

(Revisi-0)

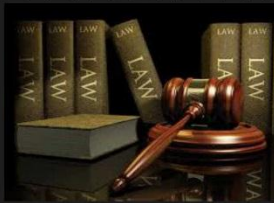
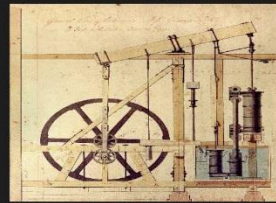
PROSIDING
PENELITIAN

ISBN: 978-602-60361-3-1

SEMINAR NASIONAL Seri 6

“Menuju Masyarakat Madani dan Lestari”

30 November 2016



Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Indonesia

ISBN-978-602-60361-3-1

Prosiding Penelitian

Seminar Nasional Seri 6 MENUJU MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI

Yogyakarta, 30 November 2016

**Editor: Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Dr. Sahabudin Sidiq, SE., MA.
Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji, S.T., M.T.**

**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Indonesia**

**PROSIDING PENELITIAN
SEMINAR NASIONAL SERI 6
MENUJU MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI**

Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM UII) dalam rangka diseminasi penelitian terkait dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-2020 Universitas Islam Indonesia dengan 7 tema sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Hidup Islami
2. Sistem Penyelenggaraan Negara Anti Korupsi dan berbasis Keadilan
3. Pengembangan Wirausaha Industri Kreatif berbasis Syariah
4. Pengembangan Kawasan Permukiman yang Terintegrasi , Hijau dan Tanggap Bencana
5. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan dan Good Governance
6. Pengembangan Teknologi Kesehatan untuk Pencegahan, Diagnostik, dan Terapeutik
7. Pengembangan Minyak Atsiri dan Fitofarmaka untuk Peningkatan Kesehatan

Diharapkan melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Pelindung : Rektor UII

Penanggungjawab : Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII

ISBN : 978-602-60361-3-1

Editor : Akhmad Fauzy
Sahabudin Sidiq
Yulianto Purwono Prihatmaji

Redaksi Pelaksana : Feris Firdaus
Sumarno
Ronny Martin Saputra

Alamat Redaksi : DPPM UII, Kampus Terpadu, Jl. Kaliurang km.14,5 Yogyakarta 55584
Telp.(0274)898444 Fax.(0274)898459

Penerbit : Universitas Islam Indonesia

Distribusi : Didistribusikan secara luas di tingkat nasional terutama instansi terkait seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian seluruh Indonesia serta pemerintah daerah dan pusat, serta dapat diunduh pada website www.dppm.uii.ac.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Prosiding Seminar Nasional Seri 6 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari dapat diterbitkan. Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM UII) dalam rangka diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-2020 Universitas Islam Indonesia. Diharapkan pada tahun 2016 melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Acara seminar nasional ini terlaksana berkat dukungan dan kerjasama yang kooperatif banyak pihak. Oleh sebab itu DPPM UII mengucapkan banyak terimakasih kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dr. Muhammad Dimiyati, Presiden Direktur PT Sido Muncul, Irwan Hidayat, Rektor Universitas Islam Indonesia, dan segenap instansi terkait lainnya serta semua pemakalah yang turut serta dalam acara seminar nasional ini.

Jumlah makalah yang masuk ke redaksi adalah 82 makalah. Setelah melalui proses review dan editing maka makalah yang lolos untuk diterbitkan dalam prosiding ini berjumlah 68 makalah. Makalah ini berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti, dosen, mahasiswa pascasarjana, dan instansi pemerintah.

Harapan kami selanjutnya semoga Prosiding Seminar Nasional Seri 6 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat di Indonesia. Atas kerjasama semua pihak kami ucapkan banyak terimakasih.

Panitia

DAFTAR ISI

BUDAYA ANTI KORUPSI DI KALANGAN SISWA DAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA ANTI KORUPSI DAN BERBASIS KEADILAN	1
<i>Agus Surono</i>	
INOVASI PENGOLAHAN SINGKONG MENJADI CASSAVA STICK DI DUSUN TRASIH DESA GIRIASIH - PURWOSARI GUNUNG KIDUL.....	13
<i>Agus Taufiq, Ageng Pambudi, Novi Amalia, Auliya Lenggogeni, Sinta Silviani Dwi Lestari, Bella Alviani Ovina, Bayu Prasetyo Utomo, Fadlan Afdallah Ramadhan, Aulia Riza</i>	
REBO WEKASAN DALAM RANAH SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH (Analisis Terhadap Ritual Rebo Wekasan Di Desa Sitanjung Lebaksiu) ...	24
<i>Ahmad Nurozi</i>	
PENGARUH EKSTRAK AIR MENIRAN TERHADAP PERUBAHAN BERAT BADAN DAN KADAR GLUKOSA DARAH PUASA PADA TIKUS SPRAGUE DAWLEY JANTAN OBESITAS	34
<i>Ai Sri Kosnayani</i>	
PEMETAAN KEUNGGULAN PERGURUAN TINGGI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG DIHASILKAN	43
<i>Akhmad Fauzy</i>	
SISTEM ELEKTRIK TENAGA HYBRID UNTUK PEMFILTERAN AIR TANAH	49
<i>Andrew Joewono, Rasional Sitepu</i>	
KOHESI RELIGIUSITAS ORGANISASIONAL	58
<i>Arif Budiharjo</i>	
BACIRO URBAN GRENHOUSE “PENDEKATAN DESAIN PADA OPTIMALISASI PEMANFAATAN CAHAYA MATAHARI DAN PENAMPUNGAN AIR HUJAN”	72
<i>Beata Berliandika, Yulianto P. Prihatmaji</i>	
UPAYA DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN YANG HAKIKI DI NEGARA HUKUM PANCASILA	84
<i>Derry Angling Kesuma</i>	
STUDI KECEPATAN LOADING ASAM SALISILAT DARI MODIFIKASI EDIBLE FILM PEKTIN – PATI JAGUNG DENGAN PLASTICIZER GLISEROL.....	110
<i>Dewi Wahyuningtyas, Yayu Sukmawati</i>	
DASHBOARD EKSEKUTIF AKADEMIK DI UNIVERSITAS UNTUK SARANA EVALUASI DIRI, PERSIAPAN AKREDITASI, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN STUDI KASUS UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	123
<i>Dody Haryadi</i>	

PENERAPAN KEBIJAKAN SATU IDENTITAS PADA KTP-el SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	135
---	-----

Fatria Khairo

EVALUASAI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN BAGI PERBAIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA (STUDI KASUS DI JAWA TENGAH).....	144
---	-----

Hadi Karyono, Evert Max Tentua

PEMANFAATAN SAMPAH TERDEGRADASI DALAM PENERAPAN TPA berkelanjutan DENGAN KONSEP SANITARY LANDFILL.....	159
--	-----

Hijrah Purnama Putra, Akhmad Marzuko, Widya Dwi Irawan, Dwi Agung Subroto

MODEL PENGEMBANGAN WIRUSAHAWAN MUDA BAGI MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN TAKALAR	170
---	-----

Ismail Rasulong, Asdi, Muhammad Astrianto Setiadi

ASSESMENT ARSITEKTUR E-LEARNING DI SANGGAR KELOMPOK BELAJAR GUNUNG KIDUL	186
--	-----

Krisnawati, Ema Utami, Hartatik, Hastari Utama

FORMULASI SNEDDS (SELF-NANOEMULSIFYING DRUG DELIVERY SYSTEM) GAMAVUTON ; UJI AKTIVITAS PENURUNAN SITOKIN TNF- α	200
--	-----

Lutfi Chabib, Viren Ramadhan, Dimas Adhi Pradana, Zullies Ikawati, Ronny Martien, Hilda Ismail

IDENTIFIKASI RANCANGAN MESIN PENCACAH GUNA OPTIMASI FERMENTASI PUPUK ORGANIK DARI SAMPAH DOMESTIK.....	210
--	-----

M Sri Prasetyo Budi, Y Agus Jayatun

MENUMBUHKAN KARAKTER RELIGIUSITAS DALAM BERWIRUSAHA.....	219
--	-----

M. Shofiyuddin

RUQYAH SYAR'IIYAH SEBAGAI METODE TIBBUN NABI; TINJAUAN FENOMENOLOGI AGAMA	227
---	-----

Muhadi Zainuddin, Anisah Budiwati

PENTINGNYA PERENCANAAN STRATEGIS DALAM GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) SEBAGAI KEUNGGULAN DAYA SAING BISNIS UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH). (Studi Kasus : Pengusaha Bisnis Keluarga Di Kota Sleman, Yogyakarta).....	237
--	-----

Nafisah Arinilhaq

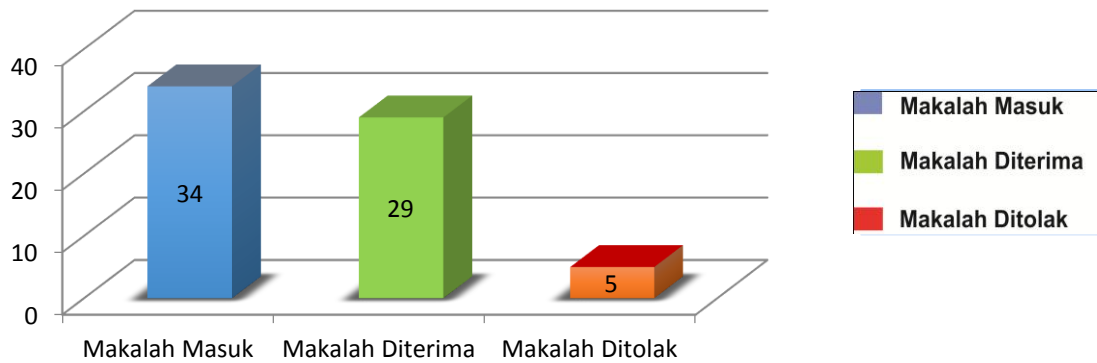
PENGARUH MOTIVASI dan KREATIVITAS TERHADAP KEBERHASILAN KEWIRUSAHAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS UMKM JENANG KUDUS).....	246
---	-----

Diah Ayu Susanti, Nanik Ermawati

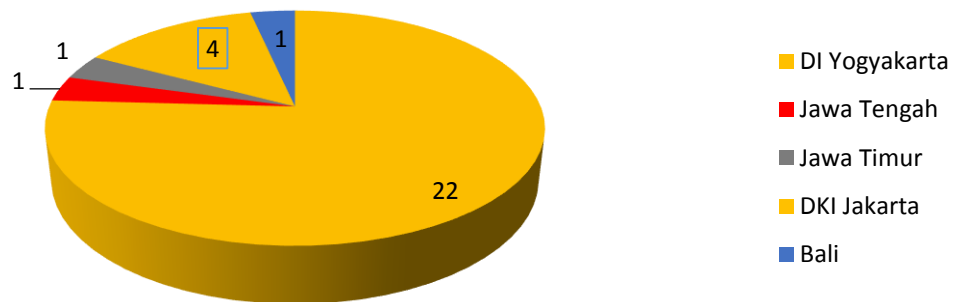
CYBER PUBLIC RELATIONS DAN PENGUATAN POSISI HUMAS DI PERGURUAN TINGGI	262
<i>Narayana Mahendra Prastya & Mutia Dewi</i>	
KAJIAN KEAMANAN ANTIHIPERTENSI PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK LANJUT USIA DI UNIT HEMODIALISA RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA.....	275
<i>Ndaru Setyaningrum, Djoko Wahyono, I Dewa Putu Pramantara</i>	
DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DENGAN PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL ACETAT (IVA) DI DUSUN CANDIREJO, DESA TEGALTIRTO, BERBAH, SLEMAN, DIY	282
<i>Nonik Ayu Wantini</i>	
PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN UNGGULAN LOKAL BERBASIS AGROPOLITAN DI DAERAH KABUPATEN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA.....	293
<i>Nur Feriyanto, Ilya Fadjar Maharika, Feris Firdaus</i>	
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN METODA KONTRASEPSI SUNTIK DMPA DI PUSKESMAS CIMAH SELATAN	312
<i>Nurkarti Azni</i>	
IMPLEMENTASI PELAYANAN PROGRAM PPIA BERDASARKAN OUTPUT ANTENATAL CARE DI PUSKESMAS GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015	320
<i>Nurul Ariningtyas</i>	
ANALISIS MANAJEMEN RADIO DAKWAH DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS RADIO MQ FM).....	330
<i>Puji Hariyanti</i>	
PEMBERDAYAAN “PETANI PEREMPUAN PERKOTAAN” BERBASIS PADA KELUARGA SIAGA DAN EKONOMI MANDIRI MELALUI PENGEMBANGAN “TEKHNOLOGI TEPAT GUNA BUDI DAYA KECAMBAH” (Suatu Program Pengembangan Petani Perkotaan Berbasis Usaha Kecil dan Menengah / UKM).....	340
<i>Punik Mumpuni Wijayanti, Daryanto Hadi</i>	
PROFIL DAN ANALISIS PRODUKSI INDUSTRI TENUN LURIK: STUDI KASUS DI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN.....	352
<i>Sahabudin Sidiq, Andhika Rizky Paradita</i>	
PERANAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DALAM MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PERIZINAN DA PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.....	368
<i>Saladdin Wirawan Effendy</i>	
SUAMI (LAKI-LAKI) DALAM PANDANGAN AL-QURAN	376
<i>Shubhi Mahmashony Harimurti</i>	

IDENTIFIKASI UNJUK KERJA ALAT PENERING SIMPLISIA ASOSIASI TANAMAN BIOFARMAKA “ASSYFA FARMA” DESA RINGINANOM TEMPURAN MAGELANG	387
<i>Sri Rahayu Gusmarwani, Imam Sodikin, Joko Triyono</i>	
EKSTRAKSI SENYAWA ANTOSIANIN DARI KULIT UBI JALAR UNGU.....	394
<i>Sumarni, Pandu Febriyanto, Dwi Adhi Putra</i>	
KONVERGENSI MULTIMEDIA MASSA, DIGITALISASI, TANTANGAN DAN PELUANG PERGURUAN TINGGI BERBASIS KOMUNIKASI DI INDONESIA	406
<i>Supadiyanto</i>	
PENGUKURAN TINGKAT KEBAUAN GAS AMONIAK (NH ₃) DI DESA SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, DIY	419
<i>Supriyanto, Ifta Irodatul Utami</i>	
MODEL PENGEMBANGAN USAHA WIRAUSAHAWAN WANITA KELOMPOK BISNIS WOMANPRENEUR SEMARANG.....	429
<i>Susetyo Darmanto</i>	
PENERAPAN ISO 9001:2008 PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE.....	442
<i>Syahrizal BMS</i>	
MODEL PERANCANGAN RUANG KREATIF SEBAGAI PUSAT SENI DAN BUDAYA (Studi Kasus Kampung Nitriprayan dengan Pendekatan Place Making).....	450
<i>Tidi Ayu Lestari, Fajriyanto</i>	
KEADILAN HUKUM BERDASARKAN KONTRAK SOSIAL.....	463
<i>Tomy Michael</i>	
DIVERSIFIKASI MELALUI MERGER DAN AKUISISI	472
<i>Trisninawati</i>	
PENGEMBANGAN MANAJEMEN ZAKAT PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKATDI PROVINSI DIY	481
<i>Unggul Priyadi, Nur Kholis, Priyonggo Suseno</i>	
TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang).....	495
<i>Retno Widhiyaningrum, Widhy Setyowati</i>	
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL MENURUT PP NO. 71 TAHUN 2010 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS)	516
<i>Zamrud Mirah Delima, Diah Ayu Susanti</i>	

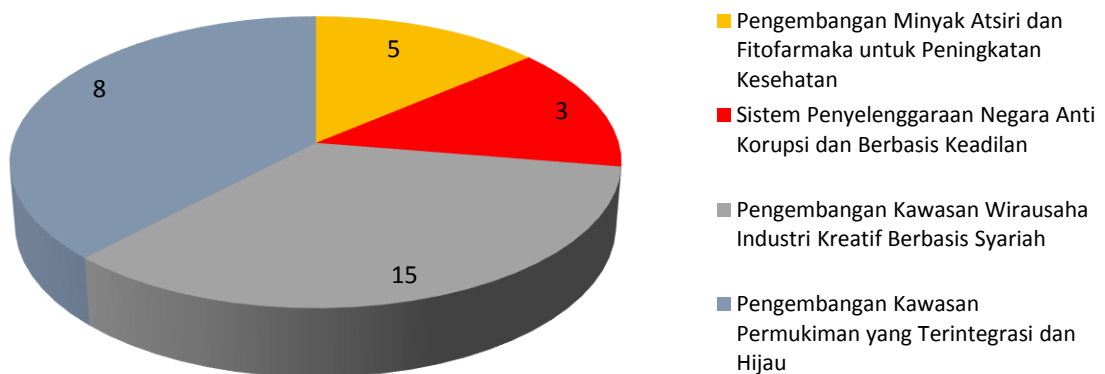
Grafik Perkembangan Jumlah Pemakalah Pada Tahun 2011



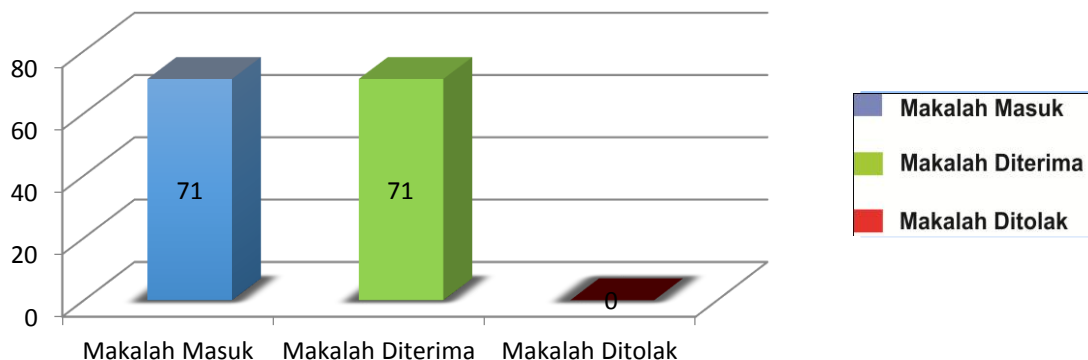
Partisipasi Pemakalah Pada Tahun 2011 Berdasarkan Wilayah



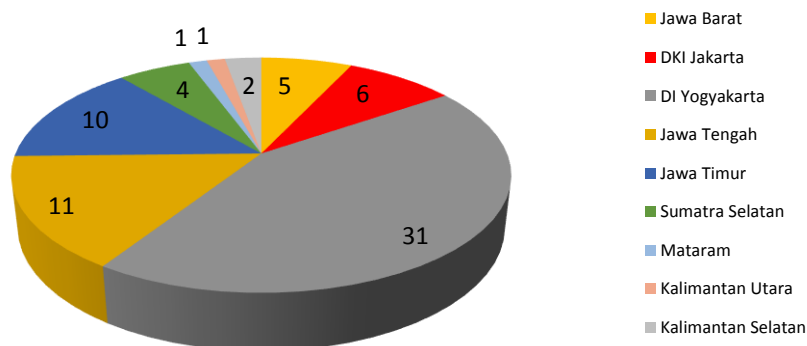
Jumlah Paper Diterima Berdasarkan Tema Pada Tahun 2011



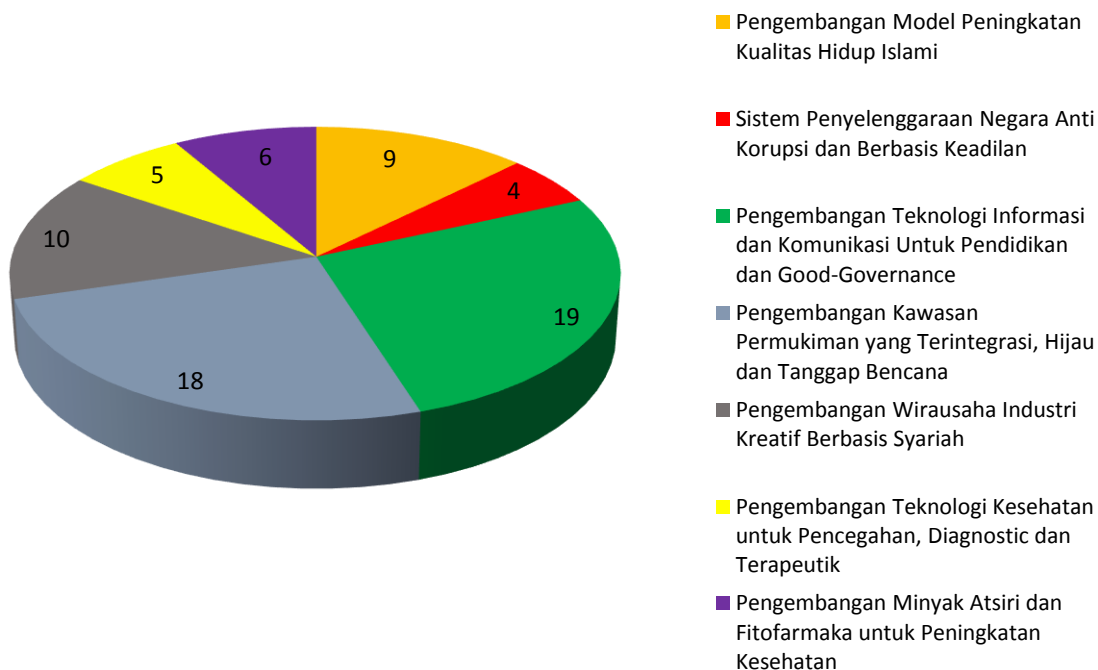
Grafik Perkembangan Jumlah Pemakalah Pada Tahun 2012



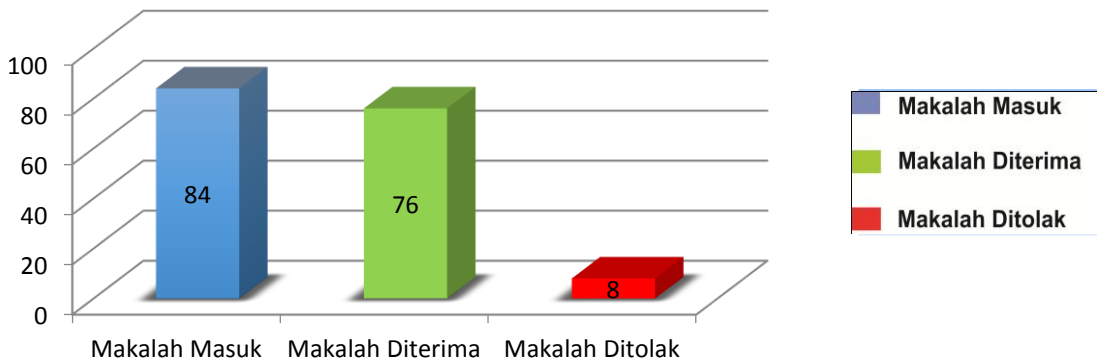
Partisipasi Pemakalah Pada Tahun 2012 Berdasarkan Wilayah



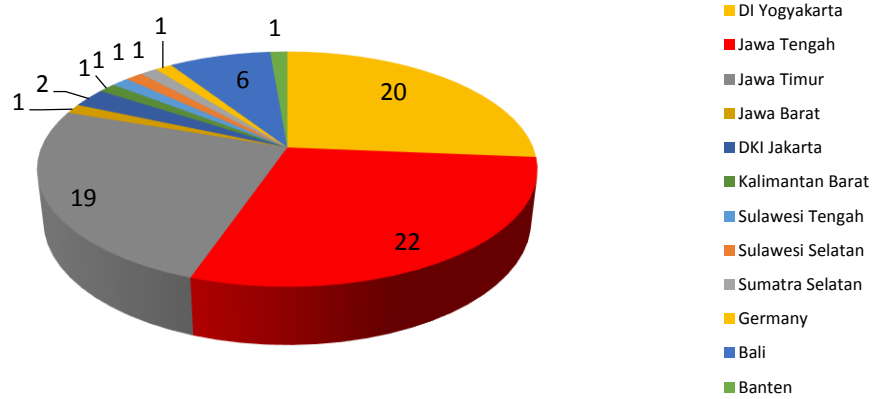
Jumlah Paper Diterima Berdasarkan Tema Pada Tahun 2012



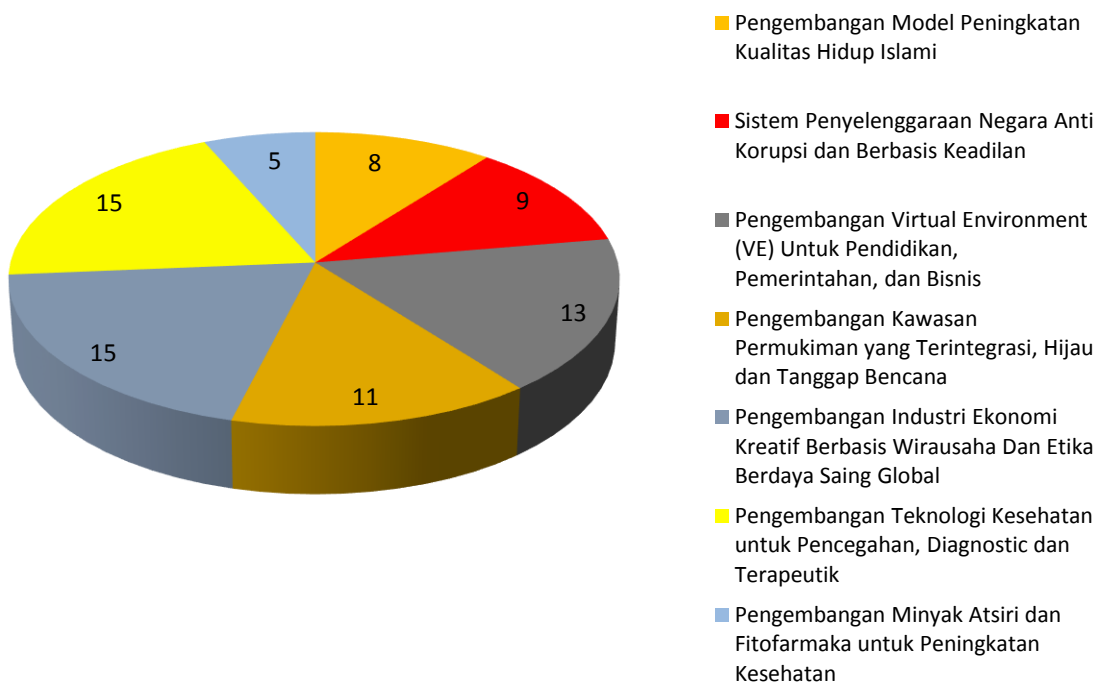
Grafik Perkembangan Jumlah Pemakalah Pada Tahun 2013



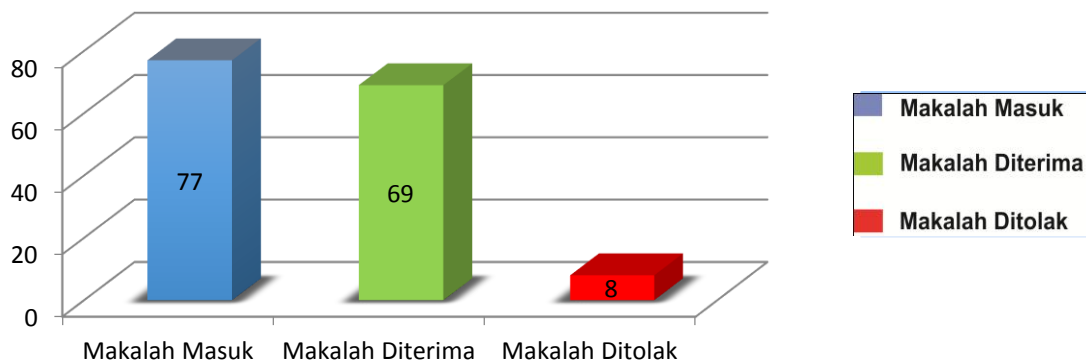
Partisipasi Pemakalah Pada Tahun 2013 Berdasarkan Wilayah



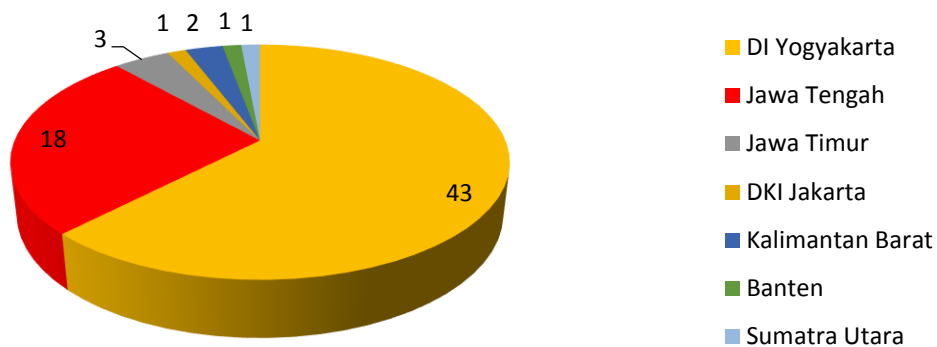
Jumlah Paper Diterima Berdasarkan Tema Pada Tahun 2013



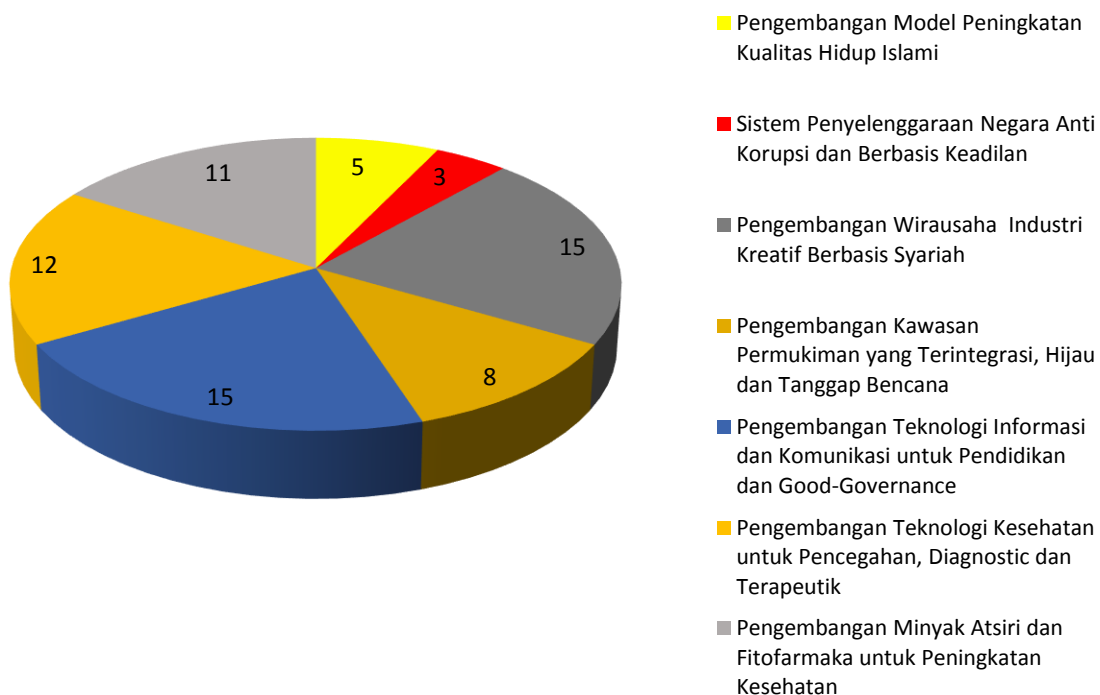
Grafik Perkembangan Jumlah Pemakalah Pada Tahun 2014



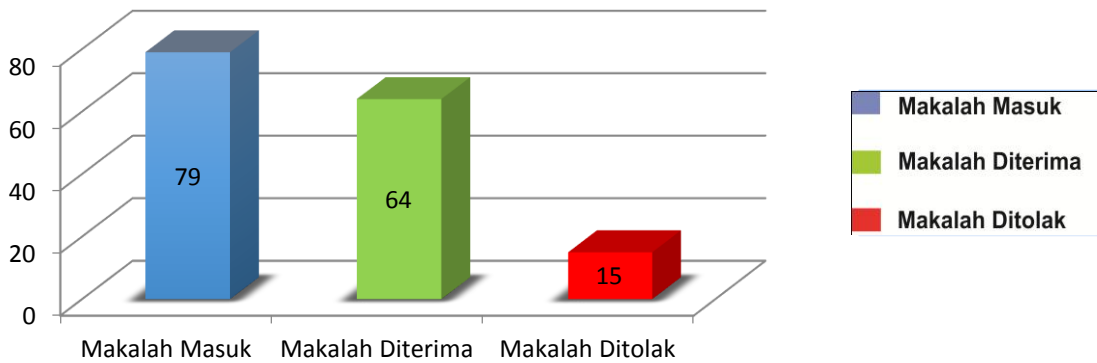
Partisipasi Pemakalah Pada Tahun 2014 Berdasarkan Wilayah



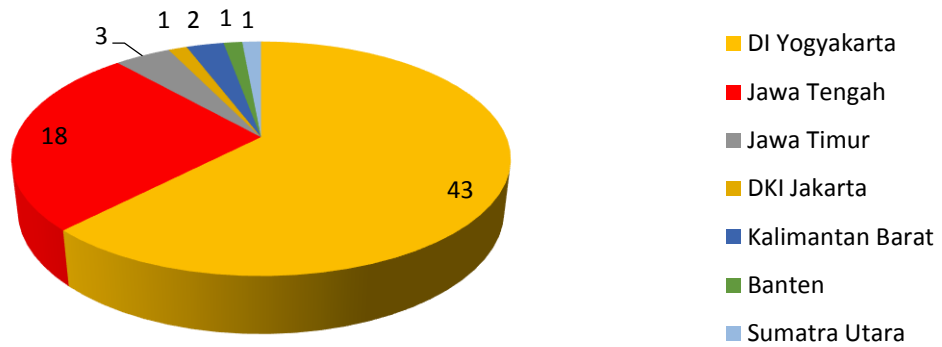
Jumlah Paper Diterima Berdasarkan Tema Pada Tahun 2014



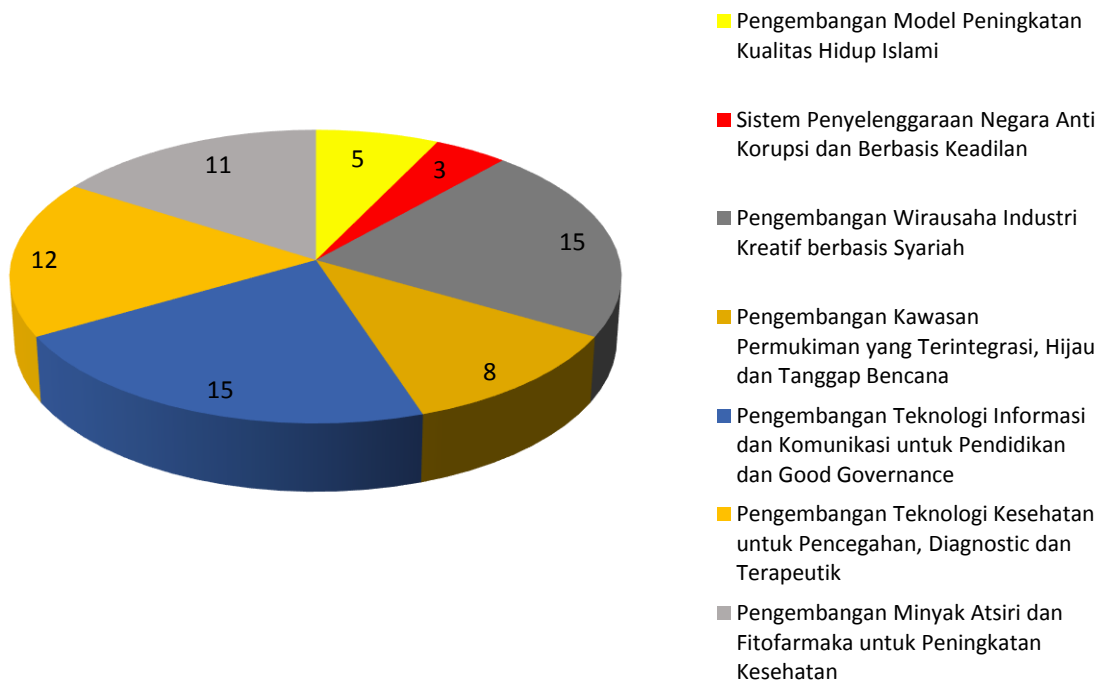
Grafik Perkembangan Jumlah Pemakalah Pada Tahun 2015



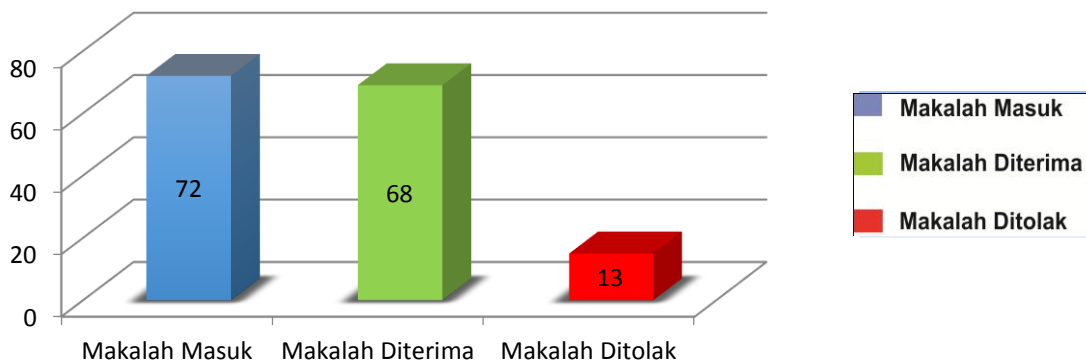
Partisipasi Pemakalah Pada Tahun 2015 Berdasarkan Wilayah



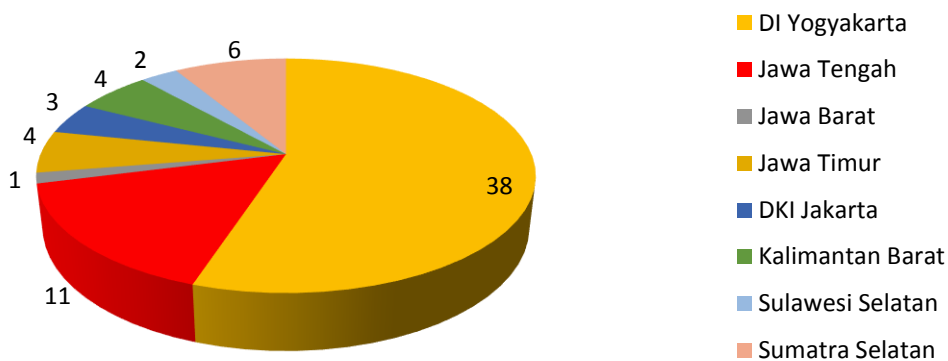
Jumlah Paper Diterima Berdasarkan Tema Pada Tahun 2015



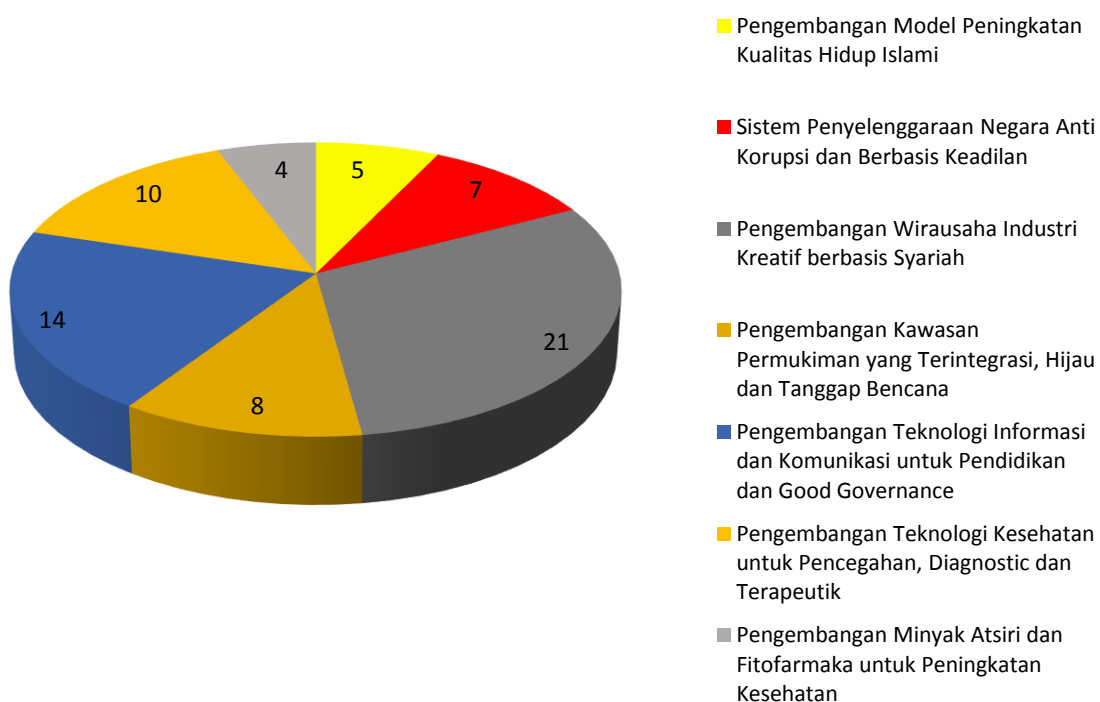
Grafik Perkembangan Jumlah Pemakalah Pada Tahun 2016



Partisipasi Pemakalah Pada Tahun 2016 Berdasarkan Wilayah



Jumlah Paper Diterima Berdasarkan Tema Pada Tahun 2016



ISBN: 978-602-60361-3-1
Yogyakarta, 30 November 2016

BUDAYA ANTI KORUPSI DI KALANGAN SISWA DAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA ANTI KORUPSI DAN BERBASIS KEADILAN

Agus Surono¹

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

Email: surono_uai@yahoo.com

ABSTRAK

Kebijakan negara dalam memberantas korupsi di Indonesia harus memperhatikan tiga aspek yang berbeda sifatnya, yaitu politik, hukum dan korupsi yang menyatu. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk menumbuhkan budaya hukum masyarakat harus dilakukan sejak pendidikan di usia dini dalam berbagai jenjang pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dapat melalui kampanye/sosialisasi dengan berbagai pihak khususnya kepada siswa pelajar mulai dari siswa SD, siswa SMP dan siswa SMA, serta kalangan mahasiswa. Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi dengan bekerjasama dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus melaksanakan program tersebut. Menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini tersebut dimulai dengan jenjang pendidikan play group, TK, SD, SMP, SMA, Mahasiswa, merupakan langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang anti korupsi dan berbasis keadilan.

Kata Kunci: Budaya Anti Korupsi, Siswa dan Mahasiswa, Penyelenggaraan Negara, Keadilan.

ABSTRACT

The state policy in combating corruption in Indonesia must pay attention to three aspects of a different kind of politics, law and corruption are fused. In order to make efforts to prevent corruption, the people determine the success of the prevention of corruption. To foster a culture of community law should be taken from education at an early age in the various levels of education. Efforts should be made to foster a culture of anti-corruption through campaigns / familiarization with the various parties, especially to students of students ranging from elementary, junior and senior high school students, and among students. Therefore all elements of society, including universities, in cooperation with governments at both central and regional governments, should implement programs. Foster a culture of anti-corruption early on began with an education level of play group, kindergarten, elementary, junior high school, students, a concrete step that can be done in order to realize the implementation of state anti-corruption and based justice.

Keywords: Anti-Corruption Culture, Student and Student, State Implementation, Justice.

PENDAHULUAN

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan peranan dalam menciptakan ketertiban itu.² Korupsi

¹ Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 13.

sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan (jabatan), kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.³

Indonesia merupakan negara yang berada dalam satu posisi penguasaan *trihybrid*, yaitu posisi dimana terdapat tiga aspek yang berbeda sifatnya, yaitu politik, hukum dan korupsi yang menyatu.⁴ Korupsi merupakan kontruksi sosial bersifat struktural, dan diduga korupsi kalangan masyarakat bawah sebagai kontruksi sosial terkait pengaruh korupsi kalangan masyarakat atas (elite sosial ekonomi), seperti pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya.⁵

Dua faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi dipengaruhi faktor-faktor obyektif yang mendorong perbuatan korupsi antara lain tidak adanya ketertiban dalam segala bidang, lemahnya organisasi aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum dan peradilan maupun aparatur perekonomian negara, lemahnya pengawasan, dan sebagainya.⁶ Korupsi sudah menjadi bagian dari "sistem" yang ada, karenanya usaha maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistem yang dikaitkan dengan peranan institusi peradilan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan korupsi.⁷

Sistem haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi dan pembaharuan (reformasi) terhadap struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) hukum dan khususnya budaya hukum (*Legal Culture*) sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum.⁸ Persoalan korupsi sebagai budaya hukum ini berkaitan erat dengan etika, moral masyarakat, khususnya pejabat penegak hukum. Pendekatan struktur dan Substansif tidak akan berhasil apabila tidak diikuti secara bersamaan dengan pendekatan budaya dan etika dari penegak hukum itu sendiri yang sering terkontaminasi dengan soal suap.⁹ Pendekatan system *up-down* dalam pemberantasan korupsi merupakan karakter representasi keseriusan Negara dalam pemberantasan korupsi.¹⁰ Pemberantasan korupsi, sebagaimana Konvensi PBB 1985, harus dimulai dari *upper power class* dan *upper economic class* dengan memperhatikan prinsip-prinsip praduga tidak bersalah.¹¹ Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, sangat

³ RB. Soemanto, dkk. *Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi*, Jurnal Yustisia, Vol. 88, (April, 2014). hlm. 80.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 2.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid. hlm. 68.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid. hlm. 69.

berarti peran kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui pendekatan non-penal sebagai bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain melalui pendidikan dari berbagai level mulai dari SD, SMP, SMA, Mahasiswa, pers (sebagai *social power*) dan institusi kenegaraan (sebagai *political power*).¹²

Pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002:¹³

“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Memperhatikan tentang pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴ Bentuk peran serta masyarakat telah pula diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No.68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggara Negara;
- b. hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara; dan
- d. hak memperoleh perlindungan dalam hal :
 - 1). Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2). Meminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵.

Selanjutnya paragraf 12 penjelasan UU Nomor. 31 Tahun 1999:¹⁶ menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan

¹² Ibid.

¹³ Ibid. hlm. 26.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129.

¹⁶ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 387.

perlindungan hukum dan penghargaan. Salah satu langkah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan dengan menumbuhkan budaya anti korupsi, sedini mungkin kepada siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, serta Mahasiswa. Upaya menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang anti korupsi dan berbasis keadilan pada masa yang akan datang karena kelak siswa-siswa dan mahasiswa tersebut akan menggantikan generasi yang ada saat ini dalam berbagai profesi yang akan ditekuni baik pemerintah maupun swasta, serta masyarakat pada umumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, khususnya terkait dengan masalah korupsi dan bagaimana cara pencegahannya, maka artikel ini berjudul: **“BUDAYA ANTI KORUPSI DI KALANGAN SISWA DAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA ANTI KORUPSI DAN BERBASIS KEADILAN”**.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara anti korupsi dan berbasis keadilan di Indonesia?
2. Bagaimana menumbuhkan budaya anti korupsi bagi siswa dan mahasiswa dalam mewujudkan penyelenggaraan negara anti korupsi dan berbasis keadilan?

PEMBAHASAN

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Anti Korupsi Dan Berbasis Keadilan.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga yang mempunyai ciri menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Pada dasarnya, suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.¹⁷ Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan.¹⁸ Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena mengingat bahwa masyarakatlah yang paling dirugikan dari korupsi.¹⁹

¹⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm.3.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Jhon Rivel, *Membangun partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi*, diakses dari http://www.kompasiana.com/rivel/membangun-partisipasi-masyarakat-dalam-memerangi-korupsi_552988646ea8348068552d76 pada 30 September 2016.

Pemerintahan yang bersih tentu menciptakan pelayanan publik yang bersifat menolong, terbuka, bertanggungjawab, responsif, dan adil.²⁰ Berputarnya roda partisipasi masyarakat akan seirama dengan perubahan di lingkungan pemerintahan.²¹ Agar upaya memerangi korupsi membawa manfaat besar, maka yang pertama dan terutama dilakukan adalah membentuk kesadaran dalam diri masyarakat bahwa mereka adalah “majikan” sedangkan pemerintah adalah “pelayan”.²²

Strategi pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, strategi preventif, yakni strategi yang sifatnya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.²³ *Kedua*, strategi detektif, yakni strategi mendeteksi apakah telah terjadi tindak pidana korupsi.²⁴ *Ketiga*, strategi advokasi, yakni strategi membangun sistem yang dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara hukum.²⁵

Adapun pilar-pilar penting penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang perlu mendapat perhatian, yakni:²⁶

1. Peraturan Perundang-Undangan

Secara objektif, norma hukum mencakup hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal (tertulis) antara lain: Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Hukum tidak tertulis mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara peratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, maka harmonisasi peraturan perundangan nasional terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan konvensi tersebut, merupakan acuan utama arah pemberantasan korupsi ke depan, mengingat tindak pidana korupsi merupakan *transnasional crime*.

2. Aparatur Penegak Hukum

Arah pemberantasan korupsi ke depan harus memperhatikan 2 (dua) hal: Pertama, tugas dan fungsi penyelidikan/penyidikan. Permasalahan yang sering muncul terkait adanya beberapa instansi penyelidik/penyidik tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010). hlm. 17.

adalah adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan penyelidikan/penyidikan. *Kedua*, tugas dan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya adanya penuntutan yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda akan memunculkan disparitas tuntutan pidana.

3. Sarana dan Prasarana

Berkaitan sarana dan prasarana, yang menyangkut beberapa hal: Pertama, persoalan teknis yuridis yang seharusnya diperkirakan diantaranya menyangkut kewenangan pemberian ijin dan persetujuan penggeledahan/penyitaan, perpanjangan penahan pengadilan negeri, pemeriksaan praperadilan perkara-perkara tindak pidana korupsi terjadi apakah berada pada pengadilan negeri setempat dimana tindak pidana korupsi terjadi ataukah pada pengadilan Tipikor. *Kedua*, permasalahan tenaga, waktu dan biaya persidangan perkara tindak pidana korupsi. *Ketiga*, asas Rutan/Lapas yang terbatas. *Keempat*, anggaran penegakan hukum yang minim. *Kelima*, kesejahteraan aparat penegak hukum.

4. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dimulai dari proses mengenali masalah, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan menjadi bagian yang sangat penting agar dapat melaksanakan peran serta untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat harus sesuai dengan beberapa asas antara lain keseimbangan, yaitu keseimbangan antara tujuan hukum menuju terciptanya keadilan dan kepastian disatu sisi dengan terwujudnya ketertiban hukum dalam masyarakat. Selanjutnya asas keadilan dalam penegakan hukum bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana korupsi agar dapat berjalan dengan seadil-adilnya sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Dan yang terakhir asas kepastian hukum, yang memberikan kepastian hukum tentang pemberian sanksi pidana oleh negara kepada pelaku tindak pidana korupsi sangat diperlukan peranan masyarakat dalam mengawasi apakah penegakan hukumnya telah mencerminkan asas kepastian hukum.²⁷ Disamping itu, tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan oleh hukum, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup.²⁸ Lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam menumbuhkan budaya anti korupsi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara anti korupsi dan berbasis keadilan yang merupakan bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub judul berikutnya.

²⁷ Ibid.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Bina Cipta, 1976). hlm. 3.

Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Kalangan Siswa Dan Mahasiswa Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Anti Korupsi dan Berbasis Keadilan

Sebagaimana diuraikan pada sub judul sebelumnya, bahwa pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui upaya menumbuhkan budaya anti korupsi. Dalam rangka menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan kepada siswa-siswa sekola dasar (SD), siswa-siswa sekolah menengah pertama (SMP), siswa-siswa sekolah menengah atas (SMA), dan juga terhadap para mahasiswa. Adapun uraian mengenai data-data statistik terhadap jumlah siswa-siswa dan mahasiswa secara nasional yang dapat diberikan materi tentang budaya anti korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Siswa Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah sekolah dasar (SD), siswa dan guru, dalam kurun waktu 2014 dapat ditunjukkan sebagai berikut²⁹: jumlah SD sebanyak 148.272 sekolah, jumlah guru sebanyak 1.539.819 orang, jumlah murid SD sebanyak 26.504.160 orang. Data tersebut didasarkan pada jumlah provinsi sebanyak 34 provinsi, dimana satu provinsi Kalimantan Utara tidak didapatkan data karena pada kurun waktu tersebut masih belum menjadi provinsi tersendiri hasil pemekaran Kalimantan Timur.

Selanjutnya apabila dijumlahkan jumlah antara guru dan murid sekolah dasar berjumlah 28.504.160 orang yang sangat potensial untuk mengkampanyekan budaya anti korupsi sejak dini khususnya kepada siswa-siswa sekolah dasar. Guru-guru tersebut dapat ditugaskan untuk mengkampanyekan budaya anti korupsi, setelah terlebih dahulu mendapatkan pelatihan oleh Peguruan Tinggi sebagai bagian dari bentuk Pengabdian kepada masyarakat. Adapun materi budaya anti korupsi dapat dilakukan secara sistematis melalui mata pelajaran dan/atau materi mata pelajaran tertentu yang memasukkan subtansi tentang pentingnya budaya anti korupsi, seperti dalam mata pelajaran Agama, Pancaasila dan Kewarganegaraan dan materi pelajaran lainnya yang relevan.

2. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Berdasarkan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah sekolah menengah pertama (SMP), siswa dan guru, dalam kurun waktu 2014 dapat ditunjukkan sebagai berikut³⁰: jumlah SMP sebanyak 35.488 sekolah, jumlah guru sebanyak 596.089 orang, jumlah murid SMP sebanyak 9.715.203 orang. Data tersebut didasarkan pada jumlah provinsi sebanyak

²⁹ Biro Pusat Statistik (BPS), Jumlah Sekolah, Guru, Murid Sekolah Dasar di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, http://www.bps.go.id/link_tabel_statis/view/id/1810, diakses tanggal 8 Oktober 2016.

³⁰ Biro Pusat Statistik (BPS), Jumlah Sekolah, Guru, Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, http://www.bps.go.id/link_tabel_statis/view/id/1810, diakses tanggal 8 Oktober 2016.

34 provinsi, dimana satu provinsi Kalimantan Utara tidak didapatkan data karena pada kurun waktu tersebut masih belum menjadi provinsi tersendiri hasil pemekaran Kalimantan Timur.

Selanjutnya apabila dijumlahkan jumlah antara guru dan murid sekolah dasar berjumlah 10.311.292 orang yang sangat potensial untuk mengkampanyekan budaya anti korupsi sejak dini khususnya kepada siswa-siswa SMP. Guru-guru tersebut dapat ditugaskan untuk mengkampanyekan budaya anti korupsi, setelah terlebih dahulu mendapatkan pelatihan oleh Peguruan Tinggi sebagai bagian dari bentuk Pengabdian kepada masyarakat. Adapun materi budaya anti korupsi dapat dilakukan secara sistematis melalui mata pelajaran dan/atau materi mata pelajaran tertentu yang memasukkan substansi tentang pentingnya budaya anti korupsi, seperti dalam mata pelajaran Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan dan materi pelajaran lainnya yang relevan.

3. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)

Berdasarkan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah sekolah menengah atas (SMA), siswa dan guru, dalam kurun waktu 2014 dapat ditunjukkan sebagai berikut³¹: jumlah SMA sebanyak 12.409 sekolah, jumlah guru sebanyak 278.711 orang, jumlah murid SMA sebanyak 4.292.288 orang. Data tersebut didasarkan pada jumlah provinsi sebanyak 34 provinsi, dimana satu provinsi Kalimantan Utara tidak didapatkan data karena pada kurun waktu tersebut masih belum menjadi provinsi tersendiri hasil pemekaran Kalimantan Timur.

Selanjutnya apabila dijumlahkan jumlah antara guru dan murid SMA berjumlah 4.570.999 orang yang sangat potensial untuk mengkampanyekan budaya anti korupsi sejak dini khususnya kepada siswa-siswa SMA. Guru-guru tersebut dapat ditugaskan untuk mengkampanyekan budaya anti korupsi, setelah terlebih dahulu mendapatkan pelatihan oleh Peguruan Tinggi sebagai bagian dari bentuk Pengabdian kepada masyarakat. Adapun materi budaya anti korupsi dapat dilakukan secara sistematis melalui mata pelajaran dan/atau materi mata pelajaran tertentu yang memasukkan substansi tentang pentingnya budaya anti korupsi, seperti dalam mata pelajaran Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan dan materi pelajaran lainnya yang relevan.

4. Mahasiswa

Berdasarkan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah perguruan tinggi di bawah Dikti, mahasiswa dan dosen, dalam kurun waktu 2014 untuk

³¹ Biro Pusat Statistik (BPS), Jumlah Sekolah, Guru, Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, http://www.bps.go.id/link_tabel_statis/view/id/1810, diakses tanggal 8 Oktober 2016.

perguruan tinggi negeri dapat ditunjukkan sebagai berikut³²: jumlah universitas sebanyak 99, jumlah dosen sebanyak 87.533 orang, jumlah mahasiswa sebanyak 1.827.240 orang. Selanjutnya untuk perguruan tinggi swasta yang berada di bawah Dikti adalah sebagai berikut: jumlah Universitas sebanyak 3181, jumlah dosen sebanyak 143.382 orang, jumlah mahasiswa sebanyak 4.012.347 orang.

Adapun jumlah perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, mahasiswa dan dosen, dalam kurun waktu 2014 untuk perguruan tinggi negeri dapat ditunjukkan sebagai berikut³³: jumlah universitas sebanyak 53, jumlah dosen sebanyak 12.002 orang, jumlah mahasiswa sebanyak 341.315 orang. Selanjutnya untuk perguruan tinggi swasta yang berada di bawah Kementerian Agama adalah sebagai berikut: jumlah universitas sebanyak 625, jumlah dosen sebanyak 14.669 orang, jumlah mahasiswa sebanyak 272.350 orang.

Dosen-dosen yang mengajar mata kuliah baik mata kuliah wajib universitas maupun mata kuliah dapat memasukkan materi tentang budaya anti korupsi antara lain dalam berbagai mata kuliah seperti: Pendidikan Agama, PPKN, Kewirausahaan, dan juga mata kuliah lainnya khususnya bagi perguruan tinggi hukum dapat secara spesifik mata Kuliah Hukum Anti Korupsi atau mata kuliah lainnya. Dosen dan mahasiswa juga dapat secara bersama-sama membentuk kader/mahasiswa pelopor anti korupsi baik dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui program advokasi dan juga sosialisasi khususnya saat ini yang berkaitan dengan diberikannya anggaran kepada desa untuk dapat mengelola dana desa. Pendampingan dan advokasi ini dapat dilakukan melalui program KKN ataupun program PKL di desa-desa diseluruh wilayah Indonesia sesuai keberadaan perguruan tinggi. Apabila hal ini dapat terprogram dan dilaksanakan dengan baik, maka peran nyata dan manfaat perguruan tinggi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi sebagai bagian upaya pencegahan tindak pidana korupsi akan dapat dilihat hasilnya pada kurun waktu 10 tahun kedepan.

Berdasarkan uraian tentang data siswa-siswa dan mahasiswa tersebut diatas maka pendidikan budaya anti korupsi sangat efektif untuk dilakukan sebagai upaya konkrit mengkampanyekan budaya anti korupsi sebagai bagian upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang anti korupsi dan berbasis keadilan pada masa yang akan datang karena kelak siswa-siswa dan mahasiswa tersebut akan menggantikan

³² Biro Pusat Statistik (BPS), Jumlah Universitas, Dosen, Mahasiswa di Bawah Kemenristekdikti, http://www.bps.go.id/link_tabel_statis/view/id/1810, diakses tanggal 8 Oktober 2016.

³³ Biro Pusat Statistik (BPS), Jumlah Universitas, Dosen, Mahasiswa di Bawah Kementerian Agama, http://www.bps.go.id/link_tabel_statis/view/id/1810, diakses tanggal 8 Oktober 2016.

generasi yang ada saat ini dalam berbagai profesi yang akan ditekuni baik pemerintah maupun swasta, serta masyarakat pada umumnya.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara anti korupsi dan berbasis keadilan sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 30 Tahun 2002, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan mengkampanyekan sedini mungkin kepada siswa-siswa SD, siswa-siswa SMP, siswa-siswa SMA, bahkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi masing-masing.
2. Bahwa dalam menumbuhkan budaya anti korupsi bagi siswa dan mahasiswa dalam mewujudkan penyelenggaraan negara anti korupsi dan berbasis keadilan dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan budaya anti korupsi bagi siswa dan mahasiswa sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat dilakukan melalui kurikulum di setiap tingkatan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dalam beberapa mata pelajaran ataupun mata kuliah tertentu yang memasukkan nilai-nilai budaya anti korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada **LP2M UNIVERSITAS AL -AZHAR INDONESIA** yang telah mendukung penulis untuk dapat mempresentasikan artikelnya di Seminar Nasional Seri 6 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA di Auditorium KH. Abd. Kahar Mudzakir, Lantai I Kompleks masjid Ulil Albab Kampus terpadu UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, *Negara Hukum, Analisis Yuridis dan Normatif tentang unsur-Unsurnya.*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*, Cet.1., Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

- Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Biro Pusat Statistik (BPS), Jumlah Sekolah, Guru, Murid Sekolah Dasar di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, http://www.bps.go.id/link_tabel_statis/view/id/1810, diakses tanggal 8 Oktober 2016.
- Biro Pusat Statistik (BPS), Jumlah Sekolah, Guru, Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, http://www.bps.go.id/link_tabel_statis/view/id/1810, diakses tanggal 8 Oktober 2016.
- Biro Pusat Statistik (BPS), Jumlah Sekolah, Guru, Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, http://www.bps.go.id/link_tabel_statis/view/id/1810, diakses tanggal 8 Oktober 2016.
- Biro Pusat Statistik (BPS), Jumlah Universitas, Dosen, Mahasiswa di Bawah Kemenristekdikti, http://www.bps.go.id/link_tabel_statis/view/id/1810, diakses tanggal 8 Oktober 2016.
- Biro Pusat Statistik (BPS), Jumlah Universitas, Dosen, Mahasiswa di Bawah Kementerian Agama, http://www.bps.go.id/link_tabel_statis/view/id/1810, diakses tanggal 8 Oktober 2016.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara*, Cet. 1., Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet. 1., Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Jhon Rivel, *Membangun partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi*, diakses dari <http://www.kompasiana.com/rivel/membangun-partisipasi-masyarakat-dalam-memerangi-korupsi-552988646ea8348068552d76> pada tanggal 18 September 2016.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-8.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cet.1., Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

*Prosiding Penelitian Seminar Nasional seri 6
"Menuju Masyarakat Madani dan Lestari"*

- RB. Soemanto, dkk. *Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi*, Jurnal Yustisia, Vol. 88, (April, 2014).
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Robert E.Godin, *Reason for Welfare, Economic, Sociological and Political but Ultimately Moral*, dalam Donald J.Moon (editor), *Responsibility Rights & Welfare, The Theory of The Welfare State*, Westview Press Inc, Boulder, Colorado, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Samuel Mangapul Tampubolon, *Peran Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. II, No.6, (Juli, 2014).
- Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi*, Cet. 4., Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

INOVASI PENGOLAHAN SINGKONG MENJADI CASSAVA STICK DI DUSUN TRASIH DESA GIRIASIH - PURWOSARI GUNUNG KIDUL

Agus Taufiq¹⁾, Ageng Pambudi²⁾, Novi Amalia³⁾, Auliya Lenggogeni⁴⁾, Sinta Silviani Dwi Lestari⁵⁾, Bella Alviani Ovina⁶⁾, Bayu Prasetyo Utomo⁷⁾, Fadlan Afdallah Ramadhan⁸⁾,
Aulia Riza⁹⁾,

¹⁾Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (DPL dan Ketua Tim KKN PPM DIKTI 2016) di Desa Giriasih-Purwosari Gunung Kidul.

²⁾⁻⁹⁾Anggota Unit 398 KKN PPM DIKTI 2016

email: auggie_my@yahoo.com

ABSTRAK

Sumber daya alam yang dimiliki oleh dusun Trasih Desa Giriasih diantaranya adalah singkong, jagung dan tembakau. Dari sumber daya alam tersebut masyarakat dusun Trasih dijadikan sebagai sumber pendapatan, tetapi masih sebatas pada menjual hasil bumi tersebut ke pasar, belum diberdayakan secara optimal (nilai tambah dari hasil bumi tersebut baru dibuat "tiwul" dan "gapplek"). Dari hasil observasi yang dilakukan dan analisa masalah, maka memungkinkan peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam (khususnya singkong yaitu dibuat "stick singkong". Jenis makanan ini (stik singkong) jika dioptimalkan pemasarannya, maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dusun Trasih. Dengan metode penyuluhan dan pemberian latihan untuk membuat deversifikasi produk dari singkong dan penyuluhan tentang pengorganisasian kelompok usaha yang sudah ada (asih mandiri) maka masyarakat dusun Trasih khususnya ibu-ibu PKK dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga pada saatnya nanti tingkat ekonomi masyarakat dusun Trasih juga dapat meningkat.

Keywords : Trasih, singkong, produksi, PKK

ABSTRACT

Natural resources which belongs to Trasih's village such as cassava, corn, and tobacco. The economy is carried out by utilizing existing crop yields in Trasih, but in the sales, the society still relying on to sell directly to the market. The profit gained is not great, and not worth with the outcome. They has also been trying to make cassava processed into "tiwul" and "gapplek" (only seasonal). Based on the results of observation and data retrieval has been done, then compiled the program seeded work, "innovation of processing cassava into Cassava Stick". Cassava stick is the idea that aims to make cassava becomes more valuable and increase the extent of society income in Trasih. The methods used is socialization about the content and benefits of nutritional cassava, cassava stick cooking's mentoring, packaging, and strategy to the initial marketing. The result is a product in the form of cassava stick with label, and create an organization that manages the natural resources of Trasih. This activity implies Trasih's society, especially womans community for the welfare o f the societ.

Keywords : Trasih, cassava, product, womans community

PENDAHULUAN

Berdasarkan batas geografis, Dusun Trasih desa Giriasih berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dan berada pada wilayah dataran tinggi. Lokasi dusun tersebut dapat dikatakan cukup jauh dari wilayah perkotaan. Kondisi jalan masuk ke lokasi tersebut sudah baik, dan udara masih sejuk karena faktor lokasi yang jauh dari perkotaan. Dari

segi kondisi masyarakat, masyarakat pada dusun tersebut ramah dan terbuka, namun masih lemah dalam hal manajemen sumber daya sehingga potensi yang ada kurang dikembangkan karena warga dusun tersebut cenderung ingin praktis dan hasil yang cepat. Potensi wilayah dari segi sosial ekonomi, jumlah penduduk Dusun trasih, giriasih sekitar 96 kepala keluarga dan rata-rata mata pencaharian masyarakat dusun tersebut sebagai petani ladang singkong, jagung, dan tembakau. Sedangkan dari segi fisik, Dusun Trasih Giriasih ini memiliki luas 200,950 hektar, dengan tanah sawah 60,983 hektar, tanah pekarangan 55,333 hektar, 55,466 hektar tanah perkebunan dan sisanya 29,168 hektar merupakan tanah perumahan penduduk. Dusun trasih memiliki luas lahan pertanian paling banyak kedua setelah dusun klepu. Hasil bumi yang paling banyak dihasilkan adalah singkong.

Singkong atau ubi kayu (*Manihot esculenta Crantz*) merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang menduduki urutan ketiga terbesar setelah padi dan jagung. Tanaman ini merupakan bahan baku yang paling potensial untuk diolah menjadi tepung. Singkong segar mempunyai komposisi kimiawi terdiri dari kadar air sekitar 60%, pati 35%, serat kasar 2,5%, kadar protein 1%, kadar lemak 0,5%, kadar abu 1%, karenanya merupakan sumber karbohidrat dan serat makanan namun sedikit kandungan zat gizi seperti protein (Hasbi, 2012). Masyarakat dusun trasih yang tidak konsistensi dan tidak berkelanjutan dalam mengolah hasil bumi berupa singkong sehingga hasil bumi tersebut hanya bernilai rendah. Permasalahannya adalah hanya terdapat lima jenis olahan makanan dengan bahan dasar singkong dari turunan 1, kurangnya pengetahuan mengenai kandungan gizi dan turunan yang dihasilkan dari singkong. Padahal dari singkong tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam produk konsumsi yang aman dan bernilai jual tinggi seperti *cake*, *nata de cassava*, *cassava stick*. Untuk produk pertaniannya dapat diolah menjadi pembasmi hama padi (pestisida alami), pupuk organik. Masih dibutuhkannya alat-alat/fasilitas pendukung peningkatan kualitas dan kuantitas olahan makanan dari singkong seperti mesin penggiling singkong menjadi tepung, *spinner*, mesin oven makanan, *sealer*, dan meja produksi menjadi faktor utama kelompok usaha dalam pengolahan singkong tersebut tidak bertahan lama. Kesiapan sumber daya manusianya dalam menghadapi pangsa pasar merupakan faktor lain pemasaran produk tersebut terhenti.

Masyarakat Dusun trasih giriasih yang kurang mampu manajemen potensi sumber daya yang ada menyebabkan sumber daya alam tersebut tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga KKN UII Unit-398 tergerak untuk menyalurkan ide dan informasi dalam pengolahan singkong berupa pembuatan *cassava stick* yang bertujuan meningkatkan kemampuan manajemen potensi sumber daya bagi masyarakat dusun tersebut. Urgensi dari kegiatan ini

adalah agar sumber daya alam berupa singkong sebanding dengan proses pemanenannya yang lama, sehingga meningkatkan nilai jual singkong.

Dari permasalahan tersebut disusunlah rencana pemecahan masalah yang antara lain adalah Sosialisasi mengenai kandungan dan manfaat gizi singkong, pendampingan memasak Stik singkong, peningkatan fasilitas produksi untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas hasil olahan makanan dari bahan dasar singkong, Pengemasan, Strategi untuk pemasaran awal, serta menjadi percontohan ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) lokal melalui diversifikasi olahan makanan dari bahan dasar singkong.

Rasionalisasi dari kegiatan ini mampu mendorong masyarakat Dusun Trasih untuk memanfaatkan maupun membudidayakan sumber daya alam berupa singkong menjadi produk yang enak dikonsumsi dan bernilai jual tinggi serta terciptanya sistem manajemen sumber daya yang lebih produktif.

METODE

Dari beberapa permasalahan yang ditemui diperlukan perencanaan kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan terarah dan jelas. Berikut ini dijelaskan tahapan yang dilakukan.

Tahapan awal adalah penyuluhan manfaat dan gizi singkong. Pada tahapan ini dijelaskan mengenai tentang nilai gizi, variasi jenis, dan turunan olahan makanan berbahan dasar singkong. Singkong yang menjadi penghasil utama di dusun trasih menjadikan tahapan ini sebagai awal mula untuk mengenalkan kandungan gizi singkong, terutama pada ibu rumah tangga yang berada di dusun trasih. Sasaran dari penyuluhan awal ini kepada masyarakat dusun trasih khususnya ibu-ibu. Cara untuk memilih responden/khalayak sasaran dengan cara mengumpulkan warga dusun trasih di balai padukuhan untuk diberikan pengarahan dan penyuluhan. Arisan PKK dusun trasih diadakan setiap bulanya, dari situlah cara yang tepat untuk memberikan penyuluhan, disamping ramai yang datang karena agenda rutin tiap bulan memungkinkan untuk informasi ini bisa tersebarluaskan. Modul / materi yang dibagikan berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh dosen farmasi yang sudah berpengalaman. Beliau juga merupakan salah satu dosen pengaju Program Pemberdayaan Masyarakat. Data inilah yang nanti menjadi rujukan untuk penyuluhan gizi singkong. Alat yang dibutuhkan hanyalah proyektor. Dari kegiatan ini nantinya masyarakat mengetahui tentang manfaat gizi, variasi jenis, dan turunan olahan makan berbahan dasar singkong.

Tahapan selanjutnya adalah penyuluhan mengenai kelompok usaha Keluarga asih mandiri yang nantinya kelompok usaha asih mandiri yang berada di dusun akan bergerak dalam

bidang pengolahan makanan dari bahan dasar hasil bumi masyarakat dusun trasih. Berdasarkan analisis data dengan teknik wawancara, masyarakat dusun trasih belum mempunyai suatu organisasi kelompok usaha yang berada di dusun dalam mengolah bahan dasar hasil bumi dusun trasih. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat dusun trasih hanya sebatas *by order*. Hal ini memungkinkan kelompok usaha tersebut tidak bertahan lama. Kelompok usaha asih mandiri yang merupakan kelompok usaha yang berada di desa. Hal tersebut mendasari kurangnya keterbukaan informasi kepada dusun yang berada di desa giriasih khususnya pada dusun trasih. Dalam hal ini perlu adanya sosialisai mengenai keluarga asih mandiri agar informasi tersebut tersebarluaskan mengenai keberadaan keluarga asih mandiri. Teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk sosialisai adalah berupa wawancara dengan bagian *kesra* yang ada di desa. Data tersebut yang menjadi acuan untuk mensosialisasikan mengenai keluarga asih mandiri. Pada tahapan ini dijelaskan mengenai keberadaan keluarga asih mandiri yang berada di desa. Sasaran kegiatan dari tahapan ini adalah Ibu-ibu PKK yang berada pada dusun trasih. Agar sasaran yang datang banyak dan ramai, pada tahapan ini berbarengan dengan perkenalan serta sosialisai program individu ataupun unit. Output dari tahapan kegiatan ini adalah terbentuknya suatu organisasi berupa keluarga asih mandiri tingkat dusun yang mawadahi dalam mengolah bahan dasar hasil bumi dusun trasih. kelompok usaha asih mandiri tingkat dusun ini juga akan berkoordinasi langsung dengan keluarga asih mandiri tingkat desa dalam hal pemasaran.

Tahapan selanjutnya adalah demo masak *cassava stick*. Berdasarkan analisis data yang didapat, Masyarakat desa giriasih hanya mempunyai 5 jenis olahan makanan dengan bahan dasar singkong dari turunan 1 (satu/pertama) yaitu berupa keripik singkong, tepung singkong, tape singkong, dan makanan tradisional. Lain hal dengan yang berada didusun trasih jenis olahan makanan yang dibuat oleh masyarakat dusun trasih hanya berupa gaplek dan tiwul. Olahan makanan itu tidak untuk diperdagangkan melainkan hanya untuk dimakan untuk sendiri. Pada tahapan ini dijelaskan mengenai pembuatan olahan makanan berupa *cassava stick*. *Cassava stick* merupakan suatu ide/gagasan untuk membuat olahan makanan lebih bervariasi dan mudah untuk dioalah. Data dalam membuat *cassava stick* didapat dari pengolahan makanan berupa *kripik bawang*. Bahan dan alat yang digunakan hampir sama dengan pengolahan makanan berupa *kripik bawang*. Bahan yang dibutuhkan yaitu Tepung Singkong 0,150 kg, Tepung Terigu 0,1 gram, Telur 1 butir, Nori (Rumput Laut Panggang) Secukupnya, Lada bubuk 2 gram Garam Secukupnya, Bawang Merah (dihaluskan) 3 Siung, Bawang Putih (dihaluskan) 3 Siung, Air Secukupnya. Alat yang dibutuhkan adalah kompor, wajan, *rolling pan*, spatula, gas. Pada tahapan ini pula dijelaskan mengenai komposisi untuk

membuat *cassava stick* agar sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat. Responden/khalayak sasaran yang dipih adalah perwakilan dari tiap Rukun Tetangga berjumlah 5 orang, yang nantinya dari 5 orang tiap Rukun Tetangga akan mengajari kepada warga yang lainnya. Alasannya adalah agar dalam manajemen waktu tercapai. Ouput dari tahapan ini adalah mengetahui bahan dan alat serta komposisi pembuatannya dan dapat mempraktekan pembuatannya. Metode yang digunaka adalah praktek memasak dan mendampinginya.

Tahapan selanjutnya adalah memperkenalkan mesin serta cara pengoperasiannya. Berdasarkan analisis data, masyarakat dusun trasih membutuhkan alat-alat/fasilitas pendukung untuk peningkatan kuantitas dan kualitas olahan makanan dari singkong. Analisis tersebut diambil dari wawancara dari warga. Hal ini membbuktikan bahwa masyarakat dusun trasih masin enggan untuk mengolah olahan makanan singkong karena proses dan waktu yang lama dalam mengolah singkong menjadi olahan makanan yang bernilai. Tujuan dari tahapan kegiatan ini adalah agar masyarakat lebih praktis lagi dalam membuat olahan singkong sehingga tergerak untuk mengolah olahan singkong. Responden/khalayak sasaran yang dipih adalah perwakilan dari tiap Rukun Tetangga berjumlah 5 orang, yang nantinya dari 5 orang tiap Rukun Tetangga akan mengajari kepada warga yang lainnya. Alasannya adalah agar dalam manajemen waktu tercapai. Alat yang diperkenalkan adalah berupa *spinner* yaitu alat peniris minyak, dan *sealer* alat pemanas press platik untuk *packaging* yang baik. Disain alat *spinner* yang digunakan adalah kapasitas 3 kilogram agar nantinya alat ini bisa memperpanjang keawetan dan kuantitas dalam mengolah makanan olahan singkong lebih banyak. Disainn dari alat *sealer* berupa pemanas press plastik sederhana prinsip nya seperti pemanas dari lilin. Alat *sealer* tersebut nantinya untuk *packaging* yang baik. Labeling perlu dilakukan agar pemasaran produk semakin mudah. Design labeling yang digunakan berupa *corel draw* yang nantinya dicetak lalu dimasukkan kedalam produk olahan tersebut lalu di *packaging* menggunakan *sealer*. Outpuynya dalah masyarakat dusun trasih mengetahui kinerja dan produktivitas alat penunjang berupa *spinner* dan *sealer*.

Tahapan selanjutnya adalah peningkatan pemasarn produk. Pemasaran produk menjadi hal penting dalam menjual produk olahan makanan. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik wawancara, berbagai kegiatan dalam mengolah hasil bumi sudah banyak hanya saja terekndala pada pemasarannya. Berdasarkan data yang diperoleh, kelompok asih mandiri tingkat desa, memasrkan produk olahanya dijual ke pasar panggang, wonosari, parangtritis, dan beberapa daerah di kota bantul. Melayani pemesanan dan mengikuti pameran-pameran seperti Gunung kidul Expo, pameran produk POSDYA, UII Expo, dan lain lain. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat belum siap untuk menerjunkan hasil olahan makanan

tersebut ke dalam pangsa pasar. Tidak jauh berbeda dengan dusun trasih, terdapat suatu usaha mandiri yaitu pembuatan aksesoris dari sampah organik berupa bungkus plastik kopi. Usaha kelompok di trasih pun begitu. Tahapan ini muncul karena adanya permasalahan yang demikian. Pada tahapan ini akan diberikan pengetahuan mengenai kiat berwirausaha dan pemasaran dasar. Responden atau khalayak sasaran yang diambil adalah kader-kader dari organisasi kelompok Asih mandiri tingkat dusun. Agar nantinya para kader inilah yang akan meneruskan kelompok usaha asih mandiri di tingkat dusun. Pembicara dari dosen memungkinkan daya tarik dalam mengikuti kegiatan seminar.

Tahapan terakhir adalah sosialisasi terkait Undang-Undang no.18 tahun 2012 tentang ketahanan, kedaulatan, kemandirian pangan sudah mengatur tentang pengutamakan produksi sesuai dengan kearifan lokal. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan sumber daya alam (SDA) melalui *diversifikasi* olahan makanan berbahan dasar singkong di dusun trasih. Hal tersebut bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan sampai tingkat individu dan menciptakan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat di pedesaan semakin merata. Responden atau khalayak sasaran yang dicapai adalah kader-kader usaha kelompok asih mandiri yang berada pada tingkat dusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, warga sangat antusias ketika mengikuti kegiatan. Hal ini dilihat dari adanya diskusi dan konsistensi selama kegiatan. Selain itu beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis masyarakat sudah memikirkakan produk yang bakal diolah untuk segera dipasarkan. Terbentuklah Organisasi yang menaungi dalam hal produksi olahan singkong ataupun sumber daya alam yang lain seperti jagung dan yang lainnya. Meskipun demikian, warga juga menyampaikan tentang modal awal yang harus disediakan dalam menjalankan program. Walaupun seperti itu penulis memberikan solusi untuk peminjaman dan membuat proposal ke desa ataupun kecamatan. Akhirnya, Dusun trasih mempunyai sebuah kelompok usaha dan tempat produksi di dusun Trasih. Sehingga bisa menjadi dusun percontohan dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) lokal melalui *diversifikasi* olahan (SDA) yang ada pada dusun itu.



Gambar 1. Penyuluhan Gizi, dan manfaat dari singkong.



Gambar 2. Antusias ibu-ibu dalam penyuluhan Keluarga Asih Mandiri



Gambar 3. Demo masak stik singkong



Gambar 4. Pengenalan alat sealer



Gambar 5. Pengenalan alat Spinner



Gambar 6. Tempat berlangsungnya kegiatan



Gambar 7. Sosialisasi UU no.18 tahun 2012



Gambar 8. Produk Cassava stik

b. Pembahasan

Terdapat beberapa temuan diantaranya adalah jumlah warga yang hadir sangat banyak dari 96 kepala keluarga, sekitar 40 warga hadir dalam rangkaian penyuluhan inovasi pengolahan *cassava stick* terutama ibu-ibu dalam menanggapi program mengolah makanan berbahan dasar singkong. Wajar saja karena sasaran utama dari pengolahan berbahan dasar singkong ini adalah ibu-ibu muda yang masih semangat untuk menjalankan kegiatan ini. Pada dasarnya warga masyarakat dusun trasih didominasi generasi tua (usia diatas 40 tahun). Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari pak paryata selaku pak dukuh bahwasanya program ini bisa terbilang sukses karena dilihat dari jumlah warga yang hadir melebihi dari jumlah warga yang hadir pada saat pelantikan serah jabatan kepala dukuh ataupun kegiatan agenda rutin yang dilakukan oleh masyarakat dusun trasih. dalam akhir dari tahapan ini diadakanya perlombaan memasak antar tiap Rukun Tetangga untuk membuat pengolahan singkong menjadi *cassava stick*. Kriteria penilaian berdasarkan pada bentuk, rasa, kerapihan dalam packaging. Pemenang ini dari perlombaan ini dijadikan sebagai contoh dalam memproduksi secara masal. Pengaruh kemasan pun turut berpengaruh terhadap loyalitas konsumen (Syaputri, 2014). Hal ini dibuktikan dengan perlombaan dengan kriteria kerapihan dalam packaging, ini merupakan awal tentang pentingnya pengemasan secara baik, pengemasan yang dilakukan dengan sempel hasil olahan makanan sebanyak 250 gram. Walaupun masih belajar dalam proses labeling. Pemasaran awal untuk warung-warung kecil ataupun pada pasar. Komunikasi mempunyai andil membangun iklim organisasi, yang berdampak kepada membangun budaya oranisasi, yaitu nilai dan kepercayaan yang menjadi titik pusat organisasi. Tujuan komunikasi dalam proses organisasi tidak lain dalam rangka membentuk saling pengertian (mutual undestanding)...(Anonim, 2012). Dalam hal ini organisasi yang dibentuk berupa kelompok keluarga asih mandiri tingkat dusun mempunyai inisiatif dalam membangun kelompok usaha ini. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi dan bakat yang dipunya serta pengarahan dalam berwirausaha sudah tersampaikan dengan baik. Ibu-ibu dusun trasih mempunyai inisiatif mencoba untuk melakukan olahan makanan lain, sperti keripik kulit singkong. Berdasarkan pada literatur komunikasus sudah terjalin sebelum organisasi ini bentuk, memungkinkan kelompok usaha ini akan bergerak maju dalam hal pengolahan singkong.

KESIMPULAN

1. Warga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan innvasi pengolahan singkong menjadi *cassava stick*

2. Proses labeling masih dalam pembelajaran
3. Inisiatif warga dalam membangun sebuah organisasi tercipta karena adanya komunikasi yang baik
4. Motivasi yang cukup kuat dari masyarakat dusun trasih untuk mengolah olahan singkong terjadi karena alat pendukung atau penunjang diberikan ke desa, sehingga harus mempunyai produksi terlebih dahulu.
5. Pemasaran yang dilakukan masih sebatas pada warung-warung kecil.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dana yang telah diberikan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti RI melalui skema KKN PPM untuk tahun anggaran 2016.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Giri Asih yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan KKN PPM dan segenap masyarakat desa Giri Asih yang terlibat dalam pelaksanaan KKN PPM di wilayah desa Giri Asih, serta terima kasih penulis ucapkan kepada para mahasiswa UII peserta KKN PPM 2016 (dari beberapa jurusan/program studi).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. Komunikasi Dalam Organisasi. *Teori Organisasi Umum*. 1 (1), 1 – 12.
- Hasbi, M., 2012. Usaha Keripik Kulit Singkong. Karya Ilmiah Mahasiswa D3 Amikom Prodi Manajemen Informatika. Retrieved from <http://www.amikom.ac.id/research/index.php/DMI/article/view/7657>.
- Syaputri R. 2014. Pengaruh Kemasan Merek dan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen pada UKM Keripik Singkong Sulis di Samarinda. *Igarss* 2014, 3(1), 1-5. <http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

**REBO WEKASAN DALAM RANAH SOSIAL KEAGAMAAN DIKABUPATEN
TEGAL JAWA TENGAH
(Analisis Terhadap Ritual Rebo Wekasan Di Desa Sitanjung Lebaksiu)**

Ahmad Nurozi
Universitas Islam Indonesia
email: ahmad.nurozi@uui.ac.id

ABSTRAK

Tradisi Rebo Wekasan di wilayah Tegal sampai sekarang masih dilaksanakan. Mereka mempercayai hari Rabu terakhir bulan Safa banyak bencana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latarbelakang munculnya tradisi Rebo Wekasan di desa Sitanjung Lebaksiu Tegal Jawa Tengah dan untuk mengetahui proses ritualnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu di bukit Sitanjung Lebaksiu Tegal Jawa Tengah dengan pendekatan kualitatif dan fenomenologi dengan subjek penelitian ritual Rebo Wekasan di desa Sitanjung Lebaksiu. Sumber data primer, sekunder dan tertier diperoleh melalui studi lapangan dan studi dokumen terkait topik penelitian dengan menggunakan konten analisis dimana peneliti merupakan instrumen penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaktahuan masyarakat setempat tentang latar belakang ritual Rebo Wekasan di desa Sitanjung Lebaksiu. Selain itu, prosesi ritual tersebut mengarah pada perbuatan khurafat yang dapat menjerumuskan masyarakat pada perilaku syirik. Makna Rebo Wekasan bagi msyarakat setempat telah bergeser menjadi arena hiburan dan dan pendapatan ekonomi.

Kata kunci: rebo wekasan,mbah tanjung sari, syaikh maulana maghribi.

ABSTRACT

Rebo tradition Wekasan in Tegal is still carried out. They believe the last Wednesday of Safa many disasters. The purpose of this study to find out the background of the emergence of a tradition in the village Sitanjung Rebo Wekasan Lebaksiu Tegal, Central Java and to know the ritual process. This research is a field, which is in the hill Sitanjung Lebaksiu Tegal, Central Java with a qualitative approach and phenomenology with research subjects Rebo Wekasan ritual in the village Sitanjung Lebaksiu. Sources of primary data, secondary and tertiary obtained through field studies and research topics related documents by using content analysis where the researcher is the instrument of his research. Results showed their ignorance of local people about the background of ritual Rebo Sitanjung Lebaksiu Wekasan village. In addition, the ritual procession leads to the superstition that can act plunged the population on the behavior of shirk. Rebo meaning Wekasan for local msyarakat been shifted into the entertainment arena and the economic and revenue.

Keywords: rebo wekasan, mbah tanjung sari, Shaykh Maulana Maghribi.

PENDAHULUAN

Kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bisa mengalami perubahan secara lambat tetapi pasti atau yang dikonsepsikan sebagai perubahan evolusioner. Kebudayaan Indis, misalnya, adalah percampuran antara kebudayaan Barat (Belanda) dan kebudayaan Timur (Jawa) yang terjadi karena proses penjajahan yang dilakukan belanda atas tanah Jawa selama tiga setengah abad. Percampuran budaya itu kemudian memengaruhi berbagai subsistem

kebudayaan, baik yang menyangkut sistem ekonomi, *religi, social*, pengetahuan, bahasa, kesenian maupun sistem teknologinya.³⁴

Kebudayaan di sini dianggap sebagai sesuatu yang standar untuk menentukan sesuatu, menentukan apa yang dapat diperbuat, apa pendapat tentang itu, dan apa yang diperbuat terhadapnya,³⁵ termasuk terjadinya asimilasi budaya dan agama Islam yang dilaksanakan berdasarkan penanggalan Jawa dan Islam seperti tradisi Rebo Wekasan³⁶ di kabupaten Tegal Jawa Tengah yang diadakan pada bulan Safar. Dalam kalender Hijriyah, bulan Safar merupakan bulan ke dua, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawwal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah.

Tradisi Rebo Wekasan di wilayah Tegal sampai sekarang masih dilaksanakan. Masyarakat Tegal banyak yang mempercayai kalau pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar ini, akan banyak bencana dan malapetaka. Sehingga banyak dari mereka, baik itu anak-anak sampai orang dewasa melakukan berbagai upaya untuk terhindar dari bencana dan malapetaka tersebut seperti tradisi mencukur beberapa helai rambut dan tradisi membuat bubur merah dan putih, yang kemudian dibagikan ke tetangga mereka.

Selain itu, pada hari tersebut masyarakat banyak yang melaksanakan ritual shalat Rebo Wekasan, mengunjungi sanak saudara, bahkan membuat serangkaian acara selama seharian yang kemudian ditutup dengan pertunjukan wayang, mandi Safar di sungai. Tidak ada bukti tertulis mengenai tradisi ini dan sejak kapan dilaksanakan dan siapa yang memulainya belum ada yang mengetahui. Akan tetapi, tradisi ini seakan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan seakan-akan jika tidak dilaksanakan, bencana dan malapetaka akan datang menimpa mereka.

Tidak hanya di Tegal, ritual mandi Safar³⁷ yang diyakini sebagai suatu upaya atau *laku* spiritual ke arah pendekatan diri kepada Allah juga dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim

³⁴ Nur Syam, *Madzab-Madzab Antropologi* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 8

³⁵ Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar disiplin Ilmu* (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2001), hlm. 218.

³⁶ Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan adalah hari Rabu di minggu terakhir di bulan Hijriyah, yaitu bulan Safar (Bahasa Jawa: Sapar). Masyarakat Jawa, khususnya di wilayah kabupaten Tegal percaya bahwa bencana dan malapetaka banyak terjadi pada hari itu. Sehingga mereka perlu melakukan berbagai ritual sebagai upaya pencegahan berbagai bencana yang diyakini dapat menimpa mereka.

³⁷ Ritual tersebut diyakini oleh sebuah kepercayaan di kalangan masyarakat tertentu bahwa Allah akan menurunkan dua belas ribu macam ujian atau cobaan kepada umat manusia pada bulan Safar, tepatnya pada hari Rabu, minggu terakhir bulan Safar.

di beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya seperti Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kepulauan Riau, Maluku, Kalimantan, dan Sumatera.

Eksistensi ritual mandi Safar ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat itu sendiri. Di satu sisi ada yang menganggapnya sebagai tindakan *bid'ah* yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang adanya *takhayul* dan *khurafat* serta mengandung unsur syirik, sedangkan di satu sisi lainnya ada yang berpendapat bahwa ritual mandi Safar hanyalah sekedar tradisi leluhur yang bernafaskan Islam yang perlu dipelihara kelestariannya, tentunya dengan mengedepankan modifikasi-modifikasi Islami dan membuang unsur-unsur mistisisme.³⁸

Pro dan kontra tersebut tentunya berawal dari dua kubu yang selalu berseberangan bahkan menimbulkan gesekan internal umat Islam antara gerakan ortodoksi Islam dan priburnisasi Islam dalam melihat Islam *vis to vis* tradisi lokal. Gerakan ortodoksi Islam atau purifikasi Islam dipakai oleh mereka yang berusaha memisahkan secara tegas mana yang hak dan mana yang batil menurut versi mereka tanpa ada toleransi sedikitpun, dan menempatkan ajaran Islam sebagai ajaran formal yang perlu diterapkan apa adanya sesuai dengan pemahaman dan tafsir mereka atas al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini dipakai ketika ajaran tauhid Islam versi mereka berhadapan dengan paham mitologi yang menurut mereka berbau *khurafat* dan *takhayul*. Sedangkan pendekatan priburnisasi Islam atau akomodatif-reformatif adalah pendekatan yang lebih menangkap ideal moral Islam daripada aspek legal formalnya. Islam dipahami secara kontekstual, lentur, respektif, dan apresiatif terhadap budaya-budaya lokal.³⁹

Ritual keagamaan menanamkan sikap ke dalam kesadaran diri yang tinggi yang sangat memperkuat mereka, dan melalui peristiwa itu akan memperkuat komunitas moral.⁴⁰ Pengalaman keagamaan dan budaya sebagai salah satu bentuk perilaku manusia dengan berdasarkan norma-norma yang dianut secara bersama, telah dicirikan sebagai fungsi sosial pemersatu aspirasi manusia yang paling luhur dan indah. Norma, moralitas sebagai sumber tatanan yang telah dipadu dengan nilai-nilai agama yang mengandung unsur-unsur kebaikan, maupun kebenaran, membuat manusia makin beradab. Manusia yang buta pemahaman agama

³⁸Moeslim Abdurrahman, *Islam sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hlm. 155.

³⁹Simuh, *Interaksi Islam dalam Budaya Jawa dalam Muhammadiyah dalam Kritik*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm.149

⁴⁰Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*. Terj. Yasogama. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.7.

akan mudah bertindak tanpa pertimbangan kemanusiaan, mengarah kepada budaya kekerasan, dan menjadi manusia biadab.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menyoroti secara spesifik tentang ritual Rebo Wekasan di Di Desa Sitanjung Lebaksiu Kabupaten Tegal Jawa Tengah dalam perspektif syariah/hukum Islam. Karena dalam ritual tersebut terdapat akulturasi antara mitos, budaya, dan agama Islam. Bahkan telah menjadi sebuah keyakinan yang melekat dalam diri masyarakat setempat jika tidak dilakukan dapat mendatangkan malapetaka. Peneliti akan melihat lebih dalam sejauh mana prosesi ritual Rebo Wekasan dan apa yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan ritual tersebut.

A. Rebo Wekasan di desa Sitanjung Lebaksiu kabupaten Tegal Jawa Tengah

Wilayah kabupaten Tegal Jawa Tengah memiliki berbagai ragam tradisi yang lekat dengan nuansa keIslaman, salah satunya adalah di Desa Sitanjung Lebaksiu yang senantiasa menggelar ritual Rebo Wekasan. Tidak didapatkan sumber yang pasti dan jelas mengenai sejarah Rebo Wekasan di desa Sitanjung. Akan tetapi, berdasarkan informasi atau cerita-cerita yang beredar dimasyarakat setempat, peringatan Rebo Wekasan diadakan untuk mengenang Syaikh Maulana Maghribi (Mbah Panggug) dan Mbah Tanjung Sari yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di desa tersebut. Untuk itu tidak ada sumber yang jelas yang menerangkan tentang pelaksanaan ritual Rebo Wekasan di wilayah tersebut.

Mayoritas masyarakat menyakini peristiwa Rebo Wekasan hanyalah mitos yang terus berkembang dengan berbagai kejadian irasional seperti beberapa pengunjung yang meninggal dunia, hilang, atau hanyut di sungai yang kemudian dikaitkan dengan bulan Safar yang penuh dengan bencana. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Sri dan Ibu Kho, pengunjung dari desa Wanasari Margasari Tegal. Keduanya mengatakan bulan Safar merupakan bulan yang penuh dengan bencana, sehingga harus diselamati. Mereka mengungkapkan, didesanya banyak anak-anak yang lahir dibulan Safar dalam keadaan cacat mental atau idiot karena pada bulan tersebut tidak diadakan selamatan sebagai bentuk kegiatan tolak bala.

Tidak adanya bukti tertulis dan sumber yang jelas dan pemahaman mendalam terhadap ritual Rebo Wekasan, telah menyebabkan terjadinya pergeseran makna Rebo Wekasan di wilayah tersebut yang dapat dilihat dari berbagai latarbelakang atau motif para peziarah dalam mendatangi bukit Sitanjung, yaitu untuk melaksanakan ritual tolak bala, untuk mencari berkah, untuk mencari *pesugihan* (kekayaan), meminta jodoh, meminta kesembuhan penyakit, atau hanya sekedar berwisata.

Menurut Yoanan, pengunjung dari Magetan yang berprofesi sebagai pengemudi angkutan umum, hampir setiap tahun ia dan istrinya mengunjungi petilasan Mbah Tanjung dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dalam bekerja dan untuk mendapatkan penglaris bagi istrinya yang berprofesi sebagai pedagang dengan cara menempatkan bunga melati atau kembang telon dimeja tempat berdagangannya yang telah didoakan oleh kuncen.

Selain itu, dalam peringatan Rebo Wekasan di Lebaksiu tampak motif lain yang lebih dominan yaitu ekonomi. Hal itu dapat dilihat sejak pertengahan bulan Safar sampai tujuh hari setelahnya terdapat banyak pengunjung dari berbagai daerah dan para pedagang yang menjual berbagai macam barang dagangan mulai dari makanan, baju, sepatu, tas, mainan anak-anak, aksesoris, permainan dan barang lainnya bahkan perjudian dan pertunjukan musik dangdut.

B. Ritual tolak bala Rebo Wekasan di desa Sitanjung Lebaksiu kabupaten Tegal Jawa Tengah

Ritual tolak bala Rebo Wekasan di desa Sitanjung Lebaksiu kabupaten Tegal Jawa Tengah, dimulai dengan mendatangi *petilasan*⁴¹ Mbah Panggung yang berada di puncak bukit Sitanjung. Bukit tersebut terletak di antara dataran-dataran tinggi yang ada di Lebaksiu dan berada pada koordinat (295615, 9220598) UTM, pada ketinggian 159 MDPL. Terletak di desa Lebaksiu kecamatan Lebaksiu tepatnya disebelah selatan kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Untuk mencapai lokasi tersebut, pengunjung harus berjalan kaki cukup jauh dan menempuh waktu hampir 2 jam yang dimulai dari pintu gerbang, kemudian harus melewati jembatan Sunglon, yaitu jembatan penghubung antara kampung dan bukit Sitanjung yang memiliki panjang 200 meter. *Petilasan* tersebut diyakini sebagai makam-makam para leluhur penyebar agama Islam di pulau Jawa, khususnya di desa Sitanjung Lebaksiu kabupaten Tegal Jawa Tengah. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, seperti Bapak Nuridin dan Bapak Zahirin, peziarah dari wilayah Brebes menyebutkan bahwa makam yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat setempat dan sekitarnya sebagai makam Syaikh Maulana Maghribi dan Mbah Tanjung Sari adalah tidak benar. Keduanya menegaskan bahwa lokasi tersebut hanyalah *petilasan* saja. Sementara berdasarkan pengamatan peneliti dilokasi, prosesi ritual tolak bala Rebo Wekasan di desa Sitanjung, dipimpin oleh seorang

⁴¹ *Petilasan* berasal dari kata *Tilas* yang artinya bekas dari sesuatu pada masa lampau (bangunan dan sebagainya). Sedangkan *Petilasan* berarti bekas peninggalan (umumnya yang bersejarah), istana, pekuburan, dan sebagainya sebagaimana dikutip dari Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008, hlm. 1703

kuncen (juru kunci) petilasan tersebut yaitu Mbah Saipi dengan berbagai media sebagai sesajen seperti kembang telon (bunga mawar, bunga melati, dan bunga cempaka putih), kemenyan, dupa, air putih kemasan, uang, rokok, dan bunga melati yang harus dibawa oleh setiap peziarah baik dari rumah masing-masing ataupun membeli kepada para pedagang yang berada di lokasi. Para peziarah secara bergantian dan beramai-ramai memasuki *petilasan* dengan membawa sesaji masing-masing kemudian duduk mengelilingi *petilasan* Syaikh Maulana Maghribi dan Mbah Tanjung Sari. Ritual dipimpin oleh *kuncen*⁴² yang dibuka dengan membaca berbagai kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan menyebut sebuah nama yaitu Mbah Trondol yang dianggap penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Agar permohonannya dikabulkan, sebelum sampai ke *petilasan*, pengunjung harus melewati jembatan penghubung antara kampung dengan bukit Sitanjung atau turun ke sungai kemudian mandi tepat di bawah jembatan tersebut. Akan tetapi jika tidak terkabul juga, maka peziarah harus naik ke puncak bukit Sitanjung.

C. Latar belakang munculnya budaya dan ritual Rebo Wekasan di desa Sitanjung Lebaksiu kabupaten Tegal Jawa Tengah

Rebo Wekasan merupakan fenomena yang terjadi dimasyarakat karena faktor akulturasi budaya Jawa dengan Islam secara intensif. Islam di wilayah Jawa memiliki karakter tersendiri karena banyak prosesi ritual keagamaan yang sebenarnya merupakan produk animisme, dinamisme, Hinduisme dan Budhisme dipertahankan dalam bingkai dan nilai-nilai Islam, seperti dengan pemberian do'a secara Islam dan tradisi kenduri, selamatan dan lain-lain.

Faktor yang melatar belakangi Rebo Wekasan adalah pembingkai adat dan tradisi *non* Islam dengan nilai-nilai Islam tersebut dapat terwujud karena warisan budaya Jawa yang halus dapat dipertahankan dan menyatu apabila dipadukan dengan unsur-unsur Islam.

Fenomena Rebo Wekasan dilatarbelakangi adanya pendapat Abdul Hamid Quds yang dituangkan dalam kitab *Kanzun Najah wa-Surur fi Fadhail al-Azminah wa-Shuhur*. Dijelaskan dalam kitab tersebut, setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, Allah menurunkan 320.000 macam bala bencana ke bumi. Hari tersebut dianggap sebagai hari yang terberat sepanjang tahun. Maka barangsiapa yang melakukan shalat 4 rakaat, di mana setiap rakaat setelah surat al-Fatihah dibaca surat al-Kautsar 17 kali, lalu surat al-Ikhlas 5 kali, surat al-Falaq dan surat an-Naas masing-masing sekali; kemudian setelah salam membaca do'a, maka Allah

⁴² Dalam praktiknya telah ditetapkan bahwa petilasan Syaikh Maulana Maghribi dipimpin oleh *kuncen* priwa. Sedangkan petilasan Mbah Tanjung Sari dipimpin oleh *kuncen* wanita.

dengan kemurahan-Nya akan menjaga orang yang bersangkutan dari semua bala bencana yang turun di hari itu sampai sempurna setahun.

Kegiatan serupa dalam mengartikan bulan Safar sebagai bulan bencana adalah sebagaimana dikisahkan oleh al-Syeikh Muhammad bin Atwi al-Maliki al-Hasani, dalam kitabnya *Abwab al-Faraj*, Pasal pengobatan dengan ayat *syifa* (penyembuh), mengkisahkan al-Imam al-Syeikh Abu al-Qashim al-Qusyairi Rahimahullah memiliki anak dalam kondisi sakit keras sehingga hampir berputus asa melihat anaknya. Dalam tidurnya ia mimpi bertemu dengan Nabi dan ia menyampaikan kondisi sakit anaknya, dan Nabi berkata; “apakah engkau tidak mengetahui ayat-ayat *syifa* di dalam al-Qur'an?”. Kemudian al-Imam al-Syeikh Abu al-Qashim al-Qusyairi segera mencari ayat-ayat yang dimaksud Rasulullah tersebut. Ditemukanlah enam ayat dalam al-Qur'an yang mengandung kata *syifa*, yaitu yang terdapat dalam surat at-Taubah (14), Yunus (57), surat al-Nahl (69), surat al-Isra (82), dan surat al-Syu'ara (80). Kemudian beliau menulis ayat-ayat tersebut di atas kertas dan memasukkannya ke dalam air dan disuguhkan kepada anaknya untuk diminum sebagai penawar, maka kemudian sembuhlah anak tersebut dari penyakitnya.⁴³ Adapun ketujuh ayat yang disebut di dalam kitab *Tajul Muluk* terdapat dalam surat Yasin (58), surat ash-Shafat (79, 109, 120, 130), surat al-Zumar (73), dan surat al-Qadar (5).⁴⁴

Atas dasar pendapat dan kisah tersebut, sebagian masyarakat menyakini bahwa bulan Safar adalah bulan sial sehingga harus mengadakan sebuah ritual untuk menolak bala bencana sebagaimana tradisi-tradisi selamatan lainnya yang diperingati untuk memperoleh keselamatan.

Fenomena tersebut merupakan bentuk pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal terhadap kesadaran pokok seseorang, dalam hal ini adalah pengalaman-pengalaman ritual yang dilakukan oleh masyarakat yang menyakini turunnya bencana di bulan Safar. Hal itu dikuatkan dengan pendapat-pendapat para peziarah yang sudah datang berkali-kali setiap hari Rabu terakhir dibulan Safar dan merasakan manfaat/keberkahan atas ritualnya, sebagaimana diungkapkan Bapak Nuridin dan Bapak Zahirin, peziarah dari wilayah Brebes yang sudah enam kali mendatangi petilasan Syaikh Maulana Maghribi dan Mbah Tanjung Sari.

Rangkaian peristiwa tersebut, apabila ditelaah dengan menggunakan teori *cultural universal* terlihat jelas adanya pergumulan unsur-unsur kebudayaan yang menyatu dengan

⁴³M. As'ad Arsyad, *Acara Ritual Mandi Safar dan Syukuran Nelayan*. (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Tanjung Jabung Timur, 2005), hlm.9

⁴⁴*Ibid*, hal. 3.

nilai-nilai keyakinan yang dianut oleh masyarakat setempat. Unsur-unsur ini merupakan bentuk ekspresi emosi pemahaman keagamaan mereka yang diwujudkan melalui ritual tertentu untuk mencapai tujuan masing-masing.

Ritual keagamaan jika dilihat dari bentuknya secara lahiriah merupakan hiasan atau semacam alat saja, akan tetapi secara substansi adalah wujud ekspresi keyakinan seseorang terhadap suatu pemahaman ajaran agama.

Dalam Islam, ritual dibedakan menjadi dua macam, yaitu ritual yang berdasarkan dalil yang secara tegas dan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah; dan ritual yang tidak berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan ritual Rebo Wekasan menurut pandangan peneliti adalah merupakan ritual yang tidak berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hanya bersumber pada suatu pendapat pandangan Abdul Hamid Quds kitab *Kanzun Najah wa-Surur fi Fadhail al-Azminah wa-Shuhu*, yang menyakini adanya bala bencana pada bulan Safar sehingga harus mengadakan selamatan atau ritual tertentu meskipun pendapat ini juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

Peristiwa Rebo Wekasan tidak hanya terjadi di wilayah Lebaksiu kabupaten Tegal saja. Di Bantul Yogyakarta disebut Rebo Pungkasan dalam bentuk Kirab Lemper pada hari Rabu terakhir bulan Sapar penanggalan Islam bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengenang pertemuan Sultan Hamengku Buwana I dengan Kyai Fakhri Usman, tokoh yang berperan penting dalam masuknya Islam di Wonokromo dan berjasa menyembuhkan wabah penyakit.

Berdasarkan fenomena di atas, Islam sebagai agama kebenaran telah menegaskan sikapnya melalui sabda Rasulullah SAW, bahwa pada bulan Safar tidak ada bala bencana sebagaimana keyakinan masyarakat.⁴⁵

KESIMPULAN

Sebagai akhir dari deskripsi dan analisis data yang telah dipaparkan dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa Rebo Wekasan merupakan sebuah peristiwa atau fenomena perpaduan intensif kebudayaan Jawa dengan Islam yang dinamis. Perpaduan tersebut berasal dari sebuah kitab yang menjelaskan tentang ritual tolak bala pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar setiap tahun yang diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Lebaksiu kabupaten Tegal Jawa Tengah yang tidak mengetahui dengan pasti latar belakang

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. رواه البخاري و (مسلم)

HR. Al-Bukhari No. 5437, HR. Muslim No. 2220, HR. Abu Daud No. 3911, dan HR. Ahmad II No. 327

ritual dalam kegiatan tersebut. Islam telah menegaskan bahwa pada bulan Safar tidak ada bala bencana sebagaimana keyakinan masyarakat sehingga tidak perlu melakukan ritual khusus sebagai bentuk menolak bencana. Pelaksanaan tradisi Rebo Wekasan di wilayah tersebut telah mengalami pergeseran, kegiatan budaya berbalut keagamaan ke perbuatan khurafat dan aspek hiburan dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. (2003). *Islam sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Arikunto, Suharsimi. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, M. As'ad. (2005). *Acara Ritual Mandi Safar dan Syukuran Nelayan*. Jambi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tanjung Jabung Timur
- Azwar, Saefuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Danandjaja, James. (1984). *Folklor Indonesia*. Jakarta: Grafitipers
- <http://alu-syahrudin.blogspot.com/2012/05/normal-0-false-false-false-enus-none.htm>. diakses pada 28 Oktober 2015
- http://www.nu.or.id/a_public-m,dinamic-s,detail-ids,10-id,41663-lang,id-c,ubudiyah-t,Penjelasan+Mengenai+Rebo+Wekasan-.php diakses pada hari Kamis 28 Oktober 2015.
- Hultkrantz, Ake. (1970). *The Phenomenology of Religion: Aims and Methods*, Vol. 6
Jurnal "Annalisa" Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, Perpustakaan UIN Walisongo
- Karasuta, Nadia. (2014). *Perilaku Sakral dan Profan Pada Upacara Adat Rebo Wekasan di Desa Suci Kabupaten Gresik*. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya Malang.
- Koentjaraningrat. (1964). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: UI
- Koentjaraningrat. (1985). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Muhadjir, Noeng. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nasution, Khoiruddin. (2010). *Pengantar Studi Islam*. Jogjakarta : Academia
- Noordin Latif, Nazar. (2014). *Tradisi Rebo Wekasan Pada Masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2000-2014*. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember 2014.

- O'Dea, Thomas. F. (1995). *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*. Terj. Yasogama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Ridwan, Deden. (2001). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia
- Simuh. (1996). *Sufisme Jawa (Transformasi Tasawuf Islam Ke Mistik Jawa)*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya
- Simuh. (2002). *Interaksi Islam dalam Budaya Jawa dalam Muhammadiyah dalam Kritik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Spradley, J. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Strauss, Anselm. (1987). *Qualitative Analysis for Social Scientist*, New York: Cambridge University Press
- Sumandiyo Hadi, Y. (2006). *Seni dalam Ritual Agama*, Yogyakarta: Pustaka
- Suprayogo, Imam. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Syam, Nur. (2007). *Madzab-Madzab Antropologi*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara

PENGARUH EKSTRAK AIR MENIRAN TERHADAP PERUBAHAN BERAT BADAN DAN KADAR GLUKOSA DARAH PUASA PADA TIKUS SPRAGUE DAWLEY JANTAN OBESITAS

Ai Sri Kosnayani

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Email: aisrikosnayani@unsil.ac.id

ABSTRAK

Latar Belakang : Obesitas selalu disertai dengan gejala klinis seperti hiperglikemia. Perbaikan status obesitas bisa dilakukan untuk menurunkan kadar glukosa darah. Penggunaan obat untuk memperbaiki status obesitas masih ada efek sampingnya Karena itu dicari obat herbal sebagai alternatif seperti meniran. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh ekstrak air meniran terhadap perbaikan status obesitas dan penurunan kadar glukosa darah puasa pada tikus Sprague dawley jantan obesitas.

Metode Penelitian : Pre – post control group design yang dilakukan pada tikus yang dibagi secara acak, yaitu (KN) normal diberi plasebo, (KP) obesitas diberi plasebo, (I) obesitas diberi ekstrak air meniran 400mg/kg BB/hari. Data diambil sebelum perlakuan dan setelah 28 kali perlakuan yaitu berupa berat badan, panjang badan dan kadar glukosa darah puasa. Data diolah dengan menggunakan Anova, Kruskal Walls, Friedman, t-test dan dilanjutkan dengan Post hoc tukey dan Mann Whitney dengan tingkat kemaknaan $p < 0,05$.

Hasil Penelitian : Pemberian ekstrak air meniran secara bermakna dapat menekan kenaikan berat badan dan menurunkan kadar glukosa darah puasa, dapat dilihat dari perubahan kadar glukosa darah puasa sebesar 53,87 mg/dL dan perubahan kenaikan berat badan 29,83 gram hampir sama dengan kelompok kontrol negatif 27,17 gram.

Simpulan dan Rekomendasi : Ekstrak air meniran dapat menekan kenaikan berat badan tikus obesitas dan menurunkan kadar glukosa darah puasa. Penelitian ini perlu dicoba dalam berbagai dosis dan ditambah waktu pemberian perilaku dengan melakukan pengamatan pada efek toksisitas ekstrak air meniran pada tikus.

Kata Kunci : Meniran, obesitas, hiperglikemia, berat badan

ABSTRACT

Background: Obesity is accompanied by clinical symptoms such as hyperglycemia. Improving the status of obesity can be done to lower blood glucose levels. The use of drugs to improve the status of obesity is still no effect sampingnya Therefore cidari herbal medicine as an alternative as meniran. This study aims to prove the effect of the water extract meniran to repair repair status of obesity and decrease in fasting blood glucose levels in rats Sprague Dawley obesity.

Methods: Pre - post control group design performed on rats were divided randomly, ie (KN) is normal given placebo, (KP) obesity were given a placebo, (I) obesity meniran water extract 400mg / kg / day. Data were taken before treatment and after treatment in the form of 28 times the body weight, body length and blood glucose levels puasa. Data were processed using ANOVA, Kruskal Walls, Friedman, t-test and continued with Post hoc Tukey and Mann Whitney with significance level of $p < 0.05$.

Results: The extract significantly meniran water can suppress weight gain and lower levels of fasting blood glukosa, can be seen from the changes in fasting blood glucose levels of 53.87 mg / dL and changes in weight gain 29.83 grams almost the same as the control group 27.17 gram negative.

Conclusions and Recommendations: meniran water extract can suppress the obese rats weight gain and lower fasting blood glucose levels. This research needs to be tested in a variety of dosage and administration time plus behavior by making observations on the effects of water extract meniran toxicity in mice.

Keywords: Meniran, obesity, hyperglycemia, weight

PENDAHULUAN

Obesitas didefinisikan sebagai gangguan gizi yang ditandai dengan akumulasi lemak yang berlebih atau abnormal yang dapat mempengaruhi kesehatan (Abel, 2010). Pada tahun 2015 WHO melaporkan bahwa tahun 2014 lebih dari 1,9 milyar orang dewasa *overweight* dan 600 juta di dalamnya obesitas atau 39 % orang dewasa *overweight* dan 13 % obesitas. Obesitas bisa terjadi pada anak-anak, pada tahun 2013, 42 juta anak balita *overweight* atau obesitas (WHO, 2015). Di Indonesia, prevalensi obesitas dan *overweight* juga mengalami peningkatan, Riskesdas 2013 melaporkan bahwa dari seluruh penduduk dewasa Indonesia 13,5 % *overweight* dan 15,4 % obesitas, sedangkan untuk anak-anak 18,8% *overweight* dan 8,8% obesitas. Angka kesakitan obesitas bisa juga ditetapkan dengan menggunakan parameter lingkaran pinggang, jika lingkaran pinggang perempuan > 80 dan laki-laki >90 maka ditetapkan sebagai obesitas abdominal. Hasil Riskesdas 2013 memperlihatkan bahwa angka kesakitan obesitas abdominal di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 18,8 % pada tahun 2007 menjadi 26,6 % pada tahun 2013 (Kemenkes RI, 2015).

Penderita obesitas akan mengalami resistensi aksi seluler insulin yang dicirikan oleh berkurangnya kemampuan insulin untuk menghambat pengeluaran glukosa dari hati dan kemampuannya untuk mendukung pengambilan glukosa pada lemak dan otot (Park *et.al.*, 2006). Oleh karena itu obesitas dianggap sebagai pencetus awal sindroma metabolik yang merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular dan diabetes melitus tipe 2, penyakit yang jumlah penderitanya telah mencapai proporsi epidemik.

Kelebihan asam lemak bebas pada obesitas dapat menyebabkan tingginya peroksidasi lipid yang memicu terjadinya inflamasi yang diawali dengan meningkatnya kadar NFkB sehingga kadar TNF α dan interleukin-6 ikut naik. Peningkatan kadar TNF α dan interleukin-6 akan menurunkan kadar adiponektin yang selanjutnya menurunkan kadar GLUT-4 sehingga kadar glukosa dalam darah meningkat.

Manajemen obesitas dapat melalui dua cara yaitu non farmakologik dengan meningkatkan aktifitas fisik dan menurunkan asupan makanan, sehingga diharapkan berat badan menjadi ideal dan farmakologik dengan cara mengkonsumsi obat yang dapat menekan rasa lapar atau meningkatkan sensitivitas insulin (Dong Cheng, 2005). Salah satu obat yang dianjurkan WHO untuk menurunkan resistensi insulin adalah metformin yang mempunyai fungsi memperbaiki status obesitas, menurunkan hiperglikemia, menurunkan tekanan darah dan menurunkan inflamasi (Rojas and Gomes, 2013). Metformin mempunyai efek samping terjadinya gangguan pencernaan seperti sakit perut, perut kembung dan diare (Metformin,

1979). Adanya efek samping dari penggunaan metformin, memungkinkan untuk dicari obat herbal sebagai alternatif.

Meniran dengan nama latin *Phyllanthus niruri* Linn. Merupakan tanaman herba tahunan yang dapat hidup di lapangan rumput beriklim tropis, telah digunakan sebagai obat di Asia, Afrika dan Amerika Selatan (Mellinger, Carbonero *et al.*, 2005). Analisis fitokimia pada ekstrak meniran memberikan reaksi positif untuk kelompok karbohidrat, alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, steroid dan *tannin* (Okoli, Ibiam *et al.*, 2010) yang memberikan sifat aktivitas antioksidan (Thiangthum, Dejaegher *et al.*, 2012). Berbagai penelitian terhadap ekstrak meniran menunjukkan bahwa ekstrak meniran bersifat hipoglikemik pada tikus yang diinduksi aloksan (Okoli, Obidike *et al.*, 2011) dan yang diinduksi streptozotocin (Nwanjo, 2006) menurunkan berat badan mencit diabetes yang diinduksi aloksan (Adeneye and Amole, 2006; Sheti, *et al.* 2012).

Penelitian efek meniran untuk pengobatan diabetes mellitus telah dilakukan pada binatang coba yang diinduksi oleh streptozocin atau aloksan. Hal ini tidak sesuai dengan terjadinya resistensi insulin pada manusia yang dipicu oleh obesitas. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pada tikus *Sprague dawley* jantan obesitas. Tikus obesitas dibuat dengan memberikan pakan tambahan fruktosa dan lemak sapi pada pakan standar AIN93G. Penentuan obesitas pada tikus menggunakan indeks Lee, tikus dinyatakan obesitas jika indeks Lee > 300 (Barnadis and Patterson, 1968). Ekstraksi meniran menggunakan air dengan tujuan untuk menghindari sisa residu pelarut. Dosis ekstrak air meniran yang diberikan 400 mg/kg BB tikus yang diberikan setiap pagi selama 28 hari (Okoli, 2010; Giribabu, Nelli *et.al.*, 2014).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan *pre post test control group design*.

Pembuatan Ekstrak Air Meniran

Keseluruhan bagian tanaman meniran diekstraksi dengan air dengan tujuan agar tidak ada residu pelarut yang tersisa dalam ekstrak.

Induksi Tikus Obesitas

Pemeliharaan hewan dilakukan dengan mengacu kebijakan dan prosedur perawatan hewan di Laboratorium Pangan dan Gizi PAU UGM. Pemberian pakan hewan coba mengacu kepada komposisi basal diet (AIN93G) untuk tikus, dengan total kalori 3346,4 kkal (Reeves, 1997).

Hewan tikus obesitas diperoleh dengan cara menginduksinya dengan fruktosa cair 1 gram dan lemak sapi cair 2 gram/hari. Tikus setiap hari diukur berat badan dan panjang badangnya

kemudian dihitung status gizinya dengan menggunakan Indeks Lee. Tikus mengalami obesitas setelah induksi dengan lemak cair dan fruktosa selama 5 minggu.

Pemberian Ekstrak Air Meniran

Percobaan ini menggunakan 18 ekor *spargue dawley* jantan. Dua belas ekor tikus diinduksi obesitas dan 6 ekor tikus normal. Tikus dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kontrol negatif yaitu tikus normal tanpa diberi perlakuan, kontrol positif yaitu tikus obesitas tanpa diberi perlakuan dan kelompok perlakuan yaitu tikus obesitas yang diberi ekstrak air meniran sebanyak 400 mg/kg BB tiap pagi jam 09.00 selama 28 hari. Pengukuran Perubahan Berat Badan dan Kadar Glukosa Darah Puasa

Berat badan tikus diukur setiap 7 hari untuk melihat perubahan berat badan sedangkan kadar glukosa darah diukur pada awal dan akhir penelitian. Glukosa darah puasa diperoleh melalui pemeriksaan kadar glukosa darah dengan metode enzimatis dilakukan melalui pengambilan cuplikan darah vena dari mata tikus. Tikus sebelum diambil darah dibius terlebih dahulu.

HASIL

Penelitian dilakukan selama 28 hari, rerata, SD, minimal dan maksimal berat badan sebelum dan sesudah perlakuan setiap kelompok percobaan sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut :

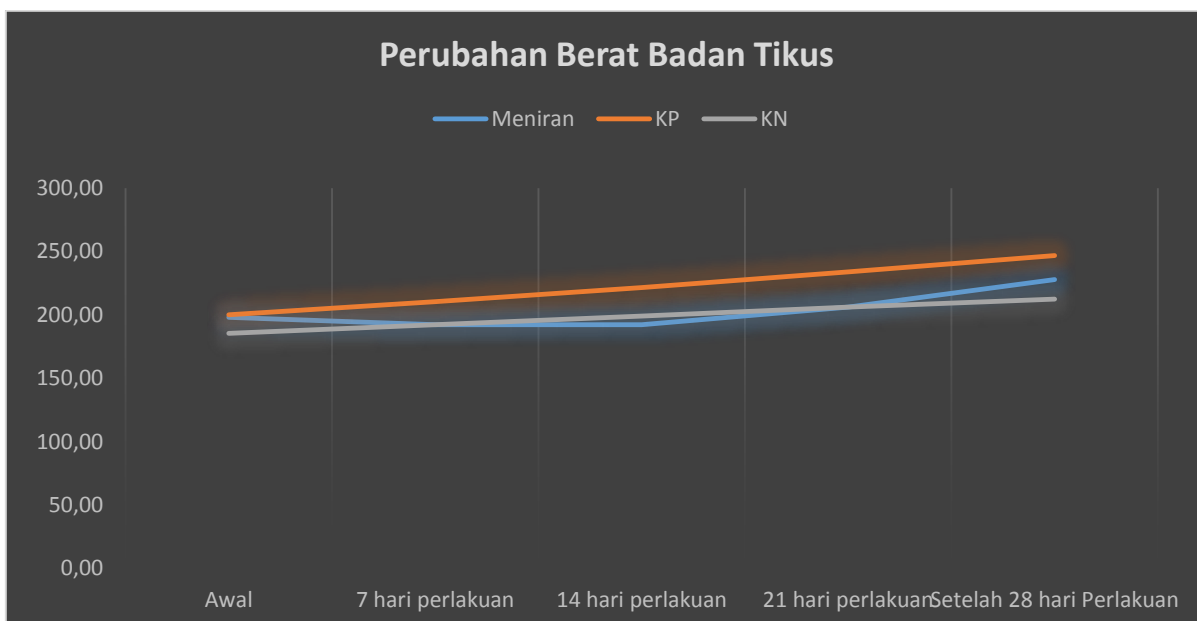
Tabel 1. Rerata, SD, Minimum dan Maksimum Berat Badan Tikus (gram)

	Rerata \pm SD, Min ; Maks ; Berat Badan (gr)			p
	Kontrol Negatif	Kelompok Positif	Perlakuan Meniran	
Awal	195,33 \pm 3,72 ; 180 ; 190	200 \pm 6,6 ; 192 ; 210	198 \pm 3,58 ; 193 ; 203	0,000
28 hari	212,5 \pm 4,18 ; 207 ; 219	246,83 \pm 7,08 ; 237 ; 256	227,83 \pm 3,87 ; 223 ;233	0,000
p	0,000	0,000	0,000	

Semua data terdistribusi normal dan homogen, analisis data digunakan ANOVA dan diperoleh hasil ada perbedaan berat badan antar kelompok percobaan pada awal dan akhir perlakuan ($p(0,000) < 0,05$) dan dengan *paired t test* diperoleh hasil ada perbedaan berat badan awal pada akhir percobaan pada semua kelompok perlakuan ($p(0,000) < 0,05$). Analisis lanjutan dengan Post Hoc diperoleh hasil pada awal penelitian ada perbedaan berat badan antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok kontrol positif ($p(0,000) < 0,05$) dan antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ($p(0,000) < 0,05$)

tetapi tidak ada perbedaan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ($p (0,758) > 0,05$). Setelah 28 hari perlakuan ada perbedaan berat badan antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok kontrol positif ($p (0,000) < 0,05$) dan antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ($p (0,000) < 0,05$) dan ada perbedaan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ($p (0,000) < 0,05$).

Untuk melihat perubahan berat badan tikus, tikus ditimbang berat badan setiap 7 hari setelah perlakuan. Perubahan rerata berat badan tikus untuk setiap kelompok dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Garfik Perubahan Berat Badan Tikus

Pada grafik di atas terlihat bahwa berat badan semua kelompok tikus percobaan mengalami kenaikan berat badan. Data perubahan berat badan terdistribusi normal dan homogen, analisis dengan ANOVA menunjukkan ada perbedaan perubahan berat badan antar kelompok percobaan ($p (0,000) < 0,05$). Analisis lanjutan dengan Post Hoc menunjukkan ada perbedaan perubahan berat badan antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok kontrol positif ($p (0,000) < 0,05$) dan antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ($p (0,002) < 0,05$) dan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ($p (0,000) < 0,05$).

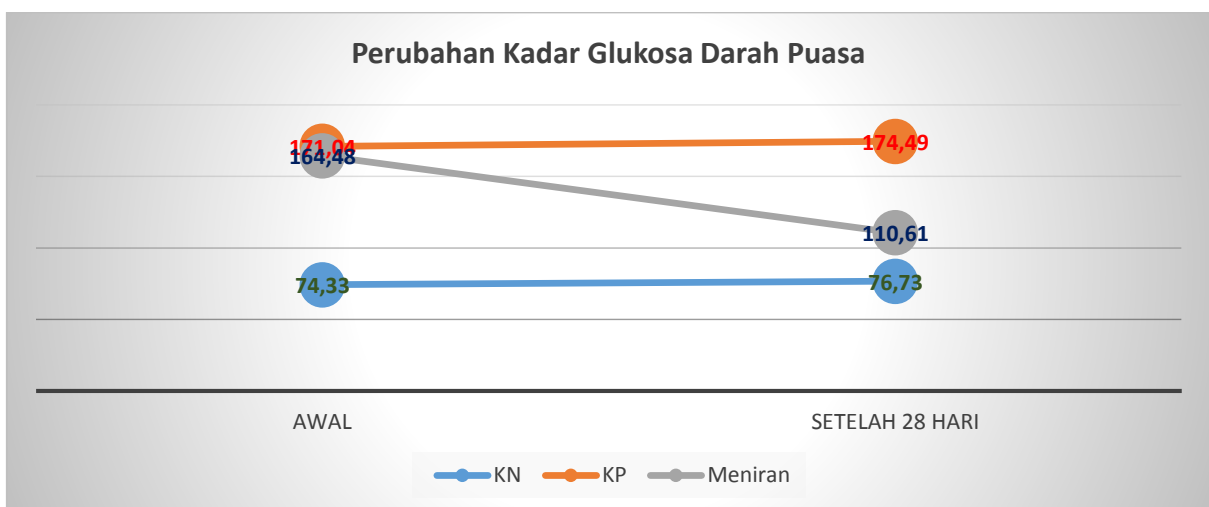
Kadar glukosa darah puasa diukur sebelum dan setelah selesai perlakuan, pada Tabel 2 disajikan rerata, sd, minimum dan maksimum kadar glukosa darah puasa sebelum dan sesudah perlakuan untuk setiap kelompok tikus percobaan.

Tabel 2. Rerata, SD, Minimum dan Maksimum Kadar Glukosa Darah Puasa

	Rerata ± SD; Min; Maks Berat Badan Kadar Glukosa Darah Puasa			p
	Kontrol Negatif	Kelompok Positif	Perlakuan Meniran	
Awal	74,33±1,19; 72,87 ; 76,06	171,04±5,93 ; 162,55 ; 177,61	164,48±1,79; 166,36; 167,18	0,0 01
28 hari	76,73±1,29; 74,69 ; 78,37	174,49±5,91 ; 166,53 ; 180,82	110,61±3,15; 106,12; 115,10	0,0 02
p	0,000	0,000	0,000	

Semua data terdistribusi normal dan homogen, analisis data digunakan ANOVA dan diperoleh hasil ada perbedaan kadar glukosa darah puasa antar kelompok percobaan pada awal ($p(0,001) < 0,05$) dan akhir perlakuan ($p(0,002) < 0,05$) dan dengan *paired t test* diperoleh hasil ada glukosa darah puasa awal pada akhir percobaan pada semua kelompok perlakuan ($p(0,000) < 0,05$). Analisis lanjutan dengan Post Hoc diperoleh hasil pada awal penelitian ada perbedaan kadar glukosa darah puasa antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok kontrol positif ($p(0,000) < 0,05$) dan antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ($p(0,000) < 0,05$) tetapi tidak ada perbedaan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ($p(0,18) > 0,05$). Setelah 28 hari perlakuan ada perbedaan glukosa darah puasa antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok kontrol positif ($p(0,000) < 0,05$), antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ($p(0,000) < 0,05$) dan dan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ($p(0,000) < 0,05$).

Untuk melihat perubahan kadar glukosa darah puasa setiap kelompok tikus percobaan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :



Gambar 2. Grafik Perubahan Kadar Glukosa Darah Puasa

Pada grafik di atas terlihat bahwa kadar glukosa darah puasa kelompok tikus kontrol positif dan kontrol negatif meningkat sedangkan kelompok tikus yang diberi ekstrak air meniran menurun. Data perubahan kadar glukosa darah puasa terdistribusi normal tetapi tidak homogen, analisis menggunakan non parametrik Kruskal Wallis menunjukkan ada perbedaan perubahan kadar glukosa darah puasa antar kelompok percobaan ($p(0,001) < 0,05$). Analisis lanjutan dengan Mann Whitney menunjukkan tidak ada perbedaan perubahan kadar glukosa darah puasa antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok kontrol positif ($p(0,16) > 0,05$). Ada perbedaan perubahan kadar glukosa darah puasa kelompok kontrol negatif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ada perbedaan ($p(0,04) < 0,05$) dan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok yang diberi perlakuan meniran ($p(0,04) < 0,05$).

PEMBAHASAN

Tikus dinyatakan obesitas jika Indeks Lee > 300 , pada awal penelitian terlihat tidak ada perbedaan berat badan antara kedua kelompok tikus yang obesitas. Selama perlakuan pemberian ekstrak meniran, berat badan tikus ketiga kelompok mengalami kenaikan tetapi dengan perubahan yang berbeda. Kelompok tikus obesitas yang tidak diberi perlakuan meningkat 46,83 gram sedangkan kelompok tikus obesitas yang diberi ekstrak air meniran hanya 29,83 gram dan kelompok tikus normal 27,17. Hal ini sesuai dengan hasil berbagai penelitian pada tikus diabetik yang diinduksi *streptozotocin* menunjukkan bahwa pemberian ekstrak meniran dapat menurunkan berat badan (Adeneye and Amole, 2006; Sheti, *et al.* 2012).

Kadar glukosa darah puasa kelompok tikus normal dan kelompok tikus obesitas yang tidak diperlakukan meningkat, tetapi kelompok tikus obesitas yang diberi ekstrak air meniran menurun walaupun belum sama dengan kadar glukosa darah puasa kelompok tikus normal. Hal ini sesuai dengan hasil berbagai penelitian yang melaporkan bahwa ekstrak meniran mempunyai efek hipoglikemik (Raphael, Sabu *et al.*, 2002; Ali, Houghton *et al.*, 2006; Nwanjo, 2007; Okoli, Ibiam *et al.*, 2010; Mbagwu, Jackson *et al.*, 2011) dan tidak menyebabkan keracunan (Nwanjo, 2007; Asare, Addo *et al.*, 2011), menormalkan diabetes yang dipicu oleh hiperlipidemia dan glikogen hati (Shabeer, Srivastava *et al.*, 2009). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dosis ekstrak meniran telah memberikan efek hipoglikemik pada dosis 400 mg/kg BB dengan LD₅₀ 471,2 mg/kg BB (Okoli, Ibiam *et al.*, 2010).

Efek hipoglikemik ekstrak air meniran diberikan oleh kandungan antioksidan. Dari hasil pengukuran ekstrak air meniran yang digunakan untuk perlakuan kandungan antioksidannya adalah 74%. Hal sesuai dengan pendapat Raphael, Sabu *et al.*, (2002) bahwa ekstrak alkohol

meniran memiliki potensi aktivitas antioksidan sehingga dapat menghambat peroksidasi lipid dan membersihkan radikal hidroksil dan superoksida.

SIMPULAN

Ekstrak air meniran dapat menekan kenaikan berat badan tikus obesitas dan menurunkan kadar glukosa darah puasa.

SARAN

Penelitian ini perlu dicoba dalam berbagai dosis dan ditambah waktu pemberian perilaku dengan melakukan pengamatan pada efek toksisitas ekstrak air meniran pada tikus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, E. Dale. Free fatty acid oxidation in insulin resistance and obesity. *Heart Metab.* 2010; 48:5–10
- Adeneye A.A., Amole, O.O. *et al.* Hypoglycemic and hypocholesterolemi activities of the aqueous leaf and seed of *Phyllanthus amarus* in mice. *Fitoterapia.* 2006. 77: 511–514.
- Ali, H., P.J Houghton, Amalia S. 2006. α amylase inhibitory activity of some Malaysian plants used to treat diabetes; with particular reference to *Phyllanthus amarus*. *Journal of Ethnopharmacology.* 107(3) : 449-466.
- Asare, G.A., Addo, P. *et al.* Acute Toxicity Studies of Aqueous Leaf Extract of *Phyllanthus niruri*. *Interdiscip. Toxicol.* 2011. 4(4):206-210.
- Bernardis LL and Patterson BD. 1968. Correlation between 'Lee index' and carcass fat content in weanling and adult female rats with hypothalamic lesions. *J Endocrinol*, 40: 527-528.
- Dong Cheng** Prevalence, predisposition and prevention of type II diabetes *Front Endocrinol (Lausanne).* 2013; 4: 52.
- Giribabu, Nelli *et al.* 2014. Aqueous extract of *Phyllanthus niruri* leaves displays in vitro antioxidant activity and prevent the elevation of oxidative stress in the kidney of streptozotocin -induced diabetic male rats. *Hindawi Publishing corporation 3*
- Kemenkes RI. 2014. Laporan hasil riset kesehatan dasar (RISKESDAS) Nasional 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Mbagwu, H., Jackson, C. *et.al.* 2011. Evaluation of the hypoglycemic of aques extract of *Phyllanthus amrus* in alloxan-indued diabetic albino rats. *Int. . Pharm Biomed Res* 2(3):158-160.

- Mellinger, C. G., Carbonero, E. R. *et al.* 2005. Chemical and biological properties of an arabinogalactan from *Phyllanthus niruri*. *J. Nat. Prod.* 68 : 1479–1483
- Metformin LS: Metformin: a review of its pharmacological properties and therapeutic use. *Diabetes Metab* 1979, 5:233–245.
- Nwanjo, H.U. 2007. Studies on The Effect of Aqueous Extract of *Phyllanthus niruri* leaf on Plasma glucose Level and some Hepatospecific Markers in Diabetic Wistar Rats. *The Internet Journal of Laboratory Medicine.* 2(2);
- Okoli, CO. Ibiam, A.F. *et al.* 2010. Evaluation of Antidiabetic Potentials of *Phyllanthus niruri* in Alloxan Diabetic Rats. *African Journal of Biotechnology.* 9(2):248-259.
- Okoli C.O. Obidike I.C. *et al.* 2011. Studies on the possible mechanisms of antidiabetic activity of extract of aerial parts of *Phyllanthus niruri*. *Pharm Biol.* 49(3):248-55.
- Park J, Lee SB, Lee S, Kim Y, Song S, Kim S, Bae E, Kim J, Shong M, Kim JM, Chung J. Mitochondrial dysfunction in *Drosophila* PINK1 mutants is complemented by parkin. Nature. 2006 Jun 29;441(7097):1157-61. Epub 2006 May 3.
- Raphael K.S. Sabu M.C. et al. 2002. Hypoglycemic Effect of Methanol extract of *Phyllanthus amarus* Schum & Thonn on Alloxan Induced Diabetes Mellitus in Rats and Its Relation with antioxidant Potential. Indian journal of experimental biology. vol. 40, no. 8, pp. 905-909.
- Reeves, P.G. 1997. Component of the AIN-93 Diet as Improvement in the AIN-76A Diet. *Journal Nutrition.* 127:838S-841S.
- Rojas and Gomes. Metformin: an old but still the best treatment for type 2 diabetes. *Diabetology & Metabolic Syndrome* 2013, 5:6; 1 – 15
- Shabeer J., Srivastava R.S. *et al.* 2009. Antidiabetic and antioxidant effect of various fractions of *Phyllanthus simplex* in alloxan diabetic rats. *J Ethnopharmacol.* 124(1):34-8.
- Sheti, *et.al.* Antidiabetic effect of ethanolic leaf extract of *Phyllanthus amarus* in alloxan induced diabetic mice. *Asian Journal of Plant Science and Research*, 2012, 2 (1): 11-15
- Thiangthum, S., Dejaegher, B. *et al.* 2012. Potentially Antioxidant Compounds Indicated from *Mallotus* and *Phyllanthus* Species Fingerprints. *Journal of Chromatography B.*;910:114-121.
- WHO. Global Health Observatory (GHO) data Obesity, Geneva, World Health Organization, 2015

PEMETAAN KEUNGGULAN PERGURUAN TINGGI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG DIHASILKAN

Akhmad Fauzy

Program Studi Statistika, FMIPA UII Yogyakarta

akhmad.fauzy@uui.ac.id

ABSTRAK

Pemetaan keunggulan perguruan tinggi perlu dilakukan. Pemetaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memotret keunggulan masing-masing perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu yang dapat digunakan sebagai basis pemetaan adalah teknologi tepat guna. Dalam penelitian ini keunggulan yang ingin dipotret mengacu kepada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, yaitu pangan; energi; teknologi dan manajemen transportasi; teknologi informasi dan komunikasi; teknologi pertahanan dan keamanan; teknologi kesehatan dan obat; dan material maju.

Kata kunci: pemetaan, perguruan tinggi, teknologi tepat guna

ABSTRACT

Mapping of excellence the college needs to be done. The mapping is done with the intention to see the advantages of each university in Indonesia. One that can be used as a base mapping is the appropriate technology. In this study the advantages that you want to capture refers to RPJMN RPJPN 2005-2025 and 2015-2019, namely food; energy; technology and transportation management; information and communication technology; defense and security technology; health and medicine technology; and advanced materials.

Keywords: mapping, university, appropriate technology

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi (PT) di Indonesia banyak macam dan bentuknya, ada yang berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. Berdasarkan data dari pangkalan data pendidikan tinggi (<http://forlap.ristekdikti.go.id/>), jumlah total PT di Indonesia ada sebanyak 4402, terdiri dari 1105 Akademi, 240 Politeknik, 2401 Sekolah Tinggi, 125 Institut dan 531 Universitas (<http://forlap.ristekdikti.go.id/>).

Dari sekian banyak PT yang ada, masing-masing berusaha mempromosikan dan menonjolkan keunggulannya. Misalkan PT A mempromosikan diri menonjol dalam bidang ekonomi, PT B dalam bidang hukum, PT C dalam bidang kedokteran dan lain sebagainya. Penonjolan yang dilakukan kebanyakan baru sebatas secara sepihak oleh PT yang bersangkutan dan seringkali belum dilandasi oleh alasan yang baik. Beberapa produk yang dihasilkan oleh PT antara lain publikasi jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, jurnal akreditasi, buku, hak kekayaan intelektual (HKI), prototype dan teknologi tepat guna (TTG). Produk tersebut mengacu kepada 7 bidang fokus pembangunan iptek seperti yang tercantum pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 yaitu:

1. Pangan,
2. Energi,
3. Teknologi dan manajemen transportasi,
4. Teknologi informasi dan komunikasi,
5. Teknologi pertahanan dan keamanan,
6. Teknologi kesehatan dan obat,
7. Material maju.

Dari latar belakang di atas, kiranya perlu dilakukan pemetaan keunggulan PT di Indonesia berbasis TTG agar Pemerintah dapat mengetahui kekuatan dari masing-masing PT berbasis TTG sehingga pembinaan PT menjadi lebih terarah. Tujuan dilakukannya pemetaan keunggulan PT di Indonesia adalah untuk memperoleh bentuk pemetaan keunggulan PT berdasar kepada TTG.

DASAR TEORI

Pemetaan dalam kamus bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan gambar, tulisan, peta, dan grafik. Dari definisi tersebut terlihat bahwa pemetaan menekankan hasil dalam bentuk visual, misalkan dalam bentuk tabel, grafik, peta, atau gambar.

Keutamaan dalam kamus bahasa Indonesia didefinisikan sebagai keadaan (lebih) unggul; keutamaan; kepandaian (kecakapan, kebaikan, kekuatan, dan sebagainya) yang lebih daripada yang lain.

PT didefinisikan berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 1 ayat (1), bahwa:

"Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia."

Dengan demikian pemetaan keunggulan PT di Indonesia mengandung arti bahwa kepandaian, kecakapan atau kekuatan dari PT di Indonesia yang ditampilkan dalam bentuk visual, misalkan dalam bentuk tabel, grafik, peta, atau gambar.

Definisi TTG sesuai Kepmendikbud No. 25/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya adalah teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi/ada secara

berdayaguna dan berhasilguna atau untuk pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, murah, dan sederhana.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan sebagai dasar dalam pemetaan keunggulan perguruan tinggi di Indonesia adalah data tentang TTG yang ada dalam kinerja PT yang telah diisi oleh masing-masing PT dalam Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Simlitabmas). Data yang dipakai adalah data hasil input data kinerja penelitian PT dalam simlitabmas tahun 2015.

Data yang diambil adalah data kinerja penelitian tahun 2015 masing-masing PT yang diambil dari www.simlitabmas.dikti.go.id. Data tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu agar data yang diolah benar-benar data yang valid. Pengecekan data antara lain:

1. Apakah administrasi data tersebut sudah lengkap? Misalkan apakah TTG yang dihasilkan sudah siap untuk dipakai. Jika belum lengkap, maka data tersebut dibuang (tidak ikut diolah),
3. Apakah data tersebut tertulis/terdaftar 1 kali, atau lebih dari 1 kali. Jika lebih dari 1 kali, maka yang ke dua dan seterusnya dibuang (tidak ikut diolah),
4. Apakah data tersebut benar-benar dari hasil perguruan tingginya, pengusulnya, penulisnya atau penciptanya? Jika bukan, maka dibuang (tidak ikut diolah),
5. Apakah data tersebut benar-benar dihasilkan pada tahun 2015 atau bukan? Jika bukan, maka dibuang (tidak ikut diolah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data kinerja penelitian PT 2015 yang diperoleh dari www.simlitabmas.dikti.go.id dan hasil verifikasi datanya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1: Data TTG hasil Kinerja Penelitian 2015 dan Verifikasinya

Data	Jumlah PT		Jumlah Data	
	Awal	Verifikasi	Awal	Verifikasi
TTG	53	52	298	294

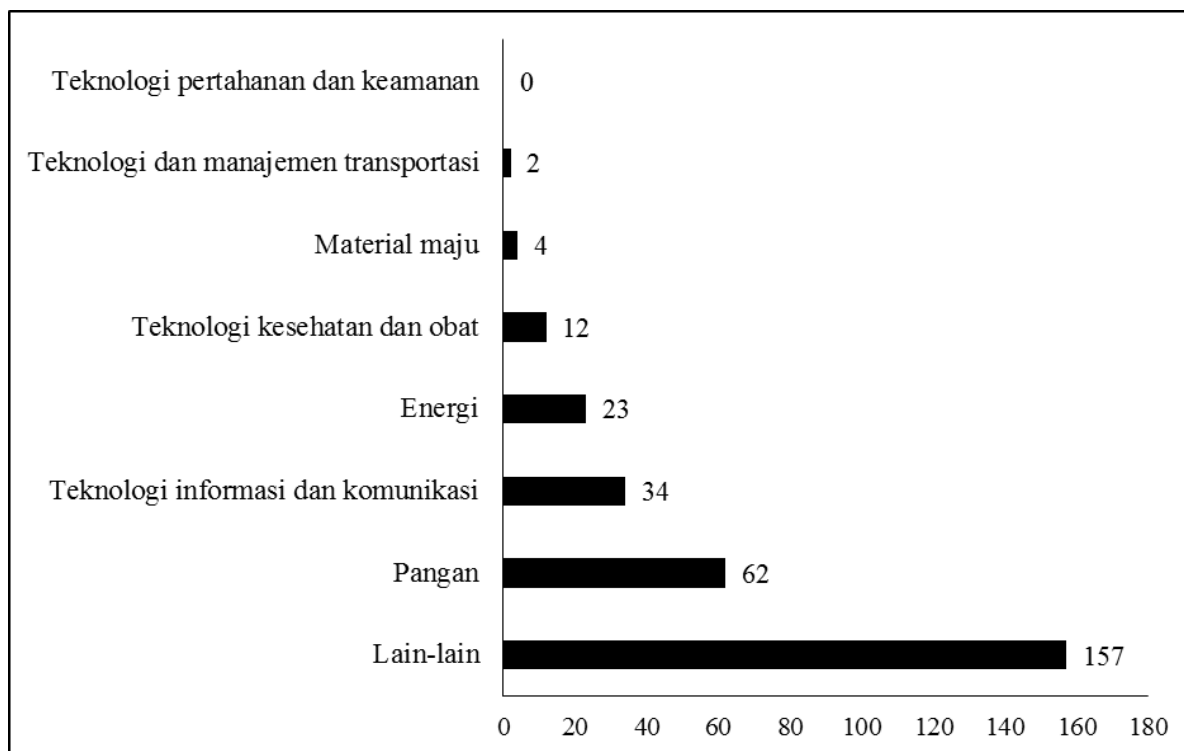
Jumlah TTG di atas diperiksa satu persatu dan dicocokkan masuk salah satu dari 7 bidang fokus pembangunan iptek seperti yang tercantum pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 yaitu pangan; energi; teknologi dan manajemen transportasi; teknologi informasi dan

komunikasi; teknologi pertahanan dan keamanan; teknologi kesehatan dan obat; dan material maju. Hasil verifikasi setiap bidang fokus dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Hasil Verifikasi Data TTG Setiap Bidang Fokus tahun 2015

No	Fokus	Jumlah TTG
1	Pangan	62
2	Energi	23
3	Teknologi dan manajemen transportasi	2
4	Teknologi informasi dan komunikasi	34
5	Teknologi pertahanan dan keamanan	0
6	Teknologi kesehatan dan obat	12
7	Material maju	4
8	Lain-lain	157

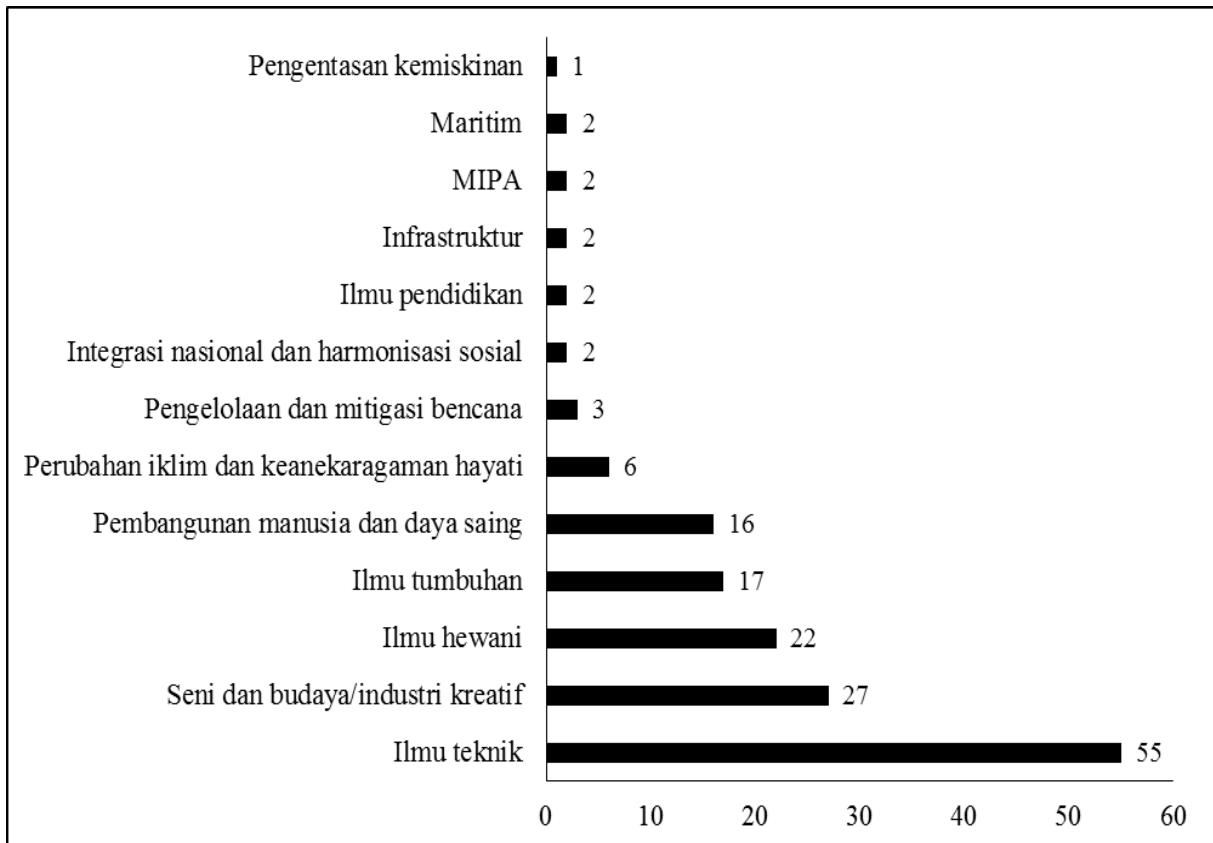
Jika data di atas dibuat grafik, maka grafiknya seperti pada grafik 1 di bawah ini.



Grafik 1: Data TTG Setiap Bidang Fokus tahun 2015

Dari grafik di atas terlihat bahwa TTG yang dihasilkan oleh PT tahun 2015 yang sudah divalidasi masih belum mengacu pada 7 fokus pembangunan iptek. Hal ini terlihat dari masih besarnya fokus kajian lain-lain (157). Untuk TTG dengan 7 fokus yang paling banyak adalah fokus pangan (62) dan yang paling sedikit adalah teknologi pertahanan dan keamanan (0).

Jika TTG dengan fokus lain-lain yang sebanyak 157 dipilah kembali berdasarkan kajian seni dan budaya/industri kreatif; pembangunan manusia dan daya saing; perubahan iklim dan keanekaragaman hayati; pengelolaan dan mitigasi bencana; integrasi nasional dan harmonisasi sosial; ilmu teknik; ilmu pendidikan; infrastruktur; MIPA; maritim; dan pengentasan kemiskinan. Secara lengkap perolehan TTG dari fokus kajian yang lain dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.



Grafik 2: Data TTG Setiap Bidang Fokus Kajian yang Lain tahun 2015

Dari grafik di atas terlihat bahwa TTG yang dihasilkan oleh PT tahun 2015 yang sudah divalidasi dan paling banyak adalah fokus kajiannya adalah ilmu teknik (55), disusul seni dan budaya/industri kreatif (27); ilmu hewani (22); ilmu tumbuhan (17); pembangunan manusia dan daya saing (16); perubahan iklim dan keanekaragaman hayati (6); pengelolaan dan mitigasi bencana (3); integrasi nasional dan harmonisasi sosial (2); ilmu pendidikan (2); infrastruktur (2); MIPA (2); maritim (2) dan pengentasan kemiskinan (1). Total ada sebanyak 157 TTG.

KESIMPULAN

TTG yang dihasilkan oleh PT tahun 2015 yang sudah divalidasi masih belum mengacu pada 7 fokus pembangunan iptek. Hal ini terlihat dari masih besarnya fokus kajian lain-lain (157). Untuk TTG dengan 7 fokus yang paling banyak adalah fokus pangan (62), disusul

teknologi informasi dan telekomunikasi (34), kemudian energi (23), teknologi kesehatan dan obat (12), material maju (4), teknologi dan manajemen transportasi (2) dan yang paling sedikit adalah teknologi pertahanan dan keamanan (0).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemristekdikti) dan DPPM UII yang telah memberikan dana penelitian dalam skema Hibah Bersaing tahun 2016 dan Hibah Penelitian Internal.

DAFTAR PUSTAKA

Data Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia.

<http://forlap.ristekdikti.go.id/>

Diakses 24 Oktober 2016.

Data Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2015

<http://www.simlitabmas.dikti.go.id/kinerja>

Diakses 23 Oktober 2016.

Daftar Universitas di Indonesia

<http://azies-site.blogspot.co.id/2014/01/daftar-universitas-negeri-di-indonesia.html>

Diakses 15 Oktober 2016.

Perguruan Tinggi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012

Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Kepmendikbud No. 25/O/1995

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

dih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/rencana-kebijakan/...pdf

Diakses 27 Oktober 2016.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_17.pdf

Diakses 26 Oktober 2016.

Teknologi Tepat Guna

Kepmendikbud No. 25/O/1995

SISTEM ELEKTRIK TENAGA HYBRID UNTUK PEMFILTERAN AIR TANAH

Andrew Joewono^{*1}, Rasional Sitepu²

¹Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

²Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

*email : andrew_sby@yahoo.com

ABSTRAK

Energi listrik merupakan suatu energi yang sangat diperlukan, namun perlu untuk memperhatikan ketersediaan bahan bakar yang ada. Matahari (sinar matahari) adalah salah satu energi terbarukan, dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Cukup tersedianya sinar matahari yang ada di Indonesia merupakan suatu peluang yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan energi listrik. Sistem hybrid yang digunakan merupakan gabungan antara penggunaan sumber listrik dari PLN dan sumber listrik hasil konversi energi dari sel surya. Pemfilteran air tanah sangat diperlukan dalam penggunaannya karena sumber air di perkotaan banyak mengalami pencemaran limbah. Sistem pemfilteran air tanah prosesnya dimulai dari menyedot air tanah (sumur/sumur bor), kemudian dilakukan filtrasi dengan menggunakan filter air, dengan cara memompakan air sedotan tersebut kedalam sistem pemfilteran air, untuk mendapatkan air hasil filtrasi, dengan kelayakan sesuai aturan pemerintah untuk air layak konsumsi, sistem ini memerlukan energi listrik untuk melakukan prosesnya, dari penelitian tahun ke-1 sudah dibuat sistem elektrik tenaga hybridnya dan sistem penyedotan air tanah, dengan hasil penyedotan air 1 liter per detik, dengan daya kerja pompa 400 watt, dan dapat beroperasi selama 4 jam. Kelanjutan penelitian membuat sistem filtrasi air dan menambah daya listrik untuk proses filtrasi tersebut dan mengukur kelayakan air terfiltrasi yang dihasilkan, didapatkan hasil air setelah di filter 0.61 hingga 0.63 liter per detik (5670 liter per 2 jam 30 menit), dengan waktu efektif kerja mesin 2 jam 30 menit, nilai TDS berkisar 276ppm hingga 281ppm dengan Ph kisaran 7.3 hingga 7.5 Oleh karena suatu sistem elektrik hybrid yang diaplikasikan untuk pemfilteran air, mempunyai keunggulan efisien penggunaan tenaga listrik dari sumber PLN dan tenaga cahaya matahari, mempunyai nilai baku kelayakan air untuk dapat dipergunakan pada kegiatan sehari-hari.

Kata Kunci : sistem hybrid, tenaga listrik, filter air

ABSTRACT

Electrical energy is an energy that is necessary, but need to consider the availability of existing fuels. The sun (sunlight) is one of the renewable energy, can be harnessed to generate electricity. Enough sunlight availability in Indonesia is an opportunity that can be developed to produce electrical energy. The hybrid system used is a combination of the use of sources of electricity and other sources of electrical energy conversion results from solar cells. Filtering ground water is indispensable in its use as a source of water in many urban areas experiencing waste pollution. Filtering system groundwater process starts sucking groundwater

(wells / bore wells), then performed filtration using a water filter, by pumping water straw that into the system of filtering water, to get the water from the filtration, with the feasibility of appropriate government regulations for potable water consumption, these systems require electrical energy to carry out the process, from study year 1 already made electrical system power hybrid system and water extraction ground, with the result of water extraction 1 liter per second, with the workings of the pump 400 watt, and can operate for 4 hour. Continuation of research makes water filtration systems and add power to the filtration process it and measure the feasibility of water filtered is generated, the result of water after the filter 0.61 to 0.63 liters per second (5670 liters per 2 hours 30 minutes), the effective time of the working machine 2 hours 30 minutes, TDS values ranging from 276ppm to 281ppm with Ph range of 7.3 to 7.5 Therefore a hybrid electric system that is applied for filtering water, has the advantages of efficient use of electric power from power source PLN and sunlight, has a value of feasibility raw water to be used in everyday activities.

Keywords: hybrid systems, electric power, water filter

PENDAHULUAN

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan, namun untuk pembangkitan masih banyak menggunakan bahan-bahan energi yang tidak terbarukan, misalnya, minyak, batu bara dan gas bumi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa konsumsi energi nasional pada tahun 2009 sebesar 948,112 ribu setara barel minyak (SBM), naik sebesar 21,87% dibandingkan konsumsi energi nasional pada tahun 2000 yang berjumlah 777,925 ribu SBM (Lemigas, 2012).

Pemanfaatan bahan-bahan sumber energi tidak terbarukan perlu diperhatikan ketersediaannya, dikarenakan keterbatasan cadangan yang masih tersisa, sehingga perlu dilakukan efisiensi pemanfaatannya, salah satu yang dilakukan dengan membuat sistem hybrid (gabungan antara sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan), yang akan diaplikasikan untuk pemompaan air untuk kegiatan sehari-hari.

Rancangan sistem elektrik hybrid untuk pemfilteran air tanah ini dikembangkan adalah mengoptimalkan pengkonversian energi dari solar panel dan cara pengisian baterai, yang dikombinasikan dengan energi listrik dari sumber energi tidak terbarukan (jaringan listrik PLN).

Rancangan yang dibuat bertujuan untuk mengefisiensi pemakaian daya listrik yang akan digunakan untuk melakukan pemompaan dan pemfilteran air tanah, sehingga menghasilkan energi listrik untuk pompa air dari sumber elektrik yang efisien didalam pemakaian energi dari sumber tidak terbarukan.

Target rancangan adalah terciptanya rancangan (desain) sistem elektrik hybrid (energi tidak terbarukan dan energi terbarukan), yang akan membangkitkan energi listrik, untuk menggerakkan sistem pemompa dan filtrasi air tanah, sehingga dapat tercipta sistem yang lebih efisien didalam konversi tenaga pemfilterannya.

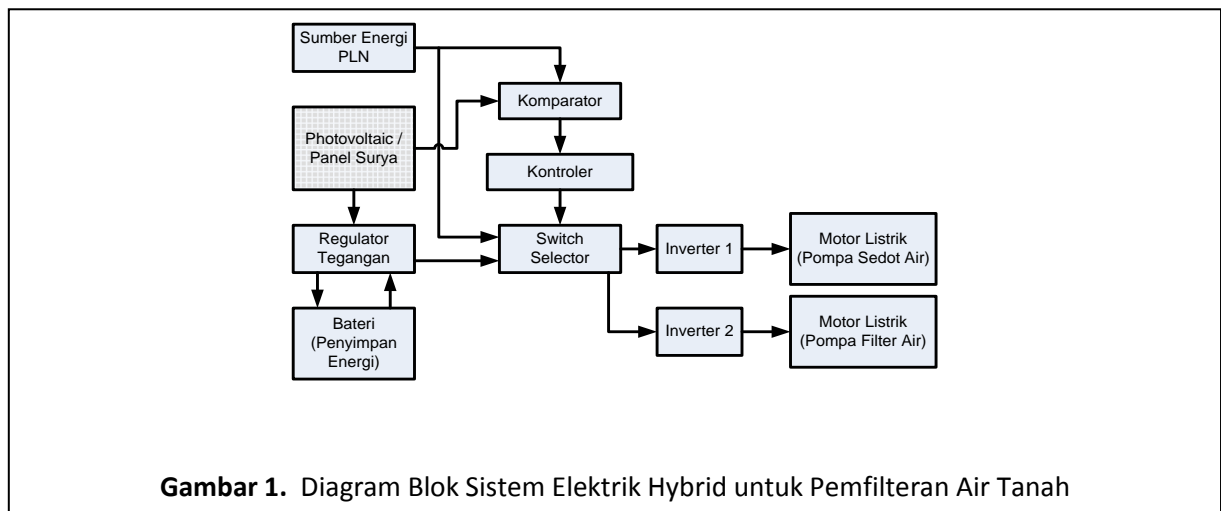
METODE PENELITIAN

Sistem elektrik hybrid untuk pemfilteran air tanah ini dikerjakan dalam beberapa tahap. Blok diagram perancangan alat seperti gambar 1.

Komponen yang digunakan untuk pengkonversian energi surya, sebagai berikut :

a. Modul Surya

Komponen utama dari Photovoltaic (PV) yang dapat menghasilkan energi listrik DC disebut panel surya atau modul surya. Panel surya terbuat dari bahan semikonduktor (umumnya *silicon*) yang apabila disinari oleh cahaya matahari dapat menghasilkan arus listrik. Dalam rancangan ini digunakan panel sel surya 100 wp 2 buah,



Gambar 1. Diagram Blok Sistem Elektrik Hybrid untuk Pemfilteran Air Tanah

b. Baterai/Aki

Baterai atau aki adalah penyimpan energi listrik digunakan sebagai sumber energi listrik pada saat matahari tidak menyinari panel surya. Baterai yang digunakan adalah baterai *deep cycle lead acid*. Pada penelitian ini digunakan baterai kapasitas 100 Ah, 12 V, sebanyak 2 buah, dengan efisiensi sekitar 80%. dengan waktu pengisian baterai/aki selama 12 jam - 16 jam.

c. Kontroler hybrid dan Inverter

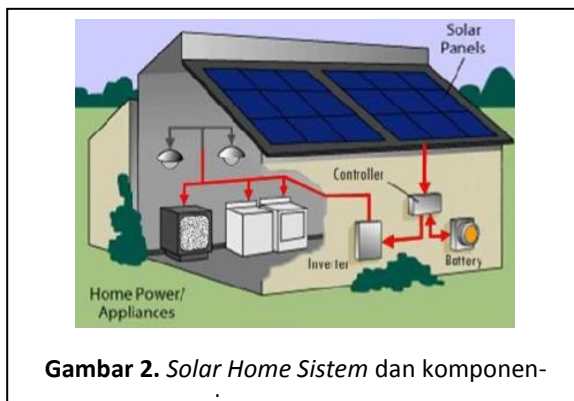
Pada penelitian ini digunakan kontroler hybrid dan inverter 1400 watt, pabrikan dari Luminous, input tegangan dari panel sel surya sebesar 24 volt dan menghasilkan tegangan pengisian baterai 24 volt. Regulator baterai digunakan untuk mengatur pengisian arus listrik

dari modul surya ke baterai/aki. Saat isi baterai tersisa 20% sampai 30%, maka regulator akan memutuskan dengan beban. Regulator baterai juga mengatur kelebihan mengisi baterai dan kelebihan tegangan dari modul surya. Manfaat dari alat ini juga untuk menghindari *full discharge* dan *overloading* serta memonitor suhu baterai. *Regulator* baterai dilengkapi dengan *diode protection* yang menghindarkan arus DC dari baterai agar tidak masuk ke panel surya lagi. Inverter (pengubah tegangan DC menjadi AC), menghasilkan tegangan AC 220 volt 1 fase, dengan daya maksimum 1400 watt.

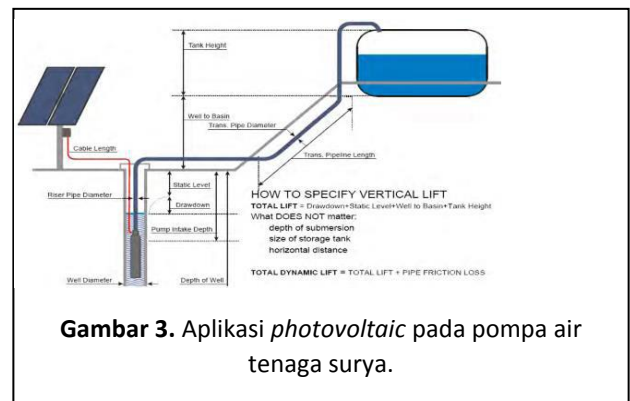
d. *Inverter*

Inverter adalah alat yang mengubah arus DC menjadi AC sesuai dengan kebutuhan peralatan listrik yang digunakan. Alat ini mengubah arus DC dari baterai / aki menjadi arus AC untuk kebutuhan beban-beban yang menggunakan arus AC.

Aplikasi Teknologi PV, yang digunakan untuk penelitian ini, meliputi *Solar Home Sistem* (SHS) yang diaplikasikan untuk memompa air di kedalaman. Komponen utama yang digunakan adalah modul surya, baterai/aki, *regulator* baterai, *inverter*, dan kabel. Skema SHS terlihat pada gambar2.



Gambar 2. Solar Home Sistem dan komponen-



Gambar 3. Aplikasi photovoltaic pada pompa air tenaga surya.

Energi listrik oleh motor listrik akan diubah menjadi energi kinetik yang akan menggerakkan pompa sehingga berhasil memompa air. Debit air yang tersisa ini akan disimpan di tangki penyimpanan sementara. Ilustrasi seperti pada gambar 3.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Perancangan sistem elektrik tenaga hybrid.

Pada tahapan ini dilakukan perancangan rangkaian penghubungan photovoltaic 100wp 12 volt dengan regulator tegangan yang mempunyai fungsi untuk menstabilkan tegangan yang dihasilkan dari photovoltaic, tegangan yang dihasilkan akan disalurkan dan diatur oleh

regulator tegangan untuk digunakan mengisi baterai penyimpan dan menyalurkan tegangan ke switch selektor untuk siap menggerakkan motor listrik (motor pompa air)

Pengujian yang dilakukan di tahapan ini, dengan melakukan pengukuran tegangan dan arus, yang dihasilkan photovoltaic dan regulator tegangan, sehingga siap untuk digunakan melakukan penyimpanan energi di baterai dan menggerakkan motor-motor listrik

2. Perancangan sistem komparator

Pada tahapan ini dilakukan perancangan rangkaian sensor dan komparator yang berfungsi membandingkan energi yang siap digunakan didalam sistem elektrik hybrid ini, apabila keadaan energi yang dihasilkan dari photovoltaic siap untuk menggerakkan motor-motor listrik maka selektor akan mengarahkan hubungan sumber energi ke motor-motor listrik, apabila energi dari photovoltaic tidak siap, maka sumber dari PLN yang akan disalurkan, sehingga di sistem ini terjadi efisien penggunaan sumber energi yang juga merupakan tolak ukur dari penelitian ini.

Pengujian yang dilakukan di tahapan ini, dengan melakukan pengukuran pada sensor dan fungsi komparator sebagai pembanding tenaga yang siap untuk disalurkan, dan penghitungan efisien pemakaian tenaga dari sumber PLN dan photovoltaic yang dihasilkan perharinya.

3. Perancangan sistem kontroler

Pada tahapan ini dilakukan perancangan rangkaian kontroler yang akan mengendalikan sistem didalam melakukan pemilihan sumber-sumber tenaga yang akan digunakan untuk terciptanya efisien pemakaian tenaga dari sumber-sumber yang digunakan

Pengujian yang dilakukan di tahapan ini, dengan melakukan pengujian keberhasilan kontroler untuk mengendalikan swicth / selektor, sesuai dengan ketentuan yang diinginkan (sumber tenaga dari photovoltaic lebih diutamakan).

4. Perancangan sistem inverter penggerak motor-motor listrik

Pada tahapan ini dilakukan perancangan rangkaian inverter, yang berfungsi untuk mengubah sumber-sumber tenaga Direct Current (DC) yang dihasilkan dari sistem, menjadi sumber Alternate Current (AC), untuk siap menggerakkan motor-motor yang digunakan

Pengujian yang dilakukan di tahapan ini, dengan melakukan pengukuran inputan dan keluaran tegangan inverter, yang menjadi sumber tenaga dalam menggerakkan motor-motor yang digunakan

Langkah-langkah perancangan teknologi PV adalah sebagai berikut (perhitungan pendekatan):

1. Mencari total beban pemakaian per hari. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban pemakaian (Wh)} = \text{Daya} \times \text{Lama pemakaian} \dots\dots\dots(1)$$

Daya pompa air 370 watt, direncanakan dipakai selama 3 jam, Maka beban pemakaian 1110 watt

- Menentukan ukuran kapasitas modul surya yang sesuai dengan beban pemakaian. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kapasitas modul surya} = \frac{\text{Total beban pemakaian harian}}{\text{Insolasi surya harian}} \dots\dots\dots (2)$$

Total beban pemakaian harian 1110 watt, insolasi surya 5 (lama waktu efektif menerima cahaya)

Maka Kapasitas modul surya 222 watt peak, atau 2 lembar solar panel 100 wp

- Menentukan kapasitas baterai/aki. Rumus yang digunakan adalah:

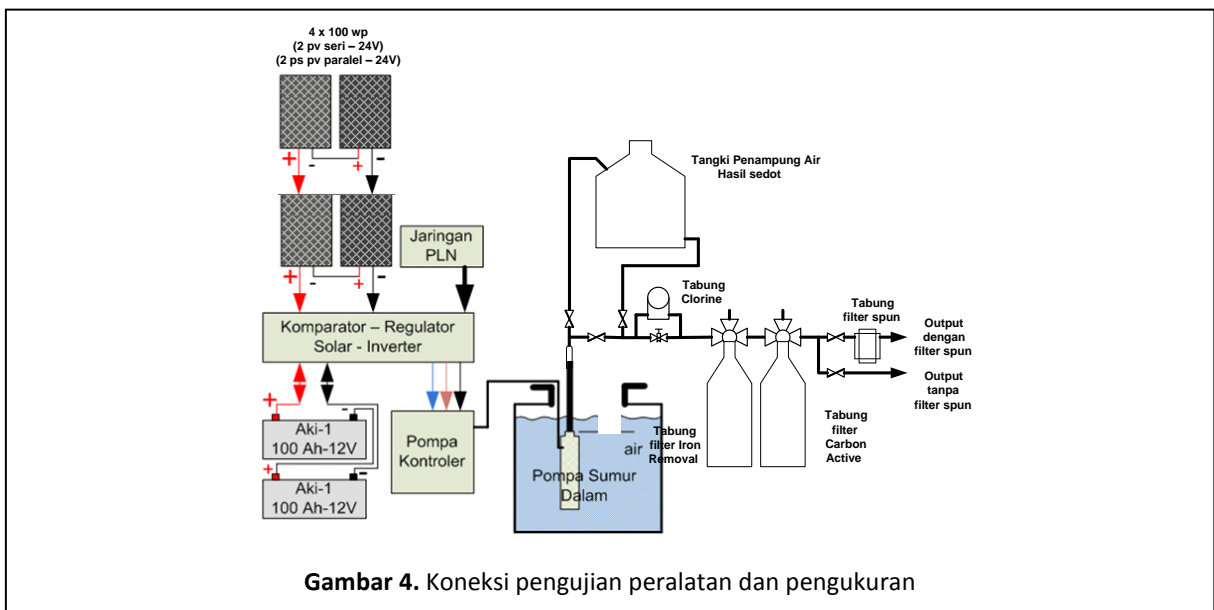
$$\text{Kapasitas baterai (Ah)} = \frac{\text{Total kebutuhan energi harian}}{\text{Tegangan sistem}} \dots\dots\dots (3)$$

Total kebutuhan energi harian 1110 watt, tegangan sistem 12 volt (untuk pemakaian 50%)

Maka Kapasitas baterai $1110 \times 2 = 2220 / 12v / 100Ah = 1,85$ keping

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan perancangan, maka dilakukan pengukuran dan pengujian dengan melakukan pemasangan peralatan dan melakukan koneksi peralatan seperti pada gambar 4. berikut ini



Gambar 4. Koneksi pengujian peralatan dan pengukuran

Untuk mengetahui daya listrik yang dibutuhkan pompa dilakukan pengukuran tegangan dan arus sewaktu melakukan pemompaan air dengan hasil seperti pada tabel 1. berikut ini,

Tabel 1. Pengukuran tegangan dan arus Pemakaian Pemompaan

No	Jam	V Pompa (V)	I Pompa (A)	Daya Pompa (W)
1	11.00	213	2.96	631
2	12.00	214	2.92	627
3	13.00	215	2.92	629
4	13.30	213	2.96	631
5	14.00	0	0	0
Rata-rata		213.8	2.94	629.6

Dari hasil pengukuran diatas, dapat diketahui, waktu efektif untuk penggunaan sistem ini kurang lebih 2 jam 30 menit efektif, dengan daya yang dapat digunakan berkisar 627 - 631 watt, sesuai dengan kinerja battery 100 Ah, 12 volt dipasang seri, menghasilkan tegangan 24 volt 100Ah, daya yang dihasilkan $24 \times 100 = 2400$ VAh, kinerja maksimum battery sebesar 50%, sehingga dapat mensupply peralatan $2400 \times 50\% = 1200$ VAh, dengan pompa yang membutuhkan daya listrik rata-rata 629.9 Watt, maka rangkaian ini dapat mensupply pompa untuk filtrasi air kurang lebih 2 jam 30 menit.

Untuk melakukan pengukuran dan pengujian kinerja pemfilteran dengan pompa air, dilakukan pengujian pemompaan dan pemfilteran air dengan skema seperti pada gambar 4. diatas, diperoleh hasil pengukuran seperti pada tabel 2. berikut ini

Tabel 2. Pengukuran dan pengujian pemfilteran air

No	Jam ukur	Arus motor [A]	Hasil Air yang dipompakan (/2L)					rata-rata [detik]
			[detik]					
			1	2	3	4	5	
1	11.00	2.96	3.21	3.14	3.14	3.12	3.11	3.14
2	12.00	2.92	3.20	3.21	3.15	3.13	3.14	3.16
3	13.00	2.92	3.23	3.17	3.18	3.16	3.16	3.18
4	13.30	2.96	3.41	3.23	3.20	3.21	3.20	3.25
5	14.00	0	0	0	0	0	0	0
rata-rata		2.94						

Dari hasil pengukuran dan pengujian pemfilteran air, didapat waktu rata-rata sebesar 3.14 - 3.25 detik per 2 liter air, pada keadaan tersupply listrik jaringan PLN atau listrik yang tersupply dari Aki, artinya sistem ini dapat melakukan pemompaan dan pemfilteran air tanah dari kedalaman dengan menghasilkan pemompaan air 0.61 - 0.63 liter per detiknya. (5670 liter per 2 jam 30 menit).

Untuk melakukan pengukuran dan pengujian kinerja filtrasi air, dilakukan pengujian pengukuran dengan alat ukur TDS (Total Dissolved Solid) dan Ph (Kadar keasaman) meter, air hasil filtrasi skema seperti pada gambar 4. diatas, diperoleh hasil pengukuran seperti pada tabel 3. berikut ini,

Tabel 3. Pengukuran dan pengujian air hasil filtrasi

No	Jam ukur	Hasil Ukur TDS					Hasil Ukur Ph				
		1	2	3	4	Rata-rata	1	2	3	4	Rata-rata
1	11.00	286	275	286	276	281	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5
2	12.00	276	267	285	275	276	7.0	7.3	7.4	7.3	7.3
3	13.00	278	276	283	276	278	7.4	7.5	7.2	7.3	7.4
4	13.30	279	278	280	279	279	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3
5	14.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari hasil pengukuran dan pengujian pemfilteran air, didapat rata-rata nilai TDS 276 - 281ppm, dan kadar keasaman (Ph) sebesar 7.3 hingga 7.5, nilai-nilai parameter air terukur tersebut memenuhi standar pemerintah yaitu, nilai TDS dibawah 300 ppm, untuk air yang digunakan layak, dengan nilai Ph, 7 - 8.

KESIMPULAN

Dari perancangan, pengukuran dan pengujian, dapat disimpulkan :

1. Sistem yang dirancang dapat berjalan dengan sistem hybrid, sumber jaringan listrik PLN dan sumber surya, yang dapat mengatur secara otomatis pengisian energi ke aki dengan prioritas sumber energi cahaya matahari.
2. Sistem dapat bekerja secara efektif kurang lebih 2 jam 30 menit, dengan daya yang dapat digunakan berkisar 627 - 631 watt, sesuai dengan kinerja battery 100 Ah, 12 volt dipasang seri, menghasilkan tegangan 24 volt 100Ah.
3. Sistem filtrasi air menghasilkan 5670 liter, selama waktu efektif dari sistem 2 jam 30 menit.

4. Parameter terukur untuk kelayakan air hasil filtrasi didapat nilai rata-rata TDS 276ppm - 281ppm, dan kadar keasaman (Ph) sebesar 7.3 hingga 7.5, nilai-nilai tersebut memenuhi standar pemerintah yaitu, nilai TDS dibawah 300 ppm, untuk air yang digunakan layak, dengan nilai Ph, 7 - 8.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada, Ristek DIKTI, atas pendanaan yang diberikan untuk melakukan penelitian ini

Ucapan terima kasih kepada, Kopertis Wilayah 7, yang mengkoordinir kegiatan penelitian hibah desentralisasi ini.

Ucapan terima kasih kepada institusi, Unika Widya Mandala Surabaya, LPPM, Dekan Fakultas Teknik dan Ketua Jurusan Teknik Elektro, yang selalu menyemangati untuk melakukan kegiatan penelitian yang dapat mengembangkan masyarakat.

D AFTAR PUSTAKA

Hasnawiya Hasan, “PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI PULAU SAUGI”, Jurnal Riset dan Teknologi Kelautan (JR TK) Volume 10, Nomor 2, Juli - Desember 2012

Angelina Evelyn T, Andrew Joewono, “Sumber Energi Listrik dengan Sistem Hybrid (Solar Panel dan Jaringan Listrik PLN)”, Jurnal Widya Teknik, Volume 10, No.1, April 2011

LEMIGAS, 2012 <http://www.lemigas.esdm.go.id/id/prdkpenelitian-264-.html> diakses 9 April 2013.

Menlh/media, 2009 <http://www.menlh.go.id/ringkasan-berita-media-massa-ii-699/diakses> 13 April 2014

DESDM (2007), PLN Targetkan Pemakaian Energi Listrik Terbarukan 10 %, Jakarta. diakses tanggal : 13/01/2009 21:09 dari DESDM (2007). <http://www.esdm.go.id/berita/listrik/39-listrik/129-pln-targetkan-pemakaian-energi-listrik-terbarukan-10.html>

FIL (2014), “Water Treatment”, <http://filter-penjernih-air.7pilar.net/> diakses tanggal 15 April 2014

KOHESI RELIGIUSITAS ORGANISASIONAL

Arif Budiharjo

Universitas Pekalongan

Email: mitraumatpusat@yahoo.com

ABSTRAK

Kohesivitas organisasi merupakan modal sosial yang perlu juga dikelola agar memunculkan persepsional yang positif pada seluruh karyawan / anggota pada organisasi. karena kohesivitas merupakan bagian dari iklim organisasi. kohesivitas pada organisasi berkecenderungan terbangun dari kohesi tugas dan kohesi sosial, namun sangat memungkinkan optimalitas kerekatan pada kohesi masih bisa pula disuport oleh kualitas religiusitas pada individu-individu dan organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat memungkinkan kohesivitas yang tidak saja terbangun dari adanya orientasi pada tugas dan orientasi pada interaksi sosial saja, namun juga kohesi yang dapat terbangun dari latar belakang karakter religiusitas pada masing-masing individu yang ada di dalam organisasi tersebut. tulisan ini mencoba untuk memunculkan bagaimana mensinkronisasikan aspek religiusitas dengan aspek kohesivitas sehingga menjadi entitas konsep "Kohesi Religiusitas Organisasional"

Kata Kunci : kohesivitas, religiusitas, kohesi religiusitas

ABSTRACT

organizational cohesion is social capital that must be managed properly. This is in order to bring positive perceptions on all employees / members. organizational cohesion is part of the organizational climate. organizational cohesion is built from task cohesion and social cohesion, but the organizational cohesion can also be built by the religious character of the individuals in the organization. Therefore it could be organizational cohesion emerged from religious cohesion. This paper tries to explain how synchronization religious aspect to the aspect of cohesion, so it appears the concept of "Cohesion Religious Organizations"

Keywords: cohesiveness, religiousness, religiosity cohesion

PENDAHULUAN

Organisasi merupakan sistem yang merangkai elemen-elemen organisasi secara terpadu dan selaras. Rangkaian keterpaduan dan keselarasan korporasi menjelaskan suatu tatanan yang mengarahkan semua proses kerja menuju kepada kinerja organisasi yang baik dan optimal. Keterpaduan organisasional harus mampu menjaga eksistensi korporasi serta mengembangkan korporasi itu sendiri. Apalagi pergerakan persaingan yang melingkupi eksistensi suatu organisasi, pada saat sekarang ini, menunjukkan suatu fenomena persaingan yang semakin menajam.

Sinergitas organisasional secara logis akan mendapatkan suatu dukungan dari kondisi kerja yang nyaman, yang terbentuk dari adanya kekerabatan, kebersamaan, keeratan, kerekatan, dan kekeluargaan dari masing-masing individu di dalam organisasi tersebut. Hal ini, paling tidak, masing-masing individu akan mempunyai persepsi yang sama perihal kenyamanan kerja

yang berkait dengan karakter kelompok organisasi yang memiliki kekerabatan, keamatan, kerekatan, dan kekeluargaan. Kondisi yang demikian yang menjadikan suatu organisasi memiliki karakter Kohesivitas Organisasi.

Kohesivitas Organisasi merupakan persepsi atas suasana batin dari masing-masing individu, berkaitan dengan perasaan kenyamanan dirinya dalam organisasi tersebut. Hal ini karena adanya berbagai karakter internalisasi hubungan, seperti keamatan, kerekatan, kekeluargaan dan kebersamaan yang dapat mendorong untuk dapat menumbuhkembangkan karakter dan sikap kerja dari masing-masing individu, dan dapat menguatkan pola kerja sama diantara sesamanya.

Pada sisi lain, norma suatu budaya yang telah menjadi suatu nilai atau tatanan yang telah dilembagakan, karena diyakini secara bersama, disadari dan disepakati secara bersama untuk menjadi suatu pedoman dan bahkan menjadi suatu prinsip bagi operasionalisasi organisasi, diharapkan akan dapat menjadi suatu warna atau nuansa bagi penguatan kohesivitas dalam organisasi tersebut. Dengan demikian kohesivitas organisasi ini akan memiliki suatu keunikan tersendiri, yaitu disamping terdapat kohesi tugas dan kohesi sosial, dapat pula dimunculkan kohesi religius atau kohesi religiusitas organisasional. Kohesi Religiusitas Organisasional ini sangat memungkinkan cocok pada organisasi yang bernuansa syariah seperti pada Lembaga Keuangan Syariah atau yang disebut BMT. Oleh karenanya pada tulisan ini mencoba memunculkan dan membahas ide variabelitas tentang “Kohesi Religius Organisasional” sebagai suatu variabel yang diharapkan dapat mengarahkan pencapaian kinerja organisasi yang optimal.

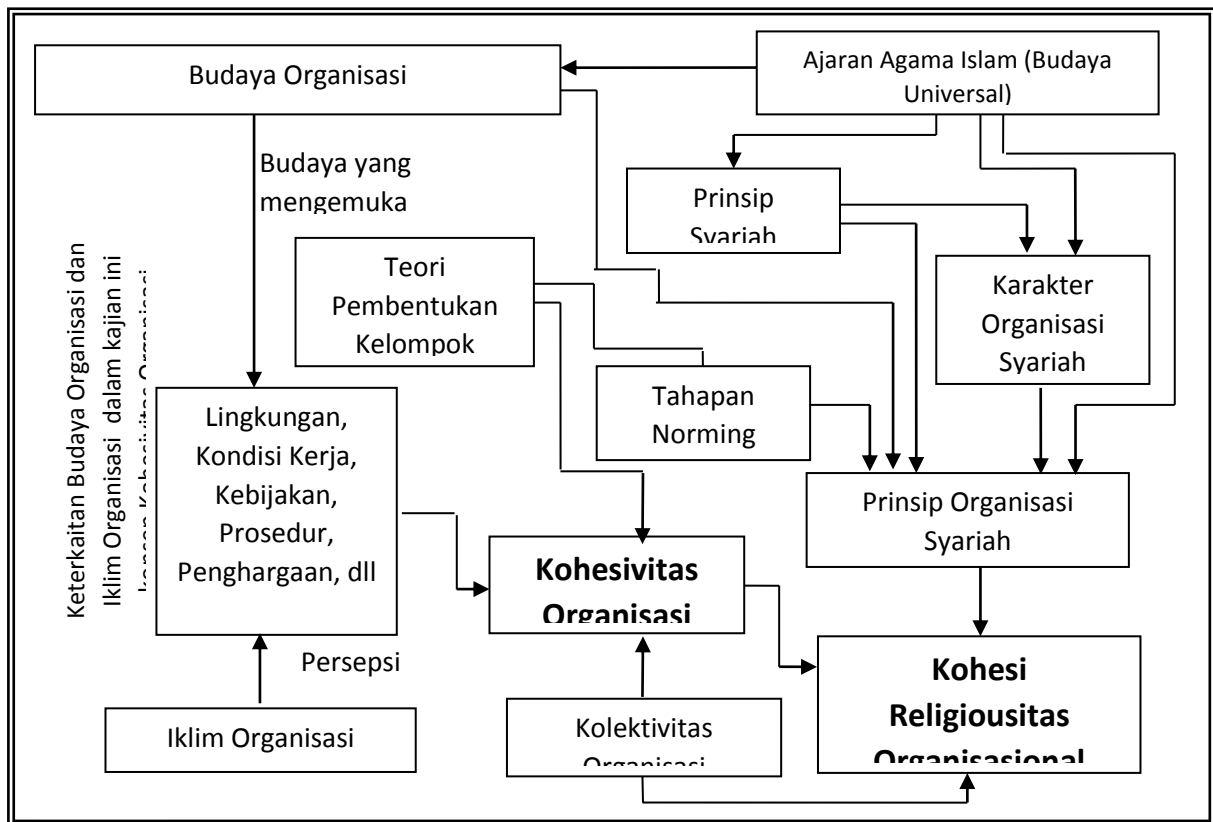
PEMBAHASAN

Untuk membahas kajian bagaimana Konsep Kohesi Religiusitas Organisasional dimunculkan, akan lebih memudahkan pemahamannya, dengan digambarkan Ikhtisar Alur Pembahasan Konsep Kohesi Religiusitas Organisasional.

Gambar 1.

Ikhtisar Alur Pembahasan

Konsep Kohesi Religiusitas Organisasional



Sumber : dikembangkan untuk keperluan tulisan ini

A. Kajian Budaya dan Iklim Organisasi yang Memperkuat Kohesivitas Organisasi

1. Budaya Organisasi

Menurut Kasali (2005), Budaya Korporat terdiri dari dua lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan yang umumnya mudah dilihat (*Visible Artifact*) dan sering dianggap mewakili perusahaan secara menyeluruh, terdiri atas cara orang berperilaku, berbondan serta simbol-simbol seperti logo perusahaan, lambang merek slogan, ritual, figur-figur hero, simbol-simbol yang dipakai, kegiatan protokoler, bahasa dan ceritera yang sering dibicarakan oleh para anggotanya. Sedangkan lapisan kedua adalah yang lebih dalam dan yang sesungguhnya disebut sebagai budaya, terdiri dari nilai-nilai pokok, filosofis, asumsi, kepercayaan, sejarah korporasi, dan proses berfikir dalam organisasi.

2. Iklim Organisasi

Iklim organisasi, menurut Shereen Ragab Dorgham (2012), telah diidentifikasi sebagai penghubung penting antara anggota suatu organisasi dengan organisasi itu sendiri. Shereen Ragab Dorgham, mengemukakan Iklim organisasi atau organisasi budaya, tercermin dalam

tujuan organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan staf atau karyawan dengan memberikan lingkungan kerja dan kondisi kerja yang baik, mendampingi dan mendukung mereka agar dapat memunculkan kepuasan kerja bagi mereka. Penciptaan iklim organisasi yang demikian dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen para karyawannya.

Sedangkan menurut Ahmed, P.K., 1988, dikatakan bahwa manusia atau individu dalam organisasi adalah pengamat aktif lingkungan organisasi dimana mereka berada. Mereka membentuk lingkungan dan dibentuk oleh lingkungan, kemudian mereka menyimpulkan atas prioritas organisasi. Dari pemahaman mereka, mereka mencoba menyesuaikan diri untuk mencapai tujuan mereka sendiri khususnya. Kadang-kadang ini berakhir sebagaimana yang kehendaki secara pribadi (atau berdasarkan persepsi pribadi), namun mungkin bertepatan dengan orang-orang atau individu lain yang ada di organisasi tersebut atau mereka (individu-individu yang lain tersebut) mungkin bertentangan dengan seseorang tersebut. Pemahaman dan persepsi dari lingkungan bertindak sebagai pedoman mekanisme pembentukan iklim sebagai suatu persepsional. Praktik dan prosedur sebagaimana dimaksud untuk mendefinisikan persepsi ini sebagai iklim organisasi.

Iklim di Organisasi itu disimpulkan oleh anggotanya melalui praktek-praktek yang ada pada organisasi, prosedur yang dijalankan di organisasi, dan sistem penghargaan dikerahkan. Semua ini menjadi indikasi dari suatu penyimpulan akan suatu iklim dalam suatu organisasi apabila apa yang dimaksudkan tersebut menjadi cara bisnis dan berjalan secara rutin. Di satu sisi adalah enkapsulasi sejati organisasi prioritas.

Sedangkan Schneider et al. (1996) mendefinisikan empat dimensi iklim :

- a) Sifat hubungan interpersonal (dalam hal ini berkaitan dengan aspek kepercayaan, hubungan timbal balik, hubungan berbasis pada kolaborasi, karakter kompetitif dalam hubungan, karakter sosialisasi organisasi kepada pendatang baru dan karakter dukungan organisasi terhadap pendatang baru atas upaya sosialisasi mereka, karakter asimiliasi para pendatang baru, karakter penghargaan organisasi kepada individu)
- b) Sifat hirarki (dalam hal ini berkait dengan aspek keputusan organisasi yang dibuat terpusat atau melalui konsensus dan partisipasi, aspek semangat kerja tim atau karakter individualistis para anggotanya, karakter pemberian hak-hak istimewa yang diberikan kepada individu tertentu, seperti manajemen Staf)
- c) Sifat pekerjaan (dalam hal ini berkaitan dengan adanya pekerjaan yang bersifat menantang atau membosankan, adanya fleksibilitas dalam organisasi, adanya sumber daya yang cukup dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab oleh para anggotanya)

- d) Fokus dukungan dan penghargaan (dalam hal ini berkaitan dengan aspek penilaian atau penghargaan atas kinerja, adanya pekerjaan-pekerjaan yang dapat mendukung perilaku anggota, aspek hubungan kuantitas pekerjaan dan kualitas hak kerja, Landasan dasar mempekerjakan orang)

3. Budaya, Iklim, Kolektivitas Organisasi, Teori Pembentukan Kelompok dalam menguraikan Konsep Kohesivitas Organisasi

Matthew B. Miles (Ochitwa, 2003), mengemukakan bahwa salah satu dari unsur kesehatan organisasi adalah kohesivitas organisasi. Kohesivitas organisasi sangat berkaitan erat dengan iklim organisasi. Dan Ahmed (1988), mengatakan bahwa iklim organisasi sebagai suatu persepsi anggota organisasi atas lingkungan dan kondisi kerja. Lingkungan dan kondisi kerja tersebut, perwujudannya sangat memungkinkan terbentuk dari kebijakan-kebijakan atau perilaku yang berasal dari mengemukanya kohesi nilai, mitos dan berbagai item-item budaya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Peters dan Waterman, bahwa budaya organisasi dijelaskan salah satunya adalah sebagai "Kohesi nilai, mitos, pahlawan dan simbol yang memiliki makna yang sangat berarti untuk orang-orang yang bekerja pada organisasi tersebut.

Dari kajian tersebut, menunjukkan *adanya keterkaitan pembahasan antara Iklim Organisasi dengan Budaya Organisasi atas konsep Kohesivitas Organisasi*. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa *konsep kohesivitas organisasi adalah merupakan kondisi atau lingkungan kerja yang dipersepsikan oleh para anggotanya (iklim organisasi), dengan mana lingkungan dan kondisi kerja tersebut menjadi suatu perwujudan dari mengemukanya kohesi nilai, mitos dan berbagai item-item budaya*. Atau artinya bahwa kohesivitas adalah berkait dengan iklim organisasi yang menjadi perwujudan dari kohesi nilai dan seperangkat budaya-budaya perusahaan.

Pada sisi lain Peters dan Waterman, masih berkait dengan budaya organisasi, dikatakan sebagai asumsi tentang kehidupan perusahaan yang telah bekerja cukup baik di masa lalu, dianggap sah dan diajarkan kepada anggota baru sebagai persyaratan keanggotaan dalam kehidupan perusahaan. Namun menurut pandangan. Sedangkan menurut Ahmed, 1988, manusia adalah pengamat aktif lingkungan di mana mereka berada di suatu organisasi, mereka membentuk lingkungan dan dibentuk oleh lingkungan. Ini berarti tekanan iklim organisasi berada pada para anggota, bahwa iklim organisasi sebagai suatu persepsi yang terbentuk pada setiap individu atas lingkungan dan kondisi kerja. Akan tetapi Shereen Ragab Dorgham, mengemukakan Iklim organisasi atau budaya organisasi, tercermin dalam tujuan organisasi untuk mengembangkan staf atau karyawan dengan memberikan lingkungan kerja dan kondisi

kerja yang baik, mendampingi dan mendukung mereka agar dapat memunculkan kepuasan kerja bagi mereka. Dari kajian tersebut, menunjukkan keterkaitan pembahasan antara Budaya Organisasi dengan Iklim organisasi tidak dapat dipisahkan.

Kohesivitas, menurut Saragih dan Akib (2004), merupakan keterikatan anggota kelompok terhadap kelompok dan anggotanya merasa selalu menjadi bagian dari kelompoknya. Mengenai kelompok, Tuckman (1965), mengemukakan, bahwa terdapat 5 (lima) tahapan pembentukan kelompok, yaitu : tahap pembentukan (*forming*), tahap mengacau (*Storming*), tahap membuat norma (*norming*), tahap mewujudkan (*performing*), dan tahap menyesuaikan (*adjourning*). Yalom (1985), mengemukakan penyempurnaan terhadap teori yang dikemukakan Tuckman dengan mengajukan peran orientasi, konflik dan kohesivitas. Tahap orientasi dan konflik berfokus pada proses terbentuknya kelompok di awal. Dan yang lebih spesifik adalah pada proses tahap ketiga, yaitu kohesivitas kelompok.

Erez dan Somech, (1996), kolektivis melihat diri mereka sebagai bagian integral dari hubungan sosial dan lebih memungkinkan untuk mendefinisikan diri mereka sebagai terikat kepada orang lain dalam jaringan sosial mereka, Erez dan Somech (1996) menyatakan bahwa bekerja dengan orang lain dan membuat kontribusi kepada kinerja kelompok membantu kolektivis memenuhi diri saling tergantung dan memperkuat identitas kelompok mereka.

Jika dicari keterkaitan antara pengertian Kohesivitas Organisasi yang merupakan suatu persepsi dari para anggotanya, maka persepsi mereka berkait dengan lingkungan dan kondisi kerja, serta berbagai macam kebijakan, prosedur, penghargaan, ketentuan dan berbagai macam hal dari perusahaan atas anggota-anggotanya, adalah sama halnya dengan atmosfer dari suatu perusahaan sebagai suatu kaidah iklim, yang akan membentuk suasana bathin baik dari masing-masing anggotanya maupun kelompok / organisasi tersebut. Dan hal yang demikian, karakter kolektivitas di dalam organisasi yang terdiri dari para anggotanya, sebagaimana yang didefinisikan oleh Erez dan Somech (1996) menjadi lebih dekat dengan karakter Kohesivitas Organisasi. Hal ini dikarenakan, menjadi semakin terikatnya para individu kepada jaringan sosial yang terbentuk dalam organisasi ini, dan akan semakin berketergantungan diantara anggota yang satu dengan yang lainnya.

B. Kajian Membangun Konsep Kohesi Religiusitas Organisasional

Untuk menguraikan bagaimana konsep Kohesi Religiusitas Organisasional dapat dibangun, maka akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kohesivitas Organisasi

Forrester, W.R., dan Tashchian, A., (2006), Kohesi Organisasi didefinisikan sebagai kecenderungan kelompok untuk tetap bersatu dalam mencapai tujuan-tujuan instrumental dan kepuasan para anggotanya. Kohesi Organisasi terbangun dari dua dimensi, yaitu : komitmen bersama untuk tugas sebagai dimensi “Kohesi Tugas”, dan hubungan sosial yang dapat menguatkan keterikatan masing-masing anggota kelompok, sebagai dimensi “Kohesi Sosial”.

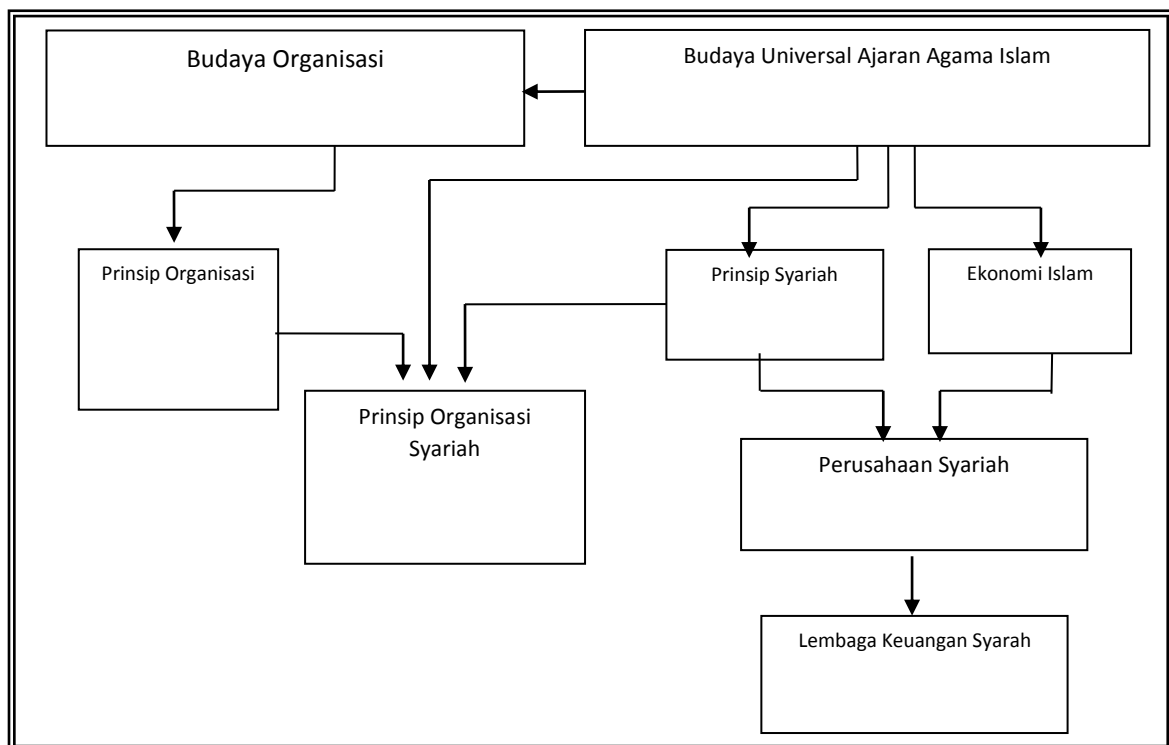
Kohesi Sosial berkaitan dengan karakter Kolektifis Organisasi, Erez dan Somech, (1996), merupakan karakter para individu dalam suatu kohesivitas organisasi yang semakin menguat. Hal ini karena, menurut Erez dan Somech (1996), kolektivis organisasi memiliki keterikatan yang sangat kuat terhadap kelompok. Baldwin, Bedell, dan Johnson, 1997, menemukan bahwa kohesi sosial menaikkan tingkat efektivitas dan kinerja tim.

2. Prinsip Organisasi Syariah

Untuk membahas kajian bagaimana Konsep Prinsip Organisasi Syariah dimunculkan, termasuk bagaimana dan teori-teori apa yang mendukungnya, maka sebelum kajian tersebut diuraikan, untuk lebih memudahkan pemahaman, digambarkan ikhtisar Alur Pembahasan Konsep Prinsip Organisasi Syariah.

Gambar 2.

Ikhtisar Alur Pembahasan Prinsip Organisasi Syariah



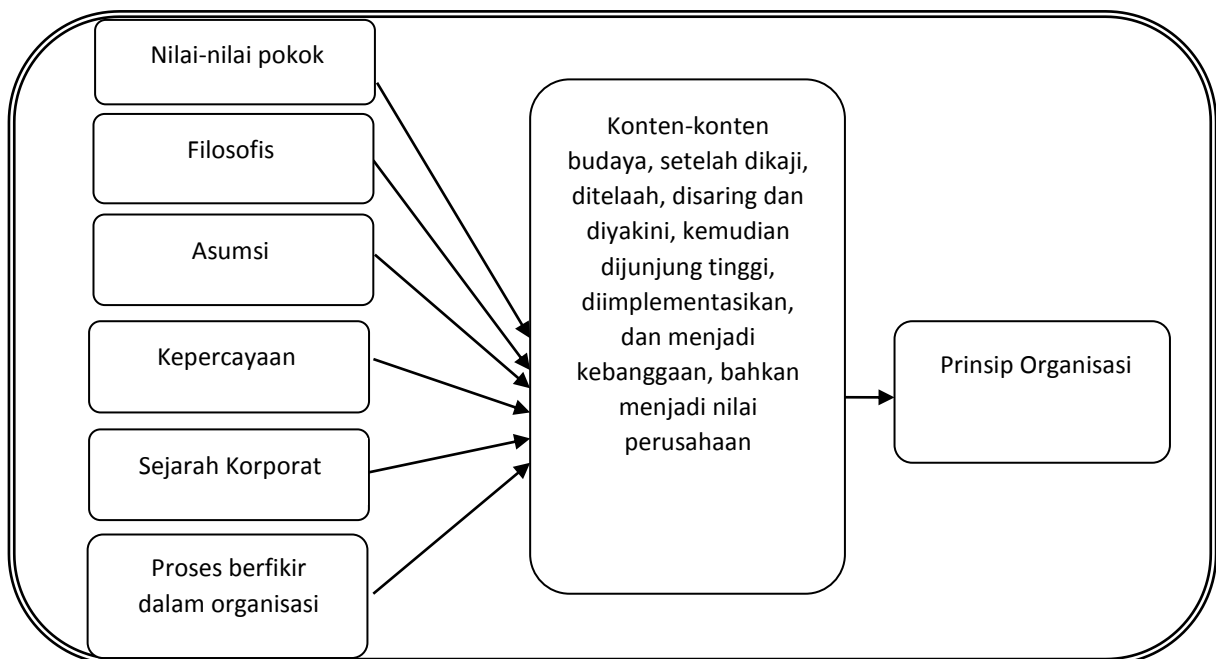
Sumber : dikembangkan untuk keperluan tulisan ini

a. Budaya Organisasi dan Prinsip Organisasi

Budaya Korporat (Kasali, 2005), dikatakan sebagai satu set nilai, penuntun kepercayaan akan suatu hal, pengertian dan cara berfikir yang dipertemukan oleh para anggota organisasi dan diterima oleh para anggota baru seluruhnya. Selanjutnya Kasali juga mengemukakan bahwa secara pragmatis, budaya organisasi dapat diartikan sebagai ”norma-norma perilaku, sosial dan moral yang mendasari setiap tindakan dalam organisasi dan dibentuk oleh kepercayaan, sikap dan prioritas para anggotanya.

Jika nilai, norma, atau kaidah-kaidah tersebut, benar-benar dapat secara kental memberikan warna budaya organisasi, dan dapat secara konsisten terimplikasikan dalam proses dan menguatkan karakter organisasi, maka nilai, norma, atau kaidah tersebut, organisasi yang bersangkutan akan memunculkan kekhasan atau karakteristik yang kuat sebagai keunikan tersendiri, dan bahkan dapat tumbuh sebagai suatu keunggulan yang muncul dari ”nilai organisasi” yang menguat. Artinya organisasi akan mendapatkan sesuatu yang dapat menghidupkan ”brand awareness” di masyarakat. Alhasil organisasi tersebut akan semakin mengemuka di benak masyarakat sebagai organisasi yang berkarakter atas ”nilai” tersebut. Dengan demikian maka terciptalah suatu ”positif image” yang kuat dan sebagai karakter khusus atau unik bagi organisasi tersebut di benak masyarakat.

Gambar 3.
Prinsip Organisasi



Sumber : Kasali (2005), yang dikembangkan untuk keperluan tulisan ini

b. Prinsip Organisasi Syariah

1. Ekonomi Islam

Islam, menurut Rivai (2002), sebagai Ad-dien, mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna (Syumul), Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam.

Islam, menurut Yekini Olawaiye Lawal (2010), telah diakui sebagai cara hidup seorang muslim, dengan perilaku dan setiap kegiatan yang mendasarkan pada Al Qur'an dan praktek Nabi Muhammad (SAW), dengan demikian apa yang menjadi dasar bagi perilaku dan kegiatan seorang muslim tentunya harus sesuai dengan syari'ah tersebut.

Tapi apa sebenarnya adalah "ekonomi Islam" ? Rivai, 2004, menyatakan, salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (muamalah, iqtishodiyah). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam Al qur'an, Assunnahah, maupun Ijtihad para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar.

Adapun Adi Setia (2011), mengemukakan Ekonomi Islam atau yang diistilahkan sebagai *The Islamic Gift Economy* (IGE) sebagai suatu sistem ekonomi integratif berdasarkan prinsip-prinsip operasi dari kerjasama (ta'āwun), kesepakatan bersama, kemitraan, dan didasarkan pada pula etika utama, syukur, kemurahan hati, moderasi, Khilafah dan Amanah.

2. Perusahaan Syariah

Patricia Sloane White (2001), mencoba untuk mengkritisi suatu bentuk yang terlihat hanya dari suatu permukaan atas suatu korporasi di Malaysia berkait dengan pandangan perusahaan syariah, yaitu :

“Para pemimpin perusahaan pada perusahaan syariah, yang juga dalam tampilan disebut sebagai "personel syariah", sebagai satu set perusahaan syariah, yaitu aturan "sumber daya manusia", kode, prosedur, dan disiplin bagi karyawan. Hal ini menjadi suatu nilai normative atas kerja syariah Islam sangat salah, di mana para pemimpin perusahaan membuat dan menegakkan kebijakan Islam untuk personil, memastikan bahwa karyawan menunjukkan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh atasan mereka. Bersama-sama, "perusahaan dan personel syariah" menggambarkan perbedaan antara pemimpin perusahaan dan orang-orang yang mereka kelola, sifat hubungan hirarkis dan gender di tempat kerja Islam, dan konsep-konsep dan keyakinan yang mendasari pekerjaan dalam ekonomi Islam.

Pemikiran atas Sloane White, didasarkan atas apa yang dikemukakan oleh Rudnyckyj, D., (2009), yang menyebutkan "ekonomi spiritual" Muslim, memberikan kursus pelatihan menggunakan syariah atau ajaran Islam untuk mengubah kesalehan dan menjadikan karyawan untuk membentuk mereka menjadi personel kompetitif secara global untuk ekonomi kapitalis neoliberal.

b. Lembaga Keuangan Syariah

El Hawary et al.(2004) mendefinisikan Perbankan Islam dan Finance (IBF) sebagai sistem yang melekat pada empat prinsip berikut:

- Risiko-Sharing : transaksi keuangan harus mencerminkan risk return yang terdistribusikan secara simetris diantara pihak-pihak yang bertransaksi.
- Materialitas: Semua transaksi keuangan harus secara langsung terkait dengan transaksi ekonomi riil.
- Tidak Mengeksploitasi : harus tidak ada pihak untuk dieksploitasi.
- Tidak ada pendanaan kegiatan berdosa: Transaksi tidak dapat digunakan untuk memproduksi barang dilarang oleh Al-Qur'an.

C. Kajian Budaya, Iklim, Kohesivitas, Kolektivitas Organisasi, Karakter Organisasi Syariah dan Prinsip Organisasi Syariah dalam menguraikan Konsep Kohesi Religiusitas Organisasional

Berkaitan dengan Budaya Organisasi, Kasali (1996), mengemukakan tujuan keberadaan budaya organisasi dapat melengkapi para anggota dengan perasaan memiliki dan bangga atas organisasi tersebut, sehingga para anggota dapat menemukan budaya organisasi sebagai identitas perusahaan.

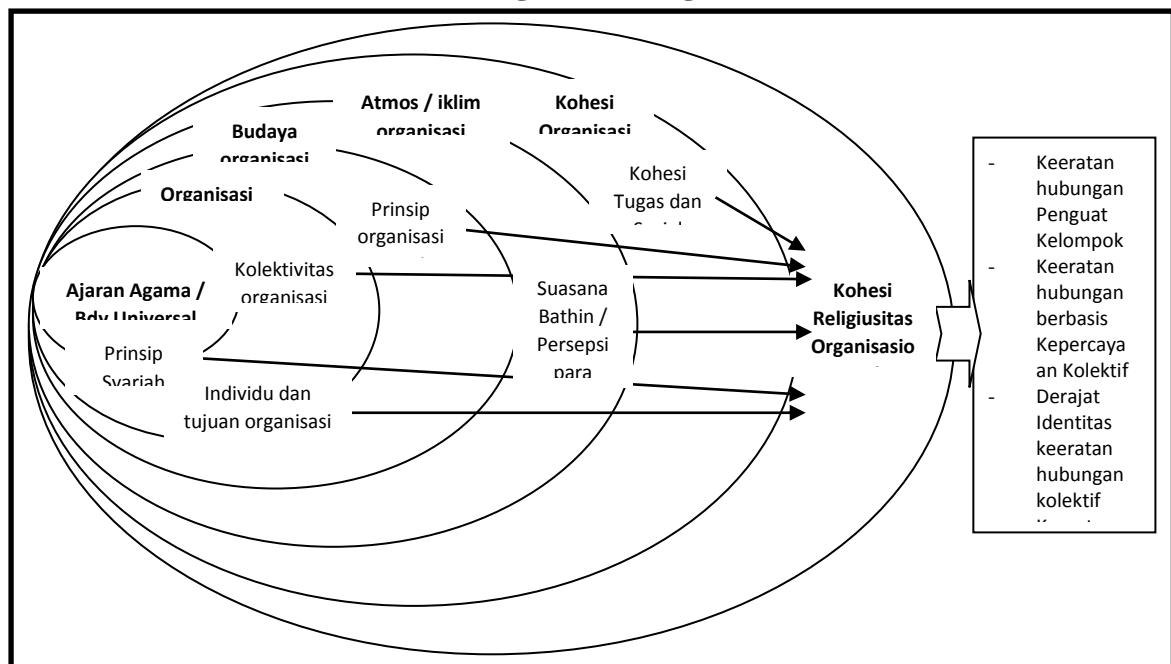
Iklim organisasi oleh Nistrom dalam King dan Anderson (1995), dapat dilihat sebagai atmosfer yang berlaku dan suasana bathin dalam kelompok atau organisasi, sedangkan menurut Schein (1992), sebagai perasaan seseorang yang dibawakan oleh individu ke dalam kelompok melalui tata ruang fisik dan cara-cara baru yang memungkinkan anggota organisasi untuk berkomunikasi satu sama lain, berkomunikasi dengan pelanggan, atau dengan orang lain di luar organisasi.

Kohesivitas, menurut Saragih dan Akib (2004), merupakan keterikatan anggota kelompok terhadap kelompok dan anggotanya merasa selalu menjadi bagian dari kelompoknya. Mengenai kelompok, Tuckman (1965), mengemukakan, bahwa terdapat 5 (lima) tahapan pembentukan kelompok, yaitu : tahap pembentukan (*forming*), tahap mengacau (*Storming*),

tahap membuat norma (*norming*), tahap mewujudkan (*performing*), dan tahap menyesuaikan (*adjouring*).

Erez dan Somech, (1996), kolektivis melihat diri mereka sebagai bagian integral dari hubungan sosial dan lebih memungkinkan untuk mendefinisikan diri mereka sebagai terikat kepada orang lain dalam jaringan sosial mereka, Erez dan Somech (1996) menyatakan bahwa bekerja dengan orang lain dan membuat kontribusi kepada kinerja kelompok membantu kolektivis memenuhi diri saling tergantung dan memperkuat identitas kelompok mereka.

Gambar 4.
Kohesi Religiusitas Organisasional



Sumber : dikembangkan untuk keperluan tulisan ini

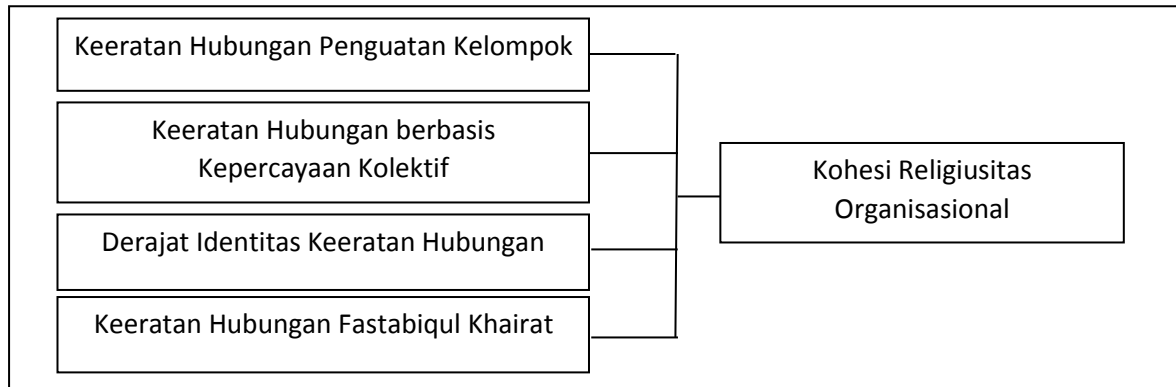
D. Proposisi Kohesi Religiusitas Organisasional

Berdasarkan kajian-kajian teori sebelumnya, maka dapat disampaikan proposisi sebagai berikut :

Kohesi Religiusitas Organisasional merupakan keeratan hubungan dalam lingkungan kerja yang berkembang pada para anggota dalam suatu organisasi yang bercirikan adanya Penguatan Kelompok, Kepercayaan Kolektif, Derajat Identitas Kolektif, dan Keeratan Hubungan Fastabiqul Khoirat.

Gambar 5.

Gambar Piktograf Proposisi



Sumber : dikembangkan untuk keperluan tulisan ini

KESIMPULAN

- 1) Kohesivitas organisasional merupakan salah satu aspek modal sosial yang perlu dibangun oleh manajemen agar muncul suatu iklim yang positif melalui persepsi yang terbangun atas keeratan dan kebersamaan dari masing-masing individu yang ada di dalam organisasi tersebut
- 2) Kohesivitas organisasi merupakan keeratan yang ada dalam organisasi berkait dengan adanya atraksional diantara masing-masing anggota untuk saling tarik menarik yang mengakibatkan adanya kemauan dan kesediaan para individu untuk tetap berada di dalam organisasi tersebut dan bahkan mau dan bersedia memunculkan keterlibatan yang tinggi pada organisasi.
- 3) Kohesivitas organisasi pada dasarnya terbentuk secara bersama-sama antara kohesi tugas dan kohesi sosial. Kedua kohesi ini saling mensupport untuk meningkatkan kualitas kohesi dalam organisasi
- 4) Namun demikian sangat memungkinkan bahwa kohesi organisasi ditingkatkan lebih lagi dengan memunculkan gagasan baru dalam kohesi, yaitu kohesi religiusitas
- 5) Kohesi religiusitas merupakan kohesi yang terbangun dari latar belakang karakter religiusitas pada masing-masing individu yang ada di dalamnya, sehingga disamping kohesi yang terbentuk atas orientasi tugas dan orientasi interaksi sosial, juga adanya interaksi yang dapat saling meningkatkan kualitas religiusitas masing-masing individu, sehingga semakin meningkatkan pula aspek tolong menolong dan keikhlasannya. Dengan demikian kohesi organisasional dapat lebih meningkat tidak saja sebesar kualitas kohesi yang terbentuk atas dasar kohesi tugas dan kohesi sosial, namun juga bersama dengan kohesi religius.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, P.K., 1988, *Culture and Climate For Innovation*, European Journal of Innovation Management, Vol 1, Number 1, pp.30-43
- Baldwin, T.T., Bedell, M.D., & Johnson J.L. 1997. The social fabric of a team - based M.B.A. program: Network effects on student satisfaction and performance. The Academy of Management Journal, 40, 1369-1397
- El Hawary D, Grais W and Iqbal Z (2004), *Regulating Islamic Financial Institutions: The Nature of the Regulated*, World Bank Policy Research Working Paper #3227.
- Erez, M., and Somech, A., 1996, *Is Group Productivity Los The Rule Or The Exception ? Effects Of Cultura And Group-Based Motivation*. Academy of management Journal, 39;1513-1537.
- Forrester, W.R., Tashchian, A., 2006, *Modeling the Relationship between Cohesion and Performance in Student Work Groups*, International Journal of Management Vol. 23 No. 3), pp. 458-464, Part 1 Sept 2006
- Kasali, R., 2005, *Paradigm Shift dan Budaya Korporat*, Manajemen Usahawan Indonesia No 03/TH.XXXIV Maret 2005
- Kasali, R., 2005. *Change ! Manajemen Perubahan dan Harapan*, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama
- Kasali, R., 2010, *Wirausaha Muda Mandiri*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Lawal, Y.O., 2010 , *Islamic Economics The Connerstone Of Islamic Banking*, Journal of Economics and Engineering, A z e r b a i j a n
- Mathieu, John E, and Dennis M. Zajac, 1990, *A Review and Meta Analysis of The Antasedents, Correlates, And Consequences of Organizational Commitment*, Spychological Buletin, Vol. 108 No 2, 171 – 194
- Newstrom, Jon W., 2007, *Organizational Behavior*, Human Behavior at work, USA. Mc. Graw Hill.
- Ochiwa, Orest, 2000. *A Study of the Organizational Climate of High and Low Adoper Elementary Schools is Saskatchewan*, http://www.ssta.sk.ca/research/school_improvement/rp27.htm, diakses 2 oktober 2003.
- Rivai, V., 2002, *Ekonomi Islam Sebagai Alat Penanggulangan Krisis Ekonomi Global, dalam Ekonomi Syariah, Konsep, Praktek & Penguatan Kelembagaannya*, MES, Pustaka Rizki Putra.

- Rudnyckyj, D, 2009, *Market Islam in Indonesia*, Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S) 15, no. SI (2009): S183-S201.
- Saragih, F.D., dan Akib, H., 2004, *Iklīm Organisasi Kreatif : Memahami Iklīm Organisasi sebagai Determinan Kreatif*, Manajemen Usaha Indonesia, No09 TH XXXIII September 2004.
- Schein, Edgar, H., (1992), *Organizational Culture and Leadership*, Jossey-Bass Publisher San Fransisco
- Schneider, B., Brief, A.P. and Guzzo, R.A., 1996, "Creating a climate and culture for sustainable change", *Organisational Dynamics*, Spring, pp. 7-19.
- Setia, A., 2011, *Mu'Āmala And The Revival Of The Islamic Gift Economy*, *Islam & Science*, Vol. 9 (Summer 2011) No. 1, by the Center for Islam and Science
- Setia, A., 2011, *Reviving an Economics for the Common Good: The Science of Earning in al-ShaybĀNĪ, al-GhazĀlĪ, and al-DimashqĪ*, *Islam & Science*, Vol. 9 (Winter 2011) No. 2,
- Tuckman, 1965, Developmental Sequence in small group, *psychological bulletin*, 63(6), 384-399.

BACIRO URBAN GREENHOUSE
“PENDEKATAN DESAIN PADA OPTIMALISASI PEMANFAATAN CAHAYA
MATAHARI DAN PENAMPUNGAN AIR HUJAN”

Beata Berliandika¹, Yulianto P. Prihatmaji²

¹*Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Islam Indonesia*

²*Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Islam Indonesia*

Email: ¹*beata.berliandika@yahoo.com*

ABSTRAK

Yogyakarta saat ini mengalami perkembangan yang berdampak pada laju pembangunan hunian dan komersial sebagai sarana penunjang hunian, sehingga menjadi pemicu berkurangnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Jumlah pemukiman yang tinggi memicu adanya peningkatan jumlah kebutuhan bahan pokok. Maka, perencanaan greenhouse merupakan sarana penunjang dari berbagai kegiatan pertanian maupun pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Yogyakarta, khususnya Baciro. Potensi lokasi sekitar yang telah mengembangkan kampung sayur dengan menanam tanaman hidroponik pada gang pemukiman mereka menjadi metode perancangan. Strategi perancangan dengan mengadakan urban farming, pasar, edukasi, online, dan community development untuk menjawab semua permasalahan yang ada di kawasan tersebut. Penerapan desain, yaitu sistem pertanian hidroponik maupun aquaponik dengan memanfaatkan air hujan yang ditampung di bak penampungan air hujan dan di suplai untuk penyiraman tanaman. Penerapan tersebut diwujudkan dengan penggunaan material atap acrylic/fiberglass sehingga panas matahari dapat masuk dan keluar dan dengan kemiringan atap 25-40 derajat agar air yang jatuh di atap langsung ke talang dan mengalir ke bak penampungan air hujan. Greenhouse memiliki banyak ventilasi di bagian fasad bangunan agar kelembapan dan panas di dalam bangunan tetap terjaga. Sistem penjualan dan pembelian pada greenhouse menggunakan sistem online, sehingga masyarakat dapat langsung mengambil barang yang telah dipesan di lokasi melalui jalur drive thru.

Kata Kunci : Pasar, Greenhouse, Urban Farming, Green Architecture, Baciro

ABSTRACT

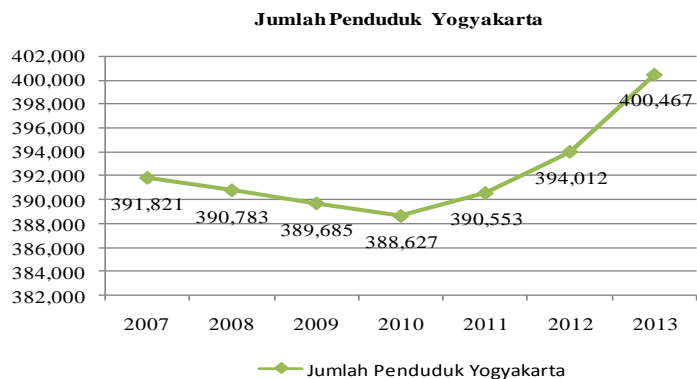
Yogyakarta is currently experiencing development that impact on the pace of residential and commercial development as a means of supporting residential, so it triggers the reduction of green open space in urban areas. A high number of settlements that triggers an increase in the number of basic material needs. Thus, the greenhouse is a means of supporting the planning of agricultural activities and food needs people of Yogyakarta, especially Baciro. Potential locations that have developed around the village by planting vegetable crops hydroponically in a residential alley them into design methods. Designing strategies to conduct urban farming, market, education, online, and community development to address all the problem that exist in the region. Application of design, namely hydroponics and aquaponics farming system by utilizing the rainwater that collected in rainwater tanks and supply for watering plants. Is realized by the application of roofing material use acrylic/fiberglass so that the sun can get in and out and with a roof slope of 20-40 degrees for the water that falls on the roof directly into gutters and flow into the rainwater tank. Greenhouse has many vents in the façade of the building so that the humidity and heat in the building is maintained. System sales and purchases in the greenhouse using the online system, so that people can directly take the goods that have been ordered on site through the drive-thru lane.

Keywords: Market, Greenhouse, Urban Farming, Green Architecture, Baciro

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pembangunan hunian dan komersial sebagai sarana penunjang hunian tidak terkendali karena pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hunian dan kebutuhan pendukung lainnya yang menjadi salah satu pemicu berkurangnya ruang terbuka hijau di suatu kawasan perkotaan khususnya kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan bagian dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 32,50 km² dengan jumlah penduduk 400.467 jiwa. Penduduk menjadi obyek maupun subyek pembangunan yang sangat dominan (badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta, 2013).

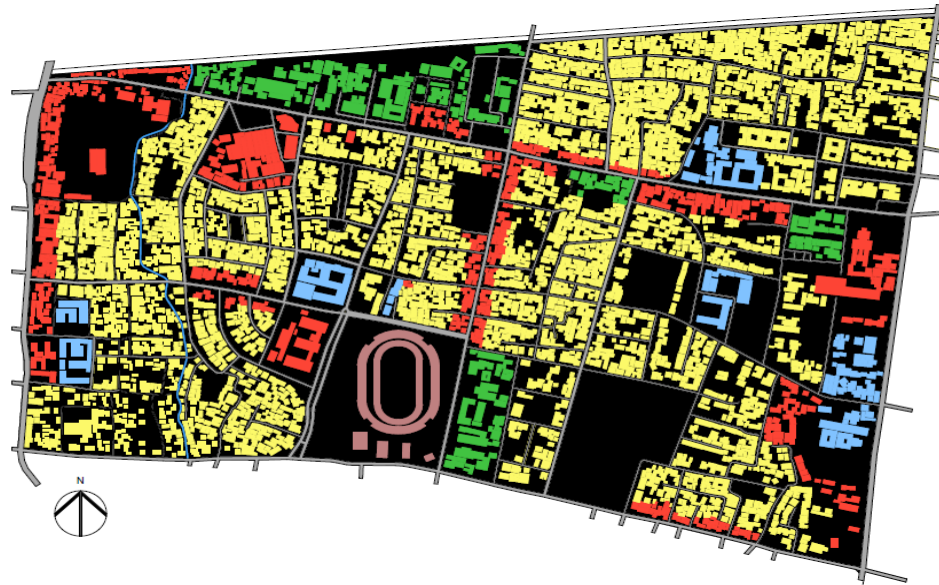
Pada Gambar 1 dapat dilihat penurunan jumlah penduduk dari tahun 2007 hingga tahun 2010, namun pada tahun 2010 hingga tahun 2013 jumlah penduduk meningkat pesat. Laju urbanisasi yang tidak terencana dengan baik menyebabkan ledakan jumlah penduduk di kota. Ledakan penduduk yaitu pertumbuhan penduduk di suatu wilayah secara cepat tidak terkendali. Hal ini yang mengakibatkan peningkatan jumlah hunian, bangunan komersial, kurangnya ruang terbuka hijau, timbulnya kemacetan, dan peningkatan jumlah kebutuhan pokok/pangan masyarakat. Hal ini terjadi pada lokasi perancangan yang terletak di Baciro, Yogyakarta.



Gambar 1 Jumlah Penduduk Yogyakarta Tahun 2007-2013

Sumber : (Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta, 2013)

Baciro merupakan kawasan yang didominasi oleh area pemukiman, selain itu juga terdapat bangunan komersial, pendidikan, sarana olahraga, perkantoran seperti pada Gambar 2. Area pemukiman di kelilingi area komersial di sepanjang jalan utama Baciro. Jumlah pemukiman yang tinggi di kawasan ini memicu adanya peningkatan jumlah kebutuhan pokok/pangan. Pada suatu area pemukiman dilengkapi dengan adanya pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan berlangsungnya kehidupan dalam suatu kawasan.



LEGENDA :

■ PERKANTORAN	■ SARANA OLAHRAGA
■ PEMUKIMAN	■ KOMERSIAL
■ PENDIDIKAN	

Gambar 2 Blok Umum Baciro

Sumber : Modifikasi New Green City, 2014

Kota Yogyakarta memiliki potensi strategis untuk perkembangan kota karena letaknya yang di kelilingi oleh gunung, bukit, hutan, lautan, dan lahan pertanian. Semakin berkembang pembangunan di Kota Yogyakarta menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Penurunan kualitas udara juga terjadi akibat berkurangnya lahan pertanian seperti pada kawasan Baciro yang menjadi fokus perancangan perkotaan.

Pertanian perkotaan menjadi salah satu pemenuh kebutuhan pangan warga dari pembibitan hingga pemanenan yang akan didistribusikan ke warga dan dijual kepada masyarakat secara segar. Massa penanaman akan membutuhkan pencahayaan dan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman walaupun dimusim kemarau. *Greenhouse* digunakan untuk percobaan budidaya, pemupukan, ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, hidroponik, penanaman tanaman diluar musim tanam (Munir, M.S, 2010)

Pernyataan keberadaan pasar yang kurang memadai, berkurangnya lahan pertanian perkotaan, dan keberadaan komunitas pasar organik ini menjadikan rancangan *urban green house* yang dapat memenuhi kebutuhan pangan warga dan meningkatkan perekonomian warga Baciro. Perancangan bangunan ini menerapkan penjualan langsung secara online karena kemajuan teknologi online saat ini dan masa mendatang akan berkembang pesat. Hal ini akan

meningkatkan penjualan dan mempermudah manusia mendapatkan sesuatu dan merancang *urban green house* yang menggunakan sistem hidroponik dengan memaksimalkan pencahayaan dan pemanfaatan air hujan sebagai dasar perancangan.

Tujuan dari perancangan Baciro Urban Greenhouse, yaitu dapat memenuhi pangan warga dengan menjual hasil pertanian organik yang segar dan dapat menyediakan hasil pertanian untuk dijual secara segar dengan memperhatikan sirkulasi pengelola agar mudah saat panen atau penanaman tanaman dan bekerjasama dengan warga yang mengembangkan pertanian vertikal untuk menjual hasil pertanian dari green house untuk meningkatkan perekonomian dan kebutuhan pangan warga.

METODE PENELITIAN

Pada perancangan Baciro Green House, metode yang digunakan dimulai dari penelusuran masalah, perumusan sampai pengujian perancangan, yaitu :

Metode Penelusuran Masalah

Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung terhadap eksisting kawasan dan pasar pertanian organik sehingga menambah informasi terhadap permasalahan kawasan secara aktual. Studi literatur, mencari dan menemukan keterkaitan dengan teori ilmu sebagai acuan, yaitu pasar organik, pertanian vertikal, teknik pengairan, dan teknologi online system.

Metode Pengumpulan Data

Survey lanjutan dengan melakukan wawancara kepada anggota komunitas pasar pertanian organik, warga Baciro, dan pengamatan secara langsung terhadap aspek yang berkaitan dengan desain.

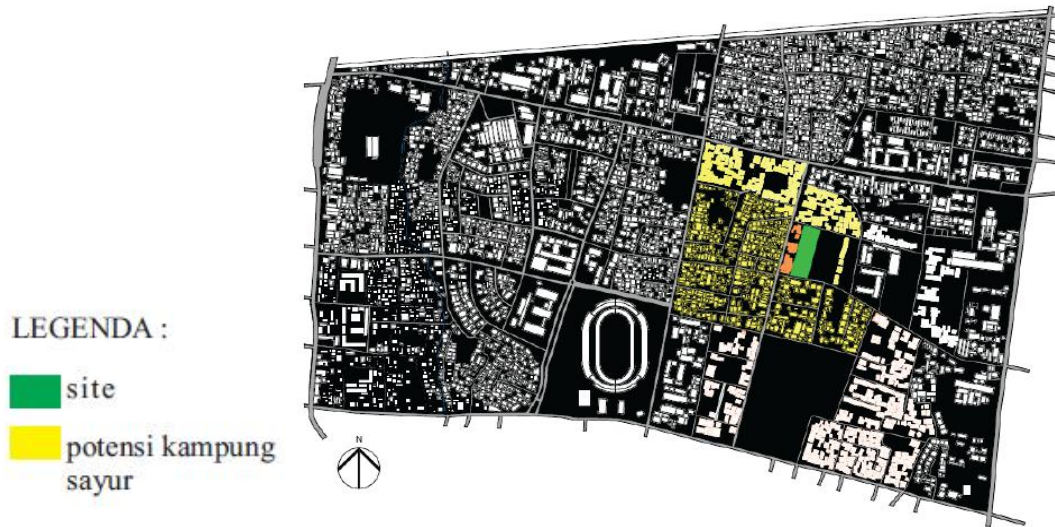
Metode Perumusan Konsep

Merumuskan konsep perencanaan dan perancangan melalui metode induktif dan metode deduktif yang akan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan atau membahas data dengan referensi.

Metode Pengujian

Metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengujian pada pemaksimalan pencahayaan matahari yang masuk ke dalam bangunan.

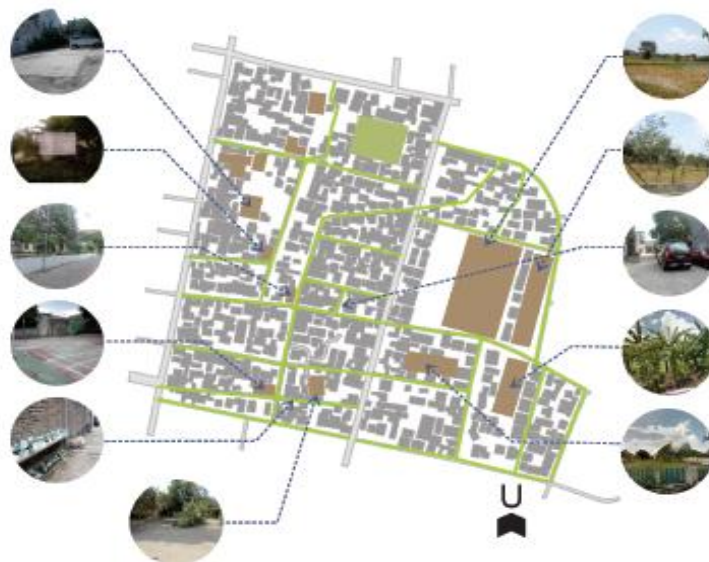
HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 3 Kampung Sayur Baciro

Sumber : Analisis Penulis, 2016

Letak bangunan berada di antara pemukiman warga (Gambar 3) berdekatan dengan kampung sayur sehingga integrasi masyarakat terhadap bangunan terjalin dengan baik. Perancangan *Baciro Urban Greenhouse* menjadi peningkatan perekonomian warga sekitar dengan adanya keikutsertaan dalam penanaman. Seperti pada Gambar 4 menjabarkan letak ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman warga.



Gambar 4 Ruang Terbuka hijau

Sumber : Analisis Penulis, 2016

Konsep Baciro Urban Greenhouse

Masyarakat Baciro juga memiliki peran pada greenhouse ini seperti skema Gambar 5 yang menjelaskan masyarakat dapat mengambil bibit untuk pembesaran di greenhouse yang akan warga jual dengan membagi profit 40% untuk *greenhouse* dan 60% untuk warga yang menjual.

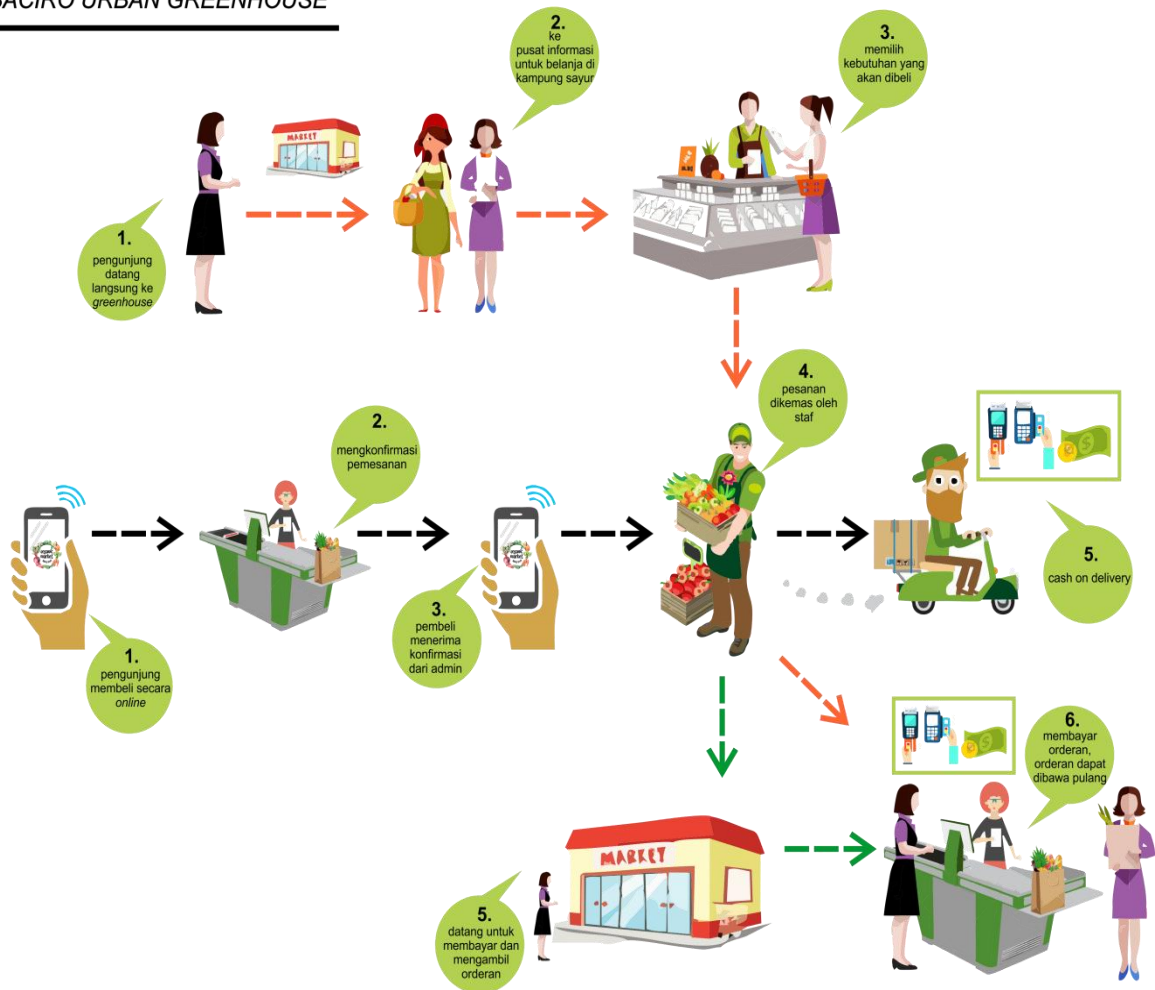


Gambar 5 Kepemilikan

Sumber : Analisis Penulis, 2016

Pembelian sayuran dan kebutuhan pangan pada pasar di *urban greenhouse* melalui pemesanan online atau datang langsung ke pasar. Pembeli dapat membeli sayur melalui aplikasi online seperti Gambar 6. Kemudian akan diarahkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen pasar organik Baciro. Pembayaran dilakukan menggunakan ATM atau *Internet Banking* apabila membeli melalui online, atau membayar cash di pasar maupun pada kurir antar saat barang sampai di tempat.

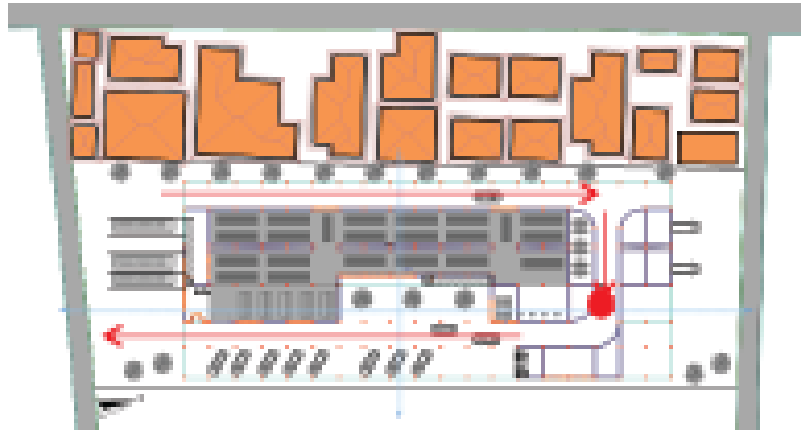
ALUR PEMBELANJAAN
BACIRO URBAN GREENHOUSE



Gambar 6 Alur Pembelanjaan

Sumber : Analisis Penulis, 2016

Pembeli dapat membeli sayuran secara online dengan memilih pesanan melalui aplikasi *Urban Greenhouse* dan pesanan dapat diantar ke tempat atau pembeli dapat juga mengambil pesanan ke *Greenhouse* melalui jalur *Drive Thru* seperti Gambar 7. Berikut denah alur drive thru

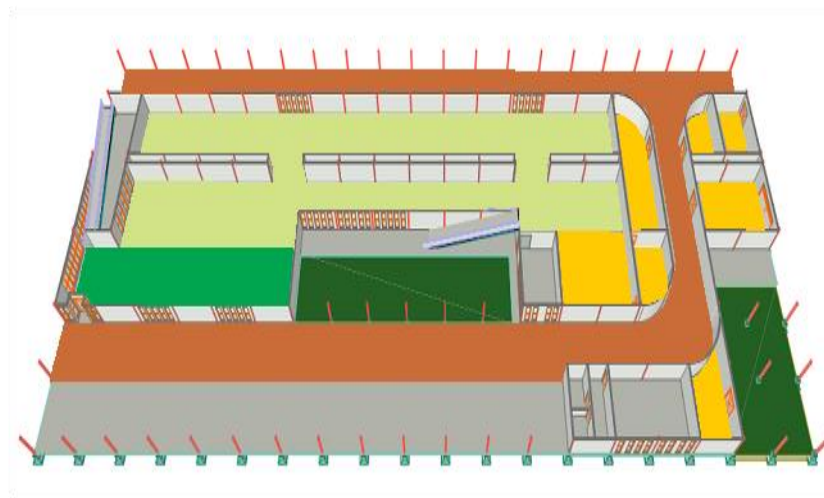


Gambar 7 Jalur Drive-Thru

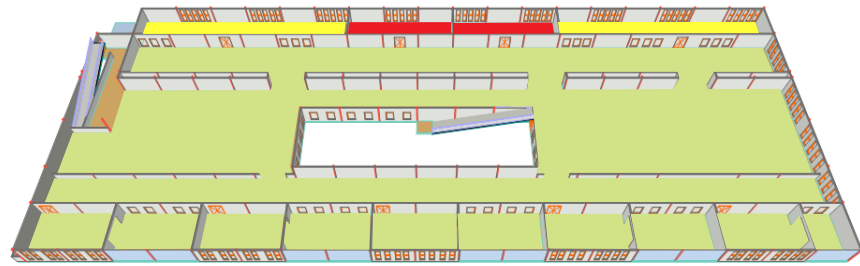
Sumber : Analisis Penulis, 2016

Desain Arsitektur *Greenhouse*

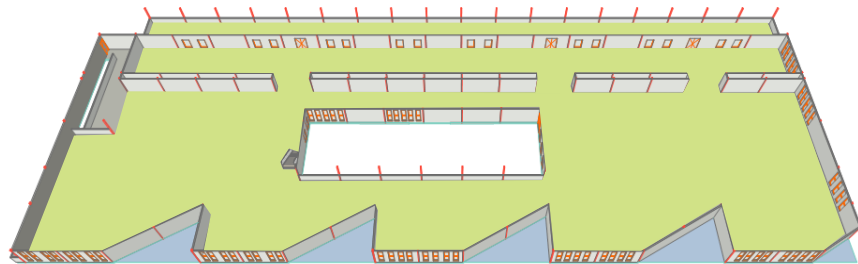
Rancangan interior difokuskan pada ruang pasar, pertanian, office dan laboratorium. Hal ini berdasarkan analisis aktivitas pengunjung dan pengelola. Berikut Gambar 8 yang menjelaskan layout ruang pada bangunan.



(a) LANTAI I



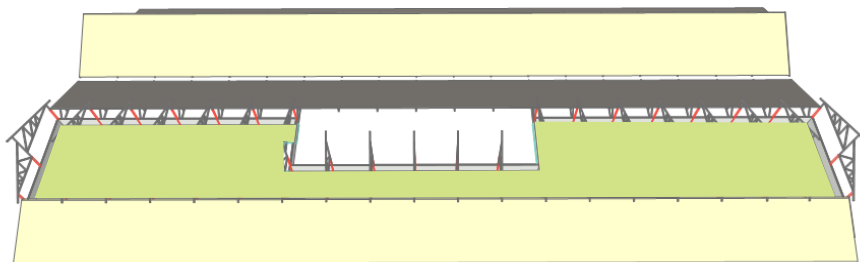
(b) LANTAI 2



(c) LANTAI 3

KETERANGAN :

- Sirkulasi
- Office
- Pertanian
- Laboratorium
- Pasar
- Edukasi
- Servis area



(d) LANTAI 4

Gambar 8 Denah Perlantai

Sumber : Analisis Penulis, 2016

Hasil Rancangan

Selubung bangunan dimaksimalkan untuk penanaman tanaman pertanian organik pada bagian fasad dengan menanam tanaman yang masa tanamnya berbeda agar pada saat tanaman pertama sudah mulai dipanen, fasad bangunan tetap tertutup oleh tanaman lainnya sehingga tidak terlihat gersang seperti Gambar 9 dan Gambar 10, dinding menggunakan acrylic/fiberglass agar cahaya yang masuk maksimal. Dinding dan atap rumah kaca terbuat dari *polyethylen* yang tembus cahaya sehingga panas matahari dapat masuk dan keluar melewatinya. Pada siang hari, sekitar 85% sinar matahari yang masuk terperangkap di dalam rumah kaca dan menjadi panas. Kerangka rumah kaca terbuat dari aluminium atau besi yang mampu menahan beban atap. Pada negara tropis, memiliki perbedaan **pengoprasian rumah kaca, yaitu energi untuk pemanas lebih sedikit sedangkan untuk keperluan ventilasi lebih besar** (Setiawan, 2005).



Gambar 9 Green Wall

Sumber : Analisis Penulis, 2016



Gambar 10 Dinding Fasad

Sumber : Analisis Penulis, 2016

Interior bangunan merupakan area farming dengan beberapa sistem penanaman seperti Gambar 11 dan 12.



Gambar 11 Farming Indoor

Sumber : Analisis Penulis, 2016



Gambar 12 Farming Outdoor

Sumber : Analisis Penulis, 2016

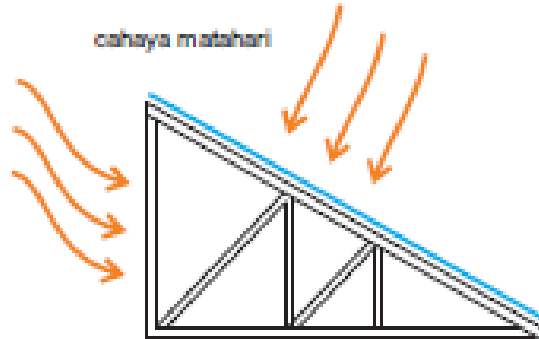
Struktur greenhouse menggunakan profil baja H dengan dimensi 200/100 seperti Gambar 13. rangka atap dibuat segitiga untuk pemaksimalan penampungan air hujan.



Gambar 13 Struktur

Sumber : Analisis Penulis, 2016

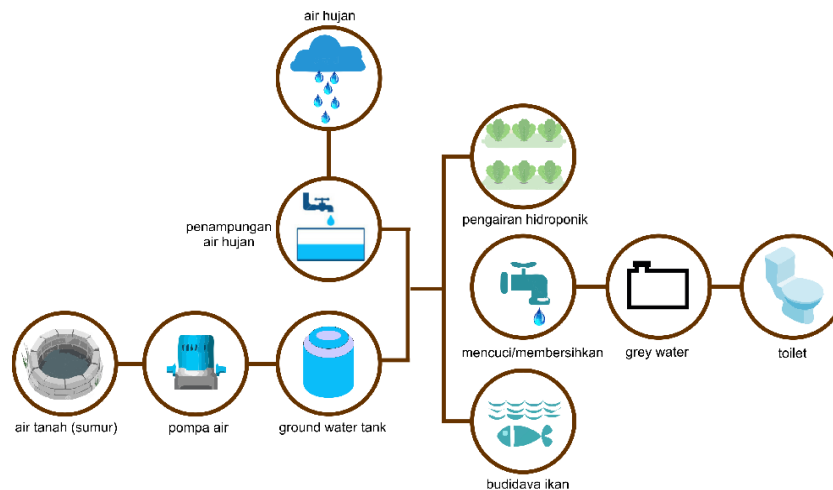
Atap bangunan berlevel antar truss untuk cahaya masuk dan penutup atap menggunakan *acrylic* atau *fiberglass* agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam bangunan (Gambar 14) untuk penyinaran secara maksimal di pagi hingga siang hari.



Gambar 14 Detail Atap

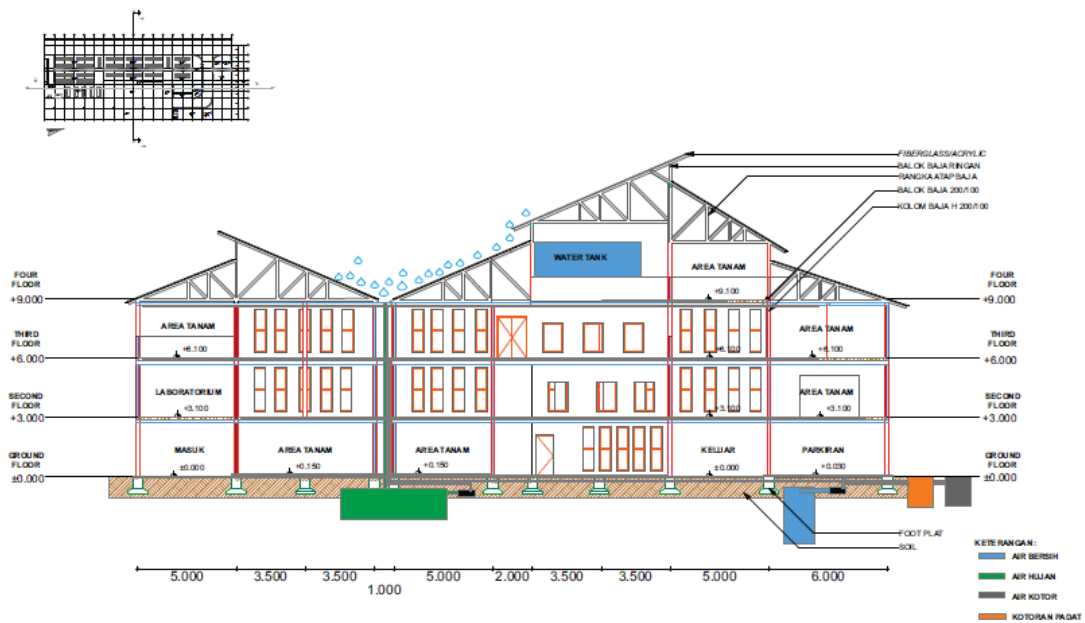
Sumber : Analisis Penulis, 2016

Sistem utilitas air pada bangunan, menggunakan sistem penampungan air hujan untuk didistribusikan ke penyiraman tanaman tiap lantai. Air yang telah digunakan di alirkan ke sumur resapan yang akan di buang ke ril kota (Gambar 15). Detail khusus pada bangunan yaitu, alur penampungan air hujan dan material yang digunakan pada penutup atap. Gambar 16 merupakan potongan bangunan yang memperlihatkan alur penampungan air hujan sampai pendistribusian.



Gambar 15 Utilitas Air

Sumber : Analisis Penulis, 2016



Gambar 16 Detail Utilitas Air

Sumber : Analisis Penulis, 2016

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan rancangan, maka penggunaan material acrylic sebagai penutup atap menjadi hal utama untuk memaksimalkan cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan. Pemanfaatan air hujan sebagai media penyiraman dengan menampung air hujan ke dalam bak penampungan air hujan menjadi pemilihan utama untuk bangunan *Green Architecture* karena tidak menggunakan air sumur untuk penyiraman tanaman. Kelembaban dalam bangunan dikendalikan oleh banyaknya ventilasi dan adanya pipa semprot yang menghasilkan percikan air di area tanam.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta. (2013). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Yogyakarta 2007-2012. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta.
- Munir, M.S., (2010). Tanah-Tanah Utama Indonesia. Karakteristik, Klasifikasi dan Pemanfaatannya. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya
- Setiawan, Indra. (2005). Pengaruh Perbedaan Ventilasi dan Pencahayaan Terhadap Pertumbuhan Tanaman Muda Individu di Dalam Rumah Kaca Tipe Tunggal. Buletin Agronom. 4.(1) : 8-14.

UPAYA DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN YANG HAKIKI DI NEGARA HUKUM PANCASILA

Derry Angling Kesuma

Email: kesumaderry@gmail.com

ABSTRAK

Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila adalah sebagai berikut: (a) Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi, (b) Pencegahan Korupsi di Sektor Publik, (c) Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, (d) Pengembangan dan Pembuatan Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi.

Dampak Terhadap Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila yaitu antara lain dapat diuraikan sebagai berikut, (a) Dampak di bidang ekonomi yaitu, (1) lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, (2) penurunan Produktivitas, (3) rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, (4) meningkatnya hutang negara. (b) Dampak terhadap penegakkan hukum yaitu, (1) fungsi pemerintahan mandul, (2) hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penegakkan Hukum, Mereduksi.

ABSTRACT

Steps That Can Be Taken In Reducing Corruption in the State of Law Pancasila is as follows: (a) Establishment of Anti-Corruption, (b) Prevention of Corruption in the Public Sector, (c) Prevention of Social and Community Empowerment, (d) Development and Instrument Making Anti-Corruption Law.

Impact on Behavior of Corruption in the State of Law Pancasila among others, can be described as follows, (a) the impact on economics, namely, (1) the slowing of economic growth and investment, (2) a decrease in productivity, (3) the poor quality of goods and services to the public, (4) increase of the state debt. (B) Impact on the rule of law, namely, (1) a government function barren, (2) the loss of people's confidence in state institutions.

Keywords: Corruption, Law Enforcement, Reduce.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan masalah sosial yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptur yang semakin canggih ataupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam negara yang paling banyak korupsinya, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum di dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. Sebab mereka sendiri sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama di dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Korupsi bukanlah kejahatan baru, melainkan kejahatan lama yang sangat pelik. Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, korupsi juga terjadi di negara-negara lain.⁴⁶ Bahkan, sekarang ini korupsi sudah dianggap sebagai masalah internasional.⁴⁷ Pemberantasan korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Secara umum tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Jika korupsi menjadi suatu budaya, tindak pidana ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa. Bahkan, menurut Romli Atmasasmita, korupsi selain menyengsarakan rakyat, juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.⁴⁸

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya di salin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *Corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴⁹ *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung dari perbuatan korup, penyuapan.⁵⁰ Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵¹ Sebagai pengertian yang buruk, busuk, rusak, kejahatan moral, kelakuan yang menyimpang, penyuapan, hal itu dapat di jumpai dalam Kramers' Engels Woordenboek oleh F. Prick van Welly yang menyebutkan bahwa “*corruption...., bedorvenheid verdorvenheid, verdorvenheid; verknoeing of verminking;*

⁴⁶ W. Tangun Susila dan I.B. Surya Dharma Jaya, “Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, (Makalah disampaikan pada Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, Bali, 14-15 Juni 2006), hlm. 2.

⁴⁷ Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Resolusi PBB Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, (*United Nations Convention Against Corruption*) telah terjadi perubahan paradigma yang signifikan dalam strategi pemberantasan korupsi. Salah satunya yaitu korupsi dalam era globalisasi bukan lagi permasalahan nasional akan tetapi merupakan permasalahan internasional. Lihat Romli Atmasasmita, “Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia”, (Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intensifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006), hlm. 2.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, “Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia”, (Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pembentukan Pengadilan Korupsi yang diselenggarakan oleh KHN dan BPHN, Jakarta, 30 Juli 2002), hlm. 1.

⁴⁹ Andi Hamzah (i). *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7

⁵⁰ S. Wojowasito. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT. Ichtiar baru, Jakarta 1999. Hlm. 128.

⁵¹ Ibid.

omkoping.⁵² Dalam arti sosial tampaknua masyarakat memang mengososiasikan korupsi sebagai penggelepan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/ unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikaulifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena korupsi merupakan pelanggaran HAM (Hak sosial dan hak ekonomi). Senada dengan Romli, Muladi menyatakan bahwa korupsi juga merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini disebabkan sifat korupsi yang sudah sistimatik, endemik, berakar (*ingrained*) dan *flagrant* yang mengakibatkan kerugian finansial dan mental.⁵³ Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*), bukan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini disebabkan, menurut Hamzah karena korupsi itu terdapat pada setiap zaman, waktu, negara dan masyarakat, sama halnya dengan pencurian. Akan tetapi, di antara kejahatan biasa tersebut terdapat yang luar biasa, seperti korupsi BLBI.⁵⁴ Dengan demikian, korupsi disebut *extra ordinary crime* karena korupsi yang dilakukan dalam jumlah yang besar dan dapat merugikan keuangan negara serta melanggar hak sosial dan hak ekonomi.

Permasalahan korupsi di Indonesia dapat dikatakan sudah dalam taraf yang membahayakan. Korupsi terjadi hampir di seluruh lapisan, baik di lembaga pemerintah, perwakilan rakyat, peradilan, pengusaha maupun masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik, artinya tindak pidana itu dilakukan di semua lembaga negara dari tingkat paling rendah sampai yang paling tinggi. Selain itu, korupsi juga terjadi di lembaga penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum. Hal ini berarti korupsi memiliki akibat yang sangat luas. Menurut Muladi, dampak luas korupsi terhadap Indonesia berupa:

⁵² F. Prick van Welly, *Eerste Deel Engels Nederland, Nijmegen*, 1946, hlm. 95.

⁵³ Muladi, "Konsep Total *Enforcement* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum", (Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intersifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006), hlm. 14; Menurut Merah Darwin permasalahan korupsi bukan hanya kerugian keuangan negara, akan tetapi korupsi merusak citra dan wibawa serta kredibilitas negara dimata masyarakat dunia. Keadaan ini berakibat para investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia keluar dari Indonesia, dan tidak adanya penanaman modal baru dari investor asing. Lihat Merah Darwin, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", (makalah disampaikan sebagai pemenuhan persyaratan tes lanjutan calon Hakim Ad- Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2 Agustus 2005), hlm. 3.

⁵⁴ Andi Hamzah, "Upaya Pemberantasan Korupsi Sebagai *Extraordinary Crime* dihubungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", (Makalah disampaikan pada Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Intersifikasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006), hlm. 7. Menurut Andi Hamzah bahwa korupsi BLBI termasuk kejahatan yang luar biasa (korupsi *extraordinary crime*) kerana jumlahnya besar (trilyunan jumlahnya), sedangkan korupsi yang dilakukan polisi lalu lintas dijalan, jembatan timbangan, KTP, pungli-pungli dan lain-lain adalah korupsi *ordinary crime*.

- a. merendahkan martabat bangsa di forum internasional.
- b. menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing;
- c. bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), baik di sektor pusat maupun daerah;
- d. bersifat transnasional dan bukan lagi masalah per negara;
- e. cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan;
- f. merusak moral bangsa (*moral and value damage*);
- g. menghianati agenda reformasi;
- h. mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
- i. mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- j. menodai supremasi hukum (*jeopardizing the rule of law*);
- k. semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain, seperti “*money laundering*”;
- l. bersifat terorganisasi (*organize crime*) yang cenderung transnasional;
- m. melanggar HAM.⁵⁵

Sebenarnya, korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia karena korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Salah satu faktor yang bisa memulai terjadinya korupsi adalah ketika orang mulai mengadakan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, sebagaimana dikatakan oleh Onghokham sebagai berikut.

Korupsi hanya ada ketika orang mulai mengadakan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, sesuatu yang dalam konsep tradisional tidak terdapat. Masalah penjualan jabatan juga sama sekali bukan merupakan masalah baru. Hal ini sudah diperkenalkan pada masa *VOC* dan kemudian dipraktekkan di dalam kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dengan demikian, lahirlah konsep bahwa jabatan umum dalam suatu negara adalah juga sumber penghasilan. Dari sanalah sebenarnya gejala korupsi bisa berjalan.⁵⁶

Akan tetapi, hingga saat ini Indonesia masih belum dapat memberantas korupsi, bahkan korupsi semakin meningkat. Keadaan ini mengakibatkan Indonesia disebut sebagai salah satu “Negara Terkorup di Dunia”, hal ini dapat dilihat pada *Corruption Perception Index*.

⁵⁵ Muladi, Op., cit Hlm. 1-3

⁵⁶ Onghokham, “Tradisi dan Korupsi”, dalam Majalah *Prisma*, (2 Februari 1983), hlm. 3. Korupsi sudah ada sejak manusia ada, korupsi dalam semua bentuknya bukan monopoli suatu negara. Korupsi di Cina, tempat para birokrat “menjual kekuasaan administrasi mereka”, tidak ada bedanya dengan korupsi di Eropa, tempat partai-partai politik mendapat komisi dalam jumlah sangat besar dari proyek-proyek pemerintah. Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen sistem Integritas Nasional)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 35.

Berdasarkan survei *Corruption Perception Index* pada tahun 2006, Indonesia merupakan negara paling korup dan berada di peringkat 7 dari 163 negara. Nilai *Corruption Preseption Index* (CPI) Indonesia ternyata 2.4. lebih rendah daripada negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Indonesia berada dalam satu peringkat dengan Azerbaijan, Burundi, Central African Republic, Ethiopia, Papua New Guinea, dan Togo, dan Zimbabwe yang merupakan negara yang dilanda konflik.

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/L/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk WvS Hindia Belanda (KUHP kita sekarang) juga tidak dijumpai istilah korupsi (*coruptie* atau *corruptien*). Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya.

Demikian juga istilah tindak pidana korupsi tidak dikenal dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1858 tersebut. Istilah tindak pidana korupsi yang pertama digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita ialah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpepu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Perpepu tersebut dulu sering disebut dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi 1960 dan berfungsi sebagai perangkat hukum pidana tentang korupsi untuk menggantikan kedudukan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Perpepu/013/1958 tersebut.

Di dalam Pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat AD tersebut perbuatan korupsi dibedakan menjadi dua, yakni (1) perbuatan korupsi tindak pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya. Menurut Pasal 2, perbuatan korupsi pidana ada tiga macam yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Pasal 209,210,418,419, dan 420 KUHP.

Dalam tiga macam perbuatan korupsi pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi pidana terjadi dalam hal apabila si pembuat melakukan kejahatan atau pelanggaran yang (1) merugikan negara atau, (2) yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, atau (3) tindak pidana Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini, dan (4) Pasal, 209,210,418,419, dan 420 KUHP.

Sedangkan perbuatan korupsi lainnya (Pasal 3) dibedakan menjadi dua macam yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara tau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan yang melawan hukum meperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Jadi, perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Oleh karena itu hukumnya bersifat perdata, tidak diancam, dan tidak dijatuhkan pidana, maka untuk mengembalikan kerugian negara, dilakukan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (BKPHB). Upaya BKPHB menyita dan merampas harta benda perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (Pasal 12) dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tinggi (Pasal 18 ayat 1). Selanjutnya Pengadilan Tinggi (PT) dapat menjatuhkan putusan dengan menghukum perbuatan dengan merampas harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut (Pasal 25 ayat1).

Dalam penjelasan Umum Perpepu No. 24 Tahun 1960 itu juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatigedaad* sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 BW. Pasal tersebut merumuskan bahwa “Tiap perbuatan

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".⁵⁷

Sesuai dengan amanat Bab III tentang Ketentuan Peralihan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", pada tanggal 27 Desember 2002 diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁸ Undang-Undang ini juga mengatur kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Adanya penggantian norma hukum pemberantasan korupsi di atas menunjukkan arah kebijakan yang sama, yakni melakukan perbaikan norma hukum agar upaya pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Di samping itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (KMK, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003).

Dari paparan di atas terdapat hal yang penting, yakni dibentuknya sebuah lembaga *Independen*⁵⁹ yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut bernama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK dibentuk dengan misi utama melakukan penegakan hukum, yakni dalam hal pemberantasan korupsi. Dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dianggap belum mampu memberantas korupsi.⁶⁰ Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dan independen serta bebas dari kekuasaan mana pun. Selain itu, dengan semakin canggihnya cara orang melakukan korupsi, badan penegak hukum konvensional semakin tidak mampu mengungkapkan dan membawa kasus korupsi besar ke pengadilan.⁶¹

⁵⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Penerbit Paramita, 1999, hlm. 346.

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30, LN No 137, Tahun 2002, TLN No. 4250.

⁵⁹ "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan...*, *op. cit.*, Pasal 3.

⁶⁰ Teten Masduki dan Danang Widoyoko, "Menunggu Gebrakan KPK", *Jantera*, (Edisi 8 Tahun III, Maret 2005): 41.

⁶¹ Hal ini antara lain dikemukakan oleh Jeremy Pope dalam Jeremy Pope, *op. cit.*, hlm. 177.

Secara khusus urgensi pembentukan KPK dapat dilihat dari pokok-pokok pikiran pembentukan KPK. Dalam pokok pikiran tersebut dijelaskan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sistematis dan meluas tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian korupsi tidak dapat dilaksanakan hanya dengan menggunakan metode dan lembaga yang konvensional, tetapi harus dengan metode baru dan lembaga baru.⁶²

KPK hadir sebagai lembaga yang memiliki tugas yang sangat besar. Masyarakat menumpukkan harapan pemberantasan korupsi kepada KPK. Oleh karena itu, KPK mempunyai kewenangan yang sangat besar, yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus atas kasus tindak pidana korupsi. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemberian kewenangan yang begitu luas, mengakibatkan KPK disebut-sebut sebagai *superbody*.⁶³

Pentingnya pembentukan lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi (*spcialized anti-corruption agencies*) juga dipersyaratkan dalam ketentuan internasional yakni Pasal 6 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi 2003 yang berbunyi sebagai berikut.

Article 6 (1)

Preventive Anti-Corruption Body or Bodies

“Each State Party shall, in Accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as:”

⁶² Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta, Percetakan Negara RI, 2002), hlm. 40.

⁶³ Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang menuju KPTPK*, (Jakarta: Gerak, 2004), hlm. 65. Menurut Indriyanto Seno Adji, KPK merupakan institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki institusi lainnya. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Oemar Seno Adji dan rekan, 2006), hlm. 44-45.

“Setiap negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan, untuk mencegah korupsi dengan cara-cara seperti:”

Selain itu, dengan dibentuknya lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi (*specialized anti-corruption agencies*) terdapat beberapa keuntungan, yakni⁶⁴

- *A high degree of specialization and expertise can be achieved;*
- *A high degree of autonomy can be established to insulate the institution from corruption and other undue influences;The institution will be separate from the agencies and departments that it will be responsible for investigating;*
- *A completely new institution enjoys a "fresh start", free from corruption and other problems that may be present in existing institutions,*
- *It has greater public credibility,*
- *It can be afforded better security protection;*
- *It will have greater political, legal and public accountability;*
- *There will be greater clarity in the assessment of its progress, successes and failures; and*
- *There will be faster action against corruption. Task-specific resources will be used and officials will not be subject to the competing priorities of general law enforcement, audit and similar agencies.*

Ketentuan tersebut mengisyaratkan pentingnya lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, bukan hanya di Indonesia. Badan anti korupsi yang independen merupakan suatu usulan reformasi yang populer di negara-negara berkembang⁶⁵ walaupun tidak menutup kemungkinan negara-negara yang maju memiliki lembaga tersebut. Badan anti korupsi terdapat pula di berbagai negara, antara lain, Australia, Hongkong, Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, RRC, Vietnam, Filipina, Mesir, Ekuador, Latvia, Lithuania, dan Botswana.⁶⁶

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan yang memiliki

⁶⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Global Programme Against Corruption: Un Anti-Corruption Toolkit*, (Vienna: UN, 2004), hlm. 89.

⁶⁵ Susan Rose-Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 222.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika: 2005), hlm. 7 dalam buku tersebut Andi Hamzah hanya melakukan perbandingan atas negara: Australia, Hongkong, Malaysia, Singapura dan Thailand.

peluang tinggi, untuk melakukan korupsi.⁶⁷ Dalam banyak kasus, korupsi sering melibatkan pejabat tinggi, elite politik, dan pelaku ekonomi.⁶⁸ Situasi ini menyebabkan kejaksaan atau kepolisian sering tidak leluasa untuk menegakkan hukum.⁶⁹ Hal ini terjadi karena dua lembaga itu tidak independen. Selain itu, juga terdapatnya korupsi di dalam tubuh kejaksaan dan kepolisian, bahkan jaksa dan polisi yang sebelumnya menangani masalah korupsi, pada akhirnya menjadi seorang tersangka korupsi atas kasus yang ditanganinya. Kenyataan ini, pada akhirnya membuat masyarakat tidak percaya kepada lembaga tersebut.

PERMASALAHAN

Menurut Klitgaard, Robert⁷⁰ bila korupsi telah mencapai tingkat *hypercorruption* akan membawa dampak yang mematikan. Sayangnya, korupsi jenis inilah yang biasanya kita jumpai dalam tubuh pemerintahan daerah berbagai negara di dunia. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mangacaukan insentif; kerugian politik, karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan. Kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ketangan orang yang tidak berhak.

Korupsi di Indonesia yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara sudah menyebar ke seluruh kehidupan masyarakat, dari birokrasi, pemerintah ke sistem peradilan dan sampai bidang legislatif. Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang masalah, untuk mengatasi masalah korupsi yang sudah merajalela ini, pada tahun 2002 dibentuk badan atau lembaga khusus, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi. Walaupun KPK merupakan lembaga baru masyarakat berharap besar terhadap kinerja KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis ingin mengetahui dan mendalami hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dapat diambil dalam mereduksi tindak pidana korupsi untuk menegakkan keadilan yang hakiki di negara hukum Pancasila serta dampak terhadap tindak pidana korupsi.

TUJUAN PENELITIAN

⁶⁷ Teten Masduki dan Danang Widoyoko, Op. cit., Hlm. 45.

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Klitgaard, Robert, dkk. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 7

Dalam menganalisis permasalahan yang ada, penulis berusaha untuk mencapai tujuan yang di inginkan yaitu, mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil dalam mereduksi tindak pidana korupsi untuk menegakkan keadilan yang hakiki di negara hukum Pancasila serta dampak terhadap tindak pidana korupsi.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan didukung metode penelitian yuridis empiris. Menurut Soetandjo Wignjosoebroto, metode penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal (doktrinal ⁷¹research), Kajian-kajian yang doktrinal lazimnya bermula dari upaya-upaya untuk membangun sistem hukum yang normatif-positivistik sebagai suatu model yang sempurna menurut imperativa-imperativa logika. Koleksi atau inventarisasi untuk mengompilasi bahan-bahan hukum akan segera dikerjakan, kemudian disusun ke dalam suatu tatanan normatif yang koheren (yang artinya tanpa mengandung kontradiksi-kontradiksi antar norma di dalamnya), tetapi juga mudah penelusurannya kembali.⁷²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung metode penelitian hukum empiris⁷³ Metode penelitian hukum normatif⁷⁴ adalah suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku-buku ilmiah, surat kabar,

⁷¹ Istilah doktrinal dan non-doktrinal ini dipakai oleh Soetandyo Wignjosoebroto dengan merujuk pada kepustakaan hukum... Soetandyo Wignjosoebroto, "Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya", dalam Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, *Widya Nukilan Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2005), hlm. 41.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian hukum empiris ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, cet. V, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 12 dan 14.

⁷⁴ Penelitian hukum kepustakaan meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. 2, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982), hlm. 51; Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian..., op. cit.*, hlm. 13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hlm. 15.

makalah hasil seminar, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan bacaan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁷⁵

Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridisnormatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer,⁷⁶ bahan hukum sekunder,⁷⁷ dan bahan hukum tersier⁷⁸

PEMBAHASAN

Teori Negara Hukum

Negara Hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan dapat dikatakan selalu aktual. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk tunduk kepada hukum (*subject to the law*).⁷⁹ Terdapat dua gagasan negara hukum di dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaat* dan negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut *rule of law*.⁸⁰

Di negara-negara Eropa Kontinental kedua istilah itu digunakan dengan cara yang berbeda antara satu negara dan negara lainnya. Di Perancis, istilah yang populer adalah *etat de droit*. Sementara Belanda menggunakan istilah yang sama, yaitu *rechtsstaat*. Istilah *etat de droit* atau *rechtsstaat* yang digunakan menurut paham Eropa Kontinental memiliki padanan kata

⁷⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

⁷⁶ Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*). Bahan ini mencakup: (a) buku; (b) kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar, simposium, dan seterusnya; (c) laporan penelitian; (d) laporan teknis; (e) majalah; (f) disertasi atau tesis; dan (g) paten. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian...*, hlm. 29.

⁷⁷ Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. *Ibid.*

⁷⁸ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, misalnya abstrak perundangundangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya; *Ibid.*, hlm. 33.

⁷⁹ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Esekutif... op. cit.*, hlm. 11.

⁸⁰ Menurut W. Friedmann. Gagasan negara hukum tidak selalu identik dengan *Rule of Law*, sedangkan istilah *Rechtsstaat* mengandung pengertian adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. W. Friedmann, *Legal Theory*, (London: Steven & Son Limited, 1960), hlm. 456.

yang sama dalam sistem hukum Inggris karena ungkapan *legal state* atau *state according to law* atau *the rule of law* mencoba mengungkapkan suatu ide yang pada dasarnya sama.⁸¹

Paham *Rechtsstaat* didasarkan pada filsuf liberal yang individualistik maka ciri individualistik yang sangat menonjol adalah pemikiran atau paham Eropa Kontinental sehingga disebut paham negara hukum liberal. Pencipta paham tersebut adalah Immanuel Kant yang mengemukakan bahwa negara hukum sebagai *Nachwacherstaat* (negara jaga malam) tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.⁸² Kemudian pemikiran Kant disempurnakan oleh Friederich Julius Stahl (pandangannya tentang *Rechtsstaat* merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant).⁸³ Paham negara hukum ditandai dengan unsur-unsur yang harus ada di dalam *Rechtsstaat* yaitu (1) pengakuan adanya hak-hak asasi manusia (*grondrechten*); (2), pemisahan kekuasaan (*Scheiding van machten*); (3), pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan (4) peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*). Scheltema mempunyai pendapat lain bahwa setiap negara hukum mempunyai empat unsur, yaitu 1) kepastian hukum, 2) persamaan, 3) demokrasi, 4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum.⁸⁴

Rechtsstaat berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme yang sedang tumbuh pesat di Eropa pada sekitar abad ke 18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant yang mengidealkan paham *laissez faire laissez aller* dan gagasan negara jaga malam (*nachwachtersstaat*). Dalam gagasan ini setiap warga dibiarkan menyelenggarakan sendiri usaha-usaha kemakmurannya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan-urusan yang dapat ditangan sendiri oleh masyarakat. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga pada malam hari yang melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan hidup tenteram.⁸⁵

Dengan melihat beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa dengan sifat-sifat yang liberal dan demokratis, *Rechtsstaat* memiliki ciri-ciri, yaitu konstitusi (undang-undang dasar)

⁸¹ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 2

⁸² Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 66.

⁸³ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm. 30.

⁸⁴ Muhammad Taher Azhary, *op. cit.*, hlm. 67. dapat dilihat pula dalam Moh. Mahfud. M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 28.

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 90. Lihat Dedi Sumardi, *Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: In-HillCo, 1987), hlm. 19.

yang memuat kaidah-kaidah mengenai (1) kedudukan, hak, dan fungsi (tugas dan wewenang), penguasa (lembaga-lembaga negara); (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara; dan (3) jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.⁸⁶

Dalam pada itu paham *Rule of law* sudah mulai tampak dalam praktik ketatanegaraan pada masa pemerintahan Henry II tahun 1164 menghasilkan *Constitution of Clarendom* yang kemudian disusul pada tahun 1215 dengan *Magna Charta* yang isinya tentang pembatasan atas kekuasaan raja. *Magna Charta* ini merupakan embrio penyusunan *Bill of Rights*, yakni piagam yang menjamin hak-hak asasi warga negara, dan pengaturan tentang kewajiban raja untuk menaati hukum. Jadi, merupakan ketentuan tentang apa yang hendak dijamin oleh hukum.⁵³ Paham negara hukum di negara Anglo Saxon dari Inggris ini dipelopori oleh AV Dicey dengan sebutan *Rule of Law*.

Sementara itu, menurut Hans Kelsen terdapat empat syarat negara hukum, yaitu (1) negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen, anggota parlemen itu dipilih oleh rakyat; (2) negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara; (3) negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan (4) negara yang melindungi hak-hak asasi manusia.⁸⁷

Franz Magnis-Suseno⁸⁸ menyebut empat syarat dalam gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu, (1) adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; (2), adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; (3), adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan (4), adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.

Franz Magnis Suseno memberikan catatan khusus berkaitan dengan ciri adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Menurutnya, dengan adanya asas kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di

⁸⁶ Marwah Effendy, *Kejaksaaan RI Posisi... op. cit.*, hlm. 27.

⁸⁷ Hans Kelsen, *Pure Theori of Law*, (London: University of California Press, 1978), hlm. 313. dilihat pula pada Denny Indrayana, "Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi VS Korupsi", *Jurnal Konstitusi*, (Volume 1 Nomor 1, juli 2004): 106.

⁸⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 298-301.

samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Di Indonesia untuk mengartikan negara hukum digunakan istilah *rechtsstaat*.⁸⁹ Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terbukti dalam Penjelasan UUD 1945, yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” (*Machtsstaat*). Namun, untuk lebih mencerminkan ciri khasnya istilah “negara hukum” ini diberi tambahan “Pancasila”, sehingga menjadi “negara hukum Pancasila”. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni hasil perubahan pertama hingga keempat, dipertegas lagi dengan kalimat “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini semula hanya ada di dalam penjelasan diubah menjadi di dalam batang tubuh, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Korupsi bertentangan dengan konsep negara hukum, bahkan dapat merusak cita-cita negara hukum.

Tindak pidana korupsi dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tersebut dirumuskan dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23, (menarik Pasal, 220, 231, 421, 422, 429, 430, KUHP), dan 24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut.

A. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.

1. Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi murnia adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik. Tindak pidana yang masuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23, (menarik Pasal, 220, 231, 421, 422, 429, 430, KUHP). Diantara pasal-pasal tersebut ada 20 pasal yang memuat 38 rumusan tindak pidana korupsi murni.

Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi dalam hal dibentuknya tindak pidana korupsi kelompok ini dapat dibedakan lagi menjadi empat kelompok berikut:

⁸⁹ Azhari, op., Cit. Hlm. 30.

1. Tindak pidana korupsi yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak Pidana Korupsi ini dimuat dalam tiga Pasal, yakni Pasal, 2, 3 dan 8.
2. Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kelancaran tugas-tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dan menyangkut kepentingan umum. Tindak pidana korupsi ini berasal dan termasuk kejahatan terhadap penguasa umum dalam bab VIII KUHP. Tindak pidana korupsi yang dimaksud ialah Pasal: 220, 231, dan Pasal 5 (mengadopsi Pasal 209 KUHP), serta Pasal 6 (mengadopsi Pasal 210 KUHP).
3. Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan umum bagi barang atau orang atau keselamatan negara dalam perang dari perbuatan yang bersifat menipu. Tindak pidana korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 7 yang substansinya mengadopsi rumusan Pasal 387 dan 388 KUHP (masuk bab kejahatan penipuan/*bedrog*).
4. Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum mengenai terselenggaranya tugas-tugas publik atau tugas pekerjaan pegawai negeri. Hal ini menyangkut kepentingan umum dari penyalahgunaan kewenangan dan sarana karena pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri atau keberkedudukan dan tugasnya untuk kepentingan umum. Tindak pidana korupsi yang masuk kelompok ini antara lain dirumuskan dalam:
 - Pasal 8 (mengadopsi dari Pasal 415 KUHP);
 - Pasal 9 (mengadopsi dari Pasal 416 KUHP);
 - Pasal 10 (mengadopsi dari Pasal 417 KUHP);
 - Pasal 11 (mengadopsi dari Pasal 419 KUHP);
 - Pasal 12 (mengadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP);

Tindak pidana korupsi kelompok keempat merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri (disamakan dengan pegawai negeri) yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya.

2. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan di sini hanya diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 21, 22, dan 24.

B. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok.

1. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum ini, ialah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal-pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23.

2. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Orang yang bukan pegawai negeri tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi pegawai negeri ini. Di sini kualitas pegawai negeri merupakan unsur *esensialia* tindak pidana. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, huruf a, b, e, f, g, h, i, 12B dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) UU No. 31/1999. Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab XXVIII buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam tindak pidana korupsi.

C. Atas Dasar Sumbernya.

Atas dasar sumbernya tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut.

1. Tindak Pidana Korupsi yang Diadopsi dari KUHP

Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam

KUHP. Formula rumusannya agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam Pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 23 yang menarik tindak pidana Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 menjadi tindak pidana korupsi.

II. Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila

Tidak ada jawaban yang pasti dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang berpendapat bahwa korupsi ibarat penyakit “kanker ganas” yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Berikut ini berbagai strategi atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk mereduksi tindak pidana korupsi di negara hukum Pancasila, yaitu antara lain:

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk independen yang khusus menangani korupsi. Indonesia sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparial (tidak memihak) jujur dan adil.

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat, dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah sistem harus dibangun dimana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hidup hajat orang banyak. Cara lain ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Mekanisme yang dapat dilakukan melalui telepon, surat atau telex, dapat pula melalui media internet sebagai media yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.

4. *Pengembangan dan Pembuatan Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi.*

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-undang Pembarnatasan Tipikor saja, tetapi instrumen hukum lain sebagai pendukung perlu dikembangkan, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* dan Pencucian Uang.

Korupsi dapat terjadi jika ada peluang, keinginan, dan bobroknya sistem pengawasan dalam waktu bersamaan. Korupsi dapat dimulai dari mana saja, misalnya suap ditawarkan pada seorang pejabat, atau sebaliknya seorang pejabat meminta atau bahkan dengan cara memaksa uang pelicin. Orang menawarkan suap karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya dan ia menyuap pejabat supaya pejabat itu mau mengabaikan peraturan. Keinginan korupsi dapat timbul karena kemiskinan, tetapi peluang untuk melakukan korupsi dapat dibatasi dengan merumuskan strategi yang realistis.⁹⁰

Strategi untuk mengontrol korupsi karenanya harus berfokus pada dua unsur yakni peluang dan keinginan. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan perubahan secara sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara membalikkan situasi kalkulasi resiko "untung rugi, resiko rendah" dengan cara menegakkan hukum, memberikan hukuman dengan efek jera secara efektif, dan menegakkan mekanisme akuntabilitas.

Memberantas korupsi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjuangan melawan perilaku jahat dalam pemerintahan yang merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan efisien melalui berbagai strategi seperti berikut.

⁹⁰ Ery Riyana Harjapamengkas dan Aan Rukmana dalam *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2009: hlm. 612-619.

1. *Reformasi Birokrasi*

Wewenang pejabat publik untuk mengambil keputusan dan kecenderungan menyalahgunakannya dapat diperkecil dengan cara memodifikasi struktur organisasi dan pengelolaan program-program publik. Perubahan ini akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan dapat memperkecil jumlah transaksi serta memperbesar peluang bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang baik.

2. *Budaya*

Senjata yang paling ampuh dalam pertempuran melawan korupsi adalah menumbuhkan kultur demokratis dan egaliter. Ciri kultur demokrasi adalah keterbukaan dan pengabdian kepada keterbukaan. Pengawal keterbukaan yang paling efektif adalah warganegara yang terhimpun dalam organisasi-organisasi yang dibentuk untuk tujuan yang diharapkan. Dalam konsteks ini pers yang bebas sangat dibutuhkan. Tanpa kebebasan untuk mengajukan pertanyaan atau untuk mengadakan perubahan, rakyat tetap tidak berdaya karena terperangkap dalam sistem demokrasi yang dangkal.

3. *Kelembagaan*

Secara kelembagaan ada fungsi-fungsi kunci yang harus dilakukan oleh tulang punggung pemberantasan korupsi atau *Core Unit*, baik pada tingkat preventif, detektif maupun represif. Harmonisasi kinerja antara lembaga Kejaksaan Agung, POLRI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan KPK memegang peran penting dalam mensukseskan pemberantasan korupsi. Hanya disayangkan, saat ini tumpang tindih wewenang dan persaingan tidak sehat membayangi kinerja beberapa lembaga tersebut. Perseteruan antara KPK dan POLRI, atau POLRI dan Kejaksaan Agung merupakan salah satu contoh ketidakharmonisan tersebut.

4. *Integrasi Sistem Pemberantasan Korupsi*

Tujuan pokok pembangunan sistem integritas nasional adalah membuat tindak pidana korupsi menjadi tindakan yang mempunyai “risiko tinggi” dan memberi “hasil sedikit”. Sistem itu dirancang untuk memastikan jangan sampai korupsi dapat terjadi, bukan mengandalkan sanksi hukum setelah korupsi terjadi. Integrasi sistem pemberantasan korupsi mencakup pilar-pilar; eksekutif, parlemen, peradilan, pelayanan publik, lembaga pengawas (BPK, KPK), masyarakat sipil dan media massa. Integrasi sistem pemberantasan korupsi membutuhkan identifikasi sistematis mengenai kelemahan dan peluang untuk memperkuat dan memperkokoh setiap pilar sehingga bersamasama menjadi kerangka yang kokoh. Untuk mewujudkan pelaksanaan proses kerja penanganan tindak pidana korupsi yang lancar, perlu dibuat : *Pertama*, sistem dan

prosedur kerja antar instansi yang terkait dengan *Core Unit*; *kedua*, standar pelaporan yang akan di pakai sebagai dokumen antar instansi; dan *ketiga*, penjadwalan pertemuan regular untuk pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, agar dapat diwujudkan persamaan persepsi atas suatu masalah.

5. *Sumber Daya Manusia*

Upaya untuk memberantas kemiskinan etika dan meningkatkan kesadaran adalah mutlak diperlukan, karenanya sumber daya manusia yang unggul harus terus di bangun terutama melalui pendidikan. Pejabat pemerintahan dan warga masyarakat yang memiliki informasi mengenai hak-hak dan menegakkan hak-hak itu dengan percaya diri. Sumber daya masyarakat yang seperti itu merupakan landasan yang sangat penting bagi sistem integritas nasional dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat yang kurang terdidik dan apatis tidak tahu hak-haknya dan bersikap menyerah pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, sementara pejabat pemerintahan yang tidak berprinsip hanya akan mengikuti arus dominan yang ada di lingkungan kerjanya tanpa bisa berpikir kritis dalam memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.

6. *Infrastruktur*

Infrastruktur yang di maksud disini adalah lembaga trias politika yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berjalannya fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada koridor hak dan kewajibannya masing-masing akan memberikan kontribusi yang diharapkan dalam pemberantasan korupsi. Sebaliknya jika tidak, maka berarti infrastruktur politik nasional ini perlu dibenahi sehingga lembaga tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan pada akhirnya mendukung upaya pemberantasan korupsi nasional.

III. Dampak Terhadap Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila

Dari berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabelvariabelnya sudah banyak dilakukan. Dari hasil studi komprehensif tersebut nampak berbagai dampak negatif akibat korupsi. Korupsi dapat merperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi.⁹¹ Bahkan dalam penelitian yang lebih elaboratif, dilaporkan bahwa

⁹¹ Mauro, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Bahan Ajar Untuk Perguruan Tinggi, 2011. Hlm 55.

korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya.⁹²

Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai Negara yang utangya parah, berpenghasilan rendah (*severy indebted low income country*) dan termasuk dalam kategori Negara-negara termiskin di dunia sama seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti tergambar dalam uraian berikut ini:

1. Dampak di Bidang Ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan Negara, khususnya sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.

Masih menurut Mauro, korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, berikut ini dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:

a) Lesunya Pertumbuhan ekonomi dan Investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan suatu kasus. Menurut laporan yang disampaikan PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*), karena iklim yang tidak kondusif akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena tindak korupsi sampai tingkat yang mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

b) Penurunan Produktifitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena terhambatnya sektor industri dan produksi. Penurunan produktifitas juga akan menyebabkan permasalahan yang lain,

⁹² Ibid

seperti tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diiringi dengan meningkatnya pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas adalah timbulnya kemiskinan masyarakat.

- c) Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik Dampak ini bisa dirasakan, misalnya rusaknya jalan-jalan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

- d) Meningkatnya Hutang Negara

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Data menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per Mei 2011 mencapai US\$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun. Angka ini melebihi APBN Negara RI tahun 2012 yang mencapai sekitar Rp. 1.300 triliun. Kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif hutang dapat dikembalikan. Dan apabila hutang digunakan untuk menutup difesit yang terjadi, hal itu akan semakin memperburuk keadaan.

2. Dampak terhadap penegakan hukum

- a) Fungsi pemerintahan mandul

Korupsi tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya isu korupsi lebih sering bersifat personal.⁹³ Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja (contoh : kasus Gayus Tambunan, pelaku korupsi yang kebetulan pegawai direktorat jenderal pajak, setidaknya membawa nama jelek bagi instansi pajak). Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial.

Pada sisi lain, masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang di duga terkait dengan tindak korupsi. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara misalnya korupsi dapat menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan

⁹³ Ibid, hlm. 64-66

yang layak. Peminpin/pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan yang paling parah akhirnya dapat menimbulkan bencana bagi rakyat.

b) Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara di Indonesia mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang (misalnya terhadap legislatif, DPR, Partai Politik, dan Lembaga Peradilan. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia bisa di lihat mulai kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktik mafia hukum. Bahkan berita yang paling akhir adalah kasus korupsi pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi partai politik.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijabarkan dan dianalisis oleh penulis, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila adalah sebagai berikut:
 - a. *Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi*
 - b. *Pencegahan Korupsi di Sektor Publik*
 - c. *Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*
 - d. *Pengembangan dan Pembuatan Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi.*
2. Dampak Terhadap Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Hukum Pancasila yaitu antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dampak di bidang ekonomi yaitu, (a) lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, (b) penurunan Produktivitas, (c) rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, (d) meningkatnya hutang negara.
 - b. Dampak terhadap penegakkan hukum yaitu, (a) fungsi pemerintahan mandul, (b) hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah (i). *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991,
Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995),

- Ery Riyana Harjapamengkas dan Aan Rukmana dalam *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2009,
- F. Prick van Welly, *Eerste Deel Engels Nederland, Nijmegen*, 1946,
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1993),
- Hans Kelsen, *Pure Theori of Law*, (London: University of California Press, 1978), hlm. 313. dilihat pula pada Denny Indrayana, "Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi VS Korupsi", *Jurnal Konstitusi*, (Volume 1 Nomor 1, juli 2004)
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 90. Lihat Dedi Sumardi, *Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: In-HillCo, 1987),
- Klitgaard, Robert, dkk. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang menuju KPTPK*, (Jakarta: Gerak, 2004), hlm. 65. Menurut Indriyanto Seno Adji, KPK merupakan institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki institusi lainnya. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Oemar Seno Adji dan rekan, 2006),
- Marwah Effendy, *Kejaksaaan RI Posisi...*
- Mauro, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Bahan Ajar Untuk Perguruan Tinggi, 2011.
- Menurut W. Friedmann. Gagasan negara hukum tidak selalu identik dengan *Rule of Law*, sedangkan istilah *Rechtsstaat* mengandung pengertian adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. W. Friedmann, *Legal Theory*, (London: Steven & Son Limited, 1960), hlm.
- Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),
- Muladi, "Konsep Total *Enforcement* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum", (Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intersifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006), hlm. 14; Menurut Merah Darwin permasalahan korupsi bukan hanya kerugian keuangan negara, akan tetapi korupsi merusak citra dan wibawa serta kredibilitas negara

- dimata masyarakat dunia. Keadaan ini berakibat para investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia keluar dari Indonesia, dan tidak adanya penanaman modal baru dari investor asing. Lihat Merah Darwin, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, (makalah disampaikan sebagai pemenuhan persyaratan tes lanjutan calon Hakim Ad- Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2 Agustus 2005),
- Onghokham, “Tradisi dan Korupsi”, dalam Majalah *Prisma*, (2 Februari 1983), hlm. 3. Korupsi sudah ada sejak manusia ada, korupsi dalam semua bentuknya bukan monopoli suatu negara. Korupsi di Cina, tempat para birokrat “menjual kekuasaan administrasi mereka”, tidak ada bedanya dengan korupsi di Eropa, tempat partai-partai politik mendapat komisi dalam jumlah sangat besar dari proyek-proyek pemerintah. Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen sistem Integritas Nasional)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003),
- Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989),
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Penerbit Paramita, 1999,
- Romli Atmasasmita, “Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia”, (Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pembentukan Pengadilan Korupsi yang diselenggarakan oleh KHN dan BPHN, Jakarta, 30 Juli 2002)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),
- S. Wojowasito. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT. Ichtiar baru, Jakarta 1999.
- Susan Rose-Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2006),
- Teten Masduki dan Danang Widoyoko, “Menunggu Gebrakan KPK”, *Jantera*, (Edisi 8 Tahun III, Maret 2005
- W. Tangun Susila dan I.B. Surya Dharma Jaya, “Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, (Makalah disampaikan pada Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, Bali, 14-15 Juni 2006),

LOADING ASAM SALISILAT DARI MODIFIKASI *EDIBLE FILM* PEKTIN – PATI JAGUNG DENGAN PLASTICIZER GLISEROL

Dewi Wahyuningtyas^{1*}, Yayu Sukmawati^{2*}

^{1,2} Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Institut Sains dan Teknologi
AKPRIND Yogyakarta

* Email : dewi.wahyuningtyas@akprind.ac.id

ABSTRAK

Ekstraksi pektin dari limbah kulit jeruk telah digunakan untuk pembuatan *edible film*. *Edible film* ini dapat diaplikasikan sebagai media Drug Delivery System (DDS) di dunia medis. Akan tetapi, *edible film* dari pektin memiliki kelemahan yaitu mudah rapuh. Untuk memperbaiki karakteristik mekanik *edible film* pektin dan mengontrol kualitas pemasukan obat, maka perlu modifikasi film dengan penambahan pati jagung dan plasticizer gliserol. Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh komposisi pektin-pati jagung dan penambahan gliserol terhadap sifat mekanik dan efisiensi pemasukan obat ke dalam *edible film*. Obat yang digunakan dalam penelitian ini adalah asam salisilat. Metode penelitian ini terdiri dari dua tahapan utama : (1) pembuatan *edible film* dengan variasi komposisi pektin-pati yaitu 3:0; 2,75:0,25; 2,5:0,5; 2,25:0,75; dan 2:1 (g/g) dan konsentrasi gliserol (0; 5; 10; dan 15% v gliserol / v larutan), dan (2) pemasukan obat. Karakteristik mekanik *edible film* yang diukur seperti ketebalan, kuat tarik, persen pemanjangan. Performa efisiensi pemasukan obat ke dalam *edible film* dianalisis menggunakan spektrofotometer visible. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pati jagung dan gliserol berpengaruh terhadap karakteristik fisik dari *edible film*. Saat pati jagung (pada rentang 0-1 gram) dan gliserol (pada rentang 0-15% volume) ditambahkan secara meningkat, maka nilai kuat tarik film menjadi menurun dan persen pemanjangan film meningkat. Hal ini mengakibatkan efisiensi drug loading ikut mengalami peningkatan dengan modifikasi pektin-pati jagung dan penambahan gliserol karena obat dapat mudah masuk ke dalam film. Efisiensi pemasukan obat tertinggi yaitu 83,25% untuk komposisi pektin-pati jagung 2 1 (g/g) dan 78,86% pada konsentrasi gliserol 15%.

Kata kunci : pektin, pati jagung, gliserol, *edible film*, efisiensi drug loading

ABSTRACT

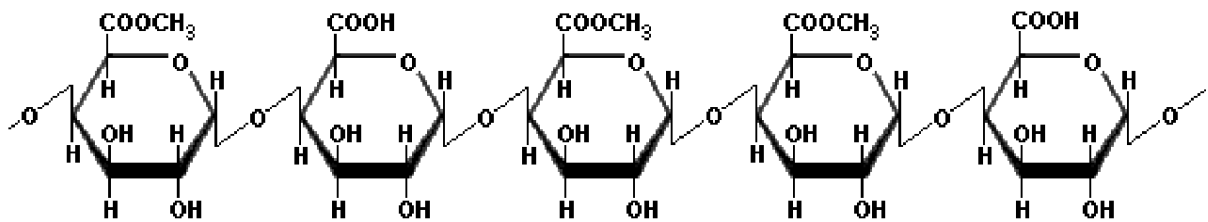
The extraction of pectin from citrus peel waste had been used for the manufacture of *edible film*. The *edible film* can be applied as a media Drug Delivery System (DDS) in the medical world. However, *edible films* of pectin has the disadvantage of easily fragile. To improve the mechanical characteristics of the *edible film* pectin and control the quality of administration of the drug, it is necessary to modify the film with the addition of corn starch and glycerol plasticizer. This research aims to study the influence of the composition of pectin-starch corn and the addition of glycerol on mechanical properties and efficiency of administration of the drug into the *edible film*. The drugs used in this study is salicylic acid. Methods This study consisted of two main phases: (1) the manufacture of *edible film* with variations of pectin-starch composition is 3: 0; 2.75: 0.25; 2.5: 0.5; 2.25: 0.75; and 2: 1 (g / g) and glycerol concentrations (0; 5; 10; and 15% glycerol v / v solution), and (2) administration of the drug. Mechanical characteristics were measured like *edible film* thickness, tensile strength, percent elongation. Performance efficiency of administration of the drug into the *edible film* was analyzed using a visible spectrophotometer. The results showed that the addition of corn starch and glycerol effect on the physical characteristics of *edible film*. When corn starch (in the range of 0-1 grams) and glycerol (in the range of 0-15% by volume) added increases, the value of tensile strength of the film is lowered and the percent elongation of the film increases. This efficiency results in increased drug loading join with the pectin-modified corn starch and glycerol as the addition of the drug can be easily fit into the film. Drug importation highest efficiency 83.25% for the composition of pectin-starch corn 2 1 (g / g) and 78.86% at a concentration of 15% glycerol.

Keywords: pectin, corn starch, glycerol, *edible film*, the efficiency of drug loading

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi besar sebagai penghasil buah jeruk. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura (2015), produksi jeruk Indonesia tahun 2014 sebesar 1.926.543 ton. Konsumsi buah jeruk menyisakan limbah berupa kulit jeruk yang banyak. Pemanfaatan limbah jeruk tersebut belum dilakukan secara maksimal. Salah satu cara pemanfaatan limbah ini adalah mengekstrak pektin yang ada di dalam limbah kulit jeruk.

Pektin merupakan senyawa polisakarida yang banyak terdapat pada tumbuhan. Pektin tersusun atas molekul asam galakturonat yang berikatan dengan ikatan α -(1-4)-glikosida yang membentuk asam poligalakturonat. Gugus karboksil sebagian teresterifikasi dengan metanol dan sebagian gugus alkohol sekunder terasetilasi (Herbstreith dan Fox, 2005). Gambar struktur asam poligalakturonat ditunjukkan pada Gambar 2 (Hoejgaard, 2004).

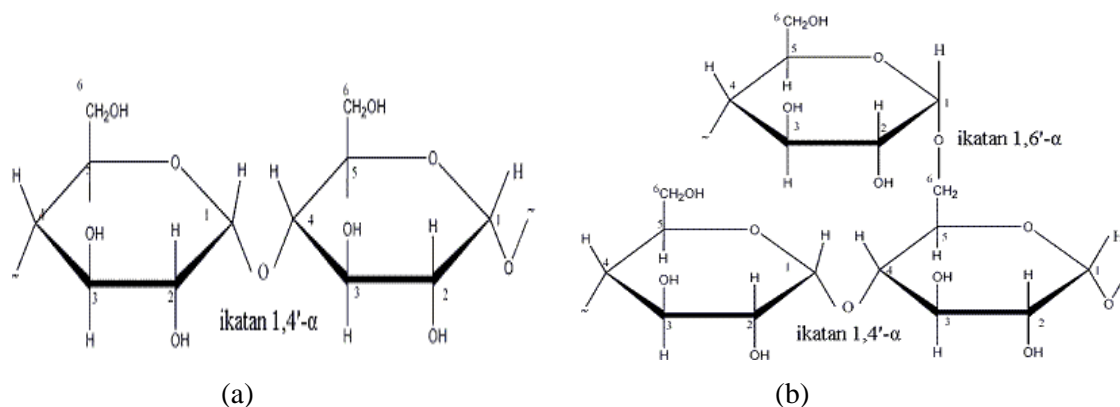


Gambar 1. Struktur kimia asam poligalakturonat

Penggunaan pektin cukup luas karena banyak dibutuhkan dalam industri pangan dan non pangan. Pektin juga telah digunakan sebagai bahan pembuatan *edible film* yaitu pelapis bahan pangan yang ramah lingkungan. Perkembangan pemanfaatan *edible film* pektin mulai dikenalkan dalam bidang farmasi dan kedokteran, yaitu sebagai *Drug Delivery System* (DDS). Menurut Mishra, dkk. (2012), pektin memiliki kemampuan sebagai *delivering bioactive agents*.

Dalam pembuatan *edible film* dari pektin sebagai membran DDS, pektin memiliki beberapa kelemahan seperti kecepatan *drug loading* (pemasukan obat) yang rendah. Penelitian ini akan memodifikasi pembuatan *film* dari pektin dengan penambahan komponen untuk memperbaiki kualitas *film* yaitu pati jagung dan *plasticizer* gliserol.

Penggunaan pati jagung ini merupakan solusi menarik sebagai pembungkus pangan inovatif yang memiliki kelebihan seperti murah, berlimpah (*renewable*), *biodegradable*, dan dapat dimakan. Komponen utama jagung adalah pati sekitar 70% dari bobot biji. Pati terdiri atas dua jenis polimer glukosa, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan rantai unit D-glukosa yang panjang dan tidak bercabang yang bergabung oleh ikatan α (1-4), sedangkan amilopektin strukturnya bercabang (Lehninger 1982). Adapun rumus struktur amilosa dan amilopektin ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur kimia (a) amilosa dan (b) amilopektin

Menurut Silva, dkk. (2009), penambahan *plasticizer* berfungsi meningkatkan fleksibilitas film dan mengurangi gaya intermolekul di rantai polimernya. Pada penelitian ini menggunakan *plasticizer* gliserol. Gliserol efektif digunakan sebagai *plasticizer* pada *film* hidrofilik, seperti film berbahan dasar pati, gelatin, pektin, dan karbohidrat lainnya termasuk kitosan (Suppakul, 2006). Batasan konsentrasi *plasticizer* di dalam polimer biasanya 5-30%. Saat konsentrasi *plasticizer* rendah, maka film yang dihasilkan keras dan kaku. Efek ini disebut *antiplasticization* (Chamarty dan Pinal, 2008).

Untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas membran DDS, maka studi kecepatan *drug loading* pada asam salisilat perlu dipelajari lebih mendalam. Pengaruh penambahan *plasticizer* gliserol pada karakteristik modifikasi *edible film* pektin-pati jagung terhadap karakteristik mekanik *film* dan kecepatan *loading* pada obat menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Bahan

Bahan yang digunakan adalah bubuk pektin diperoleh dari Toko Tekun Jaya, larutan $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, gliserol, asam salisilat ($\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$) murni sebagai contoh obat, aseton dan aquadest.

2. Alat Penelitian

Alat utama yang digunakan untuk pembuatan *edible film* dan menganalisa parameter adalah magnetic stirer, oven, cetakan teflon, dan spektrofotometer *Visible*.

3. Pembuatan *Edible Film* dari Pektin (Wirawan, dkk., 2012)

Pembuatan *edible film* dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, 3 gram polimer (variasi pektin-pati jagung 3:0; 2,75:0,25; 2,5:0,5; 2,25:0,75; 2:1) dilarutkan dalam 200 mL larutan yang telah mengandung 0,6 g gliserol/g polimer pada suhu kamar sambil diaduk dengan

magnetic stirrer selama 1,5 jam hingga homogen. Larutan dipanaskan sampai 70°C kemudian dimasukkan larutan CaCl₂.2H₂O sebanyak 0,04 g/g polimer dalam 30 mL *aquadest* selama 30 menit. Setelah larutan homogen, pengadukan dihentikan dan larutan dituang pada cetakan teflon lalu dikeringkan dengan oven pada suhu 50°C selama 15 jam.

Pada tahap kedua, *film* yang sudah terbentuk dicelupkan dalam 50 mL larutan CaCl₂.2H₂O (0,03 g/mL) yang sudah mengandung gliserol dengan variasi konsentrasi (0, 5, 10, 15% mL/mL larutan) selama 30 menit. *Film* dipisahkan dari larutan kemudian dibiarkan mengering pada suhu lingkungan selama 6 jam.

4. Pemasukan Obat ke dalam *Film* (Mishra, dkk., 2008)

Pemasukan obat ke dalam *film* merupakan tahap penggabungan antara *film* yang telah terbentuk dengan larutan obat asam salisilat. Obat dimasukkan ke dalam *film* dengan metode difusi. *Film* yang telah terbentuk dipotong dengan ukuran 4cm×4cm×tebal *film*. Kemudian *film* dilarutkan ke dalam larutan obat yang telah dilarutkan dalam aseton selama 2 jam (setiap 0,5 gram obat dilarutkan ke dalam 10 mL aseton). Kemudian *film* yang telah terisi obat dikeringkan dalam desikator.

5. Analisis Karakteristik Pektin

Karakteristik pektin meliputi penentuan kadar air, kadar abu, berat ekuivalen, metoksil, dan kadar asam galakturonat.

6. Pengukuran Ketebalan Film

Film yang sudah terbentuk diukur ketebalannya dengan mikrometer.

7. Analisis Sifat Mekanik Film

Pengujian kuat tarik dan persentase *elongation of break* (E) dilakukan dengan prosedur ASTM 882-91 di Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada.

8. Analisis *Drug Loading* (Sadeghi, 2011)

Jumlah *drug loading* di dalam *film* dihitung dari pengurangan konsentrasi larutan obat awal dengan konsentrasi larutan sisa obat setelah proses pemasukan obat ke *film*. Konsentrasi larutan diukur melalui pengukuran absorbansi larutan dengan spektrofotometer *Visible* pada panjang gelombang 542 nm. Efisiensi *drug loading* dihitung sebagai rasio antara konsentrasi obat akhir dengan konsentrasi awal obat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pektin

Uji pektin dilakukan untuk mengetahui karakteristik pektin yang digunakan sesuai dengan spesifikasi mutu pektin komersial. Perbandingan antara bahan pektin dengan pektin komersial sesuai Food Chemical Codex (1996) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan bahan pektin dengan standar pektin komersial

No.	Karakteristik	Bahan Pektin	Pektin Komersial
1.	Kadar air	0,8%	Maks. 12%
2.	Kadar abu	1,04%	Maks. 1%
3.	Berat ekuivalen	769,23	-
4.	Kadar metoksil	9,92%	Min. 7% (rendah)
5.	Kadar asam galakturonat	79,2%	Min. 65%

Hasil pada Tabel 1 menunjukkan nilai parameter pada bahan pektin yang digunakan dalam penelitian memenuhi syarat standar pektin komersial.

2. Pengaruh Komposisi Polimer pada Karakteristik *Edible Film*

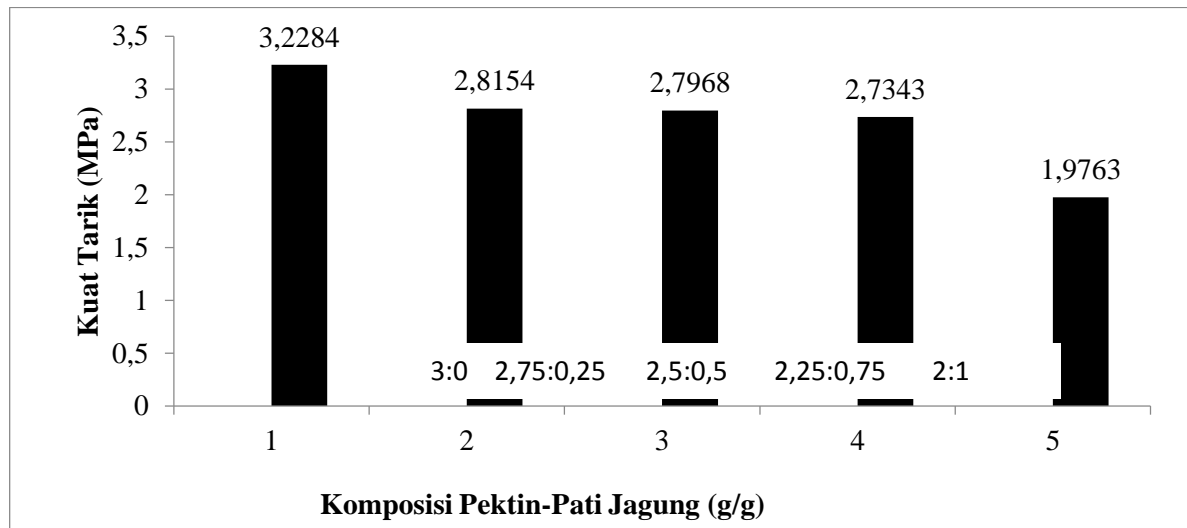
Karakteristik *edible film* yang diukur yaitu ketebalan, kuat tarik (*tensile strength*) dan persen pemanjangan (*elongation*).

Pengukuran Ketebalan *Edible Film*

Ketebalan *film* merupakan sifat fisik yang dipengaruhi oleh konsentrasi padatan terlarut dalam larutan dan ukuran plat pencetak. Hasil pengukuran ketebalan *film* diperoleh berkisar antara 0,093-0,105 mm. Ketebalan yang diperoleh tidak selalu sama karena pencampuran larutan kurang homogen saat dituang ke dalam cetakan, sehingga total padatan pada masing bagian tidak sama.

Pengujian Kuat Tarik (*Tensile Strength*) pada *Edible Film*

Kuat tarik adalah gaya tarik maksimum yang dapat ditahan oleh sebuah *film*. Parameter ini menggambarkan gaya maksimum yang terjadi pada film selama pengukuran berlangsung. Hasil uji kuat tarik pada *film* dengan variasi pati jagung ditunjukkan pada Gambar 3.



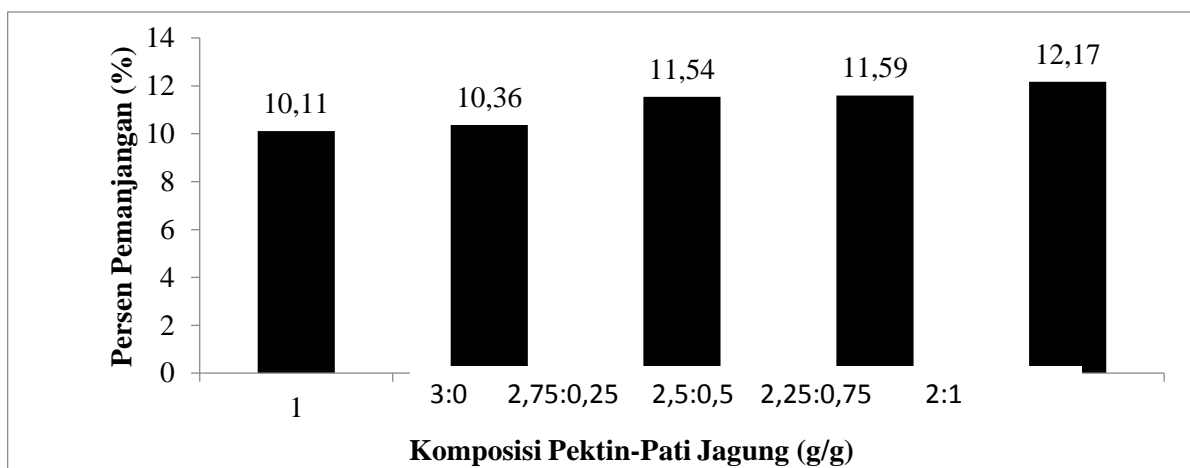
Gambar 3. Hasil uji kuat tarik pada *film* dengan variasi komposisi polimer pektin dan pati jagung

Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai kuat tarik menurun karena penambahan pati jagung pada rentang 0-1 gram. Jika penambahan pati jagung pada pektin lebih dari 1 gram, maka *film* yang dihasilkan kualitas warnanya kurang bagus yaitu berwarna kecoklatan. Pada komposisi pektin-pati jagung 3 gram dan tanpa penambahan pati jagung, nilai kuat tarik yang diperoleh merupakan nilai tertinggi sebesar 3,2284 MPa. Setelah film ditambahkan pati jagung 0,25; 0,5; 0,75; dan 1 gram, nilai kuat tarik menurun cukup signifikan. Nilai kuat tarik terendah terjadi saat komposisi pektin-pati jagung 2:1 (g/g) yaitu sebesar 1,9763 MPa.

Hal ini dimungkinkan karena pektin memiliki rantai lebih panjang daripada pati jagung, sehingga memberikan efek sifat aditif kekuatan tarik yang lebih baik dibandingkan pati jagung. Penambahan pati jagung bertujuan untuk mengurangi jumlah pektin dalam polimer tersebut karena pati jagung lebih mudah dibuat dan murah.

Pengujian Persen Pemanjangan (*Elongation*) pada *Edible Film*

Persen pemanjangan merupakan perubahan panjang maksimum saat terjadi peregangan hingga sampel film terputus. Hasil uji persen pemanjangan (*elongation*) pada *film* dengan variasi pati jagung ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil uji persen pemanjangan (*elongation*) pada *film* dengan variasi komposisi poimer pektin dan pati jagung

Gambar 4 menunjukkan bahwa nilai persen pemanjangan (*elongation*) meningkat karena penambahan pati jagung pada rentang 0-1 gram. Pada penambahan pati jagung 1 gram, nilai persen pemanjangan yang diperoleh merupakan nilai persen pemanjangan tertinggi sebesar 12,17%. Nilai persen pemanjangan yang diperoleh berkisar antara 10,11 – 12,17% dengan komposisi tertinggi pada komposisi pektin-pati jagung yaitu 2 : 1 (g/g). Menurut Krochta dan Johnson (1997), nilai persentase pemanjangan yang dikategorikan kurang baik jika kurang dari 10%. *Edible film* dari modifikasi pektin-pati jagung tergolong baik karena memiliki nilai lebih dari 10%, sehingga edible film bersifat elastis.

3. Pengaruh Konsentrasi Gliserol pada Karakteristik *Edible Film*

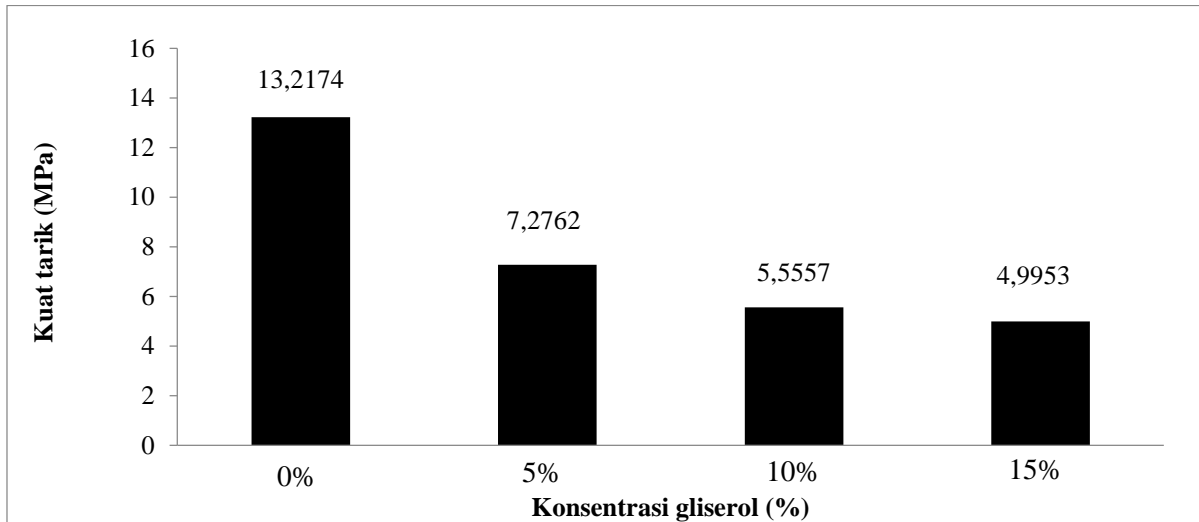
Karakteristik *edible film* yang diukur yaitu ketebalan, kuat tarik (*tensile strength*) dan persen pemanjangan (*elongation*).

Pengukuran Ketebalan *Edible Film*

Ketebalan *film* merupakan sifat fisik yang dipengaruhi oleh konsentrasi padatan terlarut dalam larutan dan ukuran plat pencetak. Hasil pengukuran ketebalan *film* diperoleh berkisar antara 0,061-0,125 mm. Ketebalan yang diperoleh tidak selalu sama karena pencampuran larutan kurang homogen saat dituang ke dalam cetakan.

Pengujian Kuat Tarik (*Tensile Strength*) pada *Edible Film*

Hasil uji kuat tarik *film* dengan variasi konsentrasi gliserol ditunjukkan pada Gambar 5.



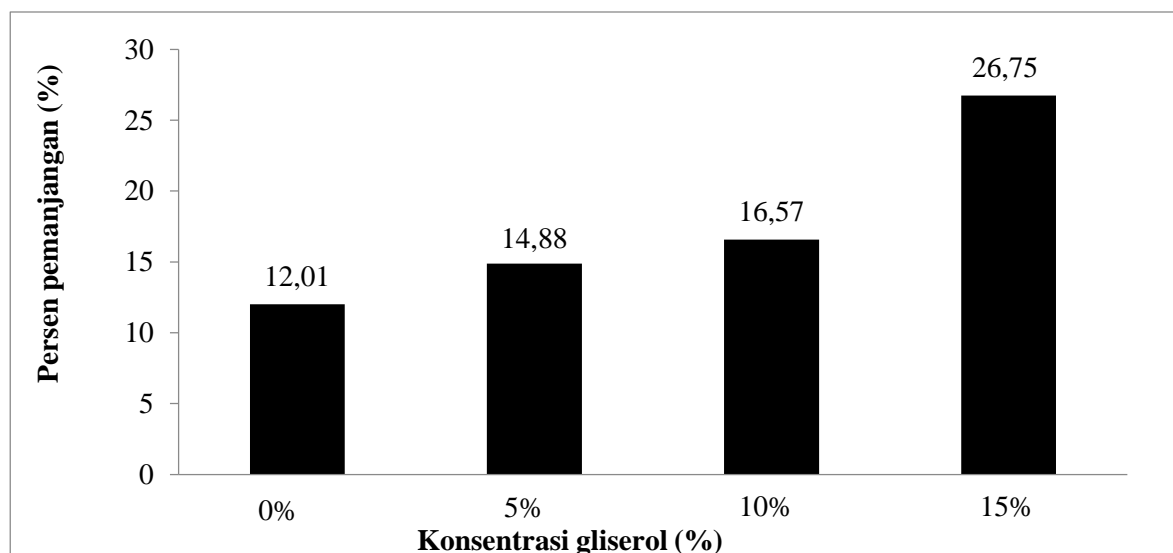
Gambar 5. Hasil uji kuat tarik pada film dengan variasi konsentrasi gliserol

Gambar 5 menunjukkan nilai kuat tarik menurun karena penambahan konsentrasi gliserol pada rentang 0-15%. Pada konsentrasi gliserol 0%, nilai kuat tarik yang diperoleh merupakan nilai kuat tarik tertinggi sebesar 13,2174 MPa. Setelah film ditambahkan gliserol 5%, 10%, dan 15%, nilai kuat tarik mengalami penurunan yang cukup signifikan dari nilai kuat tarik tanpa gliserol. Nilai kuat tarik terendah terjadi saat penambahan gliserol 15% yaitu sebesar 4,9953 MPa.

Menurut Suppakul (2006), gliserol sebagai *plasticizer* dapat mengurangi gaya intermolekul antara ikatan polimer, meningkatkan fleksibilitas *film* dengan memperlebar ruang kosong molekul dan melemahkan ikatan hidrogen rantai polimer. Hal ini yang menjadi alasan nilai kuat tarik *film* menurun seiring dengan penambahan konsentrasi gliserol. Nilai kuat tarik yang diperoleh berkisar antara 4,9953-13,2174 MPa.

Pengujian Persen Pemanjangan (*Elongation*) pada *Edible Film*

Hasil uji persen pemanjangan (*elongation*) pada *film* dengan variasi konsentrasi gliserol ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Hasil uji persen pemanjangan (elongation) pada film dengan variasi konsentrasi gliserol

Gambar 6 menunjukkan nilai persen pemanjangan (*elongation*) meningkat karena penambahan konsentrasi gliserol pada rentang 0-15%. Pada konsentrasi gliserol 15%, nilai persen pemanjangan yang diperoleh merupakan nilai persen pemanjangan tertinggi sebesar 26,75%. Gliserol sebagai *plasticizer* dapat mengurangi gaya intermolekul antara ikatan polimer sehingga meningkatkan fleksibilitas *film* dan persen pemanjangan pun meningkat. Hal tersebut sesuai dengan yang dilaporkan Waryoko, dkk (2014) bahwa apabila gliserol ditambahkan ke dalam larutan *film*, berbagai modifikasi struktur terjadi dalam polimer, matriks *film* menjadi kurang rapat, rantai polimer bergerak, dan fleksibilitas film meningkat.

Nilai persen pemanjangan yang diperoleh berkisar antara 12,01 - 26,75%. Menurut Krochta dan Johnson (1997), nilai persentase pemanjangan yang dikategorikan kurang baik jika kurang dari 10%. *Edible film* dari pektin untuk konsentrasi gliserol yang lainnya tergolong baik karena memiliki nilai lebih dari 10%, sehingga *edible film* bersifat elastis.

4. Pengaruh Komposisi Polimer terhadap Drug Loading ke dalam Film

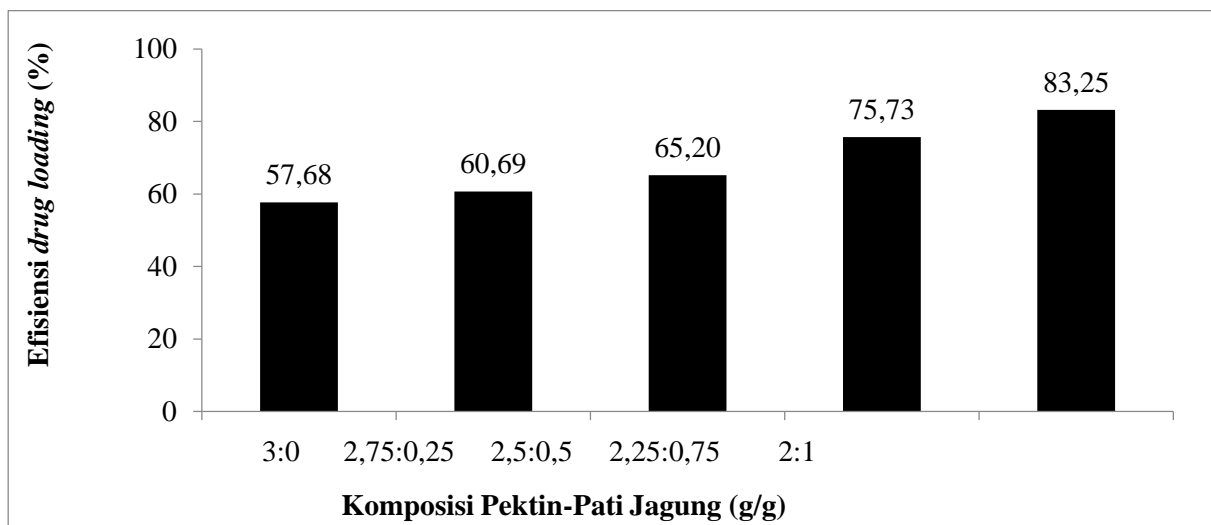
Proses *drug loading* bertujuan untuk mengetahui efisiensi obat yang dapat dimasukkan ke dalam *film*. Waktu *drug loading* berlangsung selama 1 jam. Hal ini dikarenakan selama waktu tersebut *film* belum mengalami pembengkakan hingga hancur.

Pengukuran massa obat yang dapat terloading ke dalam *film* tidak bisa dilakukan secara langsung, yaitu dengan pengukuran konsentrasi obat yang tersisa di cairan. Massa obat yang dapat terloading ke dalam *film* dicari melalui perhitungan selisih massa obat awal dengan massa obat yang tersisa di cairan. Massa obat awal yang dimasukkan ke dalam *film* sebesar 500 mg. Massa obat setelah proses *drug loading* ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Massa obat yang terloading ke dalam film

No.	Komposisi polimer pektin - pati jagung (g/g)	Massa obat terloading ke dalam film (mg)	Efisiensi <i>Drug Loading</i> (%)
1.	3:0	288,4211	57,68
2.	2,75:0,25	303,4586	60,69
3.	2,5:0,5	326,0150	65,20
4.	2,25:0,75	378,6466	75,73
5.	2:1	416,2406	83,25

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan massa obat yang terloading bertambah banyak dengan adanya penambahan pati jagung. Efisiensi *drug loading* dihitung sebagai rasio antara massa obat terloading dengan massa obat awal. Efisiensi *drug loading* pada film dengan variasi komposisi pektin-pati jagung ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Efisiensi *drug loading* (%) dengan variasi komposisi pektin-pati jagung

Hasil pada Gambar 7 menunjukkan nilai efisiensi *drug loading* meningkat karena penambahan pati jagung pada rentang 0-1 gram. Nilai tertinggi diperoleh pada komposisi pektin-pati jagung 2:1 (g/g) sebesar 83,25%. Hal ini disebabkan karena penambahan pati jagung pada pektin membuat berat molekul polimer berkurang sehingga film lebih fleksibel. Adanya fleksibilitas film akan memperlebar ruang kosong molekul dan melemahkan ikatan hidrogen pada rantai polimer, sehingga obat asam salisilat lebih mudah masuk (*loading*) ke dalam film. Nilai efisiensi *drug loading* pada film berkisar antara 57,68-83,25%.

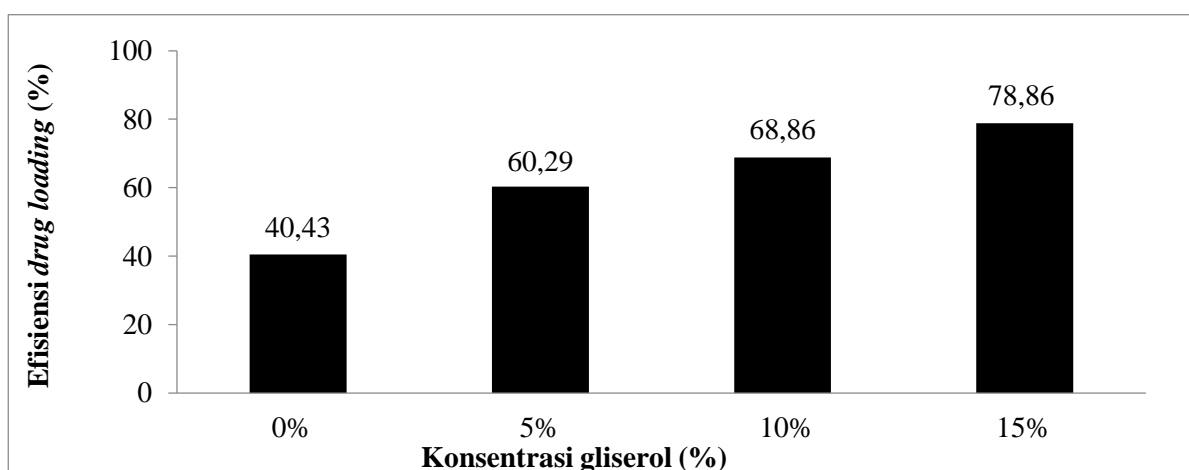
5. Pengaruh Konsentrasi Gliserol terhadap *Drug Loading* ke dalam *Film*

Proses *drug loading* pada variasi konsentrasi gliserol berlangsung sama dengan variasi komposisi polimer (pektin-pati jagung). Pengukuran massa obat yang *terloading* ke dalam *film* tidak bisa dilakukan secara langsung, yaitu dengan pengukuran konsentrasi obat yang tersisa di cairan. Massa obat setelah proses *drug loading* ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 3. Massa obat yang *terloading* ke dalam *film*

No.	Konsentrasi gliserol	Massa obat <i>terloading</i> ke dalam <i>film</i> (mg)	Efisiensi <i>Drug Loading</i> (%)
1.	0%	202,1429	40,43
2.	5%	301,4286	60,29
3.	10%	344,2857	68,86
4.	15%	394,2857	78,86

Hasil pada Tabel 7 menunjukkan massa obat yang *terloading* bertambah banyak dengan adanya penambahan konsentrasi gliserol. Efisiensi *drug loading* dihitung sebagai rasio antara massa obat *terloading* dengan massa obat awal. Hasil efisiensi *drug loading* pada *film* dengan variasi konsentrasi gliserol ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Efisiensi *drug loading* (%) dengan variasi konsentrasi gliserol

Hasil pada Gambar 8 menunjukkan nilai efisiensi *drug loading* meningkat karena penambahan konsentrasi gliserol pada rentang 0-15%. Hal ini disebabkan karena gliserol di dalam *film* membuat *film* lebih fleksibel dan elastis. Menurut Suppakul (2006), gliserol dapat

mengurangi gaya intermolekul antara ikatan polimer, meningkatkan fleksibilitas *film* dengan memperlebar ruang kosong molekul dan melemahkan ikatan hidrogen rantai polimer.

Adanya ruang kosong yang lebih lebar dalam molekul pektin membuat obat asam salisilat lebih mudah masuk (*loading*) ke dalam *film*. Semakin banyak obat yang dapat masuk ke dalam *film*, maka efisiensi *drug loading* semakin besar. Nilai efisiensi *drug loading* pada film berkisar antara 40,429-78,857%.

KESIMPULAN

Modifikasi *edible film* pektin-pati jagung dapat diaplikasikan sebagai *Drug Delivery System* (DDS). Penambahan komposisi pati jagung pada pektin yang semakin besar (rentang 0-1 gram) mempengaruhi karakteristik mekanik *film* yaitu penurunan nilai kuat tarik berkisar dan peningkatan persen pemanjangan. Penambahan konsentrasi gliserol (0-15%) juga berpengaruh terhadap karakteristik mekanik film yaitu penurunan nilai kuat tarik dan peningkatan persen pemanjangan.

Pada aplikasi membran pengahantar obat asam salisilat, penambahan komposisi pati jagung dan gliserol pada pektin yang semakin besar pada *film* akan mengakibatkan efisiensi *drug loading* semakin besar. Nilai efisiensi *drug loading* terbesar yaitu 83,25% untuk komposisi pektin-pati jagung 2 : 1 (g/g) dan 78,86 % pada konsentrasi gliserol 15%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta atas bantuan dana pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Hortikultura, 2015, *Statistik Produksi Hortikultura Tahun 2014*, Kementerian Pertanian.
- Food Chemical Codex, 1996, *Pectins*, <http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/> (diakses 4 April 2016).
- Herbstreith, K., Fox, G., 2005, *Pectin*, http://www.herbstreithfox.de/pektin/forschung_und_entwicklung/forschung_entwicklung04a.htm (diakses 11 April 2016).
- Hoejgaard, S., 2004, *Pectin Chemistry, Functionality, and Applications*, <http://www.cpkelco.com/Ptalk/ptalk.htm> (diakses 4 April 2016).
- Hyene, K., 1987, *Tumbuhan Berguna Indonesia-I*, Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan Bogor.

- Krochta, J. M., Johnson, C. M., 1997, *Edible Film and Biodegradable Polymer Film Challenger and Opportunities*, Journal Food Technology, 51 (2); 6174.
- Lehninger, A.L., 1988, *Dasar-Dasar Biokimia Jilid 1*, Erlangga, Jakarta.
- Mishra, R.K., Datt, M., Banthia. A.K., 2008, *Synthesis and Characterization of Pectin / PVP Hydrogel Membranes for Drug Delivery System*, American Association of Pharmaceutical Scientists, 9 (2), 395-403
- Mishra, R.K., Banthia, A.K., Majeed, A.B.A., 2012, *Pectin Based Formulations for Biomedical Applications : A Review*, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, Volume 5, 1-7
- Sadeghi, M., 2011, *Pectin-Based Biodegradable Hydrogels with Potential Biomedical Application as Drug Delivery Systems*, Journal of Biomaterial and Nanotechnology, 2, 36-40.
- Silva, M.A., Bierhalz, A.C.K., and Kieckbusch, T.G, 2009, *Alginate and Pectin Composite Films Crosslinked with Ca²⁺ ions: Effect of The Plasticizer Concentration*, Journal Carbohydrate Polymer, 77, 736-742.
- Suppakul, P., 2006, *Plasticizer and Realtive Humidity Effects on Mechanical Properties of Cassava Flour Films*, Department of Packaging Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
- Waryoko, Rahardjo, B., Marseno, D.W., dan Karyadi, J.N.W., 2014, *Sifat Fisik, Mekanik dan BarrierEdible Film Berbasis Pati Umbi Kimpul (Xanthosoma Sagittifolium) yang Diinkorporasi dengan Kalium Sorbat*, Jurnal Agritech, 34(1), 72-80.
- Wirawan, S.K., Prasetya, A., Ernie, 2012, *Pengaruh Plasticizer pada Karakteristik Edible Film dari Pektin*, Jurnal Reaktor, 14 (1), 61-67.

DASHBOARD EKSEKUTIF AKADEMIK DI UNIVERSITAS UNTUK SARANA EVALUASI DIRI, PERSIAPAN AKREDITASI, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN STUDI KASUS UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

Dody Haryadi

*Teknik Informatika, Universitas Al Azhar Indonesia
dodyharyadi@uai.ac.id*

ABSTRAK

Dunia korporasi saat ini menghadapi permasalahan, yaitu membengkaknya data akibat keberhasilan implementasi berbagai sistem terkomputerisasi. Begitu pula dalam dunia pendidikan, khususnya universitas. Keberhasilan Sistem Informasi Akademik (SIA) menuntut adanya berbagai laporan yang ingin dihasilkan secara cepat, tepat, akurat dan relevan. Laporan ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi performa dan mutu sebuah program studi atau perguruan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi oleh BAN-PT merupakan salah satu parameter dalam menentukan mutu perguruan tinggi serta program studi di Indonesia. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti dan dokumen yang disiapkan institusi perguruan tinggi yang sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh BAN-PT, diantaranya adalah evaluasi diri dan borang akreditasi program studi. Dalam melaksanakan proses evaluasi diri dan pengisian borang, diperlukan sumber data yang digunakan sebagai dasar dalam menilai pada suatu kriteria. Pada kebanyakan program studi, semua data tersebar pada sistem informasi dan dokumen fisik yang berbeda sehingga membutuhkan waktu dan usaha yang lebih untuk mengintegrasikan hingga menilainya. Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang mampu mengambil dan menampilkan hasil evaluasi secara visual secara otomatis dengan lebih hemat waktu dan usaha. Pengembangan system ini menggunakan metode System Development Live Cycle (SDLC). Salah satu bentuk visualisasi yang dapat menggambarkannya adalah dashboard. Melalui dashboard, pihak internal program studi atau perguruan tinggi dapat mengetahui posisi penilaian mereka pada periode tertentu sehingga dapat mengevaluasi keadaan internal program studi, dan mampu memperbaikinya dimasa datang. Penelitian dimaksudkan untuk mengembangkan dashboard eksekutif akademik.

Kata kunci : dashboard monitoring, akreditasi, akademik, SDLC

ABSTRACT

The corporate world nowadays facing so many troubles, such as data explosion caused by the successful implementation of computerization systems on so many aspects. So as in education world, especially university. The success of Sistem Informasi Akademik (SIA) demands many reports to be produced quickly, properly, accurately, and relevant. These reports are used to analyze and evaluate both performance and quality of a department in an Indonesian university and the university itself. University accreditation by BAN-PT is one of the parameter to determine the quality of a university and the department in Indonesia. The decision about quality are based on valuation from documents and proofs which is prepared by the university based on BAN-PT's standards, in between are self-evaluation and department accreditation forms. In the process self-evaluation and form filling, data sources are a necessity for a foundation in a criteria valuation. In most of the departments, all data spreads among different information systems and physical documents so it takes a lot of time in integrating up to valuating process. For that purpose, a system that capable of take and visually display the evaluation result automatically, efficiently and effortlessly is highly necessary. The development for this system is using System Development Live Cycle (SDLC) method. One of the visualization form that can display it calls dashboard. Through dashboard, internal department or the university able to locate their valuation position so that they can evaluate their internal condition and capable to improve in the future. This research are held to improve academic executive dashboard.

Keywords : dashboard monitoring, accreditation, academic, SDLC

PENDAHULUAN

Salah satu cara penilaian perguruan tinggi di Indonesia adalah dengan sistem akreditasi. Penilaian tersebut digunakan sebagai tolak ukur mutu di seluruh program studi dan institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta menyelenggarakan program profesi maupun akademik. Semakin baik nilai akreditasi akan berdampak pada pandangan pihak luar mengenai kualitas program studi dan institusi pendidikan tinggi tersebut. Proses akreditasi sendiri dilakukan dalam periode tertentu dan perlu diperbarui paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Sehingga elemen perguruan tinggi yang terkait perlu untuk memperbarui data pendukung akreditasi tersebut sebagai persiapan untuk evaluasi yang akan datang.

Elemen-elemen pendukung dalam program studi atau institusi, terutama ketua prodi/institusi, dosen, serta tim akreditasi internal perlu melakukan tahap evaluasi diri sebelum menggunakan borang yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam penilaian oleh tim Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Borang adalah sebuah formulir yang digunakan tim akreditasi sebagai dasar penilaian berisi detail kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam proses penilaian. Pihak internal prodi/institusi perlu untuk menyesuaikan keadaan sekarang dan keadaan yang diharapkan pada standar BAN PT. Dalam pengukuran tersebut dapat diketahui seberapa besar nilai mutu prodi/institusi berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang ada (BAN PT Buku II, 2009).

Pada kebanyakan program studi atau perguruan tinggi, semua data tersebar pada sistem informasi dan dokumen fisik yang berbeda sehingga membutuhkan waktu dan usaha yang lebih untuk mengintegrasikan hingga menilainya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengorganisasikan keseluruhan data program studi yang tersebar dan tidak teratur dengan baik agar lebih mudah dievaluasi sendiri sebelum periode penilaian oleh lembaga akreditasi nasional. Seperti pada studi kasus di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), yang memiliki 17 program studi, apabila telah masuk masa akreditasi maka unit Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PKSI) cukup kewalahan dalam menyiapkan laporan untuk Borang A dan Evaluasi Diri yang bersumber dari Sistem Informasi Akademik (SIA) dan sumber eksternal sistem lainnya, dengan format data yang bisa berbeda-beda. Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang mampu mengambil dan menampilkan hasil evaluasi secara visual secara otomatis dengan lebih hemat waktu dan usaha. Salah satu bentuk visualisasi yang dapat menggambarkannya adalah dashboard.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan melakukan studi pendahuluan dengan studi literatur, dan review hasil penelitian pendahulu.

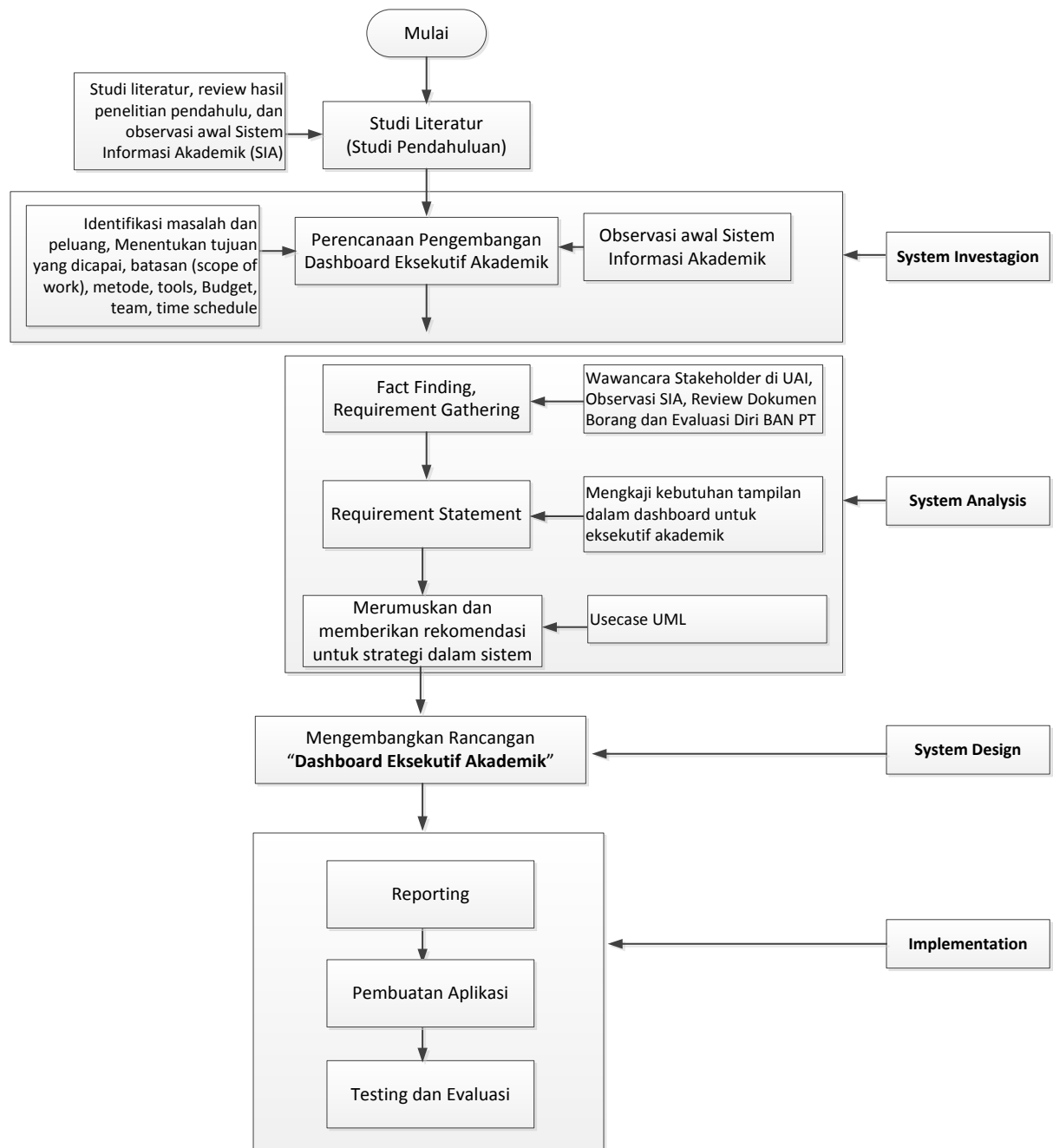
Tahapan pengembangan “Dashboard Eksekutif Akademik “ ini mengacu kepada langkah-langkah dalam Software Development life Cycle (SDLC) (Rainer,2009), yaitu pertama, dilakukan system investigation, meliputi observasi awal Sistem Informasi Akademik (SIA), identifikasi masalah dan peluang, menentukan tujuan yang dicapai, batasan (*scope of work*), metode, *tools*, *risk analysis*, *budget*, *team*, *time schedule*. Pada tahap ini menghasilkan dokumen perencanaan.

Kemudian pada tahap *system analysis*, dilakukan mengumpulkan kebutuhan sistem (*requirement gathering*) dengan melakukan teknik-teknik *fact finding* meliputi wawancara dengan stakeholder di UAI yang akan menjadi pengguna dashboard, observasi SIA, review dokumen Borang dan Evaluasi Diri BAN PT. Peneliti setelah itu mengkaji kebutuhan tampilan dalam dashboard eksekutif akademik. Pada tahap ini peneliti merumuskan dan memberikan rekomendasi untuk Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software Requirement Specification*) yang berisi *requirement statement* dan *usecase modeling*.

Selanjutnya, pada tahap *system design*, akan dilakukan rancangan tampilan dashboard, rancangan menu aplikasi dan *user interface*. Bagian ini juga dilakukan persiapan data, dengan pengambilan data mentah yang dimiliki oleh program studi untuk melengkapi data-data yang tidak dihasilkan oleh keluaran sistem informasi pada program studi.

Kemudian, tahap implementasi, diawali dengan melakukan proses *Extract Transform Load* (ETL) untuk menggabungkan antara data-data dari berbagai sumber, yang dihasilkan dari keluaran Sistem Informasi Akademik (SIA) program studi dengan data-data yang belum didapatkan dari sistem informasi tersebut berupa data eksternal. Umumnya yang terjadi adalah sebagian data yang dijadikan sumber masih terdapat perbedaan format, perbedaan tipe data, adanya kalkulasi dasar, serta pengurangan/reduksi data yang tidak dibutuhkan. Sehingga perlu dilakukan proses ETL supaya output yang dihasilkan dapat selaras dengan masukan dan desain dashboard yang diinginkan.

Setelah aplikasi ini jadi akan dilakukan testing dan evaluation oleh beberapa pengguna dashboard. Bila aplikasi dinilai belum sesuai, ada beberapa perbaikan, maka akan diperbaiki sehingga dapat dinilai sesuai. Metode Penelitian dapat dilihat pada **Gambar 1**.



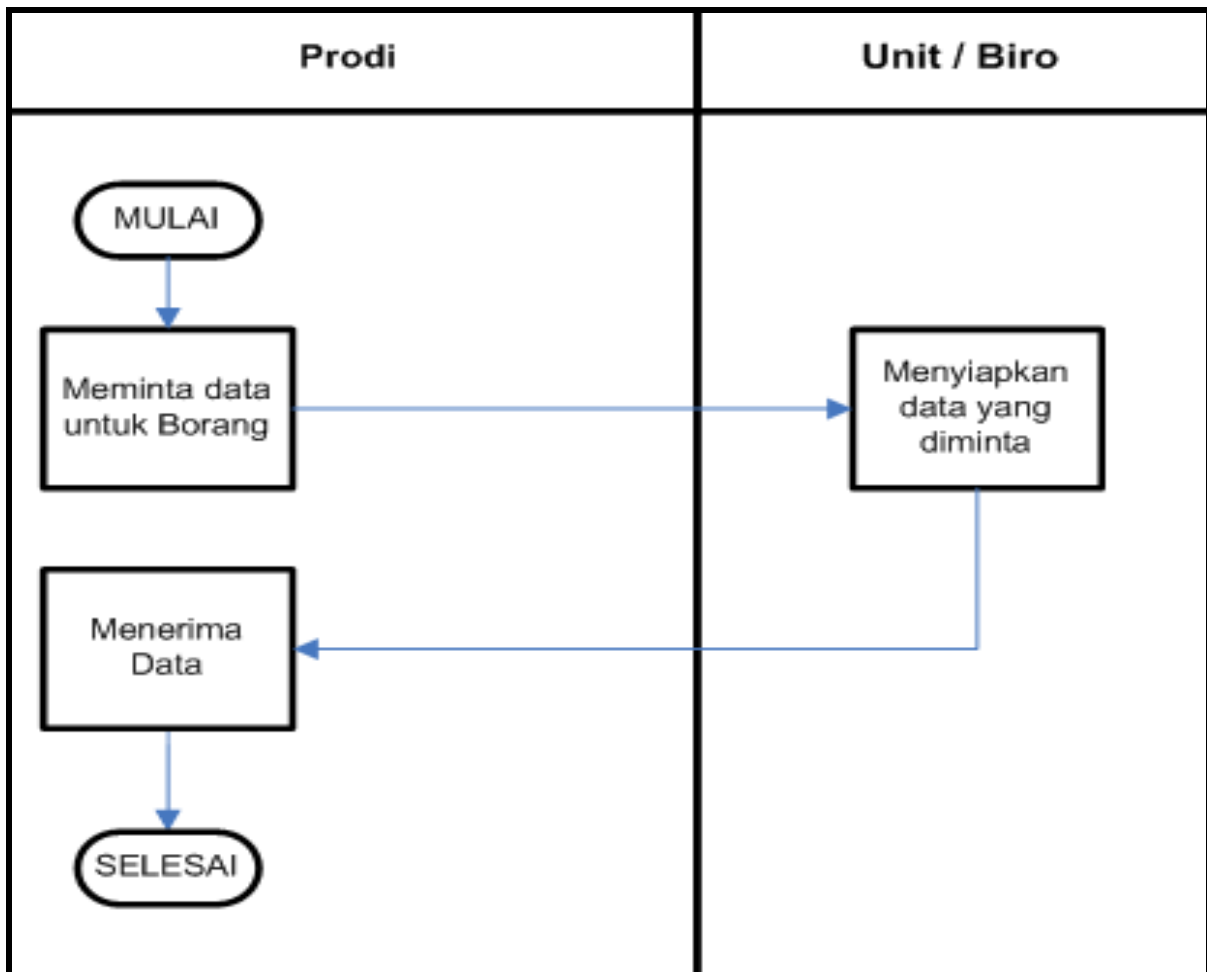
Gambar 3 Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

System Investigation

Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) memiliki 17 program studi, pada saat proses pengisian borang akreditasi, banyak permintaan data yang ditujukan ke unit / biro. Daftar unit / biro tersebut yaitu unit Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PKSI), Biro Sarana dan Prasarana (BSP), Biro Administrasi Keuangan (BAK), dan unit Perpustakaan. Masa pengurusan akreditasi untuk masing-masing program studi berbeda-beda, dan format data yang

diminta-pun terkadang berdeda juga. Bagi unit/biro, hal ini sangat memerlukan waktu dan ketelitian, karena harus mengerjakan hal yang sama berulang-ulang, terlebih lagi jika format data yang diminta berbeda-beda. Permintaan data-data akademik diajukan ke unit PKS, jumlah data yang dibutuhkan lebih banyak. Data-data tersebut diambil dari Sistem Informasi Akademik (SIA), dengan melakukan query langsung ke database, sesuai dengan format data yang diminta. Kondisi saat ini dapat dilihat pada **Gambar 2**.

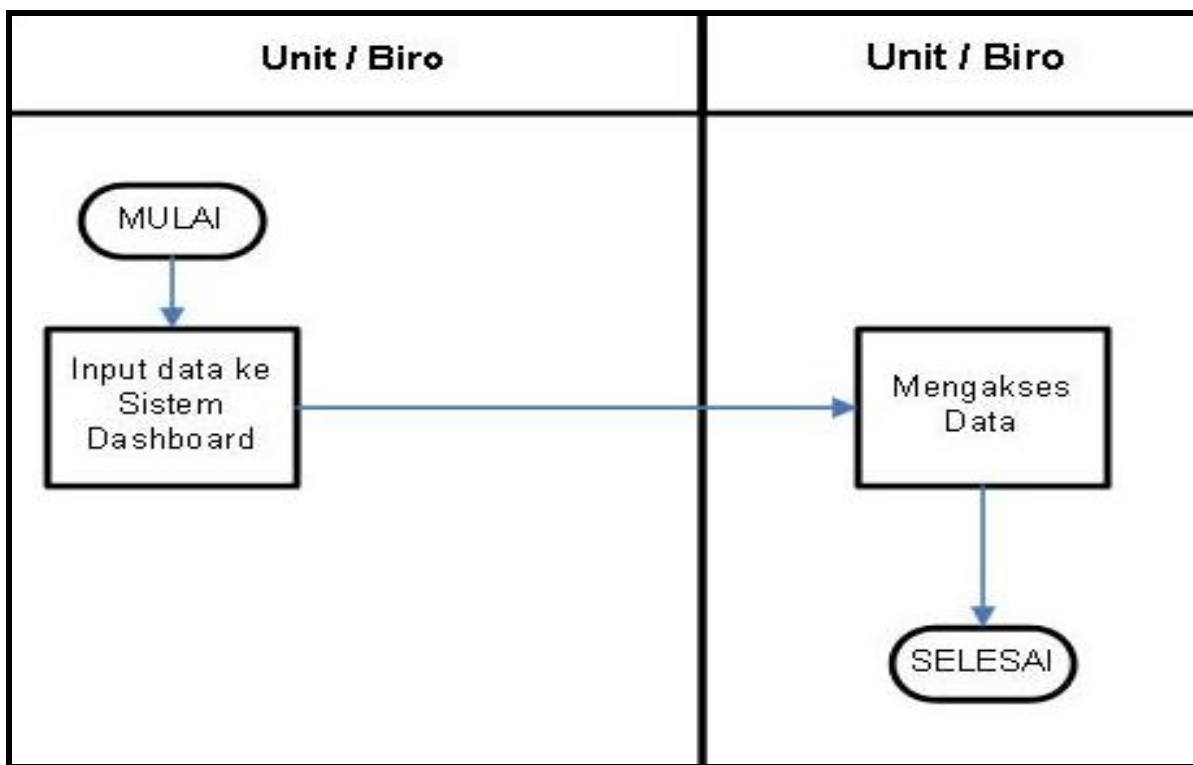


Gambar 4 Proses bisnis sebelum ada sistem

Dengan kondisi di atas, penulis menganalisa data-data apa saja yang dibutuhkan, kemudian melakukan pemetaan terhadap borang akreditasi. Banyak data yang diambil dari SIA, sehingga perlu dilakukan analisa basis data SIA. Dari daftar kebutuhan tersebut akan dirancang sistem “Dashboard Eksekutif Akademik” yang menyediakan data-data kuantitatif yang diperlukan untuk mengisi borang akreditasi. Dengan adanya sistem ini, prodi dapat langsung mengakses data-data kuantitatif yang diperlukan, dan unit/biro dapat langsung mengisinya ke sistem.

System Analysis

Dengan adanya sistem ini akan mempersingkat proses pengambilan data oleh prodi. Prodi dapat langsung mengaksesnya melalui sistem tanpa harus meminta ke unit/biro, alurnya dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Gambar 5 Proses Bisnis setelah ada sistem

Hasil dari analisa dokumen borang akreditasiI, terdapat 22 jenis data yang dapat disajikan dalam sistem. Rinciannya dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1 Jenis data yang akan dibuat dalam sistem

No	Jenis Data	Penyedia Data	
		SIA	Unit / Biro
	Borang 3A		
1	3.1.1. Mahasiswa dan Lulusan	√	
2	3.1.4. Mahasiswa Reguler 7 thn	√	
3	4.3.3. Aktivitas Dosen Tetap (SKS)	√	
4	4.3.4. Aktivitas Mengajar Dosen Tetap Sesuai Keahlian	√	
5	4.4.2. Aktivitas Mengajar Dosen Tidak Tetap	√	
6	5.4.1. Pembimbing Akademik	√	

7	5.5.1. Pembimbing Tugas Akhir	√	
8	6.2.1. Realisasi Perolehan Dana		√
9	6.2.1. Realisasi Alokasi Dana		√
10	6.3.2. Data Prasarana		√
11	6.3.3. Data Prasarana Penunjang		√
12	6.4.1. Rekapitulasi Pustaka		√
13	6.4.1. Jurnal		√
14	6.4.2. Sumber Pustaka di Tempat Lain		√
15	6.4.3. Peralatan Laboratorium		√
16	6.5.2. Aksesibilitas Jenis Data		√
Borang 3B			
1	3.1.2. Mahasiswa Reguler dan Transfer	√	
2	3.2.1. Rerata Masa Studi dan IPK	√	
3	4.2. Mata Kuliah Fakultas	√	
4	6.1.1. Jumlah Dana (Gaji&Upah)		√
5	6.1.1. Penggunaan Dana		√
6	6.4.2. Aksesibilitas Data		√

Data yang diminta ke unit/biro ada yang berasal dari SIA, maupun dari dokumen yang belum tersistemkan. Untuk data yang belum diambil dari SIA, unit/biro dapat mengisinya langsung ke dalam sistem. Pada **Tabel 1** dapat dilihat mana saja jenis data yang diambil dari SIA maupun Unit / Biro.

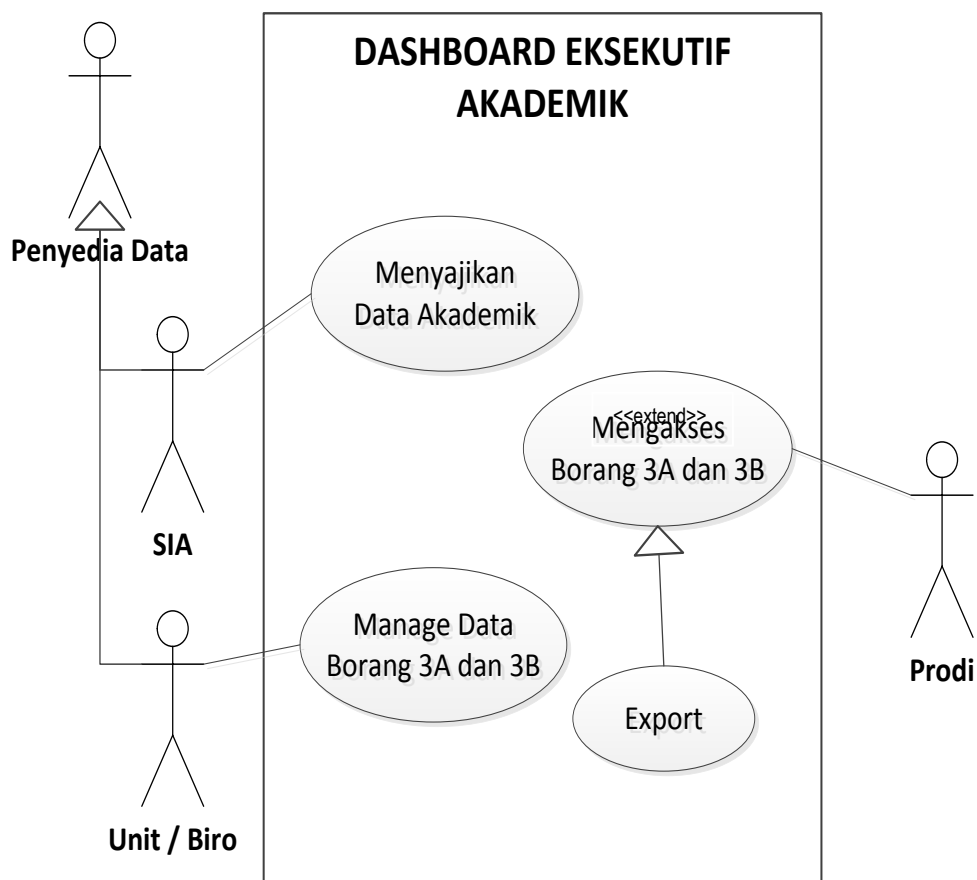
Berdasarkan standardisasi spesifikasi pemodelan berorientasi objek atau yang biasa dikenal dengan UML, penulis menggunakan *use case diagram* dalam perancangan sistem aplikasi. Daftar aktor yang terlibat dalam aplikasi dapat dilihat di **Tabel 2**.

Tabel 2 Daftar Aktor

Aktor	Deskripsi
Prodi	Aktor yang mengambil data di sistem, yang termasuk ke dalam aktor ini yaitu Kepala Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Dosen Tetap sesuai dengan Program Studi masing-masing .

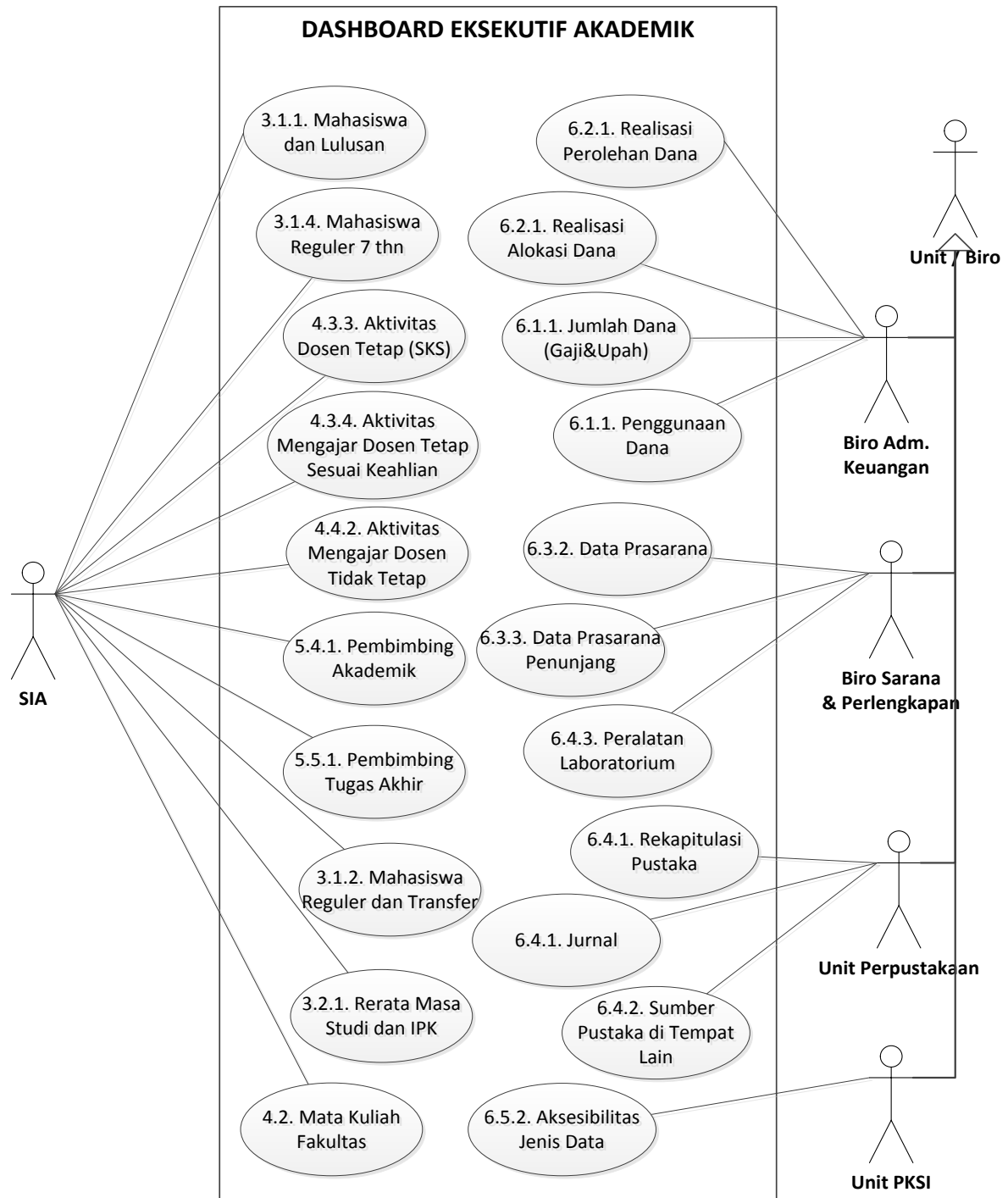
Penyedia Data	
- SIA	Sistem Informasi Akademik berfungsi sebagai sumber data yang akan diolah menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan untuk mengisi borang akreditasi.
- Unit / Biro	Aktor ini bertugas menyediakan data yang belum tersedia di SIA.

Gambaran umum sistem dapat dilihat pada **Gambar 4**. Terdapat 2 aktor yang terlibat yaitu Prodi dan Penyedia Data. Aktor Penyedia Data dikelompokkan menjadi penyedia data yang diambil dari SIA dan penyedia data yang diambil dari Unit / Biro.



Gambar 6 Use Case Diagram secara umum

Pada use case di **Gambar 5**, dapat dilihat aktor Unit / Biro dikelompokkan lagi berdasarkan bagiannya masing-masing.



Gambar 7 Use case berdasarkan penyedia data

System Design

Tampilan yang dibuat untuk sistem aplikasi Dashboard Eksekutif Akademik dapat dilihat pada Gambar 6.

The screenshot shows a dashboard titled 'Borang UAI' with a sidebar menu on the left. The main content area is titled 'Borang 3A - 3.1.1. Mahasiswa dan Lulusan'. Under 'Pencarian Data', there are filters for 'Program Studi' (Teknik Informatika) and 'Tahun Ajaran' (2011-2015). Below the filters, there is a 'Download' icon and a title 'Profil Mahasiswa dan Lulusan Program Studi Teknik Informatika Tahun 2011-2015'. A table displays the search results for the years 2011 to 2015, including columns for 'Tahun Akademik', 'Daya Tampung', 'Jumlah Calon MHS Reguler', 'Jumlah MHS Baru', 'Jumlah Total MHS', 'Jumlah Lulusan', 'IPK Lulusan Reguler', and 'Persentase Lulusan Reguler dgn IPK'.

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon MHS Reguler		Jumlah MHS Baru		Jumlah Total MHS		Jumlah Lulusan		IPK Lulusan Reguler			Persentase Lulusan Reguler dgn IPK		
		Ikut Seleksi	Lulus Seleksi	Reguler bukan Transfer	Transfer	Reguler bukan Transfer	Transfer	Reguler bukan Transfer	Transfer	Min	Rat	Mak	< 2.75	2.75 - 3.50	> 3.50
2011		103	51	29	3	170	12	26	1	2.54	2.97	3.55	8	16	2
2012		106	55	31	0	170	8	18	7	2.47	3.05	3.77	5	10	3
2013		65	43	22	0	138	4	38	2	2.37	3.00	3.78	14	19	5
2014		322	48	29	1	135	4	24	1	2.29	2.97	3.9	10	11	3
2015		231	51	31	1	113	2	23	0	2.51	3.17	3.92	6	9	8

Gambar 8 Tampilan Sistem Dashboard Eksekutif Akademik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis masalah dan sistem yang telah dibangun, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Program studi yang akan mengisi borang akreditasi dapat mengakses data yang dibutuhkan melalui sistem ini.
2. Format data yang disediakan dalam sistem diseragamkan dengan acuan kepada Borang 3A dan Borang 3B.
3. Sistem dapat menyajikan data dalam periode tertentu, dan juga berdasarkan program studi.
4. Terdapat beberapa formulir borang yang belum terintegrasi dengan sistem informasi lainnya, sehingga harus diisi rekapitulasi-nya oleh unit/biro yang bersangkutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 003/SP2H/LT/DRPM/II/2016 dan 214/SP2H/LT/DRPM/III/2016, tanggal 17 Februari 2016 dan 10 Maret 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, BAN-PT: Jakarta (2009).
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana, BAN-PT: Jakarta (2009).
- Bedi, Stephen S. Herrmann, Timothy W. Dayton, Stephen B. "Using a Dashboard Report Card to Monitor and Report Institutional Performance" in *Finding Common Ground: Quality Assurance, Quality Improvement*", vol 4, North Central Association of Colleges and School: Chicago (2008) 35.
- CIBIA (Certified International Business Intelligent Associate) Module, PASSAS, 2015 Rasmussen, Bansal, Chen, *Business Dashboards: A Visual Catalog for Design and Development*, John Wiley & Sons: New Jersey, 2009
- Rainer, RK, and Turban, E. 2009. *Introduction and Information System: Supporting and Transforming Business*. John Wiley and Sons.
- Saputro. Fandi C., dkk. *Pembuatan Dashboard Berbasis Web Sebagai Sarana Evaluasi Diri Berkala untuk Persiapan Penilaian Akreditasi Berdasarkan Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), 2012
- Turban Efraim, *Decision Support Systems And Intelligent Systems*, Prentice Hall, Upper Saddle River, Nj, 1998
- Widyaningtias. Kurnia, Yuhana. Umi Laili, Ariyani. Nurul Fajrin, (2011, December 07), *Pembangkitan Borang Akreditasi Nasional di Perguruan Tinggi Berbasis OLAP pada Data SDM dan Penelitian*. Available: digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-14277-paperpdf.pdf > diakses pada tanggal 07 Desember 2011.
- Goldman, C. R. and A. J. Horne. 1983. *Limnology*. International Student Edition. Mc. Graw Hill. Int. Book. Co. Tokyo.
- Rapaglia, John P., and Henry J. Bokuniewicz. 2009. The effect of groundwater advection on salinity in pore waters of permeable sediments. *Limnology and Oceanography*. Vol. 54(2) : 630-643.

Ahalya, N and Ramachandra T.V. 2001. Wetlands Restoration and Conservation – What, How and Why? *Proceedings of National Conference on Control of Industrial Pollution and Environmental Degradation*. September 14-15, 2001. PSG College of Engineering, Coimbatore : 560-564.

PENERAPAN KEBIJAKAN SATU IDENTITAS PADA KTP-el SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Fatria Khairo

Dosen Tetap STIH-Sumpah Pemuda

Email : stihpada@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan Satu Identitas pada KTP-el di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan database yang lengkap dan akurat pada gilirannya akan mampu menyediakan data bagi perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomis masyarakat baik pusat maupun daerah. Salah satunya akan bermanfaat untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga dapat digunakan untuk mencegah ataupun menanggulangi salah satunya penyamaran dokumen sebagai salah satu dari modus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci : KTP-el, korupsi

ABSTRACT

One Identity Policy on KTP-el in Indonesia aims to produce a complete and accurate database in turn will be able to provide data for policy formulation, planning and economic activities of both central and local communities. Beneficial of One Identity Policy to prevent and preclude their dual identity card and fraud identity, so it can be used to prevent for fraud document as one of the motif of corruption in Indonesia.

Keywords : KTP-el, corruption

PENDAHULUAN

Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan yakni **“power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”** bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut (Djaja, 2008).

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Keadaan yang demikian suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi

utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, penegakan hukum merupakan faktor yang sangat penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum harus dilakukan secara konsisten yang berorientasi kepada keadilan akan merupakan konsekuensi logis bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai negara hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah sebatas retorika, akan tetapi senantiasa diarahkan demi terwujudnya supremasi hukum. Untuk menyukseskan agenda ini, tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, akan tetapi dituntut pula komitmen setiap warga masyarakat untuk taat pada hukum dan tentunya bagi aparat penegak hukum sudah menjadi tugas dan kewajibannya untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum yang berintikan keadilan. (Chaeruddin, dkk,2007).

Terkait dengan kebijakan Satu Identitas yang digalakkan oleh Dirjen Dukcapil, dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pendataan satu identitas setiap warga masyarakat yang berperan penting dalam mendukung penegakan hukum, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamatkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian dalam negeri antara lain untuk 1). pemanfaatan, pelayanan Publik, 2). Perencanaan Pembangunan, 3). Alokasi Anggaran, 4). Pembangunan Demokrasi dan 5). Penegakan Hukum dan pencegahan kriminal. Masalah Adminduk di Indonesia seperti disampaikan oleh Dirjen Dukcapil pada saat Kuliah Umum di STIHPADA tanggal 1 Oktober 2016 antara lain 1). Jumlah Penduduk yang besar (257 Juta) belum sadar urgensi dokumen kependudukan, 2) Prosedur pengurusan yang panjang, 3) **penduduk banyak yang memiliki KTP lebih dari satu**, 4) Pemanfaatan data penduduk belum terintegrasi, 5) Wilayah Indonesia Luas dan berpulau-pulau. Pada point Penduduk banyak yang memiliki KTP lebih dari satu, penulis menganalagikan bahwa hal tersebut dapat pula menyebabkan Penyamaran Dokumen bahkan Pemalsuan Dokumen atau Fraud yang pada akhirnya sangat rentan untuk terindikasi terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin menelaah lebih lanjut tentang : **“PENERAPAN KEBIJAKAN SATU IDENTITAS PADA KTP-el SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa studi kepustakaan .

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-Undangan, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa perlunya Kebijakan Satu Identitas di Indonesia ?
2. Bagaimana Kebijakan satu Identitas berperan dalam sebagai Salah satu strategi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Perlunya Kebijakan Satu Identitas pada KTP-el di Indonesia

Kebijakan satu Identitas yang disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Prof Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. pada saat kuliah Umum di STIH-Sumpah Pemuda Pada tanggal 1 Oktober 2016, menurut penulis merupakan kebijakan yang harus sangat didukung oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam mensukseskan Program Strategi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil tolak ukurnya tidak hanya didukung pada regulasi semata. Aturan hukum dan regulasi mutlak diperlukan sebagai landasan dan melaksanakan program kerja, namun lebih dari itu yang paling utama adalah komitmen bersama antara Pemimpin di daerah dengan melihat jauh ke depan betapa besar manfaatnya dalam mendukung kesejahteraan rakyat karena berkaitan dengan konsep kebijakan pembangunan itu sendiri. Dengan komitmen dan dukungan semua pihak, diharapkan masalah kependudukan dapat teratasi sehingga kebijakan pembangunan tepat sasaran.

Tujuan penggunaan Satu Identitas yang tertera pada NIK dan penerapan e-KTP, akan menghasilkan database yang lengkap dan akurat pada gilirannya akan mampu menyediakan data bagi perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomis masyarakat baik pusat maupun daerah. Disamping itu, penggunaan NIK nasional dan penerapan e-KTP juga akan bermanfaat untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu. Terkait masalah data palsu, penulis berasumsi bahwa data palsu merupakan jembatan untuk menuju suatu tindak

korupsi. Penggunaan data palsu dapat dipergunakan untuk berbagai tindak pidana misalnya, pencucian uang dan lainnya. Penyamaran dokumen salah satunya banyaknya KTP ganda adalah salah satu dari modus tindak pidana korupsi di Indonesia⁹⁴.(Rohim,2008).

Dalam menjalankan aturan kependudukan di Indonesia terdapat Dasar Hukum yang menaungi Administrasi Kependudukan, yaitu; UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Perpres NO. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional; dan Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009. Substansi adminduk adalah berupa pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan. Pencatatan sipil berupa pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan pelaporan penduduk yang tidak bisa melapor sendiri. Sementara pendaftaran kependudukan berupa pencatatan biodata penduduk per keluarga berikut sidik jari (biometrik), pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan kependudukan, pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri. Manfaat yang diperoleh pemerintah adalah dalam hal perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, kebutuhan sektor pembangunan lain, pemilu dan pilkada, penyusunan perkembangan kependudukan; penyusunan proyeksi pembangunan, verifikasi jati diri penduduk dan dokumen kependudukan.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan adalah melalui pemutakhiran database kependudukan; meningkatkan kualitas database kependudukan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan SIAK secara on line dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Pusat; percepatan penguatan regulasi di daerah melalui Perda penyelenggaraan administrasi kependudukan serta diikuti dengan penegakan hukum (*Law Enforcement*) bagi pelanggaran administrasi kependudukan; penerapan awal (uji petik) KTP berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip; pemberian; menerapkan KTP berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip (e-KTP) ; melakukan kerjasama antara

⁹⁴Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm. 87.

Kemendagri dengan BPPT, Lembaga Sandi Negara, ITB dan APTIKOM untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga teknis.

Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip memiliki dasar hukum yang menjadi payung dalam pelaksanaannya. Pasal-Pasal yang berkaitan dgn e-KTP (Perpres No. 26 Tahun 2009) adalah pasal 2 bahwa standart dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak dan blangko e-KTP diatur dengan Peraturan Menteri (jo Permendagri No. 38 Tahun 2009); pasal 6 Ayat 1 bahwa e-KTP memuat kode keamanan (sidik jari) dan rekaman elektronik (chip); Tujuan dari penerapan KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip (e-KTP) ini adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan; memberikan perlindungan status hak sipil setiap penduduk; merupakan bentuk pengakuan negara bagi setiap penduduk.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas: 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Kinerja Dirjen Dukcapil dalam menerapkan program Satu Identitas tidak lain untuk mendukung Tujuan Administrasi Kependudukan yaitu : ***Pertama, Tertib Database Kependudukan*** meliputi terbangunnya database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat; database kependudukan Kabupaten/ Kota tersambung (online) dengan Provinsi dan Pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); database kependudukan Depdagri dan daerah tersambung (online) dengan instansi pengguna. ***Kedua, Tertib Penerbitan NIK*** meliputi NIK diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga (F-1.01) dengan menggunakan SIAK; tidak adanya NIK ganda. ***Ketiga, Tertib Dokumen Kependudukan (KK, KTP, Akta Pencatatan Sipil)*** meliputi prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; tidak adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu.

2. Pemanfaatan Kebijakan Satu Identitas pada KTP-el dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Untuk mendukung sistem penyelenggaraan negara anti korupsi dan berbasis keadilan. Pelaksanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia

seutuhnya dan seluruhnya secara adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, diperlukan usaha-usaha yang bersifat berkesinambungan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai bidang dan aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi serta bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang semakin meningkat, karena dalam kenyataannya tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat⁹⁵. (Djaja, 2010)

Sejalan dengan itu, maka untuk mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, telah dikeluarkan berbagai kebijakan. Diawali dengan penetapan Hari Anti Korupsi Sedunia oleh PBB pada tanggal 9 desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung dan Kapolri :

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa (penuntut Umum/anggota POLRI dalam rangka penegakan hukum)
3. Meningkatkan kerjasama antara Kejaksaan dengan Kepolisian Negara RI, selain dengan BPKP/PPATK dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Kebijakan selanjutnya untuk mendukung hal diatas adalah:

1. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari
2. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia
3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi⁹⁶.(Chaeruddin, dkk,2008)

⁹⁵Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV.Mandar Maju , Jakarta, 2010, hlm.139.

⁹⁶ Chaeruddin dkk, *Loc .Cit*, hlm. 13.

Sesuai amanat Pasal 58 ayat(4) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan: a) Pelayanan publik, b) Perencanaan pembangunan, c) Alokasi anggaran, d) Pembangunan demokrasi, e) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Selain hal tersebut diatas manfaat penerapan KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip (e-KTP) adalah identifikasi jatidiri, data dalam e-KTP benar-benar menunjukkan identitas diri pemegang e-KTP serta mencegah terjadinya pemalsuan dokumen maupun dokumen ganda dengan pengamanan data yang dapat diandalkan. Sehingga jika dihubungkan dengan tulisan ini, maka diharapkan penggunaan Kebijakan Satu Identitas pada KTP-el dapat membantu dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Saat ini beberapa manfaat Data Kependudukan KTP-el telah digunakan antara lain untuk mengetahui dengan cepat korban lalu lintas, pengungkapan identitas korban WNI dalam musibah Air Asia QZ 8501, Identifikasi korban tragedi Mina, Pengungkapan Identitas olah TKP Bom Starbucks coffe Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat, Perkara Teroris di Ciputat Jakarta Selatan, Pengungkapan Identitas Korban Bencana Tanah Longsor di Purworejo, Pengungkapan Identitas Korban Tabrak Lari, Pengungkapan Identitas Korban pembunuhan Wanita dalam Kardus di kolong jembatan Tol PIK tanggal 12-06-2016, (Fakrulloh,2016).

Dengan telah diterapkan beberapa manfaat KTP-el diatas maka diharapkan dengan kebijakan Satu Identitas pada KTP-el akan menghasilkan suatu sistem pengamanan yang baik untuk NKRI, konsolidasi antar sektor untuk memanfaatkan data kependudukan yang terintegrasi untuk kepentingan pembangunan dan pmerintahan yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi Rakyat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

a. Perlunya Kebijakan Satu Identitas pada KTP-el di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan database yang lengkap dan akurat pada gilirannya akan mampu menyediakan data bagi perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomis masyarakat baik pusat maupun daerah.

b. Pemanfaatan Kebijakan Satu Identitas pada KTP-el dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, akan bermanfaat untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu. Terkait masalah data palsu, penulis berasumsi bahwa data palsu merupakan jembatan untuk menuju suatu tindak korupsi. Penggunaan data palsu dapat dipergunakan untuk berbagai tindak pidana misalnya, pencucian uang dan lainnya. Penyamaran dokumen salah satunya banyaknya KTP ganda adalah salah satu dari modus tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Saran

1. Perlunya peran masyarakat dalam hal kesadaran untuk mengurus dokumen kependudukan (KTP-el) sehingga dengan database kependudukan yang baik akan dapat meningkatkan mutu Penegakan Hukum di Indonesia.

2. Perlunya Peningkatan sarana Prasarana yang baik di dalam menunjang keberhasilan program Kebijakan satu Identitas pada KTP-el untuk meningkatkan mutu database kependudukan di Indonesia..

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih Penulis Ucapkan terkhusus Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH Direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah memberikan Kuliah Umum di STIH-Sumpah Pemuda Palembang Pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan Tema “Hukum Administrasi Kependudukan sebagai Sabuk Pengaman NKRI”. Dengan Kuliah Umum tersebut sangat menginspirasi penulis untuk menuangkan sedikit ide untuk turut peduli dengan Masalah penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Korupsi. Penulis terinspirasi untuk menuangkan ide tersebut ke dalam tulisan dengan judul “PENERAPAN KEBIJAKAN SATU IDENTITAS PADA KTP-el SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”. Semoga sedikit inspirasi ini dapat bermanfaat bagi Penegakan Hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Chaerudin dkk, 2007, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV.Mandar Maju , Jakarta.

ISBN: 978-602-60361-3-1
Yogyakarta, 30 November 2016

Kuliah Umum *Hukum Administrasi Kependudukan Sebagai Sabuk Pengamanan NKRI* oleh Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil di Griya STIH-Sumpah Pemuda Palembang 1 Oktober 2016.

Rohim, 2016, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.

**EVALUASAI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN BAGI PERBAIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PRASEJAHTERA (STUDI KASUS DI JAWA TENGAH)**

Hadi Karyono*, Evert Max Tentua

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Fakultas hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

**karyonohadi08@gmail.com*

ABSTRAK

Untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera diperlukan perencanaan yang matang, dikelola dengan baik, dan terintegrasi antara tingkatan wilayah terendah, yakni desa, sampai ke tingkatan nasional. LPMD/LPMK merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi mendukung pemberdayaan masyarakat untuk tingkatan desa/kelurahan. Namun sejauh ini, data statistik menunjukkan bahwa pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera tidak banyak. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang menyebabkan ketidak optimalan pemberdayaan melalui LPMD/LPMK dengan metode studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah, ditemukan 11 poin permasalahan, yakni: (1) Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap LPMD/LPMK, (2) Pemahaman pengurus tentang tugas dan fungsi LPMD/LPMK, (3) Penyuluhan dari Pemerintah tentang tupoksi LPMD/LPMK, (4) Intensitas Koordinasi Internal LPMD/LPMK, (5) Intensitas koordinasi LPMD/LPMK dengan LSM lainnya, (6) Anggaran LPMD/LPMK, (7) Keterlibatan LPMD/LPMK dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, (8) Keterlibatan LPMD/LPMK dalam Musrenbang dan realisasi Musrenbang tingkat Kelurahan, (9) Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, (10) Akses Informasi pembangunan yang diterima masyarakat, (11) Revisi terbatas PP No 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.

Kata kunci : pemberdayaan, LPMD/LPMK, pra sejahtera.

ABSTRACT

To achieve the state purpose to be prosperous is necessarily to have well-planned, well-managed, and integrated program among those that have authority in the lowest level, which is conducted by village government, to those that have national authority. LPMD/LPMK (development community agency) is one of agencies in which the function and the order is to support community development in the bottom level (village). However, statistic data shows that decreasing amount of pre-prosperous family is not significantly decreased. This research discusses about the cause of being not optimum to develop community through LPMD/LPMK. The purpose of this study is to get an overview of the functions LPMD / LPMK in implementing the tasks of community empowerment, this reserch by using documentary analysis, interview, and observation method. The result of research found that 11 points of problem, they are; (1) The village chief (ravage) support to LPMD/LPMK, (2) The officer understanding toward task and function, (3) Government elucidation on main job and task of LPMD/LPMK, (4) Intensity of internal coordination of LPMD/LPMK, (5) Intensity of internal coordination with other non-governmental organisation, (6) LPMD/LPMK budget, (7) LPMD/LPMK involvement in the application of development in the village, (8) LPMD/LPMK involvement in musrenbang and in the application of musrenbang in the village, (9) Community involvement in the application of development, (10) Development information access received by community, (11) Limited revision on regulation no 73 year 2015 on village.

Keywords: empowerment, LPMD/LPMK, pre-prosperous.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera diperlukan perencanaan yang matang, dikelola dengan baik, dan terintegrasi antara tingkatan wilayah terkecil, yakni desa, sampai ke tingkatan nasional. Adanya integrasi kegiatan peningkatan kesejahteraan akan menghapuskan kesenjangan sehingga tercipta kesejahteraan sosial yang merata. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 mengamanahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata, yakni dengan tidak berpihak pada golongan tertentu saja. Cara yang diamanahkan Undang-Undang Dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah dengan pengelolaan perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan penguasaan sektor-sektor produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasahi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34 juga mengamanahkan tentang kesejahteraan sosial sisilain dari aspek perekonomian, yakni melalui pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Bentuk pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan ke kondisi yang lebih baik.

Terwujudnya amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak bisa dilakukan tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karenanya sesuai dengan otonomi daerah, pemerintahan yang ada di level paling bawah pemerintahan (desa dan kelurahan) membentuk suatu lembaga pembangunan yang melibatkan masyarakat (PP No.72 &73 tahun 2005). Lembaga ini disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Lembaga ini memiliki tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra pemberdayaan masyarakat desa (PP Nomor 72 tahun 2005 Pasal 90).

Melalui LMPD/LPMK yang ada di setiap desa maupun kelurahan diharapkan mampu memberikan dampak peningkatan kesejahteraan dari tingkatan keluarga pra sejahtera menuju ke tahapan keluarga sejahtera. Namun berdasarkan data statistik pemerintahan Jawa Tengah, jumlah keluarga prasejahtera masih mendominasi. Berikut ini data perkembangan jumlah keluarga berdasarkan tingkat kesejahterannya sejak tahun 2009-2013.

Tabel 1.1 Prosentase Kriteria Penduduk Berdasarkan Tingkat Kesejahterannya

Tahun	Jumlah	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus
	KK	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase

2013	10.024.478	27,18	19,99	22,68	25,83	4,32
2012	9.841.123	28,39	19,36	23,01	25,08	4,16
2011	9.816.537	28,79	19,22	23,06	24,85	4,08
2010	9.650.555	30,14	19,23	22,65	24,03	3,95
2009	9.489.024	31,59	19,12	22,18	23,18	3,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2016, diolah

Tabel 1.2 Kabupaten dan Kota yang Berada di Atas Nilai Rata-Rata Prosentase

Peringkat	Kabupaten / Kota	Prosentase
1	Kab. Grobogan	62,62
2	Kab. Rembang	50,21
3	Kab. Blora	43,33
4	Kab. Boyolali	37,19
5	Kab. Demak	36,64
6	Kab. Kendal	35,33
7	Kab. Batang	34,53
8	Kab. Pemasang	31,87
9	Kab. Pati	31,63
10	Kab. Brebes	28,05
11	Kab. Jepara	27,58
12	Kab. Banjarnegara	27,20
13	Kab. Magelang	26,79
14	Kab. Purbalingga	26,50
15	Kab. Sragen	25,79
16	Kab. Cilacap	25,76
17	Kab. Semarang	25,70
18	Kab. Purworejo	25,65

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2016, diolah

Tingginya jumlah penduduk pra sejahtera menunjukkan bahwa program peningkatan kesejahteraan melalui Lembaga Kemasyarakatan, khususnya LPMD/LPMK belum memberikan dampak yang signifikan. Hal ini lah yang menjadi latar belakang dilaksanakannya penelitian ini. Berbagai strategi pemerintah dan besarnya anggaran yang ada ternyata belum

mampu terlaksanakan dengan baik sekalipun telah ada LPMD dan LPMK yang dengan suka rela mengabdikan dirinya untuk masyarakat Jawa Tengah.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penelitian ini adalah: “ Apakah permasalahan yang menyebabkan ketidak optimalan pemberdayaan masyarakat pra sejahtera di Jawa Tengah?”

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ditujukan untuk mengetahui apakah permasalahan yang menyebabkan ketidak optimalan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera di Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pemberdayaan adalah terwujudnya masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang mandiri (Widodo dan dkk, 2015). Masyarakat yang mandiri akan mendukung kemandirian lembaga kamasyarakatan, begitu juga sebaliknya. Kemandirian yang ada tidak hanya kemandirian ekonomi tapi juga kemandirian dalam seluruh aspek kehidupan sehingga setiap masyarakat dapat dikatakan mampu memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan dasar, psikologi, pengembangan, dan aktualisasi diri. Serangkaian kemandirian ini lah yang menjadi visi besar pemberdayaan, yakni keluarga yang sejahtera.

Untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan, maka diselenggarakanlah Lembaga Kemasyarakatan yang salah satu bentuknya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) baik di tingkat desa (LPMD) maupun di tingkat kelurahan (LPMK). Organisasi ini merupakan tangan kanan Pemerintahan Desa maupun kelurahan untuk mewujudkan adanya masyarakat yang sejahtera melalui budaya gotong – royong yang menjadi ciri khas Indonesia.

Namun, hingga saat ini perkembangan kemandirian di Indonesia yang diukur dari data statistik jumlah penduduk berdasarkan kesejahteraannya belum berkurang signifikan. Padahal telah tersebar banyak LPMD/LPMK diseluruh wilayah Jawa Tengah. Hal ini menjadi titik evaluasi apakah adanya LPMD/LPMK sudah dapat dikatakan optimal atau masih ada fungsi dan kinerjanya yang belum sesuai dengan konsep dasar yang ada dalam perundang-undangan (UU, PP, Permen, Perda, Perbup/Perwalkot, Perdes, Perkedes).

Penelitian ini menemukan beberapa ketidak sesuaian antara regulasi LPMD/LPMK dengan implementasi di lapangan. Dimana beberapa ketidak sesuaian ini memberikan dampak pada tidak optimalnya kinerja LPMD/LPMK dalam membantu mewujudkan keluarga yang sejahtera. Temuan ketidak sesuaian penulis klasifikasikan dalam 10 kategori, yakni:

1. Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap LPMD/LPMK
2. Pemahaman pengurus tentang tugas dan fungsi LPMD/LPMK
3. Penyuluhan dari Pemerintah tentang tupoksi LPMD/LPMK
4. Intensitas Koordinasi Internal LPMD/LPMK
5. Intensitas koordinasi LPMD/LPMK dengan LSM lainnya
6. Anggaran LPMD/LPMK
7. Keterlibatan LPMD/LPMK dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan
8. Keterlibatan LPMD/LPMK dalam Musrenbang dan realisasi Musrenbang tingkat Kelurahan
9. Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
10. Akses Informasi pembangunan yang diterima masyarakat.
11. Revisi terbatas PP No.73 tahun 2005 tentang Kelurahan.

Klasifikasi permasalahan tersebut penulis kaji berdasarkan teori yang ada, yakni regulasi LPMD/LPMK Jawa Tengah yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian penulis kaji implementasi yang ada di lapangan. Sehingga dapat diketahui pada poin mana saja ketidaksiuaian implementasi LPMD/LPMK dengan regulasi yang ada.

Permasalahan yang ada pada implementasi LPMD/LPMK saling memberikan pengaruh. Dampak akhir dari permasalahan ini menyebabkan tujuan LPMD/LPMK tidak tercapai dengan baik. Salah satu indikator yang dapat dirasakan adalah pengembangan kesejahteraan yang tidak optimal serta masih banyaknya warga yang acuh tak acuh pada program pengentasan kemiskinan menuju keluarga sejahtera.

Tabel 4.1 Pembahasan Permasalahan Yang Menyebabkan Ketidakefektifan Pemberdayaan Masyarakat Pra Sejahtera Di Jawa Tengah

No.	Perihal	Regulasi LPMD/K di Jawa Tengah	Implementasi LPMD/LPMK di Jawa Tengah
1	Dukungan Lurah terhadap LPMD/LPMK	Permendagri Nomor 5 tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa LPMD/LPMK merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Sehingga LPMD/LPMK	Dari 30 sampel Kelurahan di kota Semarang, masih terdapat 12 LPMK yang merasa belum memiliki hubungan sinergisitas yang baik dengan Lurah setempat.

		<p>bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa atau Lurah setempat.</p> <p>Permendagri Nomor 5 tahun 2007 Pasal 3 menyatakan bahwa tugas Lembaga Kemasyarakatan, termasuk LPMD/LPMK adalah membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.</p>	
2	<p>Pemahaman Pengurus Tentang Tugas dan Fungsi LPMD/LPMK</p>	<p>Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 2 menyatakan bahwa lembaga Kemasyarakatan, termasuk LPMD/LPMK merupakan organisasi yang dibentuk atas prakarasa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.</p>	<p>Meskipun tugas pokok, fungsi, dan segala mekanisme kerja LPMD/LPMK sudah disampaikan dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa pengurus yang belum sepenuhnya memahami tupoksi tersebut. Salah satu sebabnya karena internalisasi tugas pokok dan fungsi LPMD/LPMK tidak banyak diulang kembali oleh Lurah setempat.</p>
3	<p>Penyuluhan dari Pemerintah tentang tupoksi LPMD/LPMK</p>		<p>Penyuluhan merupakan sesi yang berpengaruh untuk meningkatkan komunikasi pemerintahan dengan LPMD/LPMK. Salah satu penyuluhan LPMD/LPMK diselenggarakan oleh Bapermas melalui berbagai program nya.</p>

			<p>Akan tetapi pada implementasinya penyuluhan ini tidak secara terus menerus terlaksana. Sehingga peningkatan kapasitas tidak berjalan berkesinambungan. Penyuluhan yang kurang baik akan menurunkan optimalisasi fungsi dan tugas LPMD/LPMK terlebih karena masih ada LPM yang kepengurusannya hanya diisi oleh pengurus inti tanpa adanya kelengkapan kepengurusan yang lain.</p>
4	Intensitas koordinasi internal LPMD/LPMK	<p>Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 pasal 7 menyatakan bahwa LPMD/LPMK merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan. AD/ART Pasal 21 tentang LPMD/LPMK menyatakan bahwa organisasi ini merupakan Lembaga yang bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar.</p>	<p>Kurangnya dana operasional menyebabkan pengurus LPM tidak dapat melaksanakan kegiatan rutin seperti koordinasi internal. Koordinasi internal hanya dilakukan secara isidentil jika ada hal-hal yang perlu di bicarakan.</p>
5	Intensitas koordinasi LPMD/LPMK dengan LSM lainnya		<p>Relasi dalam berorganisasi merupakan hal yang mutlak dimiliki dan menentukan perkembangan kinerja organisasi tersebut. Namun, ketika intensitas koordinasi LPMD/LPMK dengan LSM lainnya jarang dilakukan maka terciptanya pembangunan yang</p>

			serempak juga sulit diciptakan terlebih dengan sistem bottom up.
6	Anggaran LPMD/LPMK	<p>Pemendagri Nomor 5 tahun 2007 Pasal 28 menyatakan bahwa pendanaan Lembaga Kemasyarakatan termasuk LPMD/LPMK berasal dari swadaya masyarakat; APBDes; APBD Kabupaten/Kota/Provinsi; bantuan Pemerintah; serta bantuan lain yang tidak mengikat.</p> <p>AD/ART DPD LPM Indoensia Pasal 33 tentang Sumber Dana menyatakan bahwa ada 4 sumber dana yang dibenarkan untuk pelaksanaan program kerja LPMD/LPMK yakni: Iuran anggota, APBN/APBD, bantuan tidak mengikat, dan usaha-usaha yang sah.</p>	<p>Berdasarkan regulasi yang ada, sebenarnya LPMD memiliki hak suara dalam pembagian anggaran, khususnya untuk Desa. Contoh antara lain dalam Petunjuk teknis ADD Kabupaten Grobogan. Lembaga kemasyarakatan termasuk LPMD/LPMK mendapatkan bagian 30 % dari APBD yang ada untuk penunjang kegiatan. Di Kota Semarang (2016) juga ada alokasi anggaran LPMK di setiap Kelurahan 25 juta, di tingkat kec. 40 juta. Namun dapatkah anggaran tersebut untuk pemberdayaan masyarakat sebagai- mana perencanaan pembangunan yang direncanakan oleh LPMK???? (proses kegiatan masih berjalan)</p>
7	Keterlibatan LPMD/LPMK dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan	<p>Pemendagri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 3 menyatakan bahwa tugas Lembaga Kemasyarakatan (termasuk LPMD/LPMK) adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan,</p>	<p>LPMD/LPMK merupakan tangan kanan pemerintah. Sehingga keikutsertaan LPMD/LPMK dalam penyusunan dan pembangunan di wilayah merupakan salah satu tugasnya. Akan tetapi</p>

	<p>di tingkat desa/kelurahan</p>	<p>memelihat dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; serta menumbuhkan kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pembangunan.</p> <p>Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 8 menyatakan bahwa salah satu tugas LPMD/LPMK adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif</p> <p>Permendagri Nomor 5 tahun 2007 Pasal 9 yang menyatakan bahwa LPMD/LPMK memiliki fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan</p> <p>AD/ART DPD LPM Indonesia Pasal 10 tentang Bentuk dan Sifat LPM menyatakan bahwa LPM merupakan lembaga yang bersifat independen.</p>	<p>dalam aplikasinya independensi LPMD/LPMK kurang dapat dioptimalkan karena tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya. Di sisi lain kita ketahui bahwa LPMD/LPMK merupakan kepengurusan yang dirumuskan sendiri oleh masyarakat sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan swasembada masyarakat dan memberi stimulus gotong-royong di dalam kegiatan pembangunan.</p>
8	<p>Keterlibatan LPMD/LPMK dalam Musrenbang dan realisasi Musrenbang tingkat Kelurahan</p>		<p>Untuk menciptakan desa yang mandiri melalui penyaluran aspirasi masyarakat dan swasembada gotong royong pembangunan maka diperlukan optimalisasi pemberdayaan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa</p>

			bersamaan dengan peningkatan kapasitas masyarakat desa.
9	Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan		
10	Akses Informasi pembangunan yang diterima Masyarakat		Objek pemberdayaan adalah masyarakat dan proses pembangunan berjalan dengan musyawarah mufakat. Namun pada realitanya, akses informasi perkembangan kinerja LPMD/LPMK tidak tersampaikan secara transparan kepada masyarakat. Salah satu bukti yang ditemukan dalam analisis penelitian ini adalah masih jarang nya halaman website yang berisi tentang perkembangan kinerja LPMD/LPMK yang dapat selalu diperbaharui. Padahal di sisi lain, sinergisitas antar LPM merupakan hal yang diperlukan. Adanya DPD LPM se Indonesia harus dapat mewadahi komunikasi aktif antara LPM dengan masyarakat secara umum.
11	Landasan Perundang-Undangan	Terdapat ketidak sesuaian antara PP No.73 tahun 2005 tentang Kelurahan dengan PP No.43 tahun	Di tingkat regulasi PP no.73 tahun 2005 tentang Kelurahan pasal 21 ayat(1) perlu adanya

		<p>2014 tentang Desa, yang mengatur LPMD dan LPMK.</p>	<p>revisi terbatas, berkaitan dengan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan yang ada. Kata dapat seyogyanya dirubah menjadi wajib, hal ini akan senada dengan UU Desa no.6 tahun 2014 pasal 94 ayat (4), berkaitan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat wajib memberdayakan lembaga pemberdayaan kemasyarakatan yang ada <i>yo</i> PP No.43 tahun 2014 tentang Desa pasal 151. Disamping itu juga perlu segera dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah kabupataen/kota yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang terbaru.</p>
--	--	--	--

KESIMPULAN

Masih tingginya angka keluarga pra sejahtera mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan masih belum optimal. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu penyebabnya adalah tidak optimalnya kinerja LPMD/LPMK sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Hal ini terjadi pada 11 aspek yakni:

1. Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap LPMD/LPMK. Masih ditemukan LPMD/LPMK yang tidak mendukung sepenuhnya aktifitas LPMD/LPMK nya.
2. Pemahaman pengurus tentang tugas dan fungsi LPMD/LPMK. Masih ditemukannya pengurus LPMD/LPMK yang tidak memahami sepenuhnya tugas dan fungsi LPMD/LPMK.
3. Penyuluhan dari Pemerintah tentang tupoksi LPMD/LPMK. Penyuluhan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas LPMD/LPMK belum berkesinambungan sehingga masih belum dapat meningkatkan kapasitas.
4. Intensitas Koordinasi Internal LPMD/LPMK. Kurangnya anggaran operasional menyebabkan kurangnya intensitas kooordinasi internal.
5. Intensitas koordinasi LPMD/LPMK dengan LSM lainnya. Jejaring LPMD/LPMK belum dapat dikatakan meluas sampai pada LSM pemberdayaan lainnya.
6. Anggaran LPMD/LPMK. Kurangnya anggaran LPMD/LPMK untuk penunjang kegiatan pemberdayaan.
7. Keterlibatan LPMD/LPMK dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan. LPMD/LPMK sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ternyata masih sering tidak dilibatkan dalam perenanaan pembangunan wilayahnya.
8. Keterlibatan LPMD/LPMK dalam Musrembang dan realisasi Musrembang tingkat Kelurahan. LPMD/LPMK sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ternyata masih sering tidak dilibatkan dalam perenanaan pembangunan wilayahnya dan juga kurang terlibat dalam pelaksanaannya. Pemerintah masih menggunakan pihak ke tiga untuk melaksanakan proyek pembangunan.
9. Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Lemahnya peran LPMD/LPMK ternyata mengakibatkan masyarakat kurang terlibat aktif dalam pembangunan wilayahnya.
10. Akses Informasi pembangunan yang diterima masyarakat. Masyarakat masih merasa informasi pembangunan yang disediakan pemerintah masih kurang transparan.
11. Di tingkat regulasi pusat yaitu PP no.73 tahun 2005 tentang Kelurahan pasal 21 ayat(1) **perlu adanya revisi terbatas**, berkaitan dengan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dikelurahan **dapat** menggunakan lembaga kemasyarakatan. Kata **dapat** seyogyanya dirubah menjadi **wajib**, hal ini akan senada dengan UU Desa no.6 tahun 2014 pasal 94 ayat (4) berkaitan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat wajib memberdayakan lembaga pemberdayaan kemasyarakatan yang ada *yo* PP No. 43

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 151.

SARAN

Saran yang dapat penulis ajukan dari temuan penelitian ini adalah:

1. Pemerintah hendaknya perlu untuk kembali mengkaji tujuan dan fungsi awal dari LPMD/LPMK sehingga dapat menentukan regulasi yang tepat untuk mengoptimalkan perannya.
2. Pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan personil kelembagaan besamaan program pemberdayaan masyarakat tingkat bawah (pra sejahtera).
3. Perlunya segera dilakukan revisi terbatas terhadap PP No 73 tahun 2005 tentang Kelurahan untuk menyesuaikan perkembangan kekinian serta peraturan daerah di kabupaten/kota yang mengatur lembaga kemasyarakatan.
4. Perlu adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat ditingkat desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera menjadi sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amin, Muryanto. "Konsep negara Kesejahteraan dari Waktu ke Waktu." *Jurnal Politeia* (Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara) 3 (2011).

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

<http://www.bps.go.id>. Diunduh pada 01 Agustus 2016

Daruwinata, Ridwan Dannar, and dkk. "Peran LPMK dan BKM dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang." 2012.

Galuh, Muhammad. "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah istimewa Yogyakarta." 2015.

Sarwoko, M. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 1987.

Suharto, Edi. "Negara Kesejahteraan dan eiventing DepSos." 2006.

Sunarti, Euis. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2006.

Susetio, Wasis. "Konsep Welfare State dalam Amanedemen UUD 1945: Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan dari Putusan MKRI)." *Lex Jurnalica* (Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul) 4 (April 2007).

2. Peraturan Perarundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5495)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 5587)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor:159 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 4588)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5694).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota semarang Tahun 2009 Nomor: 9 : Tambahan Lembaran Daerah Kota semarang Nomor: 34)

Peraturan Daerah Kabupaten grobogan Nomor: 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor: 7 Seri E; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor :...)

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor: 05; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor: 05)

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten

*Prosiding Penelitian Seminar Nasional seri 6
"Menuju Masyarakat Madani dan Lestari"*

Semarang Tahun 2009 Nomor:.....; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 20)

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor: 7 Seri D No. 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 35).

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor: 12 seri E No.7 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor :76).

PEMANFAATAN SAMPAH TERDEGRADASI DALAM PENERAPAN TPA berkelanjutan DENGAN KONSEP SANITARY LANDFILL

Hijrah Purnama Putra^{1*}, Akhmad Marzuko², Widya Dwi Irawan¹, Dwi Agung Subroto¹

¹Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Islam Indonesia

²Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Islam Indonesia

*hijrah_purnama@yahoo.com

ABSTRAK

Sanitary landfill adalah metode penanganan sampah tahap akhir dengan terkontrol dan memiliki sistem sanitasi yang baik agar tidak mencemari lingkungan di sekitar lokasi. Salah satu tantangan terbesar untuk menerapkan metode ini adalah penyediaan tanah penutup, sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi. Sampah organik yang masuk ke TPA hampir mendekati 85%, dengan waktu yang singkat sampah jenis ini akan terurai, salah satu produknya adalah tanah. Selama ini belum ada pemanfaatan terhadap tanah tersebut, sementara pengelola TPA membutuhkan tanah sebagai penutup di TPA dalam rangka mewujudkan TPA berkategori sanitary landfill. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi tanah yang dihasilkan dari penguraian sampah di zona yang tidak digunakan lagi berdasarkan karakteristik fisiknya, diharapkan dapat digunakan sebagai tanah penutup. Menggunakan metode pengambilan sampel dengan melakukan pengeboran di dua lokasi dalam zona 1 yang dianggap mewakili. Sampel melalui pengujian fisik tanah diantaranya adalah analisa ukuran butiran, berat volume tanah, kadar air, berat jenis dan analisa proctor. Hasil menunjukkan bahwa tanah hasil penguraian sampah di zona 1 TPA Piyungan Bantul, Yogyakarta dapat digunakan sebagai tanah penutup baik untuk keperluan daily cover, drainage layer maupun final cover.

Kata kunci : penambangan TPA, tanah penutup, kompos organik, sanitary landfill

ABSTRACT

Sanitary landfill is a waste handling method final stage with a controlled and has a good sanitation system so as not to pollute the environment around the site. One of the biggest challenges to implement this method is the provision of cover soil, so that operating costs would be higher. Organic waste that goes to landfill nearing 85%, with a short time this type of waste will be decompose, and produce the soil. So far there has been no use to the soil, while the landfill operators need soil as cover at the landfill in order to realize the landfill sanitary landfill category. This study aims to analyze the potential of the soil resulting from the decomposition of waste in the zones that have not been used again by its physical characteristics, expected to be used as a cover soil. Using the method of sampling by drilling in two locations in first zone are supposed to represent. Through physical testing of the samples include grain size analysis, soil weight volume, moisture content, density and proctor analysis. The results showed that soil decomposition of waste in Piyungan landfill, Bantul, Yogyakarta especially for first zone can be used as cover soil, both for daily cover, drainage layer and the final cover.

Keywords : landfill mining, cover soil, organic compost, sanitary landfill

PENDAHULUAN

Sanitary landfill adalah metode penanganan sampah tahap akhir dengan terkontrol dan memiliki sistem sanitasi yang baik agar tidak mencemari lingkungan di sekitar lokasi. Sampah

diangkut menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), kemudian sampah disebar lapis per lapis di lahan tersebut, dipadatkan dengan alat berat dan selanjutnya ditutup tanah setiap harinya (Damanhuri, 2008; InSWA, 2013). Sistem yang disiapkan kemudian dioperasikan secara sistematis, namun demikian diperlukan penyediaan prasarana dan sarana serta biaya operasional yang cukup mahal dalam penerapan metode ini. Salah satunya adalah penyediaan tanah penutup, di lokasi TPA belum tentu memiliki tanah penutup yang memadai, sehingga diperlukan pengadaan tanah dari luar lokasi yang menyebabkan biaya operasional menjadi lebih tinggi.

TPA Piyungan sebagai TPA regional, melayani sampah yang berasal dari wilayah perkotaan Kabupaten Sleman, Bantul dan Yogyakarta. Terletak di wilayah administrasi Kabupaten Bantul memiliki kapasitas tampungan mencapai 2,7 juta m³. Dioperasikan sejak 1995, dalam perencanaannya TPA ini akan berakhir masa pakainya pada tahun 2015 (Putra dkk, 2016). Namun masih digunakan dengan mengoptimalkan zona-zona yang telah ditutup pada periode sebelumnya. Faktor pemadatan baik pemadatan dari sampah itu sendiri maupun pemadatan yang dihasilkan oleh alat mekanis (pemadat) dan terjadinya *settlement* (penurunan permukaan sampah akibat adanya proses degradasi) akan memperpanjang usia dari TPA tersebut (Hanson *et. al.*, 2010; Ham *et.al.*,1978; Marques *et al.*, 2003; Sharma and De, 2007; Sivakumar Babu *et al.*, 2010; Gourc *et al.*, 2010).

Sampah di TPA Piyungan sebagian besar adalah sampah organik, sampah sisa makanan sebanyak 47,13%, porsi organik lainnya terdiri dari sampah taman dan kebun sebesar 20,56%, dan kayu 3,39% (Adidarma, 2014). Menurut Nasa (2014), prosentase jumlah sampah organik mencapai 84.87%, sisanya berupa sampah anorganik yaitu 15.13%. Keduanya berpendapat bahwa sampah organik yang masuk ke TPA memang dalam jumlah yang tinggi sesuai dengan porsi sampah organik dalam komposisi sampah di Indonesia. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya tingkat degradasi sampah di TPA lebih cepat. Zona 1 TPA Piyungan telah beroperasi sejak 1995 hingga 2000, telah terjadi *settlement* dan mulai tahun 2016 telah dioperasikan kembali dengan menumpukkan sampah di atas tumpukan yang lama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sampah terdegradasi terutama yang telah menjadi tanah serta potensi pemanfaatannya, salah satunya sebagai tanah penutup alternatif dalam operasional TPA berkategori *sanitary landfill*. Harapannya akan memberikan kontribusi kebaruan dalam berbagai penelitian terkait operasional TPA. Konsep yang ditawarkan adalah penambangan TPA (*landfill mining; urban mining*), metode ini memang sangat familiar di negara maju seperti beberapa negara di Eropa, Amerika dan Timur Tengah. Metode ini pertama kali diperkenalkan di Israel pada tahun 1953 untuk mendapatkan pupuk

hasil degradasi sampah di TPA (Savage *et al.*, 1993). Namun karena kandungan Pb dalam tanah TPA Piyungan mencapai 232 mg/kg, diperlukan pengolahan pendahuluan sebelum digunakan sebagai pupuk organik (Putra, 2016). Pemanfaatan lain yang lebih menjanjikan adalah mengembalikan tanah hasil degradasi tersebut menjadi tanah penutup alternatif dalam operasional TPA berkategori *sanitary landfill*.

METODE PENELITIAN

a. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan di 2 (dua) lokasi di area zona 1 TPA Piyungan, Bantul. Sampel diambil dengan pengeboran dengan menggunakan alat bor *Spindle Type Inti Drilling Rig* melalui *Spindle Stroke* dengan diameter 7cm dibor per satu meter hingga 13 meter. Sampel hasil degradasi sampah tersebut dilakukan penimbangan dan analisis komposisi sampah yang dikandungnya, namun hasil analisis komposisi sampah merupakan bagian terpisah dari publikasi ini. Setelah diketahui komposisinya, dilanjutkan dengan pengujian laboratorium khusus untuk tanah yang didapatkan dari hasil pengeboran.

b. Pengujian Laboratorium dan Analisis Data

Sampel tanah terdegradasi yang diambil dari permukaan hingga kedalaman 13 meter, dipisahkan dalam 3 kelompok, yaitu sampel pada kedalaman 5; 10 dan 13 meter dari permukaan tanah. Pembagian kedalaman ini dalam rangka mencerminkan umur dari sampah sesuai periode pengurangan yang dilakukan, tabel 1 berikut menunjukkan metode pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui umur sampah yang telah diurug di zona 1 TPA Piyungan.

Tabel 1. Pemodelan Kedalaman Timbunan Sampah pada Zona 1

Tahun	Total (Ton/tahun)	Total (m ³ /tahun)	Degradasi (30%)	Tanah penutup (3%)	Total sampah (m ³ /tahun)	Total (m ³ /bulan)	Total (m ³ /hari)	Tinggi (m/tahun)	Total Kedalaman (m)
1995	87.500	109.375	32.813	3.281	79.844	6.654	222	2,0	12,9
1996	90.200	112.750	33.825	3.383	82.308	6.859	229	2,1	10,9
1997	93.000	116.250	34.875	3.488	84.863	7.072	236	2,1	8,9
1998	95.900	119.875	35.963	3.596	87.509	7.292	243	2,2	6,8
1999	98.800	123.500	37.050	3.705	90.155	7.513	250	2,3	4,6
2000	102.000	127.500	38.250	3.825	93.075	7.756	259	2,3	2,3

Sumber : Putra dkk, 2015

Pendetakan tersebut dilakukan karena tidak ada data yang akurat terkait umur sampah dari pengelola TPA, maka perlu dilakukan pemodelan umur sampah. Menggunakan data sampah masuk ke TPA per tahunnya, luasan total zona 1 mencapai 4 Ha, berat jenis sampah saat ini diperkirakan mencapai 800kg/m^3 , faktor degradasi sebesar 30%, tanah penutup yang digunakan 3% (untuk TPA dengan kategori *sanitary landfill* memiliki rasio tanah penutup sebesar 15-20%, angka 3% merupakan prediksi karena pengelolaan TPA Piyungan pada tahun 1995-2000 masih belum sesuai prosedur yang berlaku). Setiap sampel diuji laboratorium dengan parameter pengujian antara lain adalah analisa ukuran butiran, berat volume tanah, kadar air, berat jenis tanah, analisa proctor (kepadatan tanah). Hasil akan dibandingkan dengan persyaratan tanah yang akan digunakan sebagai tanah penutup pada umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kuantitas Tanah

Komposisi sampah yang didapatkan dari kegiatan pengeboran menunjukkan bahwa persentase tanah sangat mendominasi dibandingkan dengan komposisi sampah jenis lainnya. yaitu rata-rata 55,71% (dalam persen berat) (Putra dkk, 2015). Seperti yang disampaikan pada sub bab terdahulu, hampir 80% sampah yang masuk ke TPA Piyungan, Bantul adalah sampah organik. Sehingga dengan waktu pengurugan 15-20 tahun, sampah-sampah tersebut telah terdegradasi menjadi tanah. Namun, belum diketahui secara pasti berapa kuantitas tanah yang akan dihasilkan.

Proses pengambilan sampel menggunakan *Spindle Stroke*, akan didapatkan sampah terdegradasi sesuai kedalamannya per satuan meter (Gambar 1). Luas zona I mencapai 4 Ha (40.000 m^2), pada umumnya 70% dari luasan akan digunakan sebagai lahan urug (28.000 m^2), dan sisanya untuk sarana prasarana penunjang (12.000 m^2). Tabel 1 menunjukkan ketinggian tanah didalam lubang yang digunakan sebagai titik sampling. Kuantitas tanah didapatkan dari hasil perkalian tinggi tanah di setiap meter sampling dengan luas area pengurugan.



Gambar 1. Sampel sampah terdegradasi, a). Sampel dalam plastik sampel sesuai kedalamannya masing-masing; (b). Sampel yang telah dipilah sesuai komposisi sampah

Tabel 1 menunjukkan bahwa lokasi sampling A memiliki kuantitas tanah yang lebih banyak dibandingkan lokasi B, yaitu 7,48 meter di lokasi A dan 6,28 meter di lokasi B. Secara total pengeboran dilakukan hingga 13 meter, sisanya merupakan komposisi sampah jenis lainnya. Sehingga total tanah yang dihasilkan dari zona 1 diprediksi mencapai 175.950,47 m³.

Tabel 1. Kuantitas tanah hasil degradasi sampah
di Zona 1 TPA Piyungan, Bantul Yogyakarta

Tinggi tanah (m) per kedalaman sampling	Lokasi Sampling		Rata-rata ketinggian tanah (m)	Volume tanah (m ³)
	A (m)	B (m)		
1	0,54	0,40	6,28	175.950,47
2	0,46	0,51		
3	0,64	0,44		
4	0,53	0,52		
5	0,73	0,51		
6	0,64	0,40		
7	0,84	0,00		
8	0,60	0,39		
9	0,53	0,23		
10	0,39	0,50		
11	0,42	0,43		
12	0,44	0,47		
13	0,71	0,28		
Total	7,48	5,09		

b. Analisis Ukuran Butiran

Pengujian analisis ukuran butiran dilakukan dengan dua cara yaitu analisis tanah berbutir kasar yang saringan bertujuan untuk mengetahui persentase ukuran butiran tanah dan susunan butiran tanah (gradasi) dari suatu jenis tanah yang tertahan di atas saringan 200. Sedangkan analisis berbutir halus yang diuji dengan hidrometer.

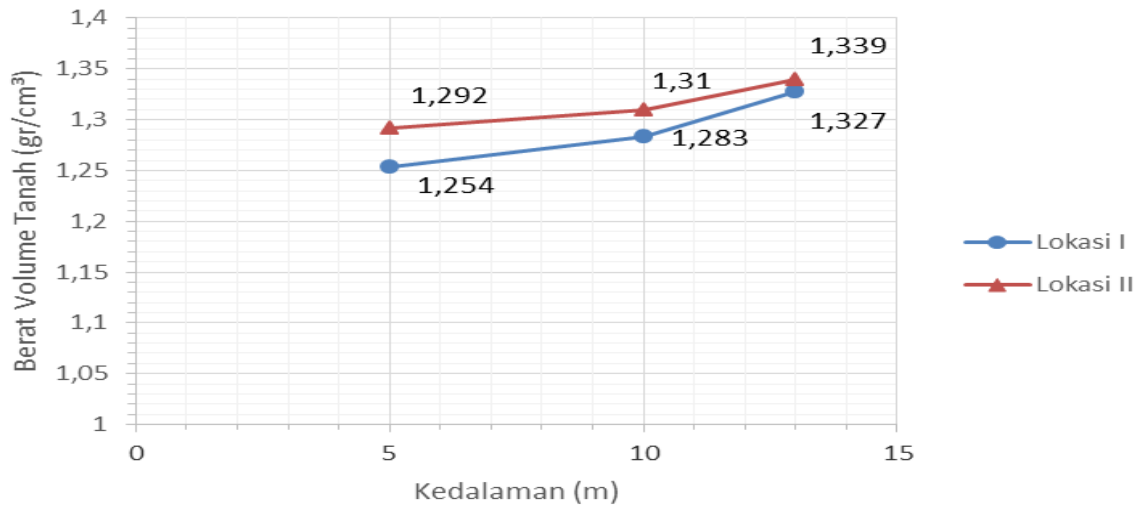
Tabel 2. Hasil uji saringan dan hidrometer

No	Lokasi	Kedalaman (m)	Klasifikasi Tanah ASTM D 422-72				
			Pasir Sedang (mm) 2	Pasir Halus (mm) 0,42	Lanau (mm) 0,075	Lempung (mm) 0,005	Lempung Koloid (mm) 0,001
1	A	5	63,74%	34,58%	0,84%	0,84%	0%
		10	66,70%	31,91%	0,70%	0,70%	0%
		13	69,61%	23,35%	3,52%	3,52%	0%
2	B	5	56,93%	38,17%	2,45%	2,45%	0%
		10	59,91%	30,79%	4,65%	4,65%	0%
		13	59,10%	35,91%	2,50%	2,50%	0%

Sampel menunjukkan hasil bahwa persentase pasir sedang dan pasir halus lebih dominan dibandingkan dengan lanau dan lempung. Jika diamati secara kasat mata pasir hasil degradasi pada TPA Piyungan lebih mirip dengan tanah humus, karena warnanya hitam pekat dan sedikit gembur. Persentase yang hampir sama juga didapatkan oleh Kurniasari dkk (2014) sebesar 50% didominasi oleh pasir, sedangkan 31,94% tanah lanau dan *clay*/lempung hampir tidak ada. Secara teori hal ini tidak mungkin jika komponen utama hasil degradasi sampah yaitu berupa pasir, karena komponen sampah yang masuk ke TPA bukan pasir melainkan sampah organik dan anorganik. Pada proses pembusukan sampah bisa terjadi secara aerobik maupun anaerobik, aerobik menghasilkan humus, CO₂, H₂O sedangkan secara anaerobik menghasilkan lumpur, CO₂, CH₄. Melalui pengujian ini dapat diketahui kategori tanah yang didapatkan termasuk dalam kategori pasir sedang dan halus berdasarkan ukuran butirannya, bukan berdasarkan jenis tanahnya.

c. Berat Volume Tanah

Berat volume merupakan petunjuk kepadatan tanah dimana semakin padat suatu tanah, maka makin tinggi berat volumenya. Berat volume tanah yang baik berkisar antara 1,1-1,6 gr/cm³ namun ada juga yang <0,85 gr/cm³. Jika tanah memiliki berat volume tinggi bahkan dapat mencapai >1,6gr/cm³ maka artinya tanah sangat keras sehingga sulit untuk meneruskan air kedalam tanah bahkan sangat sulit untuk ditembus akar tanaman.



Gambar 2. Nilai berat volume tanah pada dua lokasi sampling

Dengan berat volume tanah berkisar 1,2-1,3 gr/cm³ dapat diterapkan sebagai *top soil* atau *cover soil* karena masih dapat meneruskan air yang masuk pada tanah yang berguna untuk tanaman di atasnya, dan juga masih baik untuk perkembangan akar tanaman. Selain itu memudahkan sirkulasi evaporasi air yang terkandung pada *drainage layer*.

d. Berat Jenis Tanah

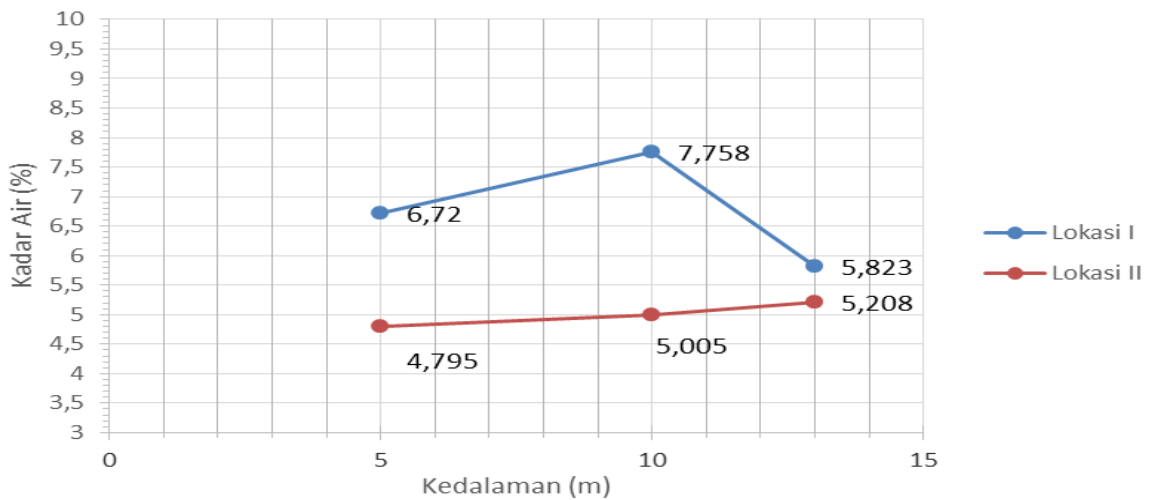
Berat jenis tanah (*granular specific*) atau berat spesifik tanah adalah nilai perbandingan berat butiran tanah dengan berat air destilasi di udara dengan volume yang sama pada temperatur tertentu biasanya diambil pada suhu 26°C. Menurut Hardiyatmo (1992), berat jenis tanah dibagi menjadi 7 kategori berikut: kerikil = 2,65-2,68; pasir = 2,65-2,68; lanau tak organik = 2,62-2,68; lempung organik = 2,58-2,65; lempung tak organik = 2,68-2,75; humus = 1,37; dan gambut = 1,25-1,80. Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian lokasi A dan B di zona 1 TPA Piyungan, Bantul.

Tabel 3. Hasil pengujian berat jenis tanah

Lokasi	Kedalaman	Berat Jenis (Gs)	Jenis Tanah
	(m)		
I	5	2,16	Humus
	10	2,33	Humus
	13	2,53	Humus
II	5	2,09	Humus
	10	2,06	Humus
	13	2,51	Humus

Proses degradasi sampah di TPA Piyungan menghasilkan tanah jenis humus. Hal ini terlihat dari pembacaan berat jenis angka dari masing-masing sampel memberikan nilai rata-rata $<2,68$ (lempung tak organik) dan $>1,25-1,80$ (gambut). Selain dari berat jenis yang telah diuji, secara kasat mata warna dari tanah hasil degradasi ini agak kehitaman seperti ciri-ciri dari tanah humus.

e. Kadar Air Tanah



Gambar 3. Kadar air pada sampel di 2 lokasi sampling

Hasil uji berat jenis menunjukkan bahwa sampel merupakan tanah humus, kemudian jika dihubungkan dengan kadar air dan gradasi butiran maka tanah hasil degradasi ini sangat cocok digunakan sebagai tanah penutup/urug permukaan (*final cover*) setara pada lapisan *under drain* air infiltrasi ± 20 cm karena jenis tanah berupa tanah hitam agak berpasir dan kadar air yang baik untuk tanah dengan peruntukan tanaman tidak melebihi 50% sesuai dengan standar kualitas kompos yang ditetapkan SNI 19-7030-2004. Fungsi air pada tanah adalah untuk melarutkan hara-hara pada tanah sehingga dapat digunakan oleh tanaman atau tumbuhan. Akan tetapi kadar air yang tinggi pada tanah dapat mengakibatkan hara-hara tersebut tercuci sehingga tidak dapat diserap oleh tumbuhan.

f. Uji Proctor

Pada uji Proctor, tanah dipadatkan dalam sebuah cetakan silinder bervolume $933,06 \text{ cm}^3$ dengan diameter 10,12cm. Selama percobaan, cetakan tersebut direkatkan pada sebuah plat dasar dan di atasnya diberi perpanjangan batang (juga berbentuk silinder). Sampel dicampur dengan air, 150mL; 200mL; 300mL; 400mL; dan 500mL, kemudian dipadatkan menggunakan penumbuk khusus. Lapis per lapis dengan jumlah tumbukan sebanyak 25 kali setiap lapisannya, berat penumbuk 2,5kg dan tinggi jatuhnya 30,5cm.

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepadatan tanah yang baik dengan variasi penambahan air di dalamnya (kadar air). Hasil uji menunjukkan lokasi A dan B memiliki kadar air optimum sebesar 27,88% (penambahan air sebesar 200 mL) dan 22,25% (penambahan air sebesar 300 mL) dengan berat volume kering 1,31537 gr/cm³ dan 1,61892 gr/cm³. Nilai kadar air lokasi A dan B masih sangat layak jika digunakan untuk tanah penutup TPA terutama untuk *final cover*. Jika dikondisi lapangan aslinya harus ada penambahan air untuk mencapai kadar optimum sesuai dengan uji *proctor* sehingga didapatkan pemadatan yang baik, karena hendaknya tanah urug tidak tergerus air hujan, operasional rutin, dan operasional alat berat. Hal ini nantinya bisa berguna untuk penerapan penutup harian atau *daily cover* serta pada lapisan *top soil* atau *final cover* pada TPA.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari latar belakang penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa kesimpulan pada penelitian ini:

1. Jumlah tanah hasil dari degradasi sampah di Zona 1 TPA Piyungan, Bantul Yogyakarta mencapai ±175.950,47 m³. Telah dikurangi 30% lahan yang digunakan sebagai area penunjang, hanya 2,8 Ha dari total 4 Ha sebagai area pengurangan.
2. Jenis tanah yang dihasilkan, termasuk kategori pasir sedang dan halus berdasarkan ukuran butiran, dengan tekstur gembur dan berwarna hitam menunjukkan jenis tanah ini adalah humus. Hal ini dibuktikan pada uji berat jenis tanah (2,06-2,53), termasuk kategori jenis tanah humus.
3. Berdasarkan hasil analisa ukuran butiran, berat volume tanah, kadar air, berat jenis tanah, analisa proctor, tanah hasil degradasi sampah di Zona 1 TPA Piyungan, Bantul dapat digunakan sebagai tanah penutup (*cover soil*) baik untuk keperluan *daily cover*, *drainage layer*, maupun *final cover*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada DPPM UII atas biaya penelitian dengan topik Potensi Pemanfaatan Sampah Terdegradasi dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sebagai Tanah Penutup Dalam Rangka Mewujudkan TPA Yang Berkelanjutan, melalui program Hibah Unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adidarma, K.P., Al Rosyid, L.M., Putra, H.P, and Farahdiba, A.U. 2014. Gas emissions inventory of methane (CH₄) with First Order Decay (FOD) method in TPA Piyungan, Bantul, DIY. *Proceedings of The 3rd International Conference on Sustainable Built Environment (ICSBE)*. October 21-22, 2014. Faculty of Civil Engineering and Planning. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Damanhuri, E., Padmi, T. 2008. *Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*. Jurusan Teknik Lingkungan. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Institut Teknologi Bandung. Bandung
- Gourc, J.P., Staub, M.J., and Conte, M. 2010. Decoupling MSW settlement into mechanical and biochemical processes—modeling and validation on large-scale setups. *Waste Management Journal*, 30 (8–9), p. 1556–1568
- Ham, R.K., Reinhardt, J.J., and Sevick, G.W. 1978. Density of milled and unprocessed refuse. *Journal of Environmental Engineering Division*. 104. p. 109–125
- Hanson, J.L., Yesiller, N., Stockhausen, S.A.V., Wong., W.W. 2010. Compaction Characteristics of Municipal Solid Waste. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering* 136 (8). p. 1095-1102
- Hardiyatmo, H.C. 1992. *Mekanika Tanah 1*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- InSwa. 2013. *Indonesia Solid Waste Newsletter : Untuk Indonesia yang lebih bersih*. Edisi 2 Maret 2013. Jakarta
- Kurniasari, O., Damanhuri, E., Padmi, T., Kardena, E. 2014. Tanah penutup landfill menggunakan sampah lama sebagai media oksidasi metana untuk mengurangi emisi gas metana. *Jurnal Bumi Lestari* Vol 4 No 1 Februari 2014. 46-52
- Marques, A.C.M., Filz, G.M., and Vilar, O.M. 2003. Composite compressibility model for municipal solid waste. *Journal of Geotechnology Geoenvironmental Engineering*. 129 (4). p. 372–378.
- Putra, H.P., Afrillah, D., Marzuko. 2015. Analisis karakteristik dan potensi pemanfaatan sampah plastik dari hasil penambangan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) (studi kasus TPA Piyungan, Bantul, Yogyakarta). *Prosiding Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari*. DPPM Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Putra, H.P., Marzuko, A., Sari, K., Sепthiani, T., and Rahmadani, F. 2016. Identification of compost potential on degraded solidwaste in Piyungan Landfill, Bantul, Yogyakarta as a step of landfill management optimization by using landfill mining method. *Proceedings of The 4th International Conference on Sustainable Built Environment (ICSBE)*. October

12-14, 2016. Faculty of Civil Engineering and Planning. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

- Sharma, H.D., and De, A. 2007. Municipal solid waste landfill settlement: Postclosure perspectives, *Journal of Geotechnology Geoenvironmental Engineering*. 133 (6). p. 619–629
- Sivakumar Babu, G.L.S., Reddy, K.R., Chouskey, S.K., and Kulkarni, H.S. 2010. Prediction of long-term municipal solid waste landfill settlement using constitutive model. *Pract. Period. Hazard. Toxic Radioact. Waste Management Journal*. 14(2). 139–150

MODEL PENGEMBANGAN WIRAUSAHAWAN MUDA BAGI MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN TAKALAR

Ismail Rasulong^{1*}, Asdi², Muhammad Astrianto Setiadi³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

[*ismail.rasulong@unismuh.ac.id](mailto:ismail.rasulong@unismuh.ac.id)

ABSTRAK

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: (1) Menganalisis tipologi khusus kawasan pesisir, khususnya sebaran sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai peluang usaha di Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar; (2) Melakukan pemetaan potensi-potensi bidang usaha yang dapat dikembangkan berdasarkan sebaran sumber daya lokal yang menjadi basis utama di dua kecamatan sasaran; (3) Menganalisis peran aktor utama pembangunan khususnya pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lembaga-lembaga kepemudaan dalam upaya memberdayakan potensi pemuda dan potensi sumber daya lokal di kawasan pesisir Takalar; dan (4) Mengkaji dan menganalisis model pemberdayaan yang dapat dikembangkan sebagai model aplikatif dan spesifik melalui pelibatan berbagai aktor utama di wilayah pesisir.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terfokus, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Kegiatan analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas melalui beberapa langkah kegiatan secara sistematis, yakni data collection, data reduction, data display, dan conclusions

Hasil penelitian menyimpulkan (1) Sebaran sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Takalar cukup beragam. Namun belum ada upaya maksimal yang sedang dilakukan untuk memanfaatkannya secara optimal. (2) Potensi bidang usaha yang dapat dikembangkan oleh kaum muda di wilayah pesisir Kabupaten Takalar sangat prospektif. Walaupun saat ini masyarakat lebih dominan fokus pada penangkapan ikan semata, belum ada upaya maksimal untuk mengembankan kegiatan usaha pada skala mikro, kecil, ataupun menengah pada pengolahan hasil laut. (3) Pemerintah daerah dan pemerintah desa di wilayah Pesisir Kabupaten Takalar telah memberikan perannya untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat termasuk kaum muda, tetapi belum optimal karena program yang dilaksanakan relatif disalah artikan oleh kelompok penerima manfaat sehingga efektifitas keberlanjutannya tidak terjamin. (4) Model pengembangan wirausahawan muda dibangun dalam suatu kerangka yang integratif dengan melibatkan seluruh aktor utama di daerah, termasuk melibatkan perguruan tinggi dalam wadah incubator bisnis untuk mempersiapkan, mengasesment, mendampingi, melatih, dan membantu kelompok-kelompok bisnis pemuda untuk start up bisnis dalam skala mikro, kecil, dan menengah.

Kata kunci : Masyarakat Pesisir, Wirausahawan Muda, Model Pengembangan,

ABSTRACT

The specific objective to be achieved from this study were: (1) Analyze the specific typology in coastal area, particularly in the distribution of economical resources than can be developed as a business opportunity in Galesong and North galesong district, Takalar Regency, (2) Mapping the potential areas that can be developed based on the distribution of local resources and became the main base for both of the districts, (3) Analyze the role of stake holder especially the government, leader of community, youth leaders and youth organizations in empowering the youth potential and the potential of local resources in Takalar coastal areas, and (4) Reviewing and analyzing the empowerment model that can be developed as a specific and applicative model by involving various major actors in coastal areas.

The data gathered through focused observation, in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), and documentation. The data analyzed qualitatively. It was done when the data

collection in progress and after the completion of data collection. Qualitative research data analysis is performed interactively and continuously until the completion through multiple step systematic activities, including data collection, data reduction, data display, and conclusion.

The research findings showed that (1) The distribution of economical resources that can be developed in coastal areas of Takalar is quite diverse. But there was no maximum efforts are being made to optimize these potentials, (2) Potential areas of business that can be developed by young people in coastal areas are highly prospective in Takalar. Although currently the dominant community just focused on fishing, there has been no efforts to develop business activities in micro, small, or medium in other seafood processing. (3) The local government in Takalar Coastal area has given its role to empower these communities including the youth, but it was not optimal because the program implemented relatively misunderstood by the beneficiaries so that the effectiveness of sustainability was not guaranteed. (4) The empowerment model of young entrepreneurs built within a framework that is integrated by involving all the main actors in the area, including involving universities as the medium of businesses incubator to prepare, to asses, to assist, to train, and to support business groups youth to start up a business in the micro, small and medium businesses.

Keywords: Coastal Communities, Young Entrepreneurs, Development Model

PENDAHULUAN

Kecamatan Galesong dan Galesong Utara adalah dua kecamatan yang berada pada poros Pesisir Barat Kabupaten Takalar. Kedua kecamatan merupakan wilayah dengan penduduk terpadat di Kabupaten Takalar. Berdasarkan data di BPS, jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut pada tahun 2013 sebanyak 76.327 jiwa atau sekitar 27,20% dari total jumlah penduduk sementara luas wilayah 41,04 km² atau sekitar 7,24% dari total luas Kabupaten Takalar, dengan demikian tingkat kepadatan di kedua Kecamatan tersebut adalah 1.500 jiwa/km² untuk Kecamatan Galesong dan 2.477 jiwa/km² untuk Kecamatan Galesong Utara. Keadaan ini sesungguhnya mencirikan pola persebaran penduduk di kawasan pesisir yang ciri khasnya memang padat terutama di kawasan permukiman yang berhimpit langsung dengan bibir pantai.

Karakteristik umum masyarakat pesisir dicirikan oleh sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Menurut Prianto (2009), masyarakat yang hidup di kota-kota atau permukiman pesisir memiliki karakteristik secara sosial ekonomis sangat terkait dengan sumber perekonomian dari wilayah laut. Demikian pula jenis mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, dan pemilik atau pekerja industri maritim. Masyarakat pesisir yang di dominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Lewaherilla, 2002). Selanjutnya dari status legalitas lahan, karakteristik beberapa kawasan permukiman di wilayah pesisir umumnya

tidak memiliki status hukum (legalitas), terutama area yang direklamasi secara swadaya oleh masyarakat (Suprijanto, 2006).

Berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir umumnya belum tersentuh dengan kebijakan pemerintah yang tepat sebab seringkali program yang dilaksanakan belum menyentuh secara utuh akar masalah yang dihadapi masyarakat, karena (a) lebih banyak menempatkan masyarakat sebagai obyek ketimbang sebagai subyek pembangunan, (b) lebih memprioritaskan pertumbuhan industri ketimbang sektor pertanian dan kelautan, (c) serta kebijakan pembangunan yang kurang mengacu pada karakteristik masing-masing kondisi lokal di daerah, dan (d) profesi nelayan masih dipandang sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan tingkat keterampilan (skill) yang tinggi dan (e) dari sudut pandang ekonomis, sering kali komunitas nelayan/ masyarakat pesisir diposisikan sebagai kelompok marginal yang dipersepsikan sedikit sekali memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini berakibat pada lambatnya proses intervensi teknologi, penguatan kapasitas masyarakat dan inovasi di kalangan nelayan.

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, salah satu cara pemberdayaan masyarakat pesisir ialah dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kesadaran akan potensi ekonomi wilayah pesisir. Karena pengelolaan wilayah sumber daya pesisir dan laut, seharusnya memberikan manfaat terbesar kepada masyarakat pesisir sebagai pelaku utama dan pemilik sumber daya tersebut. Oleh karenanya segala aktivitas pembangunan wilayah pesisir seharusnya diabdikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa mengorbankan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat. Proses mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir perlu didekati dengan pendekatan budaya, yang menempatkan mereka sebagai pelaku perubahan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir diupayakan dalam bingkai pendekatan yang harmonis dengan memperhatikan tata sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pesisir.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir khususnya kaum mudanya adalah mendorong mereka untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi peluang usaha di bidang pengelolaan sumber daya laut dan perikanan. Hasil observasi awal yang dilakukan menunjukkan rata-rata kepala keluarga memiliki tanggungan 4-7 orang sementara pendapatan mereka tidak menentu karena banyak tergantung pada faktor cuaca serta tingginya operasional untuk melaut, apalagi kebanyakan keluarga nelayan hanya sebagai buruh saja (sawi-bahasa Makassar) sehingga hasil tangkapan yang diperoleh harus dibagi dengan punggawa atau pemilik perahu. Di tiap rumah tangga, rata-rata memiliki anak usia produktif yang sudah tidak sekolah lagi (tamatan SMP atau SMA) dengan kegiatan utama

hanya turut membantu orang tua untuk melaut, bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Padahal sesungguhnya di sekitar lingkungannya banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti di bidang pengalengan, pengasingan, pengelolaan abon, dan berbagai bidang usaha lainnya yang prospektif dan bisa dikelola dalam skala industri rumah tangga.

Penelitian ini difokuskan untuk menemukan model terbaik yang dapat digunakan sebagai alat untuk menumbuhkan semangat, kreatifitas, inovasi, dan akses yang lebih luas untuk memulai kegiatan produktif bagi kalangan pemuda di masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pendalaman terhadap hal ini pada akhirnya akan menemukan model dan metode yang melibatkan aktor-aktor utama untuk memberikan ruang dan dukungan bagi meningkatnya minat kaum muda masyarakat pesisir memberdayakan dirinya sendiri. Pada tahap lanjutan, model dan metode tersebut akan diaplikasikan, didampingi pelaksanaannya, kemudian melakukan revisi dan perbaikan lebih lanjut. Pada akhirnya diharapkan akan lahir wirausahawan-wirausahawan muda khususnya dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi rintisan untuk melahirkan inkubator-inkubator penyebar “virus wirausaha” di lingkungan sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang model pengembangan wirausahawan muda di kawasan pesisir Kabupaten Takalar akan dilaksanakan di dua Kecamatan yaitu di Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah dengan wilayah pesisir yang panjang di sebelah Barat Kabupaten Takalar. Lokasi utama penelitian akan difokuskan pada 4 (empat) desa pesisir yaitu (1) untuk Kecamatan Galesong meliputi Desa Boddia, dan Desa Palalakkang. (2) untuk Kecamatan Galesong Utara meliputi Desa Tamasaju, dan Desa Tamalate.

Metode pengumpulan data disesuaikan dengan tujuan penelitian. yang meliputi:

1. Observasi terfokus dengan melakukan pengamatan langsung terhadap hasil-hasil kegiatan pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh pihak lain di wilayah sasaran. Demikian pula mengamati secara spesifik potensi dan daya dukung ekonomi untuk melakukan pemetaan potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan usaha yang prospektif di kawasan pesisir.
2. Wawancara mendalam (*indept interview*) dengan memilih informan kunci di setiap desa sasaran. Kegiatan wawancara bersifat terstruktur atau semi terstruktur dan dilakukan secara situasional kepada informan kunci penelitian ini. Untuk kepentingan agar

informasi yang diperoleh tidak hilang, maka peneliti akan menggunakan alat bantu perekaman seperti recorder handphone, kamera digital, dan alat perekam lainnya yang bisa sewaktu-waktu diputar ulang untuk pendalaman hasil wawancara.

3. Melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk lebih mendalami beberapa isu dan data yang tidak terjaring dalam wawancara mendalam, kegiatan FGD dilakukan bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa dan Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI). Arahnya adalah untuk *cross check* informasi dari kegiatan wawancara dan menggali lebih mendalam tentang faktor pendukung dan penghambat rendahnya minat wirausaha di kalangan pemuda kawasan pesisir.
4. Pencatatan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti profil masing-masing desa.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kegiatan analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas melalui beberapa langkah kegiatan secara sistematis, yakni:

1. Koleksi/Catatan data, merupakan aktivitas mengoleksi data yang diperoleh dari lapangan, baik dari hasil wawancara mendalam, FGD, dan observasi terfokus maupun data yang diperoleh dari hasil pencatatan dokumentasi. Kemudian data/informasi yang telah dikoleksi tersebut dicatat secara teliti oleh peneliti;
2. Reduksi data, dalam hal ini peneliti melakukan penyederhanaan, pengabstraksian dan mentransformasi data yang diperoleh dari lapangan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Pada tahap ini, peneliti membuat kategorisasi atas fenomena dengan cara mempelajari data secara teliti. Kategorisasi tersebut akan diamati secara cermat kemudian menyusun konseptualisasi fenomena-fenomena yang telah dikelompokkan kemudian disusun dalam daftar sesuai dengan pertanyaan penelitian.
3. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, matriks, skema, diagram, dan gambar, berujuan untuk lebih memudahkan dalam membuat kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menyatukan kembali keseluruhan data terpilih yang telah dikategorisasi berdasarkan sifat dan dimensinya, kemudian mencari hubungan antara satu kategori dengan sub kategorinya untuk menemukan beberapa kategori utama yang terkait dengan fokus masalah penelitian ini.

4. Verifikasi dan penarikan simpulan, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap data yang didapat dengan berupaya mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat antar kategori inti dan sub kategori lainnya dan perbandingan hubungan antar kategori, guna menemukan kategori inti yang akan dijadikan referensi sebagai suatu kesimpulan. Prosedur selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif ini adalah menarik narasi dari hasil kesimpulan tersebut menjadi suatu narasi yang utuh dalam bentuk proposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada 2 (dua) Kecamatan Pesisir di Kabupaten Takalar, yaitu Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara. Rencana awal, kegiatan penelitian akan mengambil sampel masing-masing 4 desa tetapi mengingat luas jangkauan wilayah dan mempertimbangkan homogenitas wilayah sehingga ditetapkan hanya mengambil sampel pada masing-masing 2 (dua) desa di tiap kecamatan wilayah studi. Oleh karena itu desa-desa yang masuk dalam wilayah studi adalah Desa Boddia dan Desa Palalakkang di Kecamatan Galesong kemudian Desa Tamalate dan Desa Tamasaju di Kecamatan Galesong Utara. Berikut ini adalah kondisi spesifik masing-masing desa.

1. Sebaran Sumber Daya Ekonomi Potensial

Keempat desa yang masuk dalam sampel lokasi penelitian ini semuanya merupakan desa-desa pesisir di Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, sumber daya ekonomi yang dimaksudkan adalah sumber daya ekonomi berbasis pada sumber daya lokal di daerah pesisir. Secara umum, potensi yang bisa dikembangkan di wilayah pesisir pantai, diantaranya adalah : hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan perikanan. Namun berdasarkan hasil studi di lapangan diperoleh informasi bahwa pada keempat desa dimaksud tidak satupun yang memiliki hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Sementara untuk rumput laut bisa saja dikembangkan tetapi hingga saat studi dilakukan belum ditemukan adanya masyarakat yang mengusahakannya, alasannya kondisi laut di wilayah ini tidak cocok ditanami rumput laut.

Oleh karena itu, satu-satunya potensi yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat hanyalah potensi perikanan laut. Masalahnya, potensi yang dimiliki wilayah pesisir ini, tidak bisa dikembangkan dengan baik oleh warga sekitar atau oleh pihak yang berwenang. Wilayah pesisir ini perlu dikembangkan, karena banyak manfaat dan keuntungan yang bisa didapatkan tidak hanya dari segi ekonomi, dari segi sosial juga apabila kita bisa

mengembangkan sumber daya alam wilayah pesisir dengan baik. Selain itu juga untuk merubah pandangan masyarakat luar wilayah pesisir, terhadap masyarakat pesisir yang dianggap masyarakat yang kumuh dan tidak memperhatikan lingkungannya.

Karena wilayah pesisir memiliki potensi yang besar dalam rangka untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir, dan juga tentu saja dapat menjadi solusi atas banyaknya anak muda yang hanya sekedar ikut melaut bersama orang tuanya dan itu dilakukan secara turun temurun. Oleh karena itu, basis kegiatan utama masyarakat di desa-desa yang masuk dalam wilayah studi sesungguhnya baru terpusat pada perikanan tangkap atau nelayan tangkap. Hal ini dapat pula dilihat dari data yang diperoleh dari Laporan Perencanaan Sektor Perikanan Kabupaten Takalar bahwa jumlah produksi perikanan tangkap terbanyak berada di Kecamatan Galesong Utara dengan jumlah tangkapan sebesar 1.273 ton disusul Kecamatan Galesong dengan jumlah tangkapan sebesar 934 ton. Industri pengolahan perikanan tangkap terbanyak berada di Kecamatan Galesong Utara dengan 66 perusahaan yang terdiri dari 42 perusahaan pembuatan pindang ikan, industri pengolahan/pengeringan ikan sebanyak 21 perusahaan dan perusahaan pengolahan telur ikan terbang sebanyak 3 perusahaan. Di kecamatan ini juga terdapat 11 perusahaan pembuatan pukat dan 1 perusahaan pembuatan es balok. Jadi kecamatan ini sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kedekatan perindustrian dengan bahan baku sehingga dapat meminimalkan biaya transportasi.

Potensi perikanan laut yang ada di daerah ini belum optimal dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Profesi nelayan tangkap menjadi dominan dan belum berkembang ke kegiatan pengolahan ikan untuk menambah nilai tambah. Padahal sesungguhnya Kepala Desa juga tahu dan paham bahwa banyak kegiatan usaha yang bisa dikembangkan oleh masyarakat untuk mengolah ikan hasil tangkapan nelayan.

Pada wilayah studi, terdapat dua Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yaitu Pelelangan Ikan Boddia di Kecamatan Galesong dan Pelelangan Ikan Beba di Galesong Utara. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di boddia yang berada di Kecamatan Galesong masih sangat sepi. Padahal TPI ini telah dilengkapi dengan kantor dan beberapa fasilitas pelayanan untuk nelayan. Terdapat depot BBM, kios bagi nelayan. Sudah bertahun-tahun area ini jadi andalan promosi pemerintah kabupaten hingga pusat sebagai sentra perikanan. Namun dapat dilihat jumlah pengunjung, jumlah perahu dan nelayan yang datang ke tempat ini sangat sedikit. Hal berbeda dapat dilihat di Tempat Pelelangan Ikan Beba yang terdapat di Kecamatan Galesong Utara TPI Beba merupakan TPI paling sibuk dalam wilayah Kabupaten Takalar. Puluhan bahkan ratusan perahu silih berganti datang pusat pelelangan ikan ini. Para pembeli berasal dari Kabupaten

Gowa, Kabupaten Takalar hingga Kota Makassar. Padahal fasilitas yang ada masih sangat terbatas.

2. Peran Aktor Utama Pembangunan

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan suatu keadaan yang normal baik dalam segi sosial, ekonomi maupun dalam segi psikologi, sejahtera fisik maupun non fisik. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, demikian pula yang terjadi pada masyarakat pesisir pada umumnya di Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara. Potensi kegiatan perikanan laut yang merupakan sumber daya ekonomi lokal yang potensial dikembangkan membutuhkan peran dari berbagai aktor pembangunan, bukan hanya pemerintah tetapi juga kelompok masyarakat, dan lembaga keuangan, bahkan termasuk perguruan tinggi.

Upaya menciptakan wirausahawan muda khususnya di wilayah pesisir yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kepehaman akan adanya potensi yang bisa dioptimalkan harus diikuti oleh kemauan untuk secara bersama mendorong bangkitnya motivasi masyarakat pesisir untuk mau tahu dan mampu melakukan kegiatan menambah nilai tambah (*value added*) dari produk-produk kegiatan perikanan laut yang ada di sekitarnya. Bidang-bidang usaha potensial yang dapat dilakukan tidak hanya berfokus pada hasil perikanan tangkap semata tetapi juga bisa dikembangkan pada aspek lain yang memiliki kaitan langsung dengan produk perikanan baik yang bersifat ke depan maupun yang memiliki efek ke belakang. Dalam arti bahwa banyak sekali kegiatan usaha yang bisa dilakukan yang dapat saling mendukung di sektor perikanan laut.

Aktor utama dalam upaya menciptakan wirausahawan muda yang dimaksudkan dalam penelitian ini diidentifikasi adalah pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga keuangan, pelaku industri, dan perguruan tinggi. Ketujuh aktor dimaksud idealnya dapat mengambil peran untuk berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, lebih khusus melalui pengembangan wirausahawan muda. Mengapa wirausahawan muda?, karena berdasarkan data-data awal yang telah dipaparkan bahwa anak-anak nelayan di desa-desa pesisir Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara tidak banyak yang dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi karena faktor ekonomi, dan karena itu mereka umumnya ikut terlibat “secara terpaksa” dalam kegiatan melaut yang dilakukan orang tuanya. Ketidakmampuan menangkap peluang untuk memanfaatkan potensi sumber daya perikanan laut yang tergolong relatif melimpah tersebut disebabkan oleh

karena tidak adanya sistem yang secara komprehensif, sistematis dan massif untuk mendorong kelompok penduduk usia muda tersebut untuk masuk dalam kegiatan produktif bernilai tambah.

Pemberian kebijakan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat bukanlah hal yang untuk mudah dilakukan. Chandra (Kusnadi, 2007) menjelaskan bahwa inisiatif untuk menggugah partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal sering merupakan intervensi pihak luar ke dalam masyarakat atau komunitas setempat dan harus memperhatikan karakter, cara dan kapasitas kaum miskin. Pada dasarnya setiap golongan masyarakat termasuk masyarakat miskin, masih memiliki potensi sumber daya social yang bisa didayagunakan untuk mengatasi kemiskinan. Sumber daya social yang berupa system nilai, norma-norma perilaku, dan kepercayaan local telah terbukti mampu menjaga integrasi masyarakat pesisir (Kusnadi, 2007). Fukuyama (Pelling and High, 2009) menjelaskan modal social sebagai kemampuan efektif dan lentur dalam menghadapi perubahan yang berlangsung cepat karena intervensi kapitalisme pada berbagai sector kehidupan masyarakat. Modal social yang memiliki unsur kepercayaan (*trust*), norma (*norm*), jaringan (*network*), dan *resiprocity* (hubungan timbal balik) adalah sumber daya sosial yang terdapat dalam kelompok kerja atau relasi social patron client yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pesisir antara juragan atau pemilik modal dengan para nelayan buruhnya. Arah kebijakan pembangunan dalam masyarakat pesisir yang memutus rantai relasi social antara Juragan dan para nelayan buruhnya sehingga menciptakan nelayan buruh menjadi masyarakat mandiri, menurut saya adalah hal yang salah. Karena tingkat kepercayaan yang tinggi nelayan buruh terhadap juragannya telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat pesisir yang sangat susah untuk diubah.

Dalam konteks pembangunan masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Takalar, idealnya merupakan bauran kebijakan antara kebijakan ekonomi, kebijakan sumber daya alam dan kebijakan kelembagaan yang bersinergis dan terintergrasi satu sama lainnya. Arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah seharusnya melibatkan semua aspek yang terdapat dalam masyarakat pesisir. Kebijakan pemanfaatan kelembagaan yang telah ada dalam masyarakat pesisir dalam hal ini yang dibentuk akibat dari relasi social patron klien antara juragannya dan nelayan buruhnya seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik.

Menurut hasil pengamatan di lapangan, keberadaan aktor tokoh masyarakat dalam hal ini orang-orang yang memiliki pengaruh kuat terhadap komunitas masyarakat nelayan yaitu jurangan, diperoleh fakta bahwa sesungguhnya terdapat relasi sosial Juragan dan nelayan buruhnya sesungguhnya memiliki akar modal sosial yang kuat, sehingga kebijakan pembangunan masyarakat di kawasan pesisir dapat melalui peran dari Juragan atau pemilik

Modal. Tingkat kepercayaan yang tinggi nelayan buruh terhadap Juragannya dan norma yang telah tersedia dalam relasi sosial tersebut, merupakan modal yang baik dalam memasukkan kebijakan-kebijakan pembangunan kepada nelayan buruh untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya dengan kata lain, Juragan bisa menjadi jembatan antara para stekholder penentu arah kebijakan dan nelayan buruh sebagai objek arah kebijakan pembangunan. Juragan dalam masyarakat pesisir bisa berperan sebagai lembaga perbankan yang dapat memberikan jaminan baik dalam modal maupun sosial kepada para nelayan buruhnya sehingga dapat menciptakan investasi modal yang dapat dimanfaatkan kelak oleh para nelayan buruhnya dan secara tidak langsung pola pikir masyarakat pesisir yang bersifat konsumtif akan bergeser secara perlahan berganti menjadi pola pikir untuk menabung.

Kenyataan bahwa potensi daerah pesisir yang sangat besar tidak didukung infrastruktur yang baik, kesempatan kerja yang luas, dan tentunya jiwa wirausaha pada individu masyarakatnya. Padahal, secara sosial budaya, masyarakat yang mayoritas nelayan tangkap tersebut, merupakan orang-orang yang ramah dan sangat terbuka. Namun terdapat sedikit masalah yakni sulitnya untuk menggerakkan, apalagi mengubah kebiasaan menangkap menjadi budidaya.

Sebenarnya pemerintah telah menggulirkan berbagai program, proyek dan kegiatan untuk mengentaskan nelayan dari kemiskinan, termasuk mendorong agar semakin banyak kelompok-kelompok usaha di masyarakat pesisir, tetapi hasilnya belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Hasil pendalaman di lapangan, memunculkan dugaan bahwa banyak faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat pesisir tidak mampu memanfaatkan peluang dari potensi sumber daya ekonomi di lingkungan sekitarnya. Salah satu di antaranya adalah karena pandangan yang keliru terhadap setiap proyek, program ataupun kegiatan yang diprakarsai pemerintah. Masyarakat masih menganggap bahwa inisiasi yang dilakukan pemerintah hanya bertujuan jangka pendek semata ataupun mereka hanya untuk menunjukkan niat baik pemerintah semata.

Ada pemahaman yang kurang tepat tentang tujuan proyek ataupun kegiatan pemberdayaan yang diinisiasi pemerintah di wilayah pesisir. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya “salah paham” kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan, umumnya mereka menganggap bahwa proyek yang dilakukan adalah “budi baik” pemerintah semata, sehingga semangat untuk mengembangkannya dalam skala yang lebih luas dan berkelanjutan sama sekali tidak terjadi.

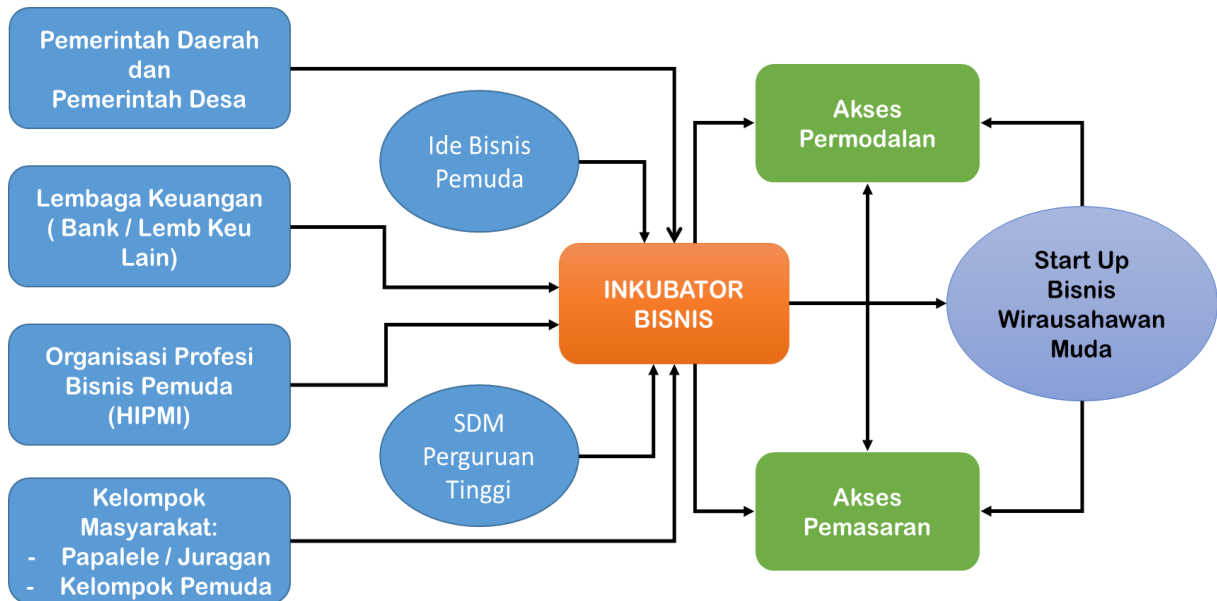
Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Takalar, pemerintah yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut mempunyai peran berbeda-beda, semua berperan

sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga. Pertama, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar merupakan penanggungjawab semua program yang telah digulirkan pemerintah kepada nelayan pada tingkat kabupaten. Sebagai pelaksana teknis, dinas sebagai penyelenggara program mempunyai peran sebagai penentu kebijakan dalam bidang perikanan termasuk dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.

Penentuan kebijakan, dinas cenderung otoriter, dinas terlalu dominan dalam menentukan kebijakan tanpa melibatkan peran serta masyarakat, akibatnya masyarakat sekedar menjalankan saja walaupun kemungkinan kurang tepat untuk kondisi spesifik masyarakat setempat. Hal semacam ini seringkali terjadi dan tentu saja pencapaian tujuan seringkali tidak tercapai secara optimal. Hal ini dapat diartikan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar khususnya di wilayah studi sangat dominan, peran dominan pemerintah menyebabkan gagalnya sebuah pemberdayaan masyarakat. Program ini cenderung bersifat *top-down*, yang cenderung tidak memberi ruang yang cukup bagi kelompok-kelompok masyarakat berperan karena kebijakan pemberdayaan tidak memperhatikan apa yang sesungguhnya kelompok masyarakat butuhkan.

3. Model Pengembangan Wirausahawan Muda

Berdasarkan hasil pengamatan, pendalaman, dan telaah masalah di lokasi penelitian, kemudian dikonfirmasi melalui kegiatan *Fucus Group Discussion* (FGD), maka model pengembangan wirausahawan muda bagi masyarakat pesisir dibangun secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh aktor utama pembangunan di daerah, yaitu pemerintah daerah, lembaga keuangan, organisasi profesi bisnis pemuda, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat, untuk mendorong tumbuhnya ide-ide bisnis bagi kaum muda di wilayah pesisir. Bentuk yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk wadah inkubator bisnis yang didalamnya semua aktor utama dimaksud terlibat aktif untuk melakukan asesmen terhadap ide-ide bisnis dari kaum muda. Kerangka model pengembangan wirausahawan muda bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Pengembangan Wirausahawan Muda Masyarakat Pesisir
Kabupaten Takalar

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016)

Pertama, pemerintah daerah harus berperan memberi ruang yang lebih luas dan berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan muda. Profil masyarakat pesisir khususnya di wilayah studi mengisyaratkan dibutuhkannya sentuhan kebijakan khusus yang berbasis pada kebijakan ekonomi yang berpihak pada tumbuhnya inisiatif, kreasi, dan motivasi untuk berwirausaha bagi kalangan muda. Kebijakan ini harus melibatkan aktor lokal seperti lembaga keuangan, organisasi profesi bisnis pemuda, dan para juragan kapal tangkap (*papalele – bahasa Makassar*) untuk secara bersama-sama memberi ruang yang lebih luas bagi kaum muda untuk mengkreasikan ide-ide bisnis mereka melalui penguatan kelembagaan inkubator bisnis di wilayah pesisir.

Kedua, lembaga keuangan (bank dan non bank) melalui kebijakan pemerintah daerah harus mengambil peran melalui inisiasi adanya kredit program yang khusus diperuntukkan bagi tumbuhnya usaha kecil dan mikro di wilayah pesisir. Untuk aktor kedua, yaitu lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai mitra yang saling menguntungkan dengan usaha bisnis yang akan dibangun. Posisi lembaga keuangan bersifat “menunggu” rekomendasi dari inkubator bisnis terkait usaha bisnis apa yang bisa dibiayai melalui kredit program dari lembaga keuangan. Rekomendasi dari inkubator menjadi jaminan bagi bank tentang kelayakan usaha dari kelompok atau individu pemuda yang akan start up bisnis.

Ketiga, organisasi profesi bisnis pemuda yang dalam konteks ini adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Organisasi ini bertugas untuk mendorong sekaligus

membantu usaha-usaha bisnis pemuda yang baru akan start up (memulai) untuk menjangkau pasar yang lebih luas, juga terkait dengan pendampingan dan pembimbingan usaha melalui program yang berkesinambungan. HIPMI dalam fungsinya sebagai organisasi profesi bisnis bagi pemuda, dapat menjadi "ayah angkat" bagi bisnis-bisnis pemuda yang baru akan dimulai.

Keempat, tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan dalam hal ini adalah *Papalele* (Juragan Kapal) dan Karang Taruna ikut terlibat dalam wadah inkubator bisnis yang dibentuk. Peran *Papalele* menjadi salah satu bentuk kelompok *local wisdom* (kearifan lokal) yang harus didorong untuk mengambil bagian mendorong tumbuhnya kesadaran kaum muda untuk memulai bisnisnya. Upaya dimaksud adalah dengan memberikan ruang yang lebih luas dengan memberi peluang kepada kaum muda untuk ikut dalam alur bisnis yang selama ini mutlak dalam penguasaan kelompok *Papalele* di kawasan pesisir. Sementara kelompok pemuda seperti organisasi Karang Taruna, berperan untuk memperluas jangkauan tugasnya tidak hanya dalam bentuk kegiatan sosial tetapi juga mengembangkan tanggung jawabnya dalam bentuk mengorganisir kaum muda untuk berkreasi dalam bidang bisnis yang riil.

Keempat aktor utama tersebut masing-masing melakukan perannya dalam satu wadah atau lembaga yang dibentuk dalam hal ini adalah Pusat Inkubator Bisnis Wilayah Pesisir. Lembaga ini dikelola oleh orang-orang yang dianggap kompeten melalui kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah dan pemuda di dalamnya. Pada prinsipnya, fungsi inkubator bisnis adalah wadah yang bisa memfasilitasi lahirnya ide-ide bisnis kreatif dari kaum muda termasuk di dalamnya melakukan kegiatan/kampanye yang bisa mendorong terjadinya perubahan pola pikir (*mindset*) kaum muda, memfasilitas kegiatan *coaching* dan *mentoring*, penilaian kelayakan usaha, pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi bisnis-bisnis potensial bagi kaum muda di wilayah pesisir. Oleh karena itu, pelibatan perguruan tinggi dalam Inkubator Bisnis dimaksudkan agar sumber daya untuk kegiatan pelatihan, *coaching* dan *mentoring* termasuk penilaian kelayakan bisnis dilakukan bersama-sama dengan perguruan tinggi sehingga hasilnya bisa lebih dipertanggung jawabkan.

Jika seluruh aktor utama tersebut terlibat dalam lembaga Inkubator Bisnis dimaksud maka akses permodalan dan akses pasar akan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan terintegrasi. Oleh karenanya lahirnya kebijakan dari pemerintah daerah untuk bisa mendorong dan mengajak lembaga-lembaga keuangan untuk mengambil peran untuk menumbuhkan usaha-usaha pada skala mikro dan kecil di wilayah pesisir akan memberikan harapan bahwa kegiatan-kegiatan usaha mikro dan kecil dapat tumbuh signifikan dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

1. Sebaran sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Takalar cukup beragam. Namun belum ada upaya maksimal yang sedang dilakukan untuk memanfaatkannya secara optimal.
2. Potensi bidang usaha yang dapat dikembangkan oleh kaum muda di wilayah pesisir Kabupaten Takalar sangat prospektif. Walaupun saat ini masyarakat lebih dominan fokus pada penangkapan ikan semata, belum ada upaya maksimal untuk mengembkan kegiatan usaha pada skala mikro, kecil, ataupun menengah pada pengolahan hasil laut.
3. Pemerintah daerah dan pemerintah desa di wilayah Pesisir Kabupaten Takalar telah memberikan perannya untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat termasuk kaum muda, tetapi belum optimal karena program yang dilaksanakan relatif disalah artikan oleh kelompok penerima manfaat sehingga efektifitas keberlanjutannya tidak terjamin.
4. Model pengembangan wirausahawan muda dibangun dalam suatu kerangka yang integratif dengan melibatkan seluruh aktor utama di daerah, termasuk melibatkan perguruan tinggi dalam wadah inkubator bisnis untuk mempersiapkan, mengasesment, mendampingi, melatih, dan membantu kelompok-kelompok bisnis pemuda untuk *start up bisnis* dalam skala mikro, kecil, dan menengah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penelitian ini dapat dilakukan. Khususnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti yang telah bersedia membiayai kegiatan penelitian ini demikian pula kepada Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar yang banyak membantu dan mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan penelitian. Kepada Pemerintah Kabupaten Takalar, kami juga haturkan terima kasih karena telah memberikan izin kepada tim pelaksana untuk melakukan penelitian pada wilayah pesisir di Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara. Kepada seluruh kepala-kepala desa di wilayah penelitian, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan BPC HIMPI Takalar, yang telah berperan aktif dalam memberikan informasi, klarifikasi, dan sumbangan pemikiran sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A.A., 2008. *Partisipasi Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara)*. Makassar: LPM UNHAS
- Dendi, A., Heile, H.J., Hilaliyah, R. and Haryono, R.S., 2004. *Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal: Beberapa Pelajaran dari Nusa Tenggara*. Jakarta: Depdragri & GTZ.
- Hutomo, M.Y., 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Bappenas, Jakarta.
- Kusnadi, S., Sulistiowati, Y. and Subchan, P., 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Lewaherilla, N.E., 2002. *Pariwisata Bahari; Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan*. Bogor: Program Pasca Sarjana Institut Pertanian.
- Mantjoro, E., 1988. *Sosial and Economic Organization of Rural Japanese Fishing Community A case of Nomaike. A Study Conducted under the Cooperation of the Japan Foundation, Samratulangi University, Indonesia, Kagoshima University, Japan*, pp.1-12.
- Moleong, L., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pelling, M. and High, C., 2005. *Understanding adaptation: what can social capital offer assessments of adaptive capacity?. Global Environmental Change*, 15(4), pp.308-319.
- Priyanto, S.H., 2009. *Mengembangkan pendidikan kewirausahaan di masyarakat. Jurnal PNFI*, 1(1), pp.57-82.
- Rahman, A. and Rasulong, I., *Empowerment of Creative Economy to Improve Community Incomes in Takalar Regency. IOSR Journal of Business and Management* Ver. V 17, no. 4: 2319-7668.
- Suprijanto, I., 2006. *Karakteristik Spesifik, Permasalahan dan Potensi Pengembangan Kawasan Kota Tepi laut/Pantai (Coastal City) di Indonesia “. Proceeding-Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global*.
- Syahza, A., 2003. *Rancangan model pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui pembangunan agroestat kelapa sawit di daerah Riau. Jurnal Ekonomi*, Th. VIII/02/November/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Trisbiantoro, Didik, dkk. 2013. *Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol 4 No. 1 hal. 18-29.

- Wardana, D.S. and Indarti, I., 2013. Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(1), 75-88.
- Wasak, M.P., 2010. Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. *Pasific Journal*, 3(5), pp.958-962.
- Wickham Phillip, A., 2001. *Strategic Entrepreneurship. A decision-making approach to new venture creation and management*. Harlow Pearson Education.
- Widjajanti, K., 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), pp.15-27.
- Yuliana, R., Model Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pengembang Ekonomi Lokal Melalui Sistem Kemitraan Bisnis Islam Berbasis Mompreneur. *Pamator*, Volume 3, Nomor 2, hal. 128-136.
- Yustika, A.E., 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Penerbit Bayu Media Malang.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*. Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta.

ASSESSMENT ARSITEKTUR E-LEARNING DI SANGGAR KELOMPOK BELAJAR GUNUNG KIDUL

Krisnawati¹⁾, Ema Utami²⁾, Hartatik³⁾, Hastari Utama⁴⁾

¹⁾Sistem Informasi STMIK AMIKOM Yogyakarta

²⁾Magister Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta

³⁾Manajemen Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta

⁴⁾Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta

Jl Ring road Utara, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta 55281

* krisna@amikom.ac.id¹

ABSTRAK

Assesment bertujuan untuk "memotret" kondisi organisasi dan SDM pada saat ini sebagai "baseline data" yang akan dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan pengembangan Sanggar Kelompok Belajar. Partisipasi seluruh warga Sanggar Kelompok Belajar (SKB) sangat penting untuk mendata aspirasi dan potensi, sehingga kondisi organisasi dan SDM dapat dipetakan secara akurat. Dengan dukungan data yang akurat dan lengkap, kebijakan pengembangan organisasi akan dapat diambil secara lebih objektif dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil pengumpulan data ada enam masalah utama yang terdapat pada proses pembelajaran pendidikan kesetaraan yang ada di SKB Gunungkidul, yaitu registrasi, bahan ajar (mencakup pengembangan program, kurikulum, produksi dan distribusi), unit sumber belajar, bantuan belajar, evaluasi, dan kendali mutu. Dari enam masalah tersebut kemudian diurai untuk memperoleh penyelesaian masalahnya. Penyelesaian masalah kemudian diidentifikasi ke dalam LTSA (Learning Technology Standar Architecture) sistem e-Learning untuk menambah standar kualitas proses dan layanan pembelajaran.

Kata kunci : Assesment, SKB, LTSA

ABSTRACT

Assessment aims to get the condition of organization and human resources at this moment as baseline data, and will be used as reference for making policy development at Sanggar Kelompok Belajar (SKB). Participation by all members of SKB is very important, to assess the aspirations and potency, so the conditions organization and human resources can be accurately mapped. With the support of the data is accurate and complete, the policy development of the organization will be able to take a more objective and precise. Based on data collection, there are six main issues contained in the learning process of education equality in SKB Gunungkidul, namely registration, teaching materials (including program development, curriculum, production and distribution), the unit of learning resources, learning support, evaluation, and quality control. From the six issues are then decomposed to obtain a solution to the problem. Troubleshooting later identified in LTSA (Learning Technology Standard Architecture) e-learning systems to increase quality of learning process and learning services.

Keywords : Assesment, SKB, LTSA

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Berdasarkan formalitasnya pendidikan memiliki bentuk yang berbeda (UU Nomor 20 Tahun 2003). Bentuk tersebut adalah pendidikan formal, nonformal dan

informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pada umumnya pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada suplemen rencana kerja pemerintahan tahun 2015 menunjukkan beberapa strategi pembangunan nasional untuk mengantisipasi dibukanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Untuk menghadapi persaingan global tersebut, maka pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan manusia yang unggul dan berdaya saing.

Peningkatan sumber daya manusia dalam hal pendidikan juga menjadi bagian dari Pendidikan Kesetaraan Dan Pendidikan Luar Sekolah yang dilakukan berjenjang dari nasional hingga kecamatan. Pada tingkat provinsi, khususnya Yogyakarta, Dinas PNFI (Pendidikan non formal dan informal) menjadi ujung tombak koordinasi yang dibantu oleh UPTD (Unit Pemerintah Tingkat Daerah) yang berfokus pada pengembangan pembelajaran yaitu BPKB (Balai pengembangan kegiatan belajar) dan BTKP (Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan) yang berfokus pada pelayanan teknologi pendidikan di wilayah provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Bersumber dari instansi pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul didapatkan suatu fakta bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C di UPT SKB (Sanggar Kelompok Belajar) Gunungkidul menjadi patokan bagi seluruh PKBM di Kabupaten Gunungkidul yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket C. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan paket C yang diselenggarakan di UPT Sanggar Kelompok Belajar Gunungkidul harus sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C yang diberlakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.

SKB Kabupaten Gunungkidul memiliki tujuan menjadi Pusat Data Pendidikan Nonformal dan Informal, melaksanakan Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI) yang berkualitas, meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kursus Institusional, meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Nonformal dan Informal, serta melaksanakan Pengkajian Pengembangan Model Pendidikan Nonformal dan Informal. Hal tersebut diperoleh dari hasil pengumpulan data pada SKB Gunungkidul.

Dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara dan peninjauan dokumen-dokumen arsitektur organisasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dari data

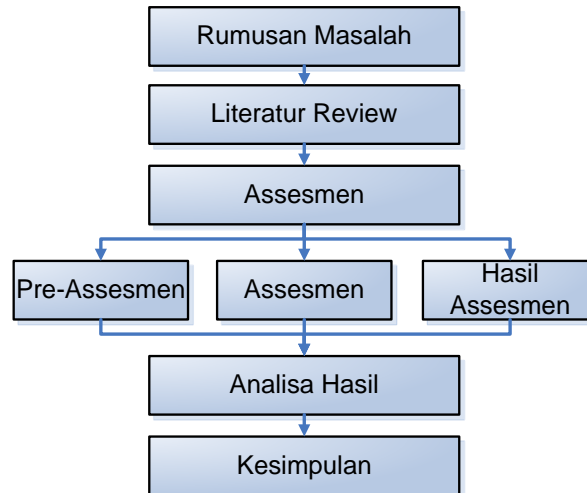
yang diperoleh bahwa akses masyarakat ke lokasi SKB terbatas dikarenakan kondisi topografi di daerah Gunungkidul, tetapi penyebaran infrastruktur internet telah masuk ke daerah SKB tersebut, sehingga memungkinkan serta mendukung untuk diterapkan suatu sistem pendidikan berbasis E-Learning. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Kidul merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang terletak di Jalan Pemuda No. 21 Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul.

Hingga saat ini SKB Gunung Kidul baru memiliki beberapa pengajar dengan kualifikasi pendidikan Ekonomi, Sosiologi, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKn. Beberapa mata pelajaran seperti Aplikasi Komputer, Sejarah dan Geografi belum memiliki pengajar di bidang tersebut. Akibatnya sering terjadi suatu kasus dimana pengajar yang mengajar suatu matapelajaran bukanlah orang yang kompetensinya di bidang tersebut. Manfaat SKB yang begitu besar bagi peserta didik nonformal di SKB Gunungkidul, maka dalam penelitian ini dibuat suatu assesmen mengenai kekurangan arsitektur pembelajaran yang ada. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses dan layanan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut maka dinilai perlu untuk dilakukan pengkajian terhadap assesmen penerapan sistem pembelajaran nonformal jarak jauh untuk kejar Paket C di SKB Gunung Kidul. Maka dapat dirumuskan pula, penelitian ini bertujuan agar e-Learning yang dibangun dapat mengacu pada standar Learning Technology System Architecture (LTSA), sehingga dapat memfasilitasi pendidik dan peserta didik untuk proses belajar-mengajar dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan akan berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data terkait pendidikan kesetaraan yang berjenjang di kabupaten Gunung kidul.

METODE PENELITIAN

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : 1). perumusan masalah, literatur review; 2). asesmen yang dibagi menjadi 3 (pre-asesmen, assesmen, hasil assesmen); 4). analisa hasil; dan 5). penarikan kesimpulan. Tahapan penelitian seperti ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan penelitian

E-learning

Beberapa pakar mendefinisikan e-learning sangat beragam, namun demikian dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Menurut Hartley (2006), e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet atau media jaringan komputer lain.

Pada perkembangannya istilah e-learning sudah banyak digunakan oleh berbagai lembaga dan beberapa lembaga juga banyak yang menyebutnya elearning. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa e-learning merupakan penyampaian konten pembelajaran secara elektronik yang didistribusikan melalui web atau melalui CD/DVD (offline) dan ada komponen evaluasi yang melekat di dalamnya (Priyanto, 2008).

Sistem manajemen pembelajaran menggunakan teknologi internet untuk mengatur interaksi user dengan sumber pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran sangat diperlukan untuk membuat sebuah environment dimana seseorang dapat merencanakan, mengakses dan mengatur sebuah e-learning (Wismasingrum, 2007). Sistem manajemen pembelajaran secara umum memiliki fitur-fitur standar pembelajaran elektronik antara lain sebagai berikut (Wismasingrum, 2007):

1. Fitur Kelengkapan Belajar Mengajar, meliputi: a). Daftar Mata Kuliah/Mata Ajar dan Kategorinya; b). Silabus Mata Kuliah/Mata Ajar; c). Materi (berbasis teks atau multimedia); d). Daftar Referensi atau Bahan Bacaan.
2. Fitur Diskusi dan Komunikasi, meliputi: a). Forum Diskusi atau Mailing List; b). Instant Messenger untuk komunikasi realtime; c). Papan Pengumuman; d). Profil dan Kontak Instruktur; e). File and Directory Sharing.

3. Fitur Ujian dan Penugasan, meliputi: a). Ujian Online (Exam); b). Tugas Mandiri (Assignment); c). Rapor dan Penilaian.

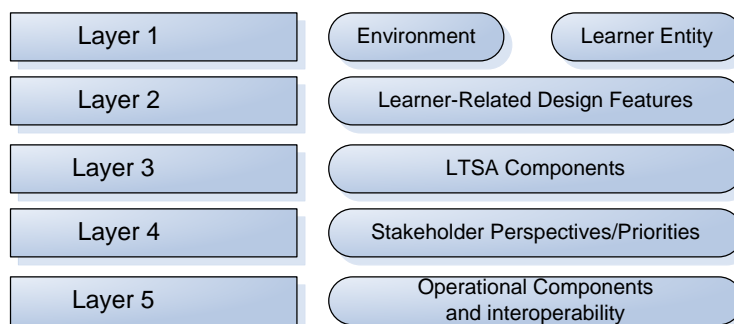
Assesment

Menurut Overton (2008) di dalam bukunya "*Assessing Learners with Special Needs: An Applied Approach*" menyatakan assesment adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk memonitor kemajuan dan bila diperlukan pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam definisi saya tentang tes, suatu asesmen bisa saja terdiri dari tes, atau bisa juga terdiri dari berbagai metode seperti observasi, wawancara, monitoring tingkah laku, dan lain sebagainya.

Assesmen dalam lingkup penelitian ini bertujuan untuk "memotret" kondisi organisasi dan SDM pada saat ini sebagai "baseline data" yang akan dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan pengembangan Sanggar Kelompok Belajar. Partisipasi seluruh warga Sanggar Kelompok Belajar sangat penting untuk mendata aspirasi dan potensi, sehingga kondisi organisasi dan sumber daya manusianya dapat dipetakan secara akurat. Dengan dukungan data yang akurat dan lengkap, kebijakan pengembangan organisasi diharapkan dapat diambil secara lebih objektif dan tepat sasaran.

Learning Technology Standar Architecture (LTSA)

Standar LTSA merupakan standar internasional sistem pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan IEEE 1484 Learning Standards Committee (LTSC) oleh Farance Incorporational, divisi Edutool, yang merupakan arsitektur tingkat tinggi yang berfokus pada masalah teknologi pembelajaran, pelatihan berbasis komputer, sistem pendukung performasi elektronik, instruksi berbantuan komputer, dan lain-lain. LTSA dapat juga diartikan sebagai suatu kerangka kerja untuk mengetahui sistem yang ada dan yang akan dibangun (Yusuf dkk, 2010). Standar LTSA ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2. Standar LTSA (Yusuf dkk, 2010).

Layer 1 yaitu *Learner and Environment Interaction*. Layer ini berfokus kepada akuisisi, transfer, pertukaran, formulasi dan penemuan pengetahuan dan atau informasi melalui interaksi dengan lingkungan. Layer 2 yaitu *Learner Related Design Features*. Layer ini berfokus kepada pengaruh yang dimiliki learner pada perancangan dari sistem pembelajaran. Layer 3 yaitu *System Components*. Layer ini mendeskripsikan komponen dasar arsitektur yang diidentifikasi pada layer 2. Layer 4 yaitu *Implementation Perspective and Priorities*. Layer ini mendeskripsikan sistem pembelajaran dari berbagai perspektif dengan mengacu pada layer 3. Setiap stakeholder memiliki perspektif yang berbeda terhadap sistem pembelajaran. Analisis terhadap perspektif dapat menghasilkan verifikasi dan validasi komponen LTSA pada system, penentuan komponen LTSA yang tidak perlu dan perlu ditekankan pada system dan indikasi berbagai prioritas perancangan level tinggi dan level rendah. Layer 5 yaitu *Operational Components and interoperability (codings, APIs, proocols)* . Layer ini mendeskripsikan komponen dan antar muka yang bersifat generic dari arsitektur pembelajaran berbasis teknologi informasi seperti yang diidentifikasi pada layer 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan penelitian, kegiatan assesmen di bagi menjadi tiga proses yang dilaksanakan, bentuk assesmen tersebut yaitu :

1. Penilaian yang dilakukan sebelum proses assesmen dilakukan pada sistem yang sedang digunakan (pre-assessment), tahapan ini lebih tertuju pada pelaksana assesmen mengenai rincian pekerjaan yang akan di asses.
2. Penilaian pada arsitektur yang sedang digunakan (*during assessment*).
3. Penilaian yang dilakukan jika penerapan e-learning dilaksanakan (*post assessment*).

Ketiga bentuk penilaian tersebut masing-masing memiliki tujuan berbeda dan saling melengkapi satu sama lain untuk mentransformasi sistem pembelajaran yang sedang berjalan.

Pre-Assesment

Sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Daerah Istimewa Yogyakarta berubah statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, Kantor Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk

berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Balai, Sub bagian Tata Usaha, Seksi Program dan Pengembangan, Seksi Pemberdayaan, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Hasil peninjauan atas data yang diperoleh pola arsitektur sistem saat ini disajikan dalam bentuk tabel serta target arsitektur sistem pendidikan jarak jauh yang direncanakan, seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Target arsitektur

Keadaan saat ini	Analisa Kebutuhan	Target Arsitektur
Proses pembelajaran Paket C belum menggunakan TI	Perancangan sistem pendukung pendidikan jarak jauh	Menggunakan sistem e-learning
Waktu akses data lambat dan dilaporkan secara manual (1 minggu)	Perancangan sistem informasi terintegrasi	Waktu akses data cepat dan berbentuk digital (1 jam)
Level operator tidak paham TI	Pelatihan penggunaan sistem informasi pendidikan jarak jauh Paket C.	Level operator memahami dan dapat menggunakan TI
Stakeholder kesulitan mengelola dokumentasi dan kekurangan dana pendidikan	Perencanaan strategis pengelolaan pendidikan jarak jauh Paket C	Mengurangi biaya pendidikan Paket C dengan memotong prosedur dan mengubah sumber belajar ke bentuk digital dan memudahkan proses tata kelola pendidikan paket C.
Belum ada autentifikasi dan otorisasi	Pembuatan sistem manajemen pendidikan jarak jauh Paket C	Pengaturan otorisasi dan autentifikasi pada pendidikan jarak jauh Paket C.

Apabila dibandingkan dengan proses belajar mengajar kejar paket C di SKB Gunung Kidul saat ini, penerapan e-Learning (pendidikan jarak jauh) memiliki beberapa kelebihan diantaranya :

1. Penerapan e-learning dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis.
2. Penerapan e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan/materi, peserta didik dengan pendidik maupun sesama peserta didik.
3. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang, dengan kondisi yang demikian itu peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran.
4. Kehadiran pendidik tidak mutlak diperlukan.
5. Pendidik akan lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan ajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang ada dan mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya.

During Assesment

Pada awal penelitian dilakukan survey terlebih dahulu, guna mengidentifikasi masalah yang terjadi pada dinas pendidikan dengan cara mendatangi tiga kantor, yaitu Kasi Kesetaraan, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, dan SKB Gunung kidul. Kemudian dilakukan pengambilan data, data tersebut diperoleh dengan cara wawancara dan tanya jawab angket yang telah dibuat sebelumnya. Hasil dari wawancara dan survey tersebut kemudian disajikan ke dalam tabel 2.

Tabel 2. Hasil Assesmen

No	Permasalahan	Keterangan
1	Registrasi	1. Penentuan kompetensi awal 2. Karakteritik calon peserta didik yang beragam (usia)
2	Bahan ajar (mencakup pengembangan program, kurikulum, produksi dan distribusi)	1. Penggunaan media cetak yang kurang interaktif dan lengkap, 2. Waktu belajar yang kaku dan strategi belajar yang monoton
3	Unit sumber belajar	1. Tidak adanya integrasi antar instansi terkait, 2. Daya tampung kelas terbatas, 3. Ketidakjelasan hak akses masing-masing instansi
4	Bantuan belajar	1. proses pembelajaran mandiri belum maksimal, 2. pemberian tugas belum sepenuhnya efektif, 3. dan kurangnya tenaga pendidik
5	Evaluasi	1. penggandaan soal memakan waktu dan tidak efisien,

		2. pelaksanaan evaluasi kurang terawasi, 3. pengumuman hasil evaluasi yang kurang baik
6	Kendali mutu	1. kurangnya standarisasi kualitas setiap proses dan produksi layanan/bantuan pendidikan/pembelajaran kepada peserta didik yang mencakup kendali dalam registrasi, bahan ajar, bantuan belajar, dan evaluasi hasil belajar

Peserta didik yang tidak menyelesaikan jenjang SMA sederajat karena beberapa hal berikut: drop out, masalah ekonomi, menikah di dini, bekerja di usia muda (kuli, pegawai, TKI, dan lain-lain), peserta didik yang memiliki kegiatan mendesak (atlet, homeschooling, dan lain-lain) menjadikan karakteristik calon peserta didik beragam.

Post Assesment

Penyelesaian masalah disesuaikan dengan rencana penerapan e-learning agar dapat membantu proses implementasi sistem di kemudian hari, disajikan pada table 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.

Tabel 3. Registrasi

No	Permasalahan 1	Rencana Pemecahan Permasalahan
1	Penentuan kompetensi awal.	Online registrasi dapat memudahkan warga gunungkidul untuk melakukan pendaftaran, agar tidak bulak-balik ke SKB
2	Karakteristik calon peserta didik yang beragam (usia).	Untuk menyeragamkan karakteristik calon peserta didik dilakukan placement test terlebih dahulu untuk menentukan kelas belajar. Placement test ditentukan dari ijazah terakhir peserta didik.

Tabel 4. Bahan ajar

No	Permasalahan 2	Rencana Pemecahan Permasalahan
1	Penggunaan media cetak yang kurang interaktif dan lengkap,	Penggunaan elemen multimedia yang terorganisir ke dalam e-library yang digunakan untuk proses penyampaian materi sehingga menarik minat dalam belajar.

		Materi disediakan dalam bentuk modul dan video, adanya soal-soal yang disediakan dan hasil pengerjaannya dapat ditampilkan. Hasil tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan pelajar mendapatkan apa yang dibutuhkan.
2	Waktu belajar yang kaku dan strategi belajar yang monoton	Peserta didik dapat mengatur jadwal dan model belajar yang dapat beradaptasi dengan keadaan peserta didik.

Tabel 5. Unit sumber belajar

No	Permasalahan 3	Rencana Pemecahan Permasalahan
1	Tidak adanya integrasi antar instansi terkait,	Dirancangnya skema LTSA guna memperjelas alur sistem pembelajaran, serta memperjelas integrasi
2	Daya tampung kelas terbatas,	Mengurangi biaya pendidikan paket c dengan memotong prosedur dan menggantikan ruang kelas menjadi materi online dan forum online.
		E-learning memberikan solusi daya tampung kelas yang terbatas.
3	Ketidakjelasan hak akses masing-masing instansi	Pembagian hak akses pada masing-masing user (Admin, Operator, calon peserta didik, peserta didik, pendidik).

Tabel 6. Bantuan ajar

No	Permasalahan 4	Rencana Pemecahan Permasalahan
1	Proses pembelajaran mandiri belum maksimal	Forum pembelajaran dapat digunakan untuk melakukan diskusi bahan ajar, baik antar pendidik dengan peserta didik maupun antar peserta didik.
		Peserta didik melakukan diskusi online pada satu topik tertentu dengan dibimbing oleh operator online bersama peserta didik lainnya.
2	Pemberian tugas belum sepenuhnya efektif	Untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugas mandiri, admin membantu dalam menyediakan referensi-referensi mengenai materi ajar.

3	Kurangnya tenaga pendidik	Tenaga pendidik di transformasi menjadi seorang operator IT, sebab operator/admin online dapat mengelola modul ajar.
---	---------------------------	--

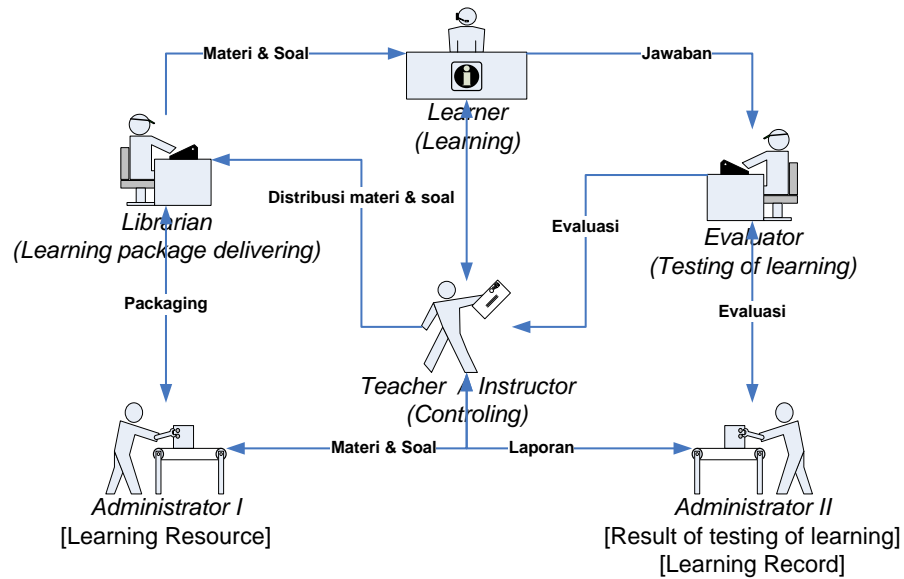
Tabel 7. Evaluasi

No	Permasalahan 5	Rencana Pemecahan Permasalahan
1	Penggandaan soal memakan waktu dan tidak efisien,	Evaluator akan melakukan proses pendistribusian soal via online (Upload and Share), agar dapat memangkas proses pendistribusian soal.
2	Pelaksanaan evaluasi kurang terawasi,	Evaluasi dilakukan oleh evaluator bukan instructor
3	Pengumuman hasil evaluasi yang kurang baik	Pengumuman hasil evaluasi berbasis online, agar peserta didik tidak perlu ke SKB untuk melihat hasil evaluasi belajar mereka.

Tabel 8. Kendali mutu

No	Permasalahan 6	Rencana Pemecahan Permasalahan
1	Kurangnya standarisasi kualitas setiap proses dan produksi layanan/bantuan pendidikan/pembelajaran kepada peserta didik yang mencakup kendali dalam registrasi, bahan ajar, bantuan belajar, dan evaluasi hasil belajar	Untuk menambah standar kualitas proses dan layanan pembelajaran diidentifikasi menggunakan Learning Technology Standar Architecture (LTSA).

Dari hasil assesmen tersebut, apabila diidentifikasi ke dalam LTSA sistem e-learning untuk menambah standar kualitas proses dan layanan pembelajaran maka dihasilkan sebuah skema pada gambar 3.



Gambar 3. Skema LTSA E-Learning di Sanggar Kelompok Belajar Gunung Kidul

Gambar 3 bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Learning Resources / Learning Record merupakan sumber materi dan hasil evaluasi, di dalamnya terdapat berbagai materi pelajaran yang dapat dijadikan referensi.
2. Teacher/Instructor mendistribusikan materi dan soal, memberikan kunci jawaban beserta pembahasan pada tahap evaluasi, serta menerima laporan atas hasil evaluasi, berupa nilai.
3. Librarian/Media dapat juga dikatakan sebagai interface bagi learner untuk mengakses materi pembelajaran/latihan soal.
4. Learner terdapat input dan output sebagai berikut: masukan yang diterima pada proses learner entity yakni materi dan soal latihan, sedangkan output berupa jawaban yang telah dikerjakan yang selanjutnya diproses sebagai evaluasi.
5. Evaluator terdapat input dan output sebagai berikut: evaluasi dari jawaban serta e-learning yang diterapkan, oleh user yang berinteraksi. Keluaran berupa nilai yang selanjutnya menjadi masukan bagi instructor dan dapat diketahui juga oleh learner entity.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menambah standar kualitas proses dan layanan pembelajaran pendidikan kesetaraan di SKB Gunungkidul dengan menggunakan LTSA sistem e-learning untuk :

1. Penyesuaian dengan standar LTSA menjadikan stakeholder yang terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar dapat menjalani aktivitasnya dengan baik, karena terpenuhinya kebutuhan pendidik dan peserta didiknya.
2. Peserta didik dapat menguasai/memahami materi pelajaran yang disampaikan pendidik. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran secara online.
3. E-learning akan memudahkan manajemen data pembelajaran berbasis online, yakni menyediakan layanan (upload and share) untuk mempermudah proses publikasi konten. Sehingga memudahkan admin dan operator untuk menempatkan materi ajarnya sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat.
4. Pendidik dapat mengupload materi, dan menyediakan referensi bagi peserta didik kapanpun dan dimanapun (terkoneksi Internet). Begitu pula dengan kemudahan publikasi informasi yang dapat dikelola oleh user admin dan operator.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan observasi pada SKB Gunung Kidul, penerapan e-Learning masih memiliki beberapa permasalahan, sehingga peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang cenderung akan muncul antara lain :

1. Untuk SKB tersebut dikarenakan berada di daerah yang memiliki struktur geografis pegunungan, akan memerlukan investasi yang mahal untuk membangun e-learning ini.
2. Peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi akan cenderung mengalami kesulitan.
3. Keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah akan menghambat pelaksanaan e-learning.
4. Bagi peserta didik yang tidak terlalu paham teknologi, sistem ini akan menjadi tantangan untuk mereka (pendidik dan peserta didik).
5. Proses belajar dan mengajarnya akan menjadi cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya penelitian ini, kepada:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

2. STMIK AMIKOM Yogyakarta
3. Sanggar Kegiatan Belajar Gunung Kidul

DAFTAR PUSTAKA

- Hartley, D. E. 2006. *Selling E-Learning*, American Society for Training and Development, USA.
- Priyanto, 2008, *Model E-Learning Readiness sebagai Strategi Pengembangan E-Learning*. Jurnal Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. halaman 267-274.
- Wismaningrum, S. K. 2007. *Perancangan model Content Authoring Tool berbasis SCORM (Sharable Content Object Reference Model) pada sistem E-learning I-ELISA*. Tesis S2 Teknik Elektro (Magister Teknologi Informasi) Universitas Gadjah Mada.
- Overton, T. 2008. *Assessing Learners with Special Needs: An Applied Approach* (7th Edition). University of Texas – Brownsville.
- [Yusuf, M., Wahyuni, S., dan Saim, M. E-Learning Menggunakan Standar Learning Technology System Architecture \(LTSA\). Jurnal Simantec. Vol. 1, No. 2 Juni 2010. ISSN 2088-2130. Halaman 131-138.](#)

**FORMULASI SNEDDS (SELF-NANOEMULSIFYING DRUG DELIVERY SYSTEM)
GAMAVUTON ; UJI AKTIVITAS PENURUNAN SITOKIN TNF- α**

**Lutfi Chabib^{1,2*}, Viren Ramadhan², Dimas Adhi Pradana², Zullies Ikawati¹,
Ronny Martien¹, Hilda Ismail¹**

¹Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia

²Program Studi Farmasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta-Indonesia

email: *lutfi.chabib@uii.ac.id

ABSTRAK

Artritis Rematoid adalah penyakit inflamasi yang bersifat kronik dan terdapat pada struktur articular persendian. Banyak ahli berpendapat bahwa mekanisme penyakit rematoid artritis ini berhubungan dengan sistem imun yang ditandai terutama oleh ekspresi sitokin Tumor necrosis factor- α (TNF- α). Gamavuton-0 memiliki efek anti arthritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SNEDDS GVT-0 terhadap penurunan kadar sitokin IL-1 β dan TNF- α dan perbedaannya terhadap suspensi GVT-0 pada hewan uji tikus Wistar jantan terinduksi Complete Freund's Adjuvant (CFA). Kontrol positif diberi metotreksat (p.o) dan kelompok perlakuan diberi SNEDDS GVT-0 (p.o) dan suspensi GVT-0 (p.o) dengan dosis 40 mg/kg BB tikus. Penetapan kadar TNF- α dilakukan dengan metode Sandwich ELISA langsung. Perbedaan antar perlakuan dianalisis secara statistik menggunakan metode one way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Tukey. Hasil yang diperoleh SNEDDS GVT-0 memiliki aktivitas menurunkan kadar sitokin TNF- α sebesar 67,29 \pm 6,38 ng/L. Selain itu, hasil uji ketahanan menunjukkan bahwa SNEDDS GVT-0 memiliki ketahanan terhadap berbagai tingkatan pengenceran dengan parameter nilai ukuran partikel, PDI, dan %transmitan. Efek penurunan kadar TNF- α SNEDDS GVT-0 berbeda signifikan dua kali lipat lebih baik dibandingkan suspensi GVT-0 dengan taraf kepercayaan 95%.

Kata kunci: Artritis rematoid, SNEDDS, Gamavuton-0, TNF- α .

ABSTRACT

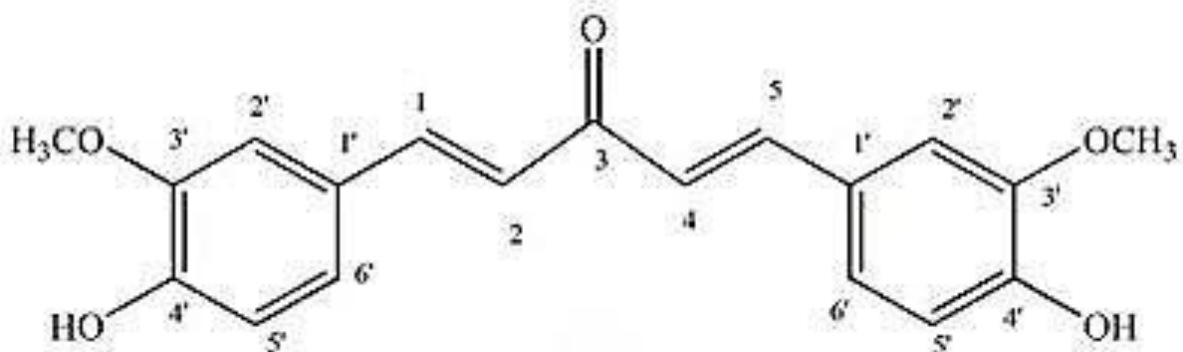
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammation disease that occurs in the articular structure of joints with an elevation of cytokine level, which are IL-1 β and TNF- α in RA joints synovium. Gamavuton-0 has an activity as anti-arthritis. This study aims to observe the effect of GVT-0 SNEDDS in lowering the level of TNF- α and to compare its activity with the GVT-0 suspension in the Complete Freund's Adjuvant (CFA)-induced Wistar male rats. Positive control group was given methotrexate orally and the treatment group was given a dose level of 40 mg/kg weight of rat GVT-0 SNEDDS and GVT-0 suspension orally. The Assay of TNF- α was conducted using direct sandwich ELISA method. The Differences between the treatments were statistically analyzed using ANOVA and Tukey Test. The result indicated that GVT-0 SNEDDS possessed the activity to lowering the level of TNF- α by respectively 67.29 \pm 6.38 ng/L. Furthermore, the result of endurance test indicated that GVT-0 SNEDDS possessed endurance against various level of dilution with paramaters of particle size, PDI, and % transmittance. GVT-0 SNEDDS possesses two times better activity on lowering the level of TNF- α compared to the GVT-0 suspension with the confidence level of 95%.

Keywords: Rheumatoid arthritis, SNEDDS, Gamavuton-0, TNF- α .

PENDAHULUAN

Arthritis rematoid (AR) merupakan penyakit peradangan pada daerah persendian yang terjadi akibat gangguan *autoimun* yang berarti bahwa sel-sel pada sendi dikenali sebagai antigen sehingga sistem imun tubuh akan menghancurkan antigen tersebut. Perkembangan AR berhubungan dengan peningkatan kadar sitokin TNF- α yang diproduksi oleh makrofag dan sel dendritik (Abbas dan Lichtman, 2005). Peningkatan kadar TNF- α ditemukan pada cairan sendi inflamasi dan dapat menyebabkan fibrosis serta kerusakan dari sendi arthritis. Adanya peningkatan kedua kadar sitokin pada jaringan sendi AR tersebut dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan keparahan pada penyakit ini (Aletha, dkk, 2010). Terapi farmakologis pada pengobatan AR yang digunakan selama ini diantaranya ialah *Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs* (DMARD), Obat Anti-Inflamasi Non Steroid (OAINS) dan kortikosteroid. Namun pengobatan ini menunjukkan kurang efesiennya terapi dikarenakan biaya yang dikeluarkan mahal serta efek samping yang cukup besar dalam penggunaan jangka panjang, sedangkan kortikosteoid sudah jarang digunakan karena efek sampingnya yang terlalu berisiko (Chabib, dkk, 2016).

Gamavuton atau GVT-0 memiliki nama kimia 1,5-bis (4'-hidroksi-3'-metoksifenil)-1,4-pentadien-3-on. GVT-0 merupakan senyawa analog kurkumin karena memiliki kesamaan dalam kepemilikan gugus hidroksi dan metoksi sebagai substituen rantai aromatiknya. Perbedaan GVT-0 dari kurkumin adalah kerangka 1,5-difenil-1,4-pentadien-3-on yang dimiliki GVT-0 sementara pada kurkumin kerangkanya adalah 1,7-difenil-1,6-heptadien-3,5-dion (Nugroho, dkk, 2007).



Gambar 1. Struktur GVT-0 (Sardjiman, 2000).

Kelarutan GVT-0 yaitu praktis tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti aseton, dimetil sulfoksida, etanol, etil asetat hal ini sama dengan kurkumin. Kurkumin yang awalnya berwarna kuning pada larutan dengan pH asam akan berubah menjadi kemerahan

atau merah tua dalam larutan basa. Degradasi ini dipicu oleh adanya gugus metilen pada kurkumin dan juga dipengaruhi oleh cahaya. Namun gamavuton sudah tidak memiliki gugus metilen lagi sehingga diharapkan memiliki kestabilan yang lebih tinggi terhadap cahaya dan pH daripada kurkumin.

Salah satu metode formulasi nanoemulsi yang berupa campuran isotropic minyak, surfaktan dan ko-surfaktan yang secara cepat dan mudah membentuk nanoemulsi pada pencampuran dengan air disebut SNEDDS (Patel, dkk, 2011). SNEDDS memiliki komponen utama berupa minyak, surfaktan, dan ko-surfaktan. Minyak sebagai fase pembawa obat, surfaktan sebagai pengemulsi minyak ke dalam air, dan ko-surfaktan untuk membantu tugas surfaktan sebagai pengemulsi.

METODE PENELITIAN

Alat

Timbangan elektrik, alat-alat gelas, *particle size analyzer* (PSA), Sentrifugator, *waterbath*, Sonikator, *Stirrer*, effendorf, oven, *incubator*, lemari pendingin, *ELISA reader*, *yellow tip* (Kan Jian), *blue tip* (LPI).

Bahan

Gamavuton-0 yang diperoleh dari hasil sintesis CCRC (*Curcumin Research Centre*) Fakultas Farmasi UGM, etanol 96% (General), metotreksat, aquades, *aqua pro injection*, minyak myritol, Tween 20, Cremophor EL, Propilenglikol, *Complete Freund's Adjuvant* (CFA), Na-CMC, NaCl 0,9%. *Standard solution*, *coated ELISA olate*, *standard dilution*, *streptavidin-HRP*, *stop solution*, *chromogen solution A*, *chromogen solution B*, *washing concentrate*, anti TNF- α .

Subyek Uji

Subjek uji yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus jantan galur *Wistar*, sehat, usia 2 bulan, berat badan berikisar 110-210 gram.

Pengajuan Kelayakan Etik

Penelitian telah memperoleh kelayakan etik (*Ethical Clearance*) dari Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia.

Pembuatan SNEDDS Gamavuton

Formula SNEDDS gamavuton ditampilkan pada **Tabel 1**. Formula SNEDDS gamavuton merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bagiana, 2014.

Tabel 1. Formula SNEDDS Gamavuton (Bagiana, 2014).

Myritol	Propilenglikol	Rasio Surfaktan		Surfaktan	Volume
		Tween 20	Cremophor EL	Total	Total
5 ml	5 ml	0,75	0,25	25 ml	35 ml

Cara pembuatan SNEDDS gamavuton yaitu gamavuton ditimbang seksama kemudian dilarutkan ke dalam myritol hingga terlarut sempurna. Selanjutnya larutan tersebut ditambahkan ko-surfaktan dengan pengadukan menggunakan *magnetic stirrer* dengan kecepatan 500 rpm selama 15 menit. Berikutnya ditambahkan cremophor EL dan tween 20.

Uji Aktivitas Penurunan Kadar TNF- α SNEDDS GVT-0

Hewan uji terlebih dahulu diaklimatisasi selama 10 hari dan dibagi menjadi 5 kelompok diantaranya kelompok normal, kontrol negatif, kontrol positif, kontrol perlakuan I (suspensi GVT-0) dan kontrol perlakuan II (SNEDDS GVT-0). Seluruh kelompok tersebut (kecuali kelompok normal) diinduksi CFA sebanyak 0,1 ml secara subplantar pada hari ke-0. Pada hari ke-15 dilakukan skoring indeks artritis untuk memastikan keberhasilan induksi. Pemberian sediaan uji selama 2 minggu meliputi metotreksat dosis 0,223 mg/kg BB peroral pada kontrol positif, suspensi GVT-0 dosis 40 mg/kg BB pada kontrol perlakuan I dan SNEDDS GVT-0 dosis 40 mg/kg BB pada kontrol perlakuan II. Pada hari ke-31 sendi lutut dan persendian jari kaki dipotong dan dilumatkan sehingga diperoleh lisat jaringan yang akan diamati ekspresi kadar TNF- α menggunakan metode ELISA.

Uji Ketahanan SNEDDS

SNEDDS gamavuton diencerkan 25, 50, 100, dan 250 kali, dengan *aqua pro-injectio* dan dievaluasi perubahan transmittan, PDI dan ukuran globul (Sawant, dkk, 2011).

Analisis Data

Data yang berupa kadar TNF- α dari tiap perlakuan dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan metode *Shapiro Wijk* dan uji homogenitas data. Jika terbukti bahwa data yang diuji terdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya data-data tersebut dapat diolah dengan metode statistik parametrik *one way ANOVA* yang dilanjutkan dengan uji *Tukey* dengan taraf kepercayaan 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan SNEDDS GVT-0

Tabel 2. Tabel hasil pengujian rerata ukuran partikel, PDI \pm SD dan hasil uji Transmitan (%)

Pengenceran	Ukuran partikel (nm)	PDI	Transmitan (%)
250x	101,4 \pm 2,33	0,43 \pm 0,04	96,37 %

Keterangan : Kriteria SNEDDS: Ukuran partikel < 200 nm; PDI 0,2- 0,7; Transmitan 100%

Formula SNEDDS merupakan campuran isotropik antara minyak, surfaktan dan ko-surfaktan yang telah dilakukan pemilihan formulasi terbaik pada penelitian sebelumnya oleh Bagiana, 2014. Fase minyak yang digunakan adalah myritol dicampurkan dengan propilenglikol sebagai ko-surfaktan lalu disonikasi dengan *pulse* 40 selama 6 menit. Kombinasi surfaktan cremophor EL dan tween 20 dengan perbandingan (1:3), kombinasi ini akan dicampurkan pada campuran sebelumnya (minyak dan ko-surfaktan) dengan penambahan zat aktif pada akhir proses pencampuran, disonikasi *pulse* 40 selama 15 menit. Berdasarkan **Tabel 2**, ukuran partikel yang diperoleh yaitu 101,4 nm yang menunjukkan bahwa sediaan ini termasuk dalam ukuran nanoemulsi. Suatu formula dikatakan stabil apabila ukuran partikel \leq 200 nm dan PDI 0,20-0,70 dengan ketahanan terhadap pengaruh pengenceran.

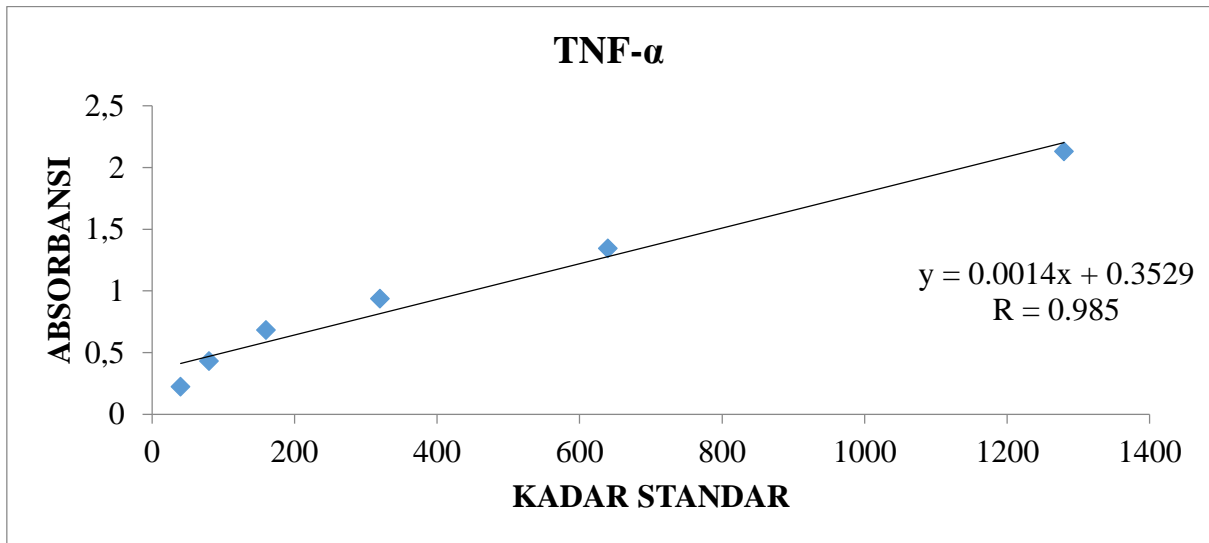
Penegakan Diagnosis AR

Tabel 3. Rata-rata indeks artritis hari ke-15 dan hari ke-30

Kelompok	Indeks Arthritis hari ke 15 (Median)	Indeks Arthritis hari ke 30 (Median)
Normal	0 \pm 0	0 \pm 0
Negatif	1,75	2,00
Positif	1,75	1,50
Suspensi GVT-0	1,75	1,50
SNEDDS GVT-0	1,50	0,75

Keterangan : Indeks \geq 1 menandakan telah AR

Penetapan Kadar Sitokin TNF- α



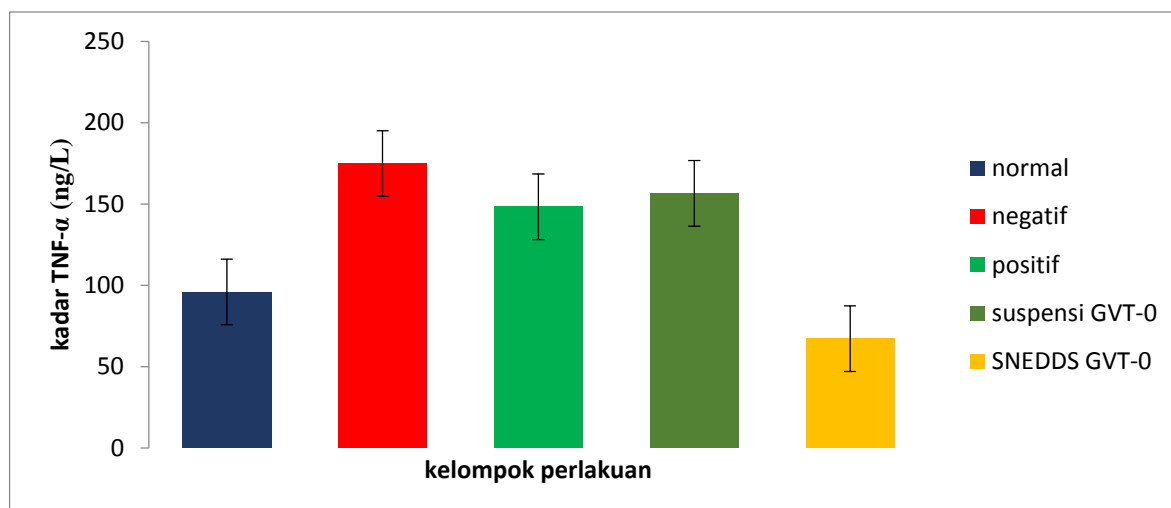
Gambar 4. Kurva baku standar TNF- α menggambarkan hubungan linier antara seri kadar TNF- α standar dengan absorbansi setelah pembacaan dengan *ELISA reader*

Hasil serapan diperoleh dari *ELISA* yang dilakukan terhadap seri kadar standar TNF- α (ng/ml) yaitu $y = 0.0014x + 0.3529$ dengan harga $r = 0.985$. nilai r_{hitung} bernilai positif berarti terdapat korelasi positif sebesar 98.5% antara serapan (x) dengan kadar standar TNF- α (y). Koefisien determinasi (kekuatan serapan (x) menjelaskann kadar standar TNF- α (y)) antara serapan (x) dengan kadar standar TNF- α (y) ditunjukkan dengan harga R^2 sebesar 97,02 %.

Tabel 5. Rata-rata kadar TNF- α \pm SE

Sampel	Kadar TNF- α (ng/L)
Normal	96,00 \pm 9,04 ^{c,d,e,f}
Kontrol negatif	174,86 \pm 7,88 ^{b,f}
Kontrol positif	148,43 \pm 14,07 ^{b,f}
Suspensi GVT-0	156,57 \pm 8,70 ^{b,f}
SNEDSS GVT-0	67,29 \pm 6,38 ^{c,d,e}

Keterangan : (a) berbeda signifikan dengan seluruh kelompok, (b) berbeda signifikan dengan kelompok kontrol normal, (c) berbeda signifikan dengan kelompok kontrol negatif, (d) berbeda signifikan dengan kelompok kontrol positif, (e) berbeda signifikan dengan suspensi GVT-0, (f) berbeda signifikan dengan SNEDDS GVT-0



Gambar 5. Histogram kadar TNF- α

GVT-0 dalam sediaan SNEDDS mampu menurunkan kadar TNF- α . Hasil pengukuran kadar TNF- α pada jaringan sendi tikus *Wistar* jantan terinduksi CFA dengan pemberian SNEDDS GVT-0 sebesar $67,29 \pm 6,38$ ng/L. Angka tersebut 2 kali lipat lebih baik dibanding suspensi GVT-0 yang menandakan terjadi perbedaan signifikan antara SNEDDS GVT-0 dan suspensi GVT-0 dalam menurunkan kadar TNF- α pada taraf kepercayaan 95%.

Ketersediaan hayati obat dalam sel target dipengaruhi juga oleh *Poli-glikoprotein*. *Poli-glikoprotein* (P-gp) (Kerwin, 2008). merupakan pompa *efflux* yang umumnya terdapat beberapa pada bagian tubuh, termasuk sel-sel usus halus yang bekerja mengeluarkan substrat dari dalam sel ke lingkungan *ekstraseluler*. Surfaktan nonionik seperti tween 20, tween 80, dan cremophor EL memiliki potensi penghambatan *efflux* P-gp. Peningkatan absorpsi, penghambatan pompa *efflux* tersebut dapat dipastikan menjadi alasan logis peningkatan anti artritis rematoid GVT-0 hasil formulasi. Dalam kasus ini, formulasi SNEDDS terbukti meningkatkan efektivitas GVT-0 sebagai obat anti artritis rematoid dengan parameter penurunan kadar TNF- α .

Uji Ketahanan SNEDDS

Uji ketahanan bertujuan untuk melihat kesamaan sifat nanoemulsi yang terbentuk melalui berbagai tingkat pengenceran. Uji ini dapat digunakan untuk memastikan kesamaan profil pelepasan obat dan memastikan bahwa obat tidak akan membentuk endapan pada pengenceran yang lebih tinggi secara *in vivo* yang secara signifikan dapat menghambat penyerapan obat (Date dan Nagarsengker, 2007).

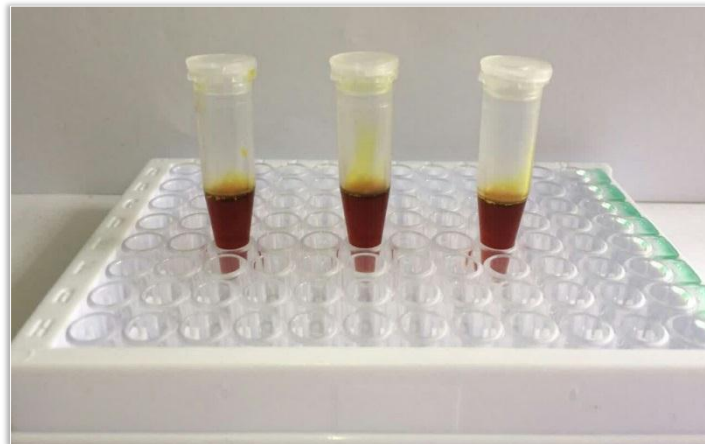
Uji % transmitan dilakukan untuk melihat kemampuan larutan sampel dalam meneruskan cahaya yang ditembakkan dari spektrofotometri UV sedangkan nilai % transmitan suatu formula menggambarkan kemampuan proses emulsifikasi dari suatu surfaktan (Anton dan

Vandamma, 2011). Semakin tinggi nilai % transmitan maka semakin baik kemampuan surfaktan yang digunakan dalam proses emulsifikasi. Berdasarkan **Tabel 6** nilai % transmitan SNEDDS gamavuton dapat dikatakan baik karena mendekati nilai 100%. Namun, nilai % transmitan tidak dapat menggambarkan ukuran partikel nanoemulsi yang terbentuk dalam proses emulsifikasi. Analisis lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan alat PSA untuk melihat ukuran partikel dan nilai PDI SNEDDS Gamavuton.

Tabel 6. Hasil Uji Ketahanan SNEDDS Gamavuton

Pengenceran	Ukuran partikel (nm) ^a ± SD	PDI ^a ± SD	Transmitan (%) ^a ± SD
25x	100,5±0,02	0,32±0,01	97,26±0,01
50x	100,56±0,01	0,36±0,01	96,18±0,06
100x	100,73±0,06	0,30±0,08	96,04±0,01
250x	101,4±2,33	0,43±0,04	96,37 %±0,01

^a Data dinyatakan sebagai rata-rata ± SD (n = 3)



Gambar 6. Hasil uji ketahanan SNEDDS GVT-0.

Nilai PDI menunjukkan keseragaman ukuran partikel yang terukur dari suatu emulsi. Distribusi ukuran partikel yang ideal berkisar antara 0,20-0,70. Nilai PDI yang lebih besar dari 0,40 menunjukkan distribusi ukuran partikel yang semakin luas, dengan kata lain, semakin rendah keseragaman partikel dari suatu emulsi (Mao, dkk, 2009). Suatu formula dikatakan stabil apabila ukuran partikel terukur ≤ 200 nm dan PDI 0,20-0,70 dengan ketahanan terhadap pengaruh pengenceran (Makadia, dkk, 2013; Mao, dkk, 2009). Salah satu faktor yang mempengaruhi ukuran partikel adalah proses homogenisasi. Panas yang ditimbulkan oleh gaya gesek dan tekanan tinggi selama proses homogenisasi dapat mempengaruhi ukuran partikel emulsi. Surfaktan ionik yang digunakan dalam emulsi tipe *oil in water* (o/w) memiliki sifat

geometri molekular yang rentan pada suhu tinggi. Bagian hidrofilik dari molekul surfaktan akan mengalami dehidrasi pada saat terjadi peningkatan suhu. Hal ini menyebabkan partikel emulsi rentatn mengalami koalesen sehingga dapat membuat pertikel emulsi semakin besar (Tan dan Nakajima, 2005; McClements, dkk, 2007).

Berdasarkan **Tabel 6** diperoleh hasil PDI dan ukuran partikel yang tergolong baik, yaitu diantara 0,20-0,70 untuk nilai PDI dan $\leq 200\text{nm}$ untuk ukuran partikel yang terukur. Sehingga dapat dikatakan SNEDDS Gamavuton memiliki kestabilan terhadap pengenceran yang dilakukan, yaitu pengenceran dengan tingkat 25, 50, 100, dan 250 kali.

KESIMPULAN

Aktivitas SNEDDS GVT-0 mampu menurunkan kadar IL-1 β sebesar $69,78 \pm 6,97$ ng/L, dan menurunkan kadar TNF- α sebesar $67,29 \pm 6,38$ ng/L pada jaringan sendi tikus *Wistar* jantan terinduksi *Complete Freund's Adjuvant* dan efek penurunan kadar TNF- α oleh SNEDDS GVT-0 berbeda signifikan dua kali lipat lebih baik dibandingkan dengan sediaan suspensi GVT-0 dengan taraf kepercayaan 95%.

SARAN

Pengembangan formulasi SNEDDS GVT-0 perlu dilanjutkan uji toksisitas seluler dikarenakan peningkatan kecepatan absorpsi akan berdampak langsung dengan meningkatnya kadar obat dalam darah. Meningkatnya kadar obat dalam darah maka dimungkinkan akan melewati kadar ambang toksik minimum (MTC) sehingga akan muncul efek samping yang tidak dikehendaki.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini didanai oleh skema Penelitian Disertasi Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. K., Lichtman, A.H., 2005, *Cellular and Molecular Immunology*, Elsevir Saunders, Philadelphia. 253-254.
- Aletaha D., Neogi, Silman J, Funovits, Felson T. 2010. Rheumatoid Arthritis Collaborative Initiative. *Arthritis Rheum*. Vol. 62: 2569 – 2581.
- Anton N., Vandamma T.F. 2011. Nano-emulsions and micro-emulsions: clarifications of the critical differences. *Pharmaceutical Research*. Vol. 28: 978-985.

- Bagiana, K. 2014. Pengembangan Nanogamavuton-0 dengan Formulasi SNEDDS Sebagai Kandidat Obat Analgetik dan Antiinflamasi [Tesis]. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Date A.A., Nagarsenker M.S. 2007. Design and evaluation of self-nanoemulsifying drug delivery systems (SNEDDs) for cefpodoxime proxetil. *International Journal of Pharmaceutics*. Vol. 329(1): 166–172.
- Chabib, L., Ikawati, Z., Martien, R., 2016, Review Rheumatoid Arthritis: Terapi Farmakologi, Potensi Kurkumin dan Analognya, serta pengembangan Sistem Nanopartikel, *Jurnal Pharmascience* Vol 3.No 1.
- Kerwin, B.A., 2008. *Polysorbates 20 and 80 used in the formulation of protein biotherapeutics: structure and degradation pathways*. *J.Pharm. Sci.*, **97(8)**, 2924-2935.
- Makadia, H., Bhatt, A., Parmar, R., Paun, J. Tank, H. 2013. Self-nano Emulsifying Drug Delivery System (SNEDDs): Future Aspect, *Asian J. Pharm. Res.* Vol. 3(1): 21-27.
- Mao, L., Duoxia, X., Jia, Y., Fang, Y., Yanxiang, G., Jian, Z. 2009. Effects of small and large molecule emulsifiers on the characteristics of β -carotene nanoemulsions prepared by high pressure homogenization. *Food Technology Biotechnology*. Vol. 47(3): 336-342.
- McClements, D.J., Decker, E.A., Weiss, J. 2007. Emulsion-based delivery systems for lypophilic bioactive components. *Journal of Food Science*. Vol. 72(8):109-124.
- Nugroho, A. E., Yuniarti, N., Istyastono, E. P., Supardjan, Hakim, L. 2007. Penghambatan Reaksi Anafilaksis Kutaneus Aktif Oleh Kalium Gamavuton-0 (K-Gvt-0). *Majalah Farmasi Indonesia*. Vol. 18(2): 63-70.
- Patel, J., Kevin, G., Patel, A., Raval, M., Sheth, N. 2011. Design and Development of a Self-Nanoemusifying Drug Delivery System for Telmisartan for Oral Drug Delivery. *Int J Pharm Investig*. Vol. 1(2): 112-118.
- Sardjiman. 2000. Syntesis of Some New Series of Curcumin Analogues, Antioksidative, Antiinflamatory, Antibacterial Activity Relationship, [Dissertasion]. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Sawant, Krutika, K., Gupta, S., Chavhan, S. 2011. Self-nanoemulsifying drug delivery system for adenovir dipivoxil: Design, characterization, in vitro and ex vivo evaluation. *Colloids Surf.A Physicochem*. Vol.392: 145-155
- Tan, C.P., Nakajima, M. 2005. β -carotene nanodispersions: preparation, characterization, and stability evaluation. *Food Chemistry*. Vol. 92: 661-671.

IDENTIFIKASI RANCANGAN MESIN PENCACAH GUNA OPTIMASI FERMENTASI PUPUK ORGANIK DARI SAMPAH DOMESTIK

M Sri Prasetyo Budi^{1*}, Y Agus Jayatun²

¹Jurusan Teknik Pertambangan STTNAS Yogyakarta

²Jurusan Teknik Industri IST AKPRIND Yogyakarta

*prasetyobudims88@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan sampah domestik merupakan salah satu masalah utama. Bersih Menjadi Sehat (BMS) adalah salah satu unit pengolah sampah menjadi pupuk organik. Langkah yang diperlukan untuk mengolah sampah domestik menjadi pupuk organik dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu pencacahan, pemeraman atau fermentasi, dan pengayakan. Bahan baku yang terdiri dari sampah, dedaunan kering, dan bahan lain yang akan diolah menjadi pupuk, dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga mudah untuk difermentasi. BMS telah memiliki mesin pencacah, tetapi produk cacahan yang dihasilkan oleh mesin belum optimal. Bahan sampah dengan ukuran kurang dari 21x30 cm tidak terpotong. Hal ini berarti sekitar 80% sampah yang masuk tidak tercacah. Kendala inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian mengenai identifikasi mesin pencacah dengan hasil berupa cacahan berukuran kecil yang dapat mempengaruhi waktu fermentasi sampah menjadi pupuk. Semakin kecil ukuran cacahan semakin sedikit pula waktu fermentasi.

Penelitian diawali dengan melihat kondisi mesin pencacah yang sudah ada. Berdasarkan pengamatan, ada dua hal penyebab masih lolosnya sampah berukuran besar dari mesin pencacah. Faktor yang pertama adalah jarak antara mata pisau masih terlalu jauh. Jarak antara mata pisau sekitar 20 cm. Hal ini menyebabkan sampah besar tidak ikut tercacah. Faktor yang kedua adalah gerakan pisau yang mencacah dalam satu arah vertikal. Hal ini menyebabkan sampah yang masih berukuran besar dan lolos dari cacahan akan langsung keluar dari mesin pencacah tanpa mengalami pencacahan. Kendala ini dapat diatasi dengan memasang pisau pencacah yang bergerak secara vertikal dan horisontal. Hasil penelitian yang berupa rancangan mesin pencacah diharapkan dapat memberikan solusi kepada pengelola sampah BMS untuk memperbaiki mesin pencacah yang sudah ada sehingga dapat memberikan hasil cacahan dengan ukuran optimal yang dapat memperpendek waktu fermentasi

Kata kunci : sampah, mesin pencacah, analisis kimiawi

ABSTRACT

Increased domestic waste is one of the main problems. Clean Be Healthy (BMS) is a unit of processing waste into organic fertilizer. Steps needed to process domestic waste into organic fertilizer is divided into three stages, namely the enumeration, curing or fermentation, and sieving. The raw material consists of litter, dry leaves, and other materials that will be processed into fertilizer, chopped into smaller sizes so it's easy to ferment. BMS has had thrasher, but the chopped product produced by the engine is not optimal. Waste materials with a size less than 21x30 cm not cut off. This means that about 80% of incoming waste is not tercacah. Obstacles that is the background of researchers to conduct research on the identification of a thrasher results in a chopped small to affect the fermentation of waste into fertilizer. The smaller the size of the shredded the fewer the fermentation time.

The study begins by examining existing thrasher. Based on the observations, there are still two things causing the escape of large garbage from thrasher. The first factor is the distance between the blade was still too far away. The distance between the blade about 20 cm. This leads to large rubbish not participate tercacah. The second factor is the movement of the chopping blade in a vertical direction. This causes the waste that is still large and escaped from the count will go right out of the chopper without enumeration. This obstacle can be overcome by installing a chopper blades that move vertically and horizontally. The results of research in the form of draft thrasher is

expected to provide solutions to waste management BMS to improve existing chopper machine that can deliver results chopped with optimal size to shorten the fermentation time

Keywords : waste, slicer, chemical analysis

PENDAHULUAN

Sampah adalah semua jenis buangan yang bersifat padat atau semi padat yang dibuang karena tidak dipergunakan atau tidak diinginkan. Sampah juga didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak dapat digunakan, dibuang, yang berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia; sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak disenangi atau dibuang, sisa aktifitas kelangsungan hidup manusia.

Sampah didefinisikan sebagai bahan sisa dari aktifitas industri maupun perorangan yang tidak mempunyai nilai. Saat ini ada peningkatan dalam produksi sampah, pengelolaannya, dan pembuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa produksi sampah merupakan efek samping dari konsumsi dan produksi yang cenderung mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Lebih jauh ada peningkatan kesadaran terhadap masalah lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan sosial yang berkaitan dengan pembuangan sampah. Perlu diberikan perhatian khusus untuk mengolah dan mengelola sampah padat dikarenakan keberadaannya yang melimpah dan berdampak buruk pada lingkungan. Di Malaysia rata-rata jumlah sampah domestik yang dihasilkan sekitar 0,5 kg/orang/hari dan dapat meningkat menjadi 1,7 kg/orang/hari di lingkungan perkotaan. Peningkatan yang signifikan ini menjadi masalah yang serius karena kurangnya lahan untuk penimbunan sampah sehingga perlu dilakukan suatu sistem pengelolaan sampah (Municipal Solid Waste Management). Keberadaan sampah ini juga berdampak buruk pada sumber air, tanah, dan udara dikarenakan munculnya lindi dan bau dari sampah. (Santibanez-Aguilar, dkk., 2013).

Keberlanjutan lingkungan adalah salah satu sasaran penting dari setiap negara, karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan hak-hak manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di negara berkembang, pengolahan sampah yang tidak sesuai akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius (al-Khatib, dkk., 2015). Produksi sampah merupakan salah satu masalah yang penting dalam masyarakat modern. Sejumlah besar sampah dihasilkan oleh masyarakat modern, dan pembuangannya menjadi salah satu masalah lingkungan yang serius. Sebagai contoh India, menghasilkan sekitar 700 juta ton sampah organik setiap tahun. Tahun 2007, di Cina dihasilkan sekitar 180 juta ton sampah dan terus meningkat dengan kecepatan 8-10% per tahun. Sampah dapat menyebabkan pencemaran yang serius pada lingkungan perkotaan, mengancam kehidupan masyarakat, lingkungan hidup, dan keberlanjutan

perkembangan masyarakat. Sejumlah besar sampah dihasilkan oleh masyarakat modern, dan pembuangannya menjadi salah satu masalah lingkungan yang serius (Awasthi, dkk., 2014). Saat ini produksi sampah mencapai 150 juta ton per tahun dengan kecepatan kenaikan produksi sampah mencapai 8-10% per tahun (Zhang, dkk., 2013).

Pertumbuhan wilayah perkotaan yang cepat dengan migrasi populasi yang masiv dari pedesaan ke pusat kota menyebabkan kenaikan produksi sampah. Kecepatan kenaikan produksi sampah, lokasi penimbunan sampah yang terbatas, dan ketatnya peraturan lingkungan untuk pembukaan lokasi baru penimbunan sampah serta incinerator telah meningkatkan biaya pembuangan sampah khususnya di negara berkembang. Karena itu masyarakat dan pemerintah berada dalam tekanan berat untuk menemukan metode pengolahan sampah yang berkelanjutan (Xiao, dkk., 2009). Kolaborasi masyarakat merupakan bagian dari pemahaman mereka terhadap perencanaan pengolahan sampah terpadu (Al-Khatib, dkk., 2015).

Permasalahan pengelolaan sampah ini telah menjadi perhatian pemerintah dengan menerbitkan undang-undang nomer 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah. Pertumbuhan wilayah perkotaan yang cepat dengan migrasi populasi yang masiv dari pedesaan ke pusat kota menyebabkan kenaikan produksi sampah. Kecepatan kenaikan produksi sampah, lokasi penimbunan sampah yang terbatas, dan ketatnya peraturan lingkungan untuk pembukaan lokasi baru penimbunan sampah serta incinerator telah meningkatkan biaya pembuangan sampah khususnya di negara berkembang. Karena itu masyarakat dan pemerintah berada dalam tekanan berat untuk menemukan metode pengolahan sampah yang berkelanjutan.

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk pengolahan sampah adalah landfill atau penimbunan. Sekitar 65% sampah yang diproduksi dikelola dengan metode penimbunan. Penimbunan membutuhkan sejumlah besar lokasi untuk penimbunan, selain itu juga dapat menimbulkan permasalahan pencemaran sekunder seperti lindi dari timbunan sampah, GHG, dan bau.

Komposting, salah satu metode pengolahan sampah secara biologis banyak digunakan karena lebih ramah lingkungan. Komposting menggunakan mikroba untuk pengolahannya. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam komposting sampah. Kendala pertama adalah belum terpilahnya sampah dari sumbernya. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilahan sampah dari sumbernya. Pertama pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi komposting. Mahalnya transportasi dan ketidakjelasan harga sampah khususnya yang sudah terpilah seperti sampah kertas, plastik, dan sampah organik menjadi satu permasalahan dalam pembiayaan pengolahan sampah. Permasalahan kedua adalah efisiensi administratif, yaitu personal yang menangani administrasi pengolahan sampah biasanya melakukan pekerjaan

pengolahan sampah secara sosial. Artinya, pekerjaan pengolahan belum dapat digunakan sebagai suatu pekerjaan profesional yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan, sehingga pekerjaan pengolahan sampah kadang terbengkalai. Kendala yang kedua adalah ukuran sampah yang akan diproses menjadi kompos mempunyai ukuran yang berbeda. Hal ini menyebabkan starter kompos yang ditambahkan menjadi tidak efektif, proses fermentasi menjadi lebih lama, dan kesulitan dalam pengadukan. Kendala ini dapat diatasi dengan cara mencacah sampah sebelum dikomposting menjadi ukuran yang lebih kecil.

Beberapa metode yang telah dikembangkan untuk mengolah sampah antara lain pirolisis, biogas, dan komposting. Menurut Chen, dkk., (2015), dalam proses pirolisis, energi dapat diperoleh dengan cara yang lebih bersih dari pada pembakaran sampah secara konvensional karena jumlah nitrogen oksida (NO_x) dan sulfur oksida (SO₂) yang dihasilkan dari proses pirolisis jauh lebih rendah dari pembakaran sampah konvensional. Untuk mengurangi emisi gas ini, kualitas sampah padat yang dipirolisis harus mempunyai kualitas yang baik dengan melakukan pengolahan pendahuluan terhadap sampah sebelum dipirolisis. Dari proses pirolisis ini akan dihasilkan residu yang baik pula. Cabeza, dkk., (2013), menjelaskan bahwa pengolahan secara biologi pada sampah merupakan cara yang paling dapat diterima oleh lingkungan. Pengolahan secara biologi dapat berupa pengolahan menjadi biogas dengan cara anaerob maupun komposting sampah secara aerob.

Salah satu faktor penting dalam pengolahan sampah adalah belum terpisahnya sampah dari sumbernya. Pemilahan sampah menimbulkan penambahan biaya untuk proses pemilahannya. Sangat umum bagi masyarakat membuang sampah dalam kondisi bercampur antara satu material dengan material lainnya. Beberapa material yang umum berada dalam sampah antara lain plastik. Plastik mempunyai dampak yang sangat besar pada lingkungan karena merupakan senyawa yang non-dgradable (tidak dapat hancur), dan menempati ruang yang sangat besar. Selain plastik, material yang sering terdapat pada sampah adalah kertas. Kertas menempati 30-40% total volume sampah padat. Logam juga merupakan salah satu material yang banyak terdapat pada sampah dan merupakan bahan sampah yang dapat didaur ulang. Gelas/kaca adalah material lain penyusun sampah yang dapat didaur ulang. Proses daur ulang kaca harus dipisahkan dari material sampah lainnya. Keuntungan dari daur ulang gelas/kaca adalah mengurangi penggunaan konsumsi energi jika dibandingkan menggunakan silika sebagai bahan baku makanan dan sayur/buah yang ada dalam komposisi sampah sekitar 27-40% (Santibañez-Aguilar, dkk., 2013). Komposisi penyusun sampah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Komposisi sampah padat di beberapa negara

Type of waste	USA ^a 2010	Mexico ^b 2009	France ^b 2009	Colombia ^b 2009	American ^c Samoa 2009	China ^c 1993
Paper and cardboard	28.5	14.2	35	22	26.4	3.1
Plastic	12.4	5.8	7	5	12.8	4.9
Metals	9	3.1	5	1	7.9	0.7
Textiles	5.3	1.2	5	4	4.2	2.1
Glass	4.6	6.6	12	2	3.4	2.2
Food wastes	13.9	31.6	21	56	3.78	46.9
Yard trimmings	13.4	9.8	-	10	11.30	-
Others	12.9	27.7	15	-	30.22	40.1

Sumber: Santibañez-Aguilar, dkk., 2013

Aktivitas pengolahan sampah seperti kegiatan seperti pengumpulan sementara, penyimpanan, transportasi, pengolahan, pengolahan dan pembuangan hampir tidak dilakukan di perkotaan karena kurangnya organisasi, sumber daya keuangan, kompleksitas dan Sistem multi-dimensi. Perlu menjadi perhatian bahwa pemusnahan sampah yang tidak terkendali dapat menimbulkan banyak perubahan lingkungan (hujan, matahari, angin), yang berkontribusi dalam menciptakan kondisi tidak sehat. Lindi limbah dan penyebaran bau, yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat dan menimbulkan pencemaran lingkungan bahaya kesehatan termasuk cedera; 58% dari anak-anak yang diwawancarai telah terluka dari

Sejumlah besar sampah domestik dihasilkan oleh masyarakat modern dan pembuangannya dapat menyebabkan masalah yang serius. Komposting merupakan salah satu pemecahan dalam pengolahan sampah domestik. Komposting digunakan secara luas dalam pengolahan sampah domestik. Untuk komposting skala kecil, metode windrow dapat digunakan untuk mengolah sampah menjadi kompos. Waktu yang dibutuhkan sekitar 3-4 bulan, tetapi kualitas dan kematangan kompos tidak pasti. Selama komposting, terjadi dekomposisi senyawa organik. Dekomposisi dan bioksidasi senyawa organik semakin cepat dengan peningkatan suhu. Bioksidasi senyawa organik diawali pada suhu 40oC. Kenaikan suhu mempercepat destruksi mikroba patogen dan benih gulma. Komposting dengan cara natural membutuhkan waktu yang sangat lama sementara volume sampah meningkat dengan cepat dan lahan menjadi lebih sempit (Awasthi, dkk., 2014).

Komposting merupakan proses biologi yang paling sukses untuk mengolah sampah yang penuh dengan bahan yang membusuk. Di Eropa, total sampah domestik yang diproduksi mencapai 239,5 juta ton meningkat hingga 260,7 juta ton dalam jangka waktu 10 tahun yang setara dengan 524 kg per tahun per kapita di tahun 2008. Di Spanyol, 26,3 juta ton sampah telah dikumpulkan selama tahun 2008. Hal ini setara dengan 465 kg per orang per tahun. Langkah terbaik untuk mengurangi dampak sampah domestik adalah dengan cara meminimasi sampah dari sumbernya. Meskipun semua upaya telah dilakukan, tetapi tidak mungkin mencapai

kondisi ini secara sempurna. Karena itu diperlukan alternatif pengolahan sampah, khususnya mengolah sampah busuk setelah dihilangkan atau dipisahkan dari sampah yang dapat didaur ulang. Pengolahan secara biologis merupakan langkah yang paling bisa diterima oleh lingkungan (aerobic composting atau anaerobic digestion). Beberapa studi yang pernah dilakukan dapat dikonfirmasi bahwa kedua cara tersebut dapat memaksimalkan daur ulang dan perolehan kembali komponen sampah. Beberapa studi membuktikan bahwa sumber pemisahan sampah yang diikuti dengan daur ulang (kertas, logam, tekstil, dan plastik) dan komposting atau anaerobic digestion (untuk sampah yang mudah busuk) dapat menghasilkan gas rumah kaca yang paling rendah, dibandingkan pembakaran sampah. Komposting harus mempertimbangkan metode pengelolaan sampah dan proses produksi pada waktu yang bersamaan. Komposting dapat meningkatkan pendapatan dari proses awal (biaya pembuangan/pengumpulan sampah) hingga akhir proses (produk yang dapat dijual). Ada juga hasil penting lain berkaitan dengan penggunaan kompos. Kompos mempunyai nilai nutrisi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk menutrisi tanah dengan memberikan nutrisi senyawa organik dan menekan penyakit pada tanaman. Kegunaan lain dari kompos adalah sebagai media filtrasi dalam sistem biofiltrasi untuk mengolah senyawa volatil yang menyebabkan sumber bau di industri. Alternatif ini sangat signifikan karena produk akhir dapat digunakan sebagai bagian dari proses itu sendiri. Perlu juga dicatat bahwa selama tahun 2009, komposting mewakili 18% pengolahan sampah di Eropa. Di Spanyol, pada tahun yang sama, sekitar 24% sampah domestik diolah dengan cara komposting dan prosesnya akan terus meningkat selama beberapa tahun terakhir (Cabeza, dkk., 2013).

Komposting dapat dilakukan pada sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya, yaitu kertas, logam, plastik, dan kaca. Persyaratan inilah yang menjadi tantangan dalam proses komposting sampah. Faktor yang penting dalam proses penyediaan sampah yang sudah terpilah ini antara lain transportasi, yaitu jarak (kilometer) dan waktu yang harus ditempuh oleh alat transportasi sampah. Faktor lainnya adalah efisiensi administrasi, yang disebabkan karena multi tugas yang dikerjakan oleh petugas pengolah sampah serta kurangnya kerja sama dan pendanaan. Hal ini disebabkan profesi pengolah sampah belum dapat dijadikan sebagai profesi utama. Umumnya penyedia pengumpul sampah dilakukan oleh perorangan dan sampah yang sudah terkumpul langsung dibuang ke TPA. Biaya yang ditentukan oleh jasa penyedia sampah biasanya bervariasi, dan masyarakat mempunyai kontrol yang lemah terhadap penyedia jasa pengumpul sampah ini (Poldnirk, 2015).

Di Mayungan, dusun Salakan, Potorono Banguntapan Bantul, telah dirintis unit pengolahan sampah yang diberi nama Bersih Menjadi Sehat (BMS). Kegiatan pengolahan

sampah yang ada di BMS antara lain bank sampah, pengomposan sampah organik, dan kebun pembibitan tanaman sayur dan buah. Sampah yang diolah di BMS bersumber dari sampah domestik. Sebagian sampah sudah terpilah dari sumbernya, sebagian lagi belum terpilah. Di unit komposting, dapat diproses sekitar 80 kg kompos setiap harinya. Kendala yang dihadapi oleh BMS antara lain: belum efektifnya mesin pencacah yang dimiliki saat ini, dikarenakan mesin pencacah tidak dapat diatur ukuran cacahannya. Hal ini menyebabkan pekerjaan pencacahan menjadi kurang efisien.

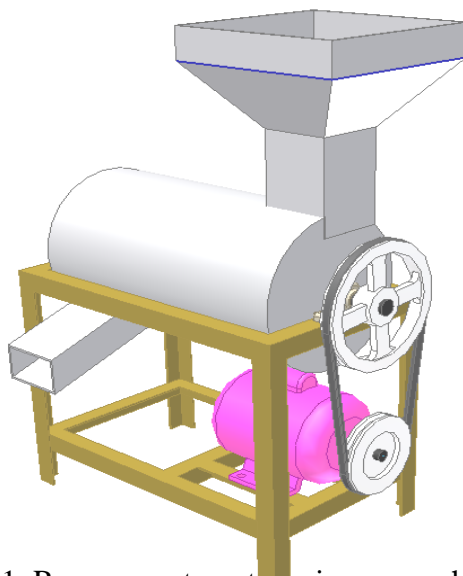
METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan adalah sampah organik. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin pencacah yang sudah ada di BMS. Selanjutnya mesin pencacah ini yang dianalisis unjuk kerjanya.

Penelitian ini diawali dengan melihat kondisi mesin pencacah yang sudah ada. Berdasarkan pengamatan, ada dua hal penyebab masih lolosnya sampah berukuran besar dari mesin pencacah. Faktor yang pertama adalah jarak antara mata pisau masih terlalu jauh. Jarak antara mata pisau sekitar 20 cm. Hal ini menyebabkan sampah besar tidak ikut tercacah. Faktor yang kedua adalah gerakan pisau yang mencacah dalam satu arah vertikal. Hal ini menyebabkan sampah yang masih berukuran besar dan lolos dari cacahan akan langsung keluar dari mesin pencacah tanpa mengalami pencacahan. Kendala ini dapat diatasi dengan memasang pisau pencacah yang bergerak secara vertikal dan horisontal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang berupa rancangan mesin pencacah disajikan dalam gambar 1



Gambar 1. Rancangan target mesin pencacah sampah organik

Mesin Pencacah sampah organik dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Ukuran mesin, tinggi 130 cm lebar 80 cm x 60 cm
2. Kapasitas mesin, pancacahan sampah 50 kg/jam
3. Mekanisme kerja mesin sistem rotari putaran mesin 480 rpm
4. Motor penggerak utama motor listrik 1 phase, ½ hp, 1400 rpm
5. Reduksi putaran 1: 3
6. Transmisi puli dan V belt/sabuk
7. Diameter poros 1”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Mesin pencacah lama hanya memberikan efek pencacahan secara vertikal sehingga ukuran hasil cacahan masih sama dengan ukuran bahan baku
2. Kendala dapat diatasi dengan merancang mesin pencacah dengan efek pencacahan secara vertikal dan horisontal
3. Diharapkan hasil rancangan dapat dilanjutkan dengan membuat mesin pencacah sebagaimana hasil rancangan

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan penelitian melalui program hibah bersaing (penelitian terapan), Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Pengurus Bersih Menjadi Sehat (BMS), Potorono, Salakan, Mayungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, I.A., Kontogianni, S., Nabaa, H.A., Alshami, N., Al-Sari, M.I., 2015, **Public perception of hazardousness caused by current trends of municipal solid waste management**, Waste Management 36, pp.323–330
- Awasthi, M K., Pandey, A.K., Khan, J., Bundela, P.S., Wong, J.W.C., Selvam, A., 2014, **Evaluation of thermophilic fungal consortium for organic municipal solid waste composting**, Bioresour. Technol., <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2014.01.048>)

- Burnley, S., Coleman, T., Peirce, A., 2015, **Factors influencing the life cycle burdens of the recovery of energy from residual municipal waste**, <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2015.02.022>
- Cabeza, I.O., López, R., Ruiz-Montoya M., Díaz, M.J., “**Maximising municipal solid waste e Legume trimming residue mixture degradation in composting by control parameters optimization**”, *Journal of Environmental Management* 128, pp.266-273
- Chen, D., Yin, L., Wang, H., He, P., 2015, **Reprint: Pyrolysis technologies for municipal solid waste: A review**, <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2015.01.022>
- Pemerintah RI, 2008, **Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**, hlm.3
- Poldnirk, J., 2015, **Optimisation of the economic, environmental and administrative efficiency of the municipal waste management model in rural areas**, *Resource, Conservation, and Recycling Journal*, 97, pp.55-65
- Santibanez-Aguilar, J.E., Ponce-Ortega, J.M., Gonzales-Campos, J.B., Serna-Gonzales, M., El-Halwagi, M.M., 2013, “**Optimal Planning for The Sustainable Utilization of Municipal Solid Waste**”, *Waste Management* 33, pp.2607-2622

MENUMBUHKAN KARAKTER RELIGIUSITAS DALAM BERWIRAUSAHA

M. Shofiyuddin

Universitas Pekalongan

Email: m.shofiyuddien@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan didalam menjalankan suatu usaha bukan hanya diukur dari berapa banyak keuntungan yang diperoleh, namun juga dari keberkahan akan hasil dari usaha itu sendiri. Keberkahan dalam usaha akan tercapai jika dalam menjalankan usaha tersebut memperhatikan hal – hal yang dapat menimbulkan keberkahan itu sendiri. Rizki yang halal dan barokah akan didapat melalui jalan yang baik jalan tidak melanggar syariat-syariat. Seorang wirausaha yang menginginkan kesuksesan dan keberkahan dalam usahanya selain giat didalam usaha juga senantiasa berpegang pada aspek religiusitas yang selalu menjadi pedoman didalam usahanya agar bisa mendapatkan rezeki yang halal, mendapat barokah dari Allah Swt, sehingga bisa mencukupi kebutuhan, dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Aspek religiusitas tersebut antara lain : kejujuran, disiplin dalam bekerja, mempererat tali silaturahmi dan memperluas pergaulan, dukungan dari keluarga, giat bekerja dan bersedekah disamping itu juga menepati janji dan kesepakatan, menjaga amanah dan janji, adil dan moderat dalam berhubungan dengan sesama, memiliki pandangan masa depan yang tajam untuk mengatur dan menyimpan sesuatu guna menghadapi masa-masa sulit, serta selalu ingat Allah dengan membayar zakat dan menunaikan shalat.

Kata kunci :Religiusitas, Wirausaha

ABSTRACT

The success in running a business is not only measured by how many benefits, but also from the blessing of the result from the business itself. Blessing in the business will be achieved if the entrepreneur pays attention more to the things that may cause the blessing itself in running their business. Kosher windfall and blessing will be obtained through a good way which does not violate the Shari'as. An entrepreneur who wants to get success and also wants to get blessing in his effort, other than must be active in running the business, has consistently hold to the aspects of religiosity that always been a guide in the business in order to obtain kosher sustenance, got a blessing from Allah, so that it can fulfil the need, and beneficial to the world and the hereafter. The religiosity aspect are included of: being honesty, having discipline in work, tightening the keeping in touch each others and expanding relationships, having support from the family, working harder and giving alms, and also keeping their promises and agreements, maintaining trust and promise, being just and moderate in relating other people, having views on his future to organize and to store something in the face of difficult times, and always remembering Allah by paying alms and prayed.

Keywords: Religiosity, Entrepreneurship

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis yang semakin pesat sekarang ini diikuti dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, berbagai macam bisnis tumbuh dengan banyaknya, hal ini tentu menunjukkan iklim bisnis yang semakin berkembang baik itu dari bisnis makanan, perbankan, perhotelan dan lain sebagainya. Semakin ketatnya persaingan dalam bisnis ini kadangaksa orang melakukan berbagai macam cara dalam upaya memenangkan persaingan dan tentunya

untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya. Berbagai ide kreatifpun muncul sebagai upaya untuk memenangkan persaingan ini.

Pengelolaan usaha yang professional menjadi kunci bagi sebuah keberhasilan, hal ini tentunya bukan suatu masalah selama bisnis ini dijalankan dengan benar, namun jika bisnis ini semata- mata hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan yang besar, kadang membuat orang lupa dan menghalalkan segala cara, tidak peduli apakah baik ataupun buruk bahkan kadang menipu atau memaksa dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat terjadi karena perilaku dalam menjalankan usaha atau bisnis hanya didasari bagaimana mengejar keuntungan tanpa dilandasi dengan nilai – nilai religius yang dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha.

Menjalankan usaha dengan lancar dan dapat berkembang tentunya menjadi keinginan setiap wirausahawan, keberhasilan dalam berwirausaha dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar lagi berkah menjadi tujuan utama. Usaha yang berkah tidak akan tercapai hanya atas dasar bersungguh – sungguh dalam berusaha, banyak aspek yang mempengaruhi diantaranya adalah bagaimana cara menjalankan bisnis atau usaha dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat juga menyangkut tentang kehalalan usaha itu sendiri.

Pendapatan dari usaha yang besar saja tidaklah cukup keberkahan pun menjadi sangat penting bahkan bukan hanya sekedar besar kecilnya pendapatan saja akan tetapi keberkahan dalam pendapatan itu sendiri menjadi tujuan yang diinginkan. Banyak orang dengan penghasilan yang tidak begitu besar namun dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari dengan baik, bahkan dapat menyekolahkan anak – anaknya sampai pada pendidikan tinggi dan sebagainya sehingga bisa dikatakan keberkahan dapat dilihat dari sisi kualitas rizki itu sendiri bukan kuantitas. Sedangkan rizki yang tidak berkah walaupun melimpah namun tidak dapat menikmatinya, mungkin karena anak- anaknya yang sering sakit – sakitan sehingga membutuhkan biaya yang besar, mungkin juga tuntutan kebutuhan lainnya yang tiada habis – habisnya. Maka jika kita memilih tentunya kita akan memilih rizki yang besar lagi berkah.

DEFINISI WIRAUSAHA

Wirausaha adalah orang – orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan – kesempatan bisnis, mengumpulkan sumberdaya – sumberdaya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari padanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan (Geoffrey G. Meredit at. Al dalam Panji Anoraga, Djoko Sudantoko, 2002).

Wirausaha merupakan seseorang yang mengambil resiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis dan menerima imbalan / balas jasa berupa profit

finansial dan maupun non finansial. (Skinner dalam Panji Anoraga, Djoko Sudantoko, 2002). Sedangkan kewirausahaan dikenal sebagai suatu proses penciptaan nilai dengan menggunakan berbagai sumber daya tertentu untuk mengeksploitasi peluang. Proses ini dibagi dalam beberapa tahapan khusus antara lain:

1. Mengidentifikasi peluang yang ada
2. Mengembangkan konsep bisnis yang baru
3. Mengevaluasi dan mengumpulkan sumber yang dibutuhkan
4. Menerapkan konsep
5. Memanfaatkan dan memperoleh hasil dari bisnis yang dijalankan

Sebelum memulai usaha seorang wirausaha harus mampu mengenal dengan baik dirinya sendiri, mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, hal ini sangat penting untuk memahami keminatan atau potensi yang ada pada dirinya, termasuk kesiapan dirinya ketika mengalami kegagalan dalam berwirausaha, karena bukannya tidak mungkin usaha yang dijalankan akan mengalami kegagalan. Kemampuan untuk belajar dari kegagalan dan tidak mudah menyerah karena banyak pengusaha yang berhasil setelah mengalami banyak kegagalan.

Jiwa dan semangat yang perlu dimiliki seorang wirausaha menurut Panji Anoraga, Djoko Sudantoko antar lain :

1. Kemampuan mengambil resiko dan pengambilan keputusan
2. Memiliki ide atau gagasan yang cemerlang, memiliki sifat optimis dalam berusaha untuk memikirkan, mengembangkan gagasan baru, unik, dan diminati banyak orang, sehingga terus menerus memikirkan dan menciptakan gagasan untuk dilaksanakan.
3. Tekun, teliti dan produktif
4. Berkarya dengan semangat kebersamaan dan etika bisnis yang sehat.
5. Memiliki motivasi untuk berkarya secara mandiri dalam arti tidak selalu bergantung pada orang lain.

MAKNA RELIGIUSITAS

Kita sering mendengar istilah religiusitas namun apakah sebetulnya yang dimaksud religiusitas tersebut, istilah Religiusitas itu sendiri asalnya adalah dari Bahasa Inggris yang memiliki kata dasar *Religion* artinya agama, *Religijs* sendiri memiliki makna keagamaan.

Religiusitas adalah sikap hidup seseorang berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya (Hakim,2004: 4), dalam bukunya Metodologi Studi Islam dijelaskan Religiusitas adalah merupakan ekspresi religius yang ditunjukkan, sedangkan menurut Bustanudin agus ekspresi religious ditemukan dalam budaya material, perilaku manusia, nilai moral, hukum dan sebagainya. Dalam perspektif Islam, religiusitas adalah perbuatan melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun dalam rangka beribadah kepada Allah (Ancok dan Suroso, 2001: 72-79).

DIMENSI RELIGIUSITAS

Ditinjau dari segi konteks religiusitas dalam agama Islam menurut Glock & Stark dalam Ancok dan Suroso (2001: 77), terdapat lima dimensi religiusitas, antara lain:

1. Keyakinan
Berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut.
2. Praktek agama
Meliputi perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen pada agama yang dianut.
3. Penghayatan
Berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu.
4. Pengetahuan agama
Mengacu kepada harapan bahwa orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi.
5. Pengalaman
Mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari kehari.

Religiusitas seseorang sngat dipengaruhi beberapa hal antara lain : pendidikan dalam keluarga, pengalaman dalam kehidupan, serta latihan yang diperoleh sejak masa kanak – kanak. Apabila sejak kecil anak dibekali dengan pendidikan agaman dan pengalaman keagamaan oleh orang tua, juga lingkungan dan teman – teman bergaulnya yang sangat taat beragama maka perilakunya akan sangat berbeda dengan anak – anak yang tidak memiliki pendidikan dan pengalaman keagamaan. Maka hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perilakunya pada masa dewasa dia akan menjadi pribadi yang menganggap agama tidak penting dalam kehidupannya.

Orang yang mendapatkan pendidikan agama baik di rumah maupun di sekolah dan masyarakat, maka orang tersebut mempunyai kecenderungan hidup dalam aturan-aturan agama, terbiasa menjalankan ibadah, dan takut melanggar larangan-larangan agama (Syahridlo, 2004).

KARAKTERISTIK PERILAKU RELIGIUSITAS

Berkaitan dengan membentuk perilaku Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa; Seharusnya setiap pendidik sadar bahwa pembinaan pribadi anak sangat memerlukan pembiasaan-pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok dan sesuai dengan perkembangan jiwanya. Karena pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk perilaku tertentu pada anak yang lambat laun perilaku itu akan bertambah jelas dan kuat, karena telah masuk menjadi bagian pribadinya (Parti, 2012: 18).

Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama mengungkapkan bahwa seseorang dikatakan memiliki perilaku religiusitas jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Jalaluddin, 2005: 107), yaitu:

- 1) Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan.
- 2) Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam perilaku dan tingkah laku.
- 3) Berperilaku positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan mendalami pemahaman keagamaan.
- 4) Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan tanggung jawab diri hingga sikap religiusitas merupakan realisasi dari sikap hidup.
- 5) Bersikap lebih terbuka dan wawasan lebih luas.
- 6) Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani.
- 7) Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.
- 8) Terlihat adanya hubungan antara sikap religiusitas dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial sudah berkembang.

MENERAPKAN RELIGIUSITAS DALAM WIRAUSAHA

Islam memandang bekerja bukanlah hanya semata – mata berkaitan dengan kehidupan didunia namun juga berhubungan dengan kehidupan diakhirat kelak. Rizki yang didapatkan

akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kehidupan didunia dan akhirat seseorang, oleh karena itu Agar usaha yang kita lakukan mendapatkan kesuksesan dan rizki yang kita peroleh mendapatkan keberkahan, maka kehati – hatian dalam menjalankan usaha harus benar – benar diperhatikan, nilai – nilai religiusitas harus selalu diterapkan dalam menjalankan usaha. Menghindari dari hal – hal yang menyebabkan rizki yang kita peroleh menjadi haram, misal ada unsur penipuan, ketidak jujuran maupun mengandung unsur riba.

Berkaitan dengan riba, islam dengan tegas melarangnya, hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al – Qur’an Surat Al- Baqarah 275 – 276 “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah: 275) . “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran serta selalu berbuat dosa.” (Al-Baqarah:276).

Juga dalam Al – Qur’an Surat A-Ruum :39, “Dan riba yang kamu berikan agar dia menambah harta seseorang, maka sebenarnya riba itu tidak menambah apapun di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mendapat keridlaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala dan hartanya).” (Ar-Ruum:39).

Dalam upaya menerapkan nilai – nilai religiusitas dalam menjalankan usaha maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain:

1. Kejujuran

Mungkin kita pernah melihat dari tayangan beberapa media tentang kecurangan – kecurangan yang dilakukan pedagang atau pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, misal pedagang yang menjual makanan yang tidak sehat karena mengandung pewarna makanan yang berbahaya, pedagang yang menjual daging busuk dan berformalin, maupun pedagang yang mencurangi timbangannya, sesaat mungkin terlihat pedagang tersebut akan memperoleh keuntungan yang banyak namun keberkahan tidak didapatnya, bisa jadi usahanya menjadi tidak berkembang atau mungkin lambat laun orang akan mengetahui kecurannya tersebut, jika hal ini terjadi maka kehancuran sudah jelas didepan mata, oleh karena itu kejujuran harus selalu dijunjung tinggi, dengan selalu memelihara kejujuran orang pun akan semakin percaya dengan kita.

2. Disiplin dalam bekerja

Kesuksesan dalam berwirausaha tentunya harus dibarengi dengan kerja keras dan disiplin yang tinggi, dengan disiplin yang tinggi maka semua pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan baik dan tentunya tepat waktu, sehingga hal ini tidak akan mengecewakan bagi pelanggan kita.

3. Mempererat tali silaturahmi dan memperluas pergaulan

Dalam bisnis koneksi menjadi hal yang sangat penting semakin luas pergaulan dan semakin banyak jaringan ini akan menguntungkan, tentunya pergaulan yang dibangun harus didasari dengan niat dan akhlak yang baik yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hubungan yang baik ini harus selalu dijaga agar para pelanggan tidak menjauh dari kita.

4. Dukungan dari keluarga

Adanya dukungan yang kuat dari keluarga akan memberikan semangat yang tinggi dalam berusaha, dukungan dari suami atau istri juga keluarga yang lain hal ini tentunya akan memunculkan spirit yang tinggi, dukungan ini akan semakin kuat ketika anggota keluarga yang lain akan dengan mudah memberikan bantuan jika kita memerlukannya.

5. Giat Bekerja

Banyak orang mengira memiliki usaha sendiri pastilah selalu menyenangkan karena kita dapat mengatur sendiri kapan akan memulai pekerjaan, berapa lama akan bekerja dan sebagainya, dan juga keruntungan yang akan didapatkan, namun perlu diingat seorang wira usaha yang gigih dia akan selalu memaksimalkan waktunya dalam bekerja, bahkan kadang tidak mengenal waktu, hal ini semata – mata demi kemajuan usahanya tersebut. Bagi wirausahawan yang senantiasa berpegang pada nilai- nilai religius maka baginya kedisiplin dan semangat dalam bekerja akan selalu dipertahankan. Dia akan bekerja sekuat tenaga namun juga tidak meninggalkan ibadah, justru giatnya bekerja akan diikuti juga dengan semangat ibadah yang tinggi dan juga doa yang mengiring usahanya.

6. Perbanyak sedekah

Tidak ada orang yang jatuh miskin karena banyak bersedekah, karena justru bersedekah akan membukakan jalan rizki bagi kita, sehingga untuk menjadi orang yang sukses dalam berwirausaha harus dibarengi dengan memperbanyak sedekah.

Al-qur'an juga memberikan tuntunan bagaimana menjalankan usaha atau bisnis yang benar, antara lain menepati janji dan kesepakatan, menjaga amanah dan janji, adil dan moderat dalam berhubungan dengan sesama, memiliki pandangan masa depan yang tajam untuk mengatur dan menyimpan sesuatu guna menghadapi masa-masa sulit, serta selalu ingat Allah dengan membayar zakat dan menunaikan shalat.

KESIMPULAN

Keberhasilan didalam berwirausaha tidak semata – mata dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh namun juga keberkahan didalam usaha, oleh karena itu maka penting untuk menerapkan religiusitas dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam berwirausaha, karena dengan menerapkan religiusitas dalam usaha tersebut akan menjaga kita dari tindakan – tindakan yang melanggar syariat yang akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain seperti yang telah dijelaskan, yang pada akhirnya membuat apa yang kita lakukan menjadi bernilai ibadah dan mendapatkan keberkahan didalam berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

<http://jalurilmu.blogspot.com/2011/10/religiusitas.html>

Islachul imam : **Memahami Makna Religiusitas**, 21 Februari 2014,

<http://islachul08.blogspot.co.id/2014/02/memahami-makna-religiusitas.html>

<http://www.matapencaharian.com/strategi-mengelola-bisnis-sukses-menguntungkan-dan-berkah.html>

<http://dakwahsyariah.blogspot.co.id/2014/07/konsep-bisnis-dalam-al-quran.html>

<http://www.kompasiana.com/merzagamal/konsep-bisnis-dalam-al-qur-an>

Jalaluddin (2005) . *Psikologi Agama*. Jakarta : PT. Grafindo Persada

Ancok, D. & Suroso, F. (2001). *Psikologi Islami ; Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdul, H. A & Mubarak. (2004). *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Pandji A & Djoko S. (2002). *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil* : PT. Rineka Cipta.

**RUQYAH SYAR'IYYAH SEBAGAI METODE TIBBUN NABI;
TINJAUAN FENOMENOLOGI AGAMA**

Muhadi Zainuddin, Anisah Budiwati

Universitas Islam Indonesia

*taufiq_kmfyeka@yahoo.co.id

ABSTRAK

Ruqyah Syar'iyah secara fenomenologis, dalam kajian fenomenologi agama dapat didefinisikan sebagai sebuah kesadaran mengenai (a) adanya dunia yang berlawanan—gaib dan empiris—; dan (b) bagaimana manusia sebagai bagian dunia empiris; (c) dapat menjalin hubungan simbolik dengan dunia gaib tersebut. Hal ini terindikasi dari tata cara yang dilakukan saat melakukan proses tersebut. Mereka memiliki kesadaran tentang apa yang mereka lakukan, tentang gejala di mana mereka terlibat; mampu memberikan makna terhadap dunia mereka. Kerangka kesadaran ini menjadi dasar atau pembimbing manusia dalam berperilaku dalam dan bertindak terhadap dunianya, sehingga pemahaman mengenai gejala sosial budaya menuntut pula pemahaman kita atas kerangka kesadaran yang digunakan untuk membangun perangkat-perangkat pemaknaan tersebut. Sehingga hal tersebut memunculkan kesadaran dalam diri mereka bahwa ada kekuatan yang bisa memberikan kesembuhan terhadap penyakit yang mereka derita melalui hubungan simbolik tersebut.

Dari sinilah kemudian muncul fenonema pengobatan kejiwaan melalui metode Ruqyah Syar'iyah. Melalui metode Ruqyah Syar'iyah ini, orang beranggapan dapat mengobati dari pengaruh jin dan sebagainya. Terdapat sebuah pesantren yang mengkhususkan untuk melakukan metode Ruqyah Syar'iyah sebagai metode tibbun nabi sebagai metode pengobatannya, yaitu PP. Rehabilitasi Nashrunminallah Krapyak, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Kata kunci: Ruqyah Syar'iyah, Tibbun Nabi, Fenomenologi Agama

ABSTRACT

Ruqyah Syar'iyah phenomenologically in the study of religious phenomenology could be defined as awareness regarding: (a) the existence of contrary worlds – supernatural and empiric worlds –; and (b) how the human being as part of empiric world (c) could symbolically interact with the supernatural world. This case is indicated by the way taken when doing that process. They have awareness about what they do, the symptom they are involved in, could give the meanings on their world. This awareness framework becomes the basic or guide for human to behave and act toward their world, so that understanding on cultural social symptom also demands us to understand the awareness framework used to build those sets in giving meanings. That matter bears the awareness in their selves that there is power which could give recovery for the illness they suffer through that symbolic interaction.

Based on this case, then, the phenomena of spiritual therapy through Ruqyah Syar'iyah have emerged. By using this Ruqyah Syar'iyah, one assumes that it could recover an annoyance of genie and so on. There is an Islamic boarding school which concern with applying that Ruqyah Syar'iyah method as the method of tibbun nabawi as their therapy method, namely PP. Rehabilitasi Nashrunminallah Krapyak, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Key words: Ruqyah Syar'iyah, Tibbun Nabawi, Religious Phenomenology

PENDAHULUAN

Persoalan besar yang muncul di tengah-tengah umat manusia sekarang ini adalah krisis spiritualitas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dominasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme, ternyata membawa manusia kepada kehidupan modern di mana sekularisme menjadi mentalitas zaman dan karena itu spiritualisme menjadi suatu tema bagi kehidupan modern. Sayyed Hossein Nasr dalam bukunya, sebagaimana disitir Syafiq A. Mughni menyayangkan lahirnya keadaan ini sebagai *The Plight Of Modern Man*, nestapa orang-orang modern.⁹⁷

Seiring dengan kondisi tersebut muncul konflik-konflik batin yang pada puncaknya menimbulkan gangguan jiwa, dan ciri-ciri gangguan jiwa yang diderita orang-orang modern menurut seorang psikoanalisis yang membuka praktek di New York yaitu Rollo May adalah ketidakbahagiaan hidup dan ketidakmampuan membuat keputusan.⁹⁸ Seiring dengan itu ada pula orang yang tidak mampu mengatasi gangguan jiwa diakibatkan oleh makhluk halus seperti jin dan sebagainya. Kondisi ini makin meningkatnya orang yang sakit jiwa.

Begitu juga yang terjadi di masyarakat. Fenomena di masyarakat kita yang menjaga diri dari godaan syaitan justru mengikuti cara-cara musyrik tanpa mereka sadari. Mereka mengandalkan benda-benda jimat sebagai tumbal (penjaga keselamatan) dalam berbagai bentuk dan rupa seperti: Keris, tombak, gelang, cincin, kalung, sabuk, potongan kayu, potongan kulit binatang, taring babi, kuku harimau, kepala harimau, bawang jantan, mrica, bungkus kemplayan, rokok cerutu, batu akik, batu kali, kerang laut, tanah kuburan, potongan kain kafan, bolpoin, korek api, biji-bijian dan sebagainya yang berasal dari dukun ataupun diperoleh dari tempat-tempat yang dianggapnya keramat, atau barang-barang yang sudah dijadikan sebagai jimat secara turun temurun. Ini dipakai pada umumnya oleh orang-orang yang jauh dari agama.

Banyak dari orang yang menjadi umpan dan korban akibat salah jalan menempuh pengobatan seperti melalui dukun, peramal, dan tukang sihir yang cenderung syirik. Mereka mengakui dapat mengobati dan menyembuhkan pengaruh dari jin dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Pengobatan yang bertendensi syirik itu bukan merupakan jalan yang terbaik, karena dapat menyesatkan orang-orang yang membutuhkan pengobatan.

Dari sinilah kemudian muncul fenomena pengobatan kejiwaan melalui metode *Ruqyah Syar'iyah*. Melalui metode *Ruqyah Syar'iyah* ini, orang beranggapan dapat mengobati dari

⁹⁷ Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 182.

⁹⁸ Rollo May, *Manusia Mencari Dirinya*, Terj. Eunive Santoso, Mitra Utama, Jakarta, 1996, hlm.

pengaruh jin dan sebagainya. Terdapat sebuah pesantren yang mengkhususkan untuk melakukan metode tersebut sebagai metode pengobatannya, yaitu PP. Rehabilitasi Nashrunminallah Krapyak. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Ruqyah Syar'iyah* sebagai metode *tibbun nabi* sebagai terapi pengobatan kejiwaan di PP. Rehabilitasi Nashrunminallah Krapyak, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian kasus atau disebut juga studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam. Adapun kesimpulan penelitian studi kasus hanya berlaku bagi tempat atau lembaga yang diteliti.

Penelitian ini dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik (utuh), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi agama, yaitu, permasalahan dan data hasil penelitian diposisikan, dipahami, dan dideskripsikan berdasarkan perspektif teori fenomenologi agama. Dalam kata lain, kenyataan di lapangan, Islam harus dilihat dan dipahami sebagaimana orang Islam memahaminya. Fenomenologi berprinsip bahwa setiap pengetahuan tentang diri kita dan dunia mestilah dimulai dengan pengalaman manusia yang paling personal. Sehubungan dengan ilmu-ilmu keagamaan, ini berarti menemui mereka dalam jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, tujuannya adalah untuk memaparkan apa yang telah menampakkan dirinya kepada jiwa-jiwa itu atau dengan kata lain fakta keagamaan.

Sumber data diperoleh secara berkesinambungan seperti menggelindingnya bola salju (*snow ball*) melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kegiatan pengumpulan data dihentikan ketika datanya sudah jenuh, artinya dari berbagai informan, baik yang lama maupun baru tidak diperoleh data yang baru lagi.⁹⁹

Penelitian ini menggunakan mekanisme:

- (a) Analisis Teks

⁹⁹ (Sugiono, 2008:57)

- (b) Wawancara
- (c) Studi Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses rehabilitasi di Pesantren Nashrunminallah ini dengan menggunakan Ruqyah Syar'iyah dan mujahadah. Untuk mujahadah, pasien diajak untuk membaca dzikir pagi-sore dengan amalan al-Ma'tsurat dari Syaikh Hasan al-Banna, serta muhasabah bersama. Selain itu, pasien juga diajak shalat tahajud dan shalat witr pada sekitar jam dua malam.

Adapun untuk Ruqyah Syar'iyah, ayat-ayat al-Qur'an itu biasanya dibacakan oleh Kiai. Tetapi pasien bisa mengikuti. Faktor kesembuhan pasien yang menjalani terapi rehabilitasi juga dipengaruhi oleh pergaulan dengan pasien yang non-rehabilitasi. Karena pasien yang bermukim di pesantren ini dibimbing untuk mampu berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan bisa belajar mandiri, mulai dari memasak, mencuci dan lain-lain.

Mengenai presentase dan rentang kesembuhan pasien yang menjalani terapi *Ruqyah Syar'iyah*, setiap pasien bisa berbeda-beda. Tergantung niat dan kesungguhan dari masing-masing pasien. Namun tetap ada rentang waktu khusus untuk kesembuhan, Semisal untuk stres ringan dan menengah, jika dibarengi dengan niat dan usaha yang sungguh-sungguh, rentang waktu untuk kesembuhannya kurang lebih tiga minggu sudah ada perubahan yang cukup signifikan.

Adapun macam-macam terapi pengobatan yang dipakai di Ponpes Nashrunminallah ada 3:

- 1) Ruqyah Syar'iyah:
 - a. Dasar Ruqyah Syar'iyah: HR Bukhari 2115 (Pengobatan sengat kalajengking dengan surat al-Fatihah, HR Bukhari 5297 (Pengobatan dengan Ruqyah Syar'iyah bagi yang terkena 'Ain (sihir), HR Bukhari 5300 (Pengobatan dengan Ruqyah Syar'iyah bagi penderita demam/stres).
 - b. Penyembuhan penyakit stres atau gila dengan dibacakan Qs. Al-Mu'minun 115-118 :
115. Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? 116. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. 117. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. 118. Dan katakanlah: "Ya

Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik."

- c. Mengusir gangguan jin dengan dibacakan Qs. Al-Mukminun ayat 97-98 :
- 097. Dan katakanlah: "Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. 098. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku."*
- d. Melepas Azimat, Ilmu hitam Qs. Ali Imran 1-10 :
- 001. Alif laam miim. 002. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. 003. Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. 004. Sebelum (Al Qur'an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa). 005. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. 006. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 007. Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. 008. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." 009. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. 010. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka,*

- e. Menyembuhkan Sihir keras Qs. Yunus ayat 81:

Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya". Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan.

Adapun syarat orang yang me-*Ruqyah Syar'iyah* adalah menjaga diri, wira'i, rutin baca al-Qur'an. Konsisten dengan apa yang dibaca (diamalkan) dengan mengulang-ulangnya (istiqamah) dan tidak hanya sekedar membaca melainkan juga harus mengetahui maknanya.

Dan syarat pasien *Ruqyah Syar'iyah* adalah:

- a. Ikhlas
- b. Suci badan dan pakaian
- c. Menutup aurat
- d. Meluruskan niat, yakin bahwa kesembuhan semata hanya di tangan Allah, bukan di tangan manusia.
- e. Merendahkan hati dan memasrahkan diri pada perlindungannya (tawakkal).
- f. Membuang-melepas benda-benda bertuah, Jimat, rajah, dan lain-lain.

Ayat-ayat yang biasa dibaca untuk proses *Ruqyah Syar'iyah* adalah:

- a. Al-Fatihah
- b. Al- Baqarah: 1-5
- c. Al- Baqarah: 163-164
- d. Al- Baqarah: 255-257
- e. Al- Baqarah: 285-286
- f. Ali Imran: 1-10
- g. Ali Imran: 18-19
- h. Al-Nisa': 56
- i. Al-Maidah: 72-76
- j. Al-A'raf: 54-56
- k. Maryam: 67-72
- l. Al-Mukminun: 115-118
- m. Al-Dukhan: 43-56
- n. Al-Hasyr: 21-24
- o. Al-Jin: 1-9
- p. Al- Ikhlas

- q. Al-Falaq
 - r. Al-Nas
- 2) Mujahadah (Dzikir dan Wirid) :

Bacaan yang dibaca ketika dzikir dan wirid harian (Pagi dan Sore) adalah al-Ma'tsurat.

- 3) Dzikir

Dzikir adalah menghadirkan hati, dalam berdzikir dianjurkan untuk mengungkapkan maksud-maksud yang hendak dituju dengan dzikir. Dianjurkan ketika berdzikir dengan keadaan sikap yang sempurna. Ketika dalam keadaan duduk menghadap ke kiblat, hendaknya dalam keadan khusyu' dan tenang, serta merendahkan kepala. Bersih anggota badan terutama pada bagian mulut, dalam hal ini dianjurkan bersiwak terlebih dahulu. Berdzikir di tempat yang bersih dan suci lebih utama, lebih utama lagi bila dzikir dilakukan di masjid.

Proses Rehabilitasi

Pada kesehariannya, Ponpes Nashrunminallah, yang merupakan pesantren rehabillitasi yang khusus menangani pasien yang ketergantungan obat, stres, dan lain sebagainya, menggunakan teknik *Ruqyah Syar'iyah* dalam mengobati pasiennya. Proses tersebut dilakukan setiap hari, sehabis maghrib, untuk kalangan pasien dan hari ahad jam 16.00 untuk umum. Pada terapi *Ruqyah Syar'iyah* tersebut, dibacakan ayat-ayat al-Qur'an dan wirid, dikenal dengan nama *al-ma'tsurat*.

Proses *Ruqyah Syar'iyah* dengan bacaan doa dan ayat-ayat al-Qur'an dalam rangka pengobatan dipilih karena pendiri pesantren tersebut mempunyai pengalaman tersendiri dengan ayat al-Qur'an yang berfungsi sebagai obat. Sang kiai ingin menularkan semangatnya kepada orang-orang di sekitarnya. Al-Qur'an sebagai obat bagi seluruh penyakit, itulah keyakinan yang dimiliki oleh setiap orang yang datang ke pesantren tersebut.

Menurut Kiai Yoyok, proses *Ruqyah Syar'iyah* yang dilakukan tidak terlepas dari bacaan al-Qur'an. al-Qur'an adalah *syifa' likulli da'*, obat semua penyakit. Baik penyakit lahir maupun batin. Sifat *syifa'* yang ada dalam al-Qur'an juga merupakan salah satu bentuk i'jaz dalam al-Qur'an sebagai kitab samawi terakhir yang diturunkan untuk umat manusia. Hal ini disandarkan pada Qs. Yunus 51:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".

Selain itu juga disandarkan pada Qs. Fushilat 44:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٤٤)

“Dan jikalau Kami jadikan Al Qur'an itu suatu bacaan dalam selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?". Apakah (patut Al Qur'an) dalam bahasa asing, sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh".

Adapun nilai yang di tanamkan pada diri pasien ada dua aspek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu:

- 1) Aspek Aqidah, pelurusan keyakinan bahwa Allahlah semata-mata yang wajib di-Tuhan-kan.
- 2) Aspek Akhlaq, melalui tausiyah harian dan pada acara makan bareng kiai senantiasa diselingi dengan ngobrol tentang wacana-wacana keislaman. Karena menurut beliau, penanaman nilai-nilai akhlaq yang dilakukan secara tidak langsung lebih bisa diterima oleh para pasien, mengingat pasien yang ada di sini tidak sebagaimana pasien-pasien di pesantren pada umumnya.

Ruqyah Syar'iyah secara fenomenologis, dalam kajian Prof. Heddy, agama dapat didefinisikan sebagai sebuah kesadaran mengenai (a) adanya dunia yang berlawanan—gaib dan empiris—; dan (b) bagaimana manusia sebagai bagian dunia empiris; (c) dapat menjalin hubungan simbolik dengan dunia gaib tersebut. Hal ini terindikasi dari tata cara yang dilakukan saat melakukan proses tersebut. Mereka memiliki kesadaran tentang apa yang mereka lakukan, tentang gejala di mana mereka terlibat; mampu memberikan makna terhadap dunia mereka. Kerangka kesadaran ini menjadi dasar atau pembimbing manusia dalam berperilaku dalam dan bertindak terhadap dunianya, sehingga pemahaman mengenai gejala sosial budaya menuntut pula pemahaman kita atas kerangka kesadaran yang digunakan untuk membangun perangkat-perangkat pemaknaan tersebut.

Sehingga hal tersebut memunculkan kesadaran dalam diri mereka bahwa ada kekuatan yang bisa memberikan kesembuhan terhadap penyakit yang mereka derita melalui hubungan simbolik tersebut.

Respon Masyarakat

Sebuah pesantren yang hadir ditengah masyarakat tentunya tidak lepas dari kehidupan masyarakat sekitar. Begitu juga dengan pesantren Nashrunminallah yang hadir di tengah masyarakat krapyak. Respon masyarakat tak semuanya sama dalam menanggapi munculnya komunitas baru di lingkungan mereka. Ada yang menerima dengan baik ada pula yang menolak.

Sejauh ini, perjalanan pesantren Nashrunminallah di tengah masyarakat mendapat respon yang baik. Beberapa orang ada yang sering mengikuti terapi dengan *Ruqyah Syar'iyah* setiap habis maghrib. Alasan warga mengikuti *Ruqyah Syar'iyah* pun berbeda-beda. Ada yang disebabkan karena pengaruh sihir, ada yang disebabkan karena sakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter, ada pula yang disebabkan karena barang dagangannya disebiri bunga oleh pedagang lain agar tidak laku, dan masih banyak lagi penyebab yang membawa mereka untuk memilih *Ruqyah Syar'iyah* di pesantren Nashrunminallah sebagai terapi.

KESIMPULAN

Ruqyah Syar'iyah sebagai alternatif pengobatan kejiwaan di Pesantren Nashrunminallah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dari sisi medis tidak mempunyai efek samping. Pengobatan tersebut tidak menggunakan sarana-sarana yang biasa digunakan dalam medis seperti operasi dengan menggunakan benda tajam sejenis pisau, gunting atau alat-alat lainnya yang berhubungan dengan operasi sebagaimana dilakukan dalam medis. Pengobatan *Ruqyah Syar'iyah* yang ditempuh di pondok pesantren tersebut hanya memohon kepada Allah dengan melalui pengobatan spiritual, kemudian dilakukan pembersihan atau penyucian diri pada pasien yang hendak di-*Ruqyah Syar'iyah*. Dari sisi syar'i praktek pengobatan di Pesantren Nashrunminallah tidak bertentangan dengan akidah umat Islam karena pasien hanya dimohon menggantungkan harapan kepada Tuhan, selain itu praktek *Ruqyah Syar'iyah* tidak menggunakan kekuatan jin apalagi setan. Hal lain yang menarik dari praktek pengobatan *Ruqyah Syar'iyah* di Pesantren Nashrunminallah yaitu biaya pengobatan relatif murah. Peneliti melihat di antara kekurangan yang paling dominan yaitu untuk kasus medis itu tidak serta merta bisa sembuh. Demikian pula kasus depresi berat kadang-kadang tidak sembuh.

Dalam hubungannya dengan praktek *Ruqyah Syar'iyah* di Pesantren Nashrunminallah jika ditinjau dari kondisi modern saat ini, bahwa pengobatan *Ruqyah Syar'iyah* di Pesantren Nashrunminallah sangat dibutuhkan masyarakat karena banyak orang yang mengalami krisis

kerohanian. Pergeseran nilai pandangan manusia yang makin materialistis dan individualistis, mulai dirasakan dampaknya yaitu munculnya individu-individu yang gelisah, rasa sepi yang tak beralasan bahkan sampai pada tingkat keinginan untuk bunuh diri. Keadaan ini tentunya sudah menyangkut pada aspek kesehatan jiwa manusia dalam mengarungi kehidupan yang makin kompleks. Mulai dari hal tersebut, manusia melirik praktek pengobatan *Ruqyah Syar'iyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 1998.

Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI-Press, 1987. Rollo May, *Manusia Mencari Dirinya*, Terj. Eunive Santoso, Mitra Utama, Jakarta, 1996.

Heddy Shri Ahimsa Putra, Fenomenologi Agama: **Pendekatan** Fenomenologi untuk Memahami **Agama dalam Jurnal Walisongo**, Volume 20, Nomor 2, November 2012.

_____, "Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan", *Makalah*, disampaikan pada Kuliah Umum "Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora", diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, pada tanggal 7 Desember 2009.

PENTINGNYA PERENCANAAN STRATEGIS DALAM GCG (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) SEBAGAI KEUNGGULAN DAYA SAING BISNIS UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH).

(Studi Kasus : Pengusaha Bisnis Keluarga Di Kota Sleman, Yogyakarta)

Nafisah Arinilhaq
Universitas Islam Indonesia
Email: arinilhaqnafisah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pentingnya Perencanaan Strategis dalam GCG (Good Corporate Governance) terhadap Keunggulan Daya Saing Bisnis UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) . (Studi Kasus : Pengusaha Bisnis Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta)". Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hubungan antara strategi perencanaan dengan praktek sistem GCG (2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi GCG dalam bisnis UMKM di D.I.Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 50 UMKM yang tersebar disetiap kabupaten di D.I.Yogyakarta menggunakan metode survey. Alat analisis yang dipakai adalah dengan multiple regression analyze dengan menggunakan SPSS Statistics 20. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa perencanaan strategis memiliki pengaruh positif untuk mendukung sistem GCG yang baik di D.I.Yogyakarta.

Kata Kunci : Perencanaan Strategis, GCG, SME Business

ABSTRACT

This study entitled "The Importance of Strategy Planning in the GCG (Good Corporate Governance) to Enhance Business Competitiveness of SME (Small Medium Enterprises), (Case Study: Family Business Entrepreneur Sleman, Yogyakarta)". The purpose of this study were (1) To determine the relationship between strategic planning and practice of corporate governance systems (2) To determine the factors that affect corporate governance in the business of SMEs in Yogyakarta. This research is a quantitative survey method with 50 SME's respondents. The analytical tool used is to analyze multiple regression using SPSS Statistics 20. The results of this study found that strategic planning has a positive influence to support the GCG good system in Yogyakarta.

Keyword : Strategic Planning, GCG, SME Business

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah sebuah sistem, struktur, tata cara serta budaya untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang serta untuk para shareholder (Fombrun, Charles J. 2006). Konsep GCG ini sendiri banyak digunakan oleh sebagian besar perusahaan karena dengan penerapan GCG, perusahaan mampu mencapai tujuan jangka panjang dengan relatif stabil. Di Asia penerapana GCG belum disadari oleh sebagian perusahaan didukung dari pernyataan oleh Development Bank Institute di tahun 1997 menyebutkan bahwa krisis yang melanda Asia disebabkan karena lemahnya penerapan GCG. Kebanyakan yang dilanda krisis adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga (Nam, Sang-woo dan Nam, Il Chong. 2004).

Dalam studi terdahulu dikemukakan bahwa perusahaan keluarga yang sukses adalah yang memiliki kredibilitas, nilai, pendidikan dan pembangunan, etika, keterbukaan, realisme praktis, pengambilan risiko, kemandirian, kewirausahaan (Koráb, V., et.al., 1998). Menurut penulis hal-hal yang disebutkan oleh penelitian tersebut merupakan bagian dari GCG. Faktor pembentukan GCG berupa kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Kesuksesan sebuah keluarga bukan didapat dari faktor indivdunya saja, namun dari kesuksesan dalam bebisnis keluarga baik besar maupun kecil (Jaffe, Dennis T. 2005) atau dalam pemahaman kita adalah bisnis UMKM keluarga. Namun untuk kelangsungan hidup jangka panjang , bisnis keluarga ini harus didukung strategi perencanaan untuk memberikan arahan dalam siklus hidup dari bisnis keluarga (Koráb, V., et.al., 1998). Kekuatan dalam menjalankan bisnis keluarga salah satunya adanya perencanaan kerja jangka panjang (Sorenson, 1999).

Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah rencana untuk mewujudkan tujuan jangka panjang dan untuk membantu perusahaan dalam bertindak. Perencanaan strategis umumnya berkisar dari 2 hingga 10 tahun atau bisa lebih lama dari itu (Ferrel, O.C. 2008 : h.207). Perencanaan dalam sebuah studi dikatakan berhasil adalah perencanaan yang diperbaharui dan inovatif serta adanya dukungan dari para staff (Jaffe, Dennis T. 2005). Tak hanya itu dalam studi tersebut menyebutkan bahwa pengembangan perencanaan juga menjadi kunci kesuksesan dimana menjadi tantangan bagi para pemimpinnya untuk tetap unggul. Tujuan dari adanya perencanaan strategis tidak lain adalah untuk membentuk dan membentuk ulang perusahaan bisnis dan produk untuk tetap tumbuh dan menghasilkan keuntungan.

Dimensi yang terdapat dalam variabel perencanaan strategis adalah produk, harga, persediaan, pasar dan target pada pasar internasional merujuk pada buku (Ferrel, O.C. 2008). Sedangkan GCG memiliki 4 dimensi pendukung yaitu *Fairness, Transparency, Responsibility, Accountability*, merujuk pada buku oleh Sobirin, Achmad. (2007). GCG ini yang nantinya mempengaruhi keunggulan daya saing sebuah usaha bisnis keluarga.

Good Corporate Governance (GCG)

Corporate Governance adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengatur bisnis dalam menaikkan akuntabilitas dan peforma perusahaan demi kepentingan jangka panjang *shareholder* maupun *stakeholder* (Abor, Joshua and Adjasi Charles K.D. 2007).

Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua

stakeholder. (Kaihatu, Thomas S. 2006). Sedangkan dalam pengertian dalam sebuah situs oleh para ahli menyebutkan, GCG merujuk pada seperangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan diarahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknyanya sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan lain (Van der Stede. 2007)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut undang-undang no. 20 tahun 2008 Usaha kecil, Mikro dan Menengah , adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan perorangan.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Keunggulan Daya Saing atau Kompetitif

Jika kita melihat dalam bahasan ekonomi yang dimaksud keunggulan bersaing adalah sebuah teori untuk menganalisis pesaing atau tindakan kompetitor dalam memperoleh informasi. Sedangkan dalam manajemen keunggulan bersaing dianggap sebagai kapabilitas sebuah perusahaan dalam memperoleh keunikan agar lebih unggul dari pesaing (Coff, Russel W. 2003). Keunggulan bersaing juga dapat dikatakan sebagai kapabilitas perusahaan dalam mengubah lingkungan dengan melihat keadaan lingkungan eksternal dan dampak yang terjadi pada lingkungan internal (Chang, Hung-Jung dan Wang, Hsien-Bin. 2013)

Perencanaan strategis dalam sebuah studi akan menambah nilai dari GCG itu sendiri serta akan terus bertumbuh kembang (Adendorff, Chriss., et., al. 2005). Bisnis keluarga biasanya menerapkan perencanaan untuk kebutuhan jangka panjang mereka (Petlina. Anastasia, Koráb. Vojtěch. Tahun tidak disebutkan). Hal tersebut sesuai dengan pemahaman GCG yang baik dan benar apabila dilakukan secara konsisten terus menerus (jangka panjang) yang akan membentuk budaya perusahaan.

HI : *Perencanaan Strategis memiliki pengaruh terhadap Good Corporate Governance.*

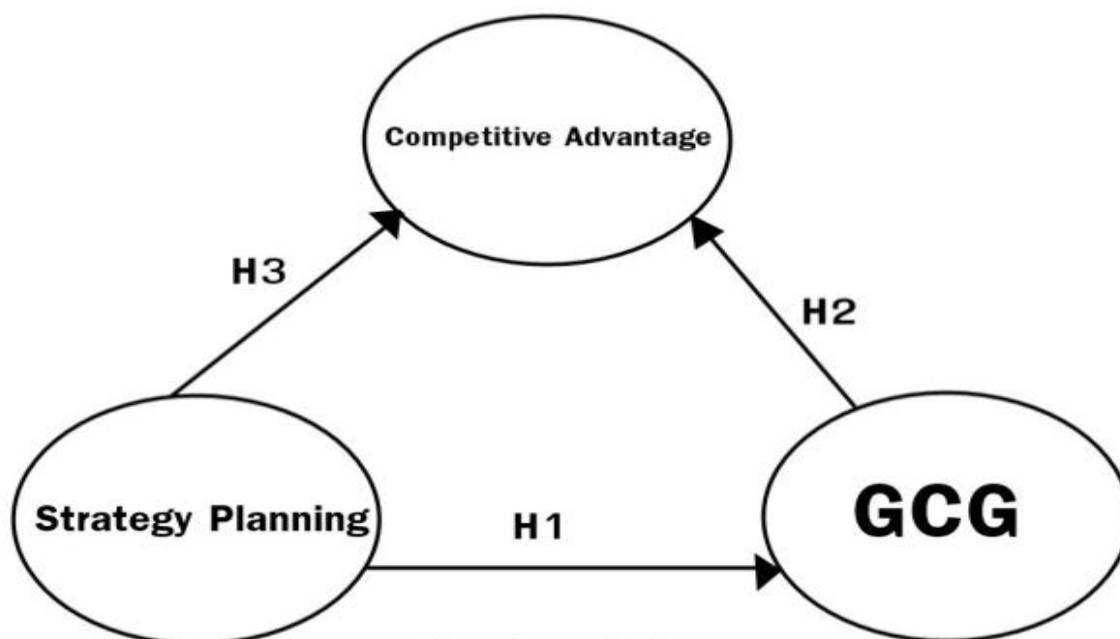
GCG dapat menjadi karakteristik untuk menjalankan sebuah perusahaan. An Dalam sebuah studi terdahulu nilai GCG harus unik dan memiliki keunggulan daya saing (Wilkes, John. 2004; h.13 dan 15). Pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi, integritas yang tinggi dibangun dari pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis (Sobirin, Achmad. 2007). Hal-hal diatas merupakan perwujudan katarestik sebuah bisnis yang menurut penulis juga merupakan ciri khas atau tanda bahwa sebuah perusahaan memiliki keunggulan tersendiri.

H2 : Good Corporate Governance memiliki pengaruh terhadap Keunggulan Bersaing.

Sebuah perencanaan strategis juga dapat menjawab bagaimana sebuah bisnis berjalan, bagaimana bisnis di masa depan dan bagaimana penentuan keputusannya (Jaffe, Dennis T. 2005). Hal tersebut jika dilakukan seara konsisten dalam jangka waktu tertentu akan menjadikan keunggulan tersendiri dibanding para pesaingnya.

H3 : Perencanaan Strategis memiliki pengaruh terhadap Keunggulan Kompetitif.

Kerangka Berpikir



Gambar. 1.1

METODE PENELITIAN

Kuisisioner disusun untuk menghitung pengaruh antara perencanaan strategis, GCG dan keunggulan kompetitif. Semua item dihitung dengan 6 *six-Likert* dari terendah Sangat Tidak Setuju (1) hingga tertinggi Sangat Setuju (6).

Sampel dan data diambil dari setiap UMKM di Kota Sleman yang mewakili bidangnya yaitu berjumlah 50 responden. Responden dihubungi dengan menggunakan kontak langsung untuk mengisi kuisioner. Dari 50 responden terdiri dari 25% responden perempuan dan 75% responden laki-laki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Competitive	4.7450	1.21059	50
Strategy	5.3680	.63934	50
GCG	5.3850	.80529	50

Correlations

		Competitive	Strategy	GCG
Pearson	Competitive	1.000	.556	.273
	Strategy	.556	1.000	.405
	GCG	.273	.405	1.000
Sig. (1-tailed)	Competitive	.	.000	.028
	Strategy	.000	.	.002
	GCG	.028	.002	.
N	Competitive	50	50	50
	Strategy	50	50	50
	GCG	50	50	50

Korelasi antara variabel keunggulan kompetitif dengan strategi sebesar 0,556. Sedangkan antara keunggulan kompetitif dengan GCG sebesar 0,273 . Sementara korelasi antara GCG dengan perencanaan strategis sangat kuat yaitu 0.405. Secara teoritis korelasi variabel keunggulan kompetitif dengan GCG lebih besar dibanding dengan perencanaan strategis, maka GCG sangat berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif dibandingkan perencanaan strategis secara langsung.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.559 ^a	.312	.283	1.02526
a. Predictors: (Constant), GCG, Strategy				

Angka R² sebesar 0,312 atau 31,2% artinya keunggulan kompetitif dapat dijelaskan oleh variabel GCG dan perencanaan strategis sebesar 31,2%. Sedangkan sisanya sebesar 68,2% (100%-31,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain.

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	22.407	2	11.203	10.658	.000 ^b
Residual	49.405	47	1.051		
Total	71.811	49			

a. Dependent Variable: Competitive

b. Predictors: (Constant), GCG, Strategy

Hipotesis

H₀ : Perencanaan Strategis dan GCG memiliki pengaruh terhadap Keunggulan Kompetitif.

H₁ : Perencanaan Strategis dan GCG tidak memiliki pengaruh terhadap Keunggulan Kompetitif.

Pengujian menggunakan uji satu sisi dengan tingkat signifikansi alpha 5% yaitu : jika P_{value} (Sig) > 0,05 maka H₀ ditolak dan jika P_{value} (Sig) < 0,05 maka H₀ diterima.

Berdasarkan tabel ANOVA : jika P_{value} (0,00) < 0,05 maka H₀ ditolak. Hasil ini dapat digunakan untuk memprediksi keunggulan daam bersaing yaitu perencanaan strategis dan GCG memiliki pengaruh terhadap keunggulan kompetitif.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.135	1.346		-.843	.403

Strategy	1.009	.251	.533	4.029	.000
GCG	.086	.199	.057	.431	.669

a. Dependent Variable: Competitive

Dari tabel koefisien diatas dapat digambarkan regresi sebagai berikut :

$$Y = -1,135 + 1,009X_1 + 0,086X_2$$

Dimana Y adalah Keunggulan Kompetitif, X_1 adalah Perencanaan Strategis dan X_2 adalah GCG.

Konstanta sebesar -1,135 memberikan arti bahwa jika UMKM tidak memiliki keunggulan kompetitif dengan perencanaan strategis dengan GCG maka UMKM dapat mengalami kerugian sebesar -1,135.

KESIMPULAN

Sebuah strategi adalah konsep dari level tertinggi kepada level yang paling rendah sebagai acuan untuk sebuah perencanaan. Menurut sebuah pendapat perencanaan strategi ini sangat penting melihat strategi dapat dijadikan sebuah pola tindakan yang menggambarkan sebuah organisasi. (Napier, Herman.S dan Kreeger, Walter.R ., 2004). Dari studi empiris juga mengemukakan bahwa kesuksesan perencanaan merupakan salah satu yang paling penting yang terdapat dalam GCG (Adendorff, Chriss., et., al. 2005). Sudah jelas bahwa perencanaan strategis masuk pada standar GCG yang baik dan benar dengan mengikuti 4 aspek utama yaitu *Fairness, Transparency, Responsibilit dan Accountability*. Dengan memiliki perencanaan strategis dengan GCG, sebuah pengusaha bisnis tentu akan memetakan untuk unggul dalam persaingan bisnis.

Dari hasil penelitian didapat bahwa perencanaan strategis mempengaruhi pada GCG dan mempengaruhi pada keunggulan kompetitif. Sangat penting bagi UMKM di Kota Sleman untuk menerapkan perencanaan strategis agar memiliki daya saing dengan memperoleh keuntungan daripadanya.

Penulis melihat fenomena UMKM di Kota Sleman dengan penerapan GCG atau tata kelola bisnis yang baik dan benar. Pada akhirnya faktor yang diuji coba perencanaan strategis dalam GCG sebagai tahap awal kesadaran terhadap pengelolaan bisnis yang baik dan benar. Sehingga setiap UMKM memiliki daya saing atau nilai kompetitif tersendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung aktivitas saya dalam menggapi cita-cita saya. Penulis juga berterimakasih kepada UMKM yang berkontribusi besar dalam jalannya penelitian ini sebagai mana mestinya.

Bagi penelitian selanjutnya, penulis harap untuk memperluas cakupan responden melibih jumlah responden yang peneliti ambil. Selain itu penulis berharap untuk meneliti faktor lain dalam GCG yang mendukung keunggulan kompetitif atau daya saing yang dilakukan oleh UMKM. Manfaat dari adanya penelitian ini bagi pihak UMKM agar lebih memperhatikan sistem GCG demi kualitas bisnis yang sehat dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, Joshua and Adjasi Charles K.D. 2007. "Corporate governance and the small and medium enterprises sector: theory and implications," *Q Emerald Group Publishing Limited*, Vol. 7 No. 2, 111-122.
- Adendorff, Chriss., et., al. 2005. "The Impact of Planning on Good Governance Practices in South African Greek Family Business," *Management Dynamics*, Vol.14, No.4, 34.
- Chang, Hung-Jung dan Wang, Hsien-Bin. 2013. "A Case Study of Dynamic Competitive Advantage," *The International Journal of Organization*, Vol.6, No.2, 198-218.
- Coff, Russel W. 2003. "The Emergent Knowledge-Based Theory of Competitive Advantage," *Managerial and Decision Economics*, Vol.24, No.4, 245.
- Demanik, Ericson. Tanggal posting : 12 September 2015. "Pengertian Good Corporate Governance Menurut Ahli," <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-good-corporate-governance.html>. Tanggal akses : 17 Juli 2016.
- Ferrel O.C. "Business : A Changing World." *McGrawHill* : Amerika, New York.
- Fombrun, Charles J. 2006. "Corporate Governance," *Corporate Reputation Review*. Vol 8. No. 4. 267.
- Jaffe, Dennis T. 2005. "Strategic Planning for the Family in Business," *Journal of Financial Planning*, Vol. 18 , No. 3, 50.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8 , No. 1, 1-9.
- Koráb, V., Kulaudova, F., Roldan Salgueiro, J. L., Sánchez-Apellaniz García, M. 1998. *Jak pracují malé rodinnéfirmy. Jak pracují malé rodinné firmy*, Brno: *VUT v Brně*, Vol 79, No. 1 , 53–67.

- Nam, Sang-Woo dan Nam, Il Chong. 2004. "Corporate Governance in Asia," *Asian Development Bank Institute*, i-191.
- Napier, Herman.S dan Kreeger,Walter.R . 2004. "The Art of Strategic Management," Jaico Publishing House : Mumbai.
- Petlina. Anastasia, Koráb. Vojtěch. "Family Business in the Czech Republic: Actual Situation," *Trends Economics and Management*, Vol. 9, No.23, 32-42.
- Sobirin, Achmad. 2007. "Budaya Organisasi (Pengertian, makna dan aplikasi dalam kehidupan organisasi), Yogyakarta : UPP, STIM YKPN.
- Wilkes, John. 2004. "Corporate governance and measuring performance," *Measuring Business Excellence*, Vol. 8, No. 4,13.

**PENGARUH MOTIVASI DAN KREATIVITAS TERHADAP
KEBERHASILAN KEWIRAUSAHAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) (STUDI KASUS UMKM JENANG KUDUS)**

Diah Ayu Susanti, Nanik Ermawati*

*Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Muria Kudus
Email: diah.ayususanti3@gmail.com, n444n111k@gmail.com*

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang banyak di geluti masyarakat. Beberapa ada yang dapat bertahan hidup dan ada yang tidak bisa bertahan hidup. UMKM yang mampu bertahan hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh motivasi dan kreativitas terhadap keberhasilan kewirausahaan UMKM.

Sampel yang digunakan adalah UMKM jenang yang ada di Kabupaten Kudus. Teknik pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner pada UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi dan kreativitas berpengaruh terhadap keberhasilan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kata Kunci : UMKM, motivasi, kreativitas, kewirausahaan

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is a business that many people in the respective fields. Some were able to survive and nothing that can not survive. SMEs can survive is influenced by several factors. Therefore, this study aimed to get empirical evidence of the influence of motivation and creativity keberhasilan kewirausahaan SMEs.

The samples are SMEs porridge in Kudus. Data collection techniques by spreading questionnaires to SMEs. Data analysis technique used is multiple regression.

The results of this study showed that variables affect motivation and creativity terhadap keberhasilan kewirausahaan Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs).

Keywords: SMEs, motivation, creativity, entrepreneurship

PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia di dukung oleh peran dari UMKM. Peran UMKM saat ini dipandang sangat penting yaitu sebagai pembangunan ekonomi. Selain sebagai pembangunan ekonomi peran lain dari UMKM yaitu dapat memperbaiki kesejahteraan sosial (Rahmawati, *et.al*, 2016). UMKM yang banyak dijumpai pada masyarakat Kudus salah satu nya adalah usaha jenang. Usaha jenang adalah usaha rumahan yang merupakan jajanan khas dari Kabupaten Kudus. Dari tahun ke tahun jumlah pengusaha jenang semakin bertambah. Persaingan antar pengusaha jenang juga semakin ketat.

Apalagi pada zaman saat ini yaitu era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Berbagai tantangan dihadapi oleh UMKM. Oleh karena itu UMKM harus memiliki jiwa kewirausahaan

yang tinggi supaya bisa bersaing dengan UMKM yang lain. UMKM berjuang untuk bisa bertahan hidup dengan berbagai tantangan tersebut.

Seorang wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya harus memiliki jiwa yang tangguh. Ketika seorang wirausahawan tersebut ingin tetap eksis dalam dunia bisnis maka wirausahawan tersebut harus memiliki sumber daya yang tangguh. Keinginan wirausaha untuk mengembangkan usaha semaksimal mungkin ini lebih dikenal dengan keberhasilan kewirausahaan. Keberhasilan wirausaha tercapai karena semangat dari diri wirausahawan yang tinggi karena tidak akan puas dengan hasil yang dimiliki sekarang. Keberhasilan yang dimiliki oleh wirausahawan tersebut pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berupa motivasi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman (2012), Purnama (2010), Dewi. *et. al* (2015), yang menemukan bukti bahwa semakin tinggi motivasi yang dimiliki oleh wirausahawan maka keberhasilan untuk menjalankan wirausaha juga tinggi. Motivasi adalah dorongan yang keluar dari diri wirausahawan untuk bekerja semaksimal mungkin.

Dorongan ini berupa gairah dalam menjalankan bisnis usahanya. Wirausahawan tidak begitu saja puas dengan hasil yang didapatkan tetapi wirausahawan akan terpacu untuk bisa mengembangkan usahanya. Dengan kata lain motivasi untuk mengembangkan usaha sangat lah penting untuk menunjang keberlangsungan usaha. Menurut Zimmerman (2001) seorang wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya memiliki motivasi sebagai berikut : 1). menciptakan tujuan sendiri, 2). membuat perbedaan, 3). potensi penuh, 4). keuntungan yang tidak terbatas, 5). kontribusi bagi masyarakat, 6). mengerjakan yang disukai.

Selain motivasi faktor lain yang menunjang dari keberhasilan kewirausahaan yaitu kreativitas. Kreativitas menurut Evans (1994) adalah gagasan baru yang bersumber dari sebuah pengetahuan sehingga menghasilkan output yang bermanfaat. Dengan kata lain kreativitas adalah upaya yang digunakan oleh wirausahawan untuk bisa menghasilkan produk, jasa atau sistem baru. Produk baru tersebut diharapkan akan dapat menciptakan daya saing agar bisa berkompetisi dengan UMKM yang lain. Setiap produk pasti akan mengalami *Product Life Cycle* (PLC) yaitu daur hidup sebuah produk. Daur hidup produk adalah siklus hidup produk dimana produk itu baru pertama kali muncul kemudian berkembang, menuju ke titik puncak (*maturity*), kemudian akan mulai menurun kembali bahkan bisa langsung turun drastis. Untuk menghindari masa penurunan yang drastis tersebut maka seorang wirausahawan akan berusaha mempertahankan produk tersebut. Bagaimana cara mempertahankan produk tersebut? Wirausahawan tersebut harus bisa menciptakan terobosan baru sehingga konsumen tidak akan bosan dengan produk tersebut. Terobosan baru tersebut dikenal dengan kreativitas.

Dengan kreativitas yang tinggi akan menciptakan produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi juga. Untuk menghasilkan produk yang kreatif ini di butuhkan sumber daya manusia yang handal juga. Sumber daya manusia yang handal ini lah yang bisa menciptakan peluang keberhasilan dalam berwirausaha. Lewat tangan tangan orang kreatif sebuah produk yang bagus dihasilkan. Dengan menghasilkan produk yang bagus dan memiliki pemasaran yang tinggi sehingga meningkatkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan laba yang meningkat menunjukkan keberhasilan berwirausaha tercapai. Penelitian tentang kreativitas yang dihubungkan dengan keberhasilan wirausaha UMKM ini pernah di teliti oleh Agustina (2013), Dewi. *et. al* (2015), Sukirman (2012),Hadiyati (2011), Rifqi Hapsah (2013).

Berdasarkan *riset gap* di atas maka peneliti ingin mengajukan judul penelitian **“PENGARUH MOTIVASI dan KREATIVITAS TERHADAP KEBERHASILAN KEWIRAUSAHAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS UMKM JENANG KUDUS)”**

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1). Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap keberhasilankewirausahaan UMKM? 2). Apakah kreativitas berpengaruh positif terhadap keberhasilankewirausahaan UMKM?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Motivasi

Motivasi menurut Hasibuan (2005) adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mencapai sebuah kepuasan dengan menggunakan daya penggerak yang menimbulkan kegairahan seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Sedangkan motivasi menurut Purnama (2010) yaitu keinginan seseorang untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan dengan didukung dorongan dari dalam diri seseorang. Dalam menentukan tujuan organisasi karyawan harus diberikan semacam dorongan yang kuat untuk bisa bekerja secara maksimal. Dorongan yang kuat tersebut berupa semangat kerja. Dengan semangat kerja yang tinggi seseorang akan mampu mengerjakan pekerjaan secara baik. Sehingga dapat disimpulkan pengertian motivasi merupakan daya penggerak yang berupa kekuatan batin atau dorongan batin yang dimiliki seseorang dimana dorongan tersebut mengakibatkan seseorang untuk bertindak atau berbuat sesuatu sehingga tujuan organisasi tercapai.

2. Kreativitas

Robbins (2002) menjelaskan kreativitas adalah sebuah gagasan baru atau ide baru yang muncul dari pemikiran seseorang yang dapat memperbaiki produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Sedangkan kreativitas menurut Sukirman (2012) adalah inisiatif untuk menemukan sesuatu yang baru berupa produk atau jasa dengan cara menambah nilai dari produk atau jasa tersebut. Pengertian lain kreativitas menurut Stoner, *et.al* (1996) adalah metode baru yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu yang baru misalnya produk, jasa, perusahaan baru, proses baru, sistem baru, teknik baru. Dapat disimpulkan kreativitas adalah gagasan, ide, inisiatif yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan sesuatu yang baru.

Untuk menemukan sesuatu yang baru perusahaan harus menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan yaitu sumber daya manusia, sumber daya modal sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Kreativitas tersebut akan digunakan wirausaha untuk menjawab peluang yang ada di sekelilingnya. Ketika bisnis sudah berjalan tanpa ada terobosan baru melalui kreativitas biasanya akan mengalami masa yang stagnan dalam hal penjualan. Oleh karena itu kreativitas yang tinggi ini akan memacu wirausaha untuk mengembangkan usaha. Dimana pengembangan usaha tersebut akan menumbuhkan rasa wirausaha yang tinggi. Dapat dikatakan ketika rasa wirausaha yang tinggi maka wirausahawan tersebut memiliki keberhasilan dalam berwirausaha.

3. Keberhasilan Kewirausahaan

Kewirausahaan menurut Baldacchino (2009) adalah peluang yang diciptakan untuk memperoleh kesuksesan dengan menggunakan segala kemampuan sumber daya dan kreativitas yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan kewirausahaan menurut Alma (2011) yaitu ide ide baru yang dimiliki oleh seseorang dimana ide baru tersebut itu berasal dari manusia yang kreatif dan inovatif. Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan akan berusaha untuk menemukan terobosan baru di bidangnya. Terobosan baru yang dimiliki perusahaan akan diberdayakan untuk menciptakan sebuah produk, jasa, sistem baru. Output yang kreatif tersebut diharapkan akan memiliki nilai tambah yang tinggi.

Kreatif juga identik dengan produk yang ditawarkan ke pelanggan berbeda dengan produsen yang lain. Ketika produsen tersebut memiliki daya jual yang tinggi karena satu satunya perusahaan yang memiliki produk tersebut maka dikatakan wirausaha tersebut berhasil dalam menemukan produk baru. Keberhasilan dalam menemukan produk baru tersebut mengindikasikan bahwa wirausahawan tersebut memiliki keberhasilan yang tinggi dalam

berwirausaha. Menurut Andari (2011) keberhasilan kewirausahaan yaitu keadaan yang menggambarkan tingkat yang ada di atas rata-rata usaha yang berada di dalam derajatnya. Artinya usaha yang dijalankan tersebut dapat menghasilkan laba yang tinggi. Sedangkan menurut Dwi (2003) keberhasilan berwirausaha di tunjukkan dengan seberapa besar pencapaian yang telah di capai oleh perusahaan, apakah pencapaian tersebut telah sesuai dengan tujuan perusahaan. Keberhasilan berwirausaha ini juga dapat dilihat dari seberapa efisienkah proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan.

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang banyak dijumpai di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia pun terbilang cukup banyak. Untuk pengawasan UMKM sendiri pemerintah juga telah memiliki lembaga yang menangani tentang UMKM yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Tentu nya Kementerian tersebut berupaya untuk membantu perkembangan UMKM. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, kriteria UMKM sebagai berikut :

Tabel 1

No	Usaha	Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah diteliti sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 2

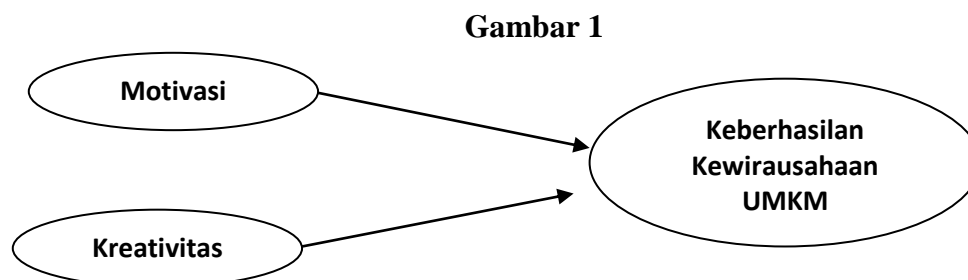
No	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Purnama (2010)	Motivasi dan Kemampuan Usaha dalam Meningkatkan Keberhasilan Usaha Industri Kecil	- Motivasi berpengaruh terhadap keberhasilan usaha industri kecil - Kemampuan usaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha industri kecil

2.	Ernani Hadiyati (2011)	Kreativitas dan Berpengaruh terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil	- Kreativitas berpengaruh positif terhadap kewirausahaan usaha kecil - berpengaruh terhadap kewirausahaan usaha kecil
3.	Sukirman (2013)	Analisis Pengaruh Kinerja Karyawan terhadap Pengembangan Kewirausahaan Usaha Kecil Jenang Kudus di Kabupaten Kudus	- Inovasi berpengaruh terhadap pengembangan kewirausahaan - Kreativitas berpengaruh terhadap pengembangan kewirausahaan - Motivasi tidak berpengaruh terhadap pengembangan kewirausahaan
4.	Rifqi hapsah (2013)	Hubungan antara <i>Self Efficacy</i> dan Kreativitas dengan Keberhasilan Berwirausaha	- <i>Self Efficacy</i> berhubungan dengan keberhasilan berwirausaha - Kreativitas berhubungan dengan keberhasilan berwirausaha.
5.	Dewi, <i>et.al</i> (2015)	Pengaruh Kreativitas dan Perilaku Inovatif terhadap Keberhasilan Usaha Industri Kecil Melalui Motivasi Usaha sebagai Variabel Mediasi	- Kreativitas berpengaruh terhadap keberhasilan usaha UMKM - berpengaruh terhadap keberhasilan usaha UMKM - Motivasi mampu memediasi hubungan kreatifitas, terhadap keberhasilan usaha UMKM

Sumber : Diolah penulis, 2016

B. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :



Sumber : Diolah Penulis, 2016

C. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Motivasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan kewirausahaan UMKM

H2 : Kreativitas berpengaruh positif terhadap keberhasilan kewirausahaan UMKM

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Explanatory Research*. *Explanatory Research* adalah jenis penelitian yang menjelaskan hipotesis (Sekaran, 2010).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang dipilih. Setelah membagikan kuesioner kemudian hasil kuesioner diolah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur buku.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang bergerak di bidang industri jenang di Kabupaten Kudus. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobabilitas* yaitu *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti (Sugiyono, 2010).

4. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen terdiri dari :

- a. Motivasi adalah dorongan yang berasal dari diri sendiri untuk melakukan sebuah pekerjaan. Motivasi menggunakan instrumen yang telah dilakukan oleh Zimmmer (2001) menggunakan enam pertanyaan.
- b. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru. Variabel ini menggunakan instrumen yang digunakan oleh Frinces (2004) menggunakan delapan pertanyaan.

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberhasilan kewirausahaan UMKM. Samir

(2005:33) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur keberhasilan usaha atau kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Produktivitas, yang diukur melalui perubahan output kepada perubahan di semua faktor input (modal dan tenaga kerja).
- b. Perubahan di tingkat kepegawaian (output, teknologi, cadangan modal, mekanisme penyesuaian, dan pengaruh terhadap perubahan status).
- c. *Rasio finansial* (mengurangi biaya pegawai dan meningkatkan nilai tambah pegawai).

5. Analisis Data

a. Uji kualitas Data

Uji kualitas data yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji *validitas* dan uji *reliabilitas*. Uji *validitas* adalah uji yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2010). Kuesioner dikatakan valid menurut Ghozali (2010) jika nilai signifikansi korelasi kuesioner tersebut kurang atau sama dengan 5% ($<0,05$). Selanjutnya Uji *reliabilitas* adalah pengujian sebuah kuesioner tentang apakah kuesioner ini dapat digunakan tidak hanya satu responden tetapi bisa digunakan oleh responden yang lain (Sugiono, 2010). Penelitian ini dikatakan *reliabel* jika nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,6 (Ghozali, 2010).

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji *normalitas*, uji *multikolinieritas*, uji *heteroskedastisitas*. Uji *normalitas* menggunakan teknik *Kolmogorof Smirnov*. Hasil pengujian data dikatakan normal jika nilai signifikansi $> 0,05$. Selanjutnya uji *multikolinieritas* yaitu pengujian apakah ada korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2010). Dikatakan tidak terjadi *multikolinieritas* jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *VIF* $< 1,0$. Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk melihat apakah terjadi kesamaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2010). Pengujian data ini harus terbebas dari heteroskedastisitas dengan menggunakan teknik uji *glejser*. Dikatakan tidak terjadi *heteroskedastisitas* jika nilai signifikansinya $> 0,05$.

c. Pengujian Hipotesis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berikut ini persamaan yang digunakan :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + e$$

Keterangan :

Y : keberhasilan kewirausahaan UMKM

X₁ : motivasi

X₂ : kreativitas

β : Koefisien Regresi

E : error

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan $\alpha=5\%$. Kaidah pengambilan keputusan menurut Ghozali (2010) sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas (sig.) $< \alpha = 5\%$ maka hipotesis alternatif didukung.
2. Jika nilai probabilitas (sig.) $> \alpha = 5\%$ maka hipotesis alternatif tidak didukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Deskripsi Penyebaran Kuesioner

Kuesioner dibagikan kepada responden yang bergerak di bidang UMKM jenang Kudus kemudian di kumpulkan kembali untuk dilakukan tahap pengolahan. Berikut ini disajikan tabel penyebaran kuesioner sebagai berikut :

Tabel 3

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner yang dibagikan	95	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(12)	12,63%
Kuesioner yang tidak lengkap data nya	(11)	11,58%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	72	75,79%

Sumber : diolah penulis, 2016

Berdasarkan tabel di atas jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 72 responden dari 95 kuesioner yang dibagikan. Prosentase jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 75,79%.

b. Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji *validitas* dilakukan dengan cara mengujikan korelasi diantara skor item – item pertanyaan dengan skor total (*Pearson Correlation*). Setiap item pertanyaan harus berkorelasi positif terhadap skor total pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien korelasi antar item – item pertanyaan, secara statistik, signifikan pada tingkat 5% yaitu 0,00 dimana kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan instrumen tersebut dinyatakan valid. Hasil ini dapat dilihat pada pada tabel 4.

Uji Reliabilitas

Uji *reliabilitas* dimaksudkan untuk dapat menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Uji ini di dasarkan dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Berdasarkan tabel 4, nilai *Cronbach Alpha* diketahui lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti instrumen penelitian yang dilakukan dinyatakan reliabel, selain itu dapat berarti konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan dapat dipercaya sebesar nilai *Cronbach Alpha* tersebut.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui terjadinya *normalitas* pada data adalah dengan cara menggunakan *Kolmogorof-smirnov test*. Pada tabel *kolmogorof-smirnov test* dapat dilihat pada tabel 5. Besarnya nilai *kolmogorov-smirnov* adalah 0,621 dan signifikan pada 0,510 hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Pada hasil pengujian *Multikolonieritas* dapat dilihat pada tabel 6, pada VIF dan *Tolerance* dapat mengindikasikan bahwa tidak terdapat *multikolonieritas* yang serius. Nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 sedangkan Nilai *Tolerance* tidak ada yang kurang dari 0.10 (Ghozali, 2010). Hal ini dapat ditegaskan kembali dari hasil korelasi antar variabel independen tidak ada korelasi yang cukup serius.

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian terhadap ada tidaknya *heteroskedastisitas* adalah dengan menggunakan *Uji Glejser*. *Uji Glejser* ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2010). dengan menggunakan *uji glejser* hasil yang didapat terlampir di tabel 7. Dari tabel hasil output SPSS berikut menunjukkan bahwa variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya *Heteroskedastisitas*.

d. Pengujian Hipotesis

Uji Determinasi

Pada pengujian menggunakan uji determinasi dilakukan untuk dapat menguji *Goodness-Fit* dari model regresi. Besarnya nilai *Adjusted R2*(terlampir pada tabel 8). Hal ini dapat diartikan bahwa variabilitas variabel dependen tersebut dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 0,463 (46,3%). Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak dapat dimasukkan dalam model regresi.

Uji Pengaruh Simultan (*F-Test*)

Pada pengujian dengan menggunakan uji pengaruh simultan (*F-test*)digunakan untuk dapat mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dapat dilihat pada nilai *F test*pada tabel 9, yaitu sebesar 31,631dan signifikan pada 0.000 yang berarti variabel independen motivasi,kreativitas secara simultan mempengaruhi variabel keberhasilan kewirausahaan UMKM.

Uji Parsial (*t-test*)

Pada pengujian dengan menggunakan uji parsial ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.Berdasarkan pengujian *t test* yang terlampir pada tabel 10,dua variabel independen yaitu motivasi,kreativitas yang dimasukkan dalam model regresi, semuanya signifikan karena tidak melebihi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kewirausahaan dipengaruhi oleh motivasi dan kreativitas dengan persamaan matematis sebagai berikut :

$$Y = 9.315+0.330X_1+0.200X_2$$

Konstanta sebesar 9.315 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka y sebesar 9.315. Koefisien regresi x1 sebesar 0.330menyatakan bahwa setiap x1 naik akan meningkatkan y sebesar 330 Koefisien regresi x2 sebesar 0.200menyatakan bahwa setiap x2 naik akan meningkatkan y sebesar 200.

2. Pembahasan

a. Motivasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Tiap wirausahawan dalam menjalankan usahanya pasti memiliki tujuan. Tujuan yang dicapai oleh wirausahawan tersebut misalnya tingkat penjualan yang tinggi. Dengan adanya motivasi dalam menjalankan usahanya dalam menentukan tujuan organisasi karyawan harus diberikan semacam dorongan yang kuat untuk bisa bekerja secara

maksimal. Dorongan yang kuat tersebut berupa semangat kerja. Dengan semangat kerja yang tinggi seseorang akan mampu mengerjakan pekerjaan secara baik. Dengan adanya dorongan tersebut dapat menentukan keberhasilan pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang sedang dijalankan hasil dari penelitian ini sejalan dengan mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Purnama (2010), Sukirman (2012), Dewi. *et. al* (2015). UMKM jenang yang ada di Kabupaten Kudus memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan usaha bisnisnya. Persaingan yang ketat antar pengusaha jenang menyebabkan pengusaha jenang berpikir bagaimana bisnisnya bisa tetap berjalan. Lingkup usaha UMKM memang sangat riskan untuk gulung tikar karena dari sisi modal maupun dari sisi persaingan. Tetapi dalam hal ini pengusaha UMKM dengan modal yang kecil mampu bertahan untuk bisa eksis berproduksi dengan cara motivasi dari diri wirausahawan tersebut. Dengan semangat yang tinggi untuk bisa menghasilkan kualitas jenang yang bagus maka akan meningkatkan tingkat penjualan juga.

b. Kreativitas Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Ketika suatu usaha telah berjalan tanpa ada terobosan baru melalui kreativitas biasanya akan mengalami masa yang stagnan dalam hal penjualan. Oleh karena itu kreativitas yang tinggi ini akan memacu wirausaha untuk mengembangkan usaha. Untuk usaha UMKM jenang wirausahawan berusaha keras untuk menghasilkan produk yang maksimal. hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aneka rasa jenang yang ditawarkan. Selain kreativitas dari sisi produk, kreativitas wirausahawan dalam hal ini berupa sistem pemasaran. Wirausahawan saat ini sangat memanfaatkan media online untuk memasarkan produk jenang. Berbeda dengan zaman dahulu untuk memasarkan jenang masih menggunakan pemasaran tradisional. Selain rasa dan sistem pemasaran, kreativitas wirausahawan ini bisa dilihat dari kemasan jenang. Dari berbagai macam kreativitas yang telah dilakukan oleh wirausahawan jenang itu menyebabkan tingkat penjualan yang tinggi. Sentral jenang juga di jual dekat dengan tempat wisata. Tempat wisata yang terkenal di Kudus misalnya Makam Sunan Muria, Makam Sunan Kudus. Dengan menggunakan sistem pemasaran yang mendekati tempat wisata akan mendongkrak penjualan jenang. Dengan kata lain tingkat kreativitas yang tinggi oleh wirausahawan menunjukkan tingkat keberhasilan wirausaha UMKM Jenang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Agustina (2013), Dewi. *et. al* (2015), Sukirman (2012), Hadiyati (2011), Rifqi Hapsah (2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1). Motivasi berpengaruh positif terhadap kewirausahaan UMKM, 2). Kreativitas berpengaruh positif terhadap kewirausahaan UMKM.

2. Saran

Saran penelitian untuk penelitian yang akan datang sebagai berikut : 1). Menambah variabel independen yang diteliti misalnya : inovasi, modal usaha, strategi pemasaran, 2). Objek penelitian tidak hanya sebatas usaha jenjang bisa menggunakan objek kerajinan tangan, 3). Menambah sampel yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma B. 2011. *Kewirausahaan*. Jakarta : Alfabeta
- Agustina, Siwi, Tri. 2013. Perilaku Inovatif dan Keberhasilan Usaha Wanita Pedagang Etnis Jawa di Surabaya. Surabaya : *Jurnal Universitas Airlangga*.
- Andari Ressa. 2011. Pengaruh kompetensi pengusaha, skala usaha dan saluran pemasaran terhadap keberhasilan usaha (survey pada industri bawang goreng di kabupaten kuningan). *Skripsi*. UPI Bandung
- Baldacchino. 2008. "Enterpreneurial Creativity and Innovation". *The First International Conference on Strategic Innovation and Future Creation*. University of Malta.
- Dewi Kusumua Rahman, Sri Wahyu Lelly Hana Setyani, Chairul Saleh. 2015. Pengaruh Kreativitas dan Perilaku Inovatif terhadap Keberhasilan Usaha Industri Melalui Usaha Sebagai Variabel Mediasi. Banyuwangi : *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- DwiBenedictaPrihatin, Riyanti. 2003. *Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*. Jakarta : Grasindo.
- Evans, James R. 1994. *Berpikir Kreatif dalam Pengambilan Keputusan dan Manajemen*. Bumi Aksara : Jakarta
- Frinces, heflin. 2004. *Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis*. Cetakan Pertama. Penerbit Darusalam : Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hadiyati, E. 2011. Kreativitas dan Berpengaruh terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 13 (1) hlm 8-15*

- Hasibuan. M. S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Purnama, Chamdan. 2010. *Motivasi dan Kemampuan Usaha dalam Meningkatkan Keberhasilan Usaha Industri Kecil*. Jurnal. Surabaya. Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Al-Anwar Mojokerto.
- Rahmawati, Soenarto, Anastasia RS, Lalu Edy HM, Sujadi RH, Arif RH, 2016. *Bisnis Usaha Kecil Menengah, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen Pemasaran*. Edisi Pertama . Cet. Ke-1. Ekuilibria : Yogyakarta
- Rifqi Hapsah. 2013. Hubungan Antara Self Efficacy dan Kreativitas dengan Keberhasilan Berwirausaha. *Jurnal Character Volume 02 Nomor 02*. Universitas Negeri Surabaya
- Robbins, Stephen. 2002. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Alih Bahasa Hadyana Pujatmaka dan Benyamin Molan. PT. Prehallindo : Jakarta.
- Samir. 2005. *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2010. *Research Method for Business : A Skill Building Approach*. Edisi 5. John Willy & Sons. New York
- Stoner, James At, Edward Freeman, Daniel Gilbert. 1996. *Manajemen Sixth Edition*. Prentice-Hall, Inc. New Jersey.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta
- Sukirman. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja Karyawan terhadap Pengembangan Kewirausahaan Usaha Kecil Jenang Kudus di Kabupaten Kudus. Salatiga : *Proceeding for Call Paper Pekan Ilmiah Dosen FEB-UKSW, 14 Desember 2012*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*
- Zimmerer, W. 2001. *Entrepreneurship and The New Ventura*. New Jersey. Prentice Hall International Inc.

LAMPIRAN

Tabel 4
Uji Validitas dan Reliabilitas

	<i>Cronbachs Alpha</i>	<i>Sig</i>
Motivasi	<i>0,621</i>	<i>0,00</i>
Kreatifitas	<i>0,510</i>	<i>0,00</i>

Sumber: Ouput SPSS, 2016

Tabel 5
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Y
N		72
Normal Parameters(a,b)	Mean	23,9861
	Std. Deviation	2,21705
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,093
	Negative	-,093
Kolmogorov-Smirnov Z		,789
Asymp. Sig. (2-tailed)		,563

a Test distribution is Normal.
 b Calculated from data.

Sumber: Ouput SPSS, 2016

Tabel 6
Uji Multikolonieritas

	Tolerance	VIF
Motivasi	<i>0,537</i>	<i>1,153</i>
Kreativitas	<i>0,350</i>	<i>1,149</i>

Variable dependent : Keberhasilan

Sumber: Ouput SPSS, 2016

Tabel 7
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,315	1,859		5,012	,000

x1	,330	,061	,502	5,372	,000
x2	,200	,057	,328	3,508	,001

Sumber: Ouput SPSS, 2016

Tabel 8
Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,692(a)	,478	,463	1,62438

a Predictors: (Constant), Motivasi,Kreativitas

b Dependent Variable:Keberhasilan

Sumber: Ouput SPSS, 2016

Tabel 9
Uji F- Test
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	166,922	2	83,461	31,631	,000(a)
	Residual	182,064	70	2,639		
	Total	348,986	72			

a Predictors: (Constant), Motivasi,Kreativitas

b Dependent Variable: Keberhasilan

Sumber: Ouput SPSS, 2016

Tabel 10
Uji T- Test

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant	9,315	1,859		5,012	,000		
	x1	,330	,061	,502	5,372	,000	,868	1,153
	x2	,200	,057	,328	3,508	,001	,788	1,149

a Dependent Variable: Y

Sumber :Output SPSS,2016

CYBER PUBLIC RELATIONS DAN PENGUATAN POSISI HUMAS DI PERGURUAN TINGGI

Narayana Mahendra Prastya¹ & Mutia Dewi²

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya,
Universitas Islam Indonesia

² Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya,
Universitas Islam Indonesia
Email: narayana@uii.ac.id

ABSTRAK

Cyber public relations merupakan istilah tentang praktek kerja public relations dengan memanfaatkan teknologi internet dalam aktivitas kehumasan. Salah satu aktivitas kehumasan adalah branding. Branding adalah upaya mengkomunikasikan identitas diri sebuah organisasi kepada masyarakat.

Penelitian ini hendak melihat pemanfaatan website resmi organisasi sebagai media untuk menyampaikan pesan organisasi berkaitan dengan branding. Organisasi yang dipilih adalah lembaga pendidikan tinggi. Bagi lembaga pendidikan tinggi, aktivitas branding merupakan hal penting di tengah persaingan global. Objek penelitian adalah pernyataan-pernyataan resmi yang terdapat di website resmi Universitas Islam Indonesia (www.uui.ac.id) periode Januari 2014-Desember 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan resmi masih didominasi oleh pernyataan dari pimpinan struktural universitas, informasi masih didominasi acara-acara yang sifatnya seremonial, serta masih terlalu terpaku pada aspek-aspek tertentu saja. Informasi-informasi tersebut kurang mendukung upaya untuk melakukan branding.

Dari hasil penelitian, penulis kemudian membahas dengan melakukan kajian pustaka dan menyimpulkan bahwa dalam penggunaan media berbasis internet dalam aktivitas branding, humas universitas perlu diberi peran lebih dari sekadar teknis komunikasi. Humas universitas sebaiknya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan kepada jajaran top management berkaitan dengan strategi branding.

Kata kunci: branding, cyber public relations, humas perguruan tinggi

ABSTRACT

Cyber public relations is a term of the practice of public relations work by utilizing internet technology in public relations activities. One kind PR activity is branding. Branding is an activities to communicate the identity of an organization to the public.

This study aims to know about the use of the official website of the organization as a medium to convey messages related to the organization's branding. The selected organization is an institution of higher education. For higher education institutions, branding activity is important in global competition. The object of research is the official statements posted in the official website of the Islamic University of Indonesia (www.uui.ac.id) in the period January 2014-December 2014.

The results showed that the official statement is dominated by a statement from the top management of the university, majority of the statements contents is ceremonial event, and dominated by particular issue. This condition does not support efforts to do branding.

From the results, the authors then concluded that the use of Internet-based media in the activities of branding, public relations in the university should be involved in the decision making process and provide input to the ranks of top management related to the branding strategy; not only as communication technician. This conclusion came from literature review about the public relations role related to cyber public relations

Keywords : branding, cyber public relations, university public relations

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi praktek-praktek dalam bidang kerja komunikasi, termasuk hubungan masyarakat (selanjutnya ditulis humas). Dalam konteks humas, media berbasis internet menyediakan saluran tambahan untuk berkomunikasi dengan target publik (Franklin, *et.al.* 2009). Media berbasis internet membuat organisasi dapat menyebarkan informasi dengan cepat dan segera, menjadikan komunikasi bersifat dua arah, meruntuhkan paradigma kontrol pesan, dan menciptakan bentuk baru dalam memonitor dan menganalisis media (Dewa Broto, 2014; Grunig, 2009; Macnamara, 2010)

Dengan mengoptimalkan potensi media berbasis internet maka praktik PR akan lebih mendunia, lebih strategis, semakin bersifat komunikasi dua arah dan interaktif, simetris atau dialogis dan lebih bertanggungjawab secara sosial. Hal ini cukup dapat mendasari bahwa pada era baru ini media sosial dapat dijadikan sebagai salah satu media yang digunakan dalam strategi PR untuk berkomunikasi dengan publiknya (Grunig, 2009). Pemanfaatan media berbasis internet dalam aktivitas kehumasan biasa disebut *cyber public relations*.

Salah satu aktivitas *cyber public relations* adalah *branding* organisasi. *Branding* pada intinya adalah mengkomunikasikan identitas diri organisasi kepada masyarakat. Manfaat branding di antaranya organisasi dapat memperoleh kredibilitas lebih, mendukung aktivitas promosi, serta membentuk konstruksi citra organisasi (Rohman, 2010: 39).

Salah satu organisasi yang memerlukan *branding* adalah perguruan tinggi. Menurut sejumlah ahli (dalam Waeraas & Solbakk, 2009 : 449), dewasa ini *branding* tengah naik daun di dunia perguruan tinggi akibat kompetisi antar perguruan tinggi, baik itu di tingkat nasional atau pun tingkat global.

Agar aktivitas branding dapat berlangsung maksimal, maka sebaiknya humas perguruan tinggi (atau divisi yang bertanggungjawab dalam *branding*) menempati posisi yang memungkinkan untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dan/atau pengambilan kebijakan berkaitan dengan *branding* organisasi (Rohman, 2010). Namun pada umumnya, posisi humas berada di level yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang dikelola oleh humas perguruan tinggi menjadi terbatas (Ilmiati, 2016).

Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana aktivitas *branding* dengan memanfaatkan media berbasis internet oleh perguruan tinggi. Objek penelitian yang dipilih adalah Universitas Islam Indonesia. Data penelitian berdasarkan isi pesan yang terdapat di website resmi Universitas Islam Indonesia (www.uui.ac.id) di periode Januari hingga Desember 2014. Isi pesan tersebut kemudian dikelompokkan dalam kategori Values, Inovation, dan Perfection – berdasarkan identitas diri yang dimiliki oleh UII.

Dengan melihat kecenderungan isi pesan, kemudian peneliti menarik kesimpulan awal dengan memberikan penilaian bagaimana aktivitas branding tersebut dilakukan. Dari kesimpulan awal tersebut, peneliti kemudian membahas bagaimana sebaiknya posisi humas perguruan tinggi dalam aktivitas *branding*.

TINJAUAN PUSTAKA

Arti Penting Branding bagi Perguruan Tinggi

Seperti halnya perusahaan, perguruan tinggi hendaknya menyadari bahwa salah satu aset *tangible* (nyata) mereka yang paling berharga adalah *brand* yang mereka miliki (Muntean, *et.al.*, 2009: 1068). Itu sebabnya aktivitas *branding* sangat diperlukan oleh universitas, terlebih lagi apabila mengingat dengan semakin banyaknya universitas atau perguruan tinggi yang bermunculan.

Identitas organisasi merupakan titik awal bagi sebuah organisasi untuk melakukan aktivitas *branding*. Identitas tersebut bisa merupakan karakter –baik itu yang telah lama melekat atau karakter baru--, identitas, nilai-nilai mendasar lainnya, atau aspek tertentu misalkan ciri khas sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan (Rohman, 2010; Waeraas & Solbakk, 2009).

Pemanfaatan Website Resmi sebagai Sarana Branding Organisasi

Branding merupakan upaya untuk mengkomunikasikan identitas organisasi. Dalam mengkomunikasikan tersebut, maka organisasi melakukan usaha presentasi diri. Menurut Luik (2011: 118-126), media berbasis internet dapat menjadi sarana bagi organisasi untuk melakukan presentasi diri. Presentasi diri adalah tindakan menampilkan diri untuk mencapai sebuah citra diri yang diharapkan. Dalam mempresentasikan diri, pengguna harus mengatur penampilan mereka. Apa yang dipublikasikan atau konten dalam media sosial harus melalui standar editorial diri yang dimiliki. Sejumlah cara untuk melakukan presentasi diri yakni *ingratitude*, *competence*, *intimidation*, *exemplification*, dan *supplication*

Website resmi organisasi merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi sebagai sarana *branding*. Sebuah studi menunjukkan bahwa *website* dapat membentuk hubungan yang kuat antara organisasi dengan publiknya. Namun begitu, *Website* juga memiliki kelemahan karena dipandang terlalu kaku, formal, eksklusif, jarang diperbarui. Sebagian besar situs korporat hanya menyerupai laporan tahunan, berisi statistik, kaku, dan muluk-muluk. Tidak ada satu pun bagian yang menggambarkan dengan jelas tentang karakter perusahaan atau pun pemimpinnya (Idris, 2010: 233-235).

Branding dan Posisi Humas Perguruan Tinggi

Humas merupakan bagian penting dalam aktivitas branding perguruan tinggi. Agar peran humas dapat berjalan maksimal, maka sebaiknya humas menempati struktur organisasi di posisi koalisi dominan, sehingga humas dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, maka humas perguruan tinggi harus menunjukkan kemampuan mereka. Di sisi lain, pimpinan universitas harus memahami pentingnya peran PR dalam aktivitas branding (Rohman, 2010: 47).

Terdapat enam karakteristik tugas public relations professional di perguruan tinggi yaitu meliputi (Widyaningsih, dalam Ilmiati, 2016: 69):

- a. Mampu membangun dan memelihara citra positif perguruan tinggi.
- b. Mampu membangun opini publik yang mendukung kepentingan organisasi
- c. Mampu memberi masukan untuk penyusunan kebijakan perguruan tinggi yang berbasis komunikasi
- d. Mampu mengemas dan menyalurkan informasi secara cepat dan akurat
- e. Mampu menjembatani kepentingan perguruan tinggi dengan stakeholder internal dan eksternal
- f. Mampu menangani krisis reputasi di perguruan tinggi

Dalam penelitiannya mengenai peran humas dalam konstruksi citra perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Ilmiati (2016) menyimpulkan bahwa humas UAD cenderung melakukan peran-peran dalam tataran teknis. Secara lingkup yang lebih luas pelaksanaan peran public relations UAD hanya berada sebagai pendukung proses internasionalisasi melalui publikasi, bukan sebagai pengelolaan citra internasional UAD. Pada kenyataannya pimpinan masih menempatkan humas sebagai sebatas publikasi dan hubungan dengan media..

Dalam struktur organisasi, humas justru diletakkan pada posisi yang cukup rendah, yakni tiga tingkat di bawah rektor, setelah wakil rektor dan kepala biro. Hal tersebut tentu membuat informasi yang dikelola humas UAD menjadi terbatas (Ilmiati, 2016: 75).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah informasi yang terdapat pada *Website* www.uui.ac.id, khusus pada menu berita yang berbahasa Indonesia. Informasi yang diteliti adalah informasi pada periode Januari 2014-Desember 2014.

Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan dalam dimensi *values*, *innovation*, dan *perfection*. *Values* berarti informasi tentang kegiatan-kegiatan pengabdian, *innovation* berarti

informasi tentang kegiatan-kegiatan yang menunjukkan keunggulan UII, dan *perfection* merupakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan risalah Islamiyah UII (*Buku IIIB Borang Institusi FPSB UII*, 2013).

Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan dalam dimensi *values*, *innovation*, dan *perfection*. *Values* berarti informasi tentang kegiatan-kegiatan pengabdian, *innovation* berarti informasi tentang kegiatan-kegiatan yang menunjukkan keunggulan UII, dan *perfection* merupakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan risalah Islamiyah UII (*Buku IIIB Borang Institusi FPSB UII*, 2013). Definisi dari tema-tema tersebut terdapat pada Tabel 1.

Beita-berita dari *Website* UII tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam *coding sheet* dengan kategori narasumber yang terdapat dalam berita, jenis kegiatan, kategori kegiatan, dan dimensi (Lihat Tabel 2). Setelah itu berita-berita tadi dianalisis dalam tabel distribusi frekuensi, untuk mengetahui presentase berita dalam satu tahun (Januari -Desember 2014)

Tabel 1. Dimensi, Definisi, dan Kategori Values, Inovation, Perfection

Dimensi	Definisi	Kategori
Values	Informasi tentang kegiatan pengabdian	- Iman dan takwa - Akhlakul Karimah - Maslahat <i>oriented</i> (memberikan manfaat bagi pihak lain)
Innovation	Informasi tentang keunggulan UII	- Intelektual - Visioner - Perkembangan yang terus menerus (<i>continous improvement</i>) - Semangat
Perfection	Informasi berkaitan dengan risalah Islamiyah UII	- Profesional - Leadership - Totalitas - Disiplin - Loyalitas

Tabel 2. Coding Sheet Analisis Data

Tanggal pemuatan	Judul	Narasumber yang terdapat dalam berita	Jenis kegiatan	Kategori (sesuai dengan yang terdapat di tabel 1)	Dimensi (sesuai dengan yang terdapat di tabel 1)
------------------	-------	---------------------------------------	----------------	---	--

TEMUAN PENELITIAN

Pengertian *brand* menurut Kevin Lane Keller adalah nama, *term*, tanda, simbol, desain, atau kombinasi antara kelima hal tersebut yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan dalam rangka menunjukkan pembeda dibandingkan dengan kompetitor lainnya (dalam Rohman, 2010: 37). Salah satu tugas humas perguruan tinggi adalah membangun dan menjaga citra baik organisasi (Widyaningsih, dalam Ilmiati, 2016: 69).

Media berbasis internet dapat menjadi sarana organisasi untuk melakukan presentasi diri, yakni tindakan menampilkan diri untuk mencapai sebuah citra diri yang diharapkan. Presentasi diri yang terjadi di dalam *new media* akan berbeda-beda berdasarkan jenis mediumnya. Jika medium tersebut adalah *homepage* pribadi, maka presentasi diri akan terjadi lebih konstan dan tetap. Hal ini disebabkan frekuensi untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam medium tersebut tidak terlalu tinggi. Kondisi yang berbeda muncul ketika mediumnya adalah twitter, microblog yang mana frekuensi untuk melakukan perubahan di dalam medium tersebut cukup dinamis dan interaktif (Luik, 2011).

Di sepanjang tahun 2014 (bulan Januari - Desember) *Website* resmi UII memuat 397 berita yang terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti wisuda, seminar, sumpah profesi, ujian promosi doktor, kuliah umum, kompetisi di bidang akademik, menerima kunjungan dari pihak lain, lawatan UII ke pihak lain, kerjasama yang dijalin UII dengan berbagai instansi, prestasi yang dicapai oleh civitas akademika UII (dosen, karyawan, staf), *workshop* berkaitan dengan keilmuan, *workshop* berkaitan dengan pengeolaan organisasi UII, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ceramah atau pelatihan, acara-acara internal UII, kegiatan yang diisi oleh alumni, dan sebagainya.

Dari isi pesan yang terdapat dalam temuan penelitian, maka UII menggunakan strategi *competence* dalam pesan-pesan yang disampaikan dalam *Website* www.uii.ac.id. Menurut Luik (2011: 124-126) tujuan dari strategi *competence* adalah membentuk identitas sebagai sosok yang terampil dan berkualitas. Karakteristik umum meliputi pengakuan terhadap kemampuan, prestasi, kinerja, dan kualifikasi.

Apabila dikelompokkan dalam kategori, maka ada tiga kategori yang tercakup yakni *masalahat oriented*/bagaimana UII memberikan manfaat pada pihak lain (49%), intelektual

(42%), dan perkembangan yang terus menerus (9%). Melalui ketiga kategori tersebut, UII bermaksud menunjukkan tingkat *competence* mereka kepada publik..

Sementara jika masuk dalam kategori dimensi, maka dimensi identitas diri UII yang ter-cover yakni Values dan Innovation. *Values* sebesar 28% dan *Innovation* sebesar 72%. *Values* menginformasikan tentang pengabdian UII bagi masyarakat, sementara *innovation* menginformasikan keunggulan UII. Besarnya presentase dimensi *innovation* menunjukkan UII melalui *Website* resminya ingin menunjukkan kepada publik tentang keunggulan-keunggulan mereka di bidang akademik dan organisasi.

Dari temuan penelitian maka terlihat dominasi isi pesan yang membuat kategori-kategori lain serta dimensi lain yang tidak ter-cover. Dari dimensi *values*, terdapat dua kategori yakni akhlakul karimah dan iman dan takwa masih belum ter-cover dalam tema-tema berita di *Website* www.uui.ac.id. Sementara dari dimensi *innovation*, ada dua kategori yang belum muncul yakni visioner dan semangat.

Dari segi narasumber berita dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar yakni dari pihak internal UII dan eksternal UII. Pihak internal adalah (1) pimpinan universitas UII, (2) pihak Yayasan Badan Wakaf UII, (3) pimpinan fakultas di UII, (4) pimpinan program studi/jurusan di UII, (5) dosen UII, (6) alumni UII, (7) pusat studi, (8) pakar agama Islam, (9) mahasiswa – baik sarjana mau pun pascasarjana, dan (10) direktorat/unit kerja di UII.

Ada pun dari pihak eksternal mencakup: (1) pemerintah, (2) asosiasi perguruan tinggi, (3) asosiasi profesi, (4) lembaga pendidikan lain, (5) praktisi, (6) akademisi dari perguruan tinggi lain, (7) pakar agama islam.

Dalam satu berita, bisa terdapat dua atau lebih narasumber. Dari hasil penelitian, narasumber berita di *Website* resmi UII didominasi oleh pimpinan universitas (total 202 kali muncul/ 25,73 persen). Selanjutnya posisi "lima besar" narasumber berita diikuti oleh peneliti internal (86 kali/ 10,9 persen), dosen UII (60 kali/ 7,6 persen), pimpinan fakultas (47 kali/ 5,98 persen), dan direktorat atau unit kerja di UII (40 kali/5,09 persen). Artinya, posisi lima besar untuk narasumber diisi dari pihak internal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasumber dari manajemen universitas (pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan direktorat) sangatlah banyak. Sementara dari kalangan keilmuan, cukup sedikit. Di kalangan keilmuan, selain dosen UII dan penelitian internal UII juga terdapat narasumber dari pusat studi internal UII, yakni pusat-pusat studi yang dikembangkan dan dikelola oleh masing-masing program studi di UII (misal terdapat Pusat Studi Gender, Pusat Studi Media Alternatif, Pusat Studi Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagainya). Jumlah berita yang menggunakan narasumber dari pusat studi UII adalah 24 (3,05

persen). Artinya jika dijumlahkan pun, jumlah narasumber dari kalangan akademisi UII presentasenya tak mencapai 25 persen.

Bagaimana dari segi identitas ke-Islam-an yang disandang oleh UII? Jumlah narasumber dari pakar agama Islam (baik itu internal mau pun eksternal) adalah 18 (2,29 persen). Dari segi narasumber memang jelas sangat sedikit. Tetapi perlu pula diingat bahwa tema-tema ke-Islam-an dapat disampaikan oleh seluruh *civitas akademika* UII. Artinya, sedikitnya jumlah narasumber dari pakar agama Islam tidak terlalu berpengaruh.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Memang, tidak ada yang keliru apabila UII menampilkan keunggulan-keunggulan, prestasi-prestasi, capaian-capaian di bidang akademik dan organisasi. Namun, pencapaian-pencapaian di bidang akademik dan organisasi merupakan hal yang juga dilakukan kebanyakan perguruan tinggi di seluruh dunia. Kondisi ini sesuai perlu dikritisi. Upaya universitas menojolkan level akreditasi, peringkat universitas versi..., klaim sebagai *world class university*, *world research university*, dan sebagainya, hanyalah upaya perguruan tinggi untuk melakukan konformitas terhadap lingkungan institusional. Status-status tersebut merupakan standar yang ditetapkan di dunia pendidikan tinggi di mana pun yang di sisi lain malah membuat “ruang gerak” perguruan tinggi untuk menampilkan ciri khas yang mereka miliki menjadi terkungkung (Waeraas & Solbakk, 2009).

Padahal masing-masing perguruan tinggi memiliki ciri khas yang terdapat dalam identitas diri mereka. Di Jerman misalnya, mengambil contoh lembaga pendidikan tinggi ilmu komunikasi, masing-masing menampilkan ciri khas kajian mereka seperti ilmu publisistik; kajian isi media dan sistem media; kajian ilmu komunikasi dan segi teknik media sekaligus memperhatikan aspek ilmu ekonomi dan ilmu hukum; ilmu kajian media dari perspektif budaya; dan lain-lain. Sementara di Indonesia, secara ragam perspektif dapat dikatakan bahwa kajian ilmu komunikasi terkesan terbatas sebagai satu objek kajian khususnya bidang sosial atau pun politik (Wahyuni, 2012). Jika contoh di Jerman tersebut dibawa ke konteks universitas, maka tiap universitas juga memiliki ciri khas masing-masing. Namun begitu UII lebih cenderung melakukan konformitas dengan menampilkan pencapaian-pencapaian sesuai dengan standar internasional tersebut.

Kondisi ini mengesankan bahwa berita-berita *Website* UII bersifat “elitis”. Hal ini dapat dipahami sebagai kelemahan *Website* secara umum. Menurut Idris (2010) kekurangan dari *Website* adalah hanya memuat informasi yang sesuai dengan kepentingan perusahaan, terlalu kaku, fomal, dan eksklusif. Sebagian besar situs korporat hanya menyerupai laporan tahunan,

berisi statistik, kaku, dan muluk-muluk. Tidak ada satu pun bagian yang dalam *Website* yang dengan jelas menggambarkan karakter perusahaan.

Selain itu, dominasi narasumber dari pihak pimpinan universitas juga kurang mendukung aktivitas *branding*. Dalam konteks perguruan tinggi, pihak internal –dalam hal ini mahasiswa, staf pengajar, karyawan, dan fakultas (Muntean, *et.al.*, 2009; Rohman, 2010) perlu berperan aktif dalam aktivitas *branding* tersebut. Bagaimana dengan narasumber dari mahasiswa, karyawan dan fakultas? Jumlah narasumber dari kalangan mahasiswa (sarjana dan pascasarjana) adalah 38 (4,84 persen). Dari jumlah tersebut, isi berita masih berbagi, yakni mengenai prestasi mahasiswa dan pernyataan mahasiswa dalam posisi mereka sebagai panitia acara. Sedangkan untuk pihak karyawan dan fakultas, lebih banyak diwakili oleh jajaran pimpinan struktural.

Dari temuan penelitian, peneliti berasumsi bahwa kekurangan dalam aktivitas branding tersebut karena posisi humas dalam struktur organisasi yang belum berada dalam --atau setidaknya dekat -- dengan *top management*. *Top management* adalah jajaran pengambil kebijakan organisasi. Menurut Rohman (2010), agar dalam aktivitas branding perguruan tinggi humas dapat berperan dengan maksimal, maka sebaiknya humas menempati struktur organisasi di posisi koalisi dominan, sehingga humas dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Ilmiati, 2016).

Ketika humas hanya menempati posisi yang rendah maka mereka hanya berperan dalam menyampaikan pesan. Padahal pesan yang disampaikan belum tentu menarik bagi masyarakat. Pesan-pesan yang bersifat elitis, hanya seputar kepentingan organisasi, dan hanya pernyataan dari pimpinan organisasi, jelas kurang menarik bagi masyarakat.

Dalam aktivitas branding, humas sebaiknya menjalani peran manajerial. Ada tiga peran yang berkaitan dengan peran manajerial yakni : (1) *expert prescribers*, (2) *problem solving facilitators*, dan (3) *communication facilitators*. Sebagai seorang *expert prescriber*, praktisi humas dipahami sebagai ahli oleh pihak manajemen dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi organisasi dengan pengalaman dan ketrampilan komunikasi yang dimiliki untuk menemukan solusi bagi penyelesaian masalah kehumasan yang dihadapi sebuah organisasi; Dalam peran *Problem Solving Process Facilitator*, praktisi kehumasan merupakan bagian dari tim manajemen yang bekerjasama dengan bagian lain membantu organisasi dan para pemimpinnnya melalui proses penyelesaian masalah secara rasional; Sebagai *communication facilitator*, praktisi humas membantu manajemen dengan menciptakan kesempatan-kesempatan untuk mendengar apa kata publik dan menciptakan peluang agar publik mendengar apa yang diharapkan manajemen (Grunig, 2009).

Secara lebih luas, dalam menggunakan media berbasis internet sebaiknya humas tidak hanya menjadi peran teknis komunikasi tetapi juga peran manajerial, di mana humas terlibat dalam pengambilan keputusan strategis organisasi serta memberikan masukan kepada jajaran manajemen atas, terlibat dalam peran manajemen strategis organisasi. Kehadiran media sosial memungkinkan PR untuk terlibat dalam peran manajemen strategis organisasi (Grunig, 2009; McDonald dan Hebbani, 2011).

Dengan menjalani peran manajerial dalam branding, maka humas dapat berperan mulai dari pesan pemilihan tema-tema yang akan dipublikasikan, menyusun pesan dengan bahasa yang menarik serta memilih narasumber yang hendak ditampilkan, serta memberikan masukan kepada jajaran manajemen atas mengenai pesan-pesan apa saja yang sekiranya dapat menarik masyarakat.

Untuk dapat menuju pengakuan dari top management agar humas dipercaya menjalani peran manajerial, maka humas perguruan tinggi perlu membuktikan diri tentang kualitas kerja mereka (Rohman, 2010: 47). Humas yang memiliki kompetensi dalam menggunakan media sosial mendapatkan pengakuan dalam proses pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan (Diga dan Kelleher, 2009). Itu sebabnya, peran manajerial humas universitas sebaiknya tidak hanya dalam tahap penyusunan pesan, tetapi juga tahap evaluasi pesan. Humas universitas perlu secara berkala melakukan evaluasi tentang respon publik terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh organisasi. Publik perguruan tinggi dapat berasal dari kalangan alumni, perusahaan atau profesional, media, pemerintah, orang tua mahasiswa, dan masyarakat umum (Rohman, 2010: 45). Hasil evaluasi nantinya menjadi masukan bagi top management dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan komunikasi (Widyaningsih, dalam Ilmiati, 2016: 69).

KESIMPULAN

Website resmi organisasi –sebagai salah satu bentuk media berbasis internet—semakin memudahkan komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Dengan adanya website resmi, maka organisasi dapat menyampaikan pesan secara lebih cepat dan memungkinkan untuk menjangkau khalayak lebih luas. Website resmi juga membuat organisasi dapat menyampaikan pesan sesuai dengan kepentingan mereka. Pesan yang disampaikan dapat disusun dengan konten, bahasa, serta dapat dipublikasikan sesuai dengan waktu yang telah organisasi tetapkan.

Dengan kelebihan tersebut, maka website resmi organisasi dapat menunjang aktivitas-aktivitas komunikasi kehumasan sebuah organisasi. Salah satu aktivitas tersebut –yang menjadi fokus dalam makalah ini -- adalah branding.

Agar kelebihan website dapat dimanfaatkan organisasi, maka pengelola konten website perlu melakukan adaptasi dalam tugasnya. Pada umumnya tanggungjawab berkaitan dengan aktivitas komunikasi dalam sebuah organisasi diemban oleh unit kerja humas. Itu berarti, humas perlu melakukan adaptasi saat mengelola website. Dalam menyampaikan informasi melalui website, tidak bisa lagi dilakukan dengan strategi kerja seperti ketika menyampaikan pesan kepada media massa/wartawan.

Namun peran humas tidak semata ditentukan oleh kompetensi dari humas itu sendiri. Jajaran pimpinan (*top management*) organisasi perlu memberikan kepercayaan lebih dari humas untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pesan yang akan disampaikan. Artinya, humas tidak sekadar menjalankan aspek teknis komunikasi, yakni sekadar menyampaikan pesan saja.

Dalam aktivitas *branding* menggunakan website resmi oleh Universitas Islam Indonesia, terlihat bahwa pesan yang disampaikan masih terlalu didominasi kegiatan-kegiatan seremonial, narasumber terlalu didominasi pimpinan struktural, sehingga hal tersebut membuat pesan yang disampaikan menjadi kurang menarik. Alhasil, upaya untuk menunjukkan identitas diri melalui informasi yang dipublikasikan di website resmi, menjadi kurang maksimal.

Aktivitas *branding* organisasi perguruan tinggi memerlukan penguatan posisi humas di struktur perguruan tinggi. Penguatan tersebut bertujuan agar pesan-pesan yang disampaikan dapat memiliki kandungan informasi yang mendukung tujuan *branding* itu sendiri.

SARAN BAGI PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Di bagian ini, penulis memberikan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema sejenis:

1. Dari segi saluran komunikasi, penelitian ini baru sebatas membahas website resmi guna menunjang aktivitas branding. Penelitian selanjutnya dapat membahas pemanfaatan media berbasis internet yang lain, yakni media sosial (misalkan Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan lain-lain) dalam aktivitas branding organisasi. Media sosial memungkinkan organisasi untuk menyampaikan pesan dengan bahasa dan kalimat yang lebih "luwes" (tidak formal seperti website), serta memungkinkan untuk melakukan interaksi dan komunikasi dua arah dengan public
2. Dari segi tema pesan, penelitian ini baru membahas satu aktivitas yakni *branding*. Untuk penelitian selanjutnya dapat membahas pemanfaatan media berbasis internet dalam aktivitas kehumasan yang lain, misalkan hubungan dengan media, berkomunikasi saat krisis, menyampaikan kegiatan tanggungjawab sosial (CSR).

- Objek penelitian ini merupakan isi pesan berkaitan dengan branding. Dari isi pesan tersebut kemudian dibahas menggunakan kajian pustaka berkaitan dengan peran humas dalam branding dan peran humas dalam menggunakan media sosial. Oleh karenanya, dalam riset selanjutnya dapat meneliti di unit kerja humas mengenai manajemen kehumasan dalam pemanfaatan media berbasis internet.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini menggunakan skema dana Penelitian Dosen Pemula dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia, tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewa Broto, G. S (2014) *The PR: Tantangan Public Relations di Era Keterbukaan Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Franklin, B., Hogan, M., Langely, Q., Mosdell, N., dan Pill, E (2009) *Key Concepts in Public Relations*. London: SAGE
- Grunig, J (2009) "Paradigms of Global Public Relations in an Age of Digitalisation" dalam *PRism* 6(2), hal 1-19. URL: <http://www.prismjournal.org/fileadmin/Praxis/Files/globalPR/GRUNIG.pdf> , diakses 15 November 2012
- Idris, I.K. (2010) "Manajemen Blog Korporat dalam Membentuk Citra Perusahaan: Studi Kasus Blog Perusahaan Jasa Konsultan PR Maverick Indonesia www.maverickid.com ". dalam *Potret Manajemen Media di Indonesia*. (Editor: Diyah Hayu Rahmitasari). Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi UII dan Penerbit Buku Litera
- Ilmiati, N.R. (2016) "Peran Public Relations dalam Konstruksi Citra Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta", dalam *Jurnal Komunikasi dan Realitas Sosial Volume 12 Nomor 12, April* hal.65-81 (ISSN : 2087-2070)
- Luik, J. (2011). "Media Sosial dan Presentasi Diri" dalam *Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi, Edisi Revisi*. (Editor: Fajar Junaedi). Yogyakarta: ASPIKOM, Penerbit Buku Litera, dan Perhumas BPC Yogyakarta
- Macnamara, J. (2010) "Public Communication Practices in The Web 2.0-3.0 Mediascape: The Case for PRevolution" dalam *Prism* 7(3), hal 1-13. http://www.prismjournal.org/fileadmin/Social_media/Macnamara.pdf , diakses 7 November 2012

- McDonald, L. dan Hebbani, A (2011) "Back to the future: Is strategic management (re)emerging as public relations' dominant paradigm?" *PRism* 8(1), hal 1-16. http://www.prismjournal.org/fileadmin/8_1/mcdonald_hebbani.pdf , diakses 27 Januari 2013
- Muntean, A. , Cabulea, L., & Danuleptiu, D. (2009) "The Brand: One of The University's Most Valuable Asset" dalam *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 11(2), hal.1066-1071. <http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1120092/54.pdf>, diakses 3 Maret 2014
- Rohman, A. (2010) "The Roles of Public Relations in University Branding" dalam *Esai-esai Komunikasi*. (Editor: Masduki). Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi UII & Total Media
- Waeraas, A. & Solbakk, M.N. (2009) "Defining the essence of a university: lessons from higher education branding" dalam *High Educ* 57, hal. 449–462. URL: <http://www.mohe.gov.my/portal/images/utama/doc/artikel/2012/02-29/defining%20the%20essense%20of%20a%20university.pdf> , diakses 3 Maret 2014
- Wahyuni, H. I. (2012) "Pendidikan Komunikasi di Jerman: Sebuah Perbandingan Kajian Ilmu Komunikasi di Jerman dan di Indonesia" dalam *Communication Review: Catatan tentang Pendidikan Komunikasi di Indonesia, Jerman, dan Australia*. (Editor : Setio Budi HH). Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Penerbit Buku Litera, dan ASPIKOM.
- (2013) *Buku IIIB Borang Institusi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, 2013*.

KAJIAN KEAMANAN ANTIHIPERTENSI PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK LANJUT USIA DI UNIT HEMODIALISA RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA

Ndaru Setyaningrum¹, Djoko Wahyono², I Dewa Putu Pramantara³

¹*Program Studi Profesi Apoteker FMIPA UII Yogyakarta*

²*Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta*

³*RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta*

**email: ndaru.fazila@gmail.com*

ABSTRAK

Pertumbuhan populasi lanjut usia secara global meningkat paling cepat diantara kelompok usia lain. Populasi lanjut usia berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal dan berbagai komorbiditas akibat proses penuaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kejadian efek samping obat (ESO) dan potensial interaksi obat (IO) antihipertensi pada pasien gagal ginjal kronik (GGK).

Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif terhadap pasien gagal ginjal kronik lanjut usia periode 22 Oktober 2012 – 22 Januari 2013. Kajian efek samping obat menggunakan skala Naranjo dan Interaksi Obat Tatro untuk mengkaji interaksi obat potensial.

Karakteristik 38 subjek penelitian usia < 70 tahun (24 pasien) dan ≥ 70 tahun (14 pasien); jenis kelamin pria (26 pasien) dan wanita (12 pasien); lama hemodialisis < 8 bulan (8 pasien) dan ≥ 8 bulan (30 pasien); penyerta DM (23 pasien) dan non DM (15 pasien). Kajian efek samping obat ditemukan 4 kejadian efek samping obat kategori probable terdiri dari nifedipin (2 kejadian), lisinopril (1 kejadian) dan captopril (1 kejadian). Interaksi obat potensial ditemukan 37,8% terdiri dari interaksi minor 12 kejadian (32,4%) dan interaksi mayor 2 kejadian (5,4%).

Penelitian ini tidak menunjukkan ditemukan efek samping aktual kategori probable 10,8% dan interaksi obat potensial 37,8%.

Kata kunci : ESO, interaksi obat, lanjut usia, GGK

ABSTRACT

The growth of elderly population increase fastest among the other age group. The elderly population been related to decrease renal function and other comorbidity as consequence of aging. The aim of this study is to know how about adverse drug reaction (ADR) and potential interaction of antihypertension drug in chronic kidney disease patient.

This is a descriptive study about elderly patient with chronic kidney disease on period October 22th 2012 – January 22th 2013. This study use Naranjo scale to evaluate ADR and Tatro Drug Interactions Fact to evaluate potential drug interaction.

There were 38 subjects analyzed, age < 70 years old (24 patients) and ≥ 70 years old (14 patients); gender men (26 patients) and women (12 patients); duration hemodialysis < 8 months (8 patients) and ≥ 8 months (30 patients); comorbidity DM (23 patients) and non DM (15 patients). There were probable ADR 4 events (10,8%) consist of nifedipine (2 events), lisinopril (1 event) and captopril (1 event). There were 14 events (37,8%) potential drug interactions consist of minor interaction (12 events) 32,4% and major interaction (2 events) 5,4%.

This study show that there were actual probable ADR 10,8% and potential drug interaction 37,8%.

Keyword : ADR, drug interaction, elderly, CKD

PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi lanjut usia secara global meningkat paling cepat diantara kelompok usia lain. Jumlah penduduk lanjut usia di negara maju diperkirakan mencapai 30% dari keseluruhan populasi pada tahun 2050 (Nobili, dkk., 2011). Seiring dengan peningkatan jumlah populasi lanjut usia maka prevalensi penyakit kronik berhubungan dengan usia seperti hipertensi dan penyakit ginjal kronik juga meningkat (Fischer dan O'Hare, 2010). Beberapa studi menyatakan bahwa prevalensi penyakit ginjal kronik meningkat seiring dengan jumlah usia (Qiu-Li Zhang dan Rothenbacher, 2008; Stevens, dkk., 2010).

Pasien dengan gangguan fungsi ginjal sering mengalami perubahan parameter farmakokinetik seperti absorpsi obat, distribusi, ikatan protein, metabolisme dan ekskresi obat melalui ginjal (Hassan, dkk., 2009). Keadaan pasien lanjut usia dengan gagal ginjal kronik berisiko tinggi mengalami masalah berhubungan dengan pengobatan (Hajjar, dkk., 2007).

Penelitian oleh Hassan, dkk., (2010) menemukan kejadian *adverse drug event* sebesar 159 kasus pada 122 pasien (40,7%) penyakit ginjal kronik di rumah sakit. Penelitian oleh Joshua, dkk., (2007) menemukan spektrum utama *adverse drug reactions* (ADRs) pasien gangguan fungsi ginjal antara lain gagal ginjal akut (22%), hipo/hiperglikemia (13%), supresi sumsum tulang (5%) dan gangguan hepar (4%).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi kejadian efek samping obat dan interaksi obat antihipertensi pada pasien gagal ginjal kronik lanjut usia di Unit Hemodialisis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pengambilan data dilakukan secara prospektif. Pemilihan sampel dilakukan secara *accidental sampling* terhadap pasien gagal ginjal kronik lanjut usia di Unit Hemodialisis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta periode 22 Oktober 2012 sampai 22 Januari 2013.

Setiap subjek uji ditelusur data profil pengobatan sesuai rekam medis kemudian dilakukan wawancara dan pengisian kuesioner. Hasil pengumpulan data kemudian dilakukan kajian keamanan penggunaan antihipertensi untuk mengetahui persentase efek samping dan interaksi obat.

Pengolahan dan analisis data

Pengolahan data profil pengobatan dilakukan dengan mengelompokkan pengobatan berdasarkan indikasi dan penyakit pasien. Selanjutnya jenis obat antihipertensi dilakukan kajian

keamanan meliputi interaksi obat antara antihipertensi dengan obat lain yang digunakan dan efek samping obat menggunakan skala Naranjo untuk mengidentifikasi kejadian merugikan akibat penggunaan obat. Hasil penilaian Naranjo kemudian diklasifikasikan menurut skor dengan ketentuan *definite* (skor ≥ 9), *probable* (skor 5 – 8), *possible* (skor 1 – 4) dan *doubtful* (skor 0).

Untuk mengkaji interaksi obat dilakukan studi literatur kemudian derajat interaksi diklasifikasikan berdasarkan kemaknaan klinis terbagi menjadi 3 kategori antara lain *major*, *moderate* dan *minor*. Suatu interaksi obat disebut *major* jika interaksi obat bermakna klinis negatif secara signifikan sehingga penggunaan bersama obat harus dihindari. Sedangkan *moderate* bermakna secara sedang bermakna klinis sehingga pada kondisi tertentu penggunaan bersama obat perlu dihindari. Merupakan kategori *minor* jika interaksi obat minimal bermakna klinis dengan resiko minimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Subjek Penelitian

Tabel 1. Karakteristik umum subjek penelitian

No	Karakteristik pasien	Kategori	Jumlah (N total = 38 pasien)	Persentase (%)
1	Usia	60 – 69 th	24	63,16
		≥ 70 th	14	36,84
2	Jenis kelamin	Laki – laki	26	68,42
		Perempuan	12	31,58
3	Lama HD	< 8 bulan	8	21,05
		≥ 8 bulan	30	78,95
4	Penyakit penyerta	DM	23	60,53
		Non DM	15	39,47

Keterangan :

HD : hemodialisis; DM : diabetes melitus

Penelitian ini menunjukkan usia kurang dari 70 tahun lebih dominan mengalami gagal ginjal kronik. Hasil ini sesuai dengan Stevens, dkk. (2010) bahwa usia rata – rata pasien menjalani dialisis adalah 65 tahun dan kelompok usia dengan perkembangan jumlah dialisis paling cepat adalah di atas 75 tahun. Berdasarkan penelitian ini jenis kelamin laki – laki juga lebih dominan dibandingkan perempuan. Hasil ini sesuai dengan Silbiger dan Neugarten (2008)

bahwa nefropati membran dan penyakit ginjal kronis lebih rentan pada pria dibandingkan wanita.

2. Profil Pengobatan Antihipertensi

Pemilihan antihipertensi harus mempertimbangkan kondisi komorbiditas, farmakokinetik, dan efek hemodinamik. Secara umum antihipertensi pada sistem renin-angiotensin-bloker, beta bloker, dan calcium channel bloker memberikan efikasi hampir mirip pada pasien dialisis. Rekomendasi pemilihan antihipertensi secara umum didasarkan atas efikasi penurunan tekanan darah, farmakokinetik selama dialisis dan antar waktu dialisis, profil efek samping, efek kardioprotektif dan efek non-kardiovaskular pada pasien dengan komorbiditas (Ekart, dkk., 2011).

Tabel 2. Profil pengobatan hipertensi

No	Profil obat	Jumlah (N)	Persen (%)
1	ARB + CCB + loop diuretik	20	52,63
2	ARB + loop diuretik	5	13,16
3	ARB + CCB	4	10,53
4	ACEI + CCB + loop diuretik	2	5,26
5	ARB + B-bloker + loop diuretik	1	2,63
6	ARB + B-bloker + CCB + loop diuretik	1	2,63
7	Loop diuretik saja	2	5,26
8	ARB saja	1	2,63
9	CCB saja	1	2,63
10	Tanpa terapi farmakologi	1	2,63
Total		38	100

Keterangan : ARB (*Angiotensin Receptor Bloker*); CCB (*Calcium Channel Blocker*); ACEI (*Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor*); B-bloker (*Beta bloker*).

ACE inhibitor dan ARB memiliki beberapa manfaat potensial untuk pasien gagal ginjal kronik dengan komorbiditas. Golongan obat tersebut menurunkan progresivitas gagal ginjal disertai diabetes maupun tanpa diabetes. Selain itu kedua golongan obat mampu menurunkan proteinuria sebagai kondisi yang menyertai gagal ginjal. Selain itu efek ACE inhibitor maupun ARB bermanfaat mencegah penyakit jantung pada pasien risiko tinggi (NKF-KDOQI, 2005).

3. Kejadian Efek Samping Obat Antihipertensi

Sebagian besar studi menunjukkan prevalensi kejadian tidak dikehendaki akibat efek samping obat lebih tinggi pada pasien lanjut usia dibandingkan pasien dewasa (Mandavi, dkk.,

2012). Suatu studi menunjukkan kejadian efek samping obat pada pasien dialisis sebesar 20,7% dari keseluruhan masalah berhubungan dengan pengobatan (Manley, dkk., 2003).

Selama penelitian ditemukan kejadian efek samping obat kategori *probable* untuk nifedipin, lisinopril dan captopril. Makna *probable* ADR menurut Naranjo, dkk., (1981) antara lain merupakan kejadian *reasonable* dan telah diakui akibat paparan obat tetapi tidak dapat dijelaskan secara kuat oleh karakteristik status klinis pasien.

Selama penelitian terdapat keterbatasan dalam menentukan jawaban terhadap beberapa poin Naranjo. Hal ini disebabkan peneliti tidak melakukan penelusuran terkait kadar obat dalam darah. Peneliti juga tidak melakukan intervensi dengan cara pemberian plasebo kepada pasien atau menguji efek dosis terhadap kejadian ADR. Oleh karena itu beberapa poin pertanyaan diberi skor 0 (tidak tahu). Sehingga hasil kemaknaan *probable* ADR kemungkinan dapat berupa *definitely* ADR dengan melakukan penelusuran data secara lebih baik.

Tabel 3. Kejadian efek samping obat

Pasien no.	Obat yang dicurigai	Manifestasi ADR	Analisis naranjo	Jumlah kejadian	Persentase (%)
4, 32	Nifedipin	Lemas	<i>Probable ADR</i>	2	5,4
11	Lisinopril	Batuk	<i>Probable ADR</i>	1	2,7
22	Captopril	Batuk	<i>Probable ADR</i>	1	2,7
Total kejadian efek samping obat				4	10,8

4. Kejadian Interaksi Obat

Tabel 4. Persentase tingkat kemaknaan kajian interaksi obat

Tingkat kemaknaan	Jenis interaksi obat	Jumlah tiap kejadian	Jumlah	Persentase (%)
1	Furosemid vs digoksin	1	1	2,7
2	Diltiazem vs HMG-CoA reduktase	1	1	2,7
3	ACEI vs furosemid	2	2	5,4
4	Diltiazem vs insulin	2	3	8,1
	Alopurinol vs ACEI	1		

5	Furosemid vs aspirin	5	7	18,9
	Nifedipin vs ranitidin	1		
	Nifedipin vs omeprazol	1		
Total kejadian interaksi obat kajian literatur			14	37,8
Jumlah subjek penelitian			38	100

Sebagian besar interaksi obat merupakan tingkat kemaknaan 3, 4 dan 5 sehingga sebagian besar tidak membutuhkan manajemen khusus dalam pengatasan interaksi obat. Namun kejadian interaksi obat dengan tingkat kemaknaan 1 dan 2 dengan total 2 kejadian (5,4%) perlu diwaspadai dengan perhatian khusus terhadap risiko keamanan pasien.

Selama penelitian tidak ditemukan data pencatatan kejadian interaksi obat secara aktual maupun potensial. Kejadian interaksi obat tidak dicatat kemungkinan pasien memang tidak mengalami interaksi obat aktual. Namun jika pasien mengalami kejadian interaksi obat aktual tetapi tidak dilakukan pencatatan tentu hal ini merugikan pasien dan tidak dapat digunakan sebagai sarana peringatan pada pemberian kombinasi obat sejenis untuk pasien lain.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan kejadian efek samping obat sebesar 10,8% dan interaksi obat potensial sebesar 37,8%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekart, R., Sebastjan Bevc, S., Hojs, R., 2011, Blood Pressure and Hemodialysis. www.intechopen.com, diakses tanggal 10 April 2013.
- Fischer, M.J., dan O'Hare, A.M., 2010, Epidemiology of hypertension in the elderly with chronic kidney disease. *Adv Chronic Kidney Dis*. Jul;17(4):329-40.
- Hajjar, E.R., Cafiero, A.C., Hanlon, J.T., 2007, Polypharmacy in Elderly Patients. *AmJ Geriatr Pharmacother*;5:345-351.
- Hassan, Y., Al-Ramahi, R.J., Aziz, N.A., Ghazali, R., 2009, Review Article: Drug Use and Dosing in Chronic Kidney Disease. *Ann Acad Med Singapore*;38:1095-103.
- Hassan, Y., Al-Ramahi, R.J., Aziz, N.A. & Ghazali, R. (2010). Adverse drug events in hospitalized patients with chronic kidney disease. *International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics*, Vol. 48 – No. 9/2010 (571-576).

- Joshua, L., Devi, P.D. & Guido, S. (2007). Adverse drug reactions in nephrology ward inpatients of a tertiary care hospital, *India Journal of Medical Science*, Vol.61, No 10, p.562-569.
- Mandavi, D'Cruz, S., Sachdev, A., Tiwari, P., 2012, Adverse drug reactions & their risk factors among Indian ambulatory elderly patients. *Indian J Med Res*;136,pp 404-410.
- Manley, H.J., Drayer, D.K., Muther, R.S., 2003, Research article Open Access Medication-related problem type and appearance rate in ambulatory hemodialysis patients.*BMC Nephrology* ;4:10.pp 1-7.
- Naranjo, C.A., Busto, U., Sellers, E.M., Sandor, P., Ruiz, I., Robert, E.A., dkk., 1981, A method for estimating the probability of adverse drug reactions.*Clin. Pharmacol. Ther*;30(2).pp 239-245.
- National Kidney Foundation: K/DOQI, 2005, Clinical Practice Guideline for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classifications & Stratification, *Am J Kidney Dis*, 39 (suppl 1).
- Nobili, A., Garattini, S., Mannucci, P.M., 2011, Review: Multiple diseases and polypharmacy in the elderly: challenges for the internist of the third millennium. *Journal of Comorbidity*;1:28-44.
- Silbiger, S., dan Neugarten, J., 2008, Gender and human chronic renal disease. *Gen Med*.;5 Suppl A:S3-S10.
- Stevens, L.A., Li, S., Wang, C., Huang, C., Becker, B.N., Bomback, A.S., dkk., 2010, Prevalence of CKD and Comorbid Illness in Elderly Patients in the United States: Results From the Kidney Early Evaluation Program (KEEP). *American Journal of Kidney Diseases*, Vol 55(3),Suppl 2.March: pp S23-S33.
- Tatro, D.S., 2011, Drug Interactions Fact : The authority on drug interactions. Wolter Kluwer Health Facts & Comparisons.
- Zhang, Q., dan Rothenbacher, D., 2008, Prevalence of chronic kidney disease in population-based studies: Systematic review. *BMC Public Health*.8:117.

**DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DENGAN PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL
ACETAT (IVA) DI DUSUN CANDIREJO, DESA TEGALTIRTO,
BERBAH, SLEMAN, DIY**

Nonik Ayu Wantini
Universitas Respati Yogyakarta
nonik_respati@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kanker leher rahim (kanker serviks) adalah tumbuhnya sel-sel tidak normal pada leher rahim, yang 90% disebabkan oleh Human Papilloma Virus (HPV). Faktor risiko kanker leher rahim adalah melakukan hubungan seksual di usia muda (<18 tahun), berganti-ganti pasangan seksual, melakukan hubungan seksual dengan pria yang berganti-ganti pasangan, merokok atau terpapar asap rokok (perokok pasif), kurang menjaga kebersihan kelamin. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013, penyakit kanker serviks merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 0,8‰ dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki prevalensi kanker serviks tertinggi yaitu sebesar 1,5‰. Tujuan kegiatan ini adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker serviks dengan IVA test. Dari 32 peserta kegiatan, yang melakukan IVA test sejumlah 23 orang (71,87%). Peserta yang tidak melakukan pemeriksaan IVA disebabkan oleh malu (2 orang), takut (2 orang), sudah pernah pap smear (2 orang), merasa IVA tidak penting (1 orang), suami tidak mengizinkan (1 orang), menstruasi (1 orang). Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui 1 orang (4,34%) dari 23 orang dengan hasil positif pada pemeriksaan IVA. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan pada pasien dengan IVA positif untuk memastikan adanya lesi yang mengarah pada keganasan agar pentalaksanaan dapat dilakukan dengan segera.

Kata kunci :kanker, serviks, pemeriksaan IVA

ABSTRACT

Cervical Cancer is the growth of abnormal cells in the cervix, of which 90% are caused by the Human Papilloma Virus (HPV). Risk factors cervical cancer are having sexual intercourse at a young age (<18 years), multiple sexual partners, having sex with men who have multiple sexual partners, smoking or exposure to cigarette smoke (passive smoking), less maintain genital hygiene. Basic Health Research in 2013, cervical cancer is the cancer with the highest prevalence in Indonesia amounting to 0.8 ‰ and Yogyakarta has the highest prevalence of cervical cancer by 1.5 ‰. The purpose of this activity is to make people aware about importance early detection of cervical cancer by visual inspection with acetic acid (VIA). A total of 23 (71.87%) VIA test were done. Participants who do not perform VIA test due to embarrassment (2), fear (2), has been pap smear (2), felt VIA is not important (1), husband is not permitted (1), menstruation (1 person). Based on the results of the examination, known to one person (4.34%) of the 23 people with positive results in the examination VIA. Further examination is required in patients with positive VIA to ensure lesions that lead to malignancy so that management can be done immediately.

Keywords: cancer, cervix, VIA test

PENDAHULUAN

Saat ini penyakit tidak menular, termasuk kanker menjadi masalah kesehatan utama baik di dunia maupun di Indonesia. Menurut data *World Health Organization* (WHO) tahun 2013, insidens kanker meningkat dari 12,7 juta kasus tahun 2008 menjadi 14,1 juta kasus tahun 2012. Sedangkan jumlah kematian meningkat dari 7,6 juta orang tahun 2008 menjadi 8,2 juta pada

tahun 2012. Kanker menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia sebesar 13% setelah penyakit kardiovaskular. Diperkirakan pada 2030 insidens kanker dapat mencapai 26 juta orang dan 17 juta di antaranya meninggal akibat kanker, terlebih untuk negara miskin dan berkembang kejadiannya akan lebih cepat (Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Menurut Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI tahun 2014, prevalensi penyakit kanker di Indonesia juga cukup tinggi. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi tumor/kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk, atau sekitar 330.000 orang. Kanker tertinggi di Indonesia pada perempuan adalah kanker leher rahim. Berdasarkan estimasi Globocan, *International Agency for Research on Cancer (IARC)* tahun 2012, insidens kanker leher rahim 17 per 100.000 perempuan. Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit 2010, kasus rawat inap kanker leher rahim 5.349 kasus (12,8%).

Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Nila Moeloek menyayangkan masih rendahnya angka kesadaran perempuan Indonesia untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim atau serviks. Padahal, bila dideteksi dan ditemukan dini, tingkat kesembuhan jenis kanker semacam ini lebih tinggi. Diperkirakan tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia karena tidak cepat terdeteksi. Pada stadium awal, kanker ini tidak menimbulkan gejala atau keluhan sama sekali. Ketika berobat, tahu-tahu sudah pada stadium lanjut. Cakupan skrining juga masih sangat rendah, kurang dari lima persen,” kata Nila Moeloek saat acara pencanangan “Gerakan Nasional Deteksi Dini Kanker Leher Rahim” yang digelar BPJS Kesehatan dan YKI di Tangerang (<http://yayasankankerindonesia.org/2014/kesadaran-untuk-deteksi-dini-kanker-serviks-masih-rendah/>, diposting pada tanggal 4 Juli 2014).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014, program deteksi dini dan tatalaksana kasus kanker yang dilakukan masih di prioritaskan pada 2 kanker tertinggi di Indonesia yaitu kanker payudara dan kanker leher rahim. Program ini dimulai sejak tahun 2007 dan telah dicanangkan sebagai program nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan *Female Cancer Program (FCP)*. Program deteksi dini kanker serviks dengan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). Sampai dengan tahun 2013, program deteksi dini kanker leher rahim telah berkembang di 207 kabupaten pada 32 provinsi. Jumlah yang diskринing sebanyak 644.951 perempuan atau 1,75% dari target perempuan usia 30-50 tahun, 28.850 (4,47%) Inspeksi Visual Asetat (IVA) positif, curiga kanker leher rahim 840 (1,3 per 1000).

Prevalensi penyakit kanker menurut diagnosis dokter/gejala berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 yang tertinggi adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu sebesar 4,1 per 1000, kemudian Jawa Tengah (2,1 per 1000), dan Bali (2,0 per 1000). Kasus kanker di DIY tahun 2013 berdasarkan hasil Riskesdas 2013 tertinggi adalah kabupaten Sleman (6,1 per 1000), kemudian Kulon Progo (4,9 per 1000), dan Gunung Kidul (3,7 per 1000). Kasus terendah adalah Kabupaten Bantul (1,8 per 1000), disusul Kota Yogyakarta (3,5 per 1000).

Kita sering mendengar cerita di masyarakat yang menyebutkan kanker serviks itu penyakit keturunan, kanker serviks tidak perlu di khawatirkan karena kasusnya tidak banyak. Namun mitos-mitos tersebut berbeda dengan fakta-faktar yang ada. Mitos atau cerita lain yang sering kita dengar di masyarakat adalah kanker serviks tidak dapat dicegah. Tapi faktanya, vaksinasi Virus Human Papiloma (HPV) merupakan pencegahan primer terhadap kanker serviks dengan membantu pembentukan antibodi. Sedangkan, papsmear ataupun IVA merupakan pencegahan sekunder yang berfungsi mendeteksi sel abnormal atau lesi prakanker. Sangatlah penting seorang wanita mengetahui lebih detail terkait Kanker Serviks dan Program Deteksi Dini Kanker Serviks.

Berbah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Terdapat 4 Desa di Kecamatan Berbah yaitu Jogotirto, Kalitirto, Sendangtirto, dan Tegaltirto. Dusun Candirejo merupakan salah 1 dari 14 dusun di Desa Tegaltirto.

METODE

Kegiatan ini meliputi beberapa tahap yaitu tahap I (Sosialisasi Kegiatan) dan tahap II (Pemeriksaan IVA dan KIE Deteksi Dini Kanker Serviks). Tahap I dilakukan pada tanggal 07 Agustus 2016 dan 10 Oktober 2016, tahap II pada tanggal 16 Oktober 2016. Peserta kegiatan ini adalah wanita dengan usia terendah 28 tahun dan tertinggi 60 tahun, yang tentunya telah memenuhi persyaratan seperti sudah menikah, sudah pernah berhubungan seksual, tidak sedang hamil.

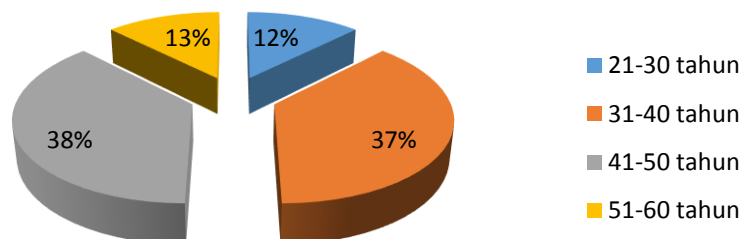
Pada tahap I, dilakukan sosialisasi kegiatan terkait pentingnya IVA dan rencana pelaksanaan IVA. Pada tahap II, peserta diminta data terkait identitas diri (umur, pendidikan, paritas, usia menikah pertama kali), riwayat deteksi dini kanker leher rahim (pap smear, IVA), dan data pengetahuan peserta (faktor risiko, gejala, deteksi dini) sebelum dilakukan pemeriksaan IVA dan dilakukan KIE Deteksi Dini Kanker Serviks dengan menggunakan Leaflet. Data yang diperoleh dilakukan editing, coding, entry dan cleaning kemudian dilakukan analisis data.

Deteksi dini kanker leher rahim dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah dilatih dengan pemeriksaan leher rahim secara visual menggunakan asam asetat yang sudah di encerkan, berarti melihat leher rahim dengan mata telanjang untuk mendeteksi abnormalitas setelah pengolesan asam asetat 3-5%. Daerah yang tidak normal akan berubah warna dengan batas yang tegas menjadi putih (*acetowhite*), yang mengindikasikan bahwa leher rahim mungkin memiliki lesi prakanker. Tes IVA dapat dilakukan kapan saja dalam siklus menstruasi, termasuk saat menstruasi, dan saat asuhan nifas atau paska keguguran. Pemeriksaan IVA juga dapat dilakukan pada perempuan yang dicurigai atau diketahui memiliki ISR/IMS atau HIV/AIDS. Alat dan bahan meliputi spekulum, lampu sorot, larutan asam asetat 3-5%, kapas lidi/tampon tang, kapas, sarung tangan, larutan klorin untuk dekontaminasi peralatan (Kemenkes RI, 2015). Dalam kegiatan ini, pemeriksaan IVA dilakukan oleh dokter dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, sebelum pemeriksaan sudah dilakukan inform consent terlebih dahulu.

Adapun langkah-langkah pemeriksaan serviks menurut Kemenkes RI (2015) adalah sebagai berikut: Apakah terdapat kecurigaan **kanker** atau tidak?

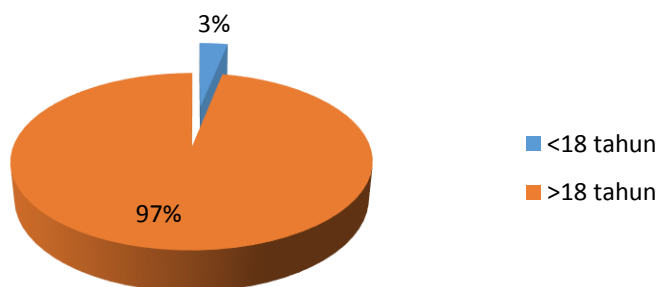
- a. Jika **ya**, klien dirujuk , pemeriksaan IVA tidak dilanjutkan. Jika pemeriksa adalah dokter ahli obstetri dan ginekologi, lakukan biopsi.
- b. Jika tidak dicurigai kanker, **identifikasi Sambungan Skuamo kolumnar (SSK)**
 - 1) Jika **SSK tidak tampak** ,maka : dilakukan pemeriksaan mata telanjang tanpa asam asetat, lalu beri kesimpulan sementara, misalnya hasil negatif namun SSK tidak tampak. Klien disarankan untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya lebih cepat atau pap smear maksimal 6 bulan lagi.
 - 2) Jika **SSK tampak**, lakukan IVA dengan mengoleskan kapas lidi yang sudah dicelupkan ke dalam asam asetat 3-5% ke seluruh permukaan serviks
- c. Tunggu hasil **IVA selama 1 menit, perhatikan apakah ada bercak putih (acetowhite epithelium) atau tidak**
 - 1) Jika tidak (IVA negatif), jelaskan kepada klien kapan harus kembali untuk mengulangi pemeriksaa IVA
 - 2) Jika ada (IVA positif), tentukan metode tata laksana yang akan dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN



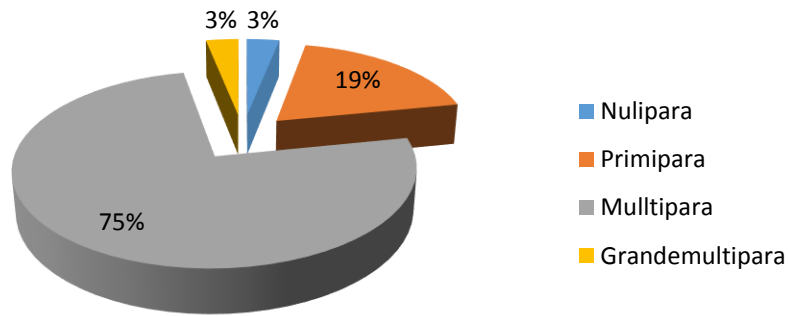
Gambar 1. Distribusi responden berdasarkan usia

Berdasarkan gambar 1. diketahui bahwa sebagian besar responden berada dalam rentang usia 31-40 tahun (37%), 41-50 tahun (38%). Berdasarkan Kemenkes (2015), deteksi dini kanker leher rahim dilakukan pada kelompok sasaran perempuan 20 tahun ke atas, namun prioritas program deteksi dini di Indonesia pada perempuan usia 30-50 tahun dengan target 50% perempuan sampai tahun 2019.



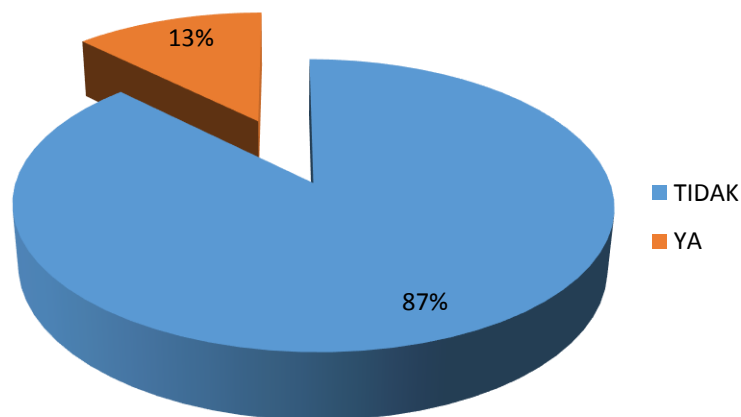
Gambar 2. Distribusi responden berdasarkan usia menikah

Berdasarkan gambar 2. diketahui bahwa sebagian responden (97%) usia pertama kali menikah yang diasumsikan dengan pertama kali berhubungan seksual > 18 tahun. Hanya 1 responden yang menikah pada usia < 18 tahun (3%). Hal ini menunjukkan sebagian besar tidak memiliki faktor risiko terjadinya kanker leher rahim dari faktor usia berhubungan seksual. Menurut Depkes RI (2009), melakukan hubungan seksual di usia muda < 18 tahun merupakan faktor risiko terjadinya kanker leher rahim.



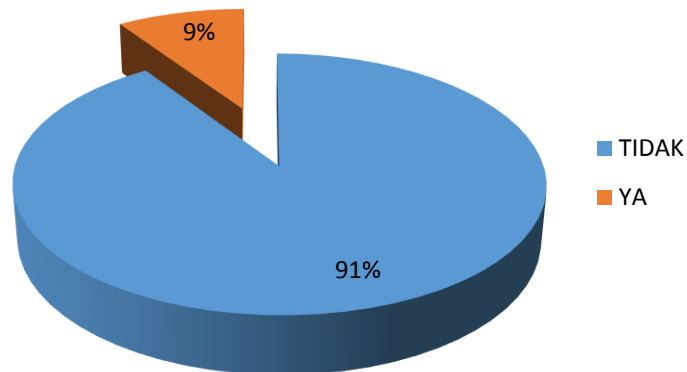
Gambar 3. Distribusi responden berdasarkan paritas

Berdasarkan gambar 3. diketahui bahwa sebagian besar responden (75%) multipara (2-4 kali pernah melahirkan), hanya 1 responden (3%) yang berstatus grandemultipara (pernah melahirkan 5 kali atau lebih).



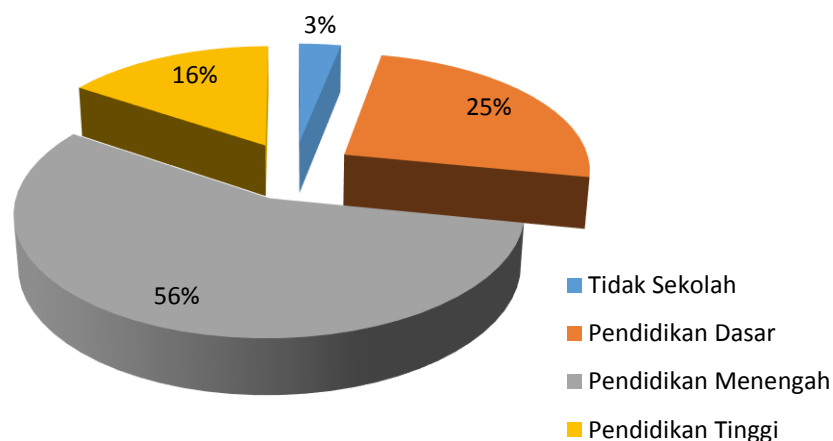
Gambar 4. Distribusi responden berdasarkan riwayat Pap-Smear

Berdasarkan gambar 4. diketahui bahwa 87% responden tidak pernah pap smear sebelumnya. Pap Smear merupakan salah satu metode deteksi dini kanker serviks selain IVA test. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 13% saja yang pernah Pap Smear, dimana 6,5% diantaranya waktu pelaksanaan Pap Smear sebelumnya sudah lebih dari 10 tahun. Walaupun sudah pernah Pap Smear, ternyata belum memahami bahwa deteksi dini kanker leher rahim dilakukan secara rutin. Menurut Depkes (2009), dianjurkan untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim paling tidak 5 tahun sekali, bila memungkinkan 3 tahun sekali. Hal ini sesuai dengan penelitian Sulistiowati, E dan Sirait, A (2014), responden yang pernah pap smear hanya 9,2%.



Gambar 5. Distribusi responden berdasarkan riwayat IVA test

Berdasarkan gambar 5. diketahui bahwa 91% responden belum pernah melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA test. Hanya 9% yang sudah pernah melakukan IVA test sebelumnya dengan rentang waktu 3-5 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan perlu adanya promosi kesehatan dan pendekatan kepada masyarakat yang lebih intensif terkait pentingnya deteksi dini kanker leher rahim. Hal ini sesuai dengan penelitian Sulistiowati, E dan Sirait, A (2014), responden yang pernah IVA 3,8%, yang belum pernah IVA 96,2%.



Gambar 6. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir

Berdasarkan gambar 6. diketahui bahwa 56% responden dengan pendidikan menengah (tamat SMA), hanya 16% dengan pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana). Menurut Notoatmodjo (2010), semakin tinggi pendidikan, maka kita akan mudah menerima hal-hal baru dan mudah menyesuaikan dengan hal yang baru tersebut.

Tabel 1. Distribusi responden mengenai pengetahuan faktor risiko kanker serviks

No	Faktor Risiko	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Melakukan hubungan seksual di usia muda (<18 tahun)	10	31,25
2.	Melakukan hubungan seksual dengan pria yang sering berganti-ganti pasangan	20	62,50
3.	Berganti-ganti pasangan seksual	17	53,13
4.	Merokok atau terpapar asap rokok	13	40,63
5.	Kurang menjaga kebersihan kelamin	20	62,50

Berdasarkan tabel 1. pengetahuan responden sebelum dilakukan promosi kesehatan dapat dikatakan rendah terkait dengan faktor risiko kanker serviks. Persentase terendah adalah responden yang mengetahui risiko melakukan hubungan seksual di usia muda (<18 tahun) hanya 31,25%. Hal ini sesuai dengan penelitian Sulistiowati, E dan Sirait, A (2014), pengetahuan responden tentang faktor risiko kanker serviks juga masih rendah, hanya 19,3% yang berpengetahuan baik.

Tabel 2. Distribusi responden mengenai pengetahuan gejala kanker serviks

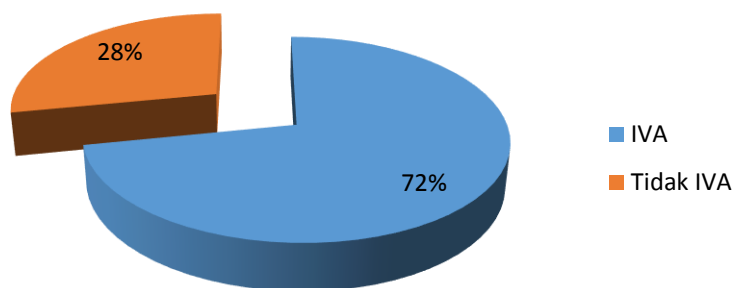
No	Gejala	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Pada tingkat dini, kanker leher rahim sering tidak menimbulkan gejala	10	31,25
2.	Keputihan berbau, gatal, berwarna putih kekuningan kadang bercampur darah	24	75,00
3.	Perdarahan setelah berhubungan seksual	11	34,38
4.	Haid tidak normal	10	31,25
5.	Perdarahan tidak di masa haid	8	25,00
6.	Perdarahan pada masa menopause	3	9,38

Berdasarkan tabel 2. diketahui bahwa persentase terendah adalah responden yang mengetahui perdarahan pada masa menopause merupakan gejala kanker serviks yaitu sebesar 9,38%. Persentase tertinggi 75% responden mengetahui keputihan berbau, gatal, berwarna putih kekuningan kadang bercampur darah merupakan gejala kanker serviks.

Tabel 3. Distribusi responden mengenai pengetahuan deteksi dini kanker serviks

No	Pernyataan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan IVA dan Pap Smear	27	84,38
2.	IVA adalah pemeriksaan yang cepat dan akurat untuk menemukan kelainan pada tahap sebelum pra kanker	26	81,25

Berdasarkan tabel 3. diketahui bahwa diatas 80% responden mengetahui deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA test.



Gambar 7. Distribusi responden berdasarkan pemeriksaan IVA test

Berdasarkan gambar 7. diketahui bahwa dari 32 peserta, hanya 23 (72%) yang bersedia dilakukan IVA test, sedangkan peserta yang tidak melakukan pemeriksaan IVA disebabkan oleh perasaan malu (2 orang), takut (2 orang), sudah pernah pap smear (2 orang), merasa IVA tidak penting (1 orang), tidak mendapatkan persetujuan pasangan (1 orang), sedang menstruasi (1 orang).

Tabel 4. Hasil pemeriksaan IVA

No	Hasil pemeriksaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	IVA (-)	22	95,65
2.	IVA (+)	1	4,35

Berdasarkan tabel 4. diketahui bahwa 1 orang (4,35%) dengan IVA positif ditunjukkan dengan setelah pengolesan asam asetat 3-5% muncul bercak putih (*acetowhite epithelium*). Hal 290

ini sesuai dengan hasil penelitian Juanda, D dan Kesuma, H (2015), ditemukan 1 orang (3%) dari subyek penelitian 30 orang dengan positif IVA pada hasil pemeriksaan inspekulo di wilayah kerja Puskesmas Kenten Palembang.

KESIMPULAN

Pencegahan kanker serviks dapat dilakukan dengan deteksi dini kanker serviks secara dini. Deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan dengan metode IVA test dikarenakan murah, efektif, dan cepat untuk mengetahui hasil pemeriksaan. Sosialisasi deteksi dini kanker serviks efektif untuk merubah perilaku masyarakat untuk melakukan deteksi dini. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan pada pasien dengan IVA positif untuk memastikan adanya lesi yang mengarah pada keganasan agar penatalaksanaan dapat dilakukan dengan segera. Diharapkan agar pemerintah dapat mensosialisasikan pemeriksaan IVA test pada seluruh masyarakat sehingga keberhasilan pencegahan kanker serviks meningkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Respati Yogyakarta atas segala dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Kepala Dusun dan tokoh masyarakat Candirejo yang telah mendukung kegiatan. Masyarakat dusun Candirejo yang telah berpartisipasi selama kegiatan berlangsung. Direktur dan Tim PKBI DIY yang telah membantu dalam pemeriksaan IVA. Keluarga tercinta atas doa dan dukungannya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Depkes RI, 2009. Buku Saku Pencegahan Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara
2. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemenkes RI. 2015. Panduan Program Nasional Gerakan Pencegahan Dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dan Kanker Payudara
3. Herman,D. 2014. Kesadaran untuk Deteksi Dini Kanker Serviks masih rendah. <http://yayasankankerindonesia.org/2014/kesadaran-untuk-deteksi-dini-kanker-serviks-masih-rendah/>, diposting pada tanggal 4 Juli 2014
4. Juanda, D dan Kesuma, H. 2015. Pemeriksaan Metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat untuk Pencegahan Kanker Serviks. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Volume 2 No.2, April 2015: 169-174

5. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2014
6. Notoatmodjo, S. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
7. Riskesdas. 2013. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI
8. Sulistiowati,E dan Sirait, A. 2014. Pengetahuan tentang Faktor Risiko, Perilaku dan Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada Wanita di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. *Buletin Penelitian Kesehatan* Vol.42, No.3, September 2014: 193-202

PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN UNGGULAN LOKAL BERBASIS AGROPOLITAN DI DAERAH KABUPATEN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA

Nur Feriyanto*, Ilya Fadjar Maharika, Feris Firdaus*****

**Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII, nurferiyanto@yahoo.com*

***Program Studi Arsitektur FTSP UII, maharika@uii.ac.id*

****Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII, feris.firdaus@uii.ac.id*

ABSTRAK

Pengembangan kawasan agropolitan dapat menyangkal asumsi yang keliru bahwa kawasan yang maju adalah kawasan yang bertransformasi menjadi perkotaan dan perubahan peranan dominan sektor pertanian ke sektor industri, dan pelayanan. Dengan asumsi bahwa sektor pertanian perhitungan produksinya sampai ke hilir yaitu sampai kepada kegiatan agro processing, maka suatu wilayah dapat disebut maju dengan tetap mencirikan wilayah perdesaan dan peran sektor pertanian yang tetap dominan. Berdasarkan hasil analisis potensi unggulan yang karakteristik dengan kawasan Sleman maka ditentukan komoditas pangan unggulan yang didukung banyak komoditas lainnya. Komoditas pangan unggulan tersebut adalah buah salak yang berada di kawasan Kecamatan Turi dan komoditas ikan air tawar yang dikembangkan di kolam yang berada di kawasan Kecamatan Ngemplak. Dua komoditas pangan unggulan ini selanjutnya dapat dikembangkan menjadi produk unggulan yang didukung berbagai produk pangan lainnya dalam rangka menghasilkan berbagai macam diversifikasi pangan untuk meningkatkan ekonomi perdesaan berbasis agropolitan. Salah satu produk unggulan di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman adalah salak pondoh yang sangat melimpah. Kelimpahan salak pondoh ini di musim panen menyebabkan harga penjualan salak pondoh segar menjadi turun sehingga diperlukan upaya diversifikasi produk salak pondoh menjadi berbagai macam produk turunan salak pondoh yang lebih tahan lama dan dapat dipasarkan sepanjang tahun. Contoh produk turunan salak pondoh tersebut adalah kripik salak, dodol salak, sirup salak, manisan salak, kopi biji salak dan lain-lain. Salah satu produk unggulan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman adalah ikan air tawar khususnya ikan nila dan ikan lele yang sangat melimpah. Untuk meningkatkan nilai ekonomi kedua jenis ikan ini maka diperlukan upaya diversifikasi dengan sentuhan teknologi tepat guna menjadi produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi dibanding ikan yang dijual dalam kondisi segar. Contoh hasil inovasi yang sudah dikembangkan adalah diversifikasi ikan lele dan ikan nila menjadi abon lele, keripik lele, nila crispy, kerupuk ikan dan lain-lain yang memiliki ketahanan/keawetan sampai setahun lebih dalam kemasan.

Kata Kunci: diversifikasi, pangan unggulan lokal, salak pondoh, ikan air tawar, agropolitan

ABSTRACT

Agropolitan development can deny the false assumption that the forward region is transformed into an urban area and change the dominant role of agriculture to industry, and services. Assuming that the calculation of the agricultural sector to downstream production that is up to the agro-processing activities, then an area can be called forth by permanent characterizes rural areas and the role of agriculture is still dominant. Based on the analysis of potential superior characteristics with the Sleman district determined featured food commodities, supported by many other commodities. The featured food commodities are fruits in the area of Turi district and commodities freshwater fish are bred in ponds in the area of the District Ngemplak. Two featured food commodities can be further developed into a superior product that is supported by a variety of other food products in order to produce a wide variety of food diversification to improve the rural economy based agropolitan. One of the products featured in the District of Turi Sleman is pondoh very abundant. Abundance pondoh this harvest season led to the sale price of fresh pondoh be dropped so that the required product diversification efforts pondoh into various derivative products pondoh more durable and can be marketed throughout the year. Examples of products that are derived pondoh bark chips, dodol bark, bark syrup, candied bark, bark coffee beans and others. One of the products featured in the district of Sleman Ngemplak are freshwater fish, especially tilapia and catfish are very abundant. To increase the economic value of the two types of fish diversification

efforts are needed with a touch of appropriate technology into derivative products is higher than the economic value of fish sold in fresh condition. Example of innovation that has been developed is a diversified catfish and tilapia be shredded catfish, catfish chips, crispy tilapia, fish crackers and others that have a resistance/durability of up to a year in packaging.

Keywords: diversification, featured local food, pondoh, bream, agropolitan

PENDAHULUAN

D.I.Yogyakarta telah mengalami perubahan struktur ekonomi yang tercermin dari penurunan peran sektor pertanian dan naiknya peran sektor non pertanian dalam menyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) D.I.Yogyakarta. Kondisi tersebut juga berakibat adanya peralihan perkembangan peluang kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Tetapi peralihan peluang kerja ke sektor non pertanian tidak serta merta dapat menampung beralihnya pekerja yang berasal dari sektor pertanian serta angkatan kerja baru yang masuk di sektor non pertanian. Hal ini terjadi karena belum siapnya angkatan kerja dengan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sektor non pertanian. Akibatnya penambahan pekerja yang masuk ke sektor pertanian akan menurunkan produktivitasnya, karena marginal produknya bernilai negatif sedangkan pekerja yang masuk ke sektor non pertanian belum maksimal produktivitasnya sehingga secara totalitas bertambahnya pekerja justru bersifat negatif bagi PDRB D.I.Yogyakarta (Feriyanto, 2014).

Perbedaan kondisi dan fasilitas pembangunan akibat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota telah memicu terjadinya urbanisasi. Kota yang sarat dengan fasilitas pembangunan menjadi magnet kuat bagi penduduk desa untuk berpindah ke kota mencari pekerjaan yang memberikan upah lebih tinggi dari upah yang diperoleh di desa. Perpindahan penduduk dari desa ke kota akan menjadikan mereka harus mengganti mata pencahariannya dari sector pertanian haraus berubah ke sector non pertanian. Persoalan yang muncul dipermukaan adalah kepadatan penduduk yang linear dengan bertambah banyaknya permukiman penduduk di kawasan perkotaan yang padat dan semakin lama semakin menghabiskan ruang terbuka hijau (RTH). Selain bertambahnya permukiman penduduk, penambahan jumlah kendaraan bermotor juga akan semakin tinggi yang linear dengan peningkatan polusi udara yang semakin buruk (Feriyanto, 2014).

Dalam laporan Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan D.I.Yogyakarta (2013) disebutkan bahwa sebanyak 80 desa yang tersebar di empat kabupaten di D.I.Yogyakarta rawan pangan. Desa rawan pangan tersebar di empat kabupaten masing-masing di Sleman (12 desa), Gunungkidul (24 desa), Kulonprogo (34 desa), dan Bantul (10 desa). Desa-desa yang masuk kategori rawan pangan itu dilihat tidak hanya dari

ketersediaan pangannya namun juga terkait kecukupan gizi, dan kemiskinan. Selain diversifikasi pangan, di desa rawan pangan juga dibentuk lembaga akses pangan sebagai solusi hambatan distribusi pangan yang menjadi pemicu desa menjadi rawan pangan. Sulitnya akses menuju desa tersebut, menjadi masalah dalam distribusi pangan sehingga masyarakat susah menjangkau pangan. Penentuan desa rawan pangan dinilai berdasarkan tiga indikator yakni ketersediaan pangan, akses pangan (kemiskinan) dan pemanfaatan pangan (kesehatan) (Arjayanti, 2013).

Penentuan desa rawan pangan dinilai berdasarkan tiga indikator yakni ketersediaan pangan, akses pangan (kemiskinan) dan pemanfaatan pangan (kesehatan). Di D.I.Yogyakarta desa yang dikategorikan rawan pangan karena disebabkan oleh salah satu indikator saja. Penyebab terbesar desa rawan di D.I.Yogyakarta adalah kemiskinan (akses pangan). Untuk mengurangi desa rawan pangan yang karena indikator akses pangan, harus dilakukan pengentasan kemiskinan. Desa rawan pangan dengan indikator pemanfaatan pangan ini bisa dilihat dari kecukupan gizi yang kurang. Di D.I.Yogyakarta Kecukupan kalori karbohidrat sekitar 96% sedangkan kecukupan kalori nasional 98%. Sementara itu kecukupan kalori protein sudah melampaui yakni 104%. Di tahun 2015, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) D.I.Yogyakarta selain mengurangi desa rawan pangan juga akan mengurangi desa waspada pangan sebanyak 16 desa yakni: masing-masing tujuh desa di Kabupaten Kulonprogo dan Sleman serta masing-masing satu desa di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul (Indriani, 2014).

Di sisi lain terdapat laporan dari Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian D.I.Yogyakarta bahwa laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup memprihatinkan yaitu per tahun rata-rata mencapai 150 hingga 170 hektare disebabkan kegiatan pengembangan wilayah di daerah itu. Sementara luas lahan sawah di D.I.Yogyakarta saat ini mencapai sekitar 56 ribu hektare, sedangkan lahan kering termasuk di dalamnya tegalan dan lainnya mencapai 90.000 ha. Dalam kurun waktu antara 2005 hingga 2009, terjadi penurunan luas lahan sawah dari 57.700 ha menjadi 56.700 ha. Jika luas lahan sawah produksi padi di D.I.Yogyakarta seperti ini terus, maka pada tahun 2040 dapat dipastikan D.I.Yogyakarta akan melakukan 'impor' beras dari provinsi lain (Sasongko, 2012). Selain itu juga dilatarbelakangi oleh laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2014) bahwa tingkat urbanisasi penduduk di Indonesia pada 2010 hingga 2035 diperkirakan mencapai 66,6%. Persentase penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, pada tahun 2010 tingkat urbanisasi mencapai angka 49,8%. Kemudian di tahun 2015 angka tersebut meningkat menjadi 53,3%,

dan 60% di tahun 2025. Hal itu akan berimplikasi pada perubahan sosial dan ekonomi, yaitu seperti permintaan konsumen akan sandang, papan, dan pangan, serta kebutuhan infrastruktur yang meliputi transportasi, komunikasi, serta energi (Alisjahbana, 2014).

Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, krisis pangan dan energi yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi, sehingga negara-negara pengekspor pangan cenderung menahan produknya untuk dijadikan stok pangan. Mengingat kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, maka ke depan Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan ketahanan pangan agar mampu menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya. Mengingat strategisnya sektor pertanian, maka pembangunan pertanian tidak hanya pada upaya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga mampu untuk menggerakkan perekonomian nasional melalui kontribusinya dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan masyarakat serta berperan dalam pelestarian lingkungan melalui praktik budidaya pertanian yang ramah lingkungan.

Konsep pengembangan agropolitan muncul dari permasalahan adanya ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang tertinggal. Proses interaksi ke dua wilayah selama ini secara fungsional ada dalam posisi saling memperlemah. Wilayah perdesaan dengan kegiatan utama sektor primer, khususnya pertanian, mengalami produktivitas yang selalu menurun akibat beberapa permasalahan, di sisi lain wilayah perkotaan sebagai tujuan pasar dan pusat pertumbuhan menerima beban berlebih sehingga memunculkan ketidaknyamanan akibat permasalahan permasalahan sosial (konflik, kriminal, dan penyakit) dan lingkungan (pencernaran dan buruknya sanitasi lingkungan permukiman). Hubungan yang saling memperlemah ini secara agregat wilayah keseluruhan akan berdampak pada penurunan produktivitas wilayah (Rustiadi dan Hadi, 2008).

Pembangunan sektor pertanian dan wilayah perdesaan sekarang dianggap sangat penting, karena apabila pembangunan sektor ini di wilayah tersebut menjadi tidak berhasil dikembangkan, terutarna dalam jangka menengah dan jangka panjang, dapat memberi dampak negatif terhadap pembangunan nasional keseluruhannya, berupa terjadinya kesenjangan yang semakin melebar antar wilayah dan antar kelompok tingkat pendapatan. Kemampuan sektor pertanian untuk memberikan kontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga tani tergantung pada tingkat pendapatan usahatani dan surplus yang dihasilkan dari sektor pertanian itu sendiri. Dengan demikian, tingkat pendapatan usahatani, disamping merupakan penentu utama kesejahteraan rumah tangga petani, juga muncul sebagai

salah satu faktor penting yang mengkondisikan pertumbuhan pertanian. Tingkat pendapatan usahatani ini sangat ditentukan oleh efisiensi petani untuk mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya ke dalam berbagai alternatif aktivitas produksi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tentang pengembangan diversifikasi pangan lokal berbasis agropolitan untuk penguatan ekonomi perdesaan serta mampu menopang kebutuhan produk pangan alternatif di daerah kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta menggunakan pendekatan Pengembangan Agropolitan sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Pembangunan Berimbang (Rustiadi dan Hadi, 2008), Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah (Soenarno, 2008), yang dilandasi oleh Kebijakan Teknis Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan untuk Penguatan Ekonomi Perdesaan (Departemen Pertanian, 2008), *Development: Toward a New Strategy for Regional Planning in Asia* (Fiedman and Douglas, 1975), *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning* (Friedman and Weaver, 1979), *The Role of Small and intermediate Sized City in National Development Processes and Strategies* (Hansen, 1982), *Applied Methods of Regional Analysis The Spatial Dimensions of Development Policy* (Rondinelli, 1985).

Penelitian dilakukan di daerah kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta dan difokuskan pada kluster kawasan perdesaan di 2 (dua) kecamatan yang memiliki potensi besar di bidang pertanian pangan dan daya dukung lainnya yang terkait, yakni kecamatan Turi dan kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta. Sampel ditentukan dengan metode *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan sampel non probabilitas yang tidak terbatas, dimana sampel dipilih dari anggota populasi yang paling mudah untuk ditemui dan dimintai informasi (Hadi, 1987, Cooper dan Emory, 1991). Penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh secara langsung di lokasi sampel dan didukung juga dengan data sekunder yang diperoleh dari *stakeholders* terkait di lokasi sampel.

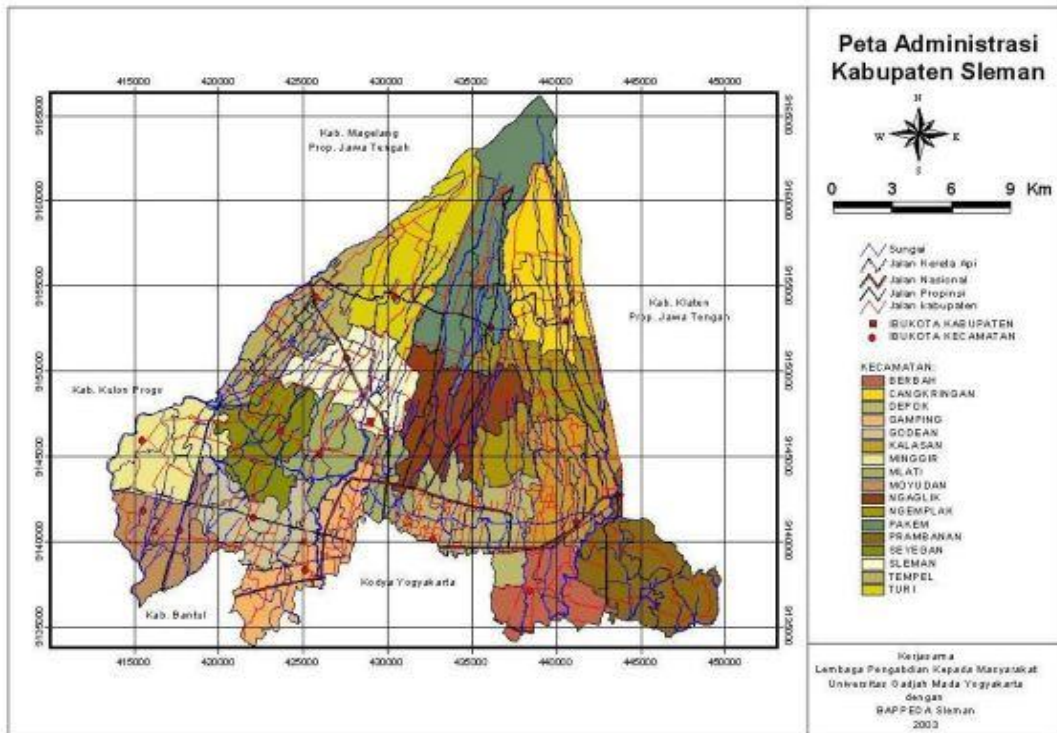
HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110° 13' 00" sampai dengan 110° 33' 00" Bujur Timur, dan mulai 7° 34' 51" sampai dengan 7° 47' 03" Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100 – 2.500 meter di atas permukaan air laut. Jarak terjauh Utara-Selatan kira-kira 32 km, Timur – Barat kira-kira 35 km, terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 padukuhan. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, bagian selatan berbatasan

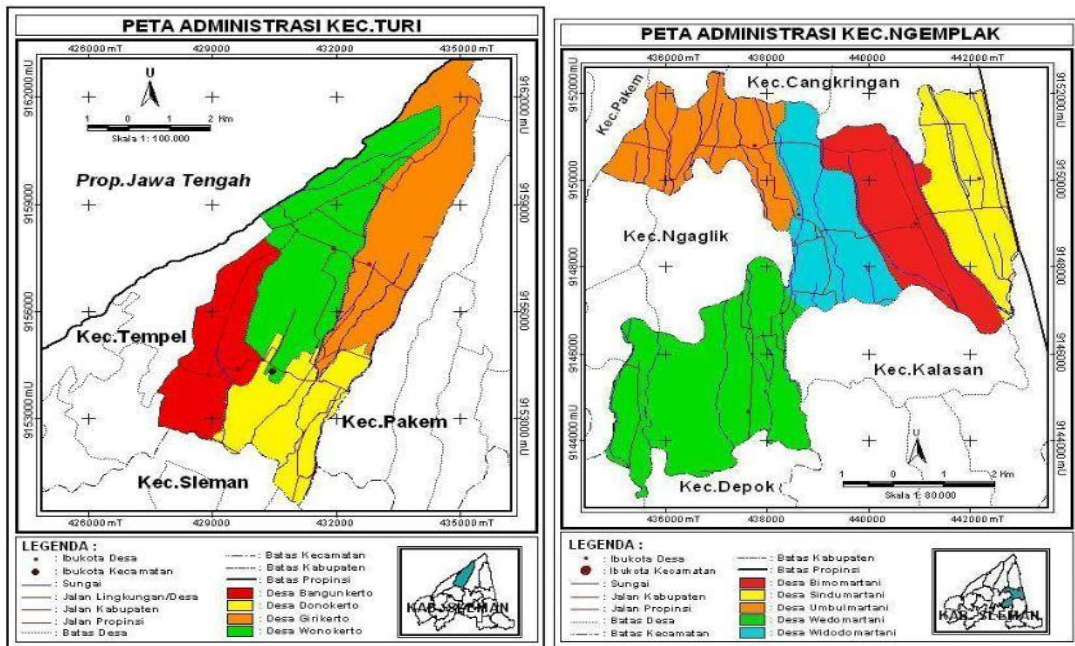
dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering yang berupa ladang dan pekarangan, serta memiliki permukaan yang agak miring ke selatan dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari Kawasan Wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol dan Opak.

Potret potensi produksi tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta kondisi spasial kawasan D.I.Yogyakarta diulas di bawah ini. Gambar 1, Gambar 1, dan Tabel 1 berikut ini menampilkan peta spasial kawasan Kabupaten Sleman dan 2 Kecamatan (Turi dan Ngemplak) yang memiliki produk unggulan lokal potensial untuk dikembangkan melalui diversifikasi pangan lokal berbasis agropolitan. Selain itu juga menampilkan luasan lahan sesuai penggunaannya (*land use*) yang menghasilkan keragaman sumber pangan seperti tanaman pangan, peternakan, dan perikanan yang potensial untuk dikaji secara strategis dalam rangka meningkatkan ekonomi perdesaan di Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta. Diversifikasi produk pangan lokal yang dihasilkan di Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta menjadi bukti kekayaan dan keanekaragaman produk pangan yang dihasilkan dari pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis agropolitan.



Gambar 1. Peta kawasan Kabupaten Sleman



Gambar 2. Peta kawasan Kecamatan Turi dan Ngemplak Sleman

Tabel 1. Luas lahan sesuai penggunaannya di Kabupaten Sleman

ha				
Jenis Penggunaan <i>Land use</i>	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekarangan/ <i>House Compounds</i>	18 477,78	18 561,00	18 561,00	18 590,90
2. Sawah/ <i>Wetland</i>	24 849,96	24 774,00	24 774,00	24 719,05
3. Tegal/ <i>Dry Land</i>	3 943,12	3 924,00	3 924,00	3 923,69
4. Hutan/ <i>Forest</i>	52,99	530,000	530,00	52,99
5. Tanah Tandus dan Semak / <i>Barren and bush</i>	1 263,84	1 263,000	1 263,00	1 263,84
7. Lainnya/ <i>Others</i>	8 894,30	8 430,000	8 430,00	8 932,03
Jumlah/Total	57 482,00	57 482,00	57 482,00	57 482,50

Sumber data: BPS Kabupaten Sleman 2015

Tanaman Pangan meliputi padi, palawija dan hortikultura. Tanaman palawija mencakup komoditas jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai serta kacang hijau. Produksi padi sawah dan padi ladang Kabupaten Sleman pada tahun 2015 tercatat sebanyak 314.402 ton. Dibandingkan tahun 2013 terjadi penurunan produksi sebesar 0,02 persen dengan produksi sebanyak 314.402 ton. Untuk tanaman palawija, dilihat dari segi produksi didominasi oleh jagung yang mencapai 33.431 ton, diikuti oleh produksi ubi kayu dan kacang tanah yang masing-masing sebanyak 13.418 ton dan 8.671 ton. Adapun produksi ubi jalar, kedelai, dan kacang hijau masing-masing 3.400 ton, 530 ton, dan 9 ton. Hortikultura terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan.

Produksi tanaman buah-buahan di Kabupaten Sleman didominasi oleh salak pondoh, sesuai dengan predikat yang disandang selama ini sebagai produsen salak pondoh terbesar. Produksi salak pondoh pada tahun 2015 mencapai 696.995 kwintal, naik sekitar 0,05 persen dibanding tahun sebelumnya sebanyak 662.321 kwintal. Komoditas ini sebagian besar dibudidayakan di Kecamatan Turi, Tempel dan Pakem yang produksinya mencapai 97,51 persen dari total produksi Kabupaten Sleman. Sementara itu, produksi Salak Gading 2.572 kwintal dan Salak Biasa 38.873 kwintal. Tabel 2 berikut ini menampilkan potensi pangan

unggulan yang karakteristik di kawasan Kabupaten Sleman khususnya di kawasan Kecamatan Turi yakni salak pondoh dan salak gading yang karakteristik dan tersentral di Kecamatan Turi Sleman.

Tabel 2. Produksi salak pondoh dan salak gading di kawasan Kabupaten Sleman

Kecamatan Districts	Salak Pondoh/Zalacca Pondoh			Salak Gading/Zalacca Gading		
	Tanaman Produktif/ Productive Crop (Rumpun/ Clusters)	Produksi Production (Kwt)	Rata-rata Produksi Average Production (Kg/Rumpu n /Clusters)	Tanaman Produktif /Producti ve Crop (Rumpun /Clusters)	Produk si Produc tion (Kwt)	Rata-rata Produksi Average Productio n (Kg/Rump un /Clusters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Moyudan	0,49	103	210,16	-	-	-
2. Minggir	0,80	165	206,73	-	-	-
3. Seyegan	1,51	351	233,27	-	-	-
4. Godean	0,52	114	218,76	-	-	-
5. Gamping	0,31	58	189,74	-	-	-
6. Mlati	0,11	20	191,15	-	-	-
7. Depok	-	-	-	-	-	-
8. Berbah	-	-	-	-	-	-
9. Prambanan	-	-	-	-	-	-
10. Kalasan	3,85	848	220,49	-	-	-
11. Ngemplak	0,61	136	224,26	-	-	-
12. Ngaglik	5,61	1 344	239,55	-	-	-
13. Sleman	38,05	9 656	253,80	-	-	-
14. Tempel	580,91	149 493	257,34	1,91	418	218,85
15. Turi	1 795,31	472 299	263,07	8,72	1 856	212,84
16. Pakem	236,85	57 864	244,31	1,36	298	218,48
17. Cangkringan	20,81	4 542	218,24	-	-	-
Jumlah/Total	2 685,72	696 995	259,52	11,99	2 572	214,44
Tahun/Year 2013	4 813 559	662 321	13,76	24 321	2 733	11,24
Tahun/Year 2012	4 381 956	493 764	11,27	23 988	2 653	11,06

Sumber data: BPS Kabupaten Sleman 2015

Kabupaten Sleman yang memiliki hawa sejuk sangat cocok bagi tumbuhan dan perkebunan salak. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sleman akan berupaya terus mendorong petani salak untuk dapat melakukan ekspor salak dan membuka pasar baru di beberapa negara. Saat ini setidaknya terdapat 23 kelompok petani salak yang memiliki registrasi kebun dengan total luasan lahan yang mereka miliki sekitar 313 hektare dengan jumlah pohon 537.388 rumpun. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas panen yang berkelanjutan petani salak di Kabupaten Sleman telah mengantongi sertifikasi. Beberapa yang terdaftar diantaranya memiliki sertifikasi prima tiga sebanyak 17 kelompok dan sertifikasi organik sebanyak dua kelompok. Sedangkan untuk sertifikasi global GAP masih dalam proses. Sertifikasi ini penting dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada tahun depan kebijakan perdagangan bebas antar negara ASEAN mulai diterapkan dan ini butuh kesiapan pelaku usaha. Jika dilihat dari segi kuantitas produksi salak Sleman cukup memadai. Sebanyak

30 persen dari total panen terserap untuk pemenuhan pasar lokal dan sebagian besar sisanya masuk ke pasar domestik meliputi wilayah Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.

Selain dijual dalam bentuk buah, salak pondoh juga dapat dijual dalam bentuk olahan yang sudah dikreasikan menjadi dodol salak, manisan salak, kripik salak, dan aneka makanan lainnya. Selain itu perkebunan salak pondoh juga dapat dijadikan tempat wisata seperti yang terjadi di Dusun Trumpon, Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Potensi dari salah pondoh ini sangat besar untuk terus dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman karena menjadi salah satu komoditi andalan. Diperlukan peran dari pemerintah untuk dapat memperluas pemasaran dengan melakukan pameran salak pondok baik didalam maupun di luar negeri. Selain itu perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai buah lokal dibandingkan dengan buah impor agar industri buah dalam negeri dapat tumbuh dan berkembang.

Seiring dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, semakin banyak masyarakat yang memperkaya variasi produk olahan dari tanaman salak sehingga inovasi produk berbahan baku salak meningkat. Pengolahan pasca panen sebagai upaya diversifikasi produk turunan yang menggunakan bahan baku salak dapat diupayakan untuk diolah lebih lanjut menjadi keripik salak, manisan salak, selai salak, sirup salak, maupun berupa caramel salak, sedangkan sisa produk maupun limbah salak dapat diupayakan dengan menghasilkan produk samping yang berasal dari kulit salak dan biji salak yang dapat diolah menjadi tas kulit salak, gantungan kunci, lukisan canvas dan barang sejenisnya. Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah bagaimana caranya agar produk olahan salak tersebut dapat laris di pasaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perancangan strategi pemasaran untuk membentuk produk olahan salak yang unggul dan kompetitif dengan melakukan pendekatan internal dan eksternal melalui analisis Strength, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT) terhadap produk caramel salak yang dihasilkan oleh Cristal Salak. Perancangan strategi pemasaran ini sekaligus guna mendukung olahan salak pondoh khas Turi, Sleman menjadi produk unggulan di Desa Wisata Kembang Arum hingga menjadi produk khas DIY. Diharapkan dengan strategi pemasaran yang tepat melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan usaha pada umumnya.

Selain salak pondoh, Kabupaten Sleman juga memiliki produksi yang cukup besar untuk komoditi rambutan dan pisang, yakni masing-masing sebanyak 177.972 kwintal dan 185.811 kwintal. Sedangkan produksi alpukat sebanyak 38.127 kwintal, durian 32.132 kwintal, jeruk 19.811 kwintal, manggis 13.975 kwintal, pepaya 90.213 kwintal, sawo 30.524 kwintal, sukun 36.592 kwintal, melon 23.994 kwintal, semangka 10.259 kwintal, jambu air 23.448 kwintal,

dan jambu biji 22.231 kwintal. Lainnya belimbing, duku/langsat, mangga, nenas, sirsak kurang dari 10 ribu kwintal. Untuk produksi tanaman sayuran, produksi yang relatif besar adalah melinjo sebesar 97.413 kwintal dan cabe merah sebanyak 40.814 kwintal. Produksi tanaman petai sebanyak 29.572 kwintal.

Produksi tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 adalah tebu dan kelapa dengan produksi masing-masing 547.893 kwintal dan 77.995,55 kwintal. Kemudian diikuti oleh mendong (untuk bahan baku tikar) dengan produksi sekitar 23.560 kwintal serta tembakau rakyat sebesar 7.575 kwintal, kopi robusta 257,70 kwintal, kopi arabika 102,50 kwintal. Adapun produksi komoditas lainnya seperti cengkih, kakao, jambu mente, kapuk, dan lada, produksinya masing-masing produksinya di bawah 100 kwintal.

Populasi ternak besar pada tahun 2015 terdiri dari sapi potong 52.651 ekor, sapi perah 3.632 ekor, kerbau 603 ekor dan kuda 355 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil meliputi domba dengan populasi 71.731 ekor, kambing 36.279 ekor, dan babi 6.676 ekor. Adapun jenis unggas yang ditanakkan didominasi oleh ayam buras dengan populasi 1,54 juta ekor, ayam potong 2,72 juta ekor dan ayam petelor sebesar 1,67 juta ekor. Untuk produksi daging, pada tahun 2015 disembelih/dipotong ternak sapi 6.953 ekor, kambing 3.507 ekor dan domba 8.304 ekor. Banyaknya produksi daging di Kabupaten Sleman sekitar 20.642,57 ton. Produksi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 20.269,90 ton. Selain produksi daging, kegiatan peternakan di Kabupaten Sleman juga menghasilkan telur dan susu. Pada tahun 2015, susu yang dihasilkan mencapai 3.589,29 ton. Semua produksi susu dihasilkan oleh peternakan yang dikelola oleh perusahaan. Untuk produksi telur, pada tahun 2015 tercatat sebesar 16.886,83 ton, naik dibanding produksi tahun 2013 yang mencapai 16.857,06 ton.

Tabel 3. Produksi ikan air tawar di kawasan Kabupaten Sleman

Kecamatan Districts	Luas Kolam Total Area of Fishpond (Ha)	Produksi Production (Kg)	Rata-rata Produksi Average Production (Kg/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Moyudan	28,07	864 630	30 799,34
2. Minggir	58,22	1 707 630	29 329,63
3. Seyegan	72,00	3 264 320	45 338,41
4. Godean	65,02	1 711 040	26 316,81
5. Gamping	95,67	3 531 030	36 906,89
6. Mlati	86,90	2 912 345	33 515,29
7. Depok	62,06	2 614 890	42 132,83
8. Berbah	51,91	2 004 050	38 606,24
9. Prambanan	18,43	413 450	22 439,62
10. Kalasan	92,62	2 945 330	31 801,18
11. Ngemplak	108,66	4 713 285	43 378,05
12. Ngaglik	9,89	210 070	21 234,21
13. Sleman	10,46	310 050	29 647,16
14. Tempel	16,71	487 530	29 184,68
15. Turi	35,18	1 096 420	31 165,12
16. Pakem	18,52	362 280	19 560,50
17. Cangkringan	44,54	1 602 190	35 971,94
Jumlah/Total	874,85	30 750 540	35 149,50
Tahun/Year 2013*)	806,39	25 530 304	26 119,99
Tahun/Year 2012	746,66	21 576 800	28 897,93

Sumber data: BPS Kabupaten Sleman

Produksi ikan air tawar (kolam) tersentral di kawasan Kecamatan Ngemplak seperti yang ditampilkan dalam Tabel 3 tersebut. Budidaya Ikan di Kabupaten Sleman terdiri dari budidaya ikan di kolam air tawar dan budidaya ikan di kolam air sawah yang dikenal dengan mina padi. Sedangkan untuk budidaya di perairan umum (karamba) masih digabung dengan penangkapan ikan di perairan umum. Produksi ikan di Kabupaten Sleman didominasi oleh budidaya di kolam air tawar, yaitu 30.750.540 kg. Budidaya mina padi dan perairan umum hanya menghasilkan masingmasing 151.900 kg dan 218.060 kg.

Sleman merupakan sentra pembudidaya ikan air tawar di D.I.Yogyakarta. Pesatnya perkembangan usaha perikanan di Sleman juga mengakibatkan meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Sleman. Minapolitan di wilayah Kabupaten Sleman, merupakan sebuah potensi yang terus dikembangkan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Di satu sisi Pemerintah Kabupaten Sleman harus mampu memberikan arah dan kerangka dalam pengembangan minapolitan. Di sisi lain masyarakat mampu merespon peluang usaha budidaya perikanan yang besar ini. Wilayah Sleman cocok untuk budidaya ikan air tawar karena kelimpahan airnya yang besar dan jenis tanahnya yang mendukung pertumbuhan dan

perkembangbiakan ikan air tawar. Berdasarkan data yang ada perkembangan perikanan di Sleman ini sampai sekarang menunjukkan prospek yang semakin bagus.

Usaha perikanan di Kabupaten Sleman pada saat ini merupakan kegiatan/usaha pokok masyarakat Sleman. Dengan kata lain pada saat ini banyak masyarakat Sleman yang bermata pencaharian pokok dari perikanan. Pada akhir tahun 2013 tercatat sebanyak 507 kelompok tani ikan dengan 5 Balai Benih Ikan dan 1 UPTD Perikanan. Wilayah Sleman juga cocok untuk budidaya ikan air tawar. Berdasarkan data yang ada perkembangan perikanan di Sleman ini sampai sekarang menunjukkan prospek yang bagus. Pada tahun 2013 produksi ikan konsumsi mencapai 25.530,3 ton (meningkat 4 ton lebih dibandingkan tahun sebelumnya), benih ikan 947 juta ekor lebih. Pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 30.750,54 (meningkat hampir 5 ton dari tahun sebelumnya).

Konsumsi ikan khususnya ikan air tawar di Kabupaten Sleman cenderung meningkat di tahun ini bila dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini bukan dikarenakan para petani ikan di kabupaten Sleman tidak meningkatkan hasil produksinya, hal ini juga dipicu dengan adanya adanya gejolak kenaikan harga daging sapi, daging ayam dan harga telur. Para ibu rumah tangga sudah semakin pandai dalam menyiasati masalah ini sehingga bisa dikatakan kenaikan konsumsi ikan air tawar di Kabupaten sleman naik dengan kisaran 25% lebih bila di bandingkan dengan tahun yang lalu.

Berdasarkan hasil analisis potensi unggulan yang karakteristik dengan kawasan Sleman maka ditentukan komoditas pangan unggulan yang didukung banyak komoditas lainnya. Komoditas pangan unggulan tersebut adalah buah salak yang berada di kawasan Kecamatan Turi dan komoditas ikan air tawar yang dikembangbiakkan di kolam yang berada di kawasan Kecamatan Ngemplak. Dua komoditas pangan unggulan ini selanjutnya dapat dikembangkan menjadi produk unggulan yang didukung berbagai produk pangan lainnya dalam rangka menghasilkan berbagai macam diversifikasi pangan untuk meningkatkan ekonomi perdesaan berbasis agropolitan.



Gambar 3. Diversifikasi salak pondoh menjadi produk turunannya (Sleman)

Tampak dalam Gambar 3 tersebut bahwa salah satu produk unggulan di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman adalah salak pondoh yang sangat melimpah. Kelimpahan salak pondoh ini di musim panen menyebabkan harga penjualan salak pondoh segar menjadi turun sehingga diperlukan upaya diversifikasi produk salak pondoh menjadi berbagai macam produk turunan salak pondoh yang lebih tahan lama dan dapat dipasarkan sepanjang tahun. Contoh produk turunan salak pondoh tersebut adalah kripik salak, dodol salak, sirup salak, manisan salak, kopi biji salak dan lain-lain. Inovasi ini harus terus dikembangkan dengan sentuhan teknologi tepat guna menjadi beragam produk turunan lainnya yang bernilai ekonomi tinggi untuk menopang kebutuhan pangan lokal yang lebih banyak dan berdaya saing tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam Gambar 4 berikut ini ditampilkan produk unggulan lainnya dari Kabupaten Sleman yakni ikan air tawar yang kelimpahannya sangat besar yang tersentral di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman;



Gambar 4. Diversifikasi ikan air tawar menjadi produk turunannya (Sleman)

Tampak dalam Gambar 4 tersebut bahwa salah satu produk unggulan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman adalah ikan air tawar khususnya ikan nila dan ikan lele yang sangat melimpah. Walaupun kelimpahan ikan air tawar khususnya ikan nila dan ikan lele ini besar di musim panen namun tidak mempengaruhi harga penjualan karena dua jenis ikan air tawar tersebut merupakan jenis ikan konsumsi yang paling banyak digemari untuk kelas ikan air tawar dengan harga terjangkau. Untuk meningkatkan nilai ekonomi kedua jenis ikan ini maka diperlukan upaya diversifikasi dengan sentuhan teknologi tepat guna menjadi produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi dibanding ikan yang dijual dalam kondisi segar. Contoh hasil inovasi yang sudah dikembangkan adalah diversifikasi ikan lele dan ikan nila menjadi abon lele, keripik lele, nila crispy, kerupuk ikan dan lain-lain yang memiliki ketahanan/keawetan sampai setahun lebih dalam kemasan. Inovasi ini harus terus dikembangkan dengan sentuhan teknologi tepat guna menjadi beragam produk turunan lainnya yang bernilai ekonomi tinggi untuk menopang kebutuhan pangan lokal yang lebih banyak dan berdaya saing tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain sentuhan teknologi tepat guna sebagai upaya diversifikasi produk turunan baik salak pondoh maupun ikan air tawar sebagai produk unggulan di Kabupaten Sleman, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan pemasaran produk turunan hasil diversifikasi tersebut. Sampai saat ini proses pemasaran produk hasil diversifikasi tersebut dipasarkan secara konvensional dan sangat terbatas di wilayah Sleman D.I.Yogyakarta saja. Kapasitas produksinya juga masih sangat terbatas karena bergantung pada permintaan pasar lokal yang terbatas selain karena modal usaha yang sangat terbatas. Upaya peningkatan daya serap produk hasil diversifikasi tersebut perlu ditingkatkan dengan membuka jalur pemasaran yang lebih luas melalui berbagai media baik pasar tradisional, pasar moderen, maupun pasar *online* (internet) yang dapat diakses secara nasional bahkan internasional. Diharapkan 2 komoditas unggulan daerah Sleman tersebut serta berbagai macam produk turunannya dapat menopang kebutuhan pangan alternatif lokal untuk ketahanan pangan nasional.

Pengembangan kawasan agropolitan dapat menyangkal asumsi yang keliru bahwa kawasan yang maju adalah kawasan yang bertransformasi menjadi perkotaan dan perubahan peranan dominan sektor pertanian ke sektor industri, dan pelayanan. Dengan asumsi bahwa sektor pertanian perhitungan produksinya sampai ke hilir yaitu sampai kepada kegiatan *agro processing*, maka suatu wilayah dapat disebut maju dengan tetap mencirikan wilayah perdesaan dan peran sektor pertanian yang tetap dominan.

Pembangunan kawasan perdesaan tidak bisa dipungkiri merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Hal ini didasari bukan hanya karena terdapatnya ketimpangan antara kawasan perdesaan dengan perkotaan tetapi juga mengingat tingginya potensi di kawasan perdesaan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong pembangunan. Berdasarkan isu dan permasalahan pembangunan perdesaan yang terjadi, pengembangan kawasan Agropolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan). Kawasan agropolitan di sini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk Kawasan Agropolitan. Kawasan tersebut terkait dengan sistem pusat-pusat permukiman nasional dan sistem permukiman pada tingkat Propinsi (RTRW Propinsi) dan Kabupaten (RTRW Kabupaten). Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis potensi unggulan yang karakteristik dengan kawasan Sleman maka ditentukan komoditas pangan unggulan yang didukung banyak komoditas lainnya. Komoditas pangan unggulan tersebut adalah buah salak yang berada di kawasan Kecamatan Turi dan komoditas ikan air tawar yang dikembangkan di kolam yang berada di kawasan Kecamatan Ngemplak. Dua komoditas pangan unggulan ini selanjutnya dapat dikembangkan menjadi produk unggulan yang didukung berbagai produk pangan lainnya dalam rangka menghasilkan berbagai macam diversifikasi pangan untuk meningkatkan ekonomi perdesaan berbasis agropolitan.
2. Salah satu produk unggulan di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman adalah salak pondoh yang sangat melimpah. Kelimpahan salak pondoh ini di musim panen menyebabkan harga penjualan salak pondoh segar menjadi turun sehingga diperlukan upaya diversifikasi produk salak pondoh menjadi berbagai macam produk turunan salak pondoh yang lebih tahan lama dan dapat dipasarkan sepanjang tahun. Contoh produk turunan salak pondoh tersebut adalah kripik salak, dodol salak, sirup salak, manisan salak, kopi biji salak dan lain-lain.
3. Salah satu produk unggulan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman adalah ikan air tawar khususnya ikan nila dan ikan lele yang sangat melimpah. Untuk meningkatkan nilai ekonomi kedua jenis ikan ini maka diperlukan upaya diversifikasi dengan sentuhan teknologi tepat guna menjadi produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi dibanding ikan yang dijual dalam kondisi segar. Contoh hasil inovasi yang sudah dikembangkan adalah diversifikasi ikan lele dan ikan nila menjadi abon lele, kripik lele, nila crispy, kerupuk ikan dan lain-lain yang memiliki ketahanan/keawetan sampai setahun lebih dalam kemasan.
4. Pengembangan kawasan agropolitan dapat menyangkal asumsi yang keliru bahwa kawasan yang maju adalah kawasan yang bertransformasi menjadi perkotaan dan perubahan peranan dominan sektor pertanian ke sektor industri, dan pelayanan. Dengan asumsi bahwa sektor pertanian perhitungan produksinya sampai ke hilir yaitu sampai kepada kegiatan *agro processing*, maka suatu wilayah dapat disebut maju dengan tetap mencirikan wilayah perdesaan dan peran sektor pertanian yang tetap dominan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI yang telah membiayai penelitian ini dalam skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) pada tahun anggaran 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. 2014. Tingkat Urbanisasi Capai 66 % 2035. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
<http://www.antaraneews.com/berita/417947/tingkat-urbanisasi-capai-66-persen-2035>
- Arjayanti, S. 2013. 80 Desa di Yogyakarta Masuk Kawasan Rawan Pangan, Bidang Ketersediaan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY,
<http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/01/80-desa-di-yogyakarta-masuk-kawasan-rawan-pangan>
- Cooper, DR dan CW Emory (1991), *Business Research Method*, 5th ed. Richard D Irwin Inc, Chicago.
- Departemen Pertanian. 2008. Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). Departemen Pertanian, Jakarta.
- Feriyanto, N. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Orang Bekerja, Investasi, Dan Jumlah Wisatawan Terhadap PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta, *Economic Journal of emerging Markets* ISSN 2086-3128, Vol.6, Issue 2, Edisi Oktober 2014 (Jurnal Terakreditasi Dikti).
- Feriyanto, N. 2014. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*, Buku, ISBN 9789793532875. Cetakan I, Maret 2014. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Fiedman, John and Mike Douglas, 1975. *Development: Toward a New Strategy for Regional Planning in Asia*. Regional Economic Centre. Nagoya. Japan.
- Friedman, J. and Weaver C. 1979. *Territory and Function The Evolution of Regional Planning*. Edward Arnold (Publisher) Ltd. London.
- Hadi, SW (1987), *Metodologi Riset*, Jilid 1, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hansen, Niles. 1982. The Role of Small and intermediate Sized Citlea in National Development Processes and Strategies. Paper delivered at Expert roup Meeting on The role of small and intertmediate cities in National development. UNCRD. Nagoya, Japan.
- Indriani, A.N. 2014. Di DIY, Hanya Tinggal 26 Desa Rawan Pangan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP),
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/12/22/ngzezd-di-diy-hanya-tinggal-26-desa-rawan-pangan>
- Rondinelli, A. Dennis. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis The Spatial Dimensions of Development Policy*. Westview Press / Boulder. London.
- Rustiadi, Ernan dan Setia Hadi, 2008, *Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan Dan Pembangunan Berimbang*, Proyek Strategis Ditjen Cipta Karya RI.

Sasongko, 2012. *Alih Fungsi Lahan DIY Memprihatinkan, Tanaman Pangan Dinas Pertanian DI Yogyakarta,*

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/12/19/mf9nfp-alih-fungsi-lahan-diy-memprihatinkan>

Soenarno, 2008, *Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah, Proyek Strategis Ditjen Cipta Karya RI.*

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN METODA KONTRASEPSI SUNTIK DMPA DI PUSKESMAS CIMAH SELATAN

Nurkarti Azni

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok

Email: nurkarti.azni@ui.ac.id

ABSTRAK

Pendahuluan, Metoda kontrasepsi DMPA adalah jenis kontrasepsi yang banyak digunakan oleh akseptor KB. Berdasarkan data BPPMPPKB Cimahi tahun 2009, akseptor baru KB suntik di Cimahi Selatan adalah 56,87%. Metoda kontrasepsi DMPA bukan merupakan pilihan yang tepat untuk penggunaan jangka lama, karena efek terhadap sistem kardiovaskuler dan kepadatan tulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metoda kontrasepsi DMPA. **Metoda,** penelitian menggunakan studi cross-sectional dengan uji statistik analisis faktor. Populasi adalah Akseptor baru DMPA periode Januari-Desember 2009 di Puskesmas Cimahi Selatan yang masih mendapatkan pelayanan pada saat penelitian. Jumlah sampel penelitian ini 67 yang diambil dengan metoda purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. **Hasil,** karakteristik akseptor DMPA di Puskesmas Cimahi Selatan 79.1% akseptor berpendidikan rendah, 64.2% berpenghasilan rendah. Analisis multivariat dengan uji statistik analisis faktor. Penelitian mengidentifikasi 8 variabel yang diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap pemilihan metoda kontrasepsi suntik DMPA. Dari hasil uji analisis faktor menunjukkan bahwa dari 8 variabel tersebut yang punya keterkaitan dan dikelompokkan menjadi 2 faktor. **Kesimpulan,** terdapat 2 kelompok faktor yang mempengaruhi pemilihan metoda kontrasepsi suntik DMPA. Faktor 1 berisi faktor yang bersifat "utama" yaitu pendidikan, paritas, pengetahuan, dukungan suami. Faktor 2 berisi faktor "pendukung" yang berisi penghasilan dan sumber informasi

Kata kunci : DMPA, cross-sectional, analisis faktor

ABSTRACT

Introduction, DMPA Contraceptive Method is the type of contraception used by acceptors. Based on data BPMPPKB Cimahi in 2009 there was 56.87% new DMPA acceptors in Puskesmas Cimahi Selatan. DMPA contraception method is not an appropriate choice for long-term use because of the effects on the cardiovascular system and bone density. This study aims to determine the factors that influence the selection of contraceptive method DMPA. **Method,** studies using cross-sectional study with a statistical test of factor analysis. The population is a new acceptor of DMPA period from January to December of 2009 in Puskesmas Cimahi Selatan and still gets service at the time of the study. 67 A number of samples of this study were taken with purposive sampling method. Collecting data using questionnaires. **Results,** DMPA acceptor characteristics in Puskesmas Cimahi Selatan acceptors 79.1% less educated, lower income 64.2%. Multivariate analysis with statistical test factor analysis. The study identified eight variables that are assumed to have an influence on the selection of DMPA Contraceptive Method. From the test results of the factor analysis showed that 8 of these variables that have relevance and grouped into two factors. **Conclusion,** There are two groups of factors that influence the selection of contraceptive methods injectable DMPA. Factor 1 contains factors that are "primary" education, parity, knowledge, husbands support. Factor 2 contains the factors "supporting" containing income and health information.

Keywords: DMPA, cross-sectional, factor analysis

PENDAHULUAN

Metoda kontrasepsi DMPA bukan merupakan pilihan yang tepat untuk penggunaan jangka lama, karena efek terhadap sistem kardiovaskuler dan kepadatan tulang. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ada hubungan antara penggunaan DMPA dalam jangka panjang dengan resiko penyakit Cardovaskuler dan kehilangan kepadatan tulang^{1,2,3}. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor yang berhubungan dengan pemilihan metoda kontrasepsi DMPA. Uji deskriptif pada penelitian ini menemukan karakteristik akseptor DMPA di Puskesmas Cimahi Selatan 79.1% akseptor berpendidikan rendah, 64.2% berpenghasilan rendah. Sedangkan pada uji multivariat terdapat 2 kelompok faktor yang mempengaruhi pemilihan metoda kontrasepsi suntik DMPA. Faktor 1 berisi faktor yang bersifat “utama” yaitu pendidikan, paritas, pengetahuan, dukungan suami. Faktor 2 berisi faktor “pendukung” yang berisi penghasilan dan informasi kesehatan.

Metoda

Penelitian dilakukan pada bulan juni tahun 2010 di Puskesmas Cimahi Selatan, menggunakan desain studi cross-sectional dengan uji statistik analisis faktor. Populasi adalah Akseptor baru DMPA periode Januari-Desember 2009 di Puskesmas Cimahi Selatan dan masih mendapatkan pelayanan pada saat penelitian (207 orang). Kriteria inklusi : Akseptor yang masih mendapatkan pelayanan pada saat penelitian. Jumlah sampel penelitian ini 67 yang diambil dengan metoda purposive sampling. Berikut cara perhitungan sampel:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

N = Jumlah populasi

$$n = \frac{207}{207.0,1^2 + 1} = 67,42$$

d = Tingkat kepercayaan/Presisi yang ditetapkan (10%)

n = Jumlah sampel

Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner. Uji validitas kuesioner dilakukan di Puskesmas Cibeber yang memiliki karakteristik populasi mirip dengan lokasi penelitian dengan 20 responden, menggunakan uji korelasi pearson product momen sedangkan uji reliabilitas menggunakan teknik alpha cronbach. 8 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Usia, Paritas, Pengetahuan, Pekerjaan, Status Ekonomi, Pendidikan, informasi kesehatan.

Definisi operasional dan Skala pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	HasilUkur	Skala
Usia / Umur	Lamanya responden menjalani hidup	Kuesioner	a. Dibagi atas 2 kategori :	Ordina 1

	sampai dengan pelaksanaan penelitian		1 = jika usia responden < 20th atau ≥ 35 th 2 = jika usia responden < 35th b. Umur responden (dalam tahun)	Ratio
Paritas/Jumlah anak	Jumlah anak yang dilahirkan akseptor kontrasepsi suntik DMPA	Kuesioner	a. Dibagi atas 2 kategori : 1 = jika memiliki anak ≥ 2 2 = jika memiliki anak < 2 b. Jumlah anak	Ordinal 1 Ratio
Pengetahuan	Kemampuan akseptor dalam memahami alat kontrasepsi suntik DMPA baik tujuan, jenis, cara tindakan, kelebihan dan efek samping.	Wawancara dengan kuesioner (10 pertanyaan)	a. Dibagi atas 2 kategori : 1 = kurang (< mean/median) 2 = baik (\geq mean/median) b. Skor pengetahuan	Ordinal 1 Ratio
Pekerjaan	Semua upaya yang dilakukan untuk mendapatkan upah dalam memenuhi kebutuhan hidup.	Kuesioner	Dibagi atas 2 kategori : 1 = Bekerja 2 = Tidak Bekerja	Ordinal 1

Status Ekonomi/ Pendapatan	Dinilai dari maksimum yang diperoleh oleh seseorang dalam suatu periode UMR Kota Cimahi Rp.1.117.000,-	Kuesioner	a. Dibagi atas 2 kategori 1 = rendah, jika pendapatan keluarga/ bulan < Rp.1.117.000,- 2= tinggi, jika pendapatan keluarga/ bulan \geq Rp. 1.117.000,- b. Jumlah penghasilan	Ordina 1 Ratio
Pendidikan	Tingkat pendidikan formal tertinggi yang diselesaikan peserta KB	Kuesioner	a. Dibagi atas 2 kategori : 1= rendah, jika tidak tamat SD – SLTP 2= Tinggi, jika SLTA – PT b. Tingkat pendidikan terakhir	Ordina 1 Ordina 1
Dukungan Suami	Dukungan suami adalah ada tidaknya motivasi dan bantuan yang diberikan kepada istri terhadap pemilihan alat untuk.	Kuesioner (4 pertanyaan)	a. Dibagi atas 2 kategori : 1 = tidak mendukung (<mean/median) 2=mendukung (\geq mean/median) b. Skor dukungan	Ordina 1 Ratio

Uji statistik analisa faktor dilakukan dengan langkah-langkah: Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan, menggunakan metode *Barlett Test of Sphericity* serta pengukuran MSA (*Measure Sampling Adequacy*). Melakukan proses inti analisis faktor, yaitu *factoring*. Menurunkan satu atau lebih faktor dari variabel-variabel yang telah lolos pada uji variabel sebelumnya. Melakukan proses *factor Rotation* atau rotasi terhadap faktor yang telah terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk ke dalam faktor tertentu.

Interpretasi atas faktor yang telah terbentuk, khususnya member nama atas variabel yang telah terbentuk yang dianggap dapat mewakili variabel-variabel anggota faktor tersebut. Validasi atas hasil faktor untuk mengetahui apakah faktor yang terbentuk telah valid.

HASIL

Dari hasil uji univariat penelitian ini, didapatkan bahwa karakteristik responden 79,1% memiliki pendidikan rendah, 76,1% mempunyai anak kurang dari 1 dan lebih atau sama dengan 2. 64,2% ibu dengan pendapatan rendah. Hasil multivariat analisis adalah sebagai berikut

a. Korelasi Matrik

Pada tahap awal *KMO-Measure of Sampling Adequacy (MSA)* menunjukkan nilai 0,576 di atas 0,5 uji dan *Barlett Spherricity* memiliki Angka signifikan 0,000. Dengan demikian kumpulan variabel tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Hasil Analisis Awal Nilai *Measure of Sampling Adequacy*

No	Variabel	MSA
1.	Pendidikan	.661
2.	Paritas	.695
3.	Penghasilan	.583
4.	Sumberinformasi	.529
5.	Pengetahuan	.671
6	Dukungan	.761

Tabel1 Hasil analisis KMO-Measure of Sampling Adequacy (MSA)

Dari analisis tersebut, didapat 2 variabel dengan nilai $MSA < 0,5$ sehingga variabel tersebut dikeluarkan secara bertahap satu persatu mulai dari variabel *MSA* terkecil sampai semua variabel mempunyai nilai di atas 0,5.

b. Ekstraksi faktor

Variabel yang memiliki $KMO > 0,5$ di ekstraksi

Komponen	Initial Eigenvalues			Extraction sums of square loadings		
	Total	Varian (%)	Kumulatif (%)	Total	Varian (%)	Kumulatif (%)
1	2.035	33.910	33.910	2.035	33.910	33.910
2	1.142	19.043	52.994	1.142	19.034	52.994

3	.904	15.073	68.017
4	.821	13.684	81.700
5	.591	9.846	91.546
6	.507	8.454	100

Tabel 2 Hasil faktor Ekstraksi

Variabel dengan *KMO-Measure of Sampling Adequacy (MSA)* > 0,5 akan diekstraksi dan dibagi menjadi 2 komponen, dengan nilai eigenvalues di atas 1. Dengan penjelasan varian sebagai berikut, Jika dari 6 variabel dijadikan 1 faktor maka faktor yang terbentuk dapat menjelaskan varian dari 6 variabel sebesar 33,91%. Jika dari 6 variabel dijadikan 2 faktor, maka faktor yang terbentuk dapat menjelaskan varian yang menjadi komponen faktor 2 sebesar 19,03%. Jumlah total varian yang dapat dijelaskan oleh kedua faktor sebesar 52,94%.

c. Rotasi Faktor

No	Variable	Correlation Value	
		1	2
1.	Pendidikan	.681	.246
2.	Paritas	-.739	.125
3.	Penghasilan	.050	.692
4.	Sumber Informasi	.057	.814
5.	Pengetahuan	.784	.160
6.	Dukungan	.550	.004

Tabel 3. Rotasi faktor

Selanjutnya dilakukan rotasi faktor, dari tabel rotasi faktor diketahui bahwa variabel pendidikan, memiliki korelasi terkuat dengan faktor 1 karena memiliki nilai *loading* di atas 0,5 yaitu pendidikan, paritas, pengetahuan, dukungan. Sedangkan faktor yang memiliki korelasi kuat dengan faktor 2 adalah penghasilan dan sumber informasi.

d. Memberi nama faktor

Dari analisis di atas dapat disimpulkan, dari keenam variabel yang diteliti dengan proses *factoring* bisa direduksi menjadi 2 kelompok faktor yang mempengaruhi pemilihan metoda kontrasepsi suntik DMPA. Faktor 1 berisi faktor yang bersifat “utama” yaitu pendidikan, paritas, pengetahuan, dukungan suami. Faktor 2 berisi faktor “pendukung” yang berisi penghasilan dan sumber informasi.

PEMBAHASAN

Terdapat hubungan antara pendidikan dengan pemilihan metoda kontrasepsi suntik DMPA. Pendidikan mempunyai korelasi cukup kuat dengan faktor 1 yaitu 0,681. (*Barlett's test* = 0.000 dan nilai *MSA* < 499). Terdapat hubungan antara paritas dengan pemilihan metoda kontrasepsi suntik DMPA (*Barlett's test* = 0.000 dan nilai *MSA* = 0.548). Paritas mempunyai korelasi cukup kuat dengan faktor 1 yaitu -0,739. Penghasilan mempunyai korelasi cukup kuat dengan faktor 2 yaitu 0,692 (*Barlett's test* = 0.000 dan nilai *MSA* > 0,5 (0,556). Terdapat hubungan antara sumber informasi dengan pemilihan metoda kontrasepsi suntik DMPA (*Barlett's test* = 0.000 dan nilai *MSA* = 0,539). Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan pemilihan metoda kontrasepsi suntik (*Barlett's test* = 0.000 dan nilai *MSA* = 0,644). Pengetahuan mempunyai korelasi yang kuat dengan faktor 1 yaitu 0,784. terdapat hubungan antara dukungan suami dengan pemilihan metoda kontrasepsi suntik DMPA (*Barlett's test* = 0.000 dan nilai *MSA* = 0,659). Dukungan suami mempunyai korelasi terkuat dengan faktor 1 yaitu -550.

KESIMPULAN

Sebagian besar ibu yang memilih menggunakan kontrasepsi DMPA di Puskesmas Cimahi Selatan memiliki pendidikan rendah (79,1%), pendapatan rendah (64,2%). Dari 8 variabel terdapat 6 variabel yang berhubungan dengan pemilihan metoda kontrasepsi suntik DMPA (*Barlett's test* = 0.000 dan nilai *MSA* > 0.5) yaitu : variabel pendidikan, paritas, penghasilan, sumber informasi, pengetahuan, dukungan suami. Terdapat 2 variabel yang tidak berhubungan dengan pemilihan metoda kontrasepsi suntik DMPA (*Barlett's test* = 0.000 dan nilai *MSA* < 0.5) yaitu variabel umur dan pekerjaan. Didapatkan 2 kelompok faktor yang mempengaruhi pemilihan metoda kontrasepsi suntik DMPA. Faktor 1 berisi faktor yang bersifat "utama" yaitu pendidikan, paritas, pengetahuan, dukungan suami. Faktor 2 berisi faktor "pendukung" yang berisi penghasilan dan sumber informasi. Rekomendasi diharapkan meningkatkan penyuluhan pada ibu dan suami untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang metod kontrasepsi serta meningkatkan dukungan suami terhadap keputusan ibu.

DAFTAR PUSTAKA

1. International Journal of Public Health, 2014. Effect of hormonal contraceptives on lipid profile and the risk indices for cardiovascular disease in a Ghanaian community. IJWH [disponible a <https://www.ncbi.nlm.nih.go>

2. The American Journal of The Medical Science, 2016. Cardiovascular Disease Risk Associated With the Long-term Use of Depot Medroxyprogesterone Acetate. <http://dx.doi.org/10.1016/j.amjms>
3. Green Journal, 2013. Use of Depot Medroxyprogesterone Acetate Contraception and Incidence of Bone Fracture. <http://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext>
4. Journal of Adolescent Depot Medroxy Progesteron Acetat and bone mineral density in adolescent- The Black Box Warning: a Position Paper of The society for adolescent medicine. 39 2006 296 3011
5. DMPA Depo medroxyprogesterone acetate Version 3 2/16 www.true.org.au

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PROGRAM PPIA BERDASARKAN
OUTPUT ANTENATAL CARE DI PUSKESMAS GEDONGTENGEN
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

Nurul Ariningtyas

Midwifery Academy of Nyai Ahmad Dahlan Yogyakarta

nurula85@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah menerapkan program Pencegahan dan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) untuk mencegah penularan virus HIV dari ibu yang menderita HIV kepada anaknya selama masa kehamilan, saat persalinan atau saat menyusui. Kota Yogyakarta mulai melaksanakan program PPIA pada tahun 2007 di Puskesmas LKB dan salah satu Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Gedongtengen. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi pelayanan program PPIA berdasarkan output antenatal care di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi langsung. Teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif Miles and Hubberman. Subjek dalam penelitian ini adalah Kasie P2M Dinkes Provinsi, Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator KIA dan Ibu Hamil K1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan program PPIA di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan kebijakan Dinkes Provinsi. Pelayanan program PPIA pada antenatal care di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan secara maksimal berkat kontrol dari pemangku kebijakan terus dilakukan.

Kata kunci : PPIA, HIV/AIDS, antenatal care.

ABSTRACT

The Government implemented a program of Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT) to prevent transmission of the HIV virus from mothers with HIV to her child during pregnancy, during delivery or while breastfeeding. Yogyakarta began to implement the PMTCT program in 2007 in Primary Health Care with Continuously Comprehensif Services. The research objective is to knowing that implementation program services of PMTCT program based on output antenatal care at Gedongkuning Primary Health Care in Yogyakarta. This study used a qualitative approach with case study design. Sampling technique with purposive sampling. Data collection techniques with in-depth interviews and direct observation. Data analysis technique using models Miles and Hubberman. Subjects in this study are the Head of the Provincial Health Office P2M, Head of Primary Health Care, KIA Coordinator Midwives and Pregnant Woman K1. The results showed that the implementation of program services at the health center PPIA Gedongtengen Yogyakarta is in conformity with the policy of the Provincial Health Office. PMTCT program services at antenatal care at Gedongkuning Primary Health Care in Yogyakarta has been implemented to the fullest thanks to the control of policy makers continue to do.

Keywords: PMTCT, HIV/AIDS, antenatal care.

PENDAHULUAN

Di Asia Tenggara, terdapat kurang lebih 4 juta orang dengan HIV dan menurut laporan perkembangan HIV-AIDS WHO (2011) sekitar 1,3 juta orang (37%) perempuan terinfeksi HIV. Jumlah perempuan yang terinfeksi HIV dari tahun ke tahun semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah laki-laki yang melakukan hubungan seksual tidak aman, yang akan menularkan HIV pada pasangan seksualnya. Pada ibu hamil, HIV bukan hanya merupakan ancaman bagi keselamatan jiwa ibu, tetapi juga merupakan ancaman bagi anak yang dikandungnya karena penularan yang terjadi dari ibu ke bayinya. Lebih dari 90% kasus anak HIV, mendapatkan infeksi dengan cara penularan dari ibu ke anak atau *mother-to-child transmission* / MTCT.

Di banyak negara berkembang, HIV merupakan penyebab utama kematian perempuan usia reproduksi. Virus HIV dapat ditularkan dari ibu HIV kepada anaknya selama masa kehamilan, pada saat persalinan atau pada saat menyusui (WHO, 2013). Di Indonesia, pemerintah menerapkan program Pencegahan dan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) atau *Prevention Mother to Child Transmission* (PMTCT). Kebijakan program PPIA mulai dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2005. Target yang harus dicapai adalah 100% dari setiap wanita pada fasilitas ANC (*Ante Natal Care*) menerima informasi mengenai *Safe Motherhood*, cara berhubungan seks yang aman, pencegahan dan penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS), PMTCT, konseling pasca tes dan layanan lanjutan (Hardon *et al.*, 2009). Menurut laporan UNAIDS (*United Nations Programme on HIV-AIDS*) tahun 2009, terdapat kemajuan signifikan dalam upaya PPIA. Salah satu sebab meningkatnya cakupan tes HIV pada ibu hamil adalah meningkatnya Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Layanan Kesehatan dan Konseling (TIPK) atau *Provider-Initiated Testing and Counseling* (PITC) di layanan/klinik *antenatal care* dan persalinan, dan layanan kesehatan lainnya.

Pelaksanaan dalam pelayanan PPIA dapat dilakukan di berbagai sarana kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) dengan proporsi pelayanan yang sesuai dengan keadaan sarana tersebut. Namun, yang terutama dalam pelayanan PPIA adalah tersedianya tenaga yang mampu dalam menjalankan program ini. Pada tahun 2007, di Yogyakarta sudah mulai melaksanakan program pencegahan dan penularan HIV/AIDS di pusat kesehatan masyarakat. Pada pusat kesehatan masyarakat yang memiliki klinik IMS dan klinik VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) melaksanakan program pencegahan penularan HIV/AIDS dengan mengidentifikasi ibu hamil melalui VCT yaitu di Puskesmas LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan). Puskesmas Gedongtengen merupakan salah satu pusesmas yang telah menerapkan program

PPIA di wilayah Kota Yogyakarta. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi pelayanan program pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak berdasarkan output *antenatal care* di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebab digunakan untuk mengungkap dan memahami fenomena HIV/AIDS di wilayah Kerja Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Informan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu informan kunci dan informan tidak kunci. Informan kunci adalah Kepala Seksi P2M Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Informan berikutnya atau informan pendukung adalah Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator KIA dan Ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan PPIA. Tempat dan peristiwa dalam penelitian ini adalah seluruh proses kegiatan pelayanan *Antenatal Care* (ANC) di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta. Dokumen atau arsip dalam penelitian ini adalah daftar pelaksanaan PPIA pada pelayanan *Antenatal Care* di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta. Dokumen tersebut merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa atau aktifitas pelayanan tersebut. Sumber ini berupa formulir/kartu ibu, buku KIA dan buku bantu KIA. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam semi terstruktur dan observasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan disajikan hasil penelitian dari informan Ibu Hamil K1, Bidan Koordinator, Kepala Puskesmas dan Kasie P2M Dinkes Provinsi DIY. Adapun sajian data dari hasil penelitian ini akan menggambarkan bagaimana implementasi pelayanan program PPIA di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Implementasi pelayanan program PPIA dapat diketahui dari *output antenatal care* dengan "7T" timbang berat badan, tekanan darah, tinggi fundus, *tetanus toxoid*, tablet zat besi (Fe), tes terhadap penyakit menular dan temu wicara. Tes terhadap penyakit menular yang dilakukan adalah tes HIV/AIDS. Serangkaian tes tersebut dilakukan saat kunjungan pertama ibu hamil ke puskesmas. Implementasi pelayanan program PPIA juga dapat dilihat dari proses konseling *pre test*, tes HIV/AIDS dan konseling *post test*. Konseling atau pemberian informasi tentang tes HIV/AIDS sebelum dilakukan tes akan sangat menentukan hasil pelayanan program PPIA.

Namun, prosedur pelaksanaan program merupakan pedoman yang sangat penting dalam menerapkan program. Bagaimana program dari pusat Kementerian Kesehatan di implementasikan di daerah oleh Dinas Kesehatan Provinsi kemudian diturunkan ke Dinas Kesehatan Kota dan terakhir di tingkat pelayanan dasar yaitu Puskesmas. Interpretasi program PPIA pada setiap petugas kesehatan dalam menjalankan program tersebut bisa berbagai macam tergantung kontrol dari pemangku kebijakan. Berikut adalah sajian data dari Informan Kasie P2M Dinkes Provinsi DIY dan Kepala Puskesmas (Kapus) yang menjelaskan tentang prosedur pelayanan program PPIA:

“...kalo ibu hamil itu masuk di koridor PITC, karna itu merupakan satu paket rangkaian dengan pemeriksaan lainnya jadi wajib...Jadi sebetulnya pemeriksaan HIV pada ibu hamil sudah jadi paket pemeriksaan...”(Informan Kasie P2M Dinkes Provinsi).

Cuplikan transkrip dari Informan (Kasie P2M Dinkes Provinsi) adalah sebuah prosedur pelayanan program PPIA yang harus diterapkan oleh puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan program PPIA yaitu Puskesmas Gedongtengen. Standar operasional prosedur pemeriksaan *antenatal care* pada ibu hamil kunjungan pertama di puskesmas yaitu diberikan pelayanan “7T” termasuk di dalamnya dilakukan tes IMS yaitu tes HIV/AIDS. Tes tersebut merupakan prosedur wajib yang harus diperoleh oleh ibu hamil kunjungan pertama untuk mengetahui status HIV ibu hamil tersebut. Status tersebut berkaitan dengan pelayanan yang akan diperoleh seorang ibu hamil dalam pengelolaan kehamilan. Peran petugas kesehatan adalah memberikan pelayanan dan juga berfungsi sebagai konselor dengan memberikan informasi tentang tes HIV/AIDS.

“...setiap pasien ANC ada paket program pemeriksaan kan, Hb, kemudian kalo ngambil darah sekalian untuk VCT. Ada informed consent, kalo tidak nanti kita dituntut”(Informan Kapus).

Informan (Kapus) menyatakan bahwa pemeriksaan *antenatal care* pada ibu hamil sudah menjadi paket pemeriksaan yang salah satunya adalah pemeriksaan darah yaitu *Haemoglobin* (Hb). Pemeriksaan tersebut dilakukan sekaligus dengan pemeriksaan HIV/AIDS. *Informed consent* atau proses pernyataan pasien setuju atau tidak setuju untuk dilakukan tindakan terlebih dahulu diberikan sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang dinyatakan oleh Informan (Kasie P2M Dinkes Provinsi) bahwa setiap pasien yang melakukan *antenatal care* pada kunjungan pertama diberikan paket pemeriksaan termasuk pemberian informasi atau konseling dan tes HIV/AIDS.

Implementasi pelayanan program PPIA berdasarkan penjelasan dari Informan (Kasie P2M Dinkes Provinsi) sudah sesuai dengan penjelasan dari Kepala Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta. Kesesuaian prosedur pelayanan program PPIA dengan *output antenatal care* dapat diketahui dengan melihat dan menanyakan langsung pada Bidan Koordinator (Bikor) selaku pemberi pelayanan program PPIA dan pasien Ibu Hamil (Bumil) yang datang memeriksa pertama kali ke puskesmas. Berikut adalah sajian data yang diperoleh dari Bikor dan Bumil:

“Semua kunjungan ibu hamil dengan trimester pertama, ibu hamil baru. Itu dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya HIV AIDS tapi ternyata setelah diadakannya pitc ini banyak kasus-kasus ternyata ibu hamil dengan HIV”(Informan Bidan Koordinator).

Informan (Bidan Koordinator) menyatakan bahwa semua ibu hamil trimester pertama yang datang berkunjung ke puskesmas tempatnya bekerja akan mendapatkan pelayanan program PPIA. Informasi tentang HIV/AIDS disampaikan sebelum dilakukannya tes HIV/AIDS. Hal ini sudah sesuai dengan prosedur pelayanan program PPIA.

“Jadi untuk pelayanan itu setiap ibu hamil yang baru datang atau yang belum pernah diperiksa kita periksa. Jadi yang baru pertama kali datang sama yang mungkin sudah beberapa kali tapi belum diperiksa ya kita periksa...sebelumnya kita kasih penjelasan dulu bahwa HIV AIDS itu bisa mengenai siapa saja walaupun tidak beresiko...”(Informan Bidan Koordinator).

Informan (Bidan Koordinator) menyatakan bahwa semua ibu hamil yang datang baik di trimester pertama, trimester kedua atau trimester ketiga yang datang berkunjung pertama kali atau sudah beberapa kali berkunjung tetapi belum pernah dilakukan tes HIV/AIDS akan mendapatkan pelayanan program PPIA. Informasi tentang HIV/AIDS disampaikan dan dijelaskan sebelum dilakukannya tes HIV/AIDS.

“...jadi memang ibu hamil yang datang pertama kali disini dan dia belum pernah berkunjung terutama tri semester pertama akan mendapatkan ee.. pemeriksaan untuk PITC atau ibu hamil yang periksa di puskesmas tapi belum pernah untuk pemeriksaan ini”(Informan Bidan Koordinator).

Informan (Bidan Koordinator) juga menyatakan bahwa implementasi pelayanan program PPIA di puskesmas tempatnya bekerja adalah dengan melakukan tes HIV/AIDS pada seluruh ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas baik yang kunjungan pertama maupun kunjungan ulang tetapi belum pernah dilakukan tes.

Penjelasan tentang implementasi pelayanan program PPIA yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap informan Bidan Koordinator tersebut sudah sesuai dengan pelayanan program PPIA seperti yang dinyatakan oleh Informan (Kasie P2M Dinkes Provinsi) dan Kepla Puskesmas. Penjelasan dari Informan selanjutnya akan memberikan gambaran lebih jelas terhadap implementasi pelayanan program PPIA di puskesmas Gedongtengen. Berikut sajian data dari Informan Ibu Hamil:

“Tadi saya datang itu masuk di pendaftaran...ditensi, ditimbang, habis tu nunggu diperiksa masuk ke KIA...bu bidan bilang kalau akan di lakukan tes untuk yang hamil pertama periksa di puskesmas, periksa darah Hb, golongan darah, urine, sama itu tadi tes HIV trus cek macam-macam ada gigi, gizi, ke psikolog juga”(Informan Bumil 1).

Informan (Bumil 1) menyatakan bahwa pelayanan yang diterimanya adalah pengukuran tekanan darah, penimbangan berat badan, pemeriksaan laboratorium seperti tes kehamilan, Hb, golongan darah, urine protein dan tes HIV kemudian pemeriksaan di klinik gigi, klinik gizi dan psikolog. Pelayanan yang didapatkan oleh Informan (Bumil 1) sudah sesuai dengan prosedur yang dinyatakan oleh Informan (Kasie P2M Dinkes Provinsi) tentang pelayanan program PPIA dengan memberikan informasi sebelum dilakukan berbagai macam tes yang salah satunya adalah tes HIV/AIDS.

“Pertama diinformasikan tentang HIV lalu pemeriksaan tentang kondisi janin, posisi dimana, detak jantungnya bagaimana dan diperiksa tekanan darah juga”(Informan Bumil 2).

Informan (Bumil 2) menyatakan bahwa pelayanan yang didapatkannya adalah pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tinggi fundus uteri (TFU), pemeriksaan denyut jantung janin dan pemberian informasi tentang HIV dan tes HIV/AIDS. Pelayanan program PPIA sudah sesuai dengan memberikan informasi diawal sebelum dilakukan tes HIV/AIDS.

“...tadi bu bidan bilang kalau akan di lakukan tes untuk yang hamil pertama periksa di puskesmas. periksa darah Hb, golongan darah, urine, sama itu tadi tes HIV. Bu bidan tadi juga sempat bilang kalau semua tes itu digunakan untuk deteksi saja, untuk mengetahui penyakit lebih dini, jadi nek ada apa-apa bisa segera cepat teratasi, gitu katanya...”(Informan Bumil 3).

Informan (Bumil 3) menyatakan bahwa pelayanan yang didapatkannya adalah pemeriksaan di KIA dan pemeriksaan di laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang telah

didapatkan adalah Hb, golongan darah, protein urine, dan tes HIV/AIDS. Bidan telah menginformasikan tentang HIV/AIDS dengan menjelaskan manfaat dari tes sehingga ibu hamil dengan sendirinya bersedia untuk dilakukan tes HIV/AIDS.

“Sudah cek HIV saya mbak...skalian cek Hb dan golongan darah...tadi setelah selesai muter-muter ke Lab, ke gigi, gizi, macem macem itu terakhir ke KIA. Bidannya yang ngasih tau hasilnya. dikasih tau hasilnya negatif. Trus dikasih konseling lagi supaya saling setia, no drugs, pake kondom, eee..itu aja mbak”(Informan Bumil 4).

Informan (Bumil 4) menyatakan bahwa telah mendapatkan pelayanan di klinik KIA dan di laboratorium. Informasi atau konseling tentang HIV/AIDS diberikan diawal sebelum dilakukan tes HIV/AIDS dan hasilnya disampaikan oleh Bidan. Informan (Bumil 4) telah mendapatkan paket pelayanan *antenatal care* “7T” sesuai dengan prosedur pelaksanaan pelayanan program PPIA.

Informan-informan diatas menceritakan bagaimana tahapan pemeriksaan yang Informan Ibu Hamil dapatkan saat diberikan pelayanan program PPIA. Beragam informasi didapatkan, mulai dari jenis pelayanan, alur pelayanan dan tes HIV/AIDS. Pasien ibu hamil yang berkunjung pertama (K1) sesuai prosedur pelayanan *antenatal care* adalah mendapatkan pelayanan “7T” yaitu; timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemberian tablet besi (*Fe*), pemberian imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*), tes terhadap penyakit menular seksual dan temu wicara dalam rangka persiapan rujukan.

Kebijakan umum pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak sejalan dengan kebijakan umum kesehatan ibu dan anak serta kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Semua ibu hamil yang datang ke pelayanan KIA untuk ANC diharapkan sebesar 80% wanita hamil mendapatkan informasi pelayanan HIV, 80% HIV tes dan konseling pada semua wanita hamil yang datang ANC, skrining 50% pasangan wanita yang mengikuti tes HIV PPIA dan 80% wanita dengan HIV menerima ARV atau profilaksis PPIA. Kebijakan Program Pencegahan HIV/AIDS pada Ibu Hamil di Indonesia tertuang dalam RAN PPIA 2013-2017 (Kemenkes, 2013).

Aplikasi kebijakan Program PPIA di setiap daerah di Indonesia membutuhkan proses sehingga hasil yang maksimal terhadap ketercapaian tujuan program didapatkan. Proses tersebut berlangsung di tingkat daerah kemudian sampai di pelayanan dasar yaitu di petugas kesehatan yang melaksanakan pelayanan program PPIA. Berbagai temuan terkait implementasi pelayanan program PPIA di Puskesmas Gedongkuning Kota Yogyakarta ditemukan pada saat penelitian berlangsung dan semua sudah disajikan dalam sajian data hasil penelitian. Seperti

yang dijelaskan dalam RAN PPIA 2013-2017 tentang hambatan dan tantangan pelaksanaan program PPIA nomor tujuh, yaitu; sistem pencatatan-pelaporan, monitoring-evaluasi dan supervisi belum dilaksanakan maksimal dan capaian hasilnya belum optimal. Oleh karena itu diperlukan peran dari pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan program PPIA. Setiap daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pusat berbeda-beda tergantung potensi dan karakter daerah yang dimiliki sehingga diperlukan kebijakan di tingkat daerah sebagai wujud dari implementasi kebijakan pusat.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2015 menunjukkan bahwa implementasi atau proses pelaksanaan pelayanan program PPIA pada pemeriksaan *antenatal care* di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta sudah sesuai seperti yang dijelaskan oleh Kasie P2M Dinkes Provinsi yaitu pelayanan program PPIA merupakan satu paket atau satu rangkaian pemeriksaan *antenatal care*. Setiap ibu hamil kunjungan pertama di Puskesmas wajib mendapatkan pelayanan *antenatal care* “7T”.

KESIMPULAN

Implementasi pelayanan program PPIA berdasarkan *output antenatal care* di Puskesmas LKB Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan semua ibu hamil kunjungan pertama (K1) mendapatkan pelayanan *antenatal care* “7T” yang salah satunya tes HIV/AIDS. Kontrol dari pemangku kebijakan terus dilakukan sehingga implementasi program berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Kasie P2M Dinkes Provinsi DIY yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu selama penelitian ini berlangsung.
2. Bapak Kepala Puskesmas Gedontengen Kota Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu selama penelitian ini berlangsung.
3. Bidan Koordinator Puskesmas dan seluruh informan Ibu Hamil yang telah membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.
4. Suamiku Ariefaldi Wicaksono, SE dan anak-anak serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin & Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Dandona, L., Kumar, S. G., Ramesh, Y. K., Rao, M. C., Marseille, E. & Kahn, J. G. 2008. Outputs, Cost and Efficiency of Public Sector Centres for Prevention of Mother to Child Transmission of HIV in Andhra Pradesh, India. *BMC Health Ser Res*, 8(26).
- Depkes RI. 2005. *Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari ibu ke Bayi*. Jakarta: Depkes RI.
- Depkes RI 2008. *Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi (Prevention Mother to Child Transmission): Modul Pelatihan*. Jakarta: Depkes RI.
- Dinkes Kota Yogyakarta, 2014. *Profil Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2014*. Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Hardon, A.P., Oosterhoff, P., Imelda, J.D., Anh, N.T & Hidayana, I. 2009. Preventing Mother-to-Child Transmission of HIV in Vietnam and Indonesia: Diverging Care Dynamics. *Sosial Science and Medicine*, 69(6):838-45.
- Hardjo, P. 2007. *Ilmu Kandungan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiro Hardjo.
- Kemenkes. 2011. *Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes. 2013. *Rencana Aksi Nasional Pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) Indonesia 2013-2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kohler, P., Okanda, J., Kinuthia, J., Mills, L., Olilo, G., Odhiambo, L., Laserson, KF., Zierler, B., Voss, J., Stewart, GJ. 2014. Community-Based Evaluation of PMTCT Uptake in Nyanza Province, Kenya. *Ploso One Volume 9 Issue 10*.
- Lussiana, C., Clemente, SVL., Ghelardi, A., Lonardi, M., Tarquino, AP., Florida, M. 2012. Effectiveness of a Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission Programme in an Urban Hospital in Angola. *Ploso One*. Volume 7 Issue 4 e36381.
- Miles, BM & Huberman, MA. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moloeng, JL. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mufdillah. 2009. *Antenatal Care Focus*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- WHO. 2011. *PMTCT Strategic Vission 2010-2015: Prevention of Mother to Child Transmission of HIV To Reach The UNGASS and Millenium Development Goals*. Geneva: WHO.

WHO. 2013. Progress Report 2011: Global HIV/AIDS Response Epidemic Update and Health Sector Progress Towards Universal Access WHO, UNICEF, UNAIDS. Geneva Switzerland: World Health Organization HIV/AIDS Department.

ANALISIS MANAJEMEN RADIO DAKWAH DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS RADIO MQ FM)

Puji Hariyanti

Program Studi Ilmu Komunikasi, FPSB, Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang KM.14 Sleman Yogyakarta

**poojie57@yahoo.com*

ABSTRAK

Di Yogyakarta, berdasarkan Directory Radio Televisi Komisi Penyiaran Daerah DIY (2014), tercatat hanya ada satu radio swasta yang memiliki positioning sebagai radio Islam. Penelitian ini ingin menjelaskan manajemen radio khususnya radio Islam terkait dengan manajemen pemrograman, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran. Keberhasilan mengelola media penyiaran ditopang oleh kreativitas manusia yang bekerja pada tiga pilar utama yang merupakan fungsi vital yang dimiliki setiap media penyiaran yaitu teknik, program dan pemasaran. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini penting untuk melihat eksistensi radio dakwah Islam di masyarakat. Radio dakwah Islam sebagai alternatif media yang mampu menyiarkan program-program yang bermutu bagi pendengarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Radio MQ FM Jogja konsisten menawarkan program-program berkualitas, yang secara berimbang menampilkan sisi idealisme dengan sisi kontemporer perkembangan-perkembangan ajaran Islam yang terjadi saat ini dengan tetap berpegang pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci: Manajemen Radio, Dakwah, Radio Mq Fm Jogja

ABSTRACT

In Yogyakarta, based Directory of Radio Television DIY Regional Broadcasting Commission (2014), there is only one private radio station which has a positioning as a Islamic radio. This study want to examine radio management, especially related to programming, human resource, and marketing management. Managing a successful broadcast media supported by the creativity of the people who work on three main pillars which are vital function of every media broadcasting, namely engineering, programs and marketing. This research uses descriptive qualitative method that aims to explain the phenomenon through data collection profusely. This research is important to notice the existence of Islamic radio in society. Islamic radio as an alternative media that broadcast high quality programs for listeners. The results showed that Radio MQ FM Jogja consistently offer quality programs, which are balanced to show the side of idealism with the contemporary developments of Islamic teachings by sticking to the Al Qur'an and Hadith.

Key word: Radio Management, Da'wah, Radio Mq Fm Jogja

PENDAHULUAN

Radio dakwah menjadi media langka di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Radio dakwah yang dimaksud adalah radio yang komposisi siarannya 100% dakwah. Radio konvensional biasanya juga menyelipkan program dakwah diantara program-program hiburan atau berita. Namun karena persentase konten dakwah yang kecil sehingga bercampur dengan konten-konten lainnya seperti musik barat, musik dangdut, infoinment, dan lain

sebagainya yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Jadi walaupun radio-radio tersebut mempunyai konten dakwah belum bisa dimasukkan kategori radio dakwah. Batasan radio dakwah dalam penelitian ini merujuk pada batasan media Islam yang diungkapkan oleh Ibrahim,dkk (2005), bahwa media Islam adalah media yang diperuntukkan bagi umat Islam, berisikan tentang kaum Muslim dan dunia Islam pada umumnya serta dibuat berdasarkan perspektif Islam. Seperti halnya definisi yang dikemukakan Jalaluddin Rakhmat (dalam Ibrahim, dkk, 2005) bahwa media Islam adalah media yang baik itu menggunakan nama Islam atau tidak, yang menyatakan diri sebagai media Islam atau tidak, tetapi yang mempunyai misi keislaman. Studi tentang manajemen radio dakwah sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Fokus penelitian lebih banyak pada manajemen pemrograman radio dakwah. Sedangkan penelitian ini ingin melihat manajemen radio dakwah secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Budyandaka (2013) terkait Strategi Kreatif Pemrograman Radio Islami di Jakarta (studi komparasi Rasil AM dan Rodja 756 AM). Perbandingan strategi kreatif pemrograman antara radio rasil AM dan Radio Rodja 756 AM terletak pada format acara unggulannya, yaitu berupa kemasan acara dan muatan acara. Studi lainnya tentang Manajemen Pemrograman Radio Komunitas Dakwah pada Radio Muslim dan Radio Imtak FM Yogyakarta oleh Prastanto (2013) dan Kebijakan dan Strategi Pemrograman pada Radio Dakwah Magelang oleh Utami (2010). Kedua penelitian ini menggambarkan tahapan-tahapan produksi program radio mulai dari perencanaan program, produksi program, eksekusi program dan pengawasan serta evaluasi program. (Hariyanti, *et.al*, 2014). Penelitian sejenis selanjutnya tentang Manajemen Pemrograman Radio Dakwah di Yogyakarta (Studi Komparasi Radio Kota Perak Yogyakarta dan Radio Persatuan bantul) oleh Retnaningtyas (2010). Penelitian ini menggambarkan kedua radio yaitu, Radio Kota Perak dan Radio Persatuan memposisikan sebagai radio dakwah. Namun dalam perkembangannya kedua radio tersebut beralih ke radio dengan muatan reguler (Hariyanti, *et.al*, 2014).

Di Yogyakarta, berdasarkan Directory Radio Televisi Komisi Penyiaran Daerah DIY (2014), tercatat hanya ada satu radio swasta yang memiliki positioning sebagai radio dakwah. Radio dakwah lainnya merupakan radio komunitas. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, banyak radio komunitas dakwah yang terdaftar namun sudah tidak lagi beroperasi. Oleh karena itu peneliti memilih obyek penelitian yaitu Radio MQ FM Jogja sebagai satu-satunya radio dakwah swasta di Yogyakarta. Studi manajemen media kali ini ingin menganalisis manajemen radio khususnya radio Islam atau radio dakwah terkait dengan manajemen pemrograman, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran. Karena seperti yang dikatakan Morissan (2009) menjelaskan bahwa keberhasilan mengelola media penyiaran sejatinya

ditopang oleh kreativitas manusia yang bekerja pada tiga pilar utama yang merupakan fungsi vital yang dimiliki setiap media penyiaran yaitu teknik, program dan pemasaran.

Penelitian ini penting untuk melihat eksistensi radio dakwah Islam di masyarakat. Radio dakwah Islam sebagai alternatif media yang mampu menyiarkan program-program yang bermutu bagi pendengarnya. Mengingat sekarang ini audiens tidak hanya menggunakan media sebagai hiburan saja tetapi juga sebagai media informasi dan media yang bisa memberikan pencerahan kepada umat. Wibowo menuliskan bahwa radio dapat dikatakan bermanfaat hanya jika bisa melaksanakan fungsi membangun kehidupan yang semakin berkebudayaan, menjadikan kehidupan manusia insani. (Wibowo,2012). Tanpa fungsi ini radio siaran dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadikan medium ini kehilangan fungsi substansinya

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Radio dakwah dengan segala dinamika dan problematika yang dihadapi adalah fenomena menarik untuk dikaji lebih dalam. Selama ini eksistensi radio dakwah kalah dengan radio siaran reguler. Padahal umat muslim di Indonesia tidak sedikit jumlahnya. Umat muslim membutuhkan media massa yang representatif yang mengusung nilai-nilai islam, sehingga mereka memiliki media yang tidak hanya memberikan hiburan semata tetapi juga memberikan informasi dan pencerahan bagi muslim, selain itu juga bisa menjadi media yang mengkonter pencitraan buruk terhadap Islam. Penelitian ini akan menjelaskan tentang radio dakwah dan manajemen radio dakwah dalam tiga aspek yaitu manajemen pemrograman, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Proses penelitian meliputi beberapa tahapan yang dimulai dari observasi dan wawancara dengan narasumber dari pihak manajemen radio dan masyarakat perwakilan audiens.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemrograman.

Ruang lingkup manajemen pemrograman radio menurut Darwanto (1992) adalah memilih dan menentukan khalayak siaran, isi dari setiap program siaran, format program siaran dan waktu penyiaran.

Berikut ini akan dipaparkan tentang manajemen pemrograman Radio MQ FM berdasarkan hasil wawancara dengan Station Manajer Radio MQ FM: Radio MQ FM Bandung merupakan radio network yang mempunyai tanggung jawab sebagai radio induk untuk menyusun program utama terkait radio jaringan lainnya yang berada di berbagai daerah tertentu yang menurut peraturan KPI masing-masing mempunyai kuota lokal. Sedangkan Radio MQ FM Jogja berfungsi sebagai stasiun afiliasi, yaitu stasiun lokal yang bekerja sama (berafiliasi) dengan stasiun jaringan (Morissan, 2009). Stasiun lokal memiliki wilayah siaran, namun sifatnya terbatas di daerah tertentu saja. Daerah layanan wajib Radio MQ FM Yogyakarta adalah Sleman, secara keseluruhan Yogyakarta dan sekitarnya yang meliputi Klaten, Magelang, Purworejo, Kebumen dan Wonosobo.

Tabel 1. Profil Pendengar Radio MQ FM Jogja

JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI 32% PEREMPUAN 68%
USIA	<15 1% 15-19 20% 20-35 70% >35 9%
STATUS PENDIDIKAN	BELUM TAMAT SMA 12% TAMAT SMA 39% TAMAT PT 49%
SES	A 25% B 15% C 48% D 12%
PEKERJAAN	PNS/TNI/POLISI 8% PEGAWAI SWASTA 15% WIRASWASTA 25% PENSIUNAN 1% PELAJAR 10% MAHASISWA 35% IBU RT 10% BURUH/PETANI 1%

Menurut Willis dan Aldridge (dalam Morissan, 2009) sistem radio berjaringan memberikan beberapa keuntungan di antaranya pada program siaran, pemasangan iklan dan efisiensi stasiun lokal. Kualitas produksi program siaran pada stasiun radio berjaringan menjadi lebih baik karena stasiun radio lokal yang bekerja sama dengan stasiun radio berjaringan akan mendapatkan berbagai acara yang pada umumnya lebih baik daripada memproduksinya sendiri, selain tentunya karena biasanya yang dikeluarkan pasti lebih mahal. Pada kasus Radio MQ FM, program induk radio jaringan harus didiskusikan dengan radio-radio lokal lainnya sebelum program diluncurkan setiap tahunnya. Bertempat di Radio MQ FM Bandung, diadakan rapat koordinasi pada bulan Desember atau November dengan radio afiliasi: Jogja, Labu Singkep dan Lampung. Dalam rapat koordinasi tersebut diadakan diskusi tentang program yang bertempat di Bandung. Dalam diskusi program disepakati apakah program yang disusun oleh Radio

MQFM Bandung perlu dimodifikasi atau perlu penyesuaian bahkan diubah sesuai kearifan lokal seperti narasumbernya yang dilokalkan atau siaran yang dilokalkan. Yang dilakukan manajemen Radio MQ FM sesuai dengan yang dikatakan Darwanto (1992), bahwa manajemen pemrograman radio dimulai dari pencarian dan pemilihan bahan yang cocok dengan kondisi masyarakat atau audiens.

Hasil diskusi program fokus pada penyesuaian program siaran dengan masing-masing kondisi lokal daerah yang mendapat jangkauan siaran radio. Setelah itu jadilah program selama satu tahun berikutnya untuk masing-masing daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait aspek program siaran adalah segmentasi, targetting, positioning, dan formating (Prayudha & Andy, 2013). Target audiens Radio MQ FM Jogja dalam anggota keluarga porsi terbesar ada pada rentang usia 25-35 dan yang lainnya adalah target pendukung. Segmentasi radio ini adalah keluarga Islam. Dan positioning yang dipilih sebagai radio pendidikan karakter yang berlandaskan nilai Islami. Hal ini mempengaruhi materi-materi yang dipilih yaitu materi yang mendidik karakter sesuai dengan ajaran Islam bahwa pendidikan dimulai dari keluarga untuk perubahan sesuai visi dan misi Radio MQ FM Jogja.

Format program berupa Edutainment, Infotainment, Talk Show, dan Insert Reportase, News, Tips, serta renungan. Program unggulan berupa talkshow rutin di mana bintang tamunya adalah para *asatids* di Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu, bintang tamu talkshow juga bisa seorang tokoh di Indonesia. Namun biasanya talkshow diselenggarakan via telpon. Ada juga tokoh yang pernah datang ke Radio MQ FM Jogja, yaitu Eri Sudewo Founder Dompot Duafa dan Duta Besar Palestina utk Indonesia. Kegiatan manajemen pemrograman terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perencanaan program di radio MQ FM Jogja meliputi direktur, manajer produksi, manajer marketing, manajer keuangan, dan seluruh stakeholder dari radio. Kegiatan perencanaan program dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap program satu tahun sebelumnya seperti feedback dari pendengar, penampilan narasumber, dan trend. Kegiatan produksi program dalam manajemen pemrograman Radio MQ Jogja meliputi dua kegiatan yaitu *on air* dan *off air*. Dalam kegiatan produksi program *on air* manajemen harus mempersiapkan ketersediaan penyiar, materi siaran, narasumber, produk-produk siaran seperti *insert* kolaborasi dengan program dari Bandung, kemudian *insert* yang berhubungan dengan prinsip yang biasanya sudah dibuat oleh Radio MQ FM Bandung dan cabang di Yogyakarta cukup menayangkan, sedangkan *insert* lokal boleh dibuat oleh masing-masing daerah. Untuk produksi *on air* melibatkan penyiar, produksi, marketing, dan keuangan. Sedangkan kegiatan produksi program *Off air*, manajemen perlu mempersiapkan kepanitiaan yang disesuaikan

dengan acara yang akan ditampilkan, misalnya pertunjukan harus mempersiapkan sarana dan prasarana seperti bintang tamu artis, alat, make up, logistik, tempat dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Jika kegiatan *off air*nya berupa *gimik* yang biasanya terdapat pertanyaan tidak terduga dari pengunjung tidak perlu peralatan yang rumit cukup membawa OB Van dan menanyakan kepada orang-orang yang bersangkutan yang sifatnya *on the spot*. Untuk produksi program *off air* melibatkan kepanitiaan yang meliputi seluruh stakeholder dari radio.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan produksi program on air di antaranya materi siaran, karena Radio MQ FM Jogja adalah radio yang berbasis Islam sehingga materi yang akan disajikan harus diseleksi terlebih dahulu mengingat banyaknya berbagai kelompok aliran atau mazhab yang berada ditengah masyarakat. Radio MQFM Jogja berusaha untuk tidak berpihak pada kelompok tertentu dengan kata lain Radio MQ FM Jogja menjembatani atau sebagai jalan tengah kelompok aliran lainnya. Sehingga dalam pemilihan berbagai materi siaran pihak Radio MQ FM Jogja harus sangat berhati-hati, dan tidak berafiliasi terhadap golongan manapun apalagi dengan golongan yang salah. Pemilihan hadist-hadist yang digunakan harus shahih yang bersumber pada kitab kitab tertentu. Hal ini menghindari masalah yang tidak diinginkan, mengingat saat ini marak di sosial media pemberitaan tentang golongan-golongan yang menyimpang. Karena Radio MQ FM Jogja merupakan radio network biasanya dari Radio MQ FM Bandung sudah memperingatkan tentang materi yang layak di siarkan maupun tidak. Sedangkan untuk produksi program *off air*, kendala berupa permasalahan teknis karena latar belakang merupakan radio bukan *event organizer*, karyawan yang sudah bertugas pada siaran on air otomatis memiliki tugas merangkap di siaran off air dan harus terbagi rata. Solusinya dengan tetap fokus pada hal-hal yang dianggap penting atau dominan yang menjadi bagian siaran seperti penyiar, operator dan reporter tidak boleh diubah-ubah sedangkan yang lain boleh membantu untuk kegiatan *off air*, hal-hal penting yang menjadi dasar penyiaran tidak boleh ditinggalkan atau tetap diutamakan. Kegiatan pengarahan program dalam tahap eksekusi program Radio MQ FM Jogja disebut internalisasi program. Tugas manajer produksi adalah menyusun program dan sosialisasi. Proses sosialisasi biasanya selesai setelah 2 sampai 3 hari sedangkan proses internalisasi bisa memakan waktu hingga 2 sampai 3 bulan karena mensinkronisasikan materi dengan penyiar dan narasumber sehingga perlu adanya beberapa tahapan evaluasi apakah sudah sesuai atau belum, jika terdapat kesalahan pasti terdapat hal yang salah baik itu dengan penyiar, materi yang dipilih. Pihak- pihak yang terlibat dalam kegiatan eksekusi program adalah *program director* untuk wilayah Jogja, penyiar, *production house*, sedangkan untuk program on air yang sifatnya *live* hanya *program director* dan penyiar.

Kegiatan pengawasan program dalam manajemen Radio MQ FM Jogja dilakukan dengan pembuatan berbagai laporan seperti laporan harian, mingguan dan bulanan. Laporan harian dilihat dari *feedback* program yang ditayangkan. Sedangkan laporan mingguan dibuat berdasarkan rekapitulasi laporan harian, performance setiap narasumber, proses siaran, dan performa penyiar. Laporan mingguan berupa rekapitulasi laporan harian akan dilaporkan kepada direktur tentang hal-hal yang menjadi kendala, evaluasi, perkembangan program. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengawasan program adalah *program director* dan direktur. Kegiatan evaluasi program dalam manajemen Radio MQ FM Jogja terdiri dari 2 macam yaitu evaluasi program bulanan dan tahunan. Laporan bulanan mencakup banyaknya *feedback* program dalam satu bulan. Jika terdapat penurunan *feedback* dalam satu bulan, maka akan diadakan diskusi penyebabnya antara *program director* dan narasumber. Pihak MQ FM dan pihak kedua yang menjadi narasumber/ pemateri mengarah kepada satu tujuan yang sama. Jika dalam 3 bulan kondisinya tetap sama diskusinya lebih padat dan sedikit mengultimatum karena kepentingan yang diwakili adalah kepentingan pendengar, jika kepentingan pendengar tidak terwakili atau terpuaskan untuk mendapatkan materi tertentu pihak MQ FM Jogja dan narasumber berupaya keras agar kepentingannya tercapai. Kegiatan ini melibatkan *Program director*. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan evaluasi program cenderung kepada person atau narasumber, karena ada yang mudah dievaluasi kadang ada yang agak susah dievaluasi, kendala teknis seperti cuaca. Solusinya dengan evaluasi terhadap *feedback* pendengar yang valid. Sebagai radio dakwah Radio MQ FM Jogja memiliki strategi dalam menyampaikan program siaran dakwah agar diterima oleh pendengar yaitu dengan memperhatikan kondisi pendengarnya, seperti di jogja otomatis menggunakan bahasa jawa atau berhubungan dengan kearifan budaya lokal masing-masing daerah. Dengan memahami audiens membuat program yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh pendengar memberikan materi sesuai dengan karakteristik pendengar. Karakteristik pendengar di Bandung dan Jogja berbeda. Audiens di Bandung sudah siap menerima tema-tema yang berat, berbeda dengan audiens di Jogja jika materi agak berat justru menjauhkan. Jumlah narasumber yang biasa mengisi program siaran dakwah berasal dari lokal sekitar lima sampai enam orang. Jika narasumber secara keseluruhan banyak karena radio MQ FM Jogja adalah radio talkshow misalnya program inspirasi pagi enam kali seminggu berarti narasumbernya juga enam orang, kemudian insirasi sore tujuh kali dalam seminggu berarti ada tujuh narasumber, berarti total ada 13 narasumber, yang info niaga tujuh orang, yang malam tujuh orang, dan yang magrib mengaji tujuh orang, total narasumber kurang lebih ada 34-35 narasumber. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan narasumber untuk mengisi program dakwah adalah penguasaan terhadap materi atau kajian

talkshow. Kedua, cara komunikasi dan sistematika menyampaikan materi, ustadz atau ustadzah yang komunikatif dan dapat menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami audiens yang dipilih untuk menjadi narasumber.

2. Sumber Daya Manusia

Manajemen Radio MQ FM Jogja menyadari perannya sebagai media massa yang menjalankan fungsi dakwah. Fungsi dakwah yang dapat diperankan oleh media massa adalah menjaga agar media massa selalu berpihak kepada kebaikan, kebenaran, dan keadilan universal sesuai dengan fitrah manusia (Arifin, 2011). Sebagai radio dakwah yang mengusung visi keislaman, Radio MQ FM Jogja melakukan seleksi tenaga kerja atau penyiar dengan latarbelakang Islam, berpegang teguh pada Al Quran dan Hadist. Perencanaan tenaga kerja atau penyiar sesuai kebutuhan radio. Sumber daya manusia Radio MQ FM Jogja menggunakan sstem rekrutmen terbuka. Terdapat buku peraturan dan SOP untuk melakukan pengarahan dan pengendalian karyawan atau penyiar agar menaati peraturan radio. Radio MQ FM Jogja juga menerapkan sanksi jika karyawan atau penyiar tidak menaati berbagai peraturan. Sistem penempatan, orientasi dan induksi karyawan atau penyiar disesuaikan bidang ilmu dan *passion* masing-masing.

Program pengembangan SDM dilakukan dengan upgrading skill 3 bulan sekali untuk mengembangkan kemampuan masing masing bidang individu. Selain pengembangan profesionalitas juga diberikan pengembangan ruhaniyah, yang pelaksanaanya satu tahun sekali di Bandung dan sebulan sekali di Jogja. Sistem kompensasi bagi karyawan atau penyiar berupa gaji, honor part time yang nominalnya tergantung jam siaran, jam reportase, jenis reportasenya. Sedangkan sistem pemberhentian karyawan atau penyiar diterapkan berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Pertama teguran lisan, kedua teguran tertulis pertama, ketiga teguran tertulis kedua dengan sanksi jika melanggar lagi dikenakan SP 1 maksimal 3 bulan. Jika melakukan kesalahan lagi mendapat SP 2, tiga bulan setelah SP 2 melakukan pelanggaran lagi SP 3 dan diberhentikan.

3. Pemasaran

Kegiatan pemasaran di Radio MQ FM Jogja dilakukan oleh manajer marketing, account executive, dan sales representative. Tetapi di Radio MQ FM Jogja diterapkan prinsip bahwa setiap orang bisa menjadi sumber marketing. Pemasaran dilakukan dalam bentuk pemasaran langsung dan tidak langsung. Pemasaran langsung dilakukan dengan silaturahmi kepada *client* dan mengenalkan Radio MQ FM Jogja atau menjalin kerjasama. Sedangkan pemasaran tidak

langsung dilakukan dengan mengirim profil Radio MQ FM Jogja ke biro iklan tertentu, atau mengirimkan ke lembaga-lembaga, secara keseluruhan lebih banyak dalam hal kerjasama. Strategi yang dilakukan Radio MQ FM Jogja dalam mempertahankan eksistensi sebagai radio dakwah di tengah persaingan radio swasta di Jogja adalah dengan menjawab keinginan atau kebutuhan dari pendengar hingga para pendengar puas sehingga diharapkan dapat menjadi pendengar loyal Radio MQ FM Jogja. Jika pendengarnya banyak maka akan tercipta kondisi yang *marketable* sehingga pemasaran akan semakin mudah. Pada saat penawaran kerjasama kepada *client* yang biasa ditanyakan adalah jumlah pendengar dan siapa pendengar tersebut. Radio MQFM JOGJA juga menerapkan kebijakan tidak menerima iklan untuk produk makanan dan minuman yang tidak halal, Produk Lembaga keuangan (perbankan dan asuransi) bukan syariah, Rokok, Bar, Diskotik.

Berikut ini beberapa faktor pendukung dan penghambat baik dari internal maupun eksternal radio dalam melakukan pemasaran di Radio MQ FM Jogja. Faktor pendukung internal adalah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, alat yang memadai untuk menjangkau pendengar yang lebih banyak. Sedangkan faktor penghambat internal berupa ketersediaan alat-alat tertentu yang mendukung siaran. Faktor pendukung eksternal berupa potensi masyarakat Jogja dan trend muslim yang semakin meningkat sehingga prospek radio dakwah juga akan meningkat. Sedangkan faktor penghambat eksternal secara umum adalah banyaknya golongan di kalangan muslim yang mengakibatkan ketidakleluasaan dalam menyebarkan materi-materi tertentu.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Radio MQ FM Jogja konsisten menawarkan program-program berkualitas, yang secara berimbang menampilkan **sisi idealisme** dengan **sisi kontemporer** perkembangan-perkembangan ajaran Islam yang terjadi saat ini dengan tetap berpegang pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Format program di Radio MQ FM berupa Edutainment, Infotainment, Talk Show, dan Insert Reportase, News, Tips, serta renungan. Kegiatan manajemen pemrograman terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Sedangkan dalam hal sumber daya manusia, radio MQ FM Jogja mengutamakan karyawan beragama Islam dan mau belajar. Radio ini sudah memiliki SOP untuk pengarahan dan pengendalian karyawan. Program pengembangan kapasitas karyawan dilakukan dengan up grading dan program rukyah yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Bandung. Strategi pemasaran Radio MQ FM Jogja dilakukan dengan dua cara. Langsung dan tidak langsung. Langsung dilakukan dengan silaturahmi dan membawa proposal kepada client untuk

mengenalkan Radio MQ FM atau menjalin kerjasama. Tidak langsung dilakukan dengan mengirim profil Radio MQ FM ke biro iklan tertentu atau lembaga-lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2011. *Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Darwanto, S. 1992. *Manajemen Produksi Acara Siaran*. Yogyakarta: Multi Media Training Center (MMTC)
- Hariyanti, Puji. 2014. *Media Islam: Kajian Manajemen dan Audiens*. Yogyakarta: Komunikasi UII
- Ibrahim, Idy Subandy, dkk. 2005. *Media dan Citra Muslim: Dari Spiritualitas untuk Berperang menuju Spiritualitas untuk Berdialog*. Yogyakarta: Jalasutra
- Morissan.(2009). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Kencana
- Prayudha, Harliantara Harley, Andy Rustam M. 2013. *Radio is Sound Only: Pengantar & Prinsip Penyiaran Radio di Era Digital*. Jakarta: Broadcastmagz
- Wibowo, Fred. (2012). *Teknik Produksi Program Radio Siaran: mengenal Medium dan Program Siaran Radio*. Yogyakarta: Grasia Book Publisher

**PEMBERDAYAAN “PETANI PEREMPUAN PERKOTAAN” BERBASIS
PADA KELUARGA SIAGA DAN EKONOMI MANDIRI MELALUI
PENGEMBANGAN
“TEKHNOLOGI TEPAT GUNA BUDI DAYA KECAMBAH”
(Suatu Program Pengembangan Petani Perkotaan Berbasis Usaha Kecil dan
Menengah / UKM)**

Punik Mumpuni Wijayanti¹, Daryanto Hadi²

¹Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia

²Madubaru PT

Email: *punik_m@yahoo.com

ABSTRAK

Negara kita, Indonesia ini adalah termasuk negara yang kaya, terutama kaya akan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tapi sayangnya pemanfaatan sumber daya alam Indonesia belum maksimal. Kita ketahui bersama bahwa dari tahun ke tahun, masalah jumlah pengangguran di Indonesia juga kian bertambah. Belum ada solusi yang jitu untuk mengatasi tingginya angka pengangguran sampai saat ini. Pengadaan lapangan kerja saja dirasa tidak cukup untuk menekan angka pengangguran di negara kita. Dapat dikatakan bahwa jumlah pencari kerja di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan, dan berdasarkan jenis kelamin maka pencari kerja perempuan mempunyai jumlah yang sama dengan pencari kerja laki laki. Berdasarkan data SP2010, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia adalah 2,6 persen. Berdasarkan jenis kelamin, TPT Laki-laki adalah 2,0 persen, sedangkan TPT Perempuan adalah 3,6 persen. Berdasarkan daerah, TPT di perkotaan 3,6 persen sedangkan di pedesaan sebesar 1,7 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa TPT Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki, dan berdasarkan daerah maka TPT perkotaan lebih tinggi daripada TPT pedesaan.

Desain penelitian dilakukan menggunakan action research dengan jumlah sampel 30 ibu PKK Pujokusuman untuk budidaya taugé. Untuk budi daya taugé menggunakan teknologi semi otomatisasi yg telah dirancang lebih efisien daripada menggunakan alat tradisional..

Manfaat dan hasil budi daya taugé adalah (1) petani perkotaan mendapatkan keuntungan financial bersih sebesar 2.700.000 per bulan, (2) kenaikan gizi keluarga bagi masyarakat. Adapun untuk pengolahan pasca panen menjadi tepung terigu, didapatkan produk biskuit yang bernilai gizi tinggi bagi anak anak dan balita

Kata kunci : Taugé, budi daya, Tekhnologi tepat guna

ABSTRACT

Our country , indonesia this is including rich country , especially is rich in natural resources which is not possessed by another country .But unfortunately the use of indonesian natural resources not maximum .We know together that from year to year , problems the unemployment rate in indonesia also continues .There has been no solution that formula for reduce the high unemployment until now .Procurement the field working it is not enough to reduce unemployment in our country .It can be said that the number of job seekers in urban areas higher than in rural areas , and on the basis of sex so job seekers women have number equal to job seekers man .Based on the data SP2010 , the open unemployment rate in indonesia is 2.6 percent .On the basis of sex , male tpt is 2,0 percent , while women tpt is 3.6 percent .Based on regional , the unemployment rate in urban 3.6 percent while in rural areas at 1.7 percent. So that it can be said that female open unemployment rate higher than open unemployment rate mani , and based on the region the open unemployment rate urban higher than open unemployment rate rural ~

A design study was conducted research using action with the total sample 30 women in pujokusuman for cultivation bean sprouts .To cultivation using was technology bean sprouts spring otomatisasi i have designed more efficient than used a traditional ~

Benefits and the results of cultivation bean sprouts are (1) farmers urban profit financial clean of IDR 2.700.000 per month, (2) a rise of nutrition family for the.As for for reprocessing

after harvest into flour wheat, obtained of biscuit products which worth nutrition high for the children and toddlers

Key Word: bean sprouts , cultivation , was technology precisely in order to

PENDAHULUAN

Negara kita, Indonesia ini adalah termasuk negara yang kaya, terutama kaya akan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tapi sayangnya pemanfaatan sumber daya alam Indonesia belum maksimal. Kita ketahui bersama bahwa dari tahun ke tahun, masalah jumlah pengangguran di Indonesia juga kian bertambah. Belum ada solusi yang jitu untuk mengatasi tingginya angka pengangguran sampai saat ini. Pengadaan lapangan kerja saja dirasa tidak cukup untuk menekan angka pengangguran di negara kita.

Jumlah, Distribusi dan Ketenagakerjaan Penduduk Indonesia

Menurut hasil Sensus Penduduk 2010 bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118. 320. 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah pedesaan sebanyak 119. 321. 070 jiwa (50,21 persen). Berdasarkan hasil SP2010, jumlah angkatan kerja adalah 107,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk yang bekerja adalah 104,9 juta jiwa, terdiri dari 66,8 juta orang laki-laki dan 38,1 juta orang perempuan. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal (perkotaan dan pedesaan), jumlah penduduk bekerja yang tinggal di perkotaan adalah sebesar 48,9 juta jiwa, sedangkan yang tinggal di daerah pedesaan adalah sebesar 56,0 juta jiwa. Sedangkan dari 107,7 juta angkatan kerja, jumlah penduduk yang mencari kerja sebanyak 2,8 juta jiwa, terdiri dari 1,4 juta orang laki-laki dan 1,4 juta orang perempuan. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal (perkotaan dan pedesaan), jumlah pencari kerja yang tinggal di perkotaan adalah sebesar 1,8 juta jiwa, sedangkan yang tinggal di daerah pedesaan adalah sebesar 961 ribu jiwa. **Dapat dikatakan bahwa jumlah pencari kerja di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan, dan berdasarkan jenis kelamin maka pencari kerja perempuan mempunyai jumlah yang sama dengan pencari kerja laki laki.**

Berdasarkan data SP2010, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia adalah 2,6 persen. Berdasarkan jenis kelamin, TPT Laki-laki adalah 2,0 persen, sedangkan TPT Perempuan adalah 3,6 persen. Berdasarkan daerah, TPT di perkotaan 3,6 persen sedangkan di pedesaan sebesar 1,7 persen.

Sehingga dapat dikatakan bahwa TPT Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki, dan berdasarkan daerah maka TPT perkotaan lebih tinggi daripada TPT pedesaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. TPAK berdasarkan SP2010 adalah sebesar 64,0 persen. TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan, masing-masing 81,2 persen dan 46,8 persen. Bila dibandingkan menurut wilayah, TPAK pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan, masing-masing sebesar 68,6 persen (pedesaan) dan 59,5 persen (perkotaan).

Sehingga dapat dikatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dan bila dibandingkan menurut wilayah bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pedesaan.

Dari data diatas dapat kita asumsikan bahwa perempuan perkotaan banyak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum perempuan di Indonesia adalah kaum yang miskin.

Jumlah, Distribusi dan Ketenagakerjaan di Propinsi DIY

Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1 844 275 orang, di mana sejumlah 1 798 207 orang diantaranya bekerja, sedangkan 46 068 orang merupakan pencari kerja. Dari hasil SP 2010, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 68,45 persen, di mana **TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan**, yaitu masing-masing sebesar 77,63 persen dan 59,69 persen. Sementara itu, bila dibandingkan menurut perbedaan wilayah, **TPAK di perkotaan lebih rendah daripada pedesaan**, masing-masing sebesar 63,09 persen dan 79,10 persen

Tingkat kemiskinan Propinsi DIY

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan dimana sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (basic needs) minimum dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum (Todaro dan Smith, 2007, *cit* BPS Prop DIY, 2013). Nilai kebutuhan minimum

kebutuhandasar tersebut digambarkan dengan garis kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak.

Garis kemiskinan di Propinsi DIY pada September 2012 sebesar Rp. 270.110,- per kapita perbulan. Apabila dibandingkan dengan keadaan Maret 2012 sebesar Rp. 260.173,- perkapota perbulan , maka garis kemiskinan selama setengah tahun mengalami kenaikan sebesar 3,82% (BPS Prop DIY, 2013).

UKM Sebagai Penyelamat Perekonomian

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UKM terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi dan permasalahan perekonomian Indonesia tersebut, maka tantangan yang dihadapi pemerintah adalah menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan: (a). **Meningkatkan ketrampilan penduduk miskin melalui kursus-kursus ketrampilan.** (b). **Meningkatkan bantuan modal bagi kelompok-kelompok usaha penduduk miskin.** (c). **Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders guna memfasilitasi pemasaran.** (d). **Meningkatkan motivasi dan ketrampilan sebagai bekal Bertransmigrasi.** (e). **Meningkatkan pembinaan rohani untuk membuka pola pikir menuju kehidupan yang layak.**

Pengembangan Tekhnologi Tepat Guna Budi Daya Kecambah

Pengembangan tekhnologi tepat guna pada pembuatan kecambah dengan memberdayakan perempuan perkotaan sebagai petani kecambah di tingkat rumah tangga, memiliki dampak multi fungsi, diantaranya: (1) dapat meningkatkan gizi keluarga, (2) dapat meningkatkan perekonomian keluarga, (3) Dapat mengurangi pengangguran perempuan khususnya daerah perkotaan yg semakin merebak, (4) meningkatkan pendidikan dan ketrampilan perempuan.

Teknologi tepat guna budi daya kecambah, sangat mudah dilakukan oleh siapapun tidak terkecuali oleh perempuan, dan sangat mudah di duplikasi dalam skala yg lebih besar. Pada budi daya ini **tidak diperlukan area yang luas** namun hanya dibutuhkan ruangan untuk meletakkan box container (1 meter persegi untuk 3 unit container), sehingga kepadatan penduduk di daerah perkotaan tidak menjadi kendala untuk melakukan budi daya kecambah tersebut.

Kebutuhan modalpun tidak terlalu tinggi hanya diperlukan modal peralatan sebesar Rp. 650.000,- / paket dan modal bahan kerja Rp. 79 500,- didapatkan hasil kotor per siklus budi daya (membutuhkan waktu 40 jam) sebesar Rp. 180.000,-. Pada setiap bulan bisa dilakukan 15 siklus budi daya kecambah ini, sehingga dapat dikatakann bahwa petani kecambah akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 2.700.000 per bulan. **Hal ini dapat meningkatkan pendapatan keluarga atau dapat dikatakan dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga.**

Pada tahap “pengolahan pasca panen” hasil yang didapatkan lebih banyak memberikan keuntungan baik bagi petani kecambah maupun bagi masyarakat setempat, karena “Tepung kecambah” mempunyai kandungan gizi yang sangat diperlukan bagi anak anak dan orang dewasa. Tepung kecambah kaya akan asam amino, merupakan sumber protein yg murah, dapat menghilangkan berbagai senyawa anti gizi di dalamnya, dapat mempertahankan mutu proteinnya dan mengandung vitamin C yang cukup tinggi. **Sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan tepung kecambah telah dapat meningkatkan gizi keluarga pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya.**

Kepraktisan teknologi budi daya ini sangat mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan program di masyarakat.

Perbandingan Komposisi Gizi Pada Kecambah Kacang Hijau Dan Kacang Hijau

Menurut PERSAGI (2009) bahwa komposisi pangan Indonesia pada kandungan gizi kacang hijau dan kecambah kacang hijau per 100 gram berat kering sangatlah meningkat (tabel1). Sebenarnya telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kandungan gizi kecambah kacang hijau (tauge) tidak diragukan lagi, dan nutrient yang terdapat pada tauge sangat bagus untuk mencukupi kebutuhan gizi anak anak dan balita pada makanan pendamping ASI.

Pada makanan anak anak dan makanan pendamping ASI, selain mengandung protein yang bermutu tinggi juga harus menghasilkan energy yang cukup tinggi. Penambahan mineral dan vitamin sangat diperlukan untuk memenuhi kelengkapan gizi yang dianjurkan. Penggunaan bahan tambahan makanan seperti penyedap, pewarna, pengawet, garam dan pemanis hendaknya dibatasi seminimal mungkin.

Tabel 1. Kandungan gizi kacang hijau dan tauge per 100 gram berat kering

NO	jenis zat gizi	satuan	kacang hijau	tauge
1	energi	g	382	354

2	Karbohidrat	g	67,22	44,79
3	Protein	g	27,1	38,54
4	Lemak	g	1,78	12,5
5	Serat	mg	8,88	11,46
6	Kalsium	mg	263,91	1729,17
7	Fosfor	mg	377,51	770,83
8	Besi	mg	8,88	8,33
9	Natrium	mg	-	-
10	Kalium	mg	-	-
11	Karoten	ug	263,91	208,33
12	Thiamin	mg	0,54	0,94
13	Riboflavin	mg	0,18	1,56
14	Niasin	mg	1,78	11,46
15	Vitamin C	mg	11,83	52,08

sumber : PERSAGI (2009)

Kandungan nilai gizi tepung kecambah lebih besar daripada kacang hijau maka bila dilakukan produk berbahan baku tepung kecambah.

Proses Pengeringan dan Penepungan Tauge

Proses pengeringan tauge hanya menggunakan alat alat sederhana yang telah dimiliki oleh ibu ibu dalam rumah tangga. Adapun alat alat yang dibutuhkan adalah oven, loyang segi empat, thermometer infra merah, dan gas elpiji bersubsidi.



Gb.2. Proses pengeringan tauge dalam oven

Setelah dilakukan pengeringan maka bahan kecambah kering dihaluskan dengan blender sampai mencapai kelembutan seperti tepung, setelah itu diayak dan jadilah tepung kecambah. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dengan suhu pada proses pengeringan terbaik dalam pembuatan tepung kecambah kacang hijau dengan menggunakan suhu 70⁰C selama 5,5 jam, dengan 20% rendemen, 5,81% kadar airnya, serta warna dan aroma disukai



Gb 3. Tepung kecambah

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan yaitu suatu bentuk penelitian refleksi-diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial (termasuk pendidikan) untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Terdapat dua esensi penelitian tindakan yaitu perbaikan dan keterlibatan. Hal ini mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke dalam tiga area yaitu: (1) Untuk memperbaiki praktek; (2) Untuk pengembangan profesional dalam arti meningkatkan pemahaman/kemampuan para praktisi terhadap praktek yang dilaksanakannya; (3) Untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini adalah tindakan melakukan budi daya kecambah kacang hijau (*sprout of mung bean*), oleh perempuan perkotaan, yaitu kelompok dasawisma ibu ibu di kampung pujokusuman, kalurahan keparakan, kecamatan Mergangsan Yogyakarta. Adapun ada 10 ibu kelompok dasa wisma yang bersedia ikut dalam program budi daya kecambah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

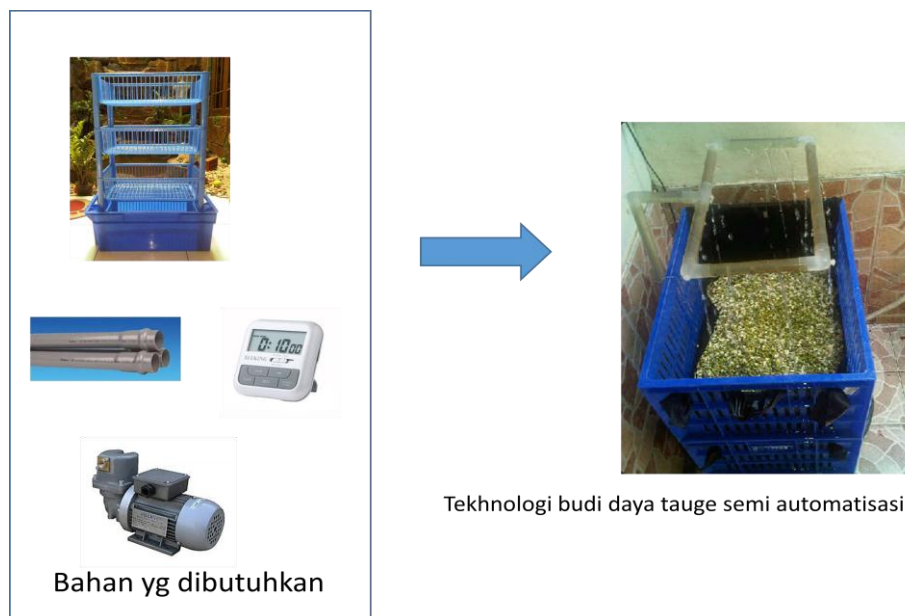
Karakteristik Responden

Ibu Dasa wisma Pujokusuman yang bersedia ikut aktif dalam program budidaya Tauge sebanyak 10 orang, dengan karakteristik pendidikan adalah sebagian besar lulusan SMA, dan karakteristik mata pencaharian sebagian besar ibu rumah tangg dan sebagian kecil buruh.

Proses Budi Daya Tauge

Budi daya tauge dengan tekhnologi yang telah kita rancang, sangatlah mudah dilakukan oleh ibu dasa wisma Pujokusuman yang tidak memiliki riwayat atau pengalaman bertani, atau belum mempunyai keahlian dalam budi daya tauge. Hanya dibutuhkan waktu 48 jam sejak peremdamam sampai dengan panen tauge.

Adapun alat yang kita kembangkan adalah seperti dalam gambar 1.



Gb.1. Tekhnologi budi daya tauge semi otomatisasi

Budi daya tauge dengan menggunakan tekhnologi semi aotumatisasi tersebut sangat dapat bermanfaat bagi ibu Dasa wisma Pujokusuman yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di wilayahnya.

Adapun analisis ekonomi dari pelaksanaan perkecambahan tauge dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4

Tabel 3. Biaya peralatan dan bahan

Alat				Rp	total
1	timer on-off	1	unit	Rp 200,000	Rp 200,000
2	Pompa air 35 watt	1	unit	Rp 100,000	Rp 100,000
3	Keranjang plastik	3	unit	Rp 60,000	Rp 180,000

*Prosiding Penelitian Seminar Nasional seri 6
"Menuju Masyarakat Madani dan Lestari"*

4	ember besar	2	unit	Rp 50,000	Rp 100,000
5	pipa plastik	1	batang (3 m)	Rp 15,000	Rp 15,000
6	kain berpori	3	meter	Rp 10,000	Rp 30,000
7	listrik	1.68	kwh	Rp 1,200	Rp 2,016
8	alat penyaring	2	unit	Rp 10,000	Rp 20,000
			S U B T O T A L		Rp 647,016
bahan					
1	air	30	liter	Rp 50,000	Rp 1,500
2	Biji Kacang hijau	6	kg	Rp 13,000	Rp 78,000
			S U B T O T A L		Rp 79,500
T O T A L					Rp 726,516

Adapun pendapatan ibu dasawisma per siklus di cantumkan dalam tabel 4.

Tabel 4. Perhitungan Pendapatan Per Siklus Budi Daya Tauge

Produksi : (1 siklus membutuhkan 48 jam)					
1	kg kacang hijau		5	kg kecambah	
6	kg kacang hijau		30	kg kecambah	
Pendapatan per siklus :					
	1	kg kecambah		Rp6.000	per kg
	30	kg kecambah		Rp,...180.000	per siklus
Pendapatan kotor per bulan :					
	15	siklus		2.700.000	

Adapun pada tabel 4 dijelaskan bahwa dalam waktu 1 bulan atau 15 siklus budi daya tauge didapatkan hasil kotor sekitar Rp. 2.700.000 perbulan dan penghasilan bersih sekitar Rp. 1.500.000 per bulan dengan penjualan hanya Rp. 6.000,- kepada penjual kecambah di pasar pasar tradisional.

Keuntungan secara financial telah didapatkan pada ibu dasawisma perkotaan melalui UKM dengan budi daya Tauge menggunakan teknologi semi otomatisasi yang telah kita

kembangkan. Adapun keuntungan dan manfaat berikutnya adalah manfaat pasca panen sebagai tepung kecambah. Pengolahan pasca panen menjadi tepung kecambah merupakan salah satu pengolahan pasca panen yang sangat sederhana namun cukup efisien karena lebih mudah dalam proses penyimpanan pasca panennya, adapun alur pengolahan pasca panen menjadi tepung kecambah.

Manfaat Dalam Agroindustri

Pelaksanaan budi daya kecambah tingkat desa wisata telah membuktikan hasil penambahan ekonomi keluarga dan penambahan gizi keluarga, namun jika pelaksanaan budi daya tersebut dilaksanakan dalam area dan wilayah yang lebih luas maka hasil produk kecambah dapat dikembangkan dalam sektor industri, diantaranya:

1. Tepung kecambah
 - a. Kapsul kecambah
 - b. Campuran makanan bayi berkebutuhan khusus (Bayi dengan BGM)
 - c. Campuran Cereal berbasis kecambah
 - d. Makanan ringan berbasis tepung kecambah
2. Enzim amylase (Pemanfaatan enzyme dalam negeri)
 - a. Industry bio etanol
 - b. Industry tekstil
 - c. Industry makanan dan minuman
 - d. Tambahan bahan kosmetik
 - e. Pembuatan gula pati
 - f. Campuran obat-obatan tertentu (industry farmasi)
3. Kulit kecambah
 - a. Pelet pakan hewan

KESIMPULAN

Kesimpulan dari program pemberdayaan budi daya kecambah sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya :

1. Peningkatan ekonomi keluarga melalui budi daya taugé yang efisien
2. Peningkatan gizi keluarga dengan mengkonsumsi tepung kecambah sebagai tambahan bahan pada setiap masakan

3. Penambahan lapangan kerja pada ibu-ibu ataupun perempuan perkotaan dan pedesaan dalam hal budi daya taugé
4. Pengurangan pengangguran di perkotaan khususnya bagi perempuan

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada :

1. Dirjen DIKTI yang telah memilih program ini sebagai 38 besar dari 500 proposal yang diajukan pada "Produk Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi berorientasi industri, Inovasi Agroindustri Expo 2013" di Jakarta
2. Bappeda Kodya Yogyakarta yang telah menerima program pemberdayaan budi daya taugé sebagai salah satu bagian program JARLIT kodya Yogyakarta
3. Dekan FAKultas Kedokteran UII yang telah membarikan ijin dan suport baik secara materi dan non materi dalam penelitian yang kami lakukan
4. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu

DAFTAR PUSTAKA

- Setyono, A. 1982, *Aspek Penambahan Asam Fitat dalam Kacang Hijau Selama Perkecambahan*. Tesis. Pascasarjana UGM. Yogyakarta. hal. 54-59.
- Cahyono, D., 2004, *Pengaruh Proses Pengeringan Terhadap Sifat Fisikokimia dan Fungsional Tepung Kecambah Kacang Hijau Hasil Germinasi dengan Perlakuan Natrium Alginat Sebagai Elisitor Penolik Antioksidan*. Skripsi IPB. Tidak Dipublikasi. 72 hal.
- Sumarno dan I. Manwan. 1990. *Grain Legumes*. National Coordinated Research Program. Central Res. Inst for Agric. (CRIFC). Bogor.
- Rahayu, K., 1988, *Isolasi dan Pengujian Aktivitas Enzym*. Pusat antar Aniversitas. UGM. Yogyakarta. hal. 1-7.
- Richana, N., Setyawan, A., Hartoto, L., dan Damardjati, D.S., 1999, Kinetik Kultivasi Produksi α -Amilase oleh Isolat Bakteri Mesofilik MII-10. *Jurnal Bioteknologi Pertanian*. 4 (2): 41-48.
- AOAC, 1995, *Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists*. Washington. D.C.
- Sutopo, J., 1993, *Aktivitas Enzym Hidrolitik Kapang Rhizopus spp pada Tempe*. Program Pascasarjana KPK. IPB. Bogor. hal. 22-27.

- Poehlman, P., and Milton, J., 1991, *The Mungbean Quality and Utilization*. Third edition. Oxford.p. 315-337.
- Setiasih, T., 1993, *Pengaruh Cara Pembuatan Tepung Kecambah Kacang Hijau (Vigna Radiata) terhadap Kandungan Gizi dan Antinutrisi*. Fateta. IPB. Bogor.
- Winarno, F.G., 1983, *Enzym Pangan*. Ed. III. PT. Gramedia. Jakarta. hal. 18-59.
- Marie, A., 1993, Introduction and Secretion of α -Amylase . Treated half Seeds and Aleurones of Wheat. *Journal Cereal Chemistry*. 70 (2):127-130.
- Fogarty, W.M., 1983, *Microbial Amylases*. In Fogarty (ed). *Myrcobial Enzymes and Technology*. Applied Science Publisher Ltd., London. Appl. Sci. Publ.
- BIOTEC, 2003, *Physically Modified Cassava Starch and its Potential Application in Food and Non-food Industry*.
- Marchal, L., and Beeftink, R., 2002, *Enzymatic Starch Hydrolysis*.
- Chibbar, R., 2000, *Carbohydrate Modification*. An Intregrated Approach to Cereal Improvement.
- Wang, N.S., 2002. *Starch Hydrolysis by Amylase*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2012, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)* Jakarta

PROFIL DAN ANALISIS PRODUKSI INDUSTRI TENUN LURIK: STUDI KASUS DI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN

Sahabudin Sidiq^{1*}, Andhika Rizky Paradita^{2*}

¹*Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*

²*Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*

**sahabuddin.sidiq@uui.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tenun lurik di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Kecamatan Cawas merupakan sentra penghasil tenun lurik dengan jumlah unit usaha paling banyak di Kabupaten Klaten. Variabel-variabel yang diteliti antara lain tenaga kerja, pengalaman, bahan baku, dan modal awal. Penelitian ini menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglas melalui uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji F, uji t, dan koefisien determinasi.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, dan dokumentasi dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 75 unit usaha. Hasil estimasi menunjukkan faktor tenaga kerja dan bahan baku signifikan pada $\alpha=10\%$, sedangkan faktor pengalaman dan modal awal tidak signifikan terhadap produksi tenun lurik. Nilai returns to scale sebesar 1,144701 menunjukkan bahwa usaha tenun lurik mengalami increasing returns to scale.

Kata kunci : usaha kecil dan menengah, faktor produksi, Cobb-Douglas

ABSTRACT

The goals of this research to analyze the factors that influence the production of weaving striated in District Cawas, Klaten Regency. District Cawas is the center of striated weaving production with the most number of business units in the regency of Klaten. The variables studied include labor, experience, raw materials, and the initial capital. This study uses a model of Cobb-Douglas production function through multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, F-test, t-test, and the coefficient of determination.

The Methods of data collection conducted by interview, questionnaire, and documentation with the number of samples are 75 business units. The result indicates the factors of labor and raw materials are significant at $\alpha = 10\%$, while the experience factor and the initial capital are not significant to the production of weaving striated. Value returns to scale of 1.144701 indicates that loom striated experiencing increasing returns to scale.

Keywords : small and medium enterprises, production factors, Cobb-Douglas

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi nasional, salah satu sektor yang memiliki peran strategis adalah sektor Usaha Kecil dan Menengah atau biasa disingkat menjadi UKM. UKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Sulistyastuti (2004) menyatakan ada empat alasan yang menjelaskan peran strategis UKM di Indonesia. Pertama, UKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit perusahaan besar. Kedua,

tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan formal yang tinggi. Sebagian besar tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil didasarkan atas pengalaman (*learning by doing*) yang terkait dengan faktor historis (*path dependence*). Ketiga, sebagian besar industri kecil berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, industri kecil telah terbukti memiliki ketahanan yang kuat (*strong survival*) ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Sektor UKM memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi krisis, hal tersebut terbukti pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ketika banyak usaha besar yang mengalami stagnasi atau bahkan berhenti beraktifitas, sektor UKM lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis tersebut. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat perkembangan UKM di Indonesia, bahwa nilai produksi UKM di Indonesia terus mengalami peningkatan pada setiap tahun. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan perkembangan usaha kecil, menengah dan besar di Indonesia antara tahun 2010-2013.

Tabel 1.

**Perkembangan Usaha Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia
Menurut PDB Atas Harga Dasar Konstan 2000 Tahun 2010-2013**

No	Indikator	Jumlah Nilai Produksi (Rp Milyar)			
		2010	2011	2012	2013
1	Usaha Kecil	239.111,4	261.315,8	294.260,7	342.579,19
2	Usaha Menengah	324.390,2	346.781,4	366.373,9	386.535,07
3	Usaha Besar	935.375,2	1.007.784,0	1.073.660,1	1.133.396,05

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2013

Dalam rangka pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi lokal sesuai potensi daerah masing-masing menjadi sangat penting. Sejalan dengan era desentralisasi, otonomi daerah memberikan kewenangan bagi setiap daerah untuk merencanakan sendiri pembangunan di daerahnya dengan dukungan sumber daya lokal. Hal ini menjadikan posisi UKM sangat penting untuk mewujudkan pembangunan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

Di Provinsi Jawa Tengah, UKM tersebar pada banyak sektor usaha, antara lain pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan sebagainya. Jawa Tengah memiliki sumber daya yang beraneka ragam dengan jumlah penduduk mencapai 33 juta jiwa (BPS, 2014). Kondisi demikian menjadikan iklim usaha di wilayah Jawa Tengah khususnya UKM memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan.

Klaten adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memajukan pembangunan perekonomian dengan mengembangkan industri Usaha Kecil dan Menengah. Seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan perkembangan banyaknya perusahaan industri di Kabupaten Klaten antara tahun 2010-2013.

Tabel 2.

Banyaknya Perusahaan Industri di Kabupaten Klaten Tahun 2010-2013

Tahun	Industri Besar/Menengah	Industri Kecil	Jumlah
2010	126	32.798	32.924
2011	126	33.937	34.063
2012	130	33.951	34.081
2013	131	34.121	34.252

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2013

Kabupaten Klaten yang terletak diantara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kota Solo, yang termasuk dalam Kasunanan Surakarta, menyebabkan kebudayaan yang ada dan berkembang secara umum masih mengikuti kebudayaan-kebudayaan daerah di sekitarnya. Kebudayaan tersebut antara lain, tari-tarian, upacara adat, baju khas daerah, dan kain tradisional, salah satunya yaitu kain tenun lurik. Tumbuh dan berkembang di daerah Jawa, kain tenun lurik menjadi kain khas untuk beberapa daerah di Jawa. Meskipun menjadi kain khas beberapa daerah, namun kain lurik memiliki perbedaan-perbedaan antara lain pada motif dan kualitas kainnya (Wardani, 2011). Seperti halnya kain batik yang menjadi kain khas daerah Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan, atau kain tenun troso yang merupakan kain khas Jepara, Klaten juga memiliki potensi tinggi di bidang ekonomi industri kain tenun tradisional khususnya kain tenun lurik.

Industri tenun lurik di Klaten pada umumnya dikelola oleh UKM. Dalam proses produksi tenun lurik, peralatan yang digunakan adalah alat tenun tradisional yang biasa disebut ATBM atau Alat Tenun Bukan Mesin. Sentra industri tenun lurik ATBM di Kabupaten Klaten tersebar di 6 kecamatan, antara lain di Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Pedan, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Polanharjo. Adapun tabel di bawah ini menunjukkan banyaknya unit usaha serta jumlah tenaga kerja pada industri tenun lurik ATBM di Klaten yang dirinci menurut kecamatan:

Tabel 3.
**Banyaknya Unit Usaha dan Tenaga Kerja Pada Industri Tenun Lurik ATBM
di Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2014**

No	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Bayat	253	760
2	Cawas	663	1364
3	Trucuk	55	158
4	Pedan	38	174
5	Karangdowo	31	65
6	Polanharjo	12	240
	Jumlah	1052	2761

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten, 2014

Kecamatan Cawas merupakan salah satu sentra penghasil tenun lurik di Kabupaten Klaten. Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Cawas merupakan sentra penghasil tenun lurik dengan jumlah unit usaha paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Klaten. Jumlah total unit usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas tercatat sebanyak 663 unit usaha. Jumlah tersebut merupakan 63,02% dari total unit usaha tenun lurik di Kabupaten Klaten yaitu berjumlah 1052 unit usaha. Untuk jumlah tenaga kerja yang bekerja pada usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas berdasarkan tabel di atas adalah sebanyak 1364 orang atau 49,40% dari jumlah total tenaga kerja yang bekerja pada usaha tenun lurik di Kabupaten Klaten.

Industri tenun lurik di Kecamatan Cawas masih tergolong industri rumah tangga, artinya proses produksinya dikerjakan di rumah sendiri yang berskala kecil dan menengah. Pengelolaan manajemen dalam usaha tenun lurik pun masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya ditangani secara profesional. sehingga perkembangannya relatif lamban. Permasalahan umum yang dialami pelaku usaha tenun antara lain adalah masalah pemasaran produk. Dalam pemasaran hasil produksi masih banyak yang bergantung pada tengkulak atau pedagang yang memesan produk yang dihasilkan. Masih banyak pelaku usaha tenun lurik yang belum memiliki outlet-outlet khusus untuk menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Padahal pemasaran ini menjadi faktor paling penting untuk meningkatkan pendapatan.

Untuk menghadapi masalah yang ada dalam usaha tenun lurik, para pelaku usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas tergabung dalam satu kelompok, yaitu Cawas Lurik Center yang merupakan wadah bagi para pelaku usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas untuk saling bekerjasama mengembangkan usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas yang tersebar di 20 desa.

Bentuk kerjasama antar pelaku usaha antara lain adalah berupa pembagian jatah produksi terutama jika terdapat pesanan tenun lurik dalam jumlah besar. Selain itu kerjasama antar pelaku usaha adalah dalam penyediaan bahan baku yang digunakan pada proses produksi, hingga masalah pemasaran produk.

Lurik adalah karya seni budaya yang merupakan *brand image* Klaten yang patut dilestarikan keberadaannya dan dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk membantu menggali potensi masyarakat untuk mengembangkan industri tenun lurik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam melakukan kegiatan produksi agar dapat memaksimalkan hasil produksi dan keuntungan yang diperoleh, pelaku usaha tenun lurik harus mampu untuk mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor produksi ditengah pengelolaan manajemen yang masih bersifat sederhana. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis dalam penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian profil dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses produksi pada usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Penulis akan memfokuskan penelitian ini pada penggunaan empat faktor produksi antara lain adalah faktor tenaga kerja, pengalaman (lama menggeluti bidang usaha tenun lurik), bahan baku, dan modal awal.

METODE PENELITIAN

Kajian Pustaka dan Model Regresi

Penelitian dengan menggunakan fungsi produksi telah banyak dilakukan . Efi Eka Wanty menggunakan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas untuk menganalisis faktor produksi batik cap Pekalongan dengan faktor produksi antara lain, tenaga kerja, kain, lilin batik, pewarna, dan tempat. Faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap produksi batik adalah faktor tenaga kerja, diikuti obat pewarna, lilin batik, tempat dan kain. Faktor yang berpengaruh paling besar terhadap produksi batik adalah faktor tenaga kerja. Disimpulkan bahwa hasil produksi batik cap di Pekalongan mengalami *increasing returns to scale*. Hal ini ditunjukkan dari nilai $1,184 > 1$. Dengan demikian outputnya dapat diperbesar lagi. Adapun nilai 1,184 adalah merupakan hasil penjumlahan dari nilai konstanta dijumlah dengan $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_5$.

Akhmad Hidayat pada tahun 2013 melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap nilai produksi serta menganalisis tingkat efisiensi baik efisiensi teknis, efisiensi harga, maupun efisiensi ekonomis pada usaha

kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. Variabel dalam penelitian ini adalah modal (X1), tenaga kerja (X2), bahan baku (X3), dan nilai produksi (Y). Data yang dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, analisis regresi linier berganda dan analisis efisiensi. Hasil uji-t modal dan bahan baku mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai produksi batik. Sedangkan variabel tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai produksi batik. Dari hasil penghitungan efisiensi diperoleh nilai efisiensi teknis sebesar 0,8427. Efisiensi harga sebesar 2,3221 dan efisiensi ekonomi sebesar 1,9568 dan nilai *returns to scale* sebesar 4,525 yang menunjukkan usaha batik berada pada *increasing returns to scale*. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum tercapai kondisi efisien pada usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan Sri Lestariningsih tahun 2006, menganalisis penawaran dan permintaan industri kecil tenun ikat troso di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Demak menunjukkan hasil penelitian bahwa di sisi permintaan (Qd) tingkat harga kain tenun (Px) berpengaruh negatif signifikan pada $\alpha=10\%$ sedangkan tingkat pendapatan konsumen (Tpk) dan harga barang substitusi (Hbs) berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha=5\%$. Sedangkan nilai R²-nya sebesar 17,6% artinya variabel permintaan kain tenun ikat troso dapat dijelaskan oleh variabel harga kain, tingkat pendapatan konsumen dan harga barang substitusi sebesar 17,6% sedangkan sisanya 82,4% diterangkan oleh faktor yang lain. Sedangkan dari sisi penawaran (Qs), variabel harga kain tenun berpengaruh positif dan biaya produksi berpengaruh negatif. Keduanya signifikan pada $\alpha=5\%$. Nilai R² nya adalah 38% sedangkan sisanya 62% diterangkan oleh variabel lain selain harga dan biaya produksi. Untuk harga keseimbangan yang terjadi antara permintaan dan penawaran adalah Rp 50.151,00 per meter sedangkan nilai outputnya 578 meter.

Yuafni (2012) dalam penelitian skripsi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi batik pada industri batik di Kota Jambi, mendeskripsikan seberapa besar modal, tenaga kerja, alat dan bahan mempengaruhi produksi kain batik Jambi. Jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional. Jumlah sampel adalah 50 industri, teknik pengambilan sampel menggunakan total sampel, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel, dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Pada signifikansi $\alpha=5\%$, hasil penelitian menyatakan bahwa modal mempengaruhi produksi batik sebesar 39,8%, tenaga kerja mempengaruhi produksi batik sebesar 25,6%, alat dan bahan mempengaruhi produksi batik sebesar 50,7%, dan modal, tenaga kerja, alat dan bahan secara bersamaan mempengaruhi produksi batik sebesar 69,1%.

Metode analisis merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Alat analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Model regresi fungsi produksi yang akan digunakan dalam menganalisis produksi tenun lurik di Kecamatan Cawas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LogY} = \log \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + \beta_4 \log X_4 + \mu$$

Tabel 4.

Definisi Variabel Fungsi Produksi Tenun Lurik

Kode	Definisi	Satuan
Y	Output/hasil produksi tenun lurik	Meter
X1	Tenaga kerja yang ikut berproduksi	Orang
X2	Pengalaman/lama menggeluti sektor tenun lurik	Tahun
X3	Bahan baku yang digunakan dalam satu bulan	Rupiah
X4	Modal awal yang digunakan	Rupiah
$\beta_1 - \beta_5$	Koefisien Regresi	

Estimasi model dilakukan menggunakan program Eviews 6.0 dengan metode OLS. Estimasi dilakukan dengan merubah variabel-variabelnya terlebih dahulu dengan bentuk logaritma. Bentuk logaritma tersebut dimaksudkan untuk memenuhi fungsi Cobb-Douglas, sehingga koefisien dari variabel independen (X) mencerminkan elastisitasnya.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian diambil secara langsung pada objek penelitian. Pengambilan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha tenun lurik dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diambil melalui studi kepustakaan, yaitu dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, laporan-laporan lembaga yang bersangkutan, serta surat kabar elektronik yang diterbitkan di internet. Untuk melengkapi penelitian ini juga dilengkapi rujukan-rujukan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten pada usaha kecil dan menengah tenun lurik yang berlokasi di Kecamatan Cawas, karena merupakan sentra produksi lurik terbanyak. Sampel yang diteliti adalah sebanyak 75 pelaku usaha tenun lurik. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak (*random sampling*) di Kecamatan Cawas. Penarikan sampel secara acak sederhana merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel (Suryadi, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Kecamatan Cawas merupakan salah satu kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di kabupaten Klaten, tepatnya terletak 18 km dari pusat Kabupaten Klaten. Secara geografis Kecamatan Cawas terletak pada posisi $110^{\circ}.30'$ - $110^{\circ}.45'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}.30'$ - $7^{\circ}.45'$ Lintang Selatan. Batas-batas wilayah secara administratif antara lain adalah:

1. Sebelah utara : Kecamatan Karangdowo dan Kecamatan Pedan
2. Sebelah selatan : Kabupaten Sukoharjo
3. Sebelah timur : Kabupaten Gunung Kidul (DIY)
4. Sebelah barat : Kecamatan Trucuk dan Kecamatan Bayat

Kecamatan Cawas merupakan salah satu sentra penghasil tenun lurik di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten tahun 2014, jumlah total unit usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas adalah sebanyak 663 unit usaha. Jumlah tersebut merupakan 63,02% dari total unit usaha tenun lurik di Kabupaten Klaten yaitu berjumlah 1052 unit usaha.

Industri Tenun lurik sudah cukup lama berkembang di Kecamatan Cawas. Untuk lebih jelasnya mengenai tahun berdirinya usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Usaha Tenun Lurik di Kecamatan Cawas Dirinci Berdasarkan Tahun Berdiri

No.	Tahun Berdiri	Frekuensi	Persentase (%)
1	1981-1990	1	1,33
2	1991-2000	22	29,33
3	2001-2010	49	65,33
4	> 2010	3	4,00
Jumlah		75	100%

Sumber: Data Primer Diolah

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa tahun berdiri usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas paling banyak antara tahun 2001-2010 yang jumlahnya mencapai sejumlah 49 unit usaha

(65%) dan paling sedikit adalah antara tahun 1981-1990 yang hanya berjumlah 1 unit usaha (1,33%).

Masyarakat Kecamatan Cawas selain bermata pencaharian dalam bidang pertanian, sebagian besar juga bermata pencaharian dalam bidang usaha tenun lurik. Data dari Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten tahun 2014 mencatat bahwa terdapat sebanyak 1364 orang tenaga kerja yang bekerja dalam bidang usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas. Dalam penggunaan tenaga kerja, para pelaku usaha harus memperhatikan berapa banyaknya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan besarnya biaya produksi dan pendapatan yang diterima. Untuk lebih jelasnya tabel di bawah ini menunjukkan hasil observasi jumlah penggunaan tenaga kerja oleh pelaku usaha tenun lurik:

Tabel 6
Jumlah Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usaha Tenun Lurik

No.	Jumlah Tenaga Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1	1-5	43	57,33
2	6-10	26	34,67
3	11-15	3	4,00
4	16-20	2	2,67
5	21-30	1	1,33
Jumlah		75	100%

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penggunaan tenaga kerja yang paling banyak pada usaha tenun lurik adalah antara 1-5 orang tenaga kerja dengan jumlah 43 unit usaha (57,33%) dan yang paling sedikit adalah penggunaan tenaga kerja antara 21-30 orang yaitu hanya ada 1 unit usaha (1,33%).

Tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah tenun lurik di Kecamatan Cawas rata-rata sudah berusia antara 40-50 tahun. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja usia muda di Kecamatan Cawas kurang tertarik untuk masuk ke dalam usaha tenun lurik. Mereka lebih memilih untuk bekerja di pabrik-pabrik atau merantau ke daerah lain. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran pada sebagian pelaku usaha tenun lurik karena mereka menjadi kesulitan untuk melakukan regenerasi tenaga kerja sedangkan tenaga kerja yang mereka miliki berangsur memasuki usia senja dimana produktivitas mereka akan semakin menurun.

Industri tenun lurik di Kecamatan Cawas masih tergolong industri rumah tangga, artinya proses produksinya dikerjakan di rumah sendiri yang berskala kecil dan menengah. Oleh karena

itu, dalam memulai usaha tenun lurik para pelaku usaha bisa memulai mendirikan usaha dengan modal awal yang tidak cukup besar. Meski dengan modal awal yang tidak cukup besar, usaha tenun lurik dapat dikembangkan dengan memanfaatkan keuntungan yang diperoleh untuk kemudian digunakan sebagai modal tambahan untuk membeli peralatan baru serta menambah jumlah bahan baku yang digunakan. Berikut tabel penggunaan modal awal oleh para pelaku usaha tenun lurik:

Tabel 7

Penggunaan Modal Awal Pada Usaha Tenun Lurik

No.	Jumlah Modal (Juta Rupiah)	Frekuensi	Persentase (%)
1	1-5	40	53,33
2	6-10	28	37,33
3	11-15	4	5,33
4	16-20	3	4,00
Jumlah		75	100%

Sumber: Data Primer Diolah

Penggunaan modal awal sejumlah antara 1-5 juta rupiah adalah yang paling banyak digunakan ketika memulai usaha tenun lurik yaitu dengan jumlah 40 unit usaha (53,33%). Penggunaan modal awal sejumlah antara 15-20 juta rupiah adalah yang paling sedikit digunakan yaitu hanya 3 unit usaha (4%).

Dalam proses produksi tenun lurik ada dua bahan baku yang digunakan, yaitu benang dan pewarna. Untuk bahan baku benang yang biasa digunakan adalah benang jenis katun dan polyester dan untuk bahan baku pewarna yang biasa digunakan adalah pewarna sintetis. Bahan baku tersebut dapat diperoleh di pasar lokal maupun didatangkan dari daerah lain. Jumlah penggunaan bahan baku dalam proses produksi akan menentukan banyaknya output yang dihasilkan. Berikut adalah tabel penggunaan bahan baku dalam produksi tenun lurik yang dirinci berdasarkan harga bahan baku yang digunakan dalam satu bulan produksi:

Tabel 8

Harga Total Penggunaan Bahan Baku Dalam Satu Bulan Produksi

No.	Jumlah Bahan Baku (Juta Rupiah)	Frekuensi	Persentase (%)
1	≤ 5	30	40,00
2	5,1-10	34	45,33
3	10,1-15	6	8,00
4	15,1-20	2	2,67

5	> 20	3	4,00
Jumlah		75	100%

Sumber: Data Primer Diolah

Penggunaan bahan baku sebesar 5,1-10 juta rupiah adalah yang paling banyak digunakan pada proses produksi tenun lurik dalam satu bulan dengan persentase 45,33%, sedangkan yang paling sedikit digunakan adalah penggunaan bahan baku sebesar 15,1-20 juta rupiah dengan persentase 2,67%.

Dalam melakukan pemasaran produk, rata-rata hasil produksi tenun lurik dipasarkan di daerah sekitar Klaten seperti Yogyakarta, Solo, sampai ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa seperti Semarang, Pekalongan, Surabaya, hingga Jakarta. Bahkan ada juga pelaku usaha yang sudah memasarkan produknya sampai ke Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk daerah lokal, pemasaran hasil produksi hanya dilakukan dalam jumlah yang kecil. Dari hasil observasi di lapangan hanya ditemukan satu pelaku usaha yang memasarkan produknya sampai ke pasar luar negeri, tepatnya Australia. Sangat sedikitnya pelaku usaha yang memasarkan produknya sampai ke pasar luar negeri disebabkan karena kurangnya informasi yang dimiliki untuk melakukan proses ekspor produk ke luar negeri. Selain itu proses mendapatkan izin ekspor pun juga sulit untuk didapatkan, sehingga dalam melakukan ekspor produk ke luar negeri pelaku usaha harus menggunakan jasa *broker* atau perantara yang memiliki akses untuk melakukan kegiatan ekspor. Hal ini tentu menyusahakan pelaku usaha yang akan menjual produknya ke luar negeri karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan jasa *broker* sebagai perantara pengiriman produk ke luar negeri.

Analisis Hasil Regresi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tenun lurik di Kecamatan Cawas. Fungsi produksi yang digunakan dalam analisis adalah fungsi Cobb-Douglas. Pengolahan data dilakukan dengan program *evIEWS* 6.0 dengan metode OLS. Model yang diestimasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Log}Y = \log \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + \beta_4 \log X_4 + \mu$$

Tabel 9

Hasil Regresi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Tenun Lurik

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
C (konstanta)	-5,881834	-4,637780	0,0000
X1 (tenaga kerja)	0,336508	3,516248	0,0008

X2 (pengalaman)	0,077209	0,793840	0,4300
X3 (bahan baku)	0,669791	7,004759	0,0000
X4 (modal awal)	0,061193	1,090229	0,2794
R ²	0,838404	-	-
F	90,79483	-	0,000000

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil regresi di atas dari empat variabel independen yang mempengaruhi produksi tenun lurik terdapat dua variabel signifikan dan dua variabel tidak signifikan jika dilihat dari nilai probabilitas. Variabel signifikan diantaranya X1 (tenaga kerja), X3 (bahan baku) dimana probabilitasnya berada di bawah nilai $\alpha=10\%$. Terdapat dua variabel tidak signifikan yaitu X2 (pengalaman), X4 (modal awal) karena nilai probabilitasnya di atas nilai $\alpha=10\%$.

Hasil estimasi di atas dapat dituliskan menjadi sebuah persamaan sebagai berikut:

$$Y = -5,881834 X1^{0,336508} X2^{0,077209} X3^{0,669791} X4^{0,061193}$$

Dari persamaan di atas dapat dilihat elastisitas dari tenaga kerja, pengalaman, bahan baku, modal awal dari nilai koefisien hasil regresi. Nilai koefisien dari persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai koefisien elastisitas tenaga kerja sebesar 0,336508 menunjukkan setiap penambahan 1% tenaga kerja dalam produksi akan meningkatkan output sebesar 0,336%.
- Nilai koefisien elastisitas pengalaman sebesar 0,077209 menunjukkan setiap penambahan 1% pengalaman dalam produksi akan meningkatkan output sebesar 0,077%.
- Nilai koefisien elastisitas bahan baku sebesar 0,669791 menunjukkan setiap penambahan 1% bahan baku dalam produksi akan meningkatkan output sebesar 0,669%.
- Nilai koefisien elastisitas modal awal sebesar 0,061193 menunjukkan setiap penambahan 1% modal awal dalam produksi akan meningkatkan output sebesar 0,061%.

Pengaruh tenaga kerja terhadap produksi tenun lurik

Hasil estimasi diperoleh t hitung untuk variabel tenaga kerja (X1) sebesar 3,516248. Untuk melakukan uji t maka dicari nilai t kritis dari tabel distribusi t dengan $\alpha=10\%$ dan Df (n-k) sebesar 70 maka didapatkan nilai 1,66691. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t hitung > t tabel. Hal tersebut berarti H₀ ditolak, hubungan variabel independen tenaga kerja (X1) dengan variabel dependen (Y) adalah signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Effe Eka Wanty tahun 2006 bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh dalam nilai produksi pada ukm batik di Pekalongan. Sehingga hasil penelitian antara ukm batik

di Pekalongan dengan ukm tenun lurik di Kecamatan Cawas adalah sama yaitu variabel tenaga kerja yang yang digunakan memiliki pengaruh terhadap nilai produksi.

Pengaruh pengalaman terhadap produksi tenun lurik

Hasil estimasi diperoleh t hitung untuk variabel pengalaman (X2) sebesar 0,793840. Hasil dari evaluasi adalah nilai t hitung $<$ t kritis (1,66691). Hal tersebut berarti gagal menolak H_0 , yang berarti pengaruh variabel pengalaman (X2) terhadap produksi tenun lurik (Y) secara statistik tidak signifikan. Pengalaman dalam usaha tenun lurik tidak berpengaruh karena meski sudah lama menggeluti bidang usaha tenun lurik, namun para pelaku usaha baik dari pengusaha maupun tenaga kerja sebagian besar tidak menjadikan usaha tenun lurik sebagai sumber penghasilan yang utama. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Cawas masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama sehingga sering ada anggapan bahwa usaha tenun lurik hanya sekedar usaha sampingan sementara menunggu musim bertani.

Pengaruh bahan baku terhadap produksi tenun lurik

Hasil estimasi diperoleh t hitung untuk variabel bahan baku (X3) sebesar 7,004759. Hasil dari evaluasi adalah nilai t hitung $>$ t kritis (1,66691). Maka dapat disimpulkan, bahan baku (X3) signifikan terhadap produksi tenun lurik. Produksi tenun lurik sangat ditentukan oleh jumlah bahan baku yang digunakan. Variabel bahan baku memiliki pengaruh positif dalam produksi tenun lurik karena semakin besar jumlah bahan baku yang digunakan maka output tenun lurik yang dihasilkan akan semakin besar pula.

Pengaruh modal awal terhadap produksi tenun lurik

Hasil estimasi diperoleh t hitung untuk variabel modal awal (X4) sebesar 1,090229. Hasil dari evaluasi adalah nilai t hitung $<$ t kritis (1,66691). Maka dapat disimpulkan, modal awal (X4) tidak signifikan terhadap produksi tenun lurik. Modal awal dalam usaha tenun lurik tidak berpengaruh karena usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas sebagian besar berasal dari usaha kecil atau rumah tangga yang ketika memulai usaha tenun lurik tidak harus menggunakan sejumlah uang modal awal dalam jumlah yang besar. Meski dengan modal awal yang tidak besar, usaha tenun lurik dapat terus berkembang dengan memanfaatkan keuntungan yang diperoleh untuk kemudian digunakan sebagai modal tambahan untuk membeli peralatan baru serta menambah jumlah bahan baku yang digunakan. Pola manajemen yang masih sederhana menyebabkan banyak usaha tenun lurik tidak dikembangkan secara maksimal, karena tidak semua pelaku usaha yang menjadikan usaha tenun lurik sebagai sumber penghasilan yang utama. Hal tersebut menyebabkan dalam kelanjutan usaha, tidak semua usaha tenun lurik mampu berkembang secara maksimal.

Returns to Scale

Returns to scale digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dari suatu usaha yang diteliti tersebut berada dalam kondisi *increasing*, *constant*, atau *decreasing returns to scale*. Berdasarkan fungsi Cobb-Douglas, maka dapat diketahui *returns to scale* pada usaha tenun lurik di Kecamatan Cawas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\sum\beta_i &= \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 \\ &= 0,336508 + 0,077209 + 0,669791 + 0,061193 \\ &= 1,144701\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan *returns to scale* di atas pada usaha kecil dan menengah tenun lurik di Kecamatan Cawas diperoleh hasil sebesar 1,144701. Hasil tersebut menunjukkan bahwa angka *returns to scale* lebih dari 1 yang berarti berada pada kondisi *increasing returns to scale*. Nilai *increasing returns to scale* sebesar 1,144701 berarti apabila terjadi kenaikan input sebesar 1 persen maka akan menaikkan output produksi sebesar 1,144701 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah tenun lurik di daerah penelitian ini layak untuk dikembangkan dan dilanjutkan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Tenun Lurik di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil koefisien determinasi maka variabel dependen tenaga kerja, pengalaman, bahan baku, dan modal awal dapat menjelaskan pengaruh pada produksi tenun lurik. Variabel tenaga kerja, pengalaman, bahan baku, dan modal awal dalam penelitian ini bersama-sama dapat menjelaskan pengaruh terhadap produksi tenun lurik dalam uji F. Variabel tenaga kerja dan bahan baku berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi tenun lurik. Variabel pengalaman dan modal awal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produksi tenun lurik. Hasil produksi tenun lurik mengalami kondisi *increasing returns to scale*. Hal ini ditunjukkan dari nilai $1,144701 > 1$ yang berarti apabila terjadi kenaikan input sebesar 1 persen maka akan menaikkan output produksi sebesar 1,144701 persen.

Implikasi dari hasil penelitian ini: Pertama, perlu adanya proses pelatihan dan perekrutan tenaga kerja baru untuk menenun lurik karena tenaga kerja akan mempengaruhi hasil produksi tenun lurik. Kedua, perlu adanya terobosan dalam melakukan pemasaran hasil produksi tenun lurik, antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam memasarkan produk dengan memanfaatkan media internet sebagai sarana melakukan promosi dan pemasaran produk. Ketiga, pemerintah diharapkan mampu membantu perkembangan usaha kecil dan menengah

tenun lurik dengan memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga kerja untuk menenun lurik, serta memberikan suntikan modal sehingga usaha tenun lurik mampu terus berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada para pengrajin tenun lurik di kecamatan Cawas, kabupaten Klaten yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam menyediakan data penelitian ini. Ucapan juga diartikan kepada program studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dana untuk penelitian ini dan pihak-pihak lain yang membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. (2010). *Tenun Tradisional di Tengah Persaingan Era Pasar Bebas*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hariyanto, I. (2012). *Tenun Lurik Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*. *Jurnal Kriya Seni ISI Surakarta* , 107-122.
- Hidayat, A. (2013). *Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Kecil dan Menengah Batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Lestariningsih, S. (2006). *Analisis Penawaran dan Permintaan Industri Kecil Tenun Ikat Troso di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pindyck, R. S. (2009). *Mikroekonomi*. Jakarta: Indeks.
- Reksohadiprodjo, S. (1999). *Manajemen Produksi*. Yogyakarta: BPFE.
- Salvatore, D. (2011). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Simanjuntak, P. J. (1999). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekartawi. (2003). *Teori Ekonomi Produksi Dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2003). *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulam, A. L. (2008). *Teknik Pembuatan Benang dan Pembuatan Kain*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Sulistiyastuti, D. R. (2004). *Dinamika UKM, Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , 143-164.

- Suryadi, P. (2009). In *Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syukur. (2001). *Metode Penelitian dan Penyajian Data Pendidikan*. Semarang: Medya Wiyata.
- Wanty, E. E. (2006). Analisis Produksi Batik Cap Dari UKM Batik Kota Pekalongan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wardani, N. D. (2011). Kain Lurik Pedan Dan Upaya Pelestarian. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widodo, S. T. (2008). Produksi Tenun ATBM Dengan Aplikasi Dan Variasi Pakan Non Benang. *Jurnal Seni Rupa Dan Desain* , 24-35.
- Yuafni. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Batik Pada Industri Batik Jambi di Kota Jambi. Padang: Universitas Negeri Padang.

**PERANAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DALAM MENCIPTAKAN
GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PERIZINAN DA PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Saladdin Wirawan Effendy
*STIM Amkop Palembang
uibila360@gmail.com*

ABSTRAK

Untuk melaksanakan pelayanan yang good governance Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak tahun 2011 telah melakukan perubahan-perubahan dalam organisasinya yaitu dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Rancangan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan informan penelitian adalah Sekretaris Badan, Manajemen representatif, Sekretaris ISO, Kepala Bidang Perizinan, Kepala Bidang Penanaman Modal, staf pelayanan. Hasil penelitian didapat : 1. Penerapan manajemen mutu menyebabkan masyarakat menjadi mengetahui prosedur pengajuan izin, syarat-syarat pengajuan izin, lama tunggu pengajuan izin, biaya yang harus dikeluarkan dan personil-personi yang bertanggung jawab. Selain itu masyarakat juga disediakan sarana untuk mengajukan komplain nya jika ada pelayanan yang tidak sesuai prosedur. Hal lain adalah masyarakat mengetahui informasi mengenai bidang perizinan dan penanaman modal 2. Adapun perbaikan-perbaikan yang ada melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem kearsipan, perbaikan prosedur, pelatihan-pelatihan terhadap personil serta membuat prosedur-prosedur manajemen lain

Kata kunci : Sistem manajemen mutu, good governance

ABSTRACT

To implement good governance services Licensing Agency for Investment and Ogan Ogan Ilir since 2011 has made changes in its organization by implementing a quality management system ISO 9001: 2008. The design of the method of qualitative research with research informants is the Board Secretary, Management representative, ISO Secretary, Head of Licensing, Head of Investment, service staff. The result is: 1. Implementation of quality management that the community be aware permit application procedures, the terms of the permit application, a long wait for licensing, costs and personnel-personi responsible. Also, they provided a means to lodge his complaint if there are services that do not comply with procedures. The other thing is the community determines the information about the field of licensing and investments 2. The improvements are there to make improvements to the archival system, improvement of procedures, training of personnel as well as making other management procedures.

Keywords : The quality management system, good governance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kegiatan yang diberikan oleh pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat adalah pelayanan publik. Pelayanan publik ini merupakan perwujudan dari usaha pemerintah untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah

harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Salah satu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat adalah masalah perizinan dan penanaman modal. Pelayanan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu instansi pelayanan tersebut adalah Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering berusaha memperbaiki pelayanan dengan melakukan perubahan organisasi sehingga didapat pelayanan yang *good governance* bagi masyarakat. Perubahan organisasi ini perlu terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat seperti system politik, ekonomi, aspek hukum, pasar, dan nilai-nilai. Perubahan ini menyebabkan masyarakat menginginkan pelayanan perizinan yang baik selain itu pemerintah pusat juga menuntut agar pelayanan terhadap masyarakat transparan, bebas korupsi dan pungutan-pungutan liar.

Untuk melaksanakan pelayanan yang *good governance* Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak tahun 2011 telah melakukan perubahan-perubahan dalam organisasinya yaitu dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Penerapan Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 ini memberikan pedoman bagi pengelolaan manajemen di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga mempunyai standar yang baik dan transparan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengambil judul “Peranan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dalam menciptakan *good governance* pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir”

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengenai peranan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dalam menciptakan *good governance* pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Untuk mengetahui perbaikan-perbaikan apa saja yang telah dilakukan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moloeng (2004:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah personil-personil yang berkompeten untuk menjawab mengenai sistem manajemen mutu dan perubahan di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir :

1. Sekretaris Badan
2. Manajemen representatif
3. Sekretaris ISO
4. Ka. Bidang Perizinan
5. Ka. Bidang Penanaman Modal
6. Staf pelayanan

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi. Menganalisis hasil laporan kegiatan sekolah pada suatu periode tertentu.
2. Wawancara. Melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan. Menurut Surakhman (2004; 174) wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan jalan melakukan kegiatan tanya jawab atas sejumlah pertanyaan baik lisan dan dijawab secara lisan pula.
3. Observasi. Melakukan pengamatan secara langsung pada lingkungan serta penerapan sistem manajemen mutu di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir

Teknik Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Mengorganisasikan Data. Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (*indepth intewiwer*).
2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban. Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding. Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.
3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data. Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai.
4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data. Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitannya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternative penjelasan lain tetnag kesimpulan yang telah didapat.
5. Menulis Hasil Penelitian. Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Program perubahan yang direncanakan oleh Badan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir menyangkut kegiatan-kegiatan yang disengaja untuk merubah suatu Organisasi.

Untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu pihak Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menentukan seorang personil yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perubahan yang disebut dengan manajemen representatif dan berfungsi sebagai *Agent of Change*. Manajemen representatif ini mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dengan berusaha melibatkan seluruh personil dan menjadikan komitmen seluruh personil serta pimpinan untuk melakukan perubahan dengan menjalankan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

Selanjutnya manajemen representatif membuat program kerja sebagai panduan untuk melaksanakan pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen representatif adalah sebagai berikut :

1. Membuat komiten untuk melaksanakan sistem manajeme mutu untuk melakukan perubahan di organisasi.

Komitmen ini dilakukan melalui penetapan kebijakan mutu dan sasaran mutu untuk Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Melakukan analisis terhadap kondisi yang ada

Melakukan analisis terhadap kondisi yang ada meliputi prosedur-prosedur yang ada, sistem pengarsipan, sistem pelayanan dan kelemahan-kelemahan personil yang ada.

3. Melakukan pelatihan-pelatihan kepada personil mengenai sistem manajemen mutu dan pelayanan.

Agar sistem manajemen mutu dapat dilaksanakan maka personil yang ada perlu untuk mendapatkan pelatihan agar dapat mengikuti dan melaksanakannya sesuai standar ISO 9001:2008. Selain pelatihan standar ISO 9001:2008 personil yang ada juga diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan pelayanan prima baik yang diadakan pada tingkat pemerintah propinsi maupun tingkat pusat.

4. Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem kearsipan dan pengembangan prosedur
Pada tahapan ini manajemen representatif beserta personil lain yang ditunjuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem kearsipan. Perbaikan-perbaikan sistem kearsipan ini meliputi identifikasi, penataan serta penyimpanan arsip sehingga arsip terlindungi serta aman dan mudah ditemukan. Selain perbaikan dalam sistem pengarsipan juga dilakukan pembuatan dan pengembangan prosedur pelayanan. Sebelum pelaksanaan ISO 9001:2008 prosedur yang ada hana sebatas alur pelayanan saja, tetapi setelah diterapkannya ISO 9001:2008 ini prosedur tidak hanya sebatas alur pelayanan saja tetapi juga meliputi dasar hukum, penanggung jawab, personil yang bertanggung jawab, lama pelayanan, biaya pelayanan dan output pelayanan serta persyaratan pelayanan. Selain

prosedur pelayanan pihak Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir juga membuat prosedur-prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen seperti pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, audit internal, tinjauan manajemen, pengukuran kinerja, tindakan pencegahan dan perbaikan.

5. Melakukan penerapan terhadap sistem manajemen mutu

Pada tahapan ini pihak Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir menerapkan aturan-aturan yang ada dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan. Untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang *Good Governance* maka Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan perubahan organisasi melalui mengembangkan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tipe perubahan yang dilaksanakan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Program perubahan yang direncanakan (*planned change*), dimana dilakukan perencanaan untuk melakukan perubahan, dimulai dari pembuatan komitmen bagi seluruh personil hingga penerapan sistem manajemen mutu tersebut. Secara teoritis tujuan dari perubahan organisasi adalah (aidil; 2015)

1. Untuk mempererat organisasi satu dengan organisasi yang lainnya.
2. Untuk meningkatkan mutu dari organisasi tersebut/organisasi yang telah dibuat.
3. Untuk meningkatkan peranan organisasi di masyarakat luas.
4. Untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat.
5. Untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan organisasi yang telah dibuat.

Adapun perbaikan yang dilakukan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem kearsipan. Perbaikan-perbaikan sistem kearsipan ini meliputi identifikasi, penataan serta penyimpanan arsip sehingga arsip terlindungi serta aman dan mudah ditemukan. Selain perbaikan dalam sistem pengarsipan juga dilakukan pembuatan dan pengembangan prosedur pelayanan. Sebelum pelaksanaan ISO 9001:2008 prosedur yang ada hana sebatas alur pelayanan saja, tetapi setelah diterapkannya ISO 9001:2008 ini prosedur tidak hanya sebatas alur pelayanan saja tetapi juga meliputi dasar hukum, penanggung jawab, personil yang bertanggung jawab, lama

pelayanan, biaya pelayanan dan output pelayanan serta persyaratan pelayanan. Selain prosedur pelayanan pihak Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir juga membuat prosedur-prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen seperti pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, audit internal, tinjauan manajemen, pengukuran kinerja, tindakan pencegahan dan perbaikan

Dari hasil penerapan manajemen mutu tersebut maka pelayanan yang *good governance* bisa didapat. Masyarakat menjadi mengetahui prosedur pengajuan izin, syarat-syarat pengajuan izin, lama tunggu pengajuan izin, biaya yang harus dikeluarkan dan personil-personi yang bertanggung jawab. Selain itu masyarakat juga disediakan sarana untuk mengajukan komplain nya jika ada pelayanan yang tidak sesuai prosedur.

Selain itu dengan berlakunya sistem manajemen mutu ini personil-personil bekerja semakin baik sebab mereka dinilai hasil kerjanya. Selain itu setiap kegiatan dilakukan evaluasi agar diketahui kelemahan dan kekurangan dari pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan sehingga pelayanan semakin lama semakin baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan manajemen mutu menyebabkan masyarakat menjadi mengetahui prosedur pengajuan izin, syarat-syarat pengajuan izin, lama tunggu pengajuan izin, biaya yang harus dikeluarkan dan personil-personi yang bertanggung jawab. Selain itu masyarakat juga disediakan sarana untuk mengajukan komplain nya jika ada pelayanan yang tidak sesuai prosedur. Hal lain adalah masyarakat mengetahui informasi mengenai bidang perizinan dan penanaman modal
2. Adapun perbaikan-perbaikan yang ada melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem kearsipan, perbaikan prosedur, pelatihan-pelatihan terhadap personil serta membuat prosedur-prosedur manajemen lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aidil Dwiputra, 2015, *Perubahan dan Perkembangan Organisasi*, aidildwiputra.blogspot.co.id
(diakses 24 Agustus 2016)

Stephen P. Robbins, 2002, *Prinsip – prinsip Perilaku Organisasi*, Erlangga, Jakarta

Sentot Imam Wahjono, 2010, *Perilaku Organisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sondang. P. Siagian, 2007, *Teori Pengembangan Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta

_____, 2016, Pengertian Good Governance Definisi Prinsip Menurut Para Ahli.

<http://www.landasanteori.com> (diakses tanggal 20 Oktober 2016)

_____, 2015, Metode Penelitian Kualitatif Dan Karakteristiknya Lengkap,

SUAMI (LAKI-LAKI) DALAM PANDANGAN AL-QURAN

Shubhi Mahmashony Harimurti

*Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Islam Indonesia
Email: shubhi.mahmashony@uii.ac.id*

ABSTRAK

Al-Umm Madrasat al-Ula. Ibu adalah madrasah pertama. Itulah kalimat yang sering didengar mengenai jasa dan peran seorang ibu/perempuan dalam mendidik anak-anaknya. Bukan hanya itu, kewajiban membentuk keluarga sakinah seakan dibebankan hanya pada pundak kaum Hawa. Jarang sekali yang menyinggung keharusan bagi suami/laki-laki untuk melanggengkan komunitas yang dipimpinnya. Padahal Allah SWT telah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (at-Tahrim: 6). Ism mausul "al-ladziina" dinilai cukup jelas bahwa perintah dari Sang Pencipta ini ditujukan bagi kaum Adam. Itu artinya kewajiban merangkai sebuah keluarga ke jenjang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah dominan di pihak suami. Mungkin karena pendakwah ataupun juga mubaligh yang hampir semua adalah lelaki sehingga terkadang ada bias dalam penyampaian ke para mad'u (objek dakwah). Kebanyakan seolah secara tidak langsung melemparkan kewajiban mulia tersebut kepada kaum ibu. Tulisan ini mengupas mengenai kedudukan dan peran seorang suami/laki-laki dalam keluarga ditinjau dari sejumlah ayat dalam al-Quran. Penalaran induktif digunakan dalam makalah ini. Artinya dari berbagai kasus khusus kemudian digeneralisir menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Kata Kunci: Suami, Laki-Laki, Keluarga, al-Quran

ABSTRACT

Al-Umm Madrasat al-Ula. Mother is the first school. That sentence often is heard about the position of a mom or woman in the children education. Not only that, but the task to create a peaceful family also given to the women. The scholar seldom discuss about the man or human assignment to do the same one. Allah Almighty says, "O ye who believe! Save yourselves and your families from a fire" (Chapter at-Tahrim verse 6). The conjunction al-ladziina is a command from The Creator to the man. Its mean that the task to arrange a family with peaceful, lovingly, and pleased is a husband domain. Maybe cause of almost the preacher is man so usually there is a distortion in fatwa. They usually give the good task to the mom. This paper discuss about position of the husband or gentleman in a family according to the verses of al-Quran. Inductive approach is used in this paper. The special case is generalized to general conclusion.

Key Words: Husband, Man, Family, al-Quran

PENDAHULUAN

Kata laki-laki khususnya dalam konteks suami dan dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah رجال serta زوج, setidaknya telah tertera dalam kitab suci al-Quran sebanyak 102 kali dengan berbagai derivasinya. Ada 42 ayat yang mengupas sosok pemimpin keluarga ini. Berbeda dengan kata perempuan (نساء) yang identik dengan istri (زوجة) diulang hingga 250 kali dalam 109 ayat. Lebih banyak istri. Maka tidak heran apabila pembahasan terkait keluarga sakinah, mayoritas peneliti atau pendakwah pasti banyak menyinggung peran perempuan atau istri dalam komunitas terkecil di masyarakat tersebut. Jarang yang membahas posisi suami.

Fuad Ifrad al-Bustani dalam *Munjid at-Thullaab* (1973) menyatakan bahwa pengertian suami adalah jodoh bagi seorang istri yang mendampingi satu sama lain dari jenis kelamin yang berbeda dan golongan yang sama (manusia). Hal ini perlu ditekankan, karena belakangan marak istilah pasangan (suami atau istri) yang berasal dari golongan jin. Baik jin *qarin* yang mendampingi seseorang sejak lahir hingga wafat maupun berpasangan dengan makhluk halus dengan tujuan syirik. Seperti pesugihan dan menginginkan awet muda. Selain itu, akhir-akhir ini cukup hangat isu mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Jadi, pasangan suami istri harus laki-laki dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode penelitian literatur. Pada bagian ini meliputi metode pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Rujukan literatur yang ada kemudian disinergikan dengan pokok persoalan atau permasalahan yang diajukan. Hal ini merupakan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh langsung di lapangan (Harimurti, 2011). Pada dasarnya studi literatur berguna dalam hal pelengkap, pendukung, dan penguat data penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kitab-kitab *turats* sangat dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Selain itu, al-Quran terjemahan pun perlu digunakan sebagai pembanding dengan penafsiran para ulama Timur Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah posisi dan peran suami dalam tinjauan ayat-ayat al-Quran. Diharapkan kaum lelaki lebih memahami hak dan kewajiban ketika mereka dalam situasi menjadi seorang suami. Hal ini penting mengingat akhir-akhir ini gencar isu mengenai bias gender yang sering kali merancukan posisi antara suami dan istri.

1. Suami adalah Penanggung Jawab Istri

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيْرًا [٤:٣٤]

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkakan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shalihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (an-Nisa: 34).

Ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki hak memelihara, melindungi, dan menangani urusan istri. Karena sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang dilakukan itu dan kerja keras yang dilakukan untuk membiayai keluarga. Oleh karena itu, pengertian istri yang shalihah adalah pasangan yang taat kepada Allah Ta’ala dan suami serta menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui langsung oleh suami. Karena memang Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu. Kepada istri yang menampakkan tanda-tanda ketidakpatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh, jauhi dia di tempat tidur, kemudian beri hukuman berupa pukulan ringan yang tidak melukai, ketika dia tidak menampakkan perbaikan. Jika dengan salah satu cara itu dia sadar dan kembali mematuhi suami, maka pasangannya tidak boleh menempuh cara lain yang lebih kejam dengan maksud menyakiti dan menganiaya istri. Allah SWT sungguh lebih mampu untuk melakukan itu dan membalas suami, jika pasangannya terus menyakiti dan menganiaya istri.

Dikutip dari *Adab al-Mar’ah fi al-Islam* (Putusan Tarjih Muhammadiyah tahun 1976) via Inayati (2009) dijelaskan bahwa kata قومون dalam ayat di atas maksudnya bukan seperti yang dipahami secara umum saat ini yaitu pemimpin. Namun diartikan sebagai penegak tanggung jawab. Suami adalah sosok satu-satunya yang berhak serta wajib atas perlindungan, pemeliharaan, penanganan, serta pendidikan bagi istrinya.

Sedangkan menurut Departemen Agama Republik Indonesia (1989), kalimat *حَفِظَ اللَّهُ* bermakna bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada para suami untuk mempergauli istri mereka dengan cara yang baik. Allah menjaga kaum Hawa dengan cara mewajibkan pasangannya memperlakukan istrinya secara elok. Sehingga para istri harus menjaga diri ketika suaminya sedang tidak bersama. Jadi, seorang istri diharapkan untuk taat kepada suaminya karena sang kepala keluarga telah berbuat baik kepadanya.

Ayat ini memang terkesan klasik. Namun, justru dalil tersebut lah yang paling mendasar jika dibahas terkait peran dan posisi seorang suami dalam bahtera rumah tangga. Tidak hanya bertanggung jawab kepada istri, tapi suami juga memikul hal yang sama terhadap anak-anaknya. Kepala keluarga harus memberi nafkah yang layak, pendidikan agama yang cukup, pengawasan yang seimbang, dan nasihat-nasihat yang menggugah kepada buah hatinya.

2. Suami Berhak Menjatuhkan Talak

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [٢:٢٣٠]

Artinya: “Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri, maka pasangannya tidak lagi halal baginya kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain dan telah terjadi hubungan suami istri antara keduanya. Apabila suami kedua itu telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga menjadi perempuan yang halal dinikahi, maka suami pertama boleh menikahi mantan istrinya itu dengan akad baru dan membangun kembali rumah tangganya dengan niat yang benar dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketentuan itu telah diterangkan dengan jelas bagi orang-orang yang beriman yang mau memahami dan mengamalkannya” (al-Baqarah: 230).

Isa (1337 H) berpendapat bahwa makna *فَإِنْ طَلَّقَهَا* pertama adalah talak yang ketiga kalinya. Karena yang namanya talak itu bertahap. Mulai pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan maksud *فَإِنْ طَلَّقَهَا* selanjutnya adalah suami kedua yang menjatuhkan talak. Tentu suami kedua tersebut menalak pertama. Kalimat *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا* ditafsirkan bahwa tidak ada dosa atas suami pertama dan istri yang telah tertalak untuk merajut kembali biduk rumah tangga kedua kalinya.

Meskipun suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, bukan berarti sang kepala keluarga bisa seenaknya mengeluarkan kata ‘cerai’. Memang tidak ada dalil baik berasal dari al-Quran maupun al-Sunnah yang menyatakan demikian. Namun, Umar ibn Khatab pernah berpendapat bahwa jika telah keluar dari mulut seorang suami kata ‘cerai’ meskipun dengan nada bercanda maka dapat dipastikan telah jatuh talak satu. Hal ini dilontarkan oleh khalifah

kedua tersebut supaya para lelaki tidak mengganggakan untuk mengeluarkan kata yang sangat dihindari oleh keluarga harmonis tersebut. Jadi, jangan mempermainkan kata ‘talak’ atau ‘cerai’.

3. Suami (Laki-Laki) Memiliki Keistimewaan dalam Hak Waris

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ [٤:١٢]

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika istri mereka tidak mempunyai anak. Apabila mereka (para istrimu) itu memiliki keturunan, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika engkau tidak mempunyai anak. Jika kamu memiliki putra, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang kerabat perempuan (satu ibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika para saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (an-Nisa: 12).

Ayat ini menerangkan bahwa suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika istri tidak mempunyai anak darinya atau dari suami yang lain. Apabila sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah hutangnya dibayar. Istri (satu atau lebih) memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika kepala keluarga tersebut tidak mempunyai anak dari istri yang ditinggalkan atau dari istri yang lain. Jika suami mempunyai anak dari istri itu atau dari pasangan yang lain, maka istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar hutangnya. Bagian cucu sama

dengan bagian anak seperti di atas. Apabila pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, tidak meninggalkan ayah dan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah hutangnya dibayar atau setelah dilaksanakan wasiat yang tidak mendatangkan mudharat bagi ahli waris. Artinya tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah melunasi hutang. Laksanakanlah, wahai orang-orang yang beriman, apa-apa yang diwasiatkan Allah SWT kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat adil dan dhalim di antara kalian dan Maha Panyabar. Dia tidak menyegerakan hukuman bagi yang melanggar.

Kalimat *غَيْرَ مُضَارٍّ* dalam ayat di atas menurut Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran (2005) adalah menyusahkan kepada ahli waris dengan tindakan-tindakan tertentu. Seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan berwasiat dengan tujuan mengurangi harta warisan. Meskipun tidak sampai sepertiga apabila ada keinginan untuk mengurangi hak waris maka tidak diperkenankan.

Hal ini tentu mengingatkan pada fenomena yang terjadi di Jember, Jawa Timur pada 25 Agustus 2015 lalu. Saat itu ada sepasang suami-istri bernama Muljono Hendrosiswojo dan Sriami yang diseret ke meja hijau oleh enam anak kandungnya sendiri. Permasalahannya adalah sang orang tua menghibahkan seluruh tanah miliknya seluas 1.700 meter persegi yang bernilai Rp 20 miliar kepada Universitas Muhammadiyah (UM) Jember tanpa menyisakan semeter pun untuk keturunan mereka (*Jawa Pos* 26 Agustus 2015). Ini tentu tidak benar karena maksimal hibah adalah sepertiga bagian. Lebih dari itu dihitung sebagai shadaqah. Pun tidak boleh seluruhnya. Dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz ke-14 halaman 158 – 159, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa hibah diharuskan dengan sepengetahuan ahli waris. Jika ahli waris adalah anak kandung, maka mereka harus mengetahui dan mengizinkan sang ayah yang akan menghibahkan harta miliknya. Jangan sampai keturunan sendiri malah tidak stabil perekonomiannya gara-gara sang ayah yang terlalu dermawan. Tidak dibenarkan pula anak-anak itu menjadi generasi yang lemah (an-Nisa ayat 9). Anak-anak mereka juga memperkarakan Badan Pengurus Harian UM Jember dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sesungguhnya pembagian hak waris bergantung pada keberadaan suami atau istri yang ditinggalkan, ayah dan ibu, serta jumlah anak kandung seagama. Meskipun begitu, pada hakikatnya bagian warisan seorang laki-laki adalah dua pertiga lebih banyak dari pada perempuan. Jadi, kaum Adam memang mendapat keistimewaan dalam pembagian harta

warisan. Ayat lain dari al-Quran yang menerangkan tentang hukum waris adalah an-Nisa ayat 11 (Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, 2016).

Terkait hubungannya dengan posisi seorang laki-laki dalam keluarga sering kali dipersoalkan oleh kelompok non-Muslim jika terkait bagian hak waris. Mereka menganggap Islam sebagai agama yang melakukan diskriminasi dan tidak adil terhadap perempuan. Karena bagian warisan bagi kaum Hawa hanya sepertiga lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Seharusnya jatahnya harus sama rata. Tidak boleh ada yang menonjol dan tidak diperkenankan apabila terdapat pihak yang sedikit bagian warisannya. Begitu menurut masyarakat yang berpandangan negatif kepada agama *rahmatan li al-'alamin* ini.

Padaahal tidak begitu sejatinya. Misal ada seorang ayah bernama A meninggalkan dua orang anak. Masing-masing laki-laki (B) dan perempuan (C). Harta A setelah dikurangi biaya pemakaman dan membayar hutang total adalah Rp 900 juta. Berdasarkan aturan dalam Islam maka B mendapatkan bagian Rp 600 juta. Sedangkan C 300 Rp juta. Dalam perjalanan waktu, B menikah dan pasti membayar mahar untuk calon istrinya. Ketika mengarang biduk rumah tangga B juga diwajibkan menafkahi sang istri beserta anak-anaknya. Dengan begitu jika dihitung-hitung harta B yang didapat dari bagian warisan pasti semakin berkurang. Beda cerita dengan C. Karena C adalah perempuan, maka dia dinikahi oleh suaminya yang tentu juga memberi mas kawin. Saat berumah tangga pun C selalu mendapat nafkah dari pasangan sahnya. Dengan begitu harta C yang merupakan bagian warisan tetap utuh bahkan bertambah karena mendapat mahar ataupun juga nafkah dari suaminya. Jadi, sebenarnya dalam aturan waris, Islam justru menerapkan keadilan dan berpihak pada kaum hawa. Harta B dan C bisa sama besarnya di kemudian hari. Bahkan C dapat melampaui kekayaan saudara kandung laki-lakinya andai C juga bekerja dan B penghasilannya kurang mencukupi. Warisan untuk laki-laki sejatinya diperuntukkan bagi dirinya sendiri, istrinya, serta anak-anaknya. Sedangkan perempuan ketika menjadi ahli waris hanya dimiliki sendiri. Begitulah keadilan warisan menurut Islam.

4. Suami Wajib Mengingat Istri/Anak Perempuannya untuk Menjaga Aurat

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٢٤:٣١]

Artinya: “Katakanlah kepada para mukminat supaya menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya serta jangan memperlihatkan perhiasannya

kecuali yang biasa terlihat. Dan supaya menutupkan kerudungnya di atas dadanya dan tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suaminya atau ayah kandungnya atau ayah mertua atau anak-anak kandungnya atau anak-anak tirinya atau saudara-saudara kandungnya atau keponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan atau pada sesama perempuan atau kepada budak miliknya atau pelayan yang tidak diinginkannya atau kepada anak kecil yang belum mengerti aurat wanita. Dan jangan memukulkan kakinya untuk diketahui perhiasan yang disembunyikannya. Dan bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (an-Nur: 31).

Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad kepada perempuan-perempuan Mukminat. Sesungguhnya mereka diperintahkan untuk menahan pandangan terhadap sesuatu yang dilarang, memelihara kemaluan dengan cara menutupnya, tidak melakukan hubungan secara tidak sah, dan tidak menampakkan keindahan tubuh serta perhiasan yang dapat menggoda laki-laki. Seperti dada, lengan, dan leher. Kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampakkannya. Seperti wajah dan tangan. Mintalah dari mereka agar menutup bagian-bagian baju yang terbuka. Contohnya leher dan dada. Yaitu dengan cara menutupnya dengan penutup kepala. Juga mintalah mereka agar tidak menampakkan keindahan-keindahan tubuh mereka. Kecuali kepada suami mereka dan kaum kerabat yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Seperti ayah, kakek, anak kandung, anak tiri, saudara kandung atau keponakan. Pengecualian tersebut juga termasuk kepada para pendamping mereka, baik orang merdeka atau budak, laki-laki yang hidup bersama mereka yang tidak mempunyai keinginan kepada perempuan. Seperti laki-laki yang sudah sangat tua. Begitu pula anak-anak kecil yang belum memiliki syahwat. Mintalah juga kepada mereka untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki kepada perhiasan yang tersembunyi. Seperti dengan menghentakkan kaki ke tanah agar suatu perhiasan yang ada di balik pakaian dapat terdengar. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah SWT wahai orang-orang Mukmin, atas segala kesalahan kalian. Lakukanlah selalu etika-etika agama agar kalian memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Menurut ‘Aidh ibn Abdillah al-Qarni (tt) beberapa anggota badan perempuan yang boleh dilihat oleh pihak-pihak yang telah disebutkan dalam ayat tersebut di atas antara lain wajah, leher, kedua tangan, dan lengan. Pelayan yang dimaksud dalam istilah *التَّالِبِينَ* adalah termasuk mereka yang rutin datang ke rumah untuk menyediakan makanan dan minuman. Menghentakkan kaki ke tanah juga bermakna berjalan dengan langkah yang bersuara atau menyeret.

Meskipun dalil ini dialamatkan kepada Rasulullah SAW tapi sesungguhnya juga berlaku umum bagi semua suami ataupun lelaki Muslim di seluruh penjuru dunia. Kesadaran seorang istri serta anak perempuan untuk menutup aurat dan menjaga pandangan adalah tanggung jawab suami juga. Sering kali terdengar jika ada berita pelecehan seksual terhadap kaum Hawa maka ada dua pendapat mengenai siapa yang patut disalahkan. Pertama pelaku, karena tidak mampu mengendalikan nafsunya. Kedua perempuan itu sendiri, sebab penampilannya dinilai mengundang birahi. Padahal, suami atau ayah dapat juga diminta pertanggungjawabannya sebagai kepala keluarga. Suami wajib dan berhak mengingatkan bahkan memerintahkan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk selalu *ghadh al-bashar*.

5. Suami (Laki-Laki) Tidak Boleh Iri dengan Istrinya

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [٤:٣٢]

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (an-Nisa: 32).

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki hendaknya tidak iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah SWT kepada perempuan. Begitu juga sebaliknya, kaum hawa tidak boleh dengki terhadap apa-apa yang dikaruniakan Allah kepada laki-laki. Masing-masing mendapatkan bagian, sesuai dengan tabiat perbuatan dan haknya. Maka hendaknya tiap-tiap pihak berharap agar karunianya ditambah oleh Allah Ta’ala dengan mengembangkan bakat dan memanfaatkan kelebihan yang dititipkan Allah kepadanya. Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu dan memberikan kepada setiap jenis makhluk sesuatu yang sesuai dengan kejadiannya.

Wajdi (1323 H) pun menyatakan bahwa Allah SWT melarang berbuat *hasad* dan telah ditakdirkan bagi laki-laki maupun perempuan terkait hasil yang telah dilakukan. Segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang adalah hasil jerih payahnya. Jadi tidak perlu ada rasa dengki satu sama lain. Murid Rasyid Ridha ini juga mengingatkan bahwa tiap manusia mewarisi bermacam-macam harta dan sifatnya netral. Artinya kekayaan yang berada di tangan seseorang janganlah menjadi pemicu untuk saling benci.

Poin ini dinilai penting karena sering kali terdengar kabar bahwa seorang suami merasa rendah diri terhadap kekayaan istri. Bahkan rasa *minder* tersebut lambat laun berubah menjadi

kedengkan. Sang kepala keluarga berpandangan bahwa dia lah yang seharusnya lebih kaya dari pada istrinya. Karena dia mempunyai kewajiban menafkahi separuh jiwanya tersebut. Padahal tidak selamanya harus begitu. Rasulullah SAW malah menganjurkan supaya laki-laki yang hendak menikah untuk mempertimbangkan salah satu kriteria calon istri yang ideal yaitu kaya. Mengapa? Supaya istri di kemudian hari tidak menuntut suaminya untuk dipenuhi segala permintaannya. Karena kehidupannya sudah sangat tercukupi. Sang suami pun tidak akan terlalu terbebani dengan tuntutan harus bekerja keras dengan sistem kejar target.

Ketika suami tidak iri dengan istrinya maka kehidupan rumah tangga akan semakin sakinah. Kalimat yang mengarah pada perceraian tidak mungkin terucap. Karena mereka berkeyakinan bahwa ketika telah menikah, maka harta suami dan istri dihitung menjadi satu. Oleh karena itu, keinginan untuk mendapatkan harta lebih dengan cara ‘mengakali’ menjatuhkan talak ataupun menggugat cerai tidak mungkin terjadi. Karena bagi suami yang iri dan menghendaki kekayaan istrinya pasti berdalih menceraikan biar ada pembagian harta *gono-gini*.

KESIMPULAN

Lima hal yang tertulis di atas menempatkan posisi seorang suami/laki-laki sebagai subjek dalam kehidupan rumah tangga. Jarang sekali semua poin yang tersebut di tulisan ini dibahas oleh para pemuka agama Islam. Apabila disinggung mengenai peran ataupun juga posisi suami dalam sebuah keluarga hampir pasti jawabannya adalah mencari nafkah. Padahal ada banyak hal yang semestinya tersemat pada diri kaum Adam. Jika kelima aspek tersebut dimengerti secara baik maka kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah sebuah keniscayaan. Keluarga harmonis juga tanggung jawab laki-laki bukan hanya perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak seperti tersebut di bawah ini.

- a. Prof Akhmad Fauzi, selaku Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII yang telah memfasilitasi riset sekaligus seminar ini.
- b. Pinus Jumaryanto, Ph.D., selaku Ketua Prodi Farmasi FMIPA UII yang mendukung penulis mengerjakan penelitian hingga selesai.
- c. Drs Moh Shoim (Allahuyarham), bapak peneliti yang memberi banyak masukan serta rujukan literatur. Semoga Allah SWT mengampuni segenap dosa-dosanya.
- d. Keluarga besar penulis yang selalu berdoa demi kesuksesan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2015. Enam Anak Gugat Ayah Kandung. *Jawa Pos* 26 Agustus: 10.
- Bahreisy, Salim dan Abdullah Bahreisy. 2001. *Tarjamah al-Quran al-Hakim*. Surabaya: CV. Sahabat Ilmu.
- al-Bustani, Fuad Ifrad. 1973. *Munjid at-Thullaab*. Beirut: Daar al-Masyriq.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Gema Risalah Press.
- Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid. Pembagian Warisan. *Suara Muhammadiyah*. No.2. Tanggal 16 – 31 Januari 2016.
- Harimurti, Shubhi Mahmashony. 2011. *Hubungan antara Perkembangan Muhammadiyah Tahun 1912 – 1964 dan Tinggalan Arkeologisnya*. Skripsi, tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Inayati, Evi Sofia. Hak Politik Perempuan dalam Islam. *Suara Muhammadiyah*. No.15. Tanggal 1 – 15 Agustus 2009.
- Isa Abd al-Jalil. 1337 H. *al-Mushaf al-Muyassar*. al-Qahirah: Daar al-Fikr.
- al-Qarni, ‘Aidh ibn Abdillah. tt. *at-Tafsir al-Muyassar*. ar-Riyadh: al-‘Ubiikaan.
- Sabiq, al-Sayyid. 1971. *Fiqh al-Sunnah al-Juz al-Raabi’ al-‘Asyarah*. al-Kuwait: Daar al-Bayaan.
- Wajdi, Muhammad Farid. 1323 H. *al-Mushaf al-Mufassar*. al-Qahirah: Muasasat al-Sya’b.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran. 2005. *Mushaf al-Quran Terjemah*. Jakarta: al-Huda.
- _____. 2007. *al-Quran Terjemah Per Kata*. Jakarta: Departemen Agama RI.

**IDENTIFIKASI UNJUK KERJA ALAT PENGERING SIMPLISIA
ASOSIASI TANAMAN BIOFARMAKA “ASSYFA FARMA”
DESA RINGINANOM TEMPURAN MAGELANG**

Sri Rahayu Gusmarwani^{1*}, Imam Sodikin², Joko Triyono³

¹Jurusan Teknik Kimia IST AKPRIND Yogyakarta

²Jurusan Teknik Industri IST AKPRIND Yogyakarta

³Jurusan Teknik Informatika IST AKPRIND Yogyakarta

*gusmarwani@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di seluruh dunia. Banyak kegunaan rempah-rempah antara lain sebagai obat herbal. Simplisia merupakan bahan dasar pembuat jamu dan obat-obatan yang dihasilkan dari aneka tanaman obat yang dibudidayakan atau tumbuh liar setelah melalui proses pengeringan. Asosiasi tanaman biofarmaka “Assyfa Farma” di Desa Ringinanom Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sudah memiliki alat pengering yang digunakan untuk memproduksi simplisia. Alat pengering berupa bangunan seperti rumah kaca yang didalamnya dilengkapi pipa yang disusun seperti rak untuk tempat pengeringan simplisia.

Penelitian identifikasi unjuk kerja alat pengering dilakukan di dusun ringinanom, Tempuran, Magelang. Data unjuk kerja alat pengering yang diperoleh dari pengamatan performa alat pengering akan digunakan sebagai dasar inovasi alat pengering. Berdasarkan hasil identifikasi dapat diperoleh data suhu pengeringan rata-rata untuk simplisia berbentuk daun adalah 70,5°C dengan waktu pengeringan 3 jam dan kadar air dalam simplisia sebesar 9,7%. Simplisia berbentuk umbi dengan ketebalan 2-3 mm mempunyai kadar air 8,6% sedangkan umbi dengan ketebalan 4-5 mm mempunyai kadar air 9,5%. Suhu rata-rata pengeringan sebesar 77°C dan waktu pengeringan selama 5 jam. Kendala yang dihadapi oleh alat pengering diantaranya rusaknya pipa, borosnya energi yang digunakan, dan simplisia yang rusak. Ketiga hal ini disebabkan oleh suhu yang terlalu tinggi karena tidak adanya pengendali suhu yang dihubungkan dengan sumber panas dari bahan bakar. Identifikasi yang dapat diperoleh dari pengamatan awal dalam penelitian ini adalah perlunya analisis kimiawi terhadap simplisia hasil pengeringan serta pengaturan suhu untuk mengatur jumlah panas yang masuk dalam ruang pengeringan. Selain itu perlu dilakukan kajian terhadap energi yang digunakan agar dapat diperoleh alat pengering yang hemat energi dan tidak merusak simplisia hasil pengeringan.

Kata kunci : identifikasi, pengering, simplisia

ABSTRACT

Indonesia is famous as the largest producer of spices in the world. Many uses of spices, among others as a medicinal herb. Crude drug maker is the basic ingredient herbs and medicines produced from a variety of medicinal plants that are cultivated or grow wild after the drying process. Association of medicinal plants "Assyfa Farma" in the village of Ringinanom District of Magelang regency Tempuran own a dryer that is used to produce bulbs. Drier form of buildings such as greenhouses inside equipped with pipes arranged as to place the drying rack.

The study identified the performance of the dryer is done in the hamlet ringinanom, Tempuran, Magelang. Data performance drier obtained from observation of the performance of the dryer will be used as the basis of innovation drier. Based on identification can be obtained from the data on average temperature drying to simplicia shaped leaves are 70,5oC with a drying time of 3 hours and the water content in the bulbs of 9.7%. Simplicia shaped tubers with a thickness of 2-3 mm has a water content of 8.6% while the tubers with a thickness of 4-5 mm has a water content of 9.5%. The average temperature of 77oC drying and drying time for 5 hours. Obstacles faced by drier including damage to pipelines, wasteful energy use, and bulbs are broken. These three things are caused by too high temperatures in the absence of a temperature controller which is connected to the heat source of the fuel. Identification can be obtained from the initial observation in this study is the need for chemical analysis of the crude drug drying results as well as setting the temperature to regulate the

amount of heat entering the drying chamber. In addition it is necessary for the study of the energy used in order to obtain dryers are energy efficient and do not damage the bulbs drying results.

Keywords: identification, dryer, simplisia

PENDAHULUAN

Fakta menunjukkan bahwa obat tradisional telah banyak digunakan oleh pasien di banyak negara. Tradisi pengobatan lokal di negara berkembang dan masyarakat pribumi umumnya dikenal sebagai “obat tradisional”. Banyak alasan penggunaan obat tradisional. Pertama, lokasi yang jauh dari pengobatan modern. Kedua, alasan budaya, yaitu penduduk pribumi lebih menyukai menggunakan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit karena merupakan peninggalan nenek moyang secara turun temurun. Alasan berikutnya adalah mahalnnya biaya pengobatan modern, serta adanya pengalaman atas kegagalan pengobatan modern sehingga para pasien lebih memilih menggunakan pengobatan tradisional (Bodeker dan Graz, 2013).

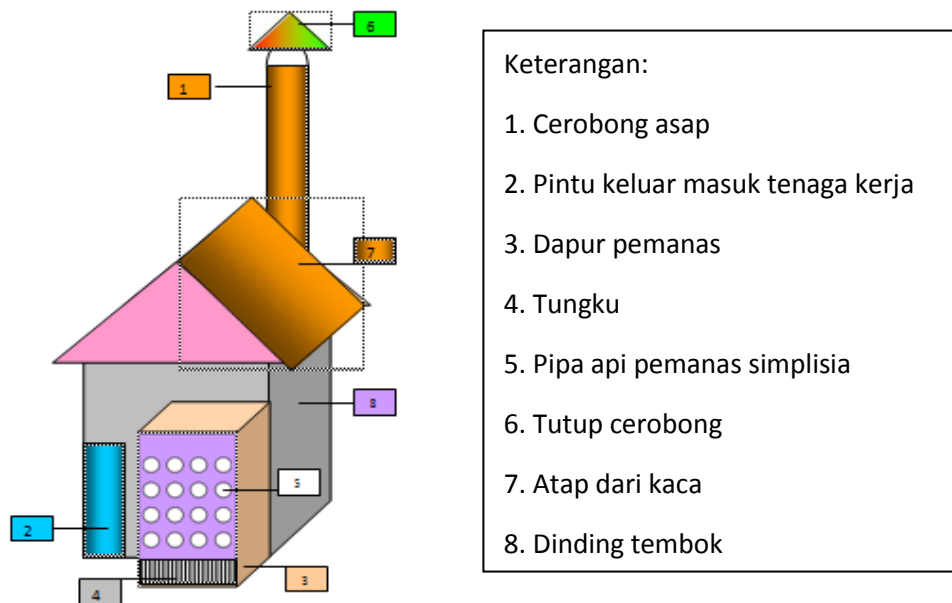
Di Indonesia, salah satu pengobatan tradisional yang banyak digunakan adalah jamu. Jamu dapat berupa cairan atau bentuk lain yang disajikan dengan cara direbus, diseduh, atau dengan cara penyajian lainnya. Ada beberapa jenis jamu yang sudah terkenal, diantaranya beras kencur, cabe puyang, pahitan, sinom, dan masih banyak lagi (Limiyati dan Juniar, 1998). Saat ini jamu telah diproduksi dan dikembangkan dalam skala industri. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan para pelaku industri jamu dan akademisi telah memperkenalkan jamu sebagai obat herbal tradisional asli Indonesia (Elfahmi, dkk., 2014).

Simplisia adalah bentuk kering dari tanaman herbal. Tanaman herbal yang terdiri dari daun, batang, bunga, buah, akar (empon-empon), dikeringkan untuk dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Pengeringan bertujuan untuk mengawetkan tanaman herbal yang akan digunakan sebagai bahan baku jamu. Proses pengeringan dilakukan untuk pengolahan tanaman herbal pasca panen (Sodikin dan Triyono, 2013). Beberapa kajian perlu dilakukan untuk memfasilitasi eksploitasi tanaman herbal sebagai obat. Pertama, perlu dilakukan pendekatan dengan masyarakat lokal dan praktisi obat herbal. Kedua, mekanisme aktivitas obat harus ditentukan. Kurangnya pengetahuan mengenai aktivitas obat akan mengakibatkan ketidaksesuaian penggunaan obat herbal untuk menyembuhkan penyakit. Ketiga, aktivitas farmakologi dari isolat atau ekstrak tanaman herbal harus divalidasi secara farmakologis dengan menggunakan serangkaian uji farmakologis sehingga dapat diketahui tingkat toksisitasnya. Keempat, pencampuran ekstrak aktif dari tanaman herbal yang satu dengan tanaman herbal lainnya yang diikuti dengan evaluasi dosis efektif dapat dilakukan untuk menentukan efisiensi yang maksimum dengan efek samping yang minimum (Dinda, dkk., 2014).

Selain kajian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam eksploitasi tanaman herbal sebagai tanaman obat, perlu juga dilakukan uji unjuk kerja dari alat pengering simplisia. Uji unjuk kerja alat pengering simplisia dilakukan dengan cara memanaskan dapur pemanas sampai temperatur ruangan pemanas mencapai 100°C . Uji unjuk kerja diukur dengan melihat dan meneliti kondisi fisik bangunan. Alat pengering dikategorikan handal, jika tidak ditemukan kerusakan, terhindar dari masuknya kotoran atau debu yang dapat mengotori bahan jamu selama proses pengeringan, dan kebocoran aliran gas panas dari pipa ketika temperatur ruangan telah mencapai maksimum (100°C).

METODE PENELITIAN

Alat pengering simplisia yang dimiliki oleh asosiasi tanaman biofarmaka “Assyfa Farma” ini berfungsi seperti rumah kaca, dengan dinding-dinding menggunakan tembok yang terbuat dari batu bata, dan atap yang terdiri dari kaca atau fiber glas putih. Di dalam ruang pengering ini ada pipa yang berfungsi sebagai pipa pemanas. Pipa tersebut akan dialiri gas panas atau nyala api dari dapur. Panas yang ada pada pipa api ini akan dipindahkan ke ruang pemanas, udara panas tersebut akan memanasi simplisia sehingga menjadi kering. Adapun bentuk alat pengering simplisia dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Skema alat pengering simplisia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat pengering simplisia yang digunakan dapat dilihat dari gambar 2.



Gambar 2. Alat pengering simplisia yang digunakan

Percobaan dilakukan dengan memanaskan ruangan sampai temperatur mencapai 100°C yang dapat diketahui dari termometer yang terpasang dibagian luar mesin pengering. Perlakuan waktu proses dan suhu pengeringan dilakukan dengan tujuan diperolehnya waktu proses dan suhu pengeringan yang optimal. Waktu proses dan suhu pengeringan yang terbaik diambil dari waktu dan suhu saat simplisia yang dikeringkan mencapai nilai kadar air terendah dan tidak rusak. Pengamatan hasil pengeringan menunjukkan bahwa pengeringan terbaik pada suhu pengeringan rata-rata untuk simplisia berbentuk daun adalah $70,5^{\circ}\text{C}$ dengan waktu pengeringan 3 jam dengan kadar air dalam simplisia sebesar 9,7%. Simplisia berbentuk umbi dengan ketebalan 2-3 mm perlu dikeringkan selama 5 jam dalam suhu 77°C untuk mendapatkan simplisia dengan kadar air 8,6%, sedangkan umbi dengan ketebalan 4-5 mm mempunyai kadar air 9,5% setelah dikeringkan dalam suhu dan waktu yang sama.

Keadaan di dalam ruang pengering dan proses pengeringan diperlihatkan dalam gambar 3 dan gambar 4.

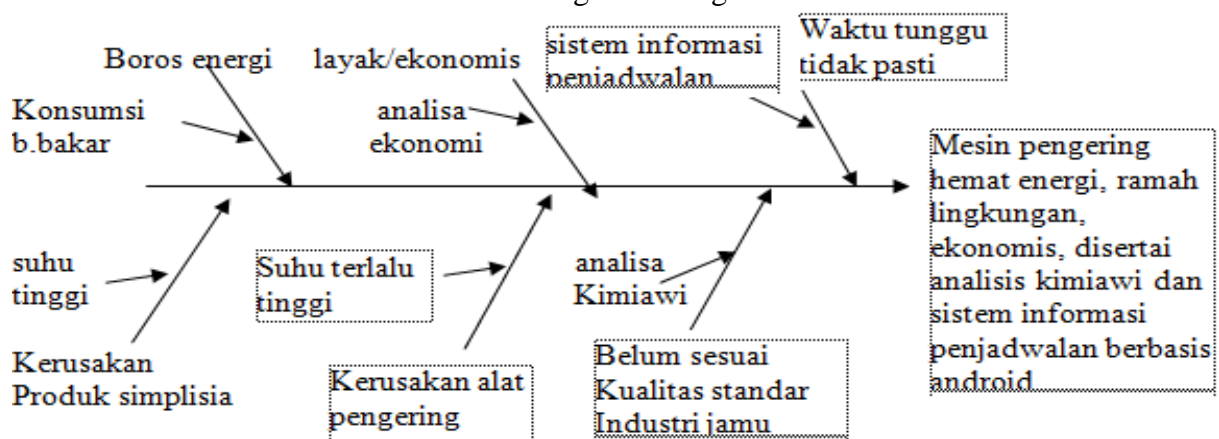


Gambar 3. Pipa Api dalam Ruang Pemanas



Gambar 4. Temulawak Dalam Proses Pengeringan

Gambar 5. Menunjukkan hasil identifikasi performa mesin pengering yang disajikan dalam bentuk diagram tulang ikan.



Gambar 5. Hasil identifikasi performa mesin pengering

Unjuk kerja alat pengering yang meliputi suhu pengeringan dan waktu pengeringan dengan hasil kadar air simplisia sudah memenuhi standar dari pustaka yang diacu. Meski demikian kualitas simplisia tidak hanya ditentukan oleh kadar air saja tetapi juga kadar curcumin yang belum dianalisis secara kimiawi. Untuk itu perlu dilakukan uji kimiawi terhadap kualitas simplisia yang dihasilkan dari alat pengering. Bahan bakar yang digunakan dalam alat pengering adalah limbah gergajian dari perusahaan kayu lapis di sekitar alat pengering. Belum adanya penghitungan secara ekonomi dalam penggunaan bahan bakar menyebabkan uji performa dari sisi penggunaan energi secara efektif dan efisien belum dapat diperkirakan. Hal ini yang akan menjadi dasar dalam inovasi yang akan dilakukan terhadap alat pengering simplisia, meliputi analisis kimiawi, pemasangan pengendali suhu, dan potensi penghematan energi.

KESIMPULAN

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan dapat disimpulkan:

1. Simplisia daun mempunyai kadar air 9,7% dengan rata-rata suhu pengeringan 70,5°C dan waktu pengeringan 3 jam.
2. Simplisia berbentuk umbi dengan ketebalan 2-3 mm mempunyai kadar air 8,6% sedangkan umbi dengan ketebalan 4-5 mm mempunyai kadar air 9,5%. Suhu rata-rata pengeringan sebesar 77°C dan waktu pengeringan selama 5 jam.
3. Perlu dilakukan uji kimiawi untuk simplisia hasil pengeringan.
4. Perlu alat pengendali suhu untuk mengatur suhu pengeringan dan suplai bahan bakar
5. Perlu kajian energi yang digunakan agar dapat dilakukan integrasi energi dalam alat pengering sehingga dapat meningkatkan unjuk kerjanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan penelitian melalui program hibah bersaing (penelitian terapan), Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Asosiasi Tanaman Biofarmaka "Assyfa Farmaka" desa Ringinanom kecamatan Tempuran kabupaten Magelang propinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodeker, G., and Graz, B., 2013, "**Traditional Medicine**", Hunter's Tropical Medicine and Emerging Infectious Disease, pp. 197-202, Elsevier
- Dinda, B., Silsarma, I., Dinda, M., Rudrapaul, P., 2014, "**Oroxylum indicum (L.) Kurz, An Important Asian Traditional Medicine: From Traditional Uses To Scientific Data For Its Commercial Exploitation**", Journal of Ethnopharmacology, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2014.12.027i>
- Elfahmi, Woerdenbag, H.J., Kayser, O., 2014, "**Jamu: Indonesian Traditional Herbal Medicine Towards Rational Phytopharmacological Use**", J Herbal Med (2014), <http://dx.doi.org/10.1016/j.hermed.2014.01.002>
- Limyati, D.A., dan Juniar, B.L.L., 1998, "**Jamu Gendong, a Kind of traditional Medicine in Indonesia: the microbial Contamination of its raw materials and endproduct**", Journal of Ethnopharmacology (63), pp.201-208
- Sodikin, I., Triyono, J, 2013, "**Rancang Bangun Alat Pengering Simplisia serta Optimalisasi Waktu dan Temperatur Pengeringan Guna Meningkatkan Produktivitas Industri Kecil**", dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional Industrial Services 2013 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon Banten, 8 - 9 Oktober 2013, ISBN: 978-602-14445-0-4, halaman 375 - 380.

EKSTRAKSI SENYAWA ANTOSIANIN DARI KULIT UBI JALAR UNGU

Sumarni, Pandu Febriyanto, Dwi Adhi Putra*
Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta
**daputra013@gmail.com*

ABSTRAK

Ubi jalar ungu mengandung senyawa antosianin yang terdapat pada daging dan kulitnya. Senyawa antosianin merupakan pigmen warna pada tumbuhan yang menghasilkan warna merah, biru, dan violet. Pengambilan zat antosianin dalam kulit ubi jalar ungu dilakukan dengan cara ekstraksi. Untuk mendapatkan senyawa antosianin terekstrak yang baik, perlu dilakukan penelitian terhadap kondisi proses ekstraksi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan kondisi operasi yang relatif baik pada proses ekstraksi antosianin dalam kulit ubi jalar ungu. Pada penelitian ini, akan dipelajari pengaruh waktu, suhu, kecepatan pengadukan, dan volume pelarut terhadap hasil antosianin terekstrak. Ekstraksi dilakukan dengan cara memasukkan 100 gram kulit ubi jalar ungu, etanol 96% dan asam sitrat 10% sebanyak 10 mL ke dalam labu leher tiga yang dilengkapi pemanas, termometer, pengaduk, dan pendingin balik. Dari analisa bahan baku diperoleh total antosianin sebanyak 1,627 mg/g bahan, dengan kadar air 77,79%. Pada ekstraksi bahan baku sebanyak 100 gram dengan pelarut etanol 96%, diperoleh antosianin terekstrak sebesar 1,344 mg/g bahan dengan kondisi operasi yang relatif baik pada waktu 150 menit, suhu 60°C, kecepatan pengadukan 400 rpm dan volume pelarut sebanyak 500 mL.

Kata kunci : Ubi jalar ungu, antosianin, ekstraksi

ABSTRACT

Ubi jalar ungu contain anthocyanins compound were found in meat and peel. An antocyanin compound is a pigment produce red, blue and violet colors. Taking anthocyanin compound from peel of ubi jalar ungu was done by extraction. Obtaining good extract of anthocyanin compound, we need to do research towards the condition of extraction process. The purpose of this research was to obtain condition of operation which was good enough in extraction process compound anthocyanin from ubi jalar ungu's peel. On this research, we were going to learn impact of variations time, temperature, stirrer speed and volume of solvent towards extracted anthocyanin's result. Extraction was done by interesting a 100 gram ubi jalar ungu's peel, 500 mL of 96% ethanol and 10% citric acid by 10 mL into a three-neck flask which was equipped with a heater, thermometer, stirrer, and cooler. From the analysis of raw materials obtained total anthocyanin as much 1,627 mg/g with a moisture content of 77,79%. In the extraction of raw materials as much as 100 grams with 96% ethanol, 500 mL, extracted anthocyanins obtained by 1,344 mg/g material with relative good operating conditions at the time of 150 minutes, the temperature of 60°C, the stirring speed of 400 rpm, and solvent volume 500 mL.

Keywords: Ubi jalar ungu, anthocyanin, extraction

PENDAHULUAN

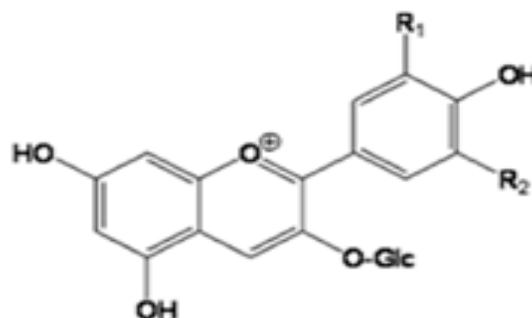
Penggunaan dan pemanfaatan zat warna pada era sekarang ini mengalami banyak peningkatan. Hampir diberbagai sektor industri besar maupun industri rumahan telah menggunakan zat warna, terutama pada industri makanan. Pada awalnya, pewarna makanan hanya menggunakan pewarna alami, misalnya dengan menggunakan daun jati untuk membuat warna merah atau menggunakan kunyit untuk mendapatkan warna kuning. Namun seiring

berjalannya waktu, kini telah ditemukan pewarna makanan sintetis yang lebih mudah digunakan dan menghasilkan warna yang lebih mantap.

Banyaknya permintaan menjadikan penjual lebih sering menggunakan pewarna makanan sebagai suatu inovasi. Dengan melimpahnya permintaan konsumen, tidak jarang banyak penjual yang bermain curang memanfaatkan pewarna tekstil sebagai pewarna didalam makanan. Penggunaan pewarna tekstil sebagai pengganti pewarna makanan sangat tidak dianjurkan. Meskipun harganya lebih terjangkau dan menghasilkan warna yang lebih tajam dan tahan lama, pewarna tekstil sangat berbahaya bila dikonsumsi tubuh dalam jangka panjang. Mengonsumsi makanan yang menggunakan pewarna tekstil dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker, dan menimbulkan penyakit kronik lainnya. Oleh karena itu, pewarna tekstil dilarang digunakan untuk pewarna makanan.

Penggunaan pewarna sintesis pada makanan tidak selalu aman karna ada dosis tertentu. Penggunaan pewarna sintesis dapat digantikan dengan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan. Antosianin adalah zat warna alami yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan dan bersifat antioksidan. Antosianin banyak dimiliki tumbuhan dengan warna merah sampai biru. Antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid yang pada umumnya larut dalam air. Pada nilai pH rendah (asam) pigmen ini berwarna merah dan pada pH tinggi (basa) berubah menjadi violet dan kemudian menjadi biru (Winarno, 1992).

Antosianin didalam tanaman biasanya terdapat dalam bentuk glikosida yaitu terbentuk dari ester dengan monosakarida seperti glukosa, galaktosa, ramnosa, dan terkadang pentosa (Santoni, 2013). Dalam pemanasan asam mineral pekat, maka antosianin pecah menjadi antosianidin dan gula. Antosianin biasanya dapat ditemukan dibebberapa bentuk antosianidin, diantaranya adalah: delfinidin, pentunidin, malvidin, sianidin, peonidin, dan pelargonidin (Anonim, 2012). Secara umum struktur molekul antosianin dapat dilihat pada Gambar 1 (Kristijarti dan Arlene, 2012).



Gambar 1. Struktur molekul antosianin

Keterangan:

Anthocyanins	R₁	R₂
delphinidin-O-glucoside	OH	OH
cyanidin-O-glucoside	OH	H
peonidin-O-glucoside	OCH ₃	H
petunidin-O-glucoside	OCH ₃	OH
malvidin-O-glucoside	OCH ₃	OCH ₃

Ubi jalar ungu mengandung pigmen antosianin dalam jumlah cukup besar, yang terdapat dalam daging maupun kulitnya. Selain mengandung pigmen antosianin, ubi jalar ungu juga merupakan sumber antioksidan dan beberapa zat lain yang berguna untuk kesehatan. Ubi jalar ungu banyak diolah menjadi berbagai produk makanan. Ubi jalar atau ketela rambat (*Ipomoea batatas L.*) merupakan tanaman yang tergolong di dalam famili *Convolvulaceae* (suku kangkung-kangkungan). Tanaman ini dapat dibudidaya baik di dataran tinggi maupun rendah dengan jenis tanah yang bermacam-macam. Berikut gambar ubi jalar ungu beserta klasifikasinya menurut Andiga (2012), dalam Hambali dkk., (2014) dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Ubi jalar ungu

Kingdom	Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom	Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
Super Divisi	Spermatophyta (Menghasilkan biji)

Divisi	Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas	Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)
Sub Kelas	Asteridae
Ordo	Solanales
Famili	Convolvulaceae (suku kangkung-kangkungan)
Genus	Ipomoea
Spesies	Ipomoea batatas Poir

Kandungan antosianin yang terdapat didalam ubi jalar ungu memiliki fungsi sebagai antioksidan, antibakteri, perlindungan untuk menghindari kerusakan hati, dan pencegah penyakit jantung dan *stroke*. Selain itu, ubi jalar ungu bisa menjadi antikanker karena mengandung zat aktif berupa selenium dan iodin serta dapat berperan dalam membantu proses kelancaran peredaran darah. Berikut ini kandungan gizi yang terdapat di dalam ubi jalar menurut Suprpta (2003) dalam Erlinan, dkk., (2011) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan gizi ubi jalar ungu

Gizi	Satuan	Ubi Ungu
Pati	%	22,64
Gula Reduksi	%	0,3
Lemak	%	0,94
Protein	%	0,77
Air	%	70,46
Abu	%	0,84
Serat	%	3,00
Vitamin C	mg/100g	21,43
Vitamin A	(SI) ^a	-
Antosianin	mg/100g	110,51

Di Indonesia sendiri pemanfaatan ubi jalar masih diproses secara umum dimana biasanya hanya direbus maupun digoreng atau bisa juga dimanfaatkan atau diproses untuk diambil patinya. Pemanfaatan atau pengolahan ubi jalar yang lebih inovasi masih sangat jarang

ditemukan. Limbah ubi jalar berupa kulit, batang, dan daun dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selain itu, daun muda yang terdapat di varietas ubi jalar dapat dimanfaatkan sebagai sayur. Melihat prospek tersebut, limbah kulit ubi jalar ungu dapat dioptimalkan penggunaannya sebagai salah satu sumber pewarna alami untuk makanan dan minuman.

Untuk mengambil zat warna antosianin dalam kulit ubi jalar ungu dilakukan dengan cara ekstraksi. Menurut Yuniwati, dkk., (2012) ekstraksi adalah suatu cara pemisahan dimana komponen dari padatan atau cairan dipindahkan ke cairan yang lain yang berfungsi sebagai pelarut. Teknik ekstraksi menurut McCabe dan Smith, (1976) digolongkan menjadi dua kategori yakni pengurasan (*leaching*) atau ekstraksi zat padat (*solid extraction*) dan ekstraksi zat cair (*liquid extraction*). Ekstraksi padat cair selalu melibatkan dua tahapan yaitu: diperlakukannya kontak antara pelarut dengan padatan sehingga konstituen zat terlarut dapat ditransfer kedalam pelarut dan pemisahan atau pencucian solute dari sisa padatan (Brown, 1978).

METODE PENELITIAN

Sampel berupa kulit ubi ungu dipotong kecil-kecil sebanyak 100 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu leher tiga yang ditambahkan etanol 96% dan asam sitrat 10% dengan volume tertentu. Ekstraksi dilakukan dengan pemanasan dalam waterbath dan pengadukan menggunakan motor pengaduk. Untuk menjaga volume pelarut digunakan pendingin balik. Ekstraksi zat antosianin dilakukan dengan memvariasikan waktu, suhu, kecepatan pengadukan, dan volum pelarut.

Perhitungan antosianin terekstrak dilakukan dengan cara Guisti dan Wrolstad (2001), Larutan hasil ekstraksi dibagi menjadi 2 yang masing-masing disiapkan sebanyak 2 ml filtrat, kemudian diencerkan. Pada sampel pertama diencerkan dengan menggunakan buffer KCL dengan pH 1,0 sebanyak 20 ml dan untuk sampel kedua digunakan buffer Na-asetat dengan pH 4,5 sebanyak 20 ml. Masing-masing sampel dilarutkan dengan larutan buffer berdasarkan DF (*Dilution Factors*) yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu 10. Kedua sampel dibiarkan selama 15 menit sebelum diukur. Absorbansi dari setiap larutan pada panjang gelombang 530 dan 700 nm diukur dengan buffer KCL pH 1 dan buffer Na-asetat pH 4,5 sebagai blankonya.

Nilai absorbansi (A) = $(A_{530} - A_{700})_{pH1} - (A_{530} - A_{700})_{pH4,5}$

$$\text{Total antosianin terekstrak } \left(\frac{mg}{L}\right) = \frac{A \times BM \times DF \times 1000}{\epsilon \times L}$$

$$\text{Total antosianin terekstrak } \left(\frac{mg}{g}\right) = \frac{A \times BM \times DF \times 1000}{\epsilon \times L} \times \frac{V}{W}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Air Bahan Baku

Kadar air dalam bahan baku diperoleh dengan menimbang 10 gram bahan dan mengeringkannya dengan cara dioven pada suhu 105-110°C selama 3 jam. Perlakuan diulang sampai berat konstan. Dari hasil percobaan diperoleh kadar air sebesar 77,79%.

Total Antosianin dalam Bahan Baku

Untuk mengetahui total antosianin dalam bahan baku, digunakan sebanyak 50,074 gram bahan baku (kulit ubi ungu), asam sitrat 10% sebanyak 10 mL dan pelarut berupa etanol 96% sebanyak 300 mL dimasukkan dalam alat soklet dan dilakukan ekstraksi hingga sembilan kali sirkulasi. Selanjutnya hasil ekstraksi dianalisa menggunakan alat spektrofotometer UV dan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan total antosianin dalam bahan. Dari hasil analisa dan perhitungan, didapatkan total antosianin dalam bahan sebesar 1,627 mg/g (antosianin/berat bahan).

Pengaruh Lama Waktu Ekstraksi Terhadap Antosianin Terekstrak

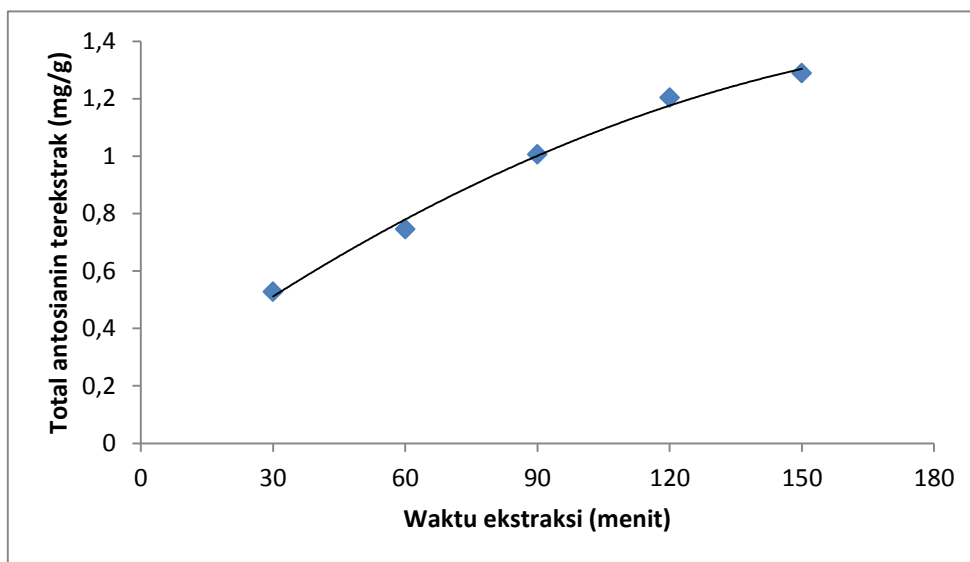
Percobaan dengan variabel lama waktu ekstraksi, dilakukan pada suhu 55°C dengan bahan berupa kulit ubi ungu sebanyak 100 gram, etanol 96% sebanyak 500 mL, dan asam sitrat 10% sebanyak 10 mL. Selanjutnya lama waktu ekstraksi divariasikan dan variabel lain dijaga tetap. Kemudian hasil ekstraksi dianalisa menggunakan spektro UV dan dengan menggunakan perhitungan yang ada dapat dihitung banyaknya antosianin terekstrak. Berikut hasil percobaan dan perhitungan pengaruh lama waktu ekstraksi terhadap % antosianin terekstrak dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Data hasil ekstraksi pada variabel lama waktu ekstraksi

No.	Lama Waktu Ekstraksi (Menit)	Total Antosainin Terekstrak (mg/g)	%Antosianin Terekstrak
1	30	0,528	32,48

2	60	0,745	45,82
3	90	1,006	64,19
4	120	1,204	73,99
5	150	1,289	79,27

Dari Tabel 2 di atas, dapat dibuat grafik hubungan antara lama waktu ekstraksi dengan % antosianin terekstrak seperti ditunjukkan pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Grafik Hubungan Lama Waktu Ekstraksi vs Total antosianin terekstrak

Dari grafik hubungan lama waktu ekstraksi vs antosianin terekstrak dapat dinyatakan bahwa semakin lama waktu ekstraksi dijalankan akan semakin banyak pula total antosianin terekstrak.

Pengaruh Suhu Ekstraksi Terhadap Antosianin Terekstrak

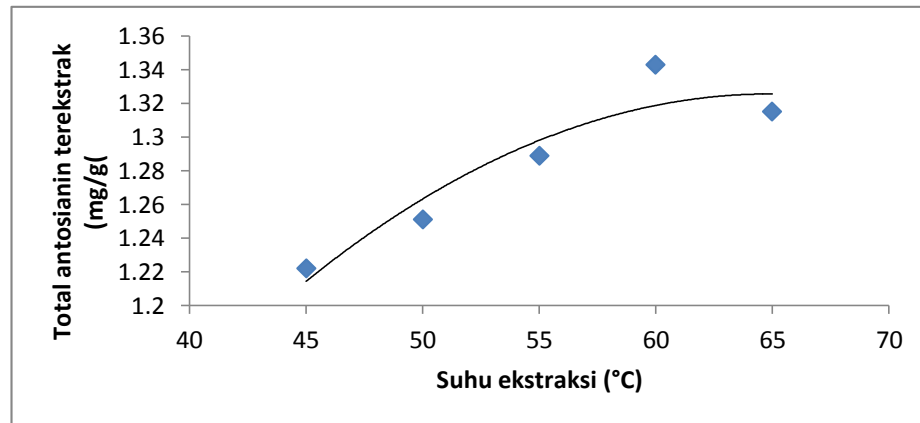
Percobaan dengan variabel suhu ekstraksi, dilakukan selama 150 menit dengan bahan berupa kulit ubi ungu sebanyak 100 gram, etanol 96% sebanyak 500 mL, dan asam sitrat 10% sebanyak 10 mL. Selanjutnya suhu ekstraksi divariasikan dan variabel lain dijaga tetap. Kemudian hasil ekstraksi dianalisa menggunakan spektro UV dan dengan menggunakan perhitungan yang ada dapat dihitung banyaknya antosianin terekstrak. Berikut hasil percobaan dan perhitungan pengaruh lama waktu ekstraksi terhadap total antosianin terekstrak dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Data hasil ekstraksi pada variabel suhu ekstraksi

No.	Suhu Ekstraksi (°C)	Total Antosainin Terekstrak	%Antosianin Terekstrak
1	45	1,222	75,15
2	50	1,251	76,89

3	55	1,289	79,27
4	60	1,343	82,56
5	65	1,315	80,82

Dari Tabel 3, dapat dibuat grafik hubungan antara pengaruh suhu ekstraksi dengan antosianin terekstrak yang ditunjukkan oleh Gambar 5 berikut:



Gambar 4. Grafik Hubungan Suhu Ekstraksi vs Total antosianin terekstrak

Dari grafik hubungan suhu ekstraksi vs total antosianin terekstrak dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi suhu ekstraksi dijalankan maka akan semakin banyak total antosianin didapatkan. Namun pada suhu 65°C didapatkan data perolehan % antosianin terekstrak menurun. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pada suhu 60°C merupakan suhu optimum pengambilan antosianin dari kulit ubi jalar ungu.

Pengaruh Kecepatan Pengadukan Terhadap Antosianin Terekstrak

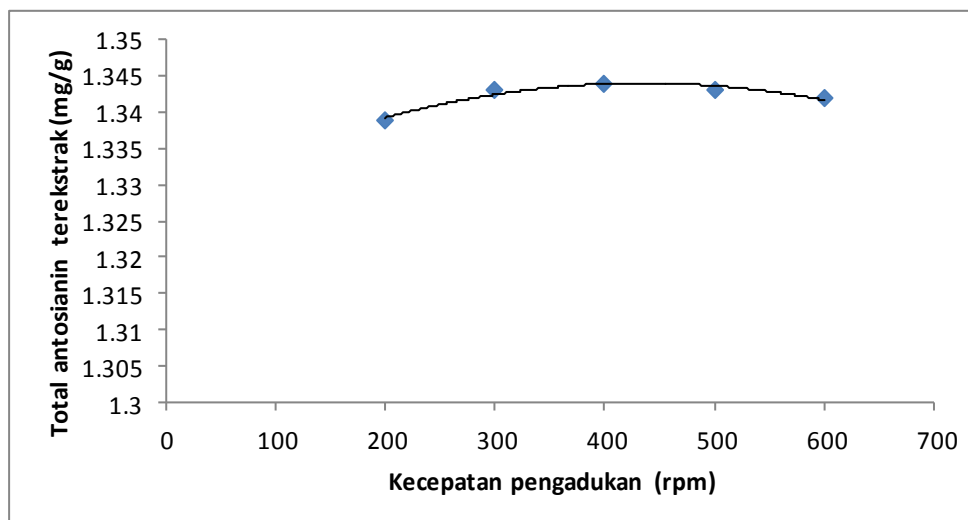
Proses ekstraksi dilakukan pada suhu 60°C selama 150 menit dengan bahan berupa kulit ubi ungu sebanyak 100 gram, etanol 96% sebanyak 500 mL, dan asam sitrat 10% sebanyak 10 mL. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh kecepatan pengadukan terhadap total antosianin terekstrak digunakan variabel sebesar 200 rpm, 300 rpm, 400 rpm, 500 rpm, dan 600 rpm. Hasil dari penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 5.

Tabel 5. Data hasil perhitungan nilai absorbansi dan total antosianin terekstrak

No	Kecepatan Pengadukan	Total Antosianin Terekstrak (mg/g)	% antosianin terekstrak
1	200 rpm	1,339	82,35
2	300 rpm	1,343	82,55
3	400 rpm	1,344	82,62

4	500 rpm	1,343	82,55
5	600 rpm	1,342	82,49

Dari Tabel 4 dapat dilukiskan grafik hubungan antara kecepatan pengadukan terhadap hasil total antosianin terekstrak yang dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Grafik hubungan kecepatan pengadukan (rpm) dengan total antosianin terekstrak (mg/g)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4 dan Gambar 5 dapat dilihat bahwa semakin tinggi kecepatan pengadukan maka hasil antosianin terekstrak yang diperoleh akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya tumbukan antara pelarut etanol dengan bahan baku sehingga mengakibatkan distribusi dan meningkatnya pengacakan. Tetapi setelah kecepatan pengadukan diatas 400 rpm total antosianin terekstrak yang diperoleh mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kecepatan pengadukan maka akan terbentuk vorteks sehingga transfer massa dari bahan baku ke dalam pelarut mengalami penurunan serta akan memperkecil kontak antara pelarut dengan bahan baku.

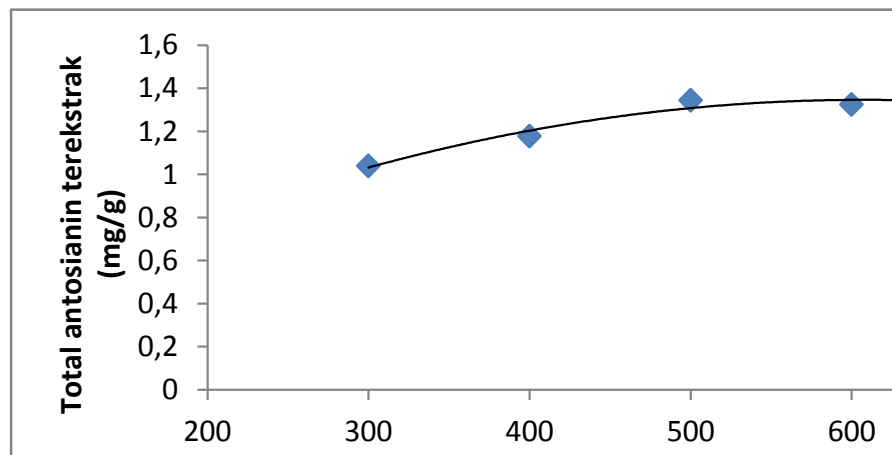
Pengaruh Perbandingan Volume Pelarut Terhadap Antosianin Terekstrak

Ekstraksi dilakukan pada suhu 60°C selama 150 menit dan kecepatan pengadukan 400 rpm dengan bahan berupa kulit ubi ungu sebanyak 100 gram dan asam sitrat 10% sebanyak 10 mL. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh perbandingan volume pelarut terhadap total antosianin terekstrak digunakan variabel sebesar 300 mL, 400 mL, 500 mL, 600 mL, dan 700 mL. Hasil dari penelitian dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 6.

Tabel 6. Data hasil perhitungan nilai absorbansi dan total antosianin terekstrak

No	Volume pelarut (mL)	Total Antosianin Terekstrak (mg/g)	% antosianin terekstrak
1	300	1,039	63,87
2	400	1,177	72,38
3	500	1,344	82,62
4	600	1,324	81,35
5	700	1,323	81,29

Dari Tabel 5 dapat dilukiskan grafik hubungan antara perbandingan bahan dan pelarut terhadap hasil total anthosianin terekstrak yang dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.



Gambar 6. Grafik hubungan antara volume pelarut (mL) dengan total anthosianin terekstrak (mg/g)

Berdasarkan hasil dari Tabel 5 dan Gambar 6 dapat diketahui bahwa semakin besar volume pelarut maka hasil total antosianin terekstrak yang diperoleh semakin besar. Hal ini disebabkan karena terjadinya kontak antara bahan baku dengan pelarut sehingga luas permukaan perpindahan massa antara bahan baku dengan pelarut akan semakin besar. Tetapi setelah volume pelarut sebesar 500 mL terjadi penurunan hasil antosiani terekstrak. Hal ini terjadi karena jumlah volume pelarut semakin besar maka distribusi molekul dan transfer massa menjadi kecil sehingga mengurangi hasil antosianin terekstrak.

KESIMPULAN

1. Pengambilan antosianin dengan cara ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol 96% dan ditambahkan asam sitrat 10% sebanyak 10 mL, diperoleh kandungan total antosianin dalam kulit ubi jalar ungu sebesar 1,627 mg/g bahan dengan kadar air 77,79%.

2. Semakin lama waktu ekstraksi total antosianin terekstrak semakin besar.
3. Semakin tinggi suhu ekstraksi semakin besar pula total antosianin terekstrak, namun setelah pada suhu lebih tinggi dari 60⁰C mengalami penurunan.
4. Semakin tinggi kecepatan pengadukan total antosianin terekstrak akan semakin besar, namun setelah kecepatan pengadukan lebih dari 400 rpm antosianin terekstrak mengalami penurunan.
5. Semakin besar volume pelarut yang ditambahkan, maka antosianin yang terekstrak akan semakin besar.
6. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan kondisi operasi yang relatif lebih baik pada waktu ekstraksi 150 menit, suhu 60⁰C, kecepatan pengadukan 400 rpm, volume pelarut 500 mL, dan bahan baku sebanyak 100 gram diperoleh hasil total antosianin terekstrak sebesar 1,344 mg/g bahan dengan %antosianin terekstrak sebesar 82,62%.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012, *Pewarna Alami Untuk Pangan, Merah-Ungu Antosianin*, dalam seafast center LPPM IPB.
- Brown, G.G., 1978, *Unit Operations*, John Wiley and Sons Inc., New York Modern Asia Edition, Charles Tuttle Co., Tokyo
- Erliana, dkk., 2011, *Potensi Ubi Jalar Ungu sebagai Pangan Funnksional*, dalam Iptek Tanaman Pangan Vol. 6 No 1, 2011
- Guisti, M.M. dan Wrolstad, R.E., 2001, *Characterization and Measurement of Anthocyanins UV-visible spectroscopy*. John Wiley & Sons, Inc.
- Hambali Mulkan, dkk., 2014, *Ekstraksi Antosianin dari Ubi Jalar dengan Variasi Konsentrasi Solven, dan Lama Waktu Ekstraksi*. Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. No. 2, Vol. 20, Hal: 25-35.
- Kristijarti, Prima dan Arlene, Aristya, 2012, *Isolasi Zat Warna Ungu pada Ipomoea batatas Poir dengan Pelarut Air*, LPPM Universitas Katolik Prahayangan.
- McCabe, W. L. dan Smith, J. C., 1976, *Unit Operation of Chemical Engineering 3rd Edition*. McGraw-Hill Book Inc.
- Santoni, Adlis, dkk., 2013, *Isolasi Antosianin dari Buah Pucuk Merah (syzgium campanulatum korth.) serta Pengujian Antioksidan dan Aplikasi sebagai Pewarna Alami*, dalam Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung 2013.
- Winarno, F.G., 1994, *Kimia Pangan dan Gizi*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Yuniwati, Murni, dkk., 2012. *Optimasi Kondisi Proses Ekstraksi Zat Pewarna dalam Daun Suji dengan Pelarut Etanol*, dalam Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) Periode III.

KONVERGENSI MULTIMEDIA MASSA, DIGITALISASI, TANTANGAN DAN PELUANG PERGURUAN TINGGI BERBASIS KOMUNIKASI DI INDONESIA

Supadiyanto

Dosen Tetap Program Studi D3 Penyiaran AKINDO Yogyakarta

**email: padiyanto@yahoo.com*

ABSTRAKSI

Babak sejarah perjalanan industri media massa mengalami masa cukup panjang sejak Revolusi Komunikasi Babak I ketika kertas dan mesin cetak ditemukan pertama kali. Lalu berlanjut pada Revolusi Komunikasi Babak II dan Babak III di mana berbagai teknologi di bidang telekomunikasi, media, dan informatika ditemukan hingga sekarang ini. Konvergensi multimedia massa menjadi problematika kompleks yang menelung industri media di Tanah Air. Sebab konvergensi multimedia massa memiliki dampak ganda (positif dan negatif) bagi kehidupan manusia. Ada dua rumusan masalah yang dikupas dalam penelitian ini. Bagaimanakah implementasi konvergensi multimedia massa dalam industri media sekarang? Bagaimanakah tantangan Perguruan Tinggi berbasis komunikasi di Indonesia dalam menghadapi era konvergensi multimedia dan digitalisasi? Penelitian ini berparadigma kualitatif diskriptif. Ada dua jenis sumber data yang diolah dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Waktu penelitian ini berlangsung sejak Agustus-Oktober 2016. Hasilnya, substansi dari konvergensi multimedia massa adalah efisiensi, produktivitas, sinergisitas (elaborasi), dan transformasi. Ada lima peluang dan tantangan yang dimiliki Perguruan Tinggi Komunikasi dalam menghadapi era konvergensi multimedia massa. Pertama, PT berbasis komunikasi harus mampu menyediakan SDM yang memiliki kompetensi terkonvergensi dalam berbagai bidang media. Yaitu keterampilan teknis dan penunjang, pengetahuan dan regulasi, serta kesadaran. Kedua, PT berbasis komunikasi harus mampu menyinergikan berbagai keilmuan komunikasi dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga mampu memberikan berbagai solusi tepat untuk menghadapi persoalan-persoalan baru di era konvergensi dan digitalisasi. Ketiga, PT berbasis komunikasi harus bisa berkontribusi dalam melahirkan berbagai regulasi baru, agar regulasi tersebut menjamin adanya perlindungan publik, pencerahan publik, mencegah monopoli media maupun praktik-praktik lain yang mengarah ke sana, serta memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. Keempat, PT berbasis komunikasi di samping menjadi "laboratorium dan pabrik" pencetak SDM andal di bidang komunikasi, juga harus memiliki sendiri "perusahaan sendiri di bidang komunikasi". Terakhir, PT berbasis komunikasi harus menjadi motor penggerak dalam melakukan berbagai gerakan perubahan sosial termasuk dalam mengamankan estafet kepemimpinan nasional maupun lokal.

Kata-kata kunci: konvergensi, perguruan tinggi, komunikasi, industri, regulasi, digitalisasi

ABSTRACT

Round the history of the mass media industry experienced a period long enough since the Revolution Communications Act I when the paper and the printing press was first discovered. Then continue on Communication Revolution Act II and Act III where the various technologies in the field of telecommunications, media, and information was found until now. Multimedia convergence of mass to the complex problems of twisting of the media industry in the country. For multimedia convergence masses have dual effects (positive and negative) for human life. There are two problem formulation pared in this study. How is the implementation of a mass of multimedia convergence in the media industry now? How College-based communication challenges in Indonesia in the era of multimedia convergence and digitalisation? This research paradigm of qualitative descriptive. There are two sources of data are processed in this study, namely primary and secondary data. This study period lasted from August to October 2016. As a result, the substance of mass multimedia convergence is the efficiency, productivity, synergy (elaboration), and transformation. There are five opportunities and challenges posed by the College of Communication in the era of multimedia convergence masses. First, the PT-based communication should be able to provide recruitment of competent converged in various media fields. Namely technical and support skills, knowledge and regulation, as well as awareness. Second, the PT-based communication should be capable of

synergizing various scholarly communication with other disciplines, so as to provide appropriate solutions to face the new problems in the era of convergence and digitalisation. Third, PT-based communication should be able to contribute in the delivery of various new regulations, in order that these regulations ensure public protection, public enlightenment, to prevent media monopolies and other practices that led to it, and provide social justice for the people. Fourth, PT-based communications in addition to being "laboratories and factories" SDM printers reliably in the field of communications, also must have its own "his own company in the field of communication". Recently, PT-based communication should be the driving force in making various movements for social change, including in securing national and local leadership baton.

Key words: convergence, college, communication, industry, regulatory, digitalization

Prolog: Globalisasi, Telematika, dan Revolusi Komunikasi

Arus globalisasi terus mendera kehidupan berbagai negara sekarang. Perubahan demi perubahan terus terjadi menerpa kita. Arus globalisasi yang semula tercetus akibat ekspansi negara-negara Eropa ke berbagai penjuru dunia untuk melancarkan tiga misi mulia—terkenal dengan nama "3G" (*Gold, Glory, and Gospel*); telah berkembang pesat menjadi konsep "desa global" (*global village*) sebagaimana yang pernah digagas Marshall McLuhan (1964). Bahwa dunia yang sangat luas seolah mengerdil bak desa-desa dunia yang saling terhubung. Dunia menjadi sempit, kerdil, dan seakan bisa digenggam tangan kita. Berbagai penemuan teknologi telekomunikasi, media, informatika, grafika, dan transportasi (Telematikagrtrans) telah berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan. Implementasi berbagai Telematikagrtrans tersebut memiliki implikasi positif sekaligus negatif. Khusus pada sektor industri media massa (baik cetak maupun elektronik), Telematikagrtrans menjadi kata kunci terwujudnya konvergensi multimedia. Berbagai jenis media massa terintegrasi dalam satu saluran terpadu. Babak pertama industri media massa, sejatinya dimulai ketika Cai Lun (Tsai Lun/Cai Jungzhon) di zaman Kaisar Dinasti Han (China) menemukan teknologi sederhana bernama kertas tahun 105 Masehi. Itulah mengapa salah satu filosofi hadits (dalam Islam) memerintahkan kepada umat Muslim untuk menuntut ilmu meski harus pergi sampai negara China. Kertas menjadi media utama penyimpanan dan penyebaran informasi dan pengetahuan pada era tersebut (bahkan bertahan sampai sekarang). Setelah Tsai Lun, tokoh sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri media adalah Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (Johan Gutenberg). Tokoh Jerman ini menemukan mesin cetak tahun 1450 Masehi. Pertemuan antara kertas dan mesin cetak inilah yang melahirkan industri media cetak pertama di dunia. Kolaborasi teknologi tersebut menjadi fondasi (*milestones*) bagi industri media. Babak ini disebut Revolusi Komunikasi Babak Pertama. Perkembangan industri media terus melejit luar biasa paska Guglielmo Marconi (Italia) menemukan teknologi radio tahun 1874 Masehi serta John Logie Baird (Skotlandia) menginvensi teknologi TV tahun 1926 Masehi. Pergerakan

informasi dan telekomunikasi yang semula berjalan lambat, tiba-tiba berjalan sangat cepat. Sebab pancaran radio dan televisi bisa merambat dengan cepat melalui gelombang frekuensi elektromagnetik, sehingga kendala ruang dan waktu bisa teratasi. Menurut pandangan penulis, penemuan teknologi radio dan televisi ini layak disebut Revolusi Komunikasi Babak Kedua—yang mengandalkan gelombang frekuensi radio.

Tren industri media kembali mengalami pergeseran luar biasa setelah sejumlah tokoh yang dipelopori oleh Leonard Kleinrock (Amerika Serikat) dan kawan-kawan menemukan teknologi Internet tahun 1969. Semula teknologi mayantara ini diperuntukkan proyek rahasia (militer) milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dinamai *Advanced Research Project Agency Network (ARPANET)*, ketika antara Blok Barat (dengan kendali Amerika Serikat) dan Blok Timur (dengan poros Uni Soviet) berada dalam suasana perang dingin (*pschywar*) yang memicu kompetisi bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi, senjata perang, dan penjelajahan ruang angkasa. Sampai sekarang implementasi teknologi Internet sangat mendominasi dalam industri media dan bidang lainnya. Layaklah kalau penemuan teknologi Internet tersebut sebagai Revolusi Komunikasi Babak Ketiga. Eksistensi Internet juga semakin mendunia berkat temuan Charles Kuon Kao (China; juga pernah berkewarganegaraan Amerika Serikat, dan Inggris) karena menemukan kabel serat optik (fiber optik dari serat kaca) tahun 1970. Berkat Internet pula dapat terjadinya konvergensi multimedia massa atau peleburan berbagai jenis industri media massa dalam satu saluran terpadu. Berbagai temuan Telematikagrtrans di atas memicu terjadinya globalisasi dan revolusi komunikasi luar biasa dalam waktu sangat cepat. Globalisasi dan Telematika berdampak ganda (positif dan negatif) bagi kehidupan. Hanya mereka yang menguasai kapital, sumber daya (manusia dan finansial, teknologi), dan kekuasaan yang akhirnya menjadi pemenang era globalisasi (Supadiyanto, 2013: 572). Adapun dua rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi konvergensi multimedia massa dalam industri media saat ini? Bagaimanakah tantangan Perguruan Tinggi berbasis komunikasi di Indonesia dalam menghadapi era konvergensi multimedia dan digitalisasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berparadigma kualitatif diskriptif. Ada dua jenis sumber data yang diolah dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengalaman empirik (refleksi) peneliti selama menggeluti dunia komunikasi dan data sekunder bersumber dari penggalian literatur atau kajian pustaka yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Waktu penelitian ini berlangsung sejak Agustus-Oktober 2016.

Peta Industri Media dan Ekonomi Politik Media

Sejatinya peta industri media massa cetak dan elektronik di Indonesia sampai sekarang hanya didominasi oleh 13 mogul (raksasa) media swasta nasional. Mereka adalah: *MNC Group* milik Hary Tanoesoedibjo; *Kompas Gramedia Group* milik Jacob Oetomo; *Elang Mahkota Teknologi* milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja; *Mahaka Media* dipunyai oleh Abdul Gani dan Erick Tohir; *CT Group* dipunyai Chairul Tanjung. Grup perusahaan lain adalah *Beritasatu Media Holdings/Lippo Group* yang dimiliki James Riady; *Media Group* milik Surya Dharma Paloh; *Visi Media Asia (Bakrie & Brothers)* milik Anindya Bakrie; *Jawa Pos Group* milik Dahlan Iskan dan Azrul Ananda; *MRA Media* milik Adiguna Soetowo dan Soetikno Soedarjo; *Femina Group* milik Pia Alisyahbana dan Mirta Kartohadiprodo; *Tempo Inti Media* milik Yayasan Tempo; *Media Bali Post Group (KMB)* milik Satria Narada (Nugroho, Yanuar. dkk. 2012 dan Lim, M. 2012). Hal ini terjadi karena para pengusaha media semakin mengukuhkan pengaruhnya dengan menguasai seluruh jenis media dari hulu sampai hilir. Bahkan mereka melakukan penguasaan bisnis bidang non media juga. Model bisnis tersebut dikenal sebagai integrasi horisontal dan vertikal.

Trennya, di samping para pengusaha media di atas melakukan strategi bisnis ganda (integrasi horisontal, vertikal, dan silang), mereka juga mengincar kekuasaan dengan menjadi politisi maupun pengurus inti partai politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Fakta tersebut sesuai dengan teori ekonomi politik media sebagaimana digagas oleh Vincent Mosco (2009; 1996). Ada tiga gagasan pokok terkandung dalam teori ekonomi politik media yaitu: komodifikasi, strukturasi, dan spasialisasi. Pemilu Presiden 2014 kemarin menjadi realitas berlakunya hukum ekonomi politik media dengan “sangat sempurna”, di mana masing-masing media memiliki kepentingan “politik dan ekonomi”, demi mengukuhkan pengaruhnya kepada audiens. Agenda Pilkada Februari 2017 mendatang yang akan digelar di 101 daerah meliputi 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota di Indonesia (termasuk di Kota Yogya dan Kabupaten Kulonprogo di DIY) menjadi medan pertarungan para politisi lokal dan nasional dalam menggolkan "libido/syahwat kekuasaan" yang dibalut bahasa retorika. Pada aspek lain, Pilkada 2017 menjadi ajang bagi para pengelola media massa untuk berkontribusi menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Bukan rahasia lagi, adanya momentum Pilpres maupun Pilkada ternyata juga meningkatkan pendapatan iklan dari berbagai perusahaan media. Logislah jika para pengusaha media juga berebut memperoleh iklan politik.

Amat menakutkan data belanja iklan nasional. Data milik PT Sigi Kaca Pariwiara, total belanja iklan nasional tahun 2014 sebesar Rp 99 triliun, tahun 2015 sebesar Rp 72,5 triliun, dan tahun 2016 diprediksi mencapai Rp 85,68 triliun. Data dari Persatuan Perusahaan Periklanan

Indonesia (P3I) tahun 2015 belanja iklan nasional sebanyak Rp 136 triliun. Data *Nielsen Media Research* sendiri memproyeksikan belanja iklan nasional tahun 2016 sebanyak Rp 67,7 triliun (sampai Juni 2016); akumulasi iklan di 15 TV, 99 koran, dan 123 majalah dan tabloid. Padahal khusus belanja iklan di TV saja habis Rp 51,9 triliun. Tahun 2009 sebanyak Rp 48,6 trilliun; Rp 59,8 triliun (2010), Rp 72,7 trilliun (2011), dan Rp 87,5 trilliun (2012).

Khusus iklan di media TV; stasiun Grup MNC (RCTI, MNCTV, dan Global TV) masih merajai pasar iklan televisi Indonesia. Tiga stasiun TV milik taipan media Harry Tanoesoedibyo menguasai 35,6 persen kue iklan dengan meraup pendapatan Rp 23,2 triliun. Rinciannya sebagai berikut: RCTI Rp 9,9 triliun, SCTV Rp 8,8 triliun, MNCTV Rp 7,9 triliun, Indosiar Rp 7 triliun, ANTV Rp 6,6 triliun, Global TV Rp 5,4 triliun, Trans 7 Rp 5,1 triliun, Trans TV Rp 4,525 triliun, TV One Rp 4,522 triliun, Metro TV Rp 2,9 triliun, Kompas TV Rp 1,3 triliun, Net TV Rp 1 triliun, dan TVRI Rp 44,4 miliar (Kompas, 2015).

Industri media TV masih menjadi primadona bisnis media. Ironisnya, televisi di Indonesia terkonsentrasi pada sejumlah pengusaha media dan terjadi homogenisasi isi siaran sebagai dampak dari aglomerasi media. Lihat saja program siarannya banyak didominasi acara "*Jakartanan*" dan program asing. Sementara program lokal tersingkirkan. Apalagi mayoritas stasiun televisi komersial yaitu sekitar 218 dari 300 stasiun televisi merupakan jaringan dari 10 stasiun induk di Jakarta dimiliki oleh 5 pemilik saja (KPI, 2012). Kompetisi bisnis media sungguh sengit. Sebab saat ini berbagai perusahaan media harus berlomba untuk mendapatkan kue iklan, sumber daya manusia yang unggul, dan sumber daya teknologi yang ideal.

Cermati saja, ada sebanyak 1.254 perusahaan media cetak (terdiri atas 614 surat kabar harian dan mingguan, 640 tabloid dan majalah. Total sirkulasinya sekitar 22,3 juta eksemplar di mana 10 juta eksemplar nya merupakan surat kabar harian/mingguan (SPS, 2014). Di bidang radio, saat ini ada sekitar 1.178 stasiun radio diperkirakan 775 buah radio merupakan LPS anggota PRSSNI, sisanya adalah radio non PRSSNI, publik lokal, dan komunitas (*Media Scene*, 2011) dan sekitar 78 stasiun RRI (RRI, 2013). Ada lima isu besar berhubungan kuat antara ekonomi politik media dan konvergensi media. Yaitu isu mengenai aglomerasi media di mana kepemilikan saham berbagai jaringan media raksasa hanya dikuasai segelintir pengusaha saja, isu dominasi isi siaran program *Jakartanan* dan program asing serta terdepaknya program lokal, buruknya kualitas isi siaran, ekspansi jaringan perusahaan media asing di Indonesia, serta eksploitasi para pekerja media di mana kesejahteraannya belum terjamin baik (Supadiyanto, 2015).

Konvergensi Multimedia Massa dan Digitalisasi

Minimal ada lima cirikhas dari konvergensi multimedia massa. *Pertama*, konvergensi multimedia massa dari sisi kepemilikan media massa (*ownership*). *Kedua*, konvergensi multimedia massa dari aspek struktur keredaksian dan pemasaran (pemberitaan dan periklanan). *Ketiga*, konvergensi multimedia massa dari perspektif konten (isi). *Keempat*, konvergensi multimedia massa dari sisi teknologi dan jaringan. *Kelima*, konvergensi multimedia massa dari aspek strategi bisnis (Supadiyanto, 2015). Di mana konvergensi tersebut saat ini terjadi serentak dan mengglobal (Mosco, 1996; 2009). Bahkan Triputra (2004: 100-101) mengungkapkan bahwa diversifikasi dan Internasionalisasi berbagai perusahaan raksasa terjadi ketika mereka melakukan ekspansi ke bidang usaha lain dan membuka diri terhadap investor asing.

Namun hanya ada empat kata kunci keberhasilan dalam menghadapi era konvergensi multimedia. Adalah: efisiensi, produktivitas, transformasi, dan sinergisitas (elaborasi). Setiap perusahaan media yang bisa tetap bertahan hidup di dunia ini harus menerapkan empat nilai esensial dari konvergensi multimedia. Jika tidak, mereka akan kolaps, ambruk, dan musnah ditelan roda zaman. Ingat salah satu watak industri media adalah tunduk pada perkembangan Telematikagrans yang baru. Simak nasib Sinar Harapan yang terbit sejak 27 April 1961 terpaksa harus menutup edisi terakhirnya pada 31 Desember 2015. Nasib sama menimpa Jurnal Nasional yang harus mengakhiri edisi cetaknya pada 1 November 2014. Surat kabar lain yang kolaps yaitu Harian Bola (edisi terakhir 31 Oktober 2014), *Soccer*, Majalah *Fortune*, *Chip*, dan *Jepp* milik Kelompok Kompas Gramedia. Koran *Celebes* dan koran Inilah Sulsel di Sulawesi Selatan juga sudah tamat nasibnya tahun 2015. Khusus di DIY, tercatat paling tidak ada 4 surat kabar yang sudah kolaps cukup lama, yaitu: Jogjakarta Post, Malioboro Ekspres, KR Bisnis, dan Jogja Raya. Di luar negeri, sejumlah manajemen surat kabar memilih untuk menutup edisi cetaknya dan beralih ke media *online* saja. Mereka antara lain: *New York Times*, *Tribune Co*, Majalah *News Week*, Majalah *Reader's Digest*, *Rocky Mountain News*, dan *The Washington Post*. Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa bisnis media cetak di Indonesia tengah berada dalam ambang "kiamat" (Supadiyanto, 2016; 2014).

Era konvergensi multimedia sesungguhnya adalah era kompetisi terbuka yang mempertarungkan kreativitas (SDM), modal/kapital, teknologi (jaringan), dan manajerial. Kompetisi yang diciptakan tidak hanya bersifat lokal atau nasional, melainkan telah bergeser berskala Internasional karena pasar yang tersedia mendunia. Kecanggihan Telematikagrans di bidang media juga telah menembus batas-batas ruang dan waktu, melintas tapal batas negara.

Berbeda dengan nasib koran, justru pertumbuhan pengguna teknologi Internet luar biasa di Indonesia. Saat ini mencapai sekitar 82 juta pengakses (Kominfo RI, 2016). Angka itu menunjukkan betapa Internet menjadi media prospektif. Padahal pada tahun 1998, jumlah pengakses Internet masih di bawah angka 1 juta pengguna. Sumber lainnya, pengguna Internet di Indonesia mencapai 71,19 juta orang (Juni 2015). Di tingkat Asia sendiri jumlah pengguna Internet mencapai 1,4 miliar orang atau yang tertinggi sedunia. Secara global, pengguna Internet dunia mencapai angka 3.079.339.857 orang atau dengan tingkat penetrasi 42,4 persen (Internetworldstats, 2015). Saat ini Kemenkominfo RI tengah menggarap Proyek Infrastruktur Palapa Ring. Proyek besar yang akan meningkatkan kecepatan koneksi Internet di Indonesia di setiap kabupaten/kota di Indonesia dengan menghubungkannya melalui jaringan kabel fiber optik baru sepanjang 13.081 km dengan nilai proyek Rp 20,9 Rp triliun yang akan berjalan selama 15 tahun ke depan (2016-2026). Proyek Palapa Ring dibagi menjadi tiga poros: Paket Barat menjangkau Riau dan Kepulauan Riau (sampai Pulau Natuna); Paket Tengah menjangkau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai Kep. Sangihe-Talaud); dan Paket Timur menjangkau NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Epilog: Peluang dan Tantangan PT Berbasis Komunikasi di Indonesia

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Badan Pusat Statistik (2016) menunjuk angka kemiskinan sebanyak 28.513.570 jiwa. Padahal tahun 2014, jumlah penduduk miskin adalah 27.727.780 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 28.553.930 orang miskin. Jumlah pengangguran terbukanya sebanyak 7.560.882 orang; di mana 905.127 pengangguran atau 12 persennya bergelar Ahlimadya dan Sarjana. Beban utang luar negeri (pemerintah dan swasta) Indonesia mencapai angka Rp 3.959,709 triliun (setara USD 304.593 juta). Angka tersebut melonjak lebih dari Rp 1.500 triliun dibandingkan jumlah utang luar negeri tahun 2010 di angka Rp 2.428.956 triliun (setara USD 202.413 juta). Padahal penerimaan negara tahun 2015 hanya sebesar Rp 1.761,642 triliun saja (Bank Indonesia, 2016).

Tentunya seluruh sivitas akademika—memiliki tantangan berat untuk memberikan kontribusi riil dalam upaya mengatasi masalah nasional di atas. Isu-isu strategis dalam bidang komunikasi dan penyiaran juga harus diketahui oleh para akademisi. PT berbasis komunikasi memiliki tanggung jawab berat dalam memajukan dunia komunikasi dan teknologi informatika di masa kini dan mendatang. Isu konglomerasi (aglomerasi) media yang mengarah pada terjadinya oligopoli media, tripologi media, duopoli media, serta monopoli media; jangan dibiarkan berkepanjangan sebab bisa mengancam masa depan demokrasi di Indonesia (Supadiyanto, 2013).

Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia kini mencapai 4.410 PTS/N di bawah payung Kemenristekdikti RI. Kampus-kampus tersebut terdiri atas: 2.373 Sekolah Tinggi, 1.098 Akademi, 564 Universitas; 132 Institut, dan 243 Politeknik. Adapun jumlah mahasiswa aktif yang dimiliki oleh ribuan PT di atas tercatat sebanyak 4.883.109 mahasiswa; di mana sebanyak 735.465 mahasiswa kuliah pada Program Studi Sosial (15,1 persen). Sedangkan jumlah dosennya sebanyak 259.968 orang (Kemenristekdikti, 2016). Artinya kompetisi antar perguruan tinggi sangat luar biasa ketatnya. Di antara terdiri dari PT Berbasis Komunikasi yang setiap tahun mampu meluluskan ribuan Ahlimadya dan Sarjana, Master, maupun Doktor. Di era konvergensi multimedia massa ini mereka memiliki tantangan yang maha berat. Ada lima peluang dan tantangan yang dimiliki oleh PT Berbasis Komunikasi:

Pertama, saat ini berbagai perusahaan media membutuhkan SDM yang memahami benar bidang komunikasi, penyiaran, periklanan, dan hubungan masyarakat. PT berbasis komunikasi harus mampu menyediakan SDM yang memiliki kompetensi terkonvergensi dalam berbagai bidang media. Ada tiga hal penting yang harus dimiliki setiap alumni PT berbasis komunikasi. Yaitu keterampilan teknis dan penunjang, pengetahuan dan regulasi, serta kesadaran (mental/watak/karakter). Para akademisi dan lulusan PT berbasis komunikasi—jangan lekas puas dalam belajar. Secara institusional, PT berbasis komunikasi harus meningkatkan kualitasnya dengan standar akreditasi yang memuaskan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal.

Kedua, di masa mendatang akan lahir era baru yang dikendalikan sepenuhnya oleh Telematikagrans. Tanda-tanda zaman itu—saat ini sudah sangat menonjol. Ketergantungan manusia pada Telematikagrans menimbulkan berbagai dampak ekonomi maupun sosial. Untuk itulah PT berbasis komunikasi harus mampu menyinergikan berbagai keilmuan komunikasi dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga mampu memberikan berbagai solusi tepat untuk menghadapi persoalan-persoalan baru di era konvergensi dan digitalisasi.

Ketiga, adanya berbagai perubahan zaman dan Telematika, menuntut adanya perubahan regulasi di bidang penyiaran, telekomunikasi, dan pers. Saat ini Komisi 1 DPR RI tengah mengubah Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam rangka untuk menyikapi migrasi penyiaran analog ke model penyiaran digital. Di DIY sendiri, DPRD DIY bersama KPID DIY dan lembaga terkait lain tengah melahirkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran di DIY. PT berbasis komunikasi harus bisa berkontribusi dalam melahirkan berbagai regulasi baru, agar regulasi tersebut menjamin adanya perlindungan publik, pencerahan publik, mencegah monopoli media maupun praktik-praktik lain yang

mengarah ke sana, serta memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. Gempuran investor asing di Indonesia harus bisa dilawan dengan penguatan pengusaha lokal dan nasional.

Memang selama ini sistem regulasi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dsb.) yang terbit sejak era reformasi semakin berorientasi "liberal". Contoh bisnis media penyiaran melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberi kesempatan asing menguasai saham perusahaan media penyiaran sampai 20 persen. Bahkan dalam praktiknya, khususnya dalam bidang industri telekomunikasi, kepemilikan saham asing sudah mencapai hampir 90 persen. Lihat saja saham PT Telekomunikasi Indonesia Seluler Tbk (Telkomsel) 37,86 persen dikuasai Singapore Telecom dan publik asing. Pemerintah dan masyarakat Indonesia cukup memiliki 62,14 persen. PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) dikuasai Telekom Malaysia Berhad dan asing sebesar 85,07 persen. Sisanya milik Telekomindo Primabhakti dan masyarakat Indonesia. Lebih prihatin lagi, pemerintah dan rakyat hanya memiliki saham 13,38 persen PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (Indosat). Sementara Singapore Technologies Telemidia Pte Ltd dan asing memegang saham 86,62 persen. Penguasaan investor asing terhadap aset-aset penting bangsa tidak hanya pada sektor media penyiaran dan telekomunikasi. Mereka juga kokoh di perbankan mencapai 100 persen. Lihat komposisi Bank Danamon (68,83 persen asing), Bank Buana (61 persen asing), Bank UOBI (100 persen asing), Bank NISP (72 persen asing), Bank OCBC (100 persen asing), CIMB Niaga (60,38 persen asing). Kemudian di Bank BII (55,85 persen asing), Bank BTPN (71,6 persen asing), Bank Panin dan Bank Permata masing-masing dikuasai asing 35 persen asing dan 44,5 persen asing. Berdasarkan data Dirjen Migas (2009), penguasaan asing juga terjadi pada dunia perminyakan. Lihat saja saham asing di Chevron (44 persen asing), Total E&P (10 persen asing), dan Conoco Phillip (8 persen asing). Sedangkan Pertamina dan mitranya yang selama ini dianggap mencerminkan perusahaan murni nasional hanya menguasai 16 persen pasar nasional. Asing juga pengendali sektor pertambangan, bisnis elektronik, perhotelan, dan jasa. Kebebasan ekonomi bisa berdampak positif demi percepatan dalam jangka pendek. Namun untuk waktu lama sesungguhnya bisa menjerumuskan dan menelikung kedaulatan nasional (Supadiyanto, 2016).

Keempat, PT berbasis komunikasi di samping menjadi "laboratorium dan pabrik" pencetak SDM andal di bidang komunikasi, juga harus memiliki sendiri "perusahaan sendiri di bidang komunikasi". Hal itu dilakukan untuk melakukan pengawinan antara dunia pendidikan dan industri. Sinergisitas antara perguruan tinggi, birokrasi, dan korporasi (segitiga besi kewirausahaan) menjadi alternatif cerdas untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kualitas SDM (Supadiyanto, 2013: 110-112 dan 2012: I-166). Jika Undang-

Undang Penyiaran yang baru (hasil perubahan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran) sudah disahkan, di Indonesia akan muncul ratusan stasiun televisi digital baru, dan di DIY khususnya akan bertambah 22 stasiun televisi digital baru (sehingga ke depan ada 39 stasiun penyiaran digital di DIY). Bukankah hal ini menjadi peluang dan kesempatan emas bagi PT berbasis komunikasi untuk berkontribusi lebih luas?

Terakhir, PT berbasis komunikasi harus menjadi motor penggerak dalam melakukan berbagai gerakan perubahan sosial termasuk dalam mengamankan estafet kepemimpinan nasional maupun lokal. Termasuk dalam mengamankan kepemimpinan dalam institusi-institusi negara yang mengatur di bidang komunikasi misalnya KPI/D, Lembaga Sensor Film (LSF), Komisi Informasi Publik, Dewan Pers, dan sebagainya. Banyaknya para pengusaha media yang terjun di bidang politik (menjadi politisi), mengakibatkan adanya penyalahgunaan media massa dan jaringannya untuk menggolkan "ambisi politik" para pemiliknya. Media memang layak dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan, namun keberadaan media massa harus bisa dimanfaatkan untuk menjamin terselenggaranya lima fungsi pers dan media penyiaran nasional secara seimbang dan proporsional (fungsi pendidikan, informasi, hiburan sehat, kontrol sosial dan kebudayaan, serta fungsi ekonomi/bisnis).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badan Pusat Statistik (BPS) 2016.

Bank Indonesia (BI) 2016.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2012.

Lim, Merlyna. (2012). *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*. USA: Media Lab Arizona State University Tempe, Arizona United States, The Ford Foundation.

McLuhan, Marshall. (1964, 2003). *Understanding Media: The Extentions of Man*. New York: Mc Graw Hill Inc.

Mosco, Vincent. (2009; 1996). *The Political Economy of Communication (Second And First Edition)*. London: SAGE Publication Ltd.

Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi. (2012). *Mapping The Lanscape of The Media Industry in Contemporary Indonesia. Report Series: Engaging Media, Empowering Societty: Assesing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizen's Rights*. Jakarta: CIPG (Centre for Innovation Policy and Governance), Hivos People Unlimeted, Fourd Foundation.

Supadiyanto. (2015). *Eksplorasi Wartawan di Era Konvergensi Multimedia Massa*. Dalam Buku Berjudul: Menegakkan Kedaulatan Komunikasi. Jakarta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI).

Jurnal dan Prosiding:

Supadiyanto. (2012). *Quovadis Online Journalism: Predicting the Future of Print Media and Online Media*. Proceeding Jogja International Conference on Communication (JICC) UPN Veteran Yogyakarta Press pada 21-22 November 2012.

_____. (2012). *Optimalisasi ICT Untuk Mencetak 4,76 Pengusaha: Taktik Jitu Menjawab Tantangan Global*. Prosiding International Seminar and National Symposium bertajuk: "Global Competitiveness Through Research Supporting Commercial Industry". Yogyakarta: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY).

_____. (2013). *Globalization, Poverty, and Inequality Information*. Prosiding of The 5th International Graduate Students Conference on Indonesia 2013. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM): Yogyakarta.

_____. (2013). *Sinergi PT-Korporasi-Birokrasi (Segitiga Besi Kewirausahaan) untuk Memberdayakan Penduduk Miskin dan Pengangguran di Indonesia*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial milik Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta Volume 12 Nomor I/2013.

_____. (2013a). *Implikasi Technological Mind Interpersonal Interconnecting (TECMIIN) Terhadap Peradaban dan Tren Komunikasi Manusia*. Jurnal Ilmu Komunikasi INTERAKSI Volume II Nomor 1-Januari 21 terbitan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Progam Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

_____. (2013b). *Implikasi Teknologi Digital dan Internet (Paperless Newspaper) pada Industri Media Cetak di Indonesia*. Prodising dalam Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII Yogyakarta.

_____. (2013c). *Konglomerasi Media*. Koran Jakarta edisi 27 Februari 2013, bisa dibaca di sini: <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/113449>

_____. (2016). *Penyajian Konten dengan Mengarusutamakan Karya Penulis Lepas pada Harian Bernas (Yogyakarta)*. Prosiding IMRAS 2016. Jakarta: Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Tesis dan Disertasi:

- Supadiyanto. (2014). *Implementasi dan Implikasi Teknologi Internet terhadap Kebijakan Redaksional Harian Jogja (Bisnis Indonesia Group) Selama Orde Reformasi*. Tesis Konsentrasi Regulasi dan Kebijakan Media Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana FISIP Universitas Diponegoro.
- Triputra, Pinckey. (2004). *Neoliberalisme dan Demokratisasi dalam Industri Penyiaran*. Disertasi pada Bidang Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia.

Makalah dan Hasil Penelitian:

- Nielsen Media Research, 2016.*
- Supadiyanto. (2014a). *Lanskap Industri Media Massa Arus Utama dan Media Online*. Makalah Diklat Jurnalisme Warga IV PPWI-Humas POLRI-Kelompok PT MAKIN di Hotel Zurich Balikpapan (Kalimantan Timur) pada Kamis, 20 Februari 2014.
- _____. (2014b). *Refleksi Kinerja KPID DIY dan Quovadis Dunia Penyiaran (dan Pers) di Era Konvergensi Multimedia Massa*. Makalah Diskusi Publik bertajuk: Refleksi Kinerja KPID DIY (2014) dan Menjaring Aspirasi Publik terhadap Masa Depan Penyiaran di DIY pada Selasa, 23 Desember 2014 di Aula Plaza Informasi Dishubkominfo DIY.

Surat Kabar:

- Kompas edisi Jumat 15 Juli 2016: *Pilkada Serentak, Daftar Potensial Pemilih Diserahkan*. halaman 2.
- Supadiyanto. (2013). *Konglomerasi Media*. Koran Jakarta edisi 27 Februari 2013.
- _____. (2013). *Membongkar Relasi Media, Politik dan Demokrasi*. Koran Jakarta edisi 18 Januari 2013.
- _____. (2013). *Relasi Media Massa dan Sistem Demokrasi*. Harian Barometer edisi 26 Februari 2013.
- _____. (2016). *KPI dan Cetak Biru Penyiaran*. Harian Bernas edisi 25 Juni 2016. Klik: <http://www.wayang.co.id/index.php/preview/id/63047>
- _____. (2016). *Masalah Baru Regulasi Penyiaran Digital (Seri 1)*. Harian Bernas edisi 13 Juli 2016. Klik: <http://www.wayang.co.id/index.php/preview/id/63610>
- _____. (2016). *Masalah Baru Regulasi Penyiaran Digital (Seri 2)*. Harian Bernas edisi 14 Juli 2016.

*Prosiding Penelitian Seminar Nasional seri 6
"Menuju Masyarakat Madani dan Lestari"*

_____. (2016). *Paket Ekonomi dan Liberalisasi*. Koran Jakarta edisi Jumat, 17 Juni 2016. klik:

<http://www.koran-jakarta.com/paket-ekonomi-dan-liberalisasi/>

_____. (2016). *Ruang Kompetisi Semakin Sempit*. Harian Bernas edisi 5 Agustus 2016.

Situs Online:

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/10/160000126/Rajai.Iklan.Indonesia.Tiga.Stasiun.TV.Milik.Hary.Tano.Raup.Rp.23.2.Triliun>

<http://forlap.dikti.go.id>

<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>

PENGUKURAN TINGKAT KEBAUAN GAS AMONIAK (NH₃) DI DESA SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, DIY

Supriyanto^{1*}, Ifta Irodatul Utami²

¹Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Islam Indonesia

*email: supri.yanto@uii.ac.id

ABSTRAK

Gas amoniak (NH₃) merupakan salah satu pencemar udara yang berbau tajam. Amoniak di atmosfer berasal dari berbagai sumber, antara lain terjadi secara alami, dekomposisi material organik, penggunaan pupuk dan emisi dari binatang jinak.. Selain baunya, amoniak dalam bentuk gas merupakan polutan yang berbahaya terutama jika terhirup ke dalam sistem pernafasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur konsentrasi amoniak pada udara ambien di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, DIY. Lokasi pengambilan sampel dibagi menjadi dua lokasi yang berbeda. Lokasi pertama yaitu di daerah pemukiman warga sebelah utara peternakan ayam dan lokasi kedua berada di daerah pemukiman warga sebelah barat peternakan ayam. Teknik pengujian sampel dilakukan dengan metode indofenol menggunakan spektrofotometer. Hasil pengukuran rata-rata konsentrasi gas amoniak di Desa Sardonoarjo yaitu 0,01 ppm sehingga dinyatakan belum memiliki potensi bahaya karena masih dibawah baku mutu yaitu 2 ppm.

Kata kunci: Amoniak, peternakan, polusi udara.

ABSTRACT

Ammonia gas (NH₃) is one of air pollutants with a strong, pungent odor. In atmosphere, ammonia occurs naturally and is produced by decomposition of organic materials, fertilizer manufacture, and livestock. Beside its strong odor, gaseous ammonia is a hazardous air pollutant particularly when inhaled. This experiment aims to know the concentration of ammonia gas in ambient air in Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, DIY. Sampling points were divided into two locations. First sampling point was located in residential area in the north of poultry farm and second sampling point was in residential area in the west of poultry farm. Measurements of atmospheric ammonia (NH₃) were conducted using spectrophotometric indophenol method. The average concentration result of ammonia gas in Sardonoarjo is 0,01 ppm and it is not potentially dangerous because the concentration is below the safe limit, 2 ppm.

Keywords: Ammonia, Livestock, air pollution.

PENDAHULUAN

Udara merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia yang harus dilindungi untuk kelangsungan hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya pembangunan, kualitas udara mengalami perubahan. Oleh karena itu jika pembangunan di berbagai bidang tidak diiringi dengan upaya pengelolaan lingkungan yang baik, maka dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara baik secara langsung maupun tidak langsung (Wardhana, 2004).

Menurut penilaian *World Health Organization* (2005) polusi udara menimbulkan penyakit yang terkait respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular, terganggunya aktivitas harian akibat sakit, gejala batuk, sesak, dan infeksi saluran pernapasa, hingga terjadinya perubahan fisiologis seperti fungsi paru dan tekanan darah. Polusi udara diperkirakan memberi kontribusi

bagi 2 juta kematian di seluruh dunia tiap tahun. Lebih dari setengah kematian tersebut terjadi di negara berkembang.

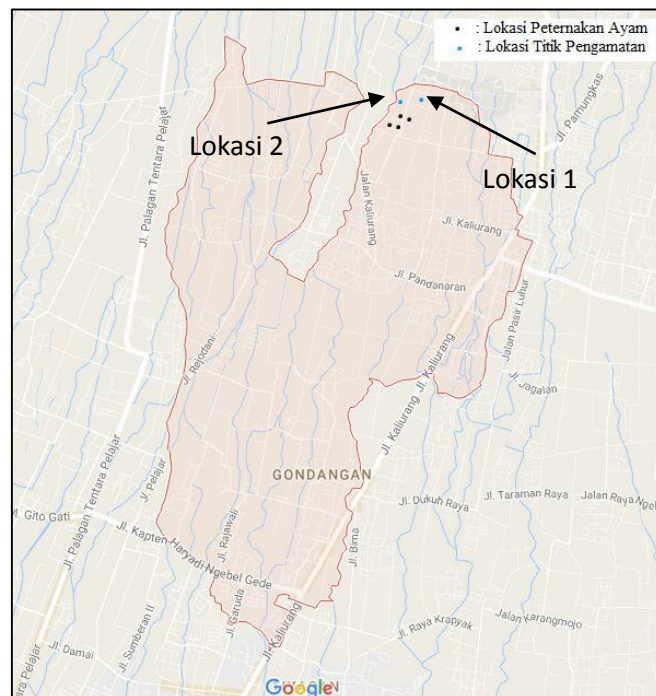
Salah satu sumber polusi udara ada pada sektor peternakan. Peternakan menyumbang gas rumah kaca sebanyak 18% dari keseluruhan kegiatan manusia (Court dan Lane, 2007). Gas berbahaya yang sering ditemukan dalam kandang antara lain NH_3 , H_2S , CO_2 , dan CH_4 . Pada konsentrasi tertentu, gas-gas tersebut dapat menyebabkan kematian (North dan Bell, 1990). Penumpukan gas-gas ini akan menyebabkan sinar infra merah yang dipancarkan kembali ke bumi semakin besar sehingga dapat meningkatkan suhu bumi (Cicerone, 1987).

Udara yang tercemar gas amoniak dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Pada kadar 1000-1500 ppm dapat menyebabkan dyspnea, nyeri dada, kejang pada saluran pernapasan dan tertundanya edema paru yang berakibat fatal (SIKERNAS, 2012).

METODE PENELITIAN

Penentuan Lokasi Sampling

Pengambilan sampel akan dilakukan secara kontinyu setiap 2 kali seminggu, yaitu setiap hari selasa dan kamis selama bulan Oktober 2016. Lokasi pengambilan sampel dibagi menjadi dua lokasi yang berbeda di desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, DIY.



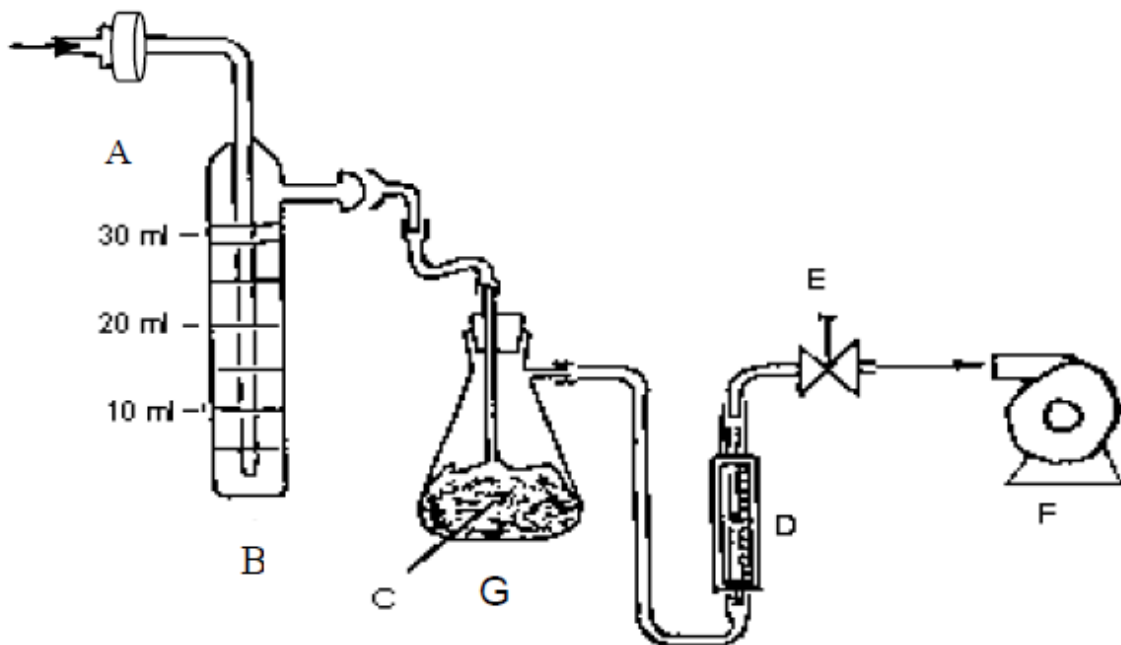
Gambar 1. Lokasi Pengambilan Contoh Uji

Lokasi pertama yaitu di daerah pemukiman warga sebelah utara peternakan ayam dan lokasi kedua berada di daerah pemukiman warga sebelah barat peternakan ayam. Lokasi pengambilan sampel mengacu pada SNI 19-7119.6-2005 tentang penentuan lokasi

pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambient. Gambar 1 menunjukkan lokasi pengambilan contoh uji amoniak dimana koordinat lokasi pertama ($7^{\circ}41'24.2''$ S $110^{\circ}24'27.8''$ E) dan koordinat lokasi kedua ($7^{\circ}41'16.0''$ S $110^{\circ}24'11.2''$ E).

Tahapan Pelaksanaan Sampling dan Pengujian

Pengambilan sampel gas amoniak (NH_3) di udara ambien menggunakan alat impinger dengan larutan penjerap asam sulfat. Teknik pengujian sampel mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7119.1-2005 tentang uji kadar amoniak (NH_3) dengan metode indofenol menggunakan spektrofotometer. Rangkaian peralatan pengambil contoh uji dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Rangkaian Peralatan Pengambil Contoh Uji Amoniak

Keterangan Gambar:

- A. *Prefilter holder*
- B. Botol penjerap volume 30 mL
- C. Perangkap uap
- D. *Flow meter*
- E. Kran pengatur
- F. Pompa
- G. Serat kaca (*glass wool*)

Prinsip pengujian gas amoniak (NH_3) ini yaitu amoniak dari udara ambien yang telah dijerap oleh larutan penjerap asam sulfat, akan membentuk amonium sulfat. Kemudian

direaksikan dengan fenol dan natrium hipoklorit dalam suasana basa, akan membentuk senyawa kompleks indofenol yang berwarna biru. Intensitas warna biru yang terbentuk diukur dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nm.

Untuk mendapatkan nilai konsentrasi gas amoniak di udara ambien, pertama dilakukan perhitungan konsentrasi NH_3 dalam larutan standar menggunakan persamaan $y = 0,185x$ yang didapat dari regresi linier kurva kalibrasi larutan standar NH_3 dimana nilai y merupakan hasil uji absorbansi larutan penjerap. Kedua, dilakukan perhitungan volume contoh uji udara yang diambil dengan rumus $V = \frac{F1+F2}{2} \times t \times \frac{Pa}{Ta} \times \frac{298}{760}$, dimana $F1$ merupakan laju alir awal dan $F2$ merupakan laju alir akhir pada *flow meter* (L/menit), t merupakan durasi pengambilan sampel (menit), Pa merupakan tekanan rata – rata selama pengambilan sampel (mmHg) dan Ta temperatur rata – rata selama pengambilan sampel (K). Setelah itu, untuk mengetahui konsentrasi NH_3 di udara ambien menggunakan persamaan $C = \frac{a}{V} \times 1000$, dimana nilai a merupakan konsentrasi NH_3 dalam larutan standar (μg) dan V dalam satuan liter (L) merupakan volume contoh uji udara yang diambil dalam kondisi normal (25°C, 760 mmHg).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suhu dan Tekanan Udara

Suhu udara merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam penyebaran polutan di udara. Suhu antara dua titik lokasi pengamatan tidak jauh berbeda berkisar pada angka 25 °C sampai 32 °C.

Kecepatan dan Arah Angin

Angin akan mempengaruhi jarak dan arah penyebaran polutan di udara. Kecepatan angin di desa Sardonoarjo pada bulan Oktober berkisar antara 7,2-9,26 km/jam. Sedangkan arah angin dominan yaitu dari arah selatan menuju utara.

Konsentrasi gas Amoniak (NH_3) di Desa Sardonoarjo

Hasil pengukuran gas amoniak yang dilakukan di dua titik pengamatan setiap hari Selasa dan Kamis pada bulan Oktober disajikan pada tabel 1 untuk lokasi pertama dan tabel 2 untuk lokasi kedua.

Data yang diperoleh merupakan data dari hasil pengukuran setiap 2 kali seminggu (hari Selasa dan Kamis) selama bulan Oktober 2016. Pengukuran pada titik pengamatan 1 dilakukan pada pagi hari pukul 07.30-08.30 WIB sedangkan pengukuran pada titik pengamatan 2 dilakukan setiap pukul 08.45-09.45 WIB. Kondisi cuaca selama pengambilan data hampir selalu cerah, meskipun pada tanggal 20 Oktober 2016 cuaca mendung pada pagi hari. Selain

peternakan ayam, di sekitar titik lokasi pengamatan terdapat pula ternak warga dan perkebunan warga yang menggunakan kotoran ayam sebagai pupuk. Hasil pengukuran menunjukkan konsentrasi gas amoniak pada titik pengamatan pertama lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi gas amoniak pada titik pengamatan kedua. Gambar 3 menunjukkan perbandingan hasil pengukuran gas amoniak pada dua titik pengamatan di Desa Sardonoarjo:

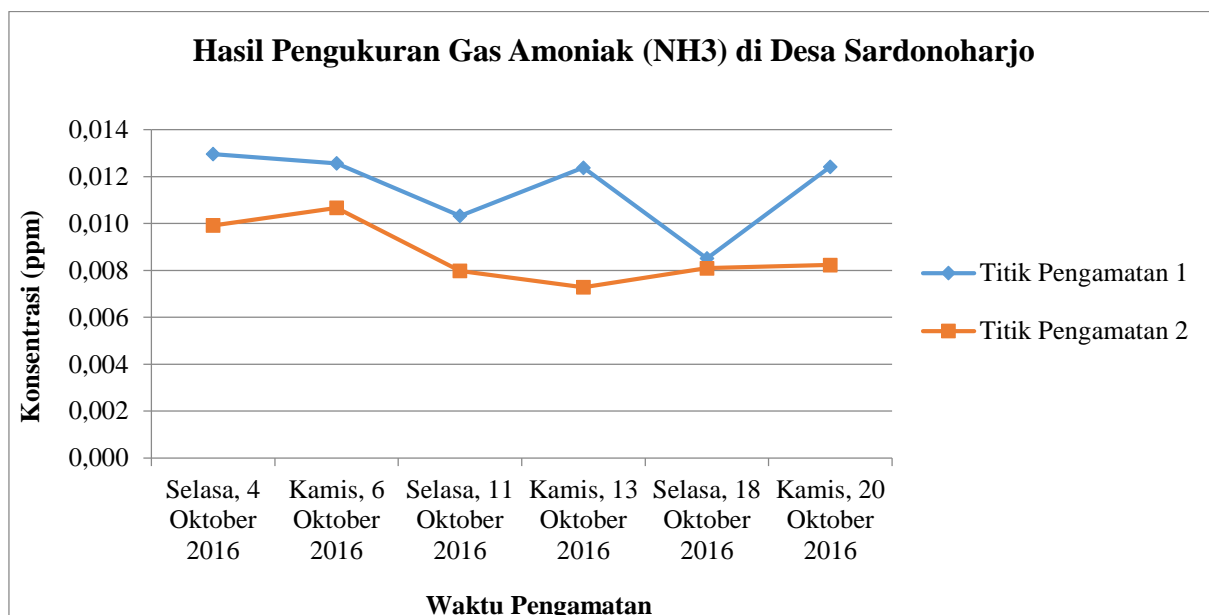
Tabel 1. Hasil Pengukuran Gas Amoniak pada Titik Pengamatan I

No.	Waktu Pengamatan	Suhu (°C)	Tekanan Udara (mmHg)	Konsentrasi Amoniak (ppm)
1	Selasa, 4 Oktober 2016	32.2	731.2	0.0130
2	Kamis, 6 Oktober 2016	25.9	731.2	0.0126
3	Selasa, 11 Oktober 2016	31.7	731.2	0.0103
4	Kamis, 13 Oktober 2016	28.1	731.2	0.0124
5	Selasa, 18 Oktober 2016	26.0	731.2	0.0085
6	Kamis, 20 Oktober 2016	25.8	731.2	0.0124

Tabel 2. Hasil Pengukuran Gas Amoniak pada Titik Pengamatan II

No.	Waktu Pengamatan	Suhu (°C)	Tekanan Udara (mmHg)	Konsentrasi Amoniak (ppm)
1	Selasa, 4 Oktober 2016	27.7	731.1	0.0099
2	Kamis, 6 Oktober 2016	30.0	731.8	0.0107
3	Selasa, 11 Oktober 2016	31.3	731.1	0.0080
4	Kamis, 13 Oktober 2016	31.1	731.2	0.0073

5	Selasa, 18 Oktober 2016	30.7	731.3	0.0081
6	Kamis, 20 Oktober 2016	25.5	731.1	0.0082



Gambar 3. Perbandingan Hasil Pengukuran Gas Amoniak (NH₃) di Titik Pengamatan 1 dan Titik Pengamatan 2

Dilihat dari hasil pengamatan, konsentrasi minimum pada kedua lokasi pengamatan menunjukkan konsentrasi gas amoniak paling rendah di Desa Sardonoarjo yaitu terjadi di titik pengamatan kedua pada hari Kamis 13 Oktober 2016 dengan konsentrasi 0,0073 ppm. Sedangkan konsentrasi gas amoniak tertinggi di Desa Sardonoarjo yaitu terjadi di titik pengamatan pertama pada hari Selasa 4 Oktober 2016 dengan konsentrasi 0,013 ppm. Rata-rata konsentrasi gas amoniak (NH₃) pada lokasi pengamatan pertama dan kedua secara berturut-turut yaitu 0,012 ppm dan 0,009 ppm. Sedangkan rata-rata keseluruhan konsentrasi gas amoniak di desa Sardonoarjo yaitu 0,0101 ppm. Konsentrasi gas amoniak pada udara ambien di Desa Sardonoarjo tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan KepMen LH No. 50 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan yaitu sebesar 2 ppm. Maka dari itu, kondisi udara ambien di Desa Sardonoarjo belum mencapai titik yang berbahaya. Tabel 4 menunjukkan konsentrasi gas amoniak (NH₃) pada udara ambien di area yang berbeda di beberapa negara.

Tabel 4. Perbandingan Konsentrasi Gas Amoniak (NH₃) pada Udara Ambien di Desa Sardonoharjo dengan Wilayah Lain, dalam ppm

Lokasi	Area	Periode	Konsentrasi	Teknik Pengukuran	Referensi
Sardonoharjo, Yogyakarta, Indonesia	Pedesaan	Oktober 2016	0.0073-0.0130	Spektrofotometri dengan Metode Indofenol	Penelitian ini
Beijing, China	Perkotaan	2008.02-2010.07	0.0228 ± 0.0163	Passive sampler	Meng et al. (2011)
	Pedesaan	2007.01-2010.07	0.0102 ± 0.0108		
Beijing, China	Perkotaan	28 Juli–3 Agustus 2001	0.0168–0.0422	Annular denuder	Yao et al. (2003)
Beijing, China	Perkotaan	Musim Panas 2002–2003	0.0239	Annular denuder	Wu et al. (2009)
Beijing, China	Perkotaan	Musim Dingin dan Musim Panas 2007	0.00029–0.0638	Annular denuder	Ianniello et al. (2010)
Beijing, China	Pedesaan	1999.09–2000.05	0.003	Passive sampler	Carmichael et al. (2003)
Xi'an, China	Perkotaan	2006.04–	0.0186	Passive sampler	Cao et al. (2009)
	Sub-urban	2007.04	0.0203		
Rome, Italy	Perkotaan	2001.05–2002.03	0.0055–0.0656	Annular denuder	Perrino et al. (2002)
New York, USA	Perkotaan	1999.07–2000.06	0.0051	Annular denuder	Bari et al. (2003)
Clinton, Carolina, USA	Perkotaan	2000.01–2000.12	0.0077	Annular denuder	Walker et al. (2004)
Kinston, Carolina, USA	Perkotaan	2000.05–2000.12	0.0035		

Morehead, Carolina, USA	Perkotaan	2000.01– 2000.12	0.0008		
Hong Kong	Perkotaan	Musim Gugur 2000	0.003	Autoanalyser	Yao et al. (2006)
Area Northern Adriatic, Kroasia	Perkotaan	1998–2005	0.0173– 0.0288	Spektrofotom etri dengan Metode Nessler	Alebic- Juretic, (2008)
	Sub-urban		0.0086– 0.0403		
Lahore, Pakistan	Perkotaan	2005.12– 2006.02	0.0303– 0.1169	Annular denuder	Biswas et al. (2008)

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang didapat maka disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata konsentrasi gas amoniak (NH_3) di Desa Sardonoarjo yaitu 0,01 ppm.
2. Konsentrasi gas amoniak (NH_3) tertinggi terjadi di titik pengamatan pertama pada hari selasa 4 Oktober 2016 dengan konsentrasi 0,013 ppm.
3. Konsentrasi gas amoniak (NH_3) terendah terjadi di titik pengamatan kedua pada hari Kamis 13 Oktober 2016 dengan konsentrasi 0,0073 ppm.
4. Konsentrasi gas Amoniak di desa Sardonoarjo tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan yaitu 2 ppm.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada DPPM UII (Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia) untuk Hibah Pengabdian Masyarakat dengan Skema Desa Mitra

DAFTAR PUSTAKA

- Alebic-Juretic, A. 2008. *Airborne ammonia and ammonium within the Northern Adriatic area, Croatia*. Environ. Pollut., 154, 439–447.
- Bari, A., Ferraro, V., Wilson, L. R., Luttinger, D., and Husain, L. 2003. *Measurements of gaseous HONO, HNO₃, SO₂, HCl, NH₃, particulate sulfate and PM_{2.5} in New York, NY*. Atmos. Environ., 37, 2825–2835.
- Biswas, K. F., Ghauri, B. M., and Husain, L. 2008. *Gaseous and Aerosol Pollutants During Fog and Clear Episodes in South Asian Urban*. Atmos. Environ., 42, 7775–7785.

- Cao, J. J., Zhang, T., Chow, J. C., Watson, J. G., Wu, F., and Li, H. 2009. *Characterization of Atmospheric Ammonia over Xi'an, China*. *Aerosol and Air Quality Research*, 9, 277–289.
- Carmichael, G. R., Ferm, M., Thongboonchoo, N., Woo, J., Chan, L. Y., Murano, K., Viet, P. H., and Mossberg, C., Bala, R., Boonjawat, J., Upatum, P., Mohan, M., Adhikary, S. P., Shrestha, A. B., Pienaar, J. J., Brunke, E. B., Chen, T., Jie, T., Guoan, D., Peng, L. C., Dhiharto, S., Harjanto, H., Jose, A. M., Kimani, W., Kirouane, A., Lacaux, J. P., Richard, S., Barturen, O., Cerda, J. C., Athayde, A., Tavares, T., Cotrina, J. S., and Bilici, E. 2003. *Measurements of sulfur dioxide, ozone and ammonia concentrations in Asia, Africa, and South America using passive samplers*. *Atmos. Environ.*, 37, 1293–1308.
- Cicerone, R. J. 1987. Changes in stratospheric ozone. *Science*. 237: 35-42.
- Court, R. & M. Lane. 2007. *Global warning: Climate change and farm animal welfare, a report by compassion in world farming*. Guarantee, Godalming.
- Ianniello, A., Spataro, F., Esposito, G., Allegrini, I., Rantica, E., Ancora, M. P., Hu, M., and Zhu, T. 2010. *Occurrence of gas phase ammonia in the area of Beijing (China)*. *Atmos. Chem. Phys.*, 10, 9487–9503, doi:10.5194/acp-10-9487-2010.
- North, M. O & D. D. Bell. 1990. *Commercial Chicken Production Manual. 4th ed. An AVI Book*. Van Nostrand Reinhold, New York.
- Perrino, C., Catrambone, M., Di Menno Di Bucchianico, A., and Allegrini, I. 2002. *Gaseous ammonia in the urban area of Rome, Italy, and its relationship with traffic emissions*. *Atmos. Environ.*, 36, 5385–5394.
- SIKERNAS. 2012. *Amoniak*. Badan POM RI.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7119.6-2005 tentang *Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien*. Jakarta : Badan Standarisasi Nasional Indonesia.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7119.1-2005 tentang *Cara Uji Kadar Amoniak (NH₃) Dengan Metoda Indofenol Menggunakan Spektrofotometer*. Jakarta : Badan Standarisasi Nasional Indonesia.
- Walker, J. T., Whittall, D., Robarge, W. P., and Paerl, H. 2004. *Ambient ammonia and ammonium aerosol across a region of variable ammonia emission density*. *Atmos. Environ.*, 38, 1235–1246.
- Wardhana, W.A. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- WHO. 2005. *WHO Air Quality Guidelines For Particulate Matter, Ozone, Nitrogen Dioxide And Sulfur Dioxide*.
- Wu, Z. J., Hu, M., Shao, K. S., and Slanina, J. 2009. *Acidic gases, NH₃ and secondary inorganic ions in PM₁₀ during summertime in Beijing, China and their relation to air mass history*. *Chemosphere*, 76, 1028–1035.
- Yao, X. H., Lau, A. P. S., Fang, M., Chan, C. K., and Hu, M. 2003. *Size distributions and formation of ionic species in atmospheric particulate pollutants in Beijing, China: I-inorganic ions*. *Atmos. Environ.*, 37, 2991–3000.
- Yao, X. H., Ling, T. Y., Fang, M., and Chan, C. K. 2006. *Comparison of Thermodynamic Predictions for in Situ pH in PM_{2.5}*. *Atmos. Environ.*, 40, 2835–2844.
- Meng, Z.Y., Lin, W.L., Jiang, X.M., Yan, P., Wang, Y., Zhang, Y.M., Jia, X.F., and Yu, X.L. 2011. *Characteristics of Atmospheric Ammonia over Beijing, China*. *Atmos. Chem. Phys.*, 11, 6139–6151

MODEL PENGEMBANGAN USAHA WIRAUSAHAWAN WANITA KELOMPOK BISNIS WOMANPRENEUR SEMARANG

Susetyo Darmanto

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang

Email: susetyodarmanto@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perkembangan wirausahawan wanita atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita di Indonesia menjadi sebuah fenomena penting untuk dicermati, karena memiliki peran yang sangat potensial terhadap kemajuan ekonomi bangsa. Womanpreneur Semarang adalah salah satu kelompok komunitas bisnis wanita yang berupaya memajukan kelompoknya dalam pengembangan bisnisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berwirausaha, berbagi pengetahuan (knowledge sharing) dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja bisnis wirausahawan wanita dalam kelompok bisnis womanpreneur Semarang. Responden penelitian adalah anggota komunitas bisnis womenpreneur Semarang sebanyak 45 orang. Analisis penelitian menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembelajaran berwirausaha, knowledge sharing dan pembelajaran organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis wirausahawan wanita dalam kelompok bisnis womanpreneur Semarang

Kata kunci : pembelajaran berwirausaha, berbagi pengetahuan, pembelajaran organisasi

ABSTRACT

The development of women entrepreneurs or entrepreneurial group of women in Indonesia become an important phenomenon to be observed, because it has a potential role to the economic progress of the nation. Womanpreneur Semarang is one of the group's business community that seeks to advance women in business development group. The purpose of this study was to determine the effect entrepreneurial learning, sharing knowledge and organizational learning on business performance of women entrepreneurs in business group of womanpreneur Semarang. Respondents are members of the business community womenpreneur Semarang as many as 45 people. Research analysis using multiple linear regression. The results showed that entrepreneurial learning, sharing knowledge and organizational had positive and significant impact on business performance of woman entrepreneur in business community of womanpreneur Semarang

Key words : entrepreneurial learning, knowledge sharing, organizational learning

PENDAHULUAN

Perkembangan wirausahawan wanita atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita di Indonesia dan juga negara-negara sedang berkembang lainnya menjadi sebuah fenomena penting untuk dicermati, karena memiliki peran yang sangat sangat potensial sebagai motor utama pendorong proses pemberdayaan wanita dan transformasi sosial, yang pada akhirnya bisa sangat berdampak positif terhadap penurunan angka pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan (Still & Timms, 2000). Akan tetapi, tingkat perkembangan kewirausahaan wanita di Indonesia dan sebagian besar negara sedang berkembang masih rendah, di pengaruhi oleh banyak faktor, yang sebagian bersifat langsung (tekanan ekonomi, sosial, budaya) dan

sebagian lainnya tidak langsung (kebijakan-kebijakan pemerintah dan lingkungan). Sebagian dari kedua faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya dalam mempengaruhi keputusan atau keinginan seorang wanita untuk menjadi pengusaha dan kemampuannya bertahan sebagai pengusaha (Firdausy, 1999)

Indeks yang juga dapat digunakan untuk menganalisis secara tidak langsung perkembangan wirausahawan wanita adalah GEI dari Social Watch (SW). Dari tabel tersebut dapat dilihat ranking negara-negara ASEAN dan nilai dari tiga dimensi dimaksud, yaitu: pendidikan, kegiatan ekonomi dan pemberdayaan. Seperti dapat dilihat, antara sekelompok ASEAN, Indonesia adalah salah satu negara anggota dengan ketidaksetaraan gender yang relatif besar, sementara itu, Filipina terlihat sebagai negara paling setara dalam hal gender.

Tabel 1.

Ranking Negara-negara ASEAN Dalam GEI

Negara	GEI	Pendidikan	Aktivitas Ekonomi	Pemberdayaan
Kambodia	62	78.1	83.5	23.2
Indonesia	55	96.8	52.8	16.0
Lao. PDR	52	80.6	59.2	16.8
Malaysia	58	98.6	46.6	29.7
Filipina	76	98.5	63.5	64.8
Singapura	63	95.0	58.6	36.5
Thailand	70	98.3	71.7	40.6
Viet Nam	74	96.5	81.3	44.0

Sumber: Social Watch (2010).

Menurut (Still & Timms, 2000) peningkatan partisipasi wanita dalam sektor bisnis adalah sebuah fenomena yang terjadi di hampir semua negara di dunia. Di Asia, 35% dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dikelola oleh wanita, 25% dari bisnis baru di China dilakukan oleh wanita, dan di Jepang 80 % Usaha kecil menengah di kelola oleh wanita (Brisco, 2000). *Womanpreneur* Semarang adalah kelompok bisnis wanita yang merupakan bagian dari kelompok bisnis Sinau Bareng yang memiliki keinginan mengembangkan bisnis anggotanya melalui cara berbagi pengetahuan dan pengalaman praktek berwirausaha. Dengan metode belajar bersama, diharapkan dapat mencapai tujuannya yaitu sukses bersama-sama. Komunitas ini semula hanya berupa kelompok diskusi beberapa orang yang seminat dalam bidang bisnis, maka demi memanfaatkan kemudahan teknologi informasi menjadi semakin berkembang dengan mengambil topik marketing, bisnis dan pengembangan diri.) . Seiring dengan antusiasme anggota dan agar kegiatan grup tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal serta untuk memudahkan anggotanya dalam berbagi (*sharing*) maupun menyerap pengetahuan, maka kemudian disusunlah tema sharing yang berbeda-beda setiap harinya. Berdasarkan fenomena yang ada dalam komunitas bisnis *womanpreneur* Semarang, diajukan model penelitian yang

didasarkan atas upaya anggota untuk dapat mengembangkan bisnis yang dimiliki dengan didasarkan atas pembelajaran berwirausaha, *knowledge sharing* dan pembelajaran organisasi. Permasalahan penelitian yang diajukan adalah : Bagaimanakah pengaruh pembelajaran berwirausaha, *sharing knowledge* dan pembelajaran berorganisasi terhadap pengembangan usaha wirausahawan wanita komunitas bisnis *womanpreneur* Semarang?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan untuk : Menganalisis pengaruh pembelajaran berwirausaha, berbagi pengetahuan (*Sharing Knowledge*) dan Pembelajaran organisasi Terhadap Pengembangan Usaha Wirausahawan Wanita Kelompok Bisnis *Womanpreneur* Semarang

Pembelajaran Berwirausaha

Menurut (Minniti & Bygrave, 2001), kewirausahaan pada dasarnya adalah suatu proses pembelajaran, sehingga agar dapat memahami kewirausahaan, kita harus terlebih dahulu memahami pembelajaran berwirausaha. Proses kewirausahaan secara konseptual diartikan sebagai sebuah proses dinamika internal dari penelitian dan pembelajaran (Cope, 2005). Pembelajaran berwirausaha yang berbasis individu, membutuhkan dukungan sumberdaya internal individu yang bersumber dari modal humani yang menggambarkan investasi seseorang berupa ketrampilan dan pengetahuan (Becker, 1964). Investasi dalam pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman akan meningkatkan kemampuan kognitif seseorang dan menumbuhkan perilaku yang efektif dan efisien (Brixy & Hessels, 2010). Menurut (Deakins, Sullivan, & Whittam, 2000) modal humanial meliputi pengetahuan, pendidikan, ketrampilan dan pengalaman, dan aspek-aspek tersebut dapat mempengaruhi pengembangan ide bisnis. Menurut (Rauch & Frese, 2000), *The human capital theory* (teori modal humanial) terkait dengan pengetahuan dan pengalaman dari wirausahawan. Pembelajaran berwirausaha meliputi : wawasan berwirausaha, gagasan bisnis, informasi kewirausahaan, keterlibatan dalam berwirausaha, mengelola kompetisi dengan mitra bisnis (Ackoff, 1989), (Novak, Hoffman, & Yung, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh (Zhang, 2012),(Leiva, Monge, & Alegre, 2014) memperlihatkan bahwa pembelajaran berwirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis

Knowledge Sharing

Secara konseptual *sharing knowledge behavior* didefinisikan sebagai tingkatan sejauh mana seseorang secara actual melakukan *sharing knowledge* ((Jang, Hong, Woo Bock, & Kim, 2002). Sedangkan menurut (Dyer & Nobeoka, 2000) *knowledge sharing* diartikan sebagai Kegiatan yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan, membantu orang bekerjasama, meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. *Knowledge sharing* juga dipahami sebagai perilaku dimana seseorang secara sukarela menyediakan berbagi pengetahuan terhadap orang lain mengenai *knowledge* dan pengalamannya ((Hansen & Avital, 2005). Selanjutnya aspek-aspek *knowledge sharing* menurut (Novak et al., 2000) adalah :

1. Memberikan pengetahuan (*knowledge donating*) adalah menyalurkan /menyebarkan pengetahuan atau modal intelektual kepada orang lain yang melibatkan komunikasi antar individu.
2. Mengumpulkan pengetahuan (*knowledge collecting*) adalah mencari /mengumpulkan pengetahuan atau modal intelektual dengan jalan berkonsultasi dengan orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *knowledge sharing* adalah suatu proses dimana para individu secara resiprokal bertukar pengetahuan melalui interaksi social, yang mendasarkan pada pengalaman dan skill yang mereka miliki untuk saling membagi dan menerima pengetahuan dalam keseluruhan organisasi untuk menciptakan pengetahuan baru (Pudjiarti, 2016). Indikator berbagi pengetahuan yang digunakan dalam penelitian ini : selalu saling berbagi pengetahuan, selalu berusaha menjaga dan meningkatkan komunikasi, kami selalu mencari dan mengumpulkan pengetahuan sebagai modal intelektual, selalu saling berbagi pengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh (Graen & Uhl-Bien, 1995), (Dulac, Coyle-Shapiro, Henderson, & Wayne, 2008); (Sari, 2012), (WAHYUNI & KISTYANTO, 2013) membuktikan bahwa berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis.

Pembelajaran Organisasional

Pembelajaran organisasi diartikan sebagai proses perbaikan tindakan melalui pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik (Fiol & Lyles, 1985). Kemudian (Garvin, 2003) mendefinisikan pembelajaran organisasi sebagai keahlian organisasi untuk menciptakan, memperoleh, menginterpretasikan, mentransfer dan membagi pengetahuan, yang bertujuan memodifikasi perilakunya untuk menggambarkan pengetahuan dan wawasan baru. (Neefe, 2001) mencoba untuk menganalisa definisi-definisi pembelajaran organisasi dan menyimpulkan beberapa elemen yang harus ada, yaitu: *The learning process, Knowledge*

acquisition orgeneration, Individual Learning, Teams Learning, Organizational knowledge. Menurut (Marquardt, 1996) untuk mewujudkan proses pembelajaran organisasi ada enam dimensi yang diperlukan yakni sistem berpikir, model mental, keahlian personal, kerjasama tim, membagi visi bersama dan dialog. Sedangkan menurut (Senge, 1990) membangun lima disiplin kunci dari pembelajaran organisasi yakni, *personal mastery, mental model, building sharedvision, team learnig, system thingking*, dan merupakan “komponen teknologis” atau dimensi yang sangat penting yang diperlukan dalam membangun pembelajaran organisasi. (Schroeder, Bates, & Junttila, 2002) mengemukakan indikator pembelajaran organisasional yaitu : training silang antar bagian, training unsistem berpikir, model mental, keahlian personal, kerjasama tim, membagi visi bersama, dan dialog.tuk melakukan tugas-tugas bersama, pelaksanaan feedback dan pelaksanaan saran. Penelitian yang dilakukan oleh (ARDI FAUZI, 2004), (Kunartinah, 2010), (Trilaksiani, 2011) memperlihatkan bahwa Pembelajaran berorganisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja bisnis.

Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan pengembangan model penelitian yang dilakukan, Hypothesis diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengalaman berwirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja bisnis
2. *Knowledge Sharing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja bisnis
3. Pembelajaran keorganisasian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah wirausahawan wanita yang tergabung dalam komunitas bisnis womanpreneur di Kota Semarang, sebanyak 40 orang.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu pada skala interval yang diberi rentang variasi pilihan, dari pilihan yang sangat tidak setuju (STS) sampai dengan jawaban sangat setuju (SS) sebanyak lima kemungkinan. Sebelum menjawab pertanyaan, responden lebih dahulu diberi keterangan tata cara pengisiannya.

Metode Analisis Data

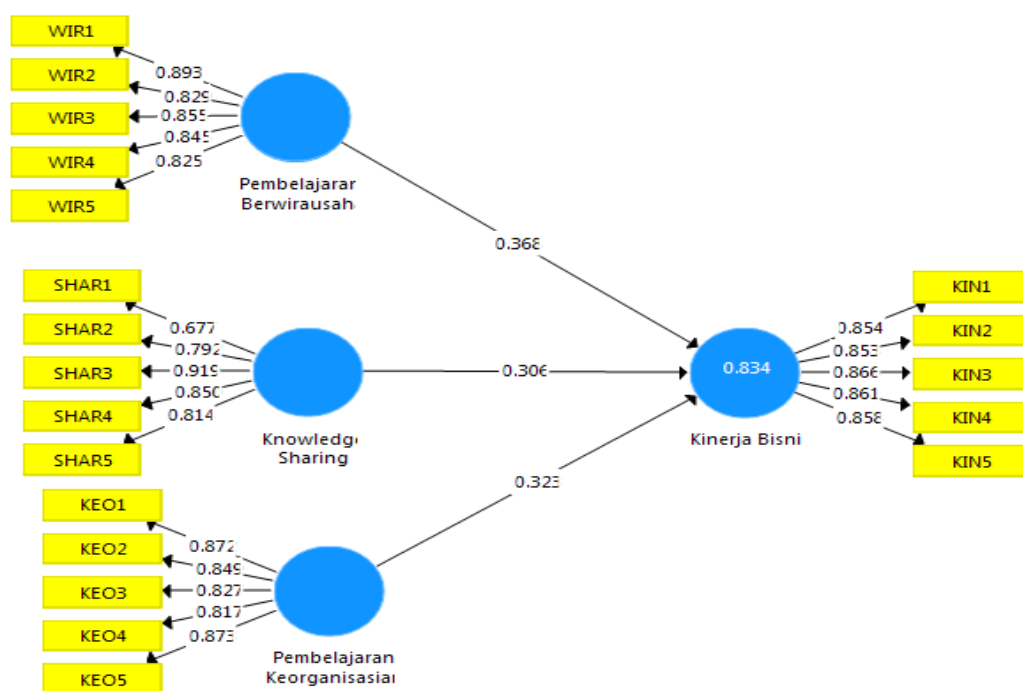
Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Adapun tujuan model *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel latent untuk tujuan prediksi (Ghozali & Latan, 2012). Untuk perhitungan data dalam penelitian ini digunakan program bantu komputer

SmartPLS versi 3.2.4. Analisis model dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik SEM PLS yang di dalamnya terdapat uji *measurement model*, yaitu validitas indikator konstruk dan reliabilitas indikator konstruk serta uji *structural model*, yaitu melihat pengaruh antara konstruk-konstruk yang diukur yang merupakan uji t dari *partial least square* itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis SEM PLS

Model struktural hasil perhitungan PLS dalam penelitian ini ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model SEM PLS Hasil Penelitian

Sumber: Data Primer, 2016.

Pengujian *Measurement (Outer Model)*

Outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Pada penelitian ini, outer model diinterpretasikan berdasarkan nilai *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*.

a. *Convergent Validity*

Prosedur pengujian *convergent validity* adalah dengan mengkorelasikan skor item (*component score*) dengan *construct score* yang kemudian menghasilkan nilai *factor loading*. Nilai *factor loading* hasil perhitungan adalah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji *Convergent Validity*

	Kinerja Bisnis	Knowledge Sharing	Pembelajaran Berwirausaha	Pembelajaran Keorganisasian
WIR1			0.893	
WIR2			0.829	
WIR3			0.855	
WIR4			0.845	
WIR5			0.825	
SHAR1		0.677		
SHAR2		0.792		
SHAR3		0.919		
SHAR4		0.850		
SHAR5		0.814		
KEO1				0.872
KEO2				0.849
KEO3				0.827
KEO4				0.817
KEO5				0.873
KIN1	0.854			
KIN2	0.853			
KIN3	0.866			
KIN4	0.861			
KIN5	0.858			

Sumber: Data Primer, 2016.

Berdasarkan hasil nilai *outer loading* awal pada Tabel 1, semua indikator berada pada angka 0,5 atau lebih. Karena nilai untuk semua indikator telah berada pada angka 0,5 atau lebih maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator telah memenuhi syarat *convergent validity* sehingga tidak ada yang gugur.

b. Discriminant Validity

Untuk pengujian *discriminant validity* dilakukan dengan cara melihat nilai akar AVE dibandingkan dengan korelasi antar konstruk / variabel, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 4.2. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)	Akar AVE
Kinerja Bisnis	0.737	0.858
Knowledge Sharing	0.663	0.814
Pembelajaran Berwirausaha	0.723	0.850
Pembelajaran Keorganisasian	0.719	0.848

Sumber: Data Primer, 2016.

Tabel 3. *Correlations Of The Latent Variables*

	Kinerja Bisnis	Knowledge Sharing	Pembelajaran Berwirausaha
Kinerja Bisnis			
Knowledge Sharing	0.838		
Pembelajaran Berwirausaha	0.826	0.722	
Pembelajaran Keorganisasian	0.846	0.827	0.735

Sumber: Data Primer, 2016.

Nilai akar AVE konstruk kinerja bisnis sebesar 0,858, lebih tinggi dibandingkan korelasi antara kinerja bisnis terhadap variabel yang lain. Demikian halnya untuk variabel yang lain juga memiliki nilai akar AVE yang lebih tinggi dibandingkan korelasi variabel tersebut dengan variabel lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan tiap indikator telah memenuhi syarat *discriminant validity*.

c. *Composite Reliability*

Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *Composite Reliability* dengan hasil perhitungan seperti dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai *Composite Reliability*

	Composite Reliability
Kinerja Bisnis	0.933
Knowledge Sharing	0.907
Pembelajaran Berwirausaha	0.929
Pembelajaran Keorganisasian	0.927

Sumber: Data Primer, 2016.

Dari Tabel 4 di atas diketahui semua variabel dalam penelitian masuk kriteria baik, karena nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,7. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa

masing-masing variabel memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis tahap kedua dalam SEM PLS penelitian ini adalah melakukan pengujian terhadap model struktural, atau disebut analisis *inner model*. Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Hasil perhitungan *R-square* dengan program bantu SmartPLS dapat ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Perhitungan *R-Square*

	R Square	R Square Adjusted
Kinerja Bisnis	0.834	0.821

Sumber: Data Primer, 2016.

Tabel 4.5 memberikan nilai *Adj R-square* 0,821 untuk konstruk kinerja bisnis. Hal ini berarti bahwa pembelajaran berwirausaha, berbagi pengetahuan, dan pembelajaran keorganisasian mampu menjelaskan kinerja bisnis sebesar 82,1%. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil perhitungan uji hipotesis dengan program bantu SmartPLS dapat ditampilkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Hubungan Antar Variabel

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pembelajaran Berwirausaha -> Kinerja Bisnis	0.368	4.129	0.000
Knowledge Sharing -> Kinerja Bisnis	0.306	3.043	0.002
Pembelajaran Keorganisasian - > Kinerja Bisnis	0.323	2.955	0.003

Sumber: Data Primer, 2016.

Dari Tabel 4.6 diketahui koefisien estimasi jalur positif, memiliki nilai t-hitung statistik lebih besar dari t-tabel 1,96, dan nilai p-value < 0,05 adalah pada semua pengaruh. Dengan demikian ketiga hipotesis penelitian yang diterima;

PEMBAHASAN

Menurut Wan (2006), pentingnya pembelajaran dalam mendorong keberhasilan berwirausaha sudah cukup dikenal luas, sebagaimana dapat dilihat dari peningkatan penelitian yang mengangkat tentang masalah pembelajaran berwirausaha pada tahun-tahun terakhir

ini. Menurut Rae dan Carswell (2000), kemampuan untuk belajar adalah esensial dalam membangun kemampuan berwirausaha. Melalui keberhasilan pembelajaran, ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan pengembangan usaha dapat dilakukan. Oleh karena itu, pembelajaran berwirausaha dinilai dapat memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan memulai usaha, dan pembelajaran berwirausaha berupa pendidikan, pengetahuan dan pengalaman dapat meningkatkan dorongan seseorang untuk memulai usaha (Davisson, 2006). Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Zhang, 2012), (Leiva, Monge, & Alegre, 2014) yang menyimpulkan bahwa pembelajaran berwirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis.

Menurut Teori knowledge management (Nonaka, 1991) tentang knowledge sharing, efektivitas knowledge management tergantung pada kemampuan knowledge sharing, dan peningkatan knowledge sharing akan meningkatkan pada kinerja seseorang untuk melakukan tugas (Liao, Liu dan Loi, 2010). Berbagi pengetahuan dalam organisasi akan meningkatkan kinerja organisasi terutama pada peningkatan kualitas layanan dan pengembangan keahlian dan kompetensi, meningkatkan nilai bagi organisasi, dan daya saing (Matzler, et al 2008). Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Graen & Uhl-Bien, 1995), (Dulac, Coyle-Shapiro, Henderson, & Wayne, 2008); (Sari, 2012), (WAHYUNI & KISTYANTO, 2013) membuktikan bahwa berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis.

Menurut Marquardt (1996), organisasi harus meningkatkan kapasitas pembelajarannya agar dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Menurut Njuguna (2009), pembelajaran organisasional semakin banyak dianggap sebagai salah satu sumber dasar keunggulan kompetitif dalam konteks manajemen strategis, di mana melalui pembelajaran organisasional, perusahaan dapat mengembangkan sumberdaya pengetahuan dan kemampuan (modal manusia serta modal organisasi) yang menciptakan nilai yang pada gilirannya menghasilkan kinerja yang unggul. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (ARDI FAUZI, 2004), (Kunartinah, 2010), (Trilaksiani, 2011) memperlihatkan bahwa Pembelajaran berorganisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja bisnis.

KESIMPULAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembelajaran berwirausaha, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) dan pembelajaran keorganisasian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis. Secara teoritis, temuan ini memberikan dukungan terhadap

Teori *Human Capital*, Teori *Knowledge Management*, dan Teori *Resource Based View* dan Teori Kewirausahaan. Secara implementatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pengembangan usaha pada kelompok-kelompok bisnis dan kewirausahaan, terutama wirausahawan wanita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada :

1. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kemenristek Dikti
2. Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah
3. Dekan FEB UNTAG Semarang
4. Responden Penelitian dari Womanpreneur Semarang dan Sinau Bareng

DAFTAR PUSTAKA

- Ackoff, R. L. (1989). From data to wisdom. *Journal of applied systems analysis*, 16(1), 3-9.
- ARDI FAUZI, H. (2004). *ANALISIS PENGARUH SIKAP KEWIRAUSAHAAN, ORIENTASI PASAR DAN PEMBELAJARAN ORGANISASIONAL TERHADAP KINERJA BISNIS (STUDI EMPIRIS PADA INDUSTRI GARMEN DI KOTA SEMARANG)*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Becker, G. S. (1964). Human capital theory. *Columbia, New York*.
- Brisco, R. (2000). *Turning Analog Women into a Digital Work Force: Plugging Women into the Asia-Pacific Economy*. Paper presented at the World Economic Forum, Asia Pacific Economic Summit.
- Brixy, U., & Hessels, J. (2010). Human capital and start-up success of nascent entrepreneurs. *EIM Research Reports H*, 201013.
- Cope, J. (2005). Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship theory and practice*, 29(4), 373-397.
- Deakins, D., Sullivan, R., & Whittam, G. (2000). Developing business start-up support programmes: evidence from Scotland. *Local Economy*, 15(2), 159-167.
- Dulac, T., Coyle-Shapiro, J. A., Henderson, D. J., & Wayne, S. J. (2008). Not all responses to breach are the same: The interconnection of social exchange and psychological contract processes in organizations. *Academy of Management Journal*, 51(6), 1079-1098.
- Dyer, J. H., & Nobeoka, K. (2000). Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: the Toyota case. *Strategic management journal*, 21(3), 345-367.

- Fiol, C. M., & Lyles, M. A. (1985). Organizational learning. *Academy of management review*, 10(4), 803-813.
- Firdausy, C. M. (1999). Women Entrepreneurs in SMEs in Indonesia. *dalam APEC, "Women Entrepreneurs in SMEs in the APEC Region"*, APEC Project on SME, 2, 98.
- Garvin, D. A. (2003). *Learning in action: A guide to putting the learning organization to work*: Harvard Business Review Press.
- Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. *Leadership Quarterly*, 6(2), 219-247.
- Hansen, S., & Avital, M. (2005). Share and share alike: The social and technological influences on knowledge sharing behavior. *Sprouts: Working Papers on Information Environments, Systems and Organizations*, 5(1), 1-19.
- Jang, S., Hong, K., Woo Bock, G., & Kim, I. (2002). Knowledge management and process innovation: the knowledge transformation path in Samsung SDI. *Journal of knowledge management*, 6(5), 479-485.
- Kunartinah, F. S. (2010). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Pembelajaran Organisasi Terhadap Kinerja Dengan Kompetensi Sebagai Mediasi. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 17(1).
- Leiva, J. C., Monge, R., & Alegre, J. (2014). The Influence of Entrepreneurial Learning in New Firms' Performance: A Study in Costa Rica. *Innovar*, 24(SPE), 129-140.
- Marquardt, M. J. (1996). *Building the learning organization*: McGraw-Hill Companies New York, NY.
- Minniti, M., & Bygrave, W. (2001). A dynamic model of entrepreneurial learning. *Entrepreneurship: Theory and practice*, 25(3), 5-5.
- Neefe, D. O. (2001). Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and non-traditional (Academic quality improvement project) accreditation processes. *University of Wisconsin stout Menomonie*, 5.
- Novak, T. P., Hoffman, D. L., & Yung, Y.-F. (2000). Measuring the customer experience in online environments: A structural modeling approach. *Marketing science*, 19(1), 22-42.
- Pudjiarti, E. S. (2016). Profesional Altruistik Dan Kualitas Pengembangan Diri Untuk Meningkatkan Budaya Berbagi Pengetahuan Perguruan Tinggi Swasta. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 30(1).

- Rauch, A., & Frese, M. (2000). Psychological approaches to entrepreneurial success: A general model and an overview of findings. *International review of industrial and organizational psychology*, 15, 101-142.
- Sari, S. F. Pengaruh Knowledge Sharing Enabler Terhadap Kinerja Karyawan.
- Schroeder, R. G., Bates, K. A., & Junttila, M. A. (2002). A resource-based view of manufacturing strategy and the relationship to manufacturing performance. *Strategic management journal*, 23(2), 105-117.
- Senge, P. (1990). *The fifth discipline: The art and science of the learning organization*. New York: Currency Doubleday.
- Still, L. V., & Timms, W. (2000). Women's business: the flexible alternative workstyle for women. *Women in Management Review*, 15(5/6), 272-283.
- Trilaksiani, T. (2011). Pengaruh Pembelajaran Organisasi, Lingkungan Eksternal, Sumberdaya Strategis, Rencana Strategis Terhadap Kinerja Perusahaan.(Penelitian di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se Wilayah Kerja Bank Indonesia Malang).(Disertasi). *DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM*.
- WAHYUNI, R. R. T., & KISTYANTO, A. (2013). PENGARUH BERBAGI PENGETAHUAN TERHADAP KINERJADEPARTEMEN MELALUI INOVASI JASA/PELAYANAN. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 1(4).
- Zhang, X. (2012). The Impact of Entrepreneurial Learning on Entrepreneurial Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Competencies *Advances in Electrical Engineering and Automation* (pp. 229-234): Springer.

**PENERAPAN ISO 9001:2008 PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM MENCIPTAKAN
PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE**

Syahrizal BMS
STIM Amkop Palembang
syahrizalbms@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sekretariat Daerah merupakan unsur pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sejak awal tahun 2015 telah melakukan setup sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001: 2008. Dan pada akhir tahun 2015 telah mendapatkan pengakuan dari badan akreditasi internasional dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008

Untuk menganalisis data digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Hasil penelitian adalah 1). Tertatanya kondisi arsip yang lebih baik, ditata, tersimpan dan teridentifikasi dengan baik sehingga jika suatu saat arsip diperlukan arsip tersebut ada atau ditemukan dalam waktu yang relatif cepat. 2). Dengan adanya standar operasional prosedur ini menyebabkan aparatur pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan menjadi lebih terarah dan lebih mudah sebab mempunyai bahan referensi untuk di jadikan bahan pertimbangan, Standar operasional prosedur ini merupakan langkah-langkah pekerjaan yang dirangkum atau dibuat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sehingga memudahkan aparatur pemerintahan dalam menimplementasikannya

Kata kunci : ISO 9001:2008, Good Governance

ABSTRACT

Regional Secretariat is an element of regional government has the duty and obligation to help the Regent in formulating policies and coordinating the local agencies and the local technical institute Government Ogan Ogan Ilir. Since the beginning of 2015 has setup a quality management system standard ISO 9001: 2008. And at the end of 2015 has received recognition from the international accreditation agency by obtaining the certificate is ISO 9001: 2008

To analyze the data used triangulation techniques. Triangulation is a technique that utilizes data validity checking something else in comparing the results of interviews of the research object.

Results of the study is 1). Well-organized archive of better conditions, laid out, stored and identified properly so that whenever a necessary archive files were missing or found in a relatively quick time. 2). With the standard operating procedures have led to government officials in resolving a problem becomes more focused and easier because it has the reference material to be made in consideration, Standard operating procedure is a step-by-step work that summarized or made under applicable legislation making it easier for officials government in implementing

Keywords: ISO 9001:2008, Good Governance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sekretariat Daerah merupakan unsur pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah

dan lembaga teknis daerah Pemerintahan Kabupaten. Dalam era reformasi terutama pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo aparat pemerintah dituntut dapat bekerja dengan baik dan bersih dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga harus di ciptakan sistem kerja yang baik yang mengarah pada pengelolaan yang *good governance*.

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten sehingga harus dapat bekerja efektif dan efisien serta harus terbebas atau mengurangi dari unsur-unsur yang merugikan seperti kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk dapat menyelenggarakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten maka Sekretariat Daerah telah berusaha untuk menciptakan suatu sistem manajemen mutu dalam mengelola pekerjaan sehari-harinya. Untuk itu sejak awal tahun 2015 telah melakukan setup sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001: 2008. Dan pada akhir tahun 2015 telah mendapatkan pengakuan dari badan akreditasi internasional dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008.

Pengakuan badan sertifikasi internasional terhadap penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 kepada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bukan sebagai akhir dari pelaksanaannya tetapi merupakan awal dari suatu tantangan untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance*.

Dalam penerapannya Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan sehingga didapat suatu sistem yang benar-benar dapat menjamin pemerintahan yang *good governance*. Dengan perbaikan-perbaikan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi Bupati dan masyarakat serta memberikan contoh bagi SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menerapkan pengelolaan pemerintahan yang *good governance*.

Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil tema penelitian “Penerapan ISO 9001:2008 pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menciptakan pemerintahan yang *good governance*”

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang diangkat adalah bagaimana Penerapan ISO 9001:2008 pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menciptakan pemerintahan yang *good governance*.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan ISO 9001:2008 pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menciptakan pemerintahan yang *good governance*.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian *kualitatif deskriptif*. Menurut Maman (2002) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penelitian ini dengan observasi dan wawancara.

Key Informan

Adapun key informan pada penelitian ini adalah Ka. Bidang Organisasi, manajemen representatif dan Staf Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Teknik Analisis

Untuk menganalisis data digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004)

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank dunia juga

mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat (Effendi: 2009). Jika dilihat dari definisi di atas maka perlu adanya suatu tata kearsipan dan dokumentasi untuk mendukung terlaksananya pengelolaan pemerintahan yang *good governance*. Tata kearsipan dan dokumentasi yang baik merupakan salah satu persyaratan terciptanya sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001:2008. Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System-QMS*) menurut Gaspersz (2008:268) yaitu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pelanggan dan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian didapat hasil bahwa arsip-arsip yang ada sudah mulai tertata dan tersimpan dengan baik, secara rinci perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan tentang masalah arsip adalah :

1. Arsip sebagian telah ditata dan disimpan dengan baik.
2. Arsip penyimpanannya telah diidentifikasi pada masing-masing bagaian.
3. Penanggung jawab pemegang arsip telah ditentukan.

Secara umum contoh kondisi di atas dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :



Gambar 1. Perbaikan sistem kearsipan

Pada gambar menunjukkan perbaikan pada sistem kearsipan terutama dalam tata penyimpanan dan identifikasi arsip selain penanggung jawab arsip pada masing-masing bagian. Dengan perbaikan sistem kearsipan ini diharapkan tingkat kehilangan arsip menjadi rendah, mudah dicari dan mengurangi kemungkinan rusak.

Selain sistem kearsipan yang diperbaiki hal lain yang sangat penting adalah pembuatan prosedur. Prosedur yang telah dibuat sebagai berikut :

1. Penetapan dan penegasan batas desa
2. Pengajuan produk hukum daerah
3. Penyelesaian sengketa lahan
4. Monitoring dan evaluasi pembebasan lahan
5. Pengawasan penyaluran raskin
6. Pengawasan penyaluran gas LPG 3 Kg
7. Pembuatan laporan kemajuan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
8. Penerbitan nota pencairan dana
9. Kepegawaian
10. Peminjaman aset Setda oleh SKPD atau masyarakat
11. Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
12. Penyaluran dana hibah
13. Penentuan tim pemandu haji daerah dan tim kesehatan haji
14. Pelayanan permohonan informasi pelayanan publik
15. Penyusunan laporan kehumasan
16. Distribusi barang pakai habis
17. Perencanaan kebutuhan barang unit

PEMBAHASAN

Pengelolaan arsip bertujuan untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat D tentang Kearsipan.

Berdasarkan Klausul 4.2.4 ISO 9001:2008 menyatakan bahwa Rekaman (arsip) yang ditetapkan untuk memberi bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan keefektifan operasi sistem manajemen mutu harus di kendalikan. Organisasi harus menetapkan prosedur tendokumentasi untuk menentukan pengendalian yang dibutuhkan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan kembali, masa simpan dan pemusnahan rekaman. Rekaman (arsip) harus tetap bisa dibaca, mudah dikenali dan diambil. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 pasal 3 ayat b-d dinyatakan bahwa tata kearsipan bertujuan untuk :

- menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan;
- menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;

Dari kondisi ini menunjukkan bahwa tata kearsipan yang mulai diperbaiki akan memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Dimana adanya perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat mulai terjamin perlindungannya. Selain itu jika ada pemeriksaan oleh instansi terkait arsip yang diperlukan akan mudah ditemukan saat diminta atau penemuan arsip tersebut membutuhkan waktu yang relatif cepat.

Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam sistem manajemen pemerintahan merupakan tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Sehingga penataan tata laksana instansi pemerintah menjadi faktor penting untuk diperbaiki.

Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan menyatakan bahwa manfaat standar operasional prosedur adalah :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah sebagian besar pekerjaan yang ada pada bagian-bagian telah mempunyai standar operasional prosedur. Sejak diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 dalam pelaksanaan pekerjaan, para pegawai tidak hanya mengandalkan peraturan perundangan yang berlaku juga mengikuti tetapi juga mengikut prosedur-prosedur yang dibuat. Hal ini terjadi disebabkan karena prosedur yang telah dibuat merupakan rincian dari peraturan perundangan yang berlaku yang telah dimodifikasi menjadi suatu petunjuk kerja yang mudah dipahami. Dengan adanya standar operasional prosedur ini menyebabkan aparatur pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan menjadi lebih terarah dan lebih mudah sebab mempunyai bahan referensi untuk di jadikan bahan pertimbangan, Standar operasional prosedur ini merupakan langkah-langkah pekerjaan yang dirangkum atau dibuat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sehingga memudahkan aparatur pemerintahan dalam menimplementasikannya.

KESIMPULAN

Bersarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi sistem manajemen mutu di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah mulai berjalan dengan baik hasil ini dapat terlihat dari :

1. Tertatanya kondisi arsip yang lebih baik, ditata, tersimpan dan teridentifikasi dengan baik sehingga jika suatu saat arsip diperlukan arsip tersebut ada atau ditemukan dalam waktu yang relatif cepat.
2. Dengan adanya standar operasional prosedur ini menyebabkan aparatur pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan menjadi lebih terarah dan lebih mudah sebab mempunyai bahan referensi untuk di jadikan bahan pertimbangan, Standar operasional prosedur ini merupakan langkah-langkah pekerjaan yang dirangkum atau dibuat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sehingga memudahkan aparatur pemerintahan dalam menimplementasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Muh. Arief. 2009. The Power Of Corporate Governance: Teori dan. Implementasi.*
Jakarta: Salemba Empat
- Gaspersz, Vincent. 2005. Total Quality Management.* Jakarta: PT. Gramedia
- Moloeng, L J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung. Rosda Karya
- Nasution. 2003. Metode Research,* Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan

MODEL PERANCANGAN RUANG KREATIF SEBAGAI PUSAT SENI DAN BUDAYA

(Studi Kasus Kampung Nitiprayan dengan Pendekatan Place Making)

Tidi Ayu Lestari, ¹Fajriyanto ²

Jurusan Arsitektur FTSP UII

²Jurusan Arsitektur FTSP UII

ABSTRAK

Nitiprayan adalah kawasan Sub-urban di Yogyakarta yang memiliki karakter dan identitas yang kuat sebagai kampung seni. Banyak kegiatan seni dan budaya yang sering diadakan di Kampung Nitiprayan karena mayoritas masyarakat Nitiprayan adalah Seniman. Sistem Kampung kreatif dirasa sangat memungkinkan diterapkan di Nitiprayan untuk mempertahankan lokalitas dan nilai-nilai budaya Nitiprayan dalam menghadapi implikasi negatif dari wilayah perkotaan. Salah satu tahapan dalam pembentukan kampung kreatif adalah penyediaan ruang basis aktivitas kreatif, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Pusat Seni dan Budaya Nitiprayan. Tujuan penulisan ini adalah membuat model perancangan pusat seni dan budaya yang dapat menampung kreativitas masyarakat di Nitiprayan dengan pendekatan creative placemaking. Metode pendekatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi problematika kampung Nitiprayan, menentukan indikator perancangan berdasarkan prinsip-prinsip creative placemaking. Adapun fokus penekanannya adalah physical form (lingkungan fisik) yang memenuhi kualitas pengalaman lokal Nitiprayan.

Model perancangan dilakukan melalui beberapa indikator creative placemaking Nitiprayan berdasarkan analisis yaitu: (1) bentuk arsitektur lokal Nitiprayan (2) bentuk yang memungkinkan interaksi langsung dan beragam berdasarkan kegiatan kesenian Nitiprayan (3) Komposisi ruang yang memberikan pengalaman kesenian Nitiprayan (4) Komposisi ruang yang memungkinkan interaksi beragam berdasarkan kesenian yang ada di Nitiprayan. Hasil dari penerapan indikator creative placemaking Nitiprayan adalah model rancangan Pusat Seni dan Budaya Nitiprayan yang mencitrakan lokalitas Nitiprayan dengan fungsi sebagai wadah kegiatan seni lukis, seni pertunjukan seni instalasi, dan sebagai tempat pembentukan ide-ide kreatif.

Kata kunci : Kampung kreatif, Creative Placemaking, lingkungan fisik, kualitas pengalaman lokal Nitiprayan.

ABSTRACT

Nitiprayan is a sub-urban area that has a strong character and identity as an art village. Many art and cultural events are often held at Kampung Nitiprayan because the majority of Nitiprayan people is an artist. Kampung kreatif system suitable to be applied in Nitiprayan to preserve Nitiprayan locality and cultural values in facing the negative implication of urban areas. To create Kampung Kreatif required creative activity space which is manifested in the form of Nitiprayan art and cultural center. Nitiprayan Art and Cultural Center designed with creative placemaking approach. Creative placemaking principle which became the focus of design is the physical form comply the quality of Nitiprayan local experience to creating the sense of place. The intention of the final project is to design Nitiprayan art and cultural center which can accomodate people's creativity with creative placemaking as a design approach. The design methode is specify Nitiprayan creative placemaking indicators based on principles of general creative placemaking. Creative placemaking principle which became the design focus is physical form that conform quality of Nitiprayan local experience.

Based on analysis, there are indicators applied to design: (1) Nitiprayan local architecture form (2) form which allows direct and diverse interaction based on Nitiprayan arts activity (3) space compositition that gives Nitiprayan arts experience (4) space compositition which allows direct and diverse interaction based on Nitiprayan arts activity. The outcome of applying Nitiprayan creative placemaking indicators is Nitiprayan art and cultural center design which imaged Nitiprayan locality to function as a basis for activities of painting, performance art installation art and as a place to looking for creative ideas.

Key Word : Kampung kreatif, Creative Placemaking, Physical Form, Quality of Nitiprayan Local Experience.

PENDAHULUAN

Kota merupakan wadah bagi penduduk didalamnya untuk beraktivitas dan berinteraksi antar individu yang kemudian memunculkan ide-ide baru yang dapat memicu kreatifitas (Landry dan Bianchini (1995 dalam Utami, 2014)). Menurut Kamil (2009 dalam Safira, 2012) dalam konteks peradaban baru, yaitu peradaban berbasis ide dan kreativitas, keberadaan ruang-ruang kota yang positif sering terlupakan. Selanjutnya Safira (2012), mengatakan bahwa salah satu solusi dari masalah urban ini adalah menciptakan ruang-ruang kreatif sebagai alternatif untuk mengefektifkan penggunaan ruang publik di daerah urban. Menurut Evans et al.(2006 dalam Utami, 2014), ruang kreatif dalam kota tersebut tidak hanya terdiri dari bangunan-bangunan besar atau desain berkelas, tetapi juga termasuk didalamnya lingkungan atau gedung yang ditinggali sehari-hari. Landry (2008 dalam Utami, 2014) mengatakan bahwa ruang-ruang kreatif yang sudah disebutkan tadi, kemungkinan akan berada di daerah pinggiran kota atau di kawasan yang berubah fungsi penggunaannya.

Menurut Safira (2012), salah satu perwujudan ruang kreatif yang telah dilakukan masyarakat urban di Indonesia adalah ‘Kampung Kreatif’. Sebutan kampung kreatif bisa dikatakan fiktif, dengan kata lain kreatif yang dimaksudkan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di area kampung, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi wilayah dan upaya penyelesaian menghasilkan solusi permasalahan (Utami, 2014).

Nitiprayan merupakan daerah Sub-Urban yang berada dipinggiran Kota Yogyakarta. Nitiprayan adalah kawasan Sub-urban yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang ada. Banyak kegiatan sosial yang sangat sering diadakan di Kampung Nitiprayan, terutama kegiatan seni karena mayoritas masyarakat Nitiprayan adalah Seniman. Seni dan budaya ini memperkuat hubungan sosial antar masyarakat Nitiprayan, mempersatukan beragam perbedaan agama, status sosial dan kreatifitas seni masing-masing seniman. Hubungan sosial yang sangat erat ini akhirnya berujung pada julukan Kampung Nitiprayan sebagai Kampung Seni. Dengan adanya julukan kampung seni ini, Nitiprayan berpotensi untuk dikembangkan menjadi kampung kreatif karena kreativitas yang memang sudah ada didalam jiwa penduduknya yang rata-rata adalah seniman.

Namun, menurut Widodo dan Lupyanto (2011), Implikasi melebarnya permasalahan Kota Yogyakarta ke kampung ini dapat dilihat dalam banyak aspek seperti sifat sosial yang cenderung mengarah ke individualis, kenampakan fisik spasial yang terus padat permukiman,

permasalahan sampah dan padatnya lalu lintas. Nitiprayan yang dijuluki sebagai Kampung Seni dikhawatirkan mulai terkikis dengan adanya implikasi dari wilayah perkotaan, sehingga perlu ada langkah-langkah dengan pendekatan tertentu untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan lokalitas masyarakat Nitiprayan.

Kampung kreatif dirasa sangat memungkinkan untuk diterapkan di Nitiprayan mengingat Nitiprayan sudah memiliki karakter dan identitas yang kuat sebagai kampung seni yang sangat kuat nilai seni, budaya dan kreatifitasnya. Menurut Utami (2014), dalam proses pembentukan kampung kreatif digunakan teori *cycle of urban creativity*, yang mana dalam teori ini terdapat lima tahapan, tahap pertama adalah pembentukan ide kreatif, tahap kedua adalah realisasi ide kreatif, tahap ketiga adalah tahap penguatan sistem pendukung aktivitas kreatif yang berkelanjutan, tahap keempat adalah penyediaan ruang basis aktivitas kreatif dan tahap kelima penyebaran aktivitas kreatif pada lokasi yang diperuntukan sebagai ruang kreatif.

Pada tahap keempat penyediaan ruang basis aktivitas kreatif merupakan salah satu faktor terjadinya kampung kreatif, oleh karena itu, penyediaan ruang basis aktivitas kreatif dan pengembangan kreatifitas sangat diperlukan untuk mewujudkan kampung kreatif di Nitiprayan.

Pusat Seni dan Budaya di Nitiprayan merupakan salah satu wadah bagi aktivitas kreatif dan pengembangan kreatifitas. Pusat Seni dan Budaya di Nitiprayan dapat memperkuat karakter dan identitas Nitiprayan sebagai kampung seni, serta mendukung Nitiprayan untuk menjadi kampung kreatif. Nitiprayan yang dijuluki sebagai kampung seni, memiliki berbagai macam kesenian namun belum ada suatu wadah yang menyatukan berbagai kesenian ini, sehingga menimbulkan kesan setiap kesenian ini berdiri sendiri. Kesenian tradisional yang berada di bagian selatan kawasan dan kesenian kontemporer yang mendominasi kawasan bagian utara, belum ada suatu wadah yang meyatukan kedua jenis kesenian ini disuatu tempat yang nantinya akan memperkuat karakter kawasan menjadi kampung seni Nitiprayan.

Untuk dapat mewujudkan wadah yang dapat menampung kreativitas masyarakat Nitiprayan digunakan pendekatan *Creative Placemaking*, yaitu pendekatan yang menjadikan suatu tempat menjadi lebih bermakna dengan kegiatan-kegiatan kreatif didalamnya, namun bagaimana merancang pusat seni dan budaya yang dapat menampung kreativitas masyarakat di Nitiprayan dengan pendekatan *creative placemaking*.

Berdasarkan hal tersebut tujuan dari model perancangan ini adalah: (1) menghasilkan model rancangan pusat seni dan budaya dengan *physical form* yang memiliki kualitas pengalaman lokal Nitiprayan sehingga menciptakan citra tempat Nitiprayan, (2) menghasilkan rancangan pusat seni dan budaya yang dapat mewadahi dan mempresentasikan kreativitas masyarakat Nitiprayan, (3) menghasilkan rancangan pusat ekspresi seni dan budaya yang dapat

menjadi akar pertumbuhan Kampung Nitiprayan menjadi Kampung Kreatif. Sasarannya adalah terciptanya model perancangan ruang kreatif dengan pendekatan creative placemaking yang mewadahi kegiatan seni lukis, seni pertunjukan seni instalasi, dan sebagai tempat pembentukan ide-ide kreatif.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Beattie (1985 dalam safira, 2012) *placemaking* adalah suatu cara untuk menciptakan ruang dalam maupun ruang luar yang spesial, proses transformasi ruang (*space*) menjadi tempat (*place*). Menurut Wyckoff (2012), terdapat empat tipe *placemaking*, yaitu *Standard Placemaking*, *Strategic placemaking*, *Tactical Placemaking* dan *Creative Placemaking*, yang mana keempat tipe ini mengutamakan kualitas tempat untuk membentuk makna dari suatu tempat. Berdasarkan konteks kawasan Nitiprayan *creative placemaking* dipilih menjadi faktor penentu perancangan. *Creative placemaking* memiliki tiga variabel yaitu kualitas tempat (*quality place*), lingkungan fisik (*physical form*) dan kegiatan sosial (*social opportunity*). Ketiga variabel ini merupakan variabel penentu perancangan, yang apabila ketiganya terpenuhi maka akan tercipta *sense of place* (makna dari suatu tempat).

Dalam D.K Ching, 1998 dijelaskan bahwa lingkungan fisik (*physical form*) terdiri dari bentuk dan ruang yang memiliki tatanan membentuk suatu sistem arsitektural, sehingga lingkungan fisik akan difokuskan pada citra bentuk dan komposisi ruang. Lingkungan fisik ini harus memenuhi kualitas ruang (*quality of place*), sebagaimana dijelaskan oleh Wyckoff (2012) dalam tulisannya *definition of placemaking: four different types* menyatakan bahwa salah satu dari beberapa tolak ukur kualitas dari suatu tempat adalah Pengalaman lokal (*allow authentic experience*), kualitas pengalaman lokal didapat melalui pendekatan arsitektur kontekstual. Menurut definisi-definisi arsitektur dalam Fergus (2010), terdapat tiga kata kunci dalam arsitektur kontekstual, yaitu *Surrounding* (lingkungan sekitar), *Part of whole* (bagian dari keseluruhan), *respecting what is already there* (memperhatikan apa yang telah ada). Dari ketiga kata kunci ini didapat pengertian arsitektural kontekstual adalah arsitektural yang memperhatikan dan memadukan elemen-elemen yang ada disekitarnya (fisik maupun non-fisik) sehingga memberikan makna bagi lingkungan sekitarnya sebagai satu kesatuan ruang. Lingkungan fisik yang memenuhi kualitas pengalaman lokal ini harus dapat mewadahi potensi kawasan (*social opportunity*), yaitu kegiatan seni dan budaya masyarakat Nitiprayan. Lingkungan fisik dengan kualitas pengalaman lokal Nitiprayan mewadahi kegiatan budaya dan kesenian masyarakat sehingga menciptakan lingkungan kreatif sebagai salah satu proses pembentukan kampung kreatif, Utami (2014).

METODE

Dalam *Principles of Creative Placemaking by ArtPlace America* terdapat beberapa prinsip *creative placemaking*, dari beberapa prinsip tersebut didapat dua prinsip yang menjadi dasar perancangan, yaitu (1) mendesain tempat yang menarik dengan modal budaya lokal. Budaya lokal yang dimaksud dibatasi pada arsitektur dan kesenian lokal; (2) fungsi yang beragam, menarik dan memungkinkan interaksi langsung antar komunitas.

Kedua prinsip diatas harus dipenuhi dalam mendesain *physical form* yang berkualitas. Kualitas yang menjadi sasaran dalam perancangan adalah kualitas pengalaman lokal. Sehingga didapat tabel indikator prinsip *creative placemaking* Nitiprayan sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator *Creative Place Making* yang digunakan

Physical form	Quality Place	Indikator	Tolak ukur
Citra bentuk	Allow authentic experience (pengalaman lokal)	bentuk yang memberikan pengalaman arsitektur lokal Nitiprayan	Arsitektur kontekstual : memadukan elemen-elemen yang sudah ada disekitarnya baik fisik maupun non fisik
		Bentuk yang memungkinkan interaksi langsung dan beragam berdasar kegiatan kesenian yang ada di Nitiprayan	
Komposisi ruang		Komposisi ruang yang memberikan pengalaman kesenian yang ada Nitiprayan	
		Komposisi ruang yang mungkin interaksi beragam berdasar kegiatan kesenian yang ada di Nitiprayan	

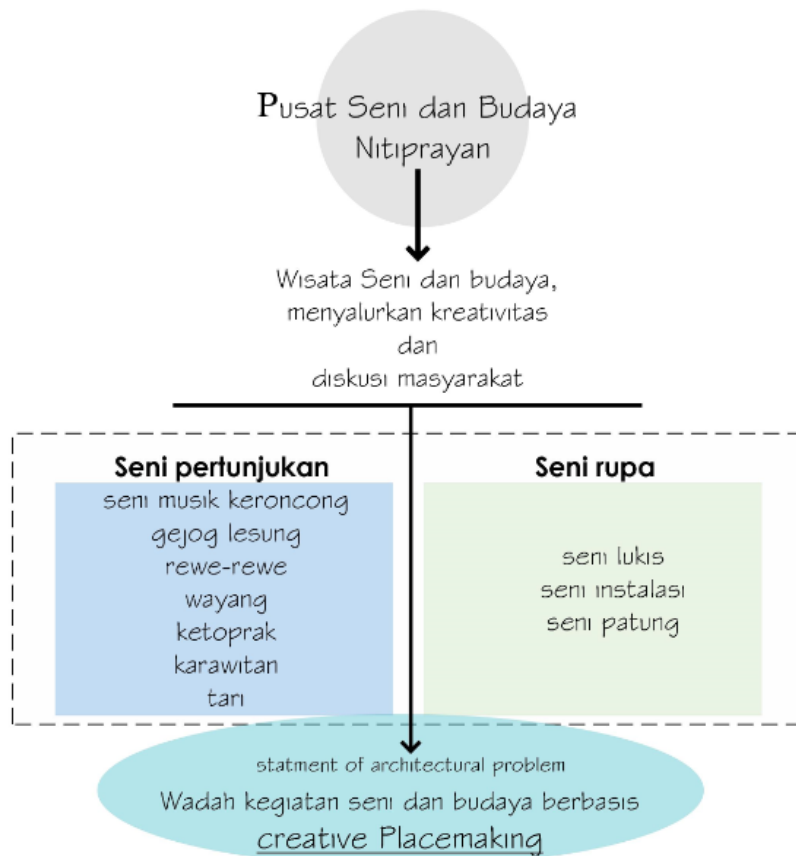
Sumber : Pemikiran penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat seni dan budaya mewadahi kreativitas seni tradisional masyarakat Nitiprayan. Seni tradisional merupakan tradisi atau budaya yang secara rutin dilakukan masyarakat Nitiprayan yang melibatkan masyarakat Nitiprayan baik yang seniman maupun bukan seniman, masyarakat luar maupun wisatawan untuk berpartisipasi baik sebagai pelaku seni maupun sebagai penonton.

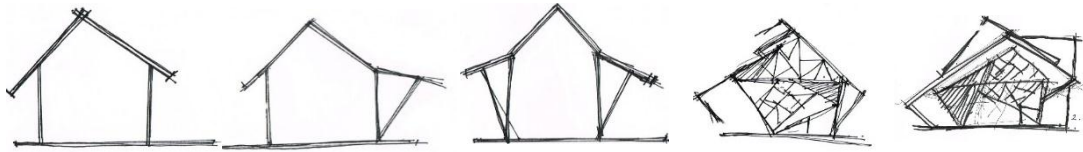
Pusat seni dan budaya juga merupakan wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi menciptakan ide-ide baru, sebagai fasilitas diskusi dan musyawarah masyarakat. Pusat Seni dan

budaya masyarakat merupakan wadah semua lapisan masyarakat Nitiprayan untuk berinteraksi antar sesama, berinteraksi dengan lingkungan, menyalurkan kreativitas, bersama-sama menginspirasi dan terinspirasi. Berikut adalah diagram kegiatan seni dan budaya yang diwadahi di pusat seni dan budaya Nitiprayan.



1. Bentuk Konteks Lokal Nitiprayan

Arsitektur lokal Nitiprayan masih menerapkan bentuk-bentuk tradisional seperti pelana, joglo dan limasan.



Gb 1. Transformasi bentuk

Arsitektur lokal Nitiprayan masih menerapkan bentuk-bentuk tradisional yang sangat jelas terlihat dari bentuk atapnya. bentuk dasar yang diambil dari analisis bentuk arsitektur tradisional Nitiprayan adalah segitiga. Berdasarkan prinsip-prinsip *creative placemaking* dengan kualitas pengalaman arsitektur lokal Nitiprayan, sehingga bentuk segitiga diambil sebagai elemen dominan pembentuk atap Pusat Seni dan Budaya Nitiprayan. Eksekusi pada desain seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

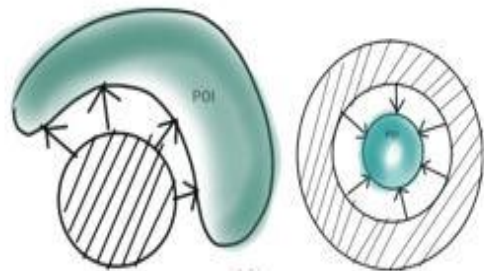


Gb2. 3D eksterior-atap transformasi

2. Bentuk yang memungkinkan interaksi langsung dan beragam berdasarkan kegiatan kesenian yang ada di Nitiprayan



Seni pertunjukan



Seni Lukis

Pola aktivitas seni menjadi dasar dalam menentukan transformasi bentuk Pusat Seni dan Budaya Nitiprayan. Pola kegiatan seni tersebut ditransformasikan di dalam site yang kemudian menjadi bentuk fisik Pusat Seni dan Budaya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

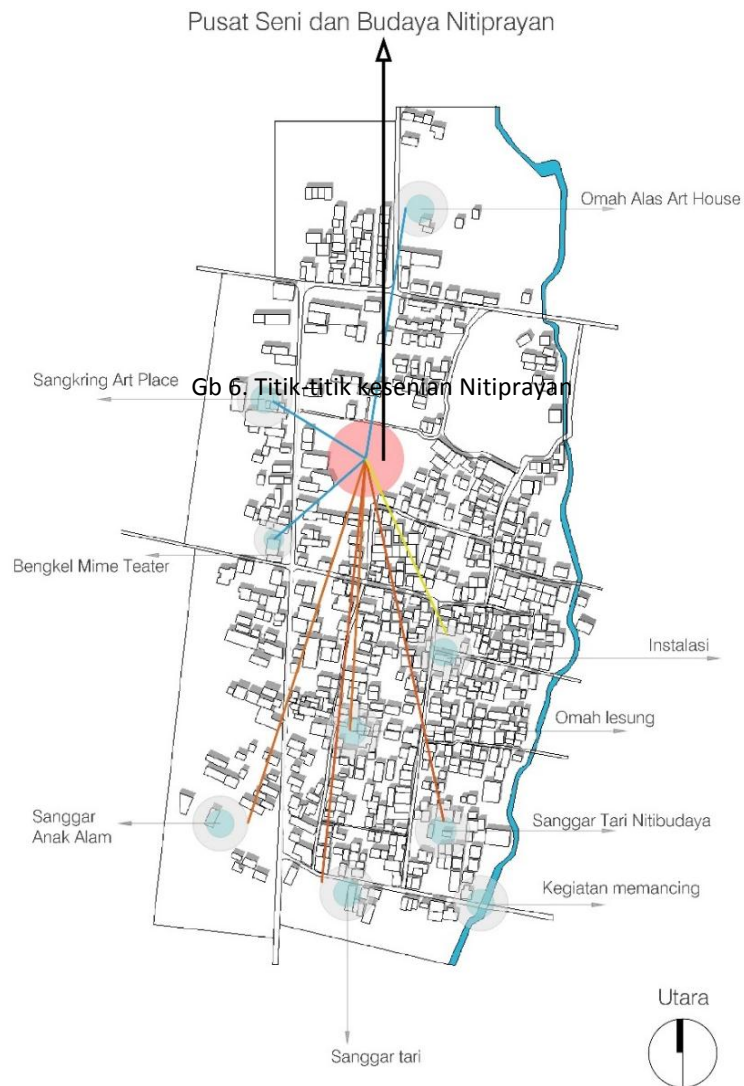


Gb 5. Point of Interest
Point of Interest



Pada gambar pola seni pertunjukan, yang menempati point of interest adalah seniman yang menampilkan pertunjukan seni, sedangkan pada pola seni lukis terdapat panah dua arah yang artinya posisi point of interest dapat ditempati oleh seniman dan penikmat seni. pada pola seni instalasi, karya dan aktivitas seniman merupakan point of interest yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari segala arah.

3. Komposisi ruang yang memberikan pengalaman kesenian yang ada di Nitiprayan

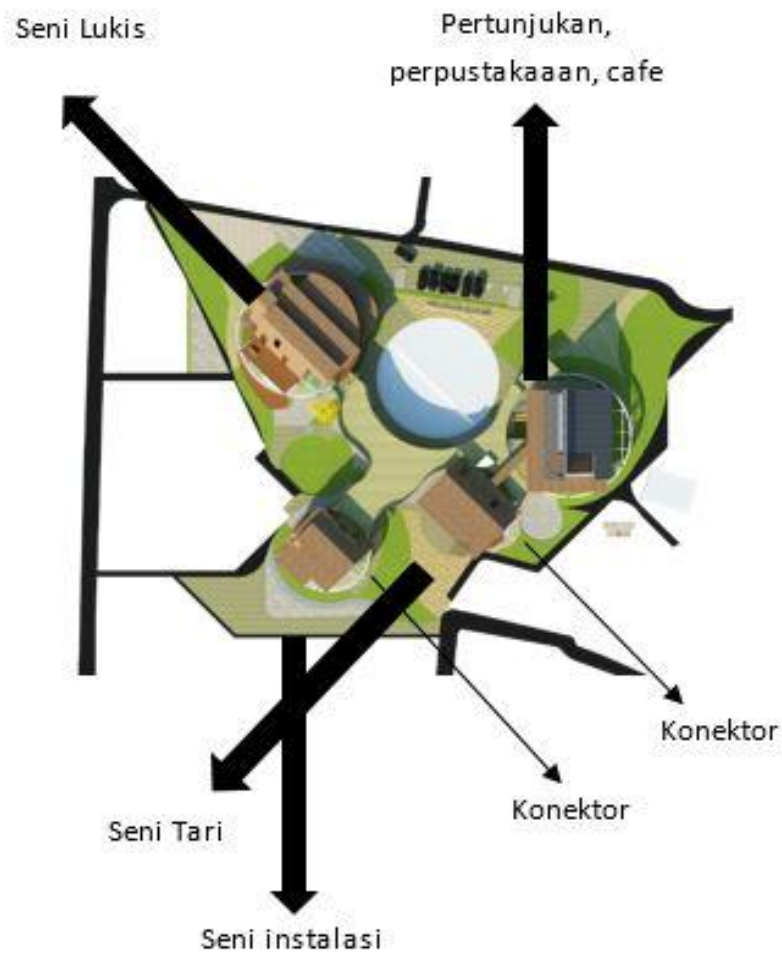


Gb 6. Titik-titik kesenian Nitiprayan



Gb. 7. Penzoningan

Titik-titik kesenian Nitiprayan menjadi acuan dalam menentukan komposisi ruang yang memberikan pengalaman kesenian Nitiprayan.



Gb. 9 Transformasi

Zoning fungsi massa bangunan berdasarkan titik-titik kesenian yang sudah ada di Nitiprayan. sehingga setiap massa bangunan memiliki muka dan sirkulasi dari arah yang berbeda-beda namun tetap memiliki main entrance utama di bagian amphiteater. Dengan zoning massa dan sirkulasi berdasarkan titik-titik kesenian yang ada di Nitiprayan, pengalaman ruang menggambarkan pertumbuhan kesenian kawasan Nitiprayan secara keseluruhan.

4. Komposisi ruang yang memungkinkan interaksi beragam berdasarkan kegiatan kesenian yang ada di Nitiprayan



Gb. 10. 3D eksterior

Suasana kreatif akan tercipta apabila setiap pola dapat berinteraksi secara langsung, sebagai contoh seni tari dapat berinteraksi dengan seni musik dengan cara tarian yang diiringi oleh musik tradisional yang langsung dimainkan oleh seniman musik, momen seni tari yang diiringi oleh seni musik direkam oleh seniman lukis melalui lukisannya, sehingga *point of interest* yang terjadi disini lebih dari satu yang dapat menciptakan suasana kreatif dan menambah ketertarikan pengunjung, pengunjung akan merasa betah berlama-lama karena *point of interest* yang lebih dari satu. Untuk itu ruang bersama yang ditempatkan diantara massa bangunan sangat memungkinkan interaksi yang beragam antara kegiatan disetiap massa bangunan. Ampiteater juga merupakan ruang bersama atau konektor dari seluruh bangunan sehingga memungkinkan kegiatan yang sangat beragam terjadi didalamnya.

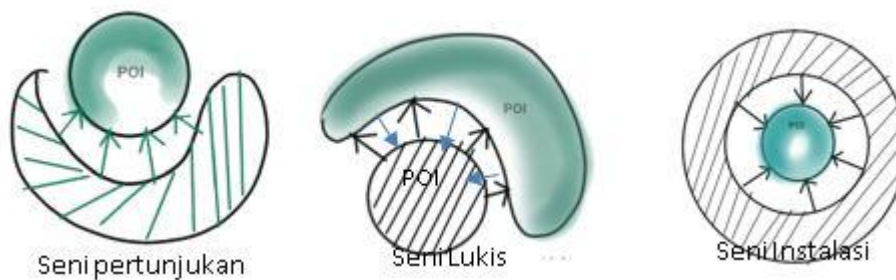
KESIMPULAN

Model perancangan ruang kreatif untuk menampung kreativitas masyarakat di Nitiprayan dapat ditampung dalam pusat seni dan budaya dengan pendekatan *creative placemaking*. Berdasarkan analisis untuk mendapatkan model perancangan yang kreatif maka dapat dicapai melalui (i) pengembangan bentuk arsitektur lokal dan bentuk yang memungkinkan interaksi langsung dan beragam dan (ii) komposisi ruang yang memberikan pengalaman kesenian dan memungkinkan interaksi yang beragam.

1. Bentuk

Arsitektur lokal Nitiprayan masih menerapkan bentuk-bentuk tradisional yang sangat jelas terlihat dari bentuk atapnya. bentuk dasar yang diambil dari analisis bentuk arsitektur tradisional Nitiprayan adalah segitiga. Berdasarkan prinsip-prinsip *creative placemaking* dengan kualitas pengalaman arsitektur lokal Nitiprayan, bentuk segitiga diambil merupakan elemen dominan pembentuk atap Pusat Seni dan Budaya Nitiprayan.

2. Bentuk yang memungkinkan interaksi langsung dan beragam berdasarkan kegiatan kesenian yang ada di Nitiprayan



Pusat Seni dan Budaya Nitipraya harus dapat mewadahi interaksi ketiga pola kegiatan seni diatas karena berdasarkan prinsip *creative placemaking* Nitiprayan, transformasi bentuk organik dapat mewakili pola kegiatan berkesenian masyarakat Nitiprayan yang cenderung fleksibel. Selain itu bentuk organik memungkinkan interaksi yang beragam.

3. Komposisi ruang yang memberikan pengalaman kesenian yang ada di Nitiprayan.

Untuk memunculkan komposisi ruang yang memberikan pengalaman kesenian yang ada di Nitiprayan, rancangan harus dapat menggambarkan kondisi kesenian yang ada di Nitiprayan, sehingga posisi kesenian yang sudah ada di Nitiprayan sangat mempengaruhi zoning rancangan.

4. Komposisi ruang yang memungkinkan interaksi beragam berdasarkan kegiatan kesenian yang ada di Nitiprayan

Suasana kreatif akan tercipta apabila setiap pola dapat berinteraksi secara langsung, Untuk mewujudkannya diperlukan ruang penghubung antar massa bangunan yang disebut konektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Brand T. (2013). *Taking Step Towards Creative Placemaking. Phase one: Community Engagement, concept and design visioning*. New York

Diakses pada tanggal 5 oktober 2015

Ching.D.K. (2008). *Arsitektur: Bentuk, Ruang, dan Tatahan*. Jakarta: Erlangga.

Manisyah M. (2009). *Kota Kreatif (Creative City): Penelusuran terhadap kota kreatif melalui studi kasus*. Depok

Diakses pada tanggal 3 Maret 2016

Mark A. Wickoff. (2014). *Definition of Placemaking: Four Different Types*. MSU Land Policy Institute

Diakses pada tanggal 30 September 2015

Mi Place. *Placemaking Overview*

Diakses pada tanggal 5 Oktober 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Bupati Bantul. Bantul

Safira. (2012). *Kampung Kreatif: Sebuah Solusi Spasial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia*. Depok

Diakses pada tanggal 8 februari 2016

S. Utami. (2014). *Proses Pembentukan Kampung Kreatif (Studi Kasus: Kampung Dago Pojok dan Cicukang, Kota Bandung*.Bandung

Diakses pada tanggal 8 Februari 2016

Turnip S. (2010). *Pusat Seni dan Budaya Batak Toba di Kabupaten Samosir*. Yogyakarta

Diakses pada tanggal 15 Maret 2015

Tyas I, dkk.(2014). *Kajian Tatahan Massa dan Bentuk Bangunan Saung Angklung Udjo Terhadap Optimalisasi Penggunaan Energi*. Bandung

Diakses pada tanggal 15 Maret 2016

Vazquez L. (2012). *Creative Placemaking: Integrating Community, Cultural and Economic Development*. Montclair New Jersey

Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015

Widodo B., dan R. Lupyanto.(2011).*Pengembangan Kawasan Pinggiran Kota dan Permasalahan Lingkungan di Kampung Seni Nitiprayan, Bantul*.Yogyakarta

Diakses pada tanggal 2 Januari 2016

KEADILAN HUKUM BERDASARKAN KONTRAK SOSIAL

Tomy Michael

*Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
tomy@untag-sby.ac.id*

ABSTRAK

Keadilan hukum dalam suatu negara haruslah mendapat perhatian lebih karena keadilan dapat ditafsirkan dengan bebas sehingga berdampak terhadap sistem penyelenggaraan negara. Dengan telaah pemikiran Jean-Jacques Rousseau, maka keadilan hukum adalah kontrak sosial negara dengan warga negaranya yang mengutamakan partisipasi masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh yaitu dalam pemikiran Jean-Jacques Rousseau, keadilan hukum benar-benar tercipta dengan baik karena ia mengutamakan pentingnya peran serta masyarakat dalam suatu negara. pemikiran Jean-Jacques Rousseau ini tercermin dalam Pasal 96 UU No. 12-2011 dimana nomenklaturnya adalah "Partisipasi Masyarakat": Partisipasi masyarakat dapat disamakan sebagai kehendak umum yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau karena aktivitas masyarakat ini mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Dengan demikian keadilan hukum berdasarkan kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau dapat mengatasi kejahatan kemanusiaan karena hakikat suatu negara adalah menyertakan masyarakat dalam setiap kebijakannya dan dapat diterapkan di Indonesia.

Kata kunci: keadilan hukum, Jean-Jacques Rousseau, kontrak sosial.

ABSTRACT

Legal justice in a country should receive more attention because justice can be interpreted freely so that the impact on the state administration system. With the study of thought Jean-Jacques Rousseau, the justice of the law is the state's social contract with its citizens that promotes community participation. The conclusion is in the thinking of Jean-Jacques Rousseau, legal justice really created properly because he emphasized the importance of community participation in a country. Jean-Jacques Rousseau's thought is reflected in Article 96 of Law No. 12-2011 in which the nomenclature is "Public Participation": Community participation can be equated as general will expressed by Jean-Jacques Rousseau for community activities is influencing decision-making in government. Thus the justice of law based on the social contract of Jean-Jacques Rousseau can cope with crimes against humanity because of the nature of a country is to include the community in any discretion and can be applied in Indonesia.

Keywords: legal justice, Jean-Jacques Rousseau, the social contract.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, keadilan hukum adalah capaian tertinggi yang diinginkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Keadilan hukum yang dimaksud harus tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan karena dengan tercapainya keadilan hukum akan sesuai hakikat Indonesia sebagai negara hukum [mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)]. Dengan mengacu hakikat keadilan dalam membentuk peraturan perundang-undangan saat ini yaitu Pasal 6 ayat

(1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011) yang termaktub bahwa:

Huruf a, yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b, yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c, yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d, yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e, yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f, yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h, yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i, yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j, yang dimaksud dengan “*asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Maka keadilan hukum yang dimaksud terdapat pada konsiderans landasan filosofis. Mengacu pada Angka 18 dan Angka 19 Lampiran II UU No. 12-2011, konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pentingnya keadilan hukum di dalam setiap peraturan perundang-undangan akan memiliki implikasi penegakan hukumnya terutama terkait penyelenggaraan negara anti kejahatan kemanusiaan. Tetapi karena sangat beragamnya definisi keadilan hukum yang dimaksud maka peneliti menggunakan pemikiran Jean-Jacques Rousseau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang memiliki arti pengkajian ilmu hukum untuk memperoleh pengetahuan yang benar guna menjawab suatu masalah (Moh Fadli, 2012). Dengan penelitian hukum normatif, peneliti memiliki argumen bahwa menggunakan hukum normatif karena penelitian hukum tergantung pada rumusan masalah berupa pernyataan “*Keadilan hukum dan Jean-Jacques Rousseau*”, maka penelitian hukum normatiflah yang paling tepat untuk digunakan (Digest Epistema, 2015). Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang dibentuk lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, pendekatan konseptual yakni pendekatan mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak

bersifat universal, dan pendekatan kasus yakni untuk dapat memahami fakta (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Kemudian bahan-bahan tersebut dipahami secara mendalam. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa deduktif. Analisa deduktif memiliki arti berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti menghadirkan objek yang hendak diteliti yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan hukum dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

ARGUMEN MEMILIH TOKOH JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Peneliti dalam tulisan ini menggunakan pemikiran Jean-Jacques Rousseau untuk menemukan apakah konsep keadilan yang dikehendaki olehnya sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian terkait penyelenggaraan negara anti kejahatan kemanusiaan akan ditemukan formulasi keadilan hukum berdasarkan kontrak sosial. Pemikiran Jean-Jacques Rousseau pertama kalinya muncul dalam karyanya berjudul asli *Le Contract Social et les idées politiques de J. J. Rousseau* dan dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia berjudul *Perihal Kontrak Sosial*. Jean-Jacques Rousseau dipengaruhi pemikiran ajaran moral Immanuel Kant dan dialektika Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Bukunya terdiri dari 4 (empat) buku yaitu:

1. *FOREWORD In which it is inquired why man passes from the state of nature to the state of society and what are the essential conditions of the compact.*
2. *Which treats of legislation.*
3. *Which treats of political laws, that is to say, of the form of government.*
4. *Which treats further of political laws and sets forth the means of strengthening the Constitution of the State.*

Peneliti menggunakan 5 (lima) judul buku dengan judul yang sama yaitu:

1. Rousseau, Jean-Jacques. 1989. *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*. Dian Rakyat. Jakarta.
2. Rousseau, Jean-Jacques. 2009. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Visimedia. Jakarta.
3. Rousseau, Jean-Jacques. 2010. *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*. Dian Rakyat. Jakarta.

4. Rousseau, Jean-Jacques. 2014. *The Social Contract & Discourses*. The Project Gutenberg eBook. United States.
5. Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*. Penguin Group. England.

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maka peneliti menggunakan terbitan Penguin Group dari England, sedangkan buku lainnya sebagai sarana pembantu guna menemukan berbagai ekspresi pemikiran tokoh Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau juga cerminan dari Frédéric Bastiat yang mengutamakan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Dijelaskan bahwa hukum bukanlah untuk mengatur hati nurani kita, pemikiran kita, kehendak kita, pendidikan kita, perubahan dalam diri kita, pemberian kita, kesenangan kita. Hukum digunakan untuk mencegah hak satu dengan hak lainnya bercampur (Frédéric Bastiat, 2007).

KEADILAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KONTRAK SOSIAL

Jean-Jacques Rousseau mengatakan manusia merupakan makhluk yang bebas tetapi ia tidak memiliki otoritas alami atas sesamanya. Awalnya bentuk tertua masyarakat adalah keluarga yang mana seorang bayi lahir dalam keadaan alami bebas maka agar bisa memenuhi kebebasannya diperlukan orang lain. Jean-Jacques Rousseau mengartikan pemberian hak ini dengan alienasi.

Richard Schacht mengemukakan bahwa alienasi yang berasal dari bahasa Latin “alienatio” berarti mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain. Pengalihan tersebut dapat melibatkan suatu kompensasi ataupun tidak; dan istilah tersebut mencakup transaksi dalam salah satu dari keadaan tersebut. Namun hal tersebut hanya berlaku jika peralihan tersebut disebabkan oleh “tindakan pemiliknya”. Dan hal tersebut hanya tepat dalam kasus-kasus yang didalamnya, kepemilikan terhadap benda yang dialihkan dinyatakan secara institusional (Richard Schacht, 2009).

Alienasi ini dapat berupa menyerahkan sebagian hak atau seluruh hak, jika sebagian hak maka ketika beranjak dewasa – hak tersebut dikembalikan dan jika seluruh hak maka ketika beranjak dewasa tidak dapat mengambilnya lagi karena seluruh hak tersebut diberikan dalam konteks negara. Pemikiran Jean-Jacques Rousseau merupakan kritik pemikiran John Locke.

Menurut John Locke, manusia adalah manusia yang benar-benar bebas sehingga apabila terjadi pembiaran akan kebebasannya akan timbul permasalahan. Dalam mengatasinya dibutuhkan hakikat kekausaan yang jelas yaitu berupa eksekutif, legislatif dan federatif. Tetapi setiap pimpinan dari masing-masing kekuasaan tersebut tidak boleh bertindak semena-mena karena mereka adalah timbul dari alienasi yang diberikan oleh masyarakat. John Locke juga menolak kepemimpinan yang bersifat monarki absolut dan hak ilahi. Masyarakat tetap memiliki

tanggung jawab kepada Tuhan tetapi dibatasi pada hal-hal tertentu. Hak ilahi merupakan hak Tuhan terhadap suatu pemimpin (John Locke, 2005). Hukum tetap berlaku dalam hubungan antara negara sehingga negara tidak mempunyai kekuasaan untuk mencabut hak-hak alam dari pribadi manusia. Negara tidak berkausa atas kehidupan, kesehatan, kebebasan dan milik seorang pribadi karena hak-hak pribadi lebih kuat daripada negara. hak-hak itu bersifat alamiah sedangkan hak-hak seorang penguasa dalam negara timbul akibat kontrak sosial.

Kulminasi John Locke sendiri adalah bentuk kritik pemikiran Thomas Hobbes yang mengagungkan monarki absolut. Di dalam bukunya berjudul *Leviathan*, Thomas Hobbes mengungkapkan bahwa masyarakat sebagai manusia pribadi haruslah diatur dengan baik karena pada dasarnya *homo homini lupus*. Dalam situasi asli belum terdapat norma-norma hidup bersama, maka orang primitif memiliki hak atas semuanya. Akibatnya ialah timbul perang semua orang melawan semua orang guna merebut apa yang dianggap haknya. Dalam situasi yang tegang itu lama-kelamaan orang mulai sadar akan keuntungan untuk mengamankan hidupnya dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama bagi semua orang yang termasuk kelompok yang sama. Untuk mencapai aturan semacam itu semua orang harus menyerahkan hak-hak asli mereka diatas segalanya (Theo Huijbers, 1982). Pada keadaan yang bersaing bebas tersebut, manusia membutuhkan hidup damai dan absolut, oleh karena itu pemimpin yang tepat adalah pemimpin yang berasal dari Tuhan sehingga apapun yang dilakukannya adalah kehendak Tuhan (Thomas Hobbes, 1949). Negara juga harus memiliki kekuasaan yang tinggi demi terciptanya kehidupan yang baik (Thomas Hobbes, 1651). Dari kedua pemikiran tokoh tersebut, Jean-Jacques Rousseau mengemukakan bahwa tidak ada pemerintah yang benar-benar memerintah karena setiap warga menjadi pelaksana undang-undang. Ia mengemukakan bahwa demokrasi berbeda dengan konsepsi modern dan merupakan satu tipe pemerintah. Pemerintahan dalam suatu negara merupakan kehendak umum yang dinyatakan sama dengan kepentingan bersama. Pemahaman yang berbeda diberikan kepada kehendak semua orang adalah sama dengan kumpulan kehendak pribadi.

Dari kehendak umum tersebut, maka akan disatukan menjadi satu bentuk pemerintahan. Pemerintahan tersebut akan menghasilkan keadilan hukum dalam bentuk produk legislatif. Lebih lengkapnya, ketika rakyat cukup mendapat informasi bermusyawarah dan jika mereka tidak pernah berkomunikasi secara pribadi maka akan muncul konflik tetapi itu dari hal tersebut akan selalu muncul keputusan terbaik. Tetapi apabila kehendak umum tersebut terbagi dalam tiap-tiap asosiasi maka kehendak setiap asosiasi itu haruslah bersifat umum sesuai kesepakatan masing-masing anggotanya. Pada akhirnya kehendak umum yang muncul sebanyak jumlah asosiasi sehingga itu bukanlah disebut sebagai kehendak umum dan itu disebut sebagai

pendapat pribadi. Dijelaskan pula bahwa selain pribadi sosial kita perlu memperhatikan pribadi-pribadi perorangan yang membentuknya, yang hidup dan kebebasannya secara alami tidak tergantung padanya. Jadi harus kita bedakan dengan baik antara hak-hak sebagai warga dan hak sebagai penguasa serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang pertama dalam kedudukannya sebagai subjek dan hak alami yang harus dapat dinikmatinya sebagai manusia. Dari sanalah muncul aristokrasi yang diawali dengan demokrasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai alienasi kedua setelah setiap manusia melakukan alienasi kepada dalam lingkup keluarga. Di dalam demokrasi, penguasa menjadikan rakyat sebagai hakim sekaligus pembuat dan pelaksana undang-undang. Dikatakan buruk karena di dalam demokrasi banyak kehendak umum yang diaktualisasikan dalam undang-undang.

Aristokrasi lebih baik dimana penguasa menjadikan rakyat berkelompok sebagai hakim. Masyarakat diajak menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Dari aristokrasi berubah menjadi monarki dimana kehendak umum mutlak tunggal. Dari kehendak umum yang tunggal ini akan timbul kegiatan memerintah yang buruk karena keadilan hanya berdasarkan satu pemimpin saja. Perubahan tetap terjadi menjadi tirani ketika seorang pemimpin betul-betul percaya pada dirinya sendiri, ia tidak mengandalkan suara Tuhan sebagai hakikat pemimpin dan tindakannya bertentangan dengan undang-undang. Perubahan terakhir yaitu despotisme dimana seorang pemimpin betul-betul menjadikan kehendak tunggalnya menjadi kehendak umum yang diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehendak tunggal ini tidak dapat menciptakan keadilan hukum karena keadilan hukum tersebut hanya bertujuan pada dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Pada dasarnya, kontrak sosial menurut Thomas Hobbes, John Locke dan Jean-Jacques Rousseau adalah proses menyerahkan sebagian hak atau seluruh hak kepada negara demi teleologi menciptakan kehidupan bahagia. Perbedaannya terletak pada asal muasal suatu negara tersebut sehingga keadilan hukum untuk mencapai teleologi tidak memiliki kesamaan di antara ketiga tokoh tersebut.

Di dalam pemikiran Thomas Hobbes, keadilan hukum hanyalah berpusat pada satu pemimpin yaitu raja karena raja adalah wakil Tuhan. Bagi peneliti hal tersebut dapat dianggap adil ketika akibat perbuatan raja menimbulkan keadilan hukum bagi seluruh masyarakatnya tetapi ketika akibat perbuatan hanya bersumber atas keadilan pada dirinya sendiri maka sistem penyelenggaraan negara secara tidak langsung mendukung kejahatan kemanusiaan.

Di dalam pemikiran John Locke, keadilan hukum terletak pada masing-masing manusia dan negara hanyalah bertindak sebagai pengawas saja. Bagi peneliti, keadilan hukum yang

diciptakan oleh John Locke lebih baik dari Thomas Hobbes karena adanya bentuk pertanggungjawaban melalui eksekutif, legislatif dan federatif. Keadilan hukum dapat tercermin di dalamnya namun produk dari eksekutif, legislatif dan federatif tidak boleh bertentangan dengan hak pribadi masing-masing warga negara. Maka keadilan hukum hanya sebatas pribadi-pribadi manusia.

Di dalam pemikiran Jean-Jacques Rousseau, keadilan hukum benar-benar tercipta dengan baik karena ia mengutamakan pentingnya peran serta masyarakat dalam suatu negara. Pemikiran Jean-Jacques Rousseau ini tercermin dalam Pasal 96 UU No. 12-2011 dimana nomenklaturnya adalah "Partisipasi Masyarakat":

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Mengacu Pasal 28 UUD NRI 1945 bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang" selaras dengan Pasal 96 UU No. 12-2011. Partisipasi masyarakat menunjukkan suatu negara benar-benar menyatakan masyarakat sebagai bagian dari negara dan menunjukkan kedewasaan dalam demokrasi. Partisipasi masyarakat dapat disamakan sebagai kehendak umum yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau karena aktivitas masyarakat ini mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Dengan demikian keadilan hukum berdasarkan kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau dapat mengatasi kejahatan kemanusiaan karena hakikat suatu negara adalah menyertakan masyarakat dalam setiap kebijakannya dan dapat diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastiat, Frédéric. 2007. *The Law*. Tribeca Books. USA.
- Epistema, Digest. 2015. "Penelitian Hukum: Antara Yang Normatif Dan Empiris". Ditulis oleh Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman.
- Fadli, Moh. 2012. *Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia*. Disertasi. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Hobbes, Thomas. 1651. *Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common wealth Ecclesiasticall and Civill*. Andrew Crooke at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard.
- _____. 1949. *De Cive or The Citizen*. Appleton-Century-Crofts Incorporated. New York.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. PT Kanisius. Jogjakarta.
- Locke, John. 2005. *Second Treatise of Government*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Rousseau, Jean-Jacques. 1989. *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*. Dian Rakyat. Jakarta.
- _____. 2009. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Visimedia. Jakarta.
- _____. 2010. *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*. Dian Rakyat. Jakarta.
- _____. 2014. *The Social Contract & Discourses*. The Project Gutenberg eBook. United States.
- _____. *The Social Contract*. Penguin Group. England.
- Schacht, Richard. 2009. *Alienasi*. Jalasutra. Yogyakarta.

DIVERSIFIKASI MELALUI MERGER DAN AKUISISI

Trisninawati

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
Trisnina2000@yahoo.com*

ABSTRAK

Strategi diversifikasi melalui merger dan akuisisi adalah strategi perusahaan untuk mempeluas usaha untuk meningkatkan daya saing dan keuntungan yang kompetitif. Keterhubungan antara strategi diversifikasi perusahaan melalui merger dan akuisisi, manajer dapat melakukan akuisisi korporasi pesaing yang bisa menghasilkan sinergi, maka korporasi akan bisa tumbuh dengan lebih cepat. Dalam menentukan pilihan merger dan akuisisi perusahaan, manajemen perlu mempertimbangkan faktor jenis sinergi yang bisa dihasilkan, sumber daya yang dimiliki oleh kedua perusahaan, tingkat kepastian pasar, tingkat kompetisi dan kesamaan sumber daya yang dimiliki oleh kedua perusahaan.

Kata kunci: diversifikasi, merger dan akuisisi, strategi korporasi, sinergi

ABSTRACT

Diversification strategy through mergers and acquisitions is the company's strategy for expanding its business to improve competitiveness and competitive advantage. Connection between the diversification strategy of the company through mergers and acquisitions, corporate managers can make acquisitions of competitors that can generate synergies, the corporation will be able to grow more quickly. In determining the selection of corporate mergers and acquisitions, management needs to consider factors kind of synergies that can be generated, the resources owned by the two companies, the level of market certainty, the level of competition and equality of resources owned by the two companies.

Keywords: diversification, mergers and acquisitions, corporate strategy, synergies

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi era globalisasi serta kompetisi yang sangat tinggi saat ini, setiap organisasi harus dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran (produk/jasa) dengan melakukan berbagai inovasi, dan efisiensi agar mampu bersaing. Untuk itu, organisasi perlu berubah, perubahan yang dibuat harus berhasil, karena hal ini sangat penting bagi kehidupan organisasi dimasa mendatang (Burke, 2008). Dalam hal ini, terdapat perusahaan dan salah satu bentuk perubahan organisasi yang memiliki dampak perubahan yang sangat besar dalam kehidupan organisasi adalah perubahan yang memiliki skala besar (*large-scale organization change*), yaitu pada waktu organisasi melakukan Merger atau Akuisisi (M&A) (Schweiger,2002, Etschmaier, 2010).

Salah satu strategi korporasi yang agresif untuk meningkatkan profit dari waktu ke waktu adalah akselerasi pertumbuhan (*expanding*) melalui diversifikasi. Diversifikasi usaha merupakan salah satu strategi menjadi pilihan manajer. Dengan penerapan diversifikasi usaha, manajer dapat mengajukan reward yang lebih besar, karena semakin banyak jenis usaha yang dikelola,

semakin besar tingkat kompleksitas perusahaan. Penerapan diversifikasi usaha salah satu juga bertujuan untuk memaksimalkan ukuran dan keragaman usaha, sehingga pemilik dapat memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dan beberapa segmen usaha yang dimiliki.

Menurut Lewellen (1971) mengatakan bahwa diversifikasi dapat memperbaiki kapasitas hutang untuk mengurangi kemungkinan kebangkrutan. Biaya yang harus dikeluarkan dalam menerapkan strategi diversifikasi diperlukan untuk dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan.

Untuk diversifikasi dibidang yang sama dengan melakukan merger dan akuisisi guna mendapatkan kompetitif efektif yang lebih cepat. Dengan akuisisi korporasi pesaing yang bisa menghasilkan sinergi, maka korporasi akan bisa tumbuh dengan lebih cepat. Jika perusahaan memiliki jaringan yang berbeda, produk yang berbeda, kemampuan manajemen yang berbeda, cara kerja maupun budaya yang berbeda, dimana antara korporasi kita dengan korporasi pesaing, maka akan menghasilkan sebuah korporasi yang sangat luar biasa sinergi akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih besar lagi.

Salah satu strategi perusahaan untuk melakukan diversifikasi melalui proses Merger atau akuisisi yang banyak kita ketahui akhir-akhir ini seringkali dilakukan oleh organisasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, antara lain: penggabungan berbagai bank misalnya: CIMB-Niaga, OCBC-NISP, OCBC-Bumi Putera, BII-Maybank, Danamon-Temasek (DBS), Sony-Erickson, Semen Gresik-Semen Padang-Semen Tonasa dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Meskipun banyak M&A dilakukan, tetapi ternyata studi empiris menunjukkan bahwa keberhasilan dari proses tersebut kurang sesuai dengan apa yang diharapkan bahkan ada yang dapat dikatakan gagal (Schweiger, 2002; Fairburn & Geroski (dalam Cartwright dan Cooper, 1993); Devoge & Shiraki, 2000). Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat juga bahkan menyatakan bahwa hanya sekitar 23-50% M&A itu berhasil (McKinsey, Marks, British Institute dan Hunt dalam Cartwright dan Cooper, 1993).

Common goals or set of goals di dunia bisnis atau tujuan sebuah perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan salah satunya adalah memperoleh keuntungan yang maksimum dalam menjalankan usahanya. Dalam pertumbuhannya organisasi juga tidak lepas dari perubahan lingkungan yang menjadi semakin kompleks dan yang belum dikenal sebelumnya dari segi jumlah perubahan yang terjadi maupun tingkat kecepatan perubahan itu sendiri (Ansoff, 1990).

Weston(2004) mengidentifikasi adanya 10 faktor yang menjadi tantangan utama sebuah organisasi untuk masa yang akan datang mengakibatkan terjadinya merger dan akuisisi, sebagai berikut:

1. Perubahan teknologi
2. Perubahan struktur organisasi
3. Perubahan kondisi keuangan dan ekonomi
4. Trend negatif dalam ekonomi dan industri
5. Perkembangan industri baru
6. Tantangan akan economies of scale, economies of scope
7. Globalisasi
8. Deregulasi dan regulasi
9. Semakin lebarnya pendapatan dan kekayaan
10. Valuasi harga saham yang terlalu tinggi di masa 1990an

Strategi agresif juga bisa dilakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan yang memiliki karakter industri yang berbeda total dengan berbagai tujuan seperti diversifikasi portofolio bisnis unit. Akan tetapi industri yang baru ini memiliki prospek yang bagus dimasa yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

Diversifikasi

Pertanyaan yang mendasar dalam diversifikasi adalah mengapa perusahaan melakukan diversifikasi. Menurut Montgomery (1994), terdapat tiga perspektif motif diversifikasi perusahaan, yaitu pandangan kekuatan pasar (*market power view*), sumber daya (*resource based view*) dan perspektif keagenan (*agency view*).

Pandangan kekuatan pasar melihat diversifikasi sebagai alat untuk menumbuhkan pengaruh anti kompetensi yang bersumber pada kekuatan konglomerat. Ketika perusahaan tumbuh menjadi besar maka pangsa pasarnya akan semakin tinggi dan akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya kompetisi pasar akibat dominasi usaha. Gribbin (1976) menyatakan bahwa sebenarnya kekuatan konglomerat merupakan fungsi dari kekuatan pasar dalam pasar individual.

Pandangan yang kedua pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Diversifikasi dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas dari sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan. Sumberdaya dan kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan masih belum digunakan secara optimal untuk beroperasi hanya pada satu lini bisnis. Alokasi sumberdaya yang efisien memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Meskipun demikian, tingkat diversifikasi yang optimal berbeda antar perusahaan tergantung pada karakteristik sumberdaya yang dimiliki. Menurut Montgomery dan Wernerfelt (1988), tingkat spesifikasi dari sumber

daya yang dimiliki seperti keahlian pada bioteknologi, maka kemampuan untuk diterapkan pada industri yang berbeda akan terbatas.

Dalam literatur keuangan teori agensi (*Agency Theory*) teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara principal dengan agent. Dalam hubungan keagenan ini, terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan. Pemilik perusahaan mendelegasikan kewenangannya kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan harapan pemilik dapat memperoleh keuntungan.

Konflik keagenan ini dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan yang menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Ada beberapa alternatif untuk mengurangi *agency cost*, diantaranya adanya kepemilikan saham oleh institusional dan kepemilikan saham oleh manajemen.

Merger dan Akuisisi

Merger dan akuisisi sama-sama merupakan bentuk penggabungan dari dua organisasi. Merger adalah penggabungan dari 2 atau lebih organisasi menjadi satu organisasi baru sedangkan akuisisi adalah pengambilan suatu organisasi menjadi bagian bagian dari organisasi lain. Latar belakang organisasi melakukan merger dan akuisi biasanya adalah pertumbuhan atau diversifikasi untuk memperoleh akses terhadap pasar, teknologi untuk memperoleh sumber daya, melakukan efisiensi operasional serta inovasi.

Namun demikian pelaksanaan merger dan akuisisi terkadang juga dapat mengalami kegagalan dikarenakan beberapa permasalahan seperti kurangnya studi kelayakan tidak tercapainya sinergi antara organisasi-organisasi lama, biaya terlalu mahal untuk proses merger dan akuisisi, konflik antar budaya organisasi dan lain-lain.

Aliansi, Merger dan Akuisisi

Menurut Gaughan (2007), bahwa strategi merger dan akuisisi bertujuan:

1. Tumbuh lebih cepat terutama pertumbuhan pada industri yang mengalami perlambatan industri, meningkatkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui pertumbuhan dan juga pertumbuhan melalui cross border acquisition
2. Untuk mencapai sinergi, baik sinergi untuk meningkatkan pendapatan, sinergi untuk biaya mencapai *economies of scale* sehingga bisa mencapai penurunan biaya dan sinergi untuk keuangan, yaitu kemampuan untuk dapat akses kepada pasar modal yang lebih baik sumber dananya

3. Diversifikasi, untuk menguasai pasar industri yang lebih menguntungkan maupun pertumbuhan lebih cepat
4. Motif ekonomi lainnya seperti integrasi, vertikal dan horizontal

Intervensi merger dan akuisisi didahului dengan diagnosis terhadap strategi organisasi. Strategi organisasi menggambarkan rentang bisnis dimana organisasi akan turut serta, sementara strategi bisnis menjelaskan bagaimana organisasi akan bersaing dalam bidang tertentu. Intervensi merger dan akuisisi biasa digunakan ketika lingkungan internal organisasi dianggap terlalu lambat, atau ketika organisasi lain (rekanan) tidak dapat mengendalikan sumberdaya sebagai kunci yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat level diversifikasi perusahaan, terdapat beberapa ukuran yang bisa dipakai untuk mengidentifikasinya. Salah satu ukuran yang banyak dipakai adalah jumlah segmen usaha yang dimiliki perusahaan. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka perusahaan akan melaporkan segmen usaha sebagai bagian dari laporan keuangan yang diterbitkan.

Pada sisi lain, diversifikasi dapat menimbulkan dampak negatif. Banyak pendapat yang mendukung posisi ini. Stults(1990) menyatakan bahwa perusahaan yang terdiversifikasi akan menempatkan investasi yang terlalu besar pada lini usahanya dengan kesempatan investasi yang rendah. Sedangkan Jensen(1986) mengemukakan bahwa manajer perusahaan yang memiliki free cashflow yang besar cenderung untuk mengambil investasi yang menurunkan nilai (value decreasing) dan proyek yang memiliki nilai sekarang bersih (net present value) yang negatif ketika mengalokasikan pada segmen usaha mereka.

Akan tetapi sebenarnya strategi perusahaan melakukan diversifikasi tidak selalu memiliki dampak negatif. Hal ini dibuktikan oleh Li dan Wong (2003) yang meneliti hubungan diversifikasi perusahaan dengan kinerja pada perusahaan-perusahaan besar di Cina. Mereka berpendapat bahwa strategi diversifikasi tidak hanya dilihat dari aspek finansial saja tetapi perlu mempertimbangkan faktor lingkungan seperti institusional yang berpengaruh terhadap strategi perusahaan. Pemilihan strategi yang tepat akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Mereka menemukan bahwa strategi diversifikasi pada bidang yang tidak berkaitan (*unrelated diversification*) justru akan menurunkan nilai perusahaan. Kesesuaian antara strategi diversifikasi yang berkaitan dengan diversifikasi yang tidak berkaitan merupakan strategi optimal yang akan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik.

Keterhubungan antara strategi diversifikasi perusahaan melalui merger dan akuisisi, manajer dapat melakukan akuisisi korporasi pesaing yang bisa menghasilkan sinergi, maka

korporasi akan bisa tumbuh dengan lebih cepat. Jika perusahaan memiliki jaringan yang berbeda, produk yang berbeda, kemampuan manajemen yang berbeda dan cara kerja maupun budaya yang berbeda, dimana antara korporasi kita dengan korporasi pesaing akan menghasilkan sebuah korporasi yang sangat luar biasa artinya sinergi akan menghasilkan yang lebih besar. Akan tetapi manajer dalam hal ini harus paham bagaimana melakukan sinergi tersebut. Dalam menentukan pilihan merger dan akuisisi perusahaan manajemen perlu mempertimbangkan faktor jenis sinergi yang bisa dihasilkan, sumber daya yang dimiliki oleh kedua perusahaan, tingkat kepastian pasar, tingkat kompetisi dan kesamaan sumber daya yang dimiliki oleh kedua perusahaan (Dyer, Kale dan Singh, 2004). Dengan diketahuinya kelima faktor tersebut, maka keputusan strategi akan lebih mudah diambil dan mengurangi tingkat kegagalan transaksi.

Model-model sinergi oleh Dale, Kyer, Singh (2004)

1. Tipe dari Sinergi
2. Nature of Resources
3. Extent of Redudant resources
4. Degree of market Uncertainly
5. Level of Competition

Proses Merger dan Akuisisi

Proses M&A adalah merupakan suatu kegiatan perubahan organisasi yang berskala besar. Hal ini antara lain karena organisasi yang melakukan M&A memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) adanya target finansial yang agresif, b) tenggat waktu yang pendek, c) menjadi sorotan publik, d) adanya “political power struggle/bargaining”, e) adanya proses reengineering; f) menjadi sorotan publik; g) adanya “issue downsizing”; h) terdapat benturan budaya; i) adanya problem retensi pegawai dan j) adanya issue demotivasi pegawai” (Galpin & Herndon, 2007;

Stynberg & Veldsman, 2011; Schuler & Jackson, 2001). Kondisi ini semua, membuat proses M&A dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perubahan organisasi yang berskala besar, yang memiliki dampak psikologis lebih besar pada pekerja, dibandingkan dengan jenis perubahan organisasi lainnya.

Akan tetapi dalam beberapa penelitian, merger dan akuisisi tidak selalu dapat meningkatkan nilai perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Merger dapat meningkat melalui sinergi menurut (Bradley dan Kimm, 1988), *disciplinary* (Alchain dan Demzes, 1972). Ditemukan juga oleh Jensen (1986) bahwa *value reducing* terjadi dengan dilakukan merger dan akuisisi karena adanya *agency costs* dan *management entrenchment* (Shiefer dan

Vishny,1989) dan *Value neutral hubris* oleh Roll, 1986 yaitu manajer akan melakukan akuisisi untuk meningkatkan nilai atau kepentingan pribadi dimana pasar telah menunjukkan harga yang sesuai dengan keadaan yang ada. Merger dan akuisisi akan menghasilkan *value creation* kepada pemegang saham untuk jangka panjang akan tetapi memiliki implikasi yang jelek kepada karyawan daripada perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi (Johan, 2010).

KESIMPULAN

Dalam melakukan strategi diversifikasi melalui merger dan akuisisi adalah sebagai strategi perusahaan untuk memluas usaha untuk meningkatkan daya saing dan keuntungan yang kompetitif. Keterhubungan antara strategi diversifikasi perusahaan melalui merger dan akuisisi, manajer dapat melakukan akuisisi korporasi pesaing yang bisa menghasilkan sinergi, maka korporasi akan bisa tumbuh dengan lebih cepat. Dalam menentukan pilihan merger dan akuisisi perusahaan manajemen perlu mempertimbangkan faktor jenis sinergi yang bisa dihasilkan, sumber daya yang dimiliki oleh kedua perusahaan, tingkat kepastian pasar, tingkat kompetisi dan kesamaan sumber daya yang dimiliki oleh kedua perusahaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara Semnas DPPM UII Menuju Masyarakat Madani Lestari ke 6 atas kerjasamanya dan tulisan saya dapat diterbitkan di prosidng serta bermanfaat bagi rekan rekan semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansoff,Igor, McDonnel Edward (1990). *Implementing Strategic Management*, 2nd Edition
Prentice Hall, United Kingdom
- Burke, Warner W (2004). *Internal Organization Dvelopment Practitioners:Where do They
Belong?* *The Journal of Applied Behavioral Science*, December 2004, 40:4,423-431
- (2008). *Organization Change, Theory and Practice*, Second Ed, sage Publications,
USA
- Cartwright, Sue&Cooper, Cary (1993). *The Psychological Impact of Merger and Acquisition
on the individual: A srudy of Building Society Managers* 46,3 (Mar 1993):327
- Chen, S.S and Kim Wai Ho (2000). *Corporate diversification,ownership structure and firm
value. The Singapore Evidence, International Review of financial Analysis*, 9, 315-
326

- Dyer, Jeffrey H, Jale Prashant dan Singh Habir (2004). When to Ally and When to Acquire, Harvard Business Review, Page 1-9
- Etschmaier, Gale S (2010). Mergers and Acquisitions as Instruments of strategic Change Management in Higher Education: Assessment Measures and Perception of Success, A Dissertation, imited Publication, University of Pensylvania, USA
- Esti Kurniasari, Sulisty. Pengaruh diversifikasi usaha terhadap kinerja perusahaan yang dimoderisasi oleh kepemilikan manajerial. Jurusan Akuntansi Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nugroho, diakses 17 September 2015
- Fairfield-Sonn, ogilive, John R, DelVechhio, Gerard(2002). Mergers, Acquisitions and Longterm Employee Attiudes. Journal of Business&Economic Studies, Vol. 8, No.2, 2002
- Gaughan, Patrick (2007).Merger, Acquisition, and Corporate Restructuring, 4 th edition, Wiley, New Jersey, US
- Gribbin, J.D.(1976). The Conglomerate merger, applied economics, 8, 19-35
- Harto, Puji (2005). Kebijakan diversifikasi perusahaan dan pengaryhnya terhadap kinerja: studi empiris pada perusahaan Publik di Indonesia. SNA VIII, Solo,14-16 September 2005
- Jensen, Michael C dan William H. Meckling (1979). Theory of the firm: Manajerial behavior agency cost and ownership structure. Jornal of financial Economics. Vol. 3h 305-360
- (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and take overs. American Economic Review 76, 323-329
- Johan, Suwinto (2010). Studi Kelayakan Usaha, edisi Pertama, Lembaga Penerbit UMN Press, Jakarta Indonesia
- Larsson Rikard and Finkelstein, Sydney (1999). Integrating Strategic, Organizational, and Human Resource Perspective on Mergers and Acquisition: A case Survey of Synergy Realization. Organization Science.vol.10,No.1 Janaury-February 1999
- Li, Mingfang and Yim-Yu Wong (2003). Diversificatio and economic performance:an empirical assessment of chinese firms.Asian Pacific Journal of management, 20, 243-265
- Montgomery, C.A and Wernerfelt (1988). Diversification, Ricardian rents and Tobin's Q. Rand Journal of economics 623-632
- (1994). Corporate diversification. Journal of economic Perspective.Vol. 8.No.3 162-178
- Schweiger, David M(2002). M&A integration, a Framework for Executive and Managers, McGrawHill, New York USA

Prosiding Penelitian Seminar Nasional seri 6
"Menuju Masyarakat Madani dan Lestari"

Stults (1990). Managerial discretion and optimal financing policies. *Journal of financial Economics*, 26, 3-27

PENGEMBANGAN MANAJEMEN ZAKAT PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI PROVINSI DIY

Unggul Priyadi, Nur Kholis, Priyonggo Suseno
Universitas Islam Indonesia
Email: priyadi.unggul@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus dikerjakan umat islam yang memenuhi ketentuan syar'i. Di dalamnya zakat mempunyai dimensi habluminallah (dimensi ibadah vertikal, antara manusia dengan Alloh swt) dan juga berdimensi habluminannas (dimensi ibadah horisontal, antara manusia dengan sesama manusia. Melalui kesadaran membayar zakat akan mendorong terciptanya kehidupan manusia yang harmonis, muzaki memperoleh kepuasan batin karena dapat menolong sesama pada sisi lain mustahik (orang miskin) dapat memanfaatkan harta pemberian muzaki.

Berdasarkan hasil riset BAZNAS dan IPB, potensi zakat secara nasional ditaksir mencapai Rp 217 triliun setiap tahun. Angka itu didasarkan pada besaran produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2010. Adapun di DIY yang memiliki penduduk sekitar 3,5 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,74 persen per tahun mempunyai potensi pengelolaan zakat yang sangat strategis dari aspek pengumpulan zakat dan pentasarufan. Mengacu data statistik DIY masih terdapat 16,97 persen penduduk yang di bawah garis kemiskinan (sekitar 585,870 jiwa). Berdasarkan agama yang dianut jumlah penduduk tersebut sekitar 91,71 persen adalah beragama Islam. Jika diasumsikan hanya 50% penduduk muslim non miskin yang berkewajiban membayar zakat dan jumlah anggota keluarga adalah 5 orang maka terdapat 316.619 KK yang berpotensi membayar zakat. Dengan asumsi pendapatan mereka rata-rata adalah lima juta rupiah per bulan dan zakat mereka adalah 1,5 juta rupiah per tahun, maka potensi zakat di DIY per tahun mencapai 361,642 milyar rupiah. Sementara itu, jumlah zakat yang terkumpul melalui lembaga amal resmi baru mencapai 12 milyar rupiah atau 3,32 persen.

Pada penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah: menganalisis konsep dan praktik manajemen OPZ dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki dan menyalurkan kepada mustahik, menganalisis kinerja manajemen OPZ, menganalisis kelemahan dan tantangan yang dihadapi oleh OPZ dalam mengelola atau manajemen zakat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Beberapa temuan dalam penelitian ini adalah: secara umum lembaga zakat di D.I. Yogyakarta, yang berkategori BAZ maupun LAZ telah melaksanakan standar manajemen internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kapabilitas masing-masing lembaga. Pada umumnya BAZ dan LAZ yang berada di lembaga tertentu cenderung lebih mengandalkan pada pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum lebih cenderung mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga dalam menarik minat muzakki untuk membayarkan zakatnya ke LAZ. Hal ini terjadi karena nature dari BAZ dan LAZ yang memang berbeda. Fundrising paling banyak nilai nominalnya untuk wilayah D.I.Y diperoleh oleh Rumah Zakat yakni sekitar 5 Milyar per tahun. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap brand Rumah Zakat dan kreativitas program yang dijalankan. Sedangkan umumnya untuk manajemen dan distribusi dana zakat, BAZ maupun LAZ mendistribusikan dana zakat untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman qordhul hasan atau modal bergulir yang berbentuk permanen, artinya hanya diberikan kepada satu lembaga atau orang untuk jangka waktu lama. Apabila ditinjau dari jenis kegiatan pendistribusian nampak bahwa yang dijadikan program unggulan untuk menarik simpati muzakki adalah melalui penonjolan akuntabilitas pendistribusian zakat di bidang-bidang yang populer di mata masyarakat. Ini bisa dibuktikan dari lebih intensif dan fokusnya penyebaran informasi program pendistribusian zakat yang menggambarkan kegiatan-kegiatan tadi di profil dan buletin-buletinnya.

Kata Kunci: Organisasi Pengumpul Zakat, Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Tasaruf, Zakat Mal.

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that Muslims must be done complying with the provisions syar'i. Zakat has dimension habluminallah (dimension of worship vertical, between man and Allah swt) and also dimension habluminannas (dimension of worship horizontal, between human). Through the consciousness of paying zakat will encourage the creation of human life that is harmonious, muzaki gain inner satisfaction helping others on the other side mustahik (the poor) can take advantage of the provision muzaki treasure.

Based on the research results BAZNAS and IPB, the potential zakat nationwide is estimated to reach Rp 217 trillion annually. That figure is based on the size of gross domestic product (GDP) in 2010. As in the Yogyakarta province which has a population of about 3,5 million inhabitants with an average population growth of 0.74 percent per year has the potential zakat management is a very strategic aspects of the collection zakat and distribution. Referring DIY statistical data, there are still 16,97 percent of the population were below the poverty line (about 585.870 inhabitants). Based on the religious affiliation of the population of about 91.71 percent are Muslim. Assuming 50% of non-poor Muslim who is obliged to pay zakat and the number of family members is 5 people so there are 316.619 families that could potentially pay zakat. Assuming their income on average is five million rupiah per month and their Zakat is 1,5 million per year, then the potential of zakat in the province per year to reach 361,642 billion rupiah. Meanwhile, the amount of zakat collected through official amil institutions reached 12 billion rupiah or 3,32 percent.

In this study objectives to be achieved are: analyzing the concepts and management practices OPZ in collecting alms from muzakki and distribute to mustahiq, analyze performance OPZ management, analyze the weaknesses and challenges faced by OPZ manage or management of zakat. The analytical method used is descriptive analysis.

Some researchs in this study are: general zakat institution in D.I. Yogyakarta, categorized BAZ and LAZ has carried out an internal management standards, fundraising strategy, management and distribution of funds, and the pattern of supervision and transparency, with varying degrees according to the condition and capabilities of each institution. In general, BAZ and LAZ is in certain institutions tend to rely more on strategy fundrising pay cuts, while the general LAZ more likely to rely on creativity and accountability program in attracting muzakki institutions to pay their zakat to LAZ. This happens because of the nature of BAZ and LAZ are indeed different. Fundrising most D.I.Y nominal value for the area acquired by the Zakat House which is about 5 billion per year. This is not out of public confidence in the brand Rumah Zakat and creativity programs. While generally for the management and distribution of zakat, BAZ and LAZ distributes zakat funds for the poor, student scholarships, training, victims of natural disasters, productive activities, and loans qordhul hasan or revolving capital in the form of permanent, meaning only given to one agency or person for a long period. When viewed from the types of distribution activities appears that is used as a flagship program to attract sympathy muzakki protrusion accountability is through zakat distribution in areas that are popular in the eyes of masyatakat. This can be proved from the more intensive and focused information dissemination zakat distribution program that describes the activities earlier in the profile and newsletter-bulletin.

Keywords: Gatherer Zakat Organisation, Badan Amil Zakat, Zakat Organization, Tasaruf, Zakat Mal

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat saat ini masih belum ditangani secara serius sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Potensi zakat belum sebanding dengan zakat yang terkumpul dari seluruh Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) seluruh Indonesia yang pada 2008 hanya sebesar Rp 900 miliar setahun (Hafidhuddin, 2009). Untuk mewujudkan optimalisasi

pengumpulan zakat diperlukan kerja keras seluruh Bazda di Indonesia dan peningkatan manajemen pengelolaan zakat untuk menciptakan kepercayaan para muzaki serta melakukan langkah strategis..

Banyak pihak menilai potensi zakat di Indonesia sangatlah tinggi. Diperkirakan potensi zakat Indonesia tahun 2011 mencapai Rp 217 Trilyun per tahun, sedangkan dana zakat yang terhimpun melalui lembaga pengelola zakat, yaitu BAZ dan LAZ baru mencapai Rp 1,5 triyun (Wibisono, 2012 dan Forum Zakat 2011). Potensi zakat yang belum tergali secara maksimal ini berkaitan dengan efektifitas lembaga amil (baik BAZ ataupun LAZ maupun lembaga lainnya), preferensi masyarakat baik pembayar zakat (*muzakki*) ataupun calon penerima zakat (*mustahiq*) yang belum mendukung pengelolaan zakat secara professional maupun keterlibatan otoritas regulasi dalam mengembangkan zakat.

Hal yang sama terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai ilustrasi penerimaan zakat selama bulan Ramadhan 1430 H ternyata masih jauh dari yang diharapkan, yakni hanya mencapai Rp 7,6 miliar, sedangkan targetnya yang ingin dicapai sebelumnya Rp 14 miliar. Jumlah tersebut juga lebih rendah dari penerimaan pada tahun lalu yang mencapai Rp 12 miliar. Penurunan perolehan zakat ini, salah satunya disebabkan banyaknya donator yang berasal dari instansi perusahaan yang menyalurkan bantuannya kepada korban gempa di Tasikmalaya serta banyak lembaga amil zakat (yayasan Islam dan pondok pesantren) yang mendirikan lembaga amil zakat. (Purwanto, *KRjogja.com*, Selasa, 29/9 2012).

DIY memiliki penduduk sekitar 3,5 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,74% per tahun. Dari jumlah tersebut masih terdapat 16,97% penduduk adalah di bawah garis kemiskinan atau sekitar 585,870 jiwa. Menurut data BPS, sekitar 91,71% penduduk DIY adalah beragama Islam. Jika diasumsikan hanya 50% penduduk Muslim non miskin yang berkewajiban membayar zakat dan dengan jumlah anggota keluarga adalah 5 orang per kepala keluarga maka terdapat 316,619 KK yang berpotensi membayar zakat. Dengan asumsi pendapatan mereka rata-rata adalah lima juta rupiah per bulan dan zakat mereka adalah 1,5 juta rupiah per tahun, maka potensi zakat di DIY per tahun mencapai 361,642 milyar rupiah. Sementara itu, jumlah zakat yang terkumpul melalui lembaga amil resmi baru mencapai 12 milyar rupiah atau 3,32 persen.

Berdasarkan potensi zakat masyarakat yang ada di Provinsi DIY khususnya Kabupaten Sleman dan data zakat yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa salah satu persoalan yang penting untuk dipecahkan adalah manajemen lembaga atau badan amil zakat dalam menggarap potensi yang ada menjadi kenyataan. Untuk itu, perlu berbagai langkah strategis

untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, di antaranya melalui lembaga pengelola zakat sebagai institusi yang menjadi tujuan para muzaki dalam melakukan pembayaran zakat.

Dari gambaran di atas, dapat diindikasikan bahwa faktor profesionalitas organisasi pengelola zakat berperan sangat penting dalam menggali potensi zakat. Oleh karena itu perlu dilakukan riset tentang Pengembangan Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Berbagai Lembaga Pengelola Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka diajukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep dan praktik manajemen organisasi pengelola zakat (OPZ) di DIY ?
- b. Apakah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh OPZ di DIY dalam manajemen zakat?
- c. Bagaimana manajemen OPZ yang efektif dan efisien?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen OPZ dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta pengembangan organisasinya. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis konsep dan praktik manajemen OPZ dalam mengumpulkan zakat dari para *muzakki* dan menyalurkan kepada *mustahiq*
- b. Menganalisis kinerja manajemen OPZ.
- c. Menganalisis kelemahan dan tantangan yang dihadapi oleh OPZ dalam mengelola atau manajemen zakat.

METODE PENELITIAN

Dimensi Penelitian

Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian menerangkan (*explanatory research*) dan penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif memberikan gambaran lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu atau aspek kehidupan pada masyarakat yang diteliti. Pendekatan tersebut dapat mengungkapkan secara hidup kaitan antara berbagai gejala sosial, dimana hal tersebut tidak dapat dicapai oleh penelitian yang bersifat menerangkan (Singarimbun dan Effendi, 1995).

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap para pembayar zakat (muzaki) dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yang berupa lazis daerah, basis daerah dan lembaga pengumpul zakat lain seperti pengumpul zakat yang dikelola takmir masjid di wilayah Kabupaten Sleman. Berikut ini perkiraan jumlah OPZ di Kabupaten Sleman.

Tabel 1: Jumlah OPZ di Kabupaten Sleman

	Jumlah (unit)	Unit pengelola zakat (unit)
UPZ	18	18
BMT*	60	10
MASJID*	1960	18
LAZ**	17	17
TOTAL		63

Sumber/keterangan: www.slemankab.go.id

Keterangan: UPZ adalah unit pengelola zakat di tingkat kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari BAZDA. Tidak setiap masjid dan BMT memiliki unit pengelola zakat

1. Jenis Data

Data yang dianalisis merupakan data primer dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber utama dan sumber pendukung seperti Kementerian Agama, Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman serta berbagai publikasi yang relevan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat. Pengumpulan data primer dilakukan dengan

- Wawancara dari sumber utama yakni para pengurus lembaga pengelola zakat, pengurus takmir, para muzaki, baitull mal wat tanwil (BMT), para penerima zakat (mustahiq) serta berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat.
- Pengkajian administrasi pengumpulan zakat pada lembaga pengelola zakat, administrasi para muzaki serta administrasi penerima zakat (para mustahiq).

2. Jumlah Pengamatan

Salah satu rumus untuk menentukan jumlah sampel salah satunya dengan menggunakan rumus Slovin (dalam Riduwan, 2005) yaitu :

$$n = N / \{N(d)^2 + 1\}$$

Keterangan :

n = sampel; N = populasi; d = tingkat signifikansi 20 persen (nilai presisi 80 persen)

Besarnya populasi (N) sebanyak 28 maka sampel yang diambil dalam penelitian adalah:
 $n = 28 / \{28(0,2)^2 + 1\} = 14$. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 16.

3. Metode Analisis

Dalam menganalisis data terdapat dua metode analisis yakni menggunakan analisis deskriptif.

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dengan pembahasan mencakup penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan sebaran data, perhitungan relatif, dan melakukan prediksi dengan tren. Ada tiga domain pokok dalam analisis ini, yaitu

- 1) Manajemen penghimpunan dana zakat
- 2) Manajemen penyaluran dana zakat
- 3) Manajemen Pengembangan Organisasi OPZ

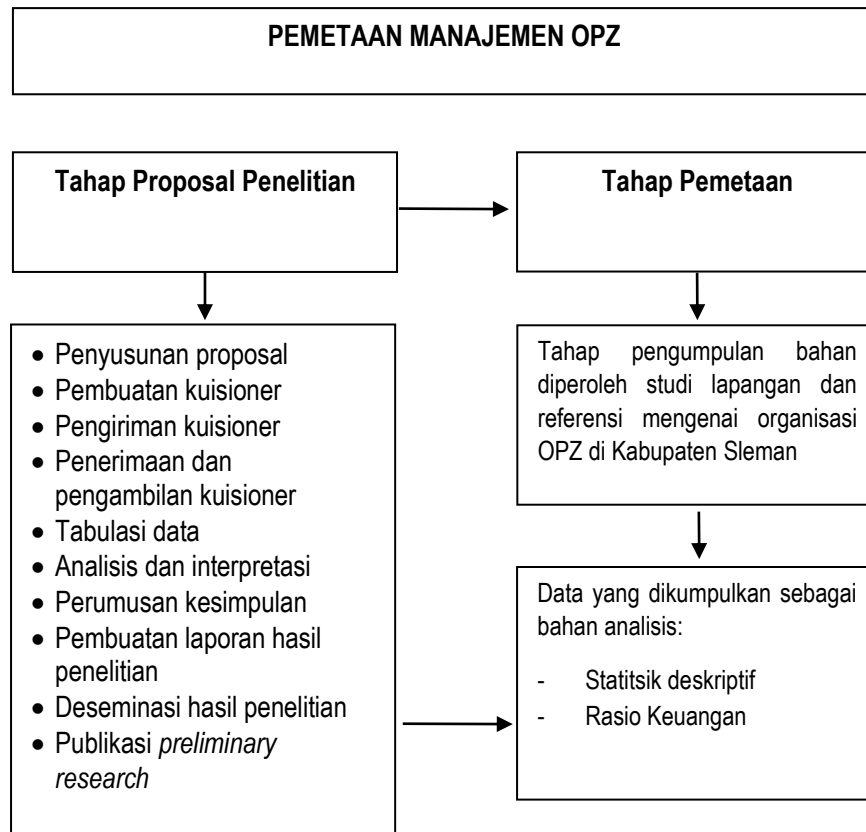
Subjek analisis meliputi Organisasi Pengelola Pakat dan pengurusnya.

b. Analisis Rasio Keuangan

Analisis secara deskriptif pada lembaga pengelola zakat diutamakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, yang mencakup tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat infak sodaqoh

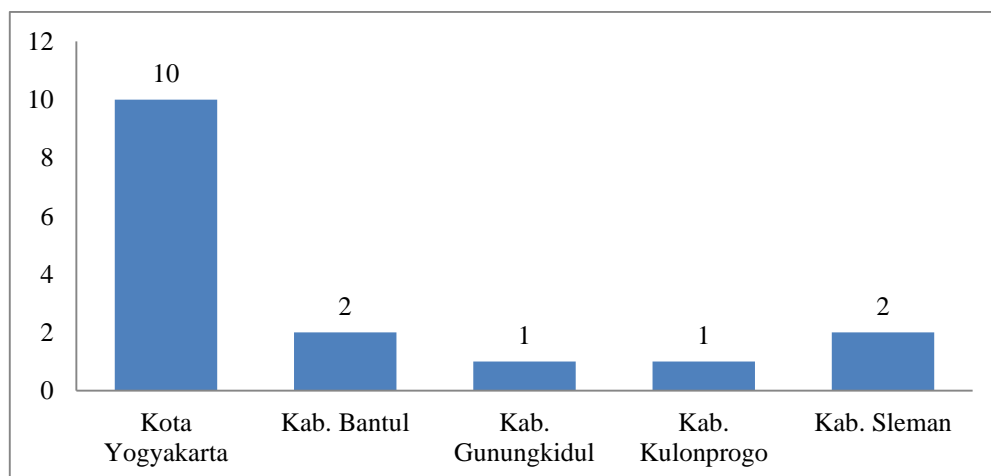
- 1) **Rasio Hasil Guna:** mengukur tingkat efektifitas dari pengelolaan dana dengan membandingkan dana ZIS yang sudah disalurkan dengan total dana ZIS yang tersimpan dalam lembaga. Rasio ini mencerminkan seberapa besar dana yang dikeluarkan lembaga kepada mustahik 8 (delapan) asnaf dan juga untuk aktivitas lembaga yang dibiayai dengan dana ZIS. Semakin tinggi rasio efektifitas menunjukkan dana yang diperoleh sudah disalurkan secara efektif.
- 2) **Rasio Penyaluran Dana ZIS:** digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana ZIS yang tersedia untuk dialokasikan kepada asnaf. Penerima manfaat dana ZIS adalah seluruh komponen/bagian dari program serta aktivitas lembaga, yang meliputi; hibah, piutang modal usaha, investasi dan operasional.
- 3) **Rasio Penyaluran Dana Hibah:** Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana ZIS yang dimiliki lembaga yang akan disalurkan untuk hibah, dimana golongan penerima hibah adalah golongan 8 (delapan) asnaf saja.

4. Tahapan Pelaksanaan Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara umum memberikan informasi mengenai aktivitas filantropi Islam yang dilakukan oleh lembaga amil zakat di Propinsi D.I. Yogyakarta. Subjek yang diteliti adalah seluruh Lembaga Amil Zakat di Propinsi DI Yogyakarta berdasarkan data Kemenag Yogyakarta tahun 2008 yang berjumlah 28 lembaga. Data yang berhasil dihimpun oleh peneliti berjumlah 16 lembaga.



Sumber: Data primer.

Grafik 1 Sebaran Kantor Lembaga Amil Zakat di Propinsi DI Yogyakarta

Dari data enam belas lembaga amil zakat yang berhasil dihimpun tersebut di atas, yang paling banyak terdapat di Wilayah Kota Yogyakarta.

1. Aspek Manajemen Internal

Berdasarkan perspektif manajemen internal, secara umum terlihat bahwa semua lembaga zakat yang ada telah memiliki komitmen untuk menjalankan aktivitasnya sesuai standar manajemen dan hukum yang berlaku. Secara umum di dalam implementasinya terdapat derajat yang bervariasi sesuai dengan kapabilitas masing-masing lembaga. Secara rinci aspek manajemen internal lembaga pengumpul zakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Manajemen Internal Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat	Manajemen Internal			
	Badan Hukum	AD/ART	Roadmap Program Tahunan	Rapat Kerja Tahunan
BAZNAS Provinsi DI Yogyakarta	√	√	√	√
BAZNAS Kota Yogyakarta	√	√	√	√
BAZ Kabupaten Bantul	√	√	√	√
BAZDA Kabupaten Gunungkidul	√	√	×	×
BAZDA Kabupaten Kulonprogo	√	√	√	√
Baitul Mal Al-Kautsar	√	√	√	√
Dompot Dhuafa Jogja	√	√	√	√
DPU-DT	√	√	√	√
LAZIS Masjid Syuhada	√	√	√	√
LAZIS Muhammadiyah PWM Yogyakarta	√	√	√	√
LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU)	√	√	√	√
LAZIS NU	√	√	×	√
LAZIS UII	√	×	√	√
Lambung Zakat Indonesia	√	√	√	√
Portal Infaq	√	√	√	√
Rumah Zakat	√	√	√	√

Sumber: Data primer.

2. Aspek Fundraising

Dalam pengelolaan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pengumpul zakat juga mempunyai variasi yang berbeda-beda. Mengingat arti pentingnya lembaga khusus yang menangani *fundraising* maka di setiap lembaga pengumpul zakat mempunyai divisi tersendiri yang secara khusus bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Terdapat 9 OPZ yang mempunyai divisi khusus dan 6 OPZ yang mendukung anggaran khusus untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Ditinjau dari aspek pengumpulan dana yang menjadi strategi fundraising, ditunjukkan dalam tabel berikut:

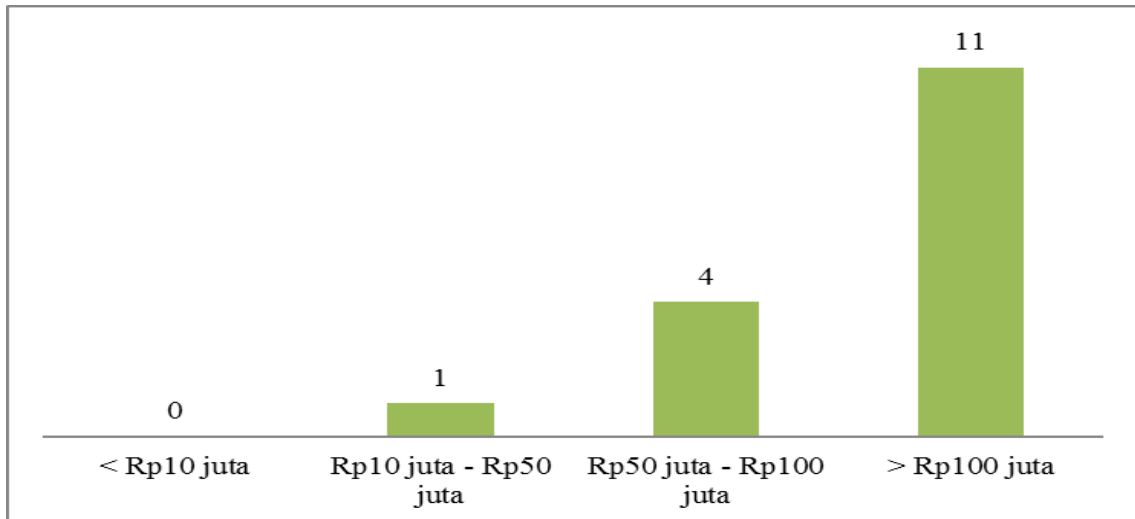
Tabel 4: Jenis Zakat yang Dihimpun Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat	Program Penghimpunan Dana					
	Zakat Fitrah	Zakat Mal	Zakat Profesi	Infaq & Sedekah	Wakaf	Lainnya
BAZNAS Provinsi DI Yogyakarta	×	×	√	×	×	×
BAZNAS Kota Yogyakarta	×	×	√	√	×	×
BAZ Kabupaten Bantul	×	×	√	×	×	×
BAZDA Kabupaten Gunungkidul	×	×	√	×	×	×
BAZDA Kabupaten Kulonprogo	×	×	√	√	×	×
Baitul Mal Al-Kautsar	√	√	√	√	√	×
Dompot Dhuafa Jogja	√	√	√	√	√	×
DPU-DT	√	√	√	√	√	×
LAZIS Masjid Syuhada	√	√	√	√	√	×
LAZIS Muhammadiyah PWM Yogyakarta	√	√	√	√	×	×
LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU)	×	√	√	√	√	×
LAZIS NU	√	√	√	√	×	×
LAZIS UII	×	×	√	×	×	×
Lambung Zakat Indonesia	√	√	√	√	×	×
Portal Infaq	√	√	√	√	√	×
Rumah Zakat	√	√	√	√	√	×

Sumber: Data primer.

3. Pentasarufan Dana ZIS

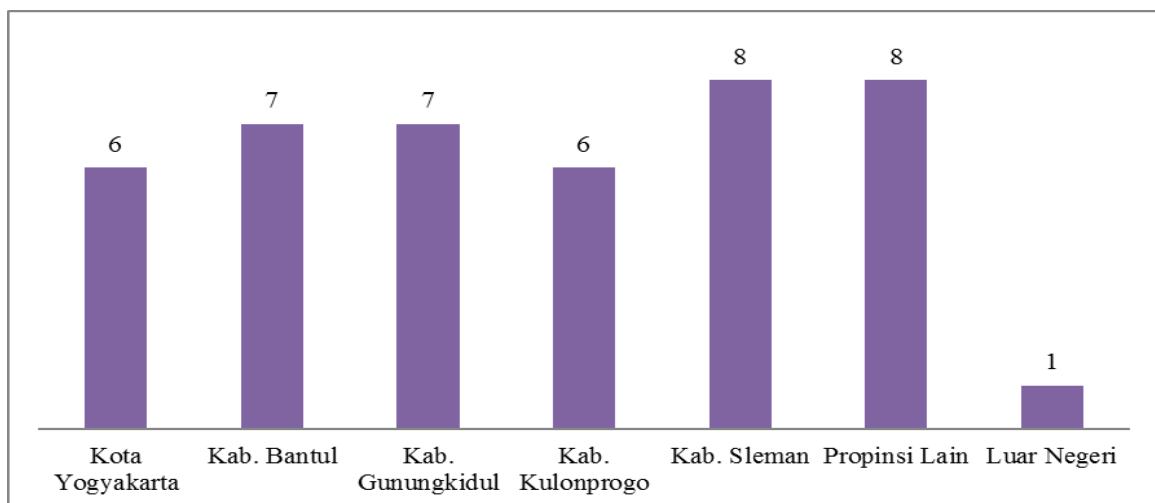
Setelah dana terkumpul dari berbagai sumber pemasukan oleh lembaga zakat maka dalam pentasarufan harus memenuhi 8 asnaf. Melalui kegiatan pentasarufan dana yang terkumpul menjadi sarana implementasi redistribusi kekayaan yang akhirnya mampu mengurangi kemiskinan di tengah masyarakat. Besaran dana yang disalurkan dari 16 lembaga pengumpul zakat besarnya sangat bervariasi dan disajikan dalam grafik berikut:



Sumber: Data primer

Grafik 2: Jumlah Dana yang Disalurkan Lembaga Amil Zakat Setiap Tahun

Adapun sebaran penyaluran zakat yang dilakukan OPZ mencakup tidak hanya di wilayah Propinsi DIY melainkan juga di luar Propinsi DIY. Secara rinci sebaran penyaluran zakat berdasarkan wilayah kabupaten adalah sebagai berikut:



Sumber: Data primer.

Grafik 3: Jumlah Lembaga Amil Zakat yang Menyalurkan Dana Berdasarkan Wilayah

4. Pola Pengawasan dan Transparansi

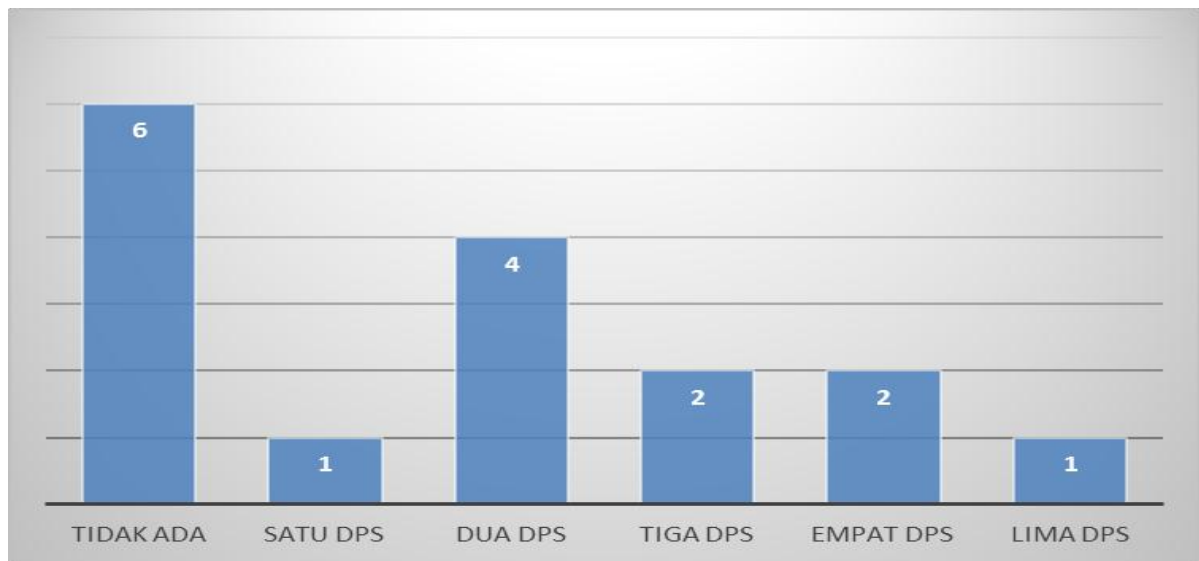
Dalam upaya mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas lembaga OPZ secara berkala mempublikasikan laporan keuangan. Melalui kegiatan tersebut akan mendorong para Muzaki menjadi percaya kepada lembaga pengumpul ZIS yang pada gilirannya lembaga OPS menjadi tumbuh dan berkembang. Secara rinci publikasi laporan keuangan yang dilakukan lembaga OPZ di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Publikasi Laporan Keuangan oleh Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat	Publikasi Laporan Keuangan			
	Sebulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
BAZNAS Provinsi DI Yogyakarta	√	×	×	√
BAZNAS Kota Yogyakarta	√	×	×	√
BAZ Kabupaten Bantul	√	×	×	√
BAZDA Kabupaten Gunungkidul	√	×	×	√
BAZDA Kabupaten Kulonprogo	√	×	×	√
Baitul Mal Al-Kautsar	√	×	×	√
Dompot Dhuafa Jogja	×	×	×	√
DPU-DT	√	×	×	√
LAZIS Masjid Syuhada	×	√	×	√
LAZIS Muhammadiyah PWM Yogyakarta	√	×	×	√
LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU)	√	×	×	√
LAZIS NU	×	√	×	√
LAZIS UII	×	×	×	√
Lambung Zakat Indonesia	×	√	×	√
Portal Infaq	×	×	×	√
Rumah Zakat	√	×	×	√

Sumber: Data primer.

Untuk mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan oleh para OPZ didukung adanya lembaga pengawas yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua lembaga amil zakat memiliki dewan pengawas syariah sebagai bagian penting dari struktur manajemen. Secara rinci keberadaan DPS dalam lembaga OPZ disajikan dalam grafik berikut:



Sumber: Data primer

Grafik 4: Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Amil Zakat

KESIMPULAN

1. Secara umum lembaga zakat di D.I. Yogyakarta, yang berkategori BAZ maupun LAZ telah melaksanakan standar manajemen internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kapabilitas masing-masing lembaga. Pada umumnya BAZ dan LAZ yang berada di lembaga tertentu cenderung lebih mengandalkan pada pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum lebih cenderung mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga dalam menarik minat muzakki untuk membayarkan zakatnya ke LAZ. Hal ini terjadi karena *nature* dari BAZ dan LAZ yang memang berbeda.
2. Fundrising paling banyak nilai nominalnya untuk wilayah D.I.Y diperoleh oleh Rumah Zakat yakni sekitar 5 Milyar per tahun. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap brand Rumah Zakat dan kreativitas program yang dijalankan. Sedangkan umumnya untuk manajemen dan distribusi dana zakat, BAZ maupun LAZ mendistribusikan dana zakat untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman *qordhul hasan* atau modal bergulir yang berbentuk permanen, artinya hanya diberikan kepada satu lembaga atau orang untuk jangka waktu lama. Apabila ditinjau dari jenis kegiatan pendistribusian nampak bahwa yang dijadikan program unggulan untuk menarik simpati *muzakki* adalah melalui penonjolan akuntabilitas pendistribusian zakat di bidang-bidang yang populer di mata masyarakat. Ini bisa dibuktikan dari lebih intensif dan fokusnya penyebaran informasi program

pendistribusian zakat yang menggambarkan kegiatan-kegiatan tadi di profil dan buletin-buletinnya.

3. BAZ dan LAZ mengalokasikan dana zakat yang terkumpul untuk golongan *fisabilillah* dan dana *amil* sendiri dengan porsi yang lebih kecil. Alokasi untuk *amil* di LAZ biasanya mendekati 12,5 %, hal ini dapat dimaklumi dengan sifat LAZ yang independen, dan harus mandiri. Persentase alokasi itu sendiri menurut para ahli hukum Islam dibenarkan selama tidak melebihi porsi 12,5 %.
4. Berdasarkan sisi akuntabilitas, pendistribusian dana zakat dari sisi sifat penyalurannya adalah baku atau sesuai program, disalurkan secara hibah, dan bentuk kebutuhannya adalah konsumtif maupun produktif. Semua aktivitas diarahkan pada pelaksanaan program sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup BAZ atau LAZ, dana zakat harus segera disalurkan, sehingga rentang ruang lingkup pendistribusian akan meluas ke sisi regional. Akuntabilitas dalam konteks ini berdimensi vertikal maupun horizontal, yakni secara moral kepada Allah SWT, *muzakki*, masyarakat luas dan dewan penasihat, dan juga memenuhi aspek akuntabilitas langsung kepada kebijakan pimpinan lembaga.
5. Secara umum LAZ dan BAZ sudah mempraktikkan akuntabilitas secara menyeluruh baik dalam konteks *habluminallah* maupun *habluminannas* dalam tatarannya sebagai kantor cabang dengan wewenang yang terbatas dibandingkan dengan kantor pusat. Bidang akuntabilitas yang mendominasi adalah bidang sosial-pendidikan dalam hal program-program yang dibuat dan bidang ekonomi dalam hal transparansi laporan penggunaan dana baik yang dilakukan secara bulanan, tri wulanan, semesteran, dan tahunan.
6. Aspek akuntabilitas dari sisi syariah yang dibuktikan di antaranya dengan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah), menunjukkan bahwa beberapa LAZ dan BAZ tidak memiliki DPS. Padahal sebagai lembaga ekonomi Islam harus memiliki DPS.

KENDALA PENELITIAN

1. Kendala dalam pelaksanaan penelitian khususnya dalam pengumpulan data yakni database LAZ yang berasal dari sumber Kemenag tidak valid, dalam arti belum menggambarkan kenyataan di lapangan. Di lapangan ditemukan lembaga zakat yang telah beralih fungsi dan peran, tetapi masih tercatat sebagai lembaga zakat di data Kemenag. Di sisi lain, terdapat beberapa LAZ yang tidak bersedia mengisi kuisioner dengan berbagai alasan. Terdapat juga LAZ yang prosedur permohonan datanya berlapis sehingga menyulitkan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Kesulitan mendapatkan data dari LAZ Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dikarenakan prosedur berlapis yang menjadikan peneliti kesulitan untuk memperoleh data, khususnya data keuangan. Data keuangan diisikan oleh bagian Keuangan namun hingga waktu yang disepakati, data belum juga terisi dan peneliti tidak memiliki kontak person langsung responden (bagian keuangan).
3. Pengelola LAZIS Dompot Shalahudin adalah mahasiswa yang direkrut secara periodik. Peneliti tidak berhasil menemui pengurus LAZ dikarenakan informan yang ditemui tidak mengenal pengurus baru LAZIS, sehingga kuisisioner yang dititipkan pun tidak dapat terlacak keberadaannya. Peneliti beberapa kali melacak kontak pengurus, namun data yang diperoleh selalu berbeda sehingga peneliti memutuskan untuk mengeliminir LAZIS Dompot Shalahudin.
4. UPZ ESQ semenjak tahun 2011 telah berganti nama menjadi Lembaga Kemanusiaan ESQ (LM ESQ) yang fokus pada program kebencanaan sehingga responden tidak bersedia untuk mengisi kuisisioner karena sudah tidak lagi menghimpun ZISWAF dari mustahik, melainkan hanya infak kebencanaan.
5. LAZIS Perkasa, LAZIS Bina Umat dan Lazis Dewan Dakwah Indonesia tidak bersedia mengisi. Sedangkan pada LAZIS Al Falah dan BAZ Kabupaten Sleman kuisisioner telah terdistribusikan, namun peneliti tidak berhasil mengkontak kembali pengurus yang bersangkutan dikarenakan kondisi kantor LAZ kosong dan dihubungi via telepon dan sms tidak direpon. Sedangkan database Baitul Maal Hidayatullah, LAZIS Rumah Zakat Taj Quro, LAZIS Tazkiya dan LAZIS Amratani tidak valid.

DAFTAR PUSTAKA

Forum Zakat. 2012. Daftar Amil Forum Zakat. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 dari <http://www.forumzakat.net/index.php?act=zis&hal=10>.

Hafidhuddin, Didin. 2012. "Baznas: Potensi Zakat Rp19 Triliun". dikutip dari <http://www.antara.co.id/arc/2009/3/2/baznas-potensi-zakat-rp19-triliun/> accessed 23 Maret 2012.

Riduwan. 2005. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula. Alfabeta : Bandung

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3E: Jakarta.

**TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN
LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang)**

Retno Widhiyaningrum, Widhy Setyowati
Universitas STIKUBANK Semarang
Email: Widhiya51@gmail.com, widhisetyowati61@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman, pengetahuan dan skeptisisme profesional untuk tanggung jawab auditor dalam mendeteksi laporan keuangan penipuan. Penelitian ini dilakukan pada kantor akuntan publik di wilayah Semarang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang berada di kantor akuntan publik di wilayah Semarang. Pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah kuesioner dengan analisis data menggunakan model regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan tidak mempengaruhi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi laporan keuangan palsu, sedangkan independensi, kompetensi dan skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan.

Kata kunci: Kemerdekaan, Kompetensi, Pengalaman, Pengetahuan, Profesional Skeptisisme dan Tanggung Jawab Of The Auditor Dalam Mendeteksi Laporan Keuangan Penipuan.

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of the independence, competence, experience, knowledge and professional skepticism to the responsibilities of the auditor in detecting fraudulent financial statements. This research was conducted on a public accounting firm in the area of Semarang.

The population in this study are all auditors who are in the public accounting firm in the area of Semarang. Sampling using convenience sampling method. Primary data collection method used is the questionnaire with the data analysis using multiple linear regression model.

The results showed that the experience and knowledge not affect the responsibilities of the auditor in detecting fraudulent financial statements, while the independence, competence and professional skepticism significant positive effect on the auditor's responsibility to detect fraud in the financial statements.

Keywords : Independence, Competence, Experience, Knowledge, Professional Skepticism and Responsibilities Of The Auditor In Detecting Fraudulent Financial Statements.

PENDAHULUAN

Akuntan publik merupakan akuntan yang telah mendapat izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik, sedangkan Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang. Seseorang yang bekerja pada akuntan publik disebut dengan seorang auditor. Auditor itu sendiri merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan pada suatu perusahaan. Seorang auditor mempunyai tanggung jawab untuk bertugas melakukan pengauditan atas panyajian laporan keuangan

manajemen perusahaan. Auditor yang melakukan suatu pengauditan atas laporan keuangan juga bertugas untuk menilai suatu kewajaran atas laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan, tidak hanya dalam hal kewajaran atas laporan keuangan saja tetapi, juga perlu memastikan bahwa apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum dan terbebas dari salah saji yang material, salah saji tersebut bisa terjadi karena tindak kecurangan (*fraud*) maupun kekeliruan (*errors*). Kasus manipulasi pembukuan yang terjadi di Indonesia misalnya adalah kasus mark up yang dilakukan PT. Kimia Farma dan kasus laporan keuangan ganda yang dimiliki oleh Bank Lippo. Kesalahan auditor dalam kedua kasus ini diduga karena auditor terlambat menyadari dan melaporkan ketidakberesan yang telah dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan (Nasution, 2012).

Sesuai dengan profesi yang dilakukannya, seorang auditor mempunyai kode etik akuntan publik yang berlaku di Indonesia yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh auditor itu sendiri yaitu dengan bertanggung jawab sebagai seorang auditor. Adnyani (2014) tanggung jawab auditor adalah merencanakan dan menjalankan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji yang material, yang di sebabkan oleh kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan baik yang disengaja maupun tidak.

Kurangnya tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor, misalnya kurangnya sikap independensi, kompetensi, pengetahuan auditor, pengalaman auditor dan sikap skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor.

Seorang auditor wajib mempunyai sikap independen yang berarti mempunyai sikap kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta, tidak tergantung oleh orang lain, dan tidak memihak pada diri auditor dalam menyatakan pendapatnya yang ditemui dalam auditnya. Menurut Adnyani (2014) mendefinisikan independensi sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga diartikan sebagai sikap yang tidak bias. Independensi auditor terbagi atas dua yaitu independensi dalam kenyataan (*Independent in fact*) dan independensi dalam penampilan (*Independent in appearance*). Hubungan antara independensi auditor terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan adalah seorang auditor itu sendiri dapat mempertahankan independensinya dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan, seorang auditor yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun (Setyaningrum, 2010 dalam Aulia, 2013). Selain sikap independensi, kompetensi auditor juga harus dimiliki auditor dalam tanggung jawabnya untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Widiyastuti (2009) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten (mempunyai keahlian) adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah membuat kesalahan. Apabila seorang auditor tersebut tidak memiliki kompetensi dalam hal mendeteksi sebuah laporan keuangan berarti tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang auditor tersebut kurang, kemungkinan seorang auditor tersebut tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya dan akan berpengaruh pada hasil yang telah di auditnya. Oleh karena itu auditor harus mempunyai sikap yang kompeten, ahli secara profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaanya sebagai auditor, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Selain sikap independensi dan kompetensi, faktor yang berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan adalah pengalaman. Pengalaman yang dimiliki oleh auditor sangatlah penting dalam hal mendeteksi sebuah kecurangan ataupun kekeliruan laporan keuangan (Adnyani, 2014) menyatakan pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku, baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang pada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.

Banyaknya pengalaman yang dimiliki auditor akan lebih mampu dalam mengungkapkan kecurangan ataupun kekeliruan laporan keuangan yang disebabkan dari adanya salah saji material. Oleh karena itu banyaknya pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan mempengaruhi seberapa bertanggung jawabkah auditor tersebut dalam melaksanakan dan menjalankan tugas pemeriksaanya yang ditinjau dari tingkat pengalaman yang dimilikinya baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan.

Selain pengalaman, pengetahuan seorang auditor juga berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Seorang auditor yang melaksanakan audit atas laporan keuangan, harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup memadai untuk memungkinkan auditor mengidentifikasi laporan keuangan yang mungkin berdampak pada laporan keuangan yang akan diauditnya.

Pengetahuan akuntan publik digunakan sebagai salah satu kunci keefektifan kerja. Pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Noviyani, 2002 dalam Herawaty, 2009). Seorang akuntan publik yang memiliki banyak pengetahuan akan lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya.

Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya (Herawaty, 2009). Seorang auditor yang memiliki banyak pengetahuan tentang kecurangan dan kekeliruan akan lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berhubungan dengan tanggung jawabnya dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh auditor maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawabnya dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Sikap skeptisme profesional juga merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi tanggung jawab seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Skeptisme profesional diartikan sebagai sikap yang tidak mudah percaya akan bukti audit yang disajikan manajemen, sikap yang selalu mempertanyakan dan evaluasi bukti audit secara kritis. Sikap skeptisme profesional sangat penting untuk dimiliki oleh auditor guna mendapatkan informasi yang lebih kuat, yang akan dijadikan sebagai dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan (Adnyani, 2014).

Tanggung jawab auditor dalam hal ini merupakan tanggung jawab pada sikap skeptisme yang dimiliki oleh auditor itu sendiri. Seorang auditor yang mempunyai skeptisme yang tinggi dalam mengaudit laporan keuangan maka tanggung jawabnya semakin tinggi pula, jadi dengan adanya sikap skeptisme yang tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan akan semakin kecil. Sebaliknya apabila skeptisme profesional auditor itu sendiri rendah maka tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan tersebut rendah dan dapat dikatakan bahwa auditor tersebut tidak mampu dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, jadi kemungkinan kecurangan yang ada tidak di telitti secara seksama karena rendahnya sikap skeptisme profesional auditor tersebut.

Penelitian sebelumnya tentang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan menemukan bahwa independensi yang menghasilkan pengaruh positif dilakukan oleh beberapa peneliti seperti oleh penelitian Adnyani, dkk (2014), Anggriawan (2014), Fuad (2015), Widiyastuti (2009), dan Pangestika, dkk (2011), sedangkan yang menghasilkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh peneliti Agustina (2013) dan Setiadi (2015).

Demikian juga pada variabel lain menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh penelitian Fuad (2014) dan Agustina (2013).

Penelitian sebelumnya yang menghasilkan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti oleh penelitian Adnyani, dkk (2014), Anggriawan (2014), Nasution (2012), dan Agustina (2013), sedangkan penelitian yang menghasilkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh penelitian Setiadi (2015), Harjanti (2012), dan Supriyanto (2014).

Penelitian yang menghasilkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh peneliti seperti oleh penelitian Agustina (2013), Harjanti (2012), dan Setiadi (2015). Demikian variabel lain yang menghasilkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh penelitian Adnyani (2014), Anggriawan (2014), Nasution (2012), dan Aulia (2013)

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Adnyani, dkk (2014) pengaruh Skeptisme profesional, independensi dan pengalaman auditor terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini adalah penulis menambahkan dua variabel yaitu kompetensi dan pengetahuan auditor, dengan menggunakan referensi penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian ini juga terdapat pada studi kasus yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Adnyani, dkk (2014) melakukan penelitian studi kasus pada KAP wilayah Bali, sedangkan penelitian ini dilakukan pada studi kasus KAP di Kota Semarang, dengan studi kasus yang berbeda apakah akan memperoleh hasil yang sama atau hasil yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada KAP Di Kota Semarang)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency theory menjelaskan hubungan antara agen (pihak manajemen suatu perusahaan) dengan pemilik (principal). Pemilik merupakan pihak yang memberikan amanat kepada agen untuk melakukan suatu jasa atas nama principal, sementara agen adalah pihak yang diberi mandat. Agen bertindak sebagai pihak yang berwenang mengambil keputusan, sedangkan pihak principal ialah yang mengevaluasi informasi. Namun *agency theory* juga mengenal adanya *asymmetric information* yaitu adanya ketidakseimbangan dalam proporsi informasi

yang dikonsumsi oleh kedua belah pihak. Asymmetric Information ini dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

1. Moral hazard yaitu pada saat pihak agen menyembunyikan informasi yang dimilikinya, dengan tujuan agar informasi tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan utilitas agen.
2. Adverse selection yaitu pada saat pihak agen tidak mengetahui bagaimana membuat suatu kebijakan dari informasi yang dimilikinya (Rahman, 2011).

Tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*). Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*).

Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Seorang auditor dalam menjalankan profesinya sebagai auditor telah diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia. Auditor memiliki tanggungjawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan telah terbebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan (Adnyani, dkk, 2014).

Tanggungjawab tersebut tentunya dalam rangka untuk menilai kewajaran laporan keuangan dari salah saji secara material yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, standar auditing dan kode etik akuntan. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap etika profesi seperti yang diisyaratkan dalam standar auditing dan kode etik akuntan berarti auditor kurang menunjukkan atau tidak memiliki idealisme yaitu sebagai sikap yang dependen dan tidak menghindarkan terjadi berbagai kepentingan.

Independensi

Menurut Agoes (2012) independensi adalah sikap yang tidak mudah dipengaruhi dan sikap yang tidak memihak kepada kepentingan orang lain dalam mengambil keputusan untuk mempertahankan kebebasan dalam menyatakan pendapatnya. Independensi bagi auditor terbagi menjadi 3 jenis independensi yaitu independensi dalam penampilan (*Independent In Appearance*), independensi dalam kenyataan (*Independent In Fact*), dan independensi dalam pemikiran (*Independent In Mind*).

Seorang auditor yang mampu mempertahankan sikap independensi merupakan seorang auditor yang mampu menjunjung tinggi integritas dalam dirinya sendiri, karena dalam melaksanakan pekerjaannya seorang auditor diharapkan mampu mempertahankan

independensinya, yang berarti seorang auditor tersebut dituntut untuk selalu bersikap jujur, tidak dipengaruhi oleh orang lain dan tidak memihak kepada siapapun agar mendapat kepercayaan dari masyarakat lain.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fuad (2015) yang menyatakan bahwa, semakin tinggi independen auditor maka semakin tinggi tanggung jawab mereka dalam mendeteksi kecurangan (fraud), karena tidak terikat dengan kepentingan kecuali melakukan auditing sesuai dengan standar dan prosedur audit yang berlaku. Penelitian juga dilakukan oleh Adnyani, dkk (2014) bahwa apabila independensi mampu dipertahankan maka tanggung jawab auditor akan meningkat dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang disebabkan karena salah saji material. Penelitian yang dilakukan Widiyastuti dan Pamudji (2009), Pangestika dkk, (2011) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan independensi, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan menjadi lebih baik, dalam kata lain auditor dalam mengambil keputusan tidak dipengaruhi pihak lain. Oleh karena itu penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Independensi berpengaruh positif terhadap tanggungjawab auditor mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Kompetensi

Standar umum pertama (SA seksi 210) dalam Agoes (2012) menyebutkan audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang lebih memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.

Auditor yang mempunyai kompetensi yang tinggi dalam memeriksa laporan keuangan akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya, oleh karena itu auditor yang menggunakan kompetensi atau keahlian profesionalnya dalam proses mengaudit mereka akan lebih ahli dalam menemukan kecurangan ataupun kekeliruan yang disengaja atau yang tidak disengaja dalam laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fuad (2015) menunjukkan kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor, bahwa semakin tinggi kompetensi auditor maka semakin tinggi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Pengalaman Audit

Pengalaman audit adalah suatu proses pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh auditor selama melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditanganinya (Suraida, 2005 dalam Nasution, 2012).

Seorang auditor yang mempunyai pengalaman yang tinggi ia akan lebih tau tentang teknik-teknik pada saat proses mengaudit laporan keuangan perusahaan. Auditor yang memiliki tingkat pengalaman yang berbeda maka akan berbeda pula tingkat pengetahuan yang dimiliki dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, ketika seorang auditor tersebut mempunyai pengalaman yang lebih banyak maka mereka akan lebih mempunyai rasa bertanggung jawab pada pekerjaannya, mereka akan lebih mampu mencari dan menganalisis penyebab munculnya salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan yang di sengaja ataupun tidak disengaja.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Adnyani, dkk (2014) seorang auditor apabila memiliki pengalaman yang cukup, maka akan menunjang kualitas audit yang dihasilkan selain itu dengan pengalaman yang dimiliki, seorang auditor akan terbiasa menghadapi masalah pekerjaannya. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, maka tanggung jawabnya semakin tinggi. Oleh karena itu penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pengalaman berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Pengetahuan Audit

Pengetahuan auditor merupakan pengetahuan yang bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokakarya serta pengarahan dari auditor seniornya kepada auditor juniornya. Seorang auditor yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya (Herawaty dan Susanto, 2009).

Pengetahuan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan perlu dimiliki oleh seorang auditor. Seorang auditor yang memiliki banyak pengetahuan akan lebih mampu dalam membedakan antara kecurangan dan kekeliruan yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Pengetahuan yang cukup akan membuat auditor lebih paham dan ahli dalam menentukan eksistensi kecurangan laporan keuangan, oleh karena itu pengetahuan yang tinggi akan

membuat seorang auditor lebih bertanggung jawab dalam menentukan pengungkapan atas penyimpangan laporan keuangan pada saat mereka melaksanakan auditnya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2015) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan. Semakin tinggi pengetahuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan maka semakin tinggi pula tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pengetahuan auditor berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor mendeteksi kecurangan laporan keuangan

Skeptisme Profesional

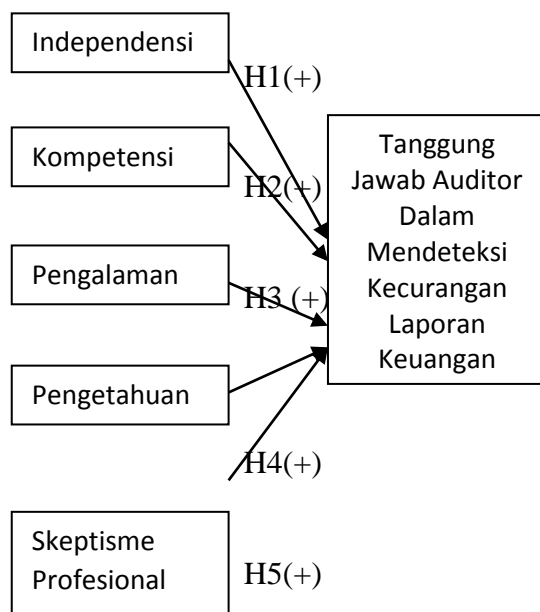
Menurut Adnyani, dkk (2014) skeptisme profesional diartikan sebagai sikap yang tidak mudah dipercaya akan bukti audit yang disajikan manajemen, sikap yang selalu mempertanyakan, mencurigai dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Skeptisme profesional sangat penting untuk dimiliki oleh auditor guna mendapatkan informasi yang kuat, untuk dijadikan dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan.

Rendahnya skeptisme auditor akan menyebabkan auditor tidak mampu untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan karena auditor percaya begitu saja terhadap bukti yang di auditnya. Berbeda dengan seorang auditor yang mempunyai skeptisme profesional yang tinggi, mereka akan mampu untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan, mereka yang mempunyai skeptisme yang tinggi akan dapat mengevaluasi bukti audit secara optimal karena dengan sikapnya yang selalu mempertanyakan bukti audit secara kritis. Auditor yang mampu mempertahankan skeptisme profesionalnya maka semakin tinggi tanggung jawabnya dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, mereka akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan atas laporan yang diauditnya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adnyani, dkk (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi skeptisme profesional auditor, maka semakin tinggi tanggung jawabnya dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor mendeteksi kecurangan laporan keuangan

KERANGKA PEMIKIRAN



METODELOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada KAP yang berada di Semarang. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. *Convenience sampling* berarti unit sampling yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Aulia, 2013). Metode *convenience sampling* digunakan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara dimana pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner.

PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Variabel Independensi, memiliki KMO 0.811 dengan sin

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .		.811
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	372.488
	df	66
	Sig.	.000

Variabel Kompetensi

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .		.798
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	182.064
	df	15
	Sig.	.000

Variabel Pengalaman Auditor

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .		.903
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	347.884
	df	36
	Sig.	.000

Variabel Pengetahuan Auditor

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .		.850
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	184.620
	df	15
	Sig.	.000

Variabel Skeptisme Profesional

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .		.838
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	302.432
	df	45
	Sig.	.000

Berdasarkan tabel diatas hasil uji validitas yang diperoleh dari setiap variabel mempunyai nilai lebih dari 0.5 sehingga menunjukkan bahwa jumlah sampel pada variabel independensi, kompetensi, pengalaman, pengetahuan dan skeptisme profesional dikatakan cukup. Di samping itu dilihat dari nilai Bartlett's Test menunjukkan nilai signifikan 0.000.

Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas ini digunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Nunnaly, 1994 dalam Imam Ghozali, 2011).

Variabel	Cronbach Alpha
Independensi	0,889
Kompetensi	0,871
Pengalaman	0,927
Pengetahuan	0,886
Skeptisme Profesional	0,881
Tanggungjawab	0.799

Berdasarkan Tabel uji reliabilitas hasil uji reliabilitas diperoleh hasil nilai cronbach's lebih besar dari 0,7 untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini, Hal ini menunjukkan bahwa variabel independensi, kompetensi, pengalaman, pengetahuan, skeptisme profesional dan tanggung jawab auditor tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.83046137
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.071
	Negative	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		.776
Asymp. Sig. (2-tailed)		.584

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai sig = 0.584 \geq 0.05, maka dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikan $>$ 0.05 artinya data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	Independensi	.757	.286	.161	.334	2.991
	Kompetensi	.731	.297	.168	.395	2.535
	Pengalaman	.654	.206	.114	.471	2.125
	Pengetahuan	.427	.070	.038	.650	1.539
	Skeptisme Profesional	.683	.327	.186	.535	1.871

a. Dependent Variable: Tanggung Jawab

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian data yang dapat dilihat pada tabel setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance $>$ 0,1 dan nilai VIF $<$ 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolenieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.421	.553		4.375	.000
	Independensi	-.002	.017	-.021	-.103	.918
	Kompetensi	-.047	.025	-.352	-1.882	.065
	Pengalaman	-.029	.016	-.313	-1.831	.073
	Pengetahuan	.010	.017	.090	.618	.539
	Skeptisme Profesional	.009	.016	.091	.568	.572

a. Dependent Variable: AbRes

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian data menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai sig $\geq 0,05$. Jadi tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abres. Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya di atas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heterokedastisitas.

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman, pengetahuan dan skeptisme profesional terhadap tanggung jawab.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.349	1.208		3.601	.001
	Independensi	.082	.038	.279	2.153	.036
	Kompetensi	.122	.054	.268	2.247	.029
	Pengalaman	.053	.035	.166	1.521	.134
	Pengetahuan	.019	.037	.047	.505	.615
	Skeptisme Profesional	.085	.034	.255	2.493	.016

a. Dependent Variable: Tanggung Jawab

Berdasarkan diatas hasil pengujian data menunjukkan bahwa koefisien regresi yang diperoleh yaitu : $Y = 0,279 X_1 + 0,269 X_2 + 0,166 X_3 + 0,047X_4 + 0,255X_5$.

Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.792	5	19.158	25.343	.000 ^a
	Residual	39.311	52	.756		
	Total	135.103	57			

a. Predictors: (Constant), Skeptisme Profesional, Pengetahuan, Kompetensi, Pengalaman, Independensi

b. Dependent Variable: Tanggung Jawab

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian data Hasil uji F diperoleh Fhitung = 25.343 dan nilai p value = 0,000. Karena nilai signifikansi < 0,05, dapat disimpulkan bahwa variable independensi, kompetensi, pengalaman, pengetahuan dan skeptisme professional sebagai variabel independen berpengaruh terhadap tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842 ^a	.709	.681	.86947

a. Predictors: (Constant), Skeptisme Profesional, Pengetahuan, Kompetensi, Pengalaman, Independensi

b. Dependent Variable: Tanggung Jawab

Berdasarkan tabel atas hasil pengujian data diperoleh nilai koefisien determinasi simultan (R²) adjusted R square sebesar 0.681, dengan demikian menunjukkan bahwa independensi, kompetensi, pengalaman, pengetahuan dan skeptisme professional sebagai variabel independen berpengaruh terhadap tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan nilai sebesar 68.10% dan sisanya 31.9% dari kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t juga digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen yang diuji dengan tingkat signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bebas berpengaruh terhadap variable terikat.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.349	1.208		3.601	.001
	Independensi	.082	.038	.279	2.153	.036
	Kompetensi	.122	.054	.268	2.247	.029
	Pengalaman	.053	.035	.166	1.521	.134
	Pengetahuan	.019	.037	.047	.505	.615
	Skeptisme Profesional	.085	.034	.255	2.493	.016

a. Dependent Variable: Tanggung Jawab

Pengaruh independensi terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan

Variabel independensi menunjukkan nilai signifikansi 0.036 dengan diperoleh nilai t hitung sebesar 2.153. Karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 ($0,036 < 0,05$), maka Independensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka akan memiliki tanggung jawab yang tinggi sebagai auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Demikian pula sebaliknya seorang auditor yang memiliki independensi yang rendah maka akan memiliki tanggungjawab yang rendah pula sebagai auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh kompetensi terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan

Variabel kompetensi menunjukkan nilai signifikansi 0,029 dengan diperoleh nilai t hitung sebesar 2.247. Karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 ($0,029 < 0,05$), maka kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi maka akan memiliki tanggungjawab yang tinggi sebagai auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Demikian pula sebaliknya seorang auditor yang memiliki kompetensi yang rendah maka akan memiliki tanggung jawab yang rendah pula sebagai auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Pengalaman terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan

Variabel pengalaman menunjukkan nilai signifikansi 0,134 dengan diperoleh nilai t hitung sebesar 1.521. Karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 ($0,134 > 0,05$), maka pengalaman tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki pengalaman kerja yang banyak maupun sedikit tidak berpengaruh terhadap tanggung jawabnya dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan karena mereka mempunyai standar yang sama.

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2015) namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnyani dkk (2014) dengan hasil yang menyatakan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan.

Pengaruh Pengetahuan terhadap Tanggungjawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel pengetahuan menunjukkan nilai signifikansi 0,615 dengan diperoleh nilai t hitung sebesar 0.505. Karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 ($0,615 > 0,05$), maka pengetahuan tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan auditor yang tinggi maupun rendah tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan karena mereka sebagai auditor junior maupun senior mempunyai standar yang sama.

Pengaruh Pengetahuan terhadap Tanggungjawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel skeptisme profesional menunjukkan nilai signifikansi 0,016 dengan diperoleh nilai t hitung sebesar 2.493. Karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 ($0,016 < 0,05$), maka Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki skeptisme Profesional yang tinggi maka akan memiliki tanggungjawab yang tinggi sebagai auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Demikian pula sebaliknya seorang auditor yang memiliki

Skeptisme Profesional yang rendah maka akan memiliki tanggungjawab yang rendah pula sebagai auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa :

1. Independensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
3. Pengalaman tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
4. Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
5. Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
6. Independensi, kompetensi, pengalaman, pengetahuan dan skeptisme profesional secara bersama-sama berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

KETERBATASAN

1. Hasil uji koefisien determinasi bahwa pada nilai adjusted R square masih memperoleh nilai yang rendah, sehingga masih banyak variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian.
2. Peneliti memisahkan variabel kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang mempunyai arti tidak berbeda, yang seharusnya tidak ada pemisahan antara ketiga variabel tersebut.
3. Penelitian ini menggunakan metode convenience sampling sehingga data yang diperoleh tidak bisa di generalisasikan

SARAN

1. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi memang penting dalam sebuah tanggung jawab auditor mendeteksi kecurangan laporan keuangan, tetapi pengalaman dan pengetahuan tersebut jangan sampai disalah gunakan agar tetap menjaga integritas dalam diri auditor tersebut.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar tidak memisahkan antara variabel kompetensi, pengalaman dan pengetahuan karena ketiganya mempunyai arti yang tidak berbeda.
3. Untuk penelitian selanjutnya perlu memilih sampel yang kemudian di komparasikan berdasarkan jenjang tingkat auditor senior dan auditor junior misalnya menggunakan metode purposive sampling atau yang lainnya.
4. Untuk penelitian selanjutnya di harpakan pada pembuatan data usia responden untuk kuesioner yang disebar dibuat interval
5. Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan menggambarkan secara deskriptif variabel yang akan di teliti
6. Penelitian selanjutnya juga perlu memperluas objek penelitian, tidak hanya pada 1 Wilayah Kota Semarang saja misalnya pada KAP di Provinsi Jawa Timur atau Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Atmadja dan Herawati. 2014. Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Independensi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Tanggungjawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Dan Kekeliruan Laporan Keuangan. e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha .Jurusan Akuntansi Program S1. Vol.2 No. 1)
- Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik : Edisi keempat. Penerbit : Salemba empat. Jakarta.
- Agustin, Nindya. 2013. Pengaruh Independensi, Kompetensi , Pengalaman dan Pengetahuan Terhadap Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan: Studi Empiris pada KAP di Jawa Tengah.
- Amaliya, Nur Hasanah. 2013. Pengertian Audit Menurut Para Tokoh. (<http://nur-amaliyaaccounting.blogspot.com/2013/12.html>), diakses 10 Agustus 2015).
- Anggriawan, Eko Ferry. 2014. Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu Anggaran Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Fraud. Jurnal Nominal. Vol.3. No. 2)
- Aulia, Muhammad Yusuf. 2013. Pengaruh Pengalaman Audit, Independensi, dan Skeptisme Profesional Terhadap Pendeteksian Kecurangan. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Dan Stirbu, dkk. 2009. Fraud and Error. Auditor's Responsibility Levels. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica. Vol. 11 No. 1)

- Fuad, Khoirul. 2015. Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Prosedur Audit Terhadap Tanggungjawab Dalam Mendeteksi *Fraud*. ISSN 2085-4277. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>. Vol. 7 No.1. Maret 2015, pp 10-17)
- Ghozali, Imam, 2011, Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gutama, Wijayanti. 2015. Peranan Teori Akuntansi Dalam Mengatasi Munculnya Kecurangan Pelaporan Keuangan. (<http://www.academia.edu/10236269>), diakses 27 November 2015).
- Herawaty, Arleen dan Yulius Kurnia Susanto. 2009. Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik. JAAI Vol. 13 No. 2. Desember 2009 : 211-220)
- Nariya. 2012. Teori agensi. (<https://dukuntansi.wordpress.com/2012/01/13/>), diakses 27 November 2015.
- Nasution, Hafifah dan Fitriany. 2012. Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit Dan Tipe Kepribadian Terhadap Skeptisme Profesional Dan Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. Simposium Nasional Akuntansi 15. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat 20-23 Sept 2012.
- Pangestika, Widya, Taufeni Taufik dan Alfiati Silvi. 2014. Pengaruh Keahlian Profesional, Independensi, Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Pendeteksian Kecurangan. JOM FEKON. Vol. 1 No. 2)
- Rahman, Fatahul. 2011. Peran Manajemen dan tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. ISSN : 0216-6437. Jurnal Eksis. Vol. 7. No. 2. Agustus 2011; 1816-2000)
- Siregar, Irna Nadya. 2011. Pengaruh profesionalisme, Keahlian, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan Dan Adaptasi Sarbanes Oxley Act 2002 Section 404 Terhadap Pengungkapan Kecurangan.
- Widiyastuti, Marcellina dan Sugeng Pamudji. 2009. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*). <http://jurnal.unimus.ac.id>. Value Added, Vol. 5 No. 2. Maret 2009-Agustus 2009)
- Yunintasari, Herty Safitri. 2010. Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Upaya Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya *Fraud*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

ISBN: 978-602-60361-3-1
Yogyakarta, 30 November 2016

Zimbelman , Mark. F . 2014. Akuntansi Forensik : Edisi keempat. Penerbit : salemba empat.
Jakarta.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL MENURUT PP NO.
71 TAHUN 2010
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS)**

Zamrud Mirah Delima¹, Diah Ayu Susanti²

¹*Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus*

²*Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus*

Email: ¹*zamrudmirahdelima@gmail.com*

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya pada tahun 2015 masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (Cash Toward Accrual) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrual, padahal ketentuan untuk menerapkan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010 yaitu pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual (SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi) dengan penerapan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Selain itu penelitian ini akan memperdalam hasil penelitian sebelumnya. Jenis data adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner kepada 62 pegawai bagian keuangan atau bagian akuntansi seluruh dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Pengolahan data menggunakan model penelitian analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Variabel SDM dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan, tetapi teknologi informasi dan komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Komunikasi, SAP berbasis akrual

ABSTRACT

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus as one of the reporting entity, in presenting its financial statements in 2015 was based on PP No.24 of 2005 based CTA (Cash Toward accrual) and / or the Cash Based Towards Accrual, when the provisions for applying the SAP accrual-based PP No.71 th 2010 is the year 2015. This study aims to re-examine variables previous research on factors affecting the readiness of the implementation of accrual-based SAP (Human Resource, Organizational Commitment, Information and Communication Technology) with the implementation of the District Government Kudus. In addition this study will deepen the results of previous studies. This type of data is primary data. The sampling method using purposive sampling. Collecting data using a survey questionnaire to 62 employees of the financial part or parts of the entire accounting department at Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Processing data using a research model multiple linear regression analysis. The results showed that the Human Resources, Organizational Commitment, Information and Communication Technologies simultaneously positive effect on the readiness of the implementation of accrual-based SAP. Human Resource and Organizational Commitment partially positive significant, but the Information and Communication Technology partially have no effect on the readiness of the implementation of accrual-based SAP.

Keywords: Human Resources, Organizational Commitment, Information Technology, Communication, accrual-based SAP

PENDAHULUAN

Pada UU No 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) mengharuskan penerapan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010. Penerbitan PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual yang menandakan berakhirnya masa PP No. 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) ini diyakini mampu memberikan landasan bagi implementasi akuntansi pemerintahan yang lebih baik.

Pemerintah akan menerapkan SAP berbasis akrual yang akan diberlakukan penuh bagi semua Kementerian / Lembaga dan Pemerintahan Daerah pada 2015 (Tempo, 2010). Tetapi hal ini sulit diwujudkan melihat beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang belum siap untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara penuh. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Hasil Pemeriksaan Sementara (IHSP) oleh BPK . Tiga tahun setelah PP No. 71 Tahun 2010 disahkan masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika banyak pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia mampu mendapat opini WTP, maka dapat diasumsikan kewajiban untuk menerapkan basis akrual penuh pada tahun 2015 tidak akan menghadapi kendala yang berarti.

Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat memiliki tata kelola keuangan yang baik dan jelas serta menghasilkan pertanggungjawaban yang lebih cepat serta lengkap sesuai SAP, menurut Nazier (2009) menimbulkan banyak permasalahan. Beberapa permasalahan yaitu penyiapan infrastruktur sistem administrasi (sistem akuntansi, sistem administrasi aset, dan sistem teknologi informasi) dan penyiapan aparat yang berkualitas (*qualified*) untuk menjalankan regulasi baru tersebut. Untuk menunjukkan beratnya masalah ini dapat dilihat dari ketergantungan banyak daerah (kabupaten/kota) pada jasa konsultan untuk menyiapkan laporan keuangannya.

Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi (Simanjuntak dalam Ardiansyah, 2012). Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri yang merupakan penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi (*hardware* dan *software*) yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Aldiani (2009) juga berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya computer dan software akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan informasi yang

berkualitas. Perubahan pengelolaan keuangan negara yang lebih dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Selain ketiga faktor di atas juga diperlukan komunikasi yang berkesinambungan. Komunikasi harus dilakukan baik dengan pihak eksternal maupun dengan pihak internal, sehingga penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapainya diperlukan faktor –faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan. Maka, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar tingkat pengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian yang meneliti tentang faktor–faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya yaitu Indah (2008) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Aldiani (2009) meneliti tentang faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, dan Ardiansyah (2012) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP No.71 tahun 2010 pada KPPN Malang. Penelitian ini akan mengacu pada tiga penelitian terdahulu yaitu penelitian Indah (2008), Aldiani (2009), dan Ardiansyah (2012). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak seragam. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi objek penelitian yang berbeda.

Karena terdapat perbedaan hasil dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat pentingnya penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang masih menggunakan sistem akuntansi *cash toward accrual*, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?
2. Apakah komitmen organisasi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?

3. Apakah teknologi informasi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?
4. Apakah tata cara komunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Darise (2009) menyatakan bahwa sistem Akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donator, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

2. Laporan Keuangan Daerah

Tanjung (2012) menyatakan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar. SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang–undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrua tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrua dimaksud tercantum dalam Lampiran I PP No.71 Tahun 2010.

4. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Nawawi dalam Aldiani (2009) ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
3. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi

akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri,2010).

Menurut Tjiptoherijanto dalam Indriasari (2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

5. Komitmen Organisasi

Luthans dalam Aldiani (2009) menyatakan bahwa komitmen organisasi sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Menurut Robbins (2006) komitmen organisasi adalah keadaan dimana pegawai mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sarannya serta berharap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat Pemerintah Daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.

6. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Haryanto,2012). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (internet, intranet), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., dalam Indriasari,2008).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar.

Teknologi informasi memegang peranan cukup penting dalam suatu organisasi. Teknologi informasi ini diharapkan sebagai suatu sistem informasi yang dapat mendukung tercapainya keefektifan dan keefisienan organisasi.

7. Komunikasi

Menurut Edwar dalam Herlina (2013) ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses implementasi, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Komunikasi berasal dari bahasa Latin "Communis" yang berarti sama (common), maksudnya penyampaian gagasan / idea dengan menetapkan terlebih dahulu titik temu yang sama. Flippo dalam Gibson (2000) membuat definisi komunikasi sebagai suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu idea dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara atau penulis. Komunikasi mempunyai lingkup yang luas dan komprehensif.

Komunikasi dipandang sebagai suatu proses yang dinamis. Menurut Robbins (2006), komunikasi di dalam organisasi sering digambarkan sebagai komunikasi formal. Komunikasi formal mengacu pada komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi (struktur organisasi). Arah komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi ke bawah (komunikasi yang mengalir ke bawah dari manajer ke para karyawan), komunikasi ke atas (komunikasi yang mengalir ke atas dari karyawan ke manajer), komunikasi lateral (komunikasi yang terjadi diantara sesama karyawan ke manajer), komunikasi diagonal (komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi).

8. Penelitian Terdahulu

Penelitian Aldiani (2009) menganalisis faktor – faktor pendukung keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 pada pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hasil menunjukkan Sumber Daya Manusia (SDM), komitmen, dan perangkat pendukung mampu menjelaskan keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 2005 pada pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu sebesar 36,5 % dan sisanya sebesar 63,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Secara parsial variabel komitmen mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 , sedangkan SDM dan perangkat pendukung mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 di pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu.

Penelitian Ardiansyah (2012) meneliti Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 (studi empiris pada KPPN Malang). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Variabel komunikasi juga ternyata berpengaruh dan signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Penelitian yang dilakukan oleh Faradillah (2013) menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP pada PP No.71 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Makassar diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Penelitian Herlina (2013) ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintahan daerah dalam implementasi PP No.71 Tahun 2010 pada pemerintah kabupaten Nias Selatan. Tiga faktor yang mempengaruhi kesiapan pemda Kabupaten Nias Selatan adalah informasi, perilaku, keterampilan. Ketiga faktor tersebut merupakan ekstraksi dari 5 variabel yang diteliti yaitu komunikasi, kompetensi sdm, struktur birokrasi, komitmen pimpinan, dan resistensi terhadap perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor informasi memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual. Faktor informasi ini meliputi sosialisasi tentang sistem akuntansi basis akrual. Responden mengetahui sistem akuntansi basis akrual dari peneliti. Mereka mengharapkan adanya pelatihan SDM dan mengadakan perangkat lunak (*IT based system*). Sehingga kompetensi SDM, struktur birokrasi, dan komunikasi berpengaruh positif terhadap faktor kesiapan pemerintah dalam implementasi. Faktor selanjutnya adalah perilaku. Perilaku memiliki loading factor tinggi, artinya perilaku memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemda dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual. Hal ini berarti resistensi terhadap perubahan dalam penerapan sistem akuntansi basis akrual berpengaruh signifikan. Hal ini ditunjukkan dari keengganan pegawai bagian keuangan untuk menyesuaikan diri dan kompetensinya dengan tuntutan perubahan sistem tersebut. Faktor

terakhir adalah faktor keterampilan. Faktor keterampilan juga memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual.

Penelitian Indah (2008) menganalisis pengaruh sumber daya manusia dan teknologi informasinya terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 2005. Teknologi informasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 2005.

Kusuma (2013) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I. Penelitian ini mendapat hasil bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. Namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan, dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

Penelitian Romilia (2011) menyatakan perangkat pendukung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 2005. Kabupaten Bangkalan memiliki perangkat pendukung yang sudah berjalan dengan baik. Komunikasi memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 di Kabupaten Bangkalan. Anggota SKPD merasa lebih nyaman mengerjakan tugasnya sendiri daripada mengkomunikasikannya dengan orang lain. Regulasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 2005. Pegawai SKPD di Kabupaten Bangkalan tidak merasa terbebani dengan regulasi, karena mereka mau mempelajari dan memahami setiap peraturan baru yang keluar. Komitmen juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. Komitmen pegawai dalam penelitian ini belum cukup kuat untuk menerapkan PP No.24 Tahun 2005. Dalam penelitian ini, SDM juga tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pegawai SKPD yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA dan tidak memiliki pengetahuan tentang akuntansi.

Penelitian Adventana (2014) menunjukkan bahwa SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Variabel SDM dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan, tetapi teknologi informasi dan komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hasil penelitian ini juga mengemukakan

bahwa variabel independen mampu mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual hanya sebesar 23,20%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh antara sumber daya manusia dengan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Nazier (2009) mengungkapkan tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih sangat rendah. Tingkat pemahaman dasar meliputi lingkup keuangan negara, bentuk pertanggung jawaban keuangan negara, standar akuntansi yang digunakan, dan subtansi standar akuntansi pemerintahan. Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani dalam Kusuma,2013).

SDM memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini didukung oleh Krumwiede dalam Kusuma (2013) menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi. Demikian pula menurut Brusca dalam Kusuma (2013) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrual membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan.

Kusuma (2013) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Temuan empiris dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan Indah (2008), Aldiani (2010), Ardiansyah (2012), Faradillah (2013), dan Herlina (2013) menunjukkan bahwa SDM memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual. Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga bahwa:

H1 : SumberDayaManusia akan berpengaruh secara positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Pengaruh antara komitmen organisasi dengan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu agar dapat meenunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi (Aldiani,2010). Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilan.

Bekerja dengan maksimal dalam hal ini antara lain bekerja keras, ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya, senang dan peduli terhadap organisasi tempatnya bekerja. Jika pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi pemerintahan akan tercapai dengan sumbangsih mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan menyebabkan peningkatan kinerja.

Komitmen organisasi berpengaruh pada keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 pada pemerintahan Kabupaten Labuan Batu menurut penelitian Aldiani (2010). Sedangkan menurut penelitian Ardiansyah (2012) Komitmen Organisasional tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini karena menurutnya, komitmen organisasi akan mempunyai pengaruh pada saat penerapan SAP akrual yang akan diterapkan pada tahun 2015.

Sedangkan saat menjelang penerapan SAP berbasis akrual tersebut, komitmen organisasi tidak berpengaruh. Berdasarkan kedua penelitian yang tidak mempunyai hasil yang sama tersebut, maka penulis akan menduga hipotesa sebagai berikut :

H2 : Komitmen Organisasi akan berpengaruh secara positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Pengaruh antara teknologi informasi dengan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Krumwiede dalam Kusuma (2013) menunjukkan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah.

Penelitian sebelumnya oleh Kusuma (2013) yang memperlihatkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas teknologi informasi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aldiani (2010) dan Romilia (2011) bahwa perangkat pendukung mampu menjelaskan keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005.

Studi ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan diminta untuk memfasilitasi dan mendukung pengenalan akuntansi akrual di sektor publik. Akibatnya, kualitas tinggi yang ada di dalam sistem informasi organisasi harus dipertimbangkan sebagai prasyarat penting dari keberhasilan pelaksanaan (Ouda, dalam Kusuma, 2013). Argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut :

H3 : Teknologi informasi akan berpengaruh secara positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Pengaruh antara komunikasi dengan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Menurut Edwar dalam Herlina (2013) komunikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardiansyah (2012) bahwa komunikasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini sama diungkapkan oleh Romilia (2011) yang menghasilkan hipotesis yang sama untuk penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah :

H4 : Komunikasi akan berpengaruh secara positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Explanatory Research* , yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis (Sugiyono 2009). Pengujian hipotesis ini akan memperkuat teori atau bahkan menolak teori yang sudah pernah dilakukan sebuah pengujian.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan metode pengambilan sampel dimana sampel di ambil secara acak sesuai keinginan peneliti (Sugiyono 2009). Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan atau bagian akuntansi seluruh dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang berjumlah 62 responden.

2. Penyajian Data

Instrumen penelitian ini di ukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin. Instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel berjumlah 33 pertanyaan. Data yang akan di analisis sebelumnya harus memenuhi Uji *Validitas* dan Uji *Reliabilitas*. Uji *Validitas* yang bertujuan untuk menguji tingkat kevalidan setiap instrumen penelitian melalui pertanyaan atau pernyataan yang disajikan dalam kuesioner (Ghozali, 2007). Menurut Ghozali (2007) suatu kuisisioner dikatakan *valid* apabila hasil dari korelasi tersebut mempunyai tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (5%). Uji *Reliabilitas* bertujuan untuk menguji kehandalan dari instrument penelitian (Ghozali, 2007). Menurut (Ghozali, 2007) kuesioner dikatakan *Reliabel* jika koefisien *Cronbach's Alpha* sama dengan atau lebih dari 0,6.

Uji Asumsi Klasik juga dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *Normalitas*, Uji *Heteroskedastisitas*, dan Uji *Multikolonieritas*. Uji *Normalitas* yaitu uji yang digunakan

untuk mengukur data yang didapat apakah sudah terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2007). Selain itu juga menggunakan Uji *Multikolonieritas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Gozali, 2007). Uji *Heteroskedastisitas* digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2007).

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : kesiapan penerapan SAP berbasis aktual
X₁ : sumber daya manusia
X₂ : komitmen organisasi
X₃ : teknologi informasi
X₄ : tata cara komunikasi
 β : Koefisien Regresi
e : error

Menurut Ghozali (2007), Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan $\alpha=5\%$. Kaidah pengambilan keputusan adalah : Jika nilai probabilitas (sig.) $< \alpha=5\%$ maka hipotesis alternatif didukung. Jika nilai probabilitas (sig.) $> \alpha=5\%$ maka hipotesis alternatif tidak didukung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji *validitas* dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item – item pertanyaan dengan skor total (*Pearson Correlation*). Masing – masing item pertanyaan harus berkorelasi positif terhadap skor total pada tingkat signifikansi 5%. Hasil dari pengujian menunjukkan nilai koefisien korelasi antar item – item pertanyaan, secara statistik, signifikan pada tingkat 5% yaitu 0,00 dimana kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan instrumen tersebut dinyatakan valid. Hasil ini terlampir pada tabel 1.

Uji *reliabilitas* dimaksudkan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Uji ini dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Berdasarkan tabel 1, nilai

Cronbach Alpha diketahui lebih besar dari 0,5 yaitu komitmen organisasi dan tata cara komunikasi Hal ini berarti instrumen penelitian dinyatakan reliabel, tetapi untuk instrumen sumber daya manusia dan teknologi informasi diketahui kurang dari 0,5 selain itu dapat berarti konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan dapat dipercaya sebesar nilai *Cronbach Alpha* tersebut.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji *Multikolonieritas*

Hasil pengujian *Multikolonieritas* pada tabel 2, untuk VIF dan Tolerance mengindikasikan bahwa tidak terdapat *multikolonieritas* yang serius. Nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan Nilai Tolerance tidak ada yang kurang dari 0.10 (Ghozali, 2007). Hal ini juga ditegaskan kembali dari hasil korelasi antar variabel independen tidak ada korelasi yang cukup serius pada tabel 2.

Uji *Heteroskedastisitas*

Salah satu cara untuk menguji ada tidaknya *heteroskedastisitas* adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED*, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Ghozali, 2007). Dari grafik *scatterplots* yang terdapat pada gambar 2 terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak (random) baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi.

Uji *Normalitas*

Salah satu cara untuk mengetahui *normalitas* data adalah dengan menggunakan *Normal Probability Plots*. Pada grafik *Normal Probability Plots* pada gambar 3 tampak bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

3. Pengujian Hipotesis

Uji *Determinasi*

Uji *Determinasi* dilakukan untuk menguji *Goodness-Fit* dari model regresi. Besarnya nilai R^2 sebesar 0.610 (terlampir pada tabel 3) yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 61,0% sedangkan sisanya 39,0% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Uji *Pengaruh Simultan (F Test)*

Uji pengaruh simultan (*F test*) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama – sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dapat dilihat pada nilai *F test* pada tabel 4, yaitu sebesar 24.870 dan signifikan pada 0.000 yang berarti variabel

independen Sumber daya manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Tata cara komunikasi Menggunakan secara simultan mempengaruhi variabel Kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Uji Parsial (*t test*)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji *t test* yang terlampir pada tabel 5, empat variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi, dua signifikan karena tidak melebihi 0,05. Dan ada yang melebihi 0,05, Teknologi informasi dan tata cara komunikasi tidak signifikan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi, tata cara komunikasi dengan persamaan matematis :

$$Y = 5,951 + 0.390 X1 + 0,140 X2 + 0.089 X3 + 0.056 X4$$

Konstanta sebesar 5.951 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka *y* sebesar 5.951 Koefisien regresi *x1* sebesar 0.390 menyatakan bahwa setiap *x1* naik akan meningkatkan *y* sebesar 390. Koefisien regresi *x2* sebesar 0,140 menyatakan bahwa setiap *x2* naik akan meningkatkan *y* sebesar 140 Koefisien regresi *x3* sebesar 0.089 menyatakan bahwa *x3* meningkat sebesar 089, koefisien regresi *x4* sebesar 0.056 menyatakan bahwa setiap *x4* naik akan meningkat *y* sebesar 056.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil statistik di atas dapat dikatakan bahwa SDM memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini didukung oleh Krumwiede dalam Kusuma (2013) menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi. Demikian pula menurut Brusca dalam Kusuma (2013) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrual membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan. Penelitian yang dilakukan di kabupaten kudos sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual yang dilakukan di kabupaten kudos. Penelitian sejalan dengan yang dilakukan Indah (2008), Aldiani (2010), Ardiansyah (2012), Faradillah (2013), dan Herlina (2013) menunjukkan bahwa SDM memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual.

Komitmen organisasi berpengaruh pada keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 pada pemerintahan Kabupaten Labuan Batu menurut penelitian Aldiani (2010). Sedangkan menurut penelitian Ardiansyah (2012) Komitmen Organisasional tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini karena menurutnya, komitmen organisasi akan

mempunyai pengaruh pada saat penerapan SAP akrual yang akan diterapkan pada tahun 2015. Penelitian yang terjadi di kabupaten Kudus terkait komitmen organisasi sejalan dengan penelitian sebelumnya dan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Teknologi informasi memfasilitasi dan mendukung pengenalan akuntansi akrual di sektor publik. Kualitas tinggi yang ada di dalam sistem informasi organisasi harus dipertimbangkan sebagai prasyarat penting dari keberhasilan pelaksanaan (Ouda, dalam Kusuma, 2013). Menurut Edwar dalam Herlina (2013) komunikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan, kedua variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual yang dilakukan di kabupaten Kudus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini:

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian di atas sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual
2. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual
3. Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual
4. Tata Cara komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Menambah variabel independen yang lain misal kemampuan pengguna, sistem informasi.
2. Menambah populasi dalam penelitian misal di Kota besar.

DAFTAR PUSTAKA

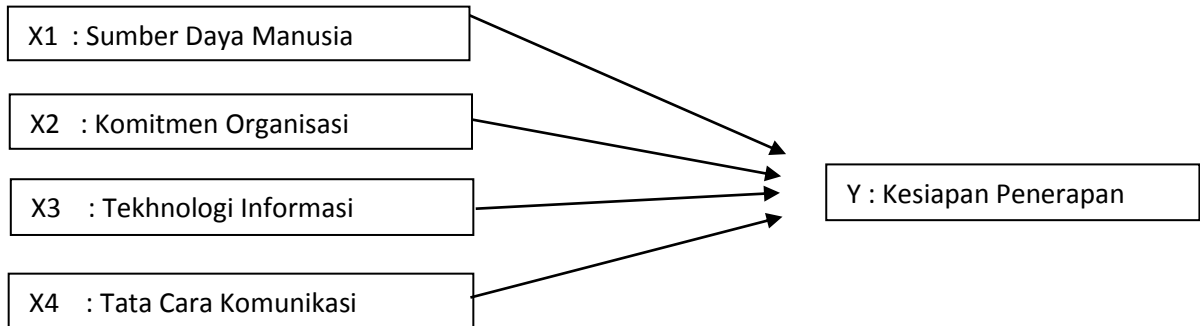
- Adventana (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY Dalam Implementasi Sap Berbasis Akrual Menurut Pp No. 71 Tahun 2010*. Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta
- Aldiani, Sulani. (2009). Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 pada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. *Simposium Nasional XII*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

- Ardiansyah (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (studi pada unit kerja KPPN Malang)*. Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi II. PT Indeks, Jakarta.
- Faradillah, Andi (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gibson et al., (2000). *ORGANIZATION : Behavior, Structure, Processes, 10th edition*. McGraw-Hill Companies, Inc, New York.
- Hariyanto, Agus. (2012). *Penggunaan Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. STIE Dharma Putra, Semarang.
- Herlina, Hetti (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi Pp 71 Tahun 2010 (Studi Empiris : Kabupaten Nias Selatan)*. Skripsi, Universitas Negeri Padang. Padang
- Indah.(2008). *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Teknologi informasinya terhadap Keberhasilan Penerapan PP No.24 tahun 2005*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Indriasari, Desi (2008). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir)*. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.
- Kusuma, Muhamad Indra Yudha (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI Pada Pemerintah*. Skripsi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2012). *Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kudus.go.id
- Nazier, Daeng.(22 Juli 2009). *Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan*. Seminar Nasional. www.bpk.go.id
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Undang – Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putri.(2012). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan pada Pemda Kab.Bengkalis*. Skripsi.Univeristas Sriwijaya, Bengkulu.
- Robbins, StephenP. (2006) .*Perilaku Organisasi, Edisi ke-10*. PT. Indeks, Jakarta.
- Romilia, Riana. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Kabupaten Bangkalan*.Skripsi. STIE Perbanas,Surabaya.
- Suhardjanto dan Yulianingtyas.(2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV.Afabeta: Bandung.
- Sukmaningrum.(2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tanjung, Abdul Hafis. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit: Alfabeta, Bandung
- Tempo Interaktif.(14 Desember 2010).Pemerintah terapkan standar akuntansi baru.
www.tempo.com

LAMPIRAN

Gambar 1
Hipotesa Penelitian



Tabel 1
Uji Validitas dan Reliabilitas

	<i>Cronbachs Alpha</i>	<i>Sig</i>
Sumber Daya Manusia	<i>0,297</i>	<i>0,00</i>
Komitmen Organisasi	<i>0,603</i>	<i>0,00</i>
Tekhnologi Informasi	<i>0,309</i>	<i>0,00</i>
Tata Cara Komunikasi	<i>0,581</i>	<i>0.00</i>

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Ouput SPSS, 2016

Tabel 2
Uji Multikolonieritas

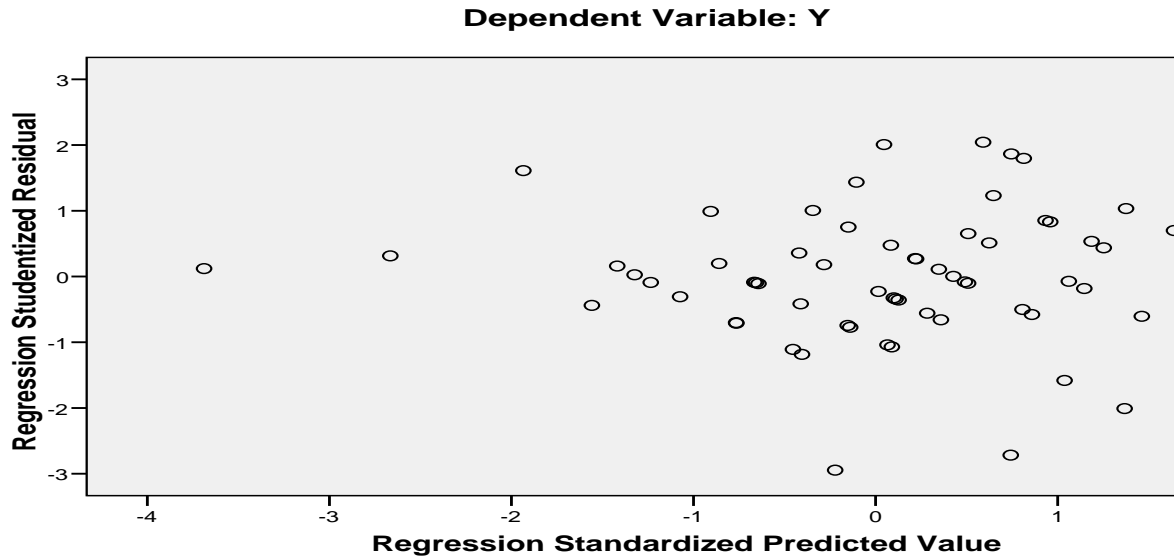
	Tolerance	VIF
Sumber Daya Manusia	0,708	1,413
Komitmen Organisasi	0,965	1,036
Tekhnologi Informasi	0,713	1,402
Tata Cara Komunikasi	0,943	1,061

Variable dependant : Kesiapan

Sumber: Ouput SPSS, 2016

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas

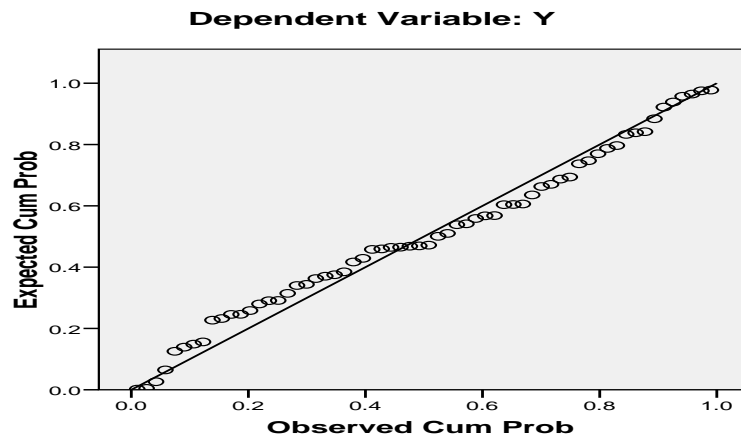
Scatterplot



Sumber Output SPSS 2016

Gambar 3
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber Ouput : SPSS, 2016

Tabel 3
Uji Diterminasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,797(a)	,636	,610	1,35634

- a. Predictors: (Constant), Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Tata cara komunikasi
- b. Dependent Variable: Kesiapan Penerapan SAP berbasis acrual
- c. Sumber: Ouput SPSS, 2016

Tabel 4
Uji F Test
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	183,010	4	45,752	24,870	,000(a)
	Residual	104,861	57	1,840		
	Total	287,871	61			

- a. Predictors: (Constant), Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, Tata cara komunikasi
- b. Dependent Variable: Kesiapan Penerapan SAP berbasis acrual
- c. Sumber: Ouput SPSS, 2016

Tabel 5
Uji t Test
Coefficients(a)

Mode		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			B	Std. Error
1	Constant)	5,951	2,355		2,527	,014		
	x1	,390	,058	,635	6,683	,000	,708	1,413
	x2	,140	,068	,168	2,063	,044	,965	1,036

x3	,089	,050	,168	1,774	,081	,713	1,402
x4	,056	,061	,075	,916	,363	,943	1,061

a Dependent Variable: Kesiapan Penerapan SAP berbasis Acrua